



Tumbuh Berkelanjutan di Masa Pandemi

LAPORAN TAHUNAN 2020

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Tumbuh Berkelanjutan di Masa Pandemi

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dilalui penuh perjuangan yang memaksa kita melakukan adaptasi terhadap "The New Normal". PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertekad memperkuat inovasi/integritas membangun bisnis yang berkualitas dengan mencanangkan fokus dan inisiatif strategi yang menjadi acuan dalam memulihkan dan memacu bisnis Perseroan ke depan. Bagi Perseroan, pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerjanya dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. juga memperkuat kolaborasi sinergi dengan mitra bisnis. Hal ini memacu penyaluran kredit, meningkatkan dana pihak ketiga dan pendapatan non bunga sekaligus meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah lewat berbagai inovasi *digital* yaitu BTN *mobile banking*, Portal BTN properti, Portal rumah murah BTN, BTN solusi dan program Batara Spekta.

Di tengah masa pandemi COVID-19, perbaikan *business process* Perseroan mampu membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Laba Perseroan melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan mencapai 655,71% dibandingkan posisi tahun lalu. Sementara dana pihak ketiga juga melambung lebih dari 23,78% dibandingkan tahun lalu. Pencapaian kinerja keuangan tersebut menjadi bukti nyata di tengah pandemi, para pegawai tetap dapat bekerja dan berkarya bagi Perseroan.



LAPORAN
TAHUNAN **2020**

Kesinambungan Tema —



2019 —

RUMAH UNTUK KELUARGA MILENIAL INDONESIA

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa merupakan modal yang besar bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dengan bonus demografi yang memprediksikan lebih kurang 20% diantaranya berusia 20-44 tahun, Indonesia menjadi negara dengan modal aset yang sangat potensial: penduduk dengan usia produktif yang besar.

Sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, Bank BTN mencoba menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para “Milenial”, sebutan bagi generasi produktif Indonesia.

Fokus Bank BTN untuk menjadi bank tabungan di sektor pembiayaan perumahan akan menjadi agenda prioritas ke depan. Dengan potensi pasar para Milenial yang cukup besar, Bank BTN berharap mampu menjadi mitra dalam ekosistem industri perumahan dan properti, sekaligus terus-menerus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

2018

MEMPERSIAPKAN EKOSISTEM *DIGITAL* MELALUI TRANSFORMASI UNTUK Mendukung BISNIS Yang BERKELANJUTAN

Di tengah kondisi bisnis perbankan yang penuh tantangan, Perseroan mampu memantapkan kinerjanya dibuktikan dengan keberhasilan dalam meningkatkan posisinya yang cukup kompetitif di industri perbankan dan sektor perumahan nasional, khususnya pada realisasi Program Sejuta Rumah. Keberhasilan kinerja tersebut, tidak terlepas dari proses transformasi *Digital Banking* yang secara konsisten diterapkan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan industri perbankan yang semakin kompleks. Menyadari tantangan ke depan, Perseroan telah mengambil langkah penting untuk memperkuat fundamental keuangan khususnya dalam mempersiapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang semakin dekat. Untuk itu, di tahun 2018 Perseroan telah memperkuat tata kelola proses bisnis yang lebih *prudent* dan meningkatkan penambahan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai upaya untuk meningkatkan rasio *coverage*. Bagi Perseroan, transformasi *Digital Banking* dengan upaya memperkuat fundamental keuangan merupakan keharusan untuk mengelola tantangan bisnis perbankan kedepannya, guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan Perseroan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

2017

TRANSFORMASI BERBASIS *DIGITAL BANKING* UNTUK Mendukung PENGUATAN DAN PERLUASAN BISNIS PERUMAHAN

Transformasi Perseroan berbasis *digital* menjadi prioritas Perseroan di tahun 2017. Sebab dominasi *digital* pada aspek bisnis di segala sektor dan lini sudah kian nyata. Pemahaman Perseroan terhadap generasi milenial serta pengembangan SDM generasi milenial menjadi perhatian manajemen Perseroan untuk mengantisipasi persaingan khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kehandalan bersaing di *market* saat ini. Perseroan akan terus mengembangkan penggunaan teknologi *digital* terkini yang khusus maupun bersifat umum untuk mendukung layanan dan jaringannya.

2016

MENGKOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN, Mendukung AKSELERASI PROGRAM SEJUTA RUMAH

Di tahun 2016 Perseroan mampu mencatatkan keberhasilan dalam kinerja, menerapkan praktik tata kelola perusahaan secara baik, dan meraih citra positif di mata publik. Keberhasilan dicapai berkat konsistensi Perseroan dalam menjalankan bisnis berdasarkan kaidah industri dan niaga yang sehat, memiliki sumber daya yang mampu menghasilkan *value creation*, *comply* dengan peraturan dan memiliki arah serta strategi yang jelas.

Daftar Isi

- 3 Tema dan Arti Tema
- 4 Kesenambungan Tema
- 6 Daftar Isi

Kilas Kinerja

- 12 14 Pencapaian Kinerja Penting 2020
- 16 16 Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 16 Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
- 23 Ikhtisar Operasional
- 23 Informasi Harga Saham
- 26 Aksi Korporasi
- 26 Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

- 9 Sekilas Tentang Perseroan
- 10 Jejak Langkah

- 27 Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
- 28 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
- 28 *Rating* Perusahaan 2020
- 29 Laporan Analisis Perusahaan
- 30 Peristiwa Penting

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

- 40 Laporan Dewan Komisaris
- 46 Laporan Direksi
- 58 Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

Profil Perusahaan

- 60 62 Identitas Perusahaan
- 64 64 *Brand* Perusahaan
- 65 65 Riwayat Singkat Perusahaan
- 66 66 Keterangan Perubahan Nama
- 67 67 Bidang Usaha
- 67 67 Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
- 68 68 Produk dan Jasa
- 78 78 Peta Wilayah Usaha
- 80 80 Struktur Organisasi
- 82 82 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
- 82 82 Visi
- 83 83 Misi
- 82 82 *Review* Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi
- 85 85 Budaya Perusahaan
- 85 85 Profil Dewan Komisaris
- 91 91 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 94 94 Profil Direksi
- 102 102 Profil Pejabat Satu Level di bawah Direksi
- 103 103 Profil Pejabat Eksekutif
- 117 117 Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
- 117 117 Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi
- 117 117 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 118 118 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
- 119 119 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
- 119 119 Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
- 120 120 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- 121 121 Pengembangan Kompetensi Pegawai
- 121 121 Kebijakan
- 121 121 Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
- 126 126 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
- 126 126 Biaya Pengembangan Kompetensi
- 127 127 Komposisi Pemegang Saham
- 128 128 Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
- 128 128 Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih
- 129 129 Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5%
- 129 129 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
- 130 130 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
- 130 130 Struktur Grup Perusahaan
- 131 131 Kronologi Penerbitan Saham
- 132 132 Kronologi Penerbitan Obligasi dan/atau Pencatatan Obligasi Serta Efek Lainnya
- 139 139 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
- 142 142 Penghargaan dan Sertifikasi
- 146 146 Nama dan Alamat Entitas Anak, Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan
- 155 155 Jaringan Mitra Usaha
- 155 155 Informasi Pada Website Perseroan
- 156 156 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

160

Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perseroan

162	Tinjauan Perekonomian	280	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang/Modal
162	Analisis Perekonomian Global	281	Komitmen dan Kontinjensi
162	Analisis Perekonomian Indonesia	281	Perjanjian dan Perikatan
164	Analisis Industri Perbankan	282	Pencapaian Target dan Target Ke Depan
164	Tinjauan Industri Perumahan	290	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
166	Analisis Posisi Perseroan dalam Industri Perbankan	290	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
168	Tinjauan Operasional	291	Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
168	Strategi Perseroan	291	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
180	Aspek Pemasaran	292	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
180	Strategi Pemasaran Tahun 2020	299	Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Perseroan
184	Pangsa Pasar	302	Suku Bunga Dasar Kredit
186	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha	302	Kualitas Aset Produktif
187	Segmen Konvensional	305	Aspek Perpajakan
204	Segmen Syariah	305	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Perseroan
212	Prospek Usaha dan Strategi ke Depan	306	Perubahan Kebijakan Akuntansi
218	Tinjauan Keuangan	308	Tingkat Kesehatan Perseroan
218	Kinerja Keuangan	309	Informasi Kelangsungan Usaha
218	Laporan Posisi Keuangan	311	Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter
227	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	311	Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha
230	Laporan Arus Kas	312	Transaksi Derivatif
232	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang		
235	Akselerasi Pertumbuhan <i>Fee Based income</i>		
236	Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko		
280	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal		
280	Investasi Barang Modal		

314

Human Capital

317	Kerangka Strategi <i>Human Capital</i>	323	Pengembangan Organisasi
317	Profil Direktorat Human Capital	323	Manajemen <i>Human Capital</i>
321	Strategi <i>Human Capital</i>	328	Internalisasi Budaya

332

Teknologi Informasi

334	Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi
336	Profil Direktorat Teknologi Informasi
337	Manajemen Teknologi Informasi
341	Strategi Teknologi Informasi ke Depan

342

Tata Kelola Perusahaan

- 345 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 346 Tujuan Penerapan Prinsip GCG
- 347 Penerapan Prinsip GCG di Lingkup Bank BTN
- 348 Komitmen Penerapan Bank BTN
- 349 Implementasi GCG yang Berkelanjutan di Lingkup Bank BTN
- 354 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
- 354 Struktur Organ Perusahaan
- 355 *Governance Soft Structure*
- 355 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
- 355 Pemegang Saham
- 357 Rapat Umum Pemegang Saham
- 371 Dewan Komisaris
- 395 Dewan Pengawas Syariah
- 403 Direksi
- 462 Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
- 491 Organ dan Komite di Bawah Direksi
- 526 Tata Kelola Remunerasi dan Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 535 Akuntan Publik
- 538 Manajemen Risiko
- 553 Sistem Pengendalian Internal
- 557 Fungsi Kepatuhan
- 566 Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- 568 Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
- 568 Perkara Penting
- 569 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 579 Program Anti Korupsi
- 580 Kode Etik
- 583 Kebijakan Gratifikasi
- 586 *Whistleblowing System*
- 593 Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
- 595 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- 595 Tata Kelola Unit Usaha Syariah
- 601 *Buyback* Saham dan *Buyback* Obligasi
- 601 Rencana Strategis Bank
- 602 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
- 602 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 603 Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian
- 604 Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)
- 604 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- 605 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- 610 *Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*
- 612 *Good Corporate Governance Assessment*
- 625 Praktik *Bad Corporate Governance*

626

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- 628 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
- 643 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia
- 645 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
- 648 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
- 655 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
- 661 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen
- 663 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

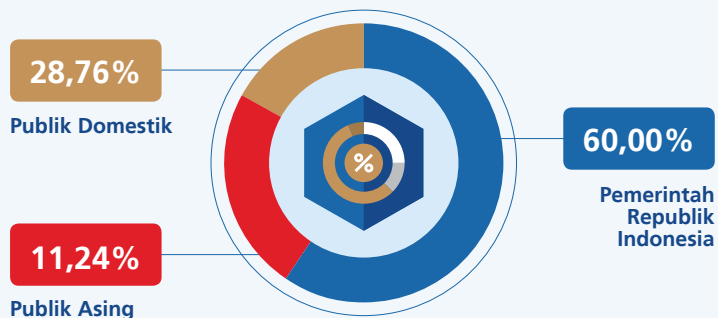
668

Indeks Referensi OJK

Laporan Keuangan

Sekilas Tentang Perseroan

KEPEMILIKAN



TOTAL ASET

sebesar
Rp361,21
triliun



BIDANG USAHA
Bank Umum

Bank  **BTN**



PRODUK DAN JASA



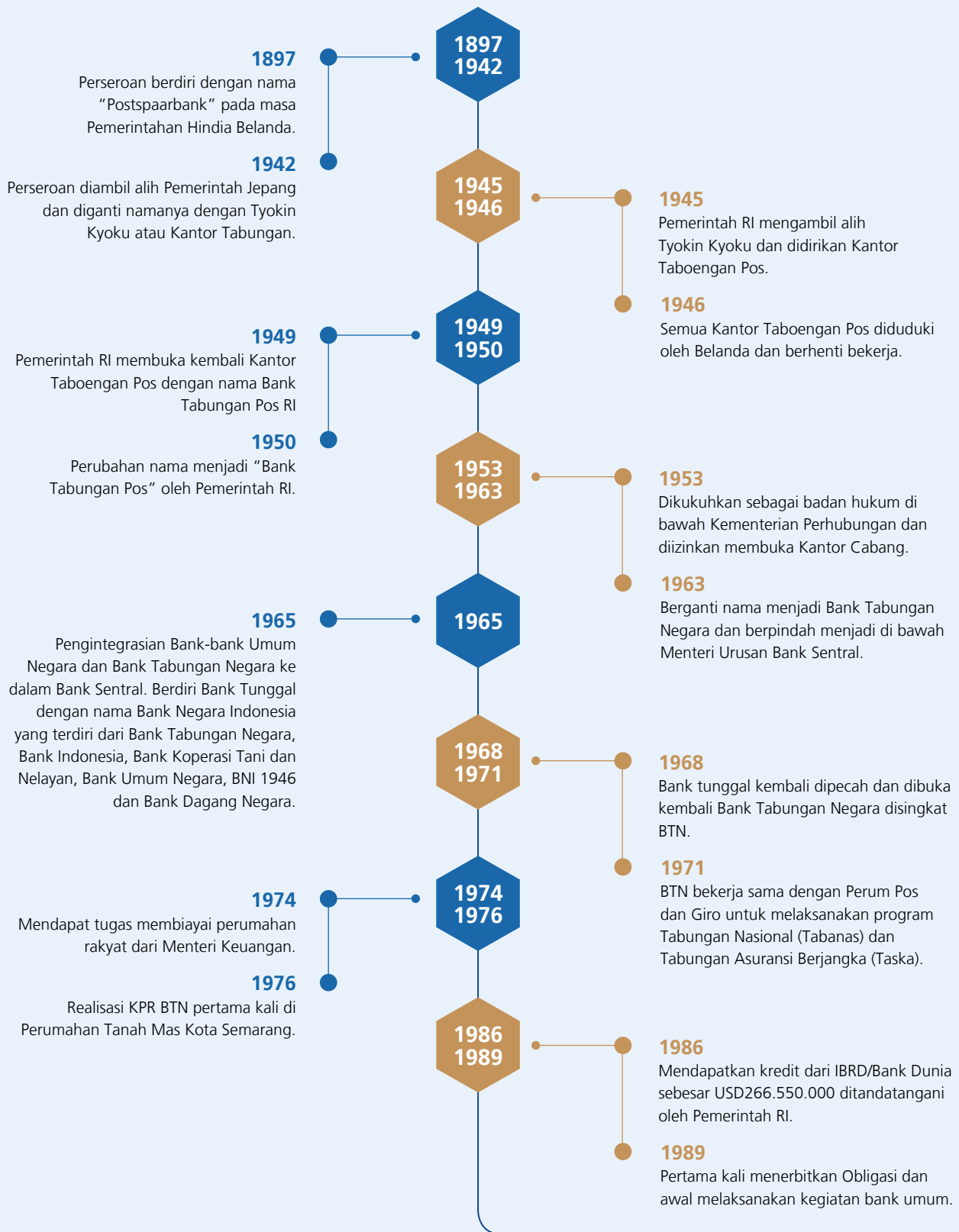
Perbankan
Konvensional

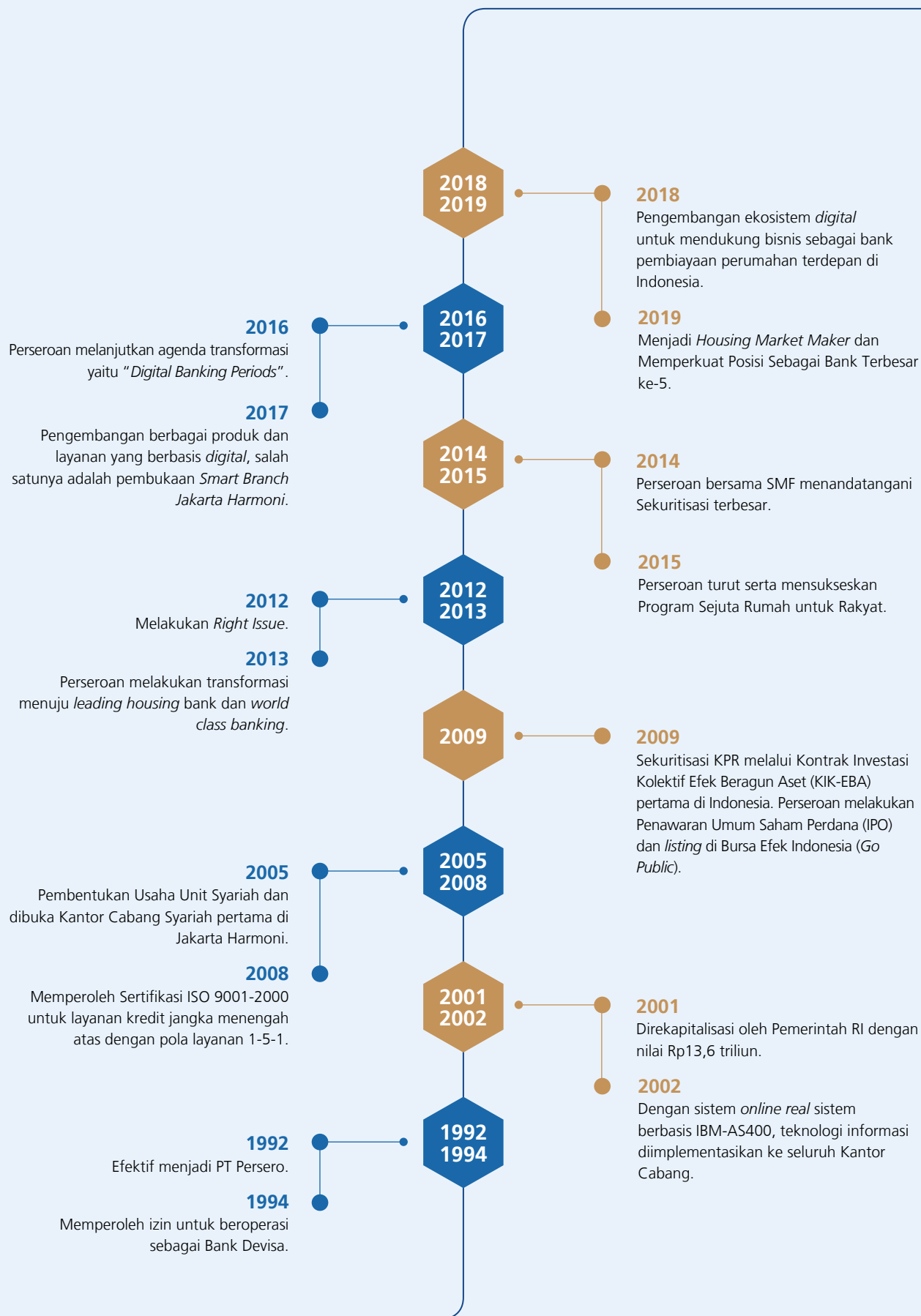


Perbankan Syariah/
Unit Usaha Syariah



Jejak Langkah





Kilas Kinerja





Pencapaian Kinerja Penting 2020



KINERJA SEGMENT
PERBANKAN KONSUMER

↑ **11,03 %**



KINERJA SIMPANAN
SEGMENT SYARIAH

↑ **9,01 %**



KINERJA SEGMENT
PERBANKAN KOMERSIAL

↑ **88,97 %**



KINERJA PEMBIAYAAN
SEGMENT SYARIAH

↑ **6,14 %**



TOTAL ASET

↑ **15,85 %**



LABA TAHUN BERJALAN

↑ **665,71 %**



Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dilalui penuh perjuangan yang memaksa kita melakukan adaptasi terhadap "The New Normal". PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertekad memperkuat inovasi/integritas membangun bisnis yang berkualitas dengan mencanangkan 5 (lima) fokus dan 8 (delapan) inisiatif yang menjadi acuan dalam memulihkan dan memacu bisnis Perseroan ke depan.

Tantangan terjadi pada kuartal kedua, ketika pandemi COVID-19 melanda. Satu persatu sektor ekonomi mulai merasakan dampaknya, termasuk perbankan. Namun, bagi Perseroan, pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerjanya dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi. Strategi tersebut antara lain:

- Melakukan transformasi operasional cabang dan mengembangkan KPR Non Subsidi.

- Mengembangkan *value chain* diantaranya dengan mengembangkan kemitraan dengan para *developer* maupun mitra lainnya dalam lingkup ekosistem perumahan.
- Mengembangkan *partnership* misalnya membentuk perusahaan modal ventura, membentuk anak usaha baru untuk menangkap peluang yang ada meraih *fee based income*.
- Percepatan penyelesaian kredit macet.

Selain itu, Perseroan juga memperkuat kolaborasi sinergi dengan mitra bisnis. Hal ini memacu penyaluran kredit, meningkatkan dana pihak ketiga dan pendapatan non bunga sekaligus meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah lewat berbagai inovasi *digital* yaitu *BTN Mobile Banking*, Portal *BTN Properti*, Portal *Rumah Murah BTN*, *BTN Solusi* dan Program *Batara Spekta*.

Di tengah masa pandemi COVID-19, Perbaikan *business process* Perseroan mampu membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Keuangan Perseroan 2020

Indikator	2020	2019	Growth Year on Year
Aset	Rp361,21 Triliun	Rp311,77 Triliun	15,85%
Laba	Rp1,60 Triliun	Rp209 Miliar	655,71%
Dana Pihak Ketiga	Rp278,99 Triliun	Rp225,40 Triliun	23,78%
Kredit	Rp260,11 Triliun	Rp255,83 Triliun	1,68%
LDR	93,19%	113,50%	
NPL	4,37%	4,78%	

Laba Perseroan melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan mencapai 655,71% dibandingkan posisi tahun lalu. Sementara dana pihak ketiga juga melambung lebih dari 23,78% dibandingkan tahun lalu. Pencapaian kinerja keuangan tersebut menjadi bukti nyata di tengah pandemi para pegawai tetap dapat bekerja dan berkarya bagi Perseroan.

Perseroan sebagai BUMN tidak hanya fokus dalam mencapai kinerja keuangan prima, namun juga diberi kepercayaan untuk andil dalam pemulihan ekonomi nasional yang diterpa pandemi. Amanah tersebut diemban Perseroan dengan sangat baik. Dana pemulihan ekonomi yang dipercayakan Pemerintah sebesar Rp10 triliun dalam dua tahap berhasil disalurkan sebesar lebih dari Rp31,51 triliun dan disambut lebih dari 1,4 juta debitur baik debitur KPR subsidi/non subsidi maupun nasabah lain dari segmen kredit konsumen dan komersial.

Selain mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, Perseroan juga turun sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga kredit umum KPR serta restrukturisasi kredit.

Kerja keras dan ketulusan menjalankan perannya dalam perekonomian mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 di bidang kredit komersial dan pengadaan untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain itu, Perseroan juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain, *Indonesia Best Bank Capital Bond* dalam *The Asset Country Awards 2020*, *Top Brand Award 2020* dengan produk KPR *Gaesss For Millenial*, predikat *Bankers of The Year 2020* bagi Direktur Utama Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta *CNBC Indonesia Award: The Most Inspiring Banks* untuk kategori “*The Best Bank In Mortgage Market*” karena mencatatkan prestasi mempertahankan kinerja 2020 positif di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Di tahun 2020, Perseroan mampu melalui tantangan dengan kerja sama yang solid, disiplin kerja dan fokus terhadap pencapaian target dan strategi yang tepat. Hal ini dikarenakan Perseroan berada dalam jalur yang tepat untuk menjalani visi utamanya menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia*. Visi dan misi menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* dapat terwujud dengan strategi yang telah ditetapkan dan diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Ikhtisar

Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
KAS	1.429.426	1.369.167	1.243.615	1.027.554	1.006.682
GIRO PADA BANK INDONESIA	11.107.672	15.512.329	15.417.862	12.554.585	10.697.378
GIRO PADA BANK LAIN					
Pihak ketiga	2.995.233	391.877	718.377	295.378	305.830
Pihak berelasi	221.896	357.624	870.392	262.619	16.958
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.808)	(1.632)	(1.718)	(1.696)	(1.482)
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN					
Pihak ketiga	19.830.096	10.996.115	26.461.116	24.691.186	17.581.082
Pihak berelasi	337	101.078	3.644	6.317	268
EFEK-EFEK					
Pihak ketiga					
Nilai wajar melalui laba rugi	836.662	4.189.398	4.147.137	4.857.775	548.521
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	187.136	1.422.811	637.512	1.430.651	2.371.633
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	99.608	373.379	206.897	243.786	267.175
Pihak berelasi					
Nilai wajar melalui laba rugi	701.925	-	-	-	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	1.247.848	1.206.536	874.112	1.185.742	967.810
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	132.787	919.925	3.000	3.000	31.002
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.000)	(27.378)	(20.173)	(14.923)	(14.441)
OBLIGASI PEMERINTAH					
Nilai wajar melalui laba rugi	19.441.763	1.232.204	2.777.574	497.939	1.130.579
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	33.019.094	6.147.729	3.904.235	4.357.109	5.076.450
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	3.826.894	3.673.668	2.711.329	3.328.925	3.036.610
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI					
Pihak ketiga	954.955	1.675.221	-	-	-
Pihak berelasi	-	200.000	-	-	-
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH					
Kredit yang diberikan					
Pihak ketiga	217.711.277	214.807.263	204.651.014	176.511.761	148.100.848
Pihak berelasi	17.340.839	17.405.276	11.605.291	4.491.022	2.121.112

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.151.936)	(5.425.908)	(2.777.845)	(2.024.561)	(1.724.935)
Pembiayaan/piutang syariah					
Pihak ketiga	25.059.007	23.609.204	22.037.831	17.987.387	14.224.095
Pihak berelasi	3.040	3.416	3.596	411	326
Cadangan kerugian penurunan nilai	(909.007)	(690.258)	(520.287)	(331.426)	(391.099)
TAGIHAN SPOT SUKU BUNGA					
Pihak ketiga	70.386	-	167	-	-
TAGIHAN AKSEPTASI					
Pihak berelasi	196.071	487.052	528.148	8.081	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.393)	-	-	-	-
PENYERTAAN SAHAM					
Pihak ketiga	-	270	270	270	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(270)	(270)	(270)	-
ASET TETAP					
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	8.512.185	8.108.086	7.411.526	6.940.933	6.557.332
Akumulasi penyusutan	(3.054.306)	(2.707.428)	(2.393.832)	(2.103.614)	(1.897.953)
ASET HAK GUNA	360.566	-	-	-	-
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	6.285.574	3.210.772	2.959.502	2.296.440	1.864.829
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	1.972.393	629.105	260.251	174.555	102.791
ASET LAIN-LAIN	3.784.186	2.600.197	2.715.921	2.688.331	2.189.078
TOTAL ASET	361.208.406	311.776.828	306.436.194	261.365.267	214.168.479
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS SEGERA	4.765.276	1.999.183	2.301.930	2.813.874	2.081.886
SIMPANAN DARI NASABAH					
Giro					
Pihak ketiga	16.546.465	9.583.560	17.774.334	9.871.173	8.335.736
Pihak berelasi	52.054.300	38.524.556	35.898.854	40.148.653	34.307.944
Giro Wadiah					
Pihak ketiga	946.930	917.455	1.314.451	956.128	1.577.075
Pihak berelasi	2.138.165	1.675.555	1.467.403	1.793.198	1.625.300
Tabungan					
Pihak ketiga	38.279.792	41.212.905	37.991.758	37.672.125	32.388.545
Pihak berelasi	420.345	272.004	359.081	545.811	388.290
Tabungan Wadiah					
Pihak ketiga	903.998	789.042	765.695	621.268	2.046.975
Pihak berelasi	1.211	847	629	1.133	2.398
Deposito berjangka					
Pihak ketiga	60.918.288	61.281.176	69.989.506	33.155.848	26.310.843
Pihak berelasi	86.940.320	52.648.592	45.472.777	52.326.084	43.226.110
Deposito berjangka Mudharabah					
Pihak ketiga	-	-	-	-	5.637.175
Pihak berelasi	-	-	-	-	4.141.326
Total simpanan dari nasabah	259.149.814	206.905.692	211.034.488	177.091.421	159.987.717
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
Pihak ketiga	29.880	4.509.238	2.992.579	5.063.433	3.152.735
Pihak berelasi	-	-	-	-	500.000

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI					
Pihak ketiga	-	935.000	935.000	1.385.000	1.385.000
LIABILITAS AKSEPTASI					
Pihak berelasi	196.071	487.052	528.148	8.081	-
LIABILITAS SPOT SUKU BUNGA					
Pihak ketiga	22.787	-	152	-	-
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN					
Pihak ketiga	10.835.733	14.405.980	13.719.734	15.109.834	14.919.910
Pihak berelasi	4.974.733	5.377.572	6.925.026	5.370.625	-
PINJAMAN YANG DITERIMA					
Pihak ketiga	6.798.082	8.681.368	7.430.342	2.997.908	2.999.695
Pihak berelasi	17.009.056	13.784.289	8.069.151	4.993.145	1.999.921
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	726.914	630.002	630.134	492.361	382.551
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	6.489	-	-	-	-
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	6.666.875	5.736.637	6.217.814	5.612.462	4.629.410
PINJAMAN SUBORDINASI					
Pihak ketiga	4.194.554	-	-	-	-
Pihak berelasi	5.999.878	5.999.669	2.999.519	2.999.319	2.999.118
TOTAL LIABILITAS	321.376.142	269.451.682	263.784.017	223.937.463	195.037.943
DANA SYIRKAH TEMPORER					
SIMPANAN NASABAH					
Giro <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	341.683	826.682	1.059.570	1.731.342	-
Pihak berelasi	17.003	588.030	534.702	154.636	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	2.683.283	3.226.349	2.675.780	1.905.085	-
Pihak berelasi	430.860	136.577	84.289	201.157	-
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	11.022.780	11.661.400	8.814.203	6.431.893	-
Pihak berelasi	5.345.495	2.038.501	5.625.953	4.958.259	-
Total simpanan nasabah	19.841.104	18.477.539	18.794.497	15.382.372	-
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
Giro <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	176	243	315	2.334	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	2.139	3.299	8.857	1.632	-
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	1.000	7.870	8.060	378.032	-
Total simpanan dari bank lain	3.315	11.412	17.232	381.998	-
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	19.844.419	18.488.951	18.811.729	15.764.370	-
EKUITAS					
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah setelah pajak tangguhan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	1.100.019	11.460	(107.430)	(21.742)	(115.567)
Pengukuran kembali					
Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan	(531.674)	(194.707)	(82.886)	(143.158)	(78.546)
Bagian efektif Lindung Nilai - Arus Kas	(1.239)	-	-	-	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	3.307.991	2.966.991	2.966.991	2.966.991
Saldo laba*					
Telah ditentukan penggunaannya	7.004.198	12.995.995	10.749.657	8.327.684	6.232.559
Belum ditentukan penggunaannya	1.759.096	366.002	2.964.662	3.184.205	2.775.645
TOTAL EKUITAS	19.987.845	23.836.195	23.840.448	21.663.434	19.130.536
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	361.208.406	311.776.828	306.436.194	261.365.267	214.168.479

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil					
Bunga	22.947.252	23.271.432	20.781.512	18.446.732	16.501.472
Bagi hasil dan margin unit syariah	2.158.528	2.448.442	2.070.246	1.644.868	637.347
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.105.780	25.719.874	22.851.758	20.091.600	17.138.819
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus					
Bunga	(14.687.492)	(15.167.294)	(11.627.554)	(9.805.116)	(8.870.675)
Beban pendanaan lainnya	(147.146)	(157.708)	(128.826)	(113.773)	(90.952)
Bonus Simpanan Wadiah	(21.782)	(15.641)	(12.436)	(11.753)	(13.647)
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	(1.335.517)	(1.417.430)	(993.765)	(820.018)	-
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(16.191.937)	(16.758.073)	(12.762.581)	(10.750.660)	(8.975.274)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.913.843	8.961.801	10.089.177	9.340.940	8.163.545
Pendapatan Operasional Lainnya					
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	760.751	832.556	819.837	750.364	591.244
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	275.538	113.399	130.900	138.972	178.427
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	356.168	478.339	437.553	294.486	218.091
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	308.351	144.553	8.586	101.934	54.430
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	18.493	20.894	30.316	8.145	6.443

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	87.011	1.745	11.999	-	3.507
Lain-lain	708.295	518.366	632.403	312.030	230.680
Total Pendapatan Operasional Lainnya	2.514.607	2.109.852	2.071.594	1.605.931	1.282.822
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.258.479)	(3.486.665)	(1.714.427)	(884.401)	(707.531)
Beban Operasional Lainnya	(3.784)				
Umum dan administrasi	(3.103.552)	(3.425.022)	(3.225.353)	(2.952.916)	(2.465.706)
Gaji dan tunjangan karyawan	(2.977.208)	(2.863.955)	(2.876.562)	(2.554.429)	(2.121.653)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	-	-	(1.801)	-
Premi program penjaminan Pemerintah	(469.360)	(467.791)	(401.532)	(346.755)	(285.344)
Lain-lain	(285.782)	(306.447)	(349.097)	(314.666)	(513.901)
Total Beban Operasional Lainnya	(6.835.902)	(7.063.215)	(6.852.544)	(6.170.567)	(5.386.604)
LABA OPERASIONAL	2.330.285	521.773	3.593.800	3.891.903	3.352.232
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(59.428)	(110.711)	16.475	(30.348)	(22.148)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.270.857	411.062	3.610.275	3.861.555	3.330.084
BEBAN PAJAK	(668.499)	(201.799)	(802.352)	(834.089)	(711.179)
LABA TAHUN BERJALAN	1.602.358	209.263	2.807.923	3.027.466	2.618.905
Pendapatan Komprehensif Lain:					
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Revaluasi Aset Tetap	-	341.000	-	-	3.042.739
Pengukuran kembali program imbalan pasti	397.512	(132.869)	80.363	(86.149)	36.797
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	60.545	21.048	(20.091)	21.537	(84.947)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Bagian efektif Lindung Nilai-Arus Kas	(1.239)	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	1.342.481	148.613	(114.250)	125.100	24.164
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(253.922)	(29.723)	28.562	(31.275)	(6.041)
Total laba komprehensif tahun berjalan	2.352.711	557.332	2.782.507	3.056.679	5.631.617
LABA PER SAHAM					
Dasar (nilai penuh)	151	20	265	286	247
LAPORAN ARUS KAS					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan margin	22.025.695	25.453.902	22.179.899	19.605.492	16.822.384
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	331.915	153.997	151.188	160.844	197.916
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(16.095.612)	(16.646.046)	(12.624.698)	(10.641.698)	(8.950.086)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(341.466)	(590.027)	(976.956)	(975.516)	(938.172)
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-	6.710	3.941	-	-
Pembayaran atas surat ketetapan pajak	-	-	-	(477.742)	-

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Beban operasional lainnya - neto	(3.986.344)	(4.845.107)	(5.163.188)	(4.519.265)	(4.051.884)
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	(59.428)	(110.711)	16.475	(30.347)	(22.148)
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.874.760	3.422.718	3.586.661	3.121.768	3.058.010
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:					
Penempatan pada bank lain	(595.305)	(351.800)	-	-	-
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	172.622	2.452.777	740.954	(4.301.109)	(542.078)
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	(18.122.548)	1.547.115	(2.350.369)	703.654	(1.107.805)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(7.255.860)	(18.229.537)	(39.554.295)	(35.209.569)	(26.149.799)
Aset lain-lain	(1.285.447)	300.335	10.680	3.048	(414.285)
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:					
Liabilitas segera	2.446.942	(301.002)	(414.568)	773.805	224.818
Simpanan dari nasabah					
Giro	20.492.649	(5.565.072)	3.653.362	7.376.147	13.491.520
Giro Wadiah	492.085	(188.844)	32.528	486.967	986.092
Tabungan	(2.784.772)	3.134.070	132.903	5.441.102	3.374.101
Tabungan Wadiah	115.320	23.565	143.923	54.609	694.426
Deposito berjangka	33.928.841	(1.532.515)	29.980.351	15.944.980	11.487.713
Deposito berjangka Mudharabah		-	-	-	2.245.195
Simpanan dari bank lain	(4.479.357)	1.516.659	(2.070.854)	1.419.543	1.931.537
Liabilitas lain-lain	177.416	(734.052)	650.935	929.317	504.480
Dana syirkah temporer	1.355.469	(322.778)	3.047.359	3.555.426	-
Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	26.532.815	(14.828.361)	(2.410.430)	299.688	9.783.925
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.061.584	-	36.889	51.388	80.326
Pembelian aset tetap	(798.086)	(366.561)	(526.743)	(396.710)	(285.604)
(Kenaikan) Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.082.203	(718.350)	1.089.818	743.790	(1.880.992)
(Kenaikan) Penurunan obligasi pemerintah yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	(25.844.225)	(2.085.930)	464.873	719.340	61.595
Penerimaan dari obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	-	944.573	14.046	135.785
Pembelian obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(148.619)	(947.963)	(319.917)	(299.246)	(65.252)
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	(1.083.081)	-	-	(20.000)
Pembelian efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	920.267	(1.875.221)	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(23.726.876)	(7.077.106)	1.689.493	832.608	(1.974.142)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.493.811	4.144.000	3.660.000	5.828.447	3.430.667
Pembayaran biaya emisi dari surat-surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	(2.959)
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(5.322.500)	(5.122.930)	(3.520.000)	(201.000)	(1.000.000)
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(935.000)	-	(450.000)	-	(750.091)
Eksekusi opsi saham karyawan	-	-	-	-	8.993
Pembayaran dividen	(20.927)	(561.585)	(605.493)	(523.781)	(370.181)
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	9.141.448	11.001.654	7.550.287	3.993.479	(2.727.112)
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(7.823.008)	(4.020.720)	(36.490)	(1.000.000)	2.999.118
Penerimaan dari pinjaman subordinasi	4.047.884	2.999.950	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	581.708	8.440.369	6.598.304	8.097.145	1.588.435
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	3.387.647	(13.465.098)	5.877.367	9.229.441	9.398.218
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	31.249.908	44.715.006	38.837.639	29.608.198	20.209.980
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	34.637.555	31.249.908	44.715.006	38.837.639	20.209.980
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:					
Kas	1.429.426	1.369.167	1.243.615	1.027.554	1.006.682
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	15.512.329	15.417.862	12.554.585	10.697.378
Giro pada bank lain	3.217.129	749.501	1.588.769	557.997	322.788
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	18.883.328	10.745.393	26.364.760	24.697.503	17.581.350
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	2.873.518	100.000	-	-
Total	34.637.555	31.249.908	44.715.006	38.837.639	29.608.198
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19,34	17,32	18,21	18,87	20,34
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,37	4,78	2,81	2,66	2,84
Non Performing Loan (NPL) Netto	2,06	2,96	1,83	1,66	1,85
Return On Asset (ROA)	0,69	0,13	1,34	1,71	1,76
Return On Equity (ROE)	10,02	1,00	14,89	18,11	18,35
Net Interest Margin (NIM)	3,06	3,32	4,32	4,76	4,98
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	91,61	98,12	85,58	82,06	82,48
Cost to Income Ratio (CIR)	53,85	58,08	-	-	-
Loan to Deposit Ratio (LDR)	93,19	113,50	103,49	103,13	102,66
Persentase Pelanggaran BMPK					
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan BMPK					
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Giro Wajib Minimum (GWM)					
GWM Utama Rupiah					
Konvensional	3,16	6,19	6,61	7,02	6,72
Syariah	3,15	4,64	5,30	5,00	5,08
GWM Valuta Asing	4,63	8,28	8,69	8,38	8,47
Posisi Devisa Netto	3,17	4,14	1,55	1,29	0,29

*Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasireorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Keterangan: Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki Investasi pada Entitas Asosiasi.

Ikhtisar Operasional

(dalam Jutaan Rupiah)

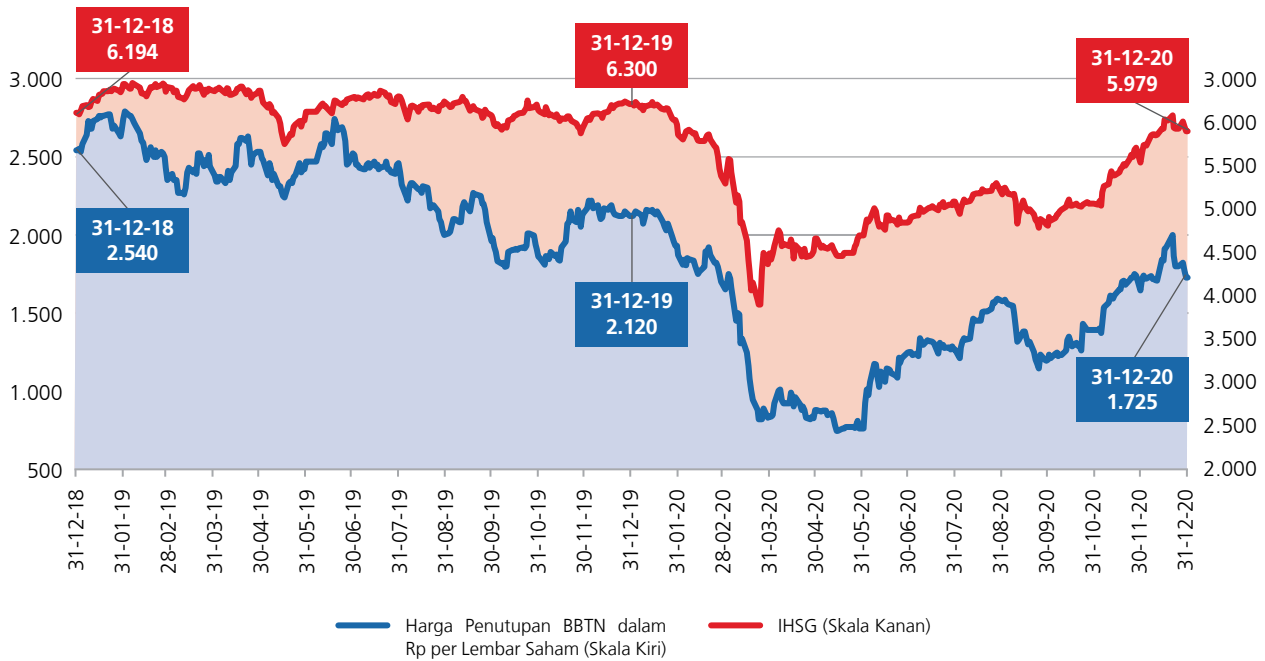
Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Perbankan Konsumer					
Penyaluran Kredit Konsumer	190.872.775	185.028.314	49.371.120	44.187.731	34.804.253
Simpanan Konsumer	65.777.811	65.600.784	61.792.136	52.743.237	44.389.209
Perbankan Komersial					
Penyaluran Kredit Komersial	44.186.175	47.184.222	29.135.261	23.298.077	18.521.043
Simpanan Komersial	189.525.768	137.939.293	146.263.780	120.011.519	100.568.259
Unit Usaha Syariah					
Penyaluran Pembiayaan Syariah	25.062.047	23.612.620	8.326.533	7.489.093	5.960.741
Simpanan Syariah	23.831.409	21.861.284	8.326.533	18.754.100	15.030.249

Informasi Harga Saham

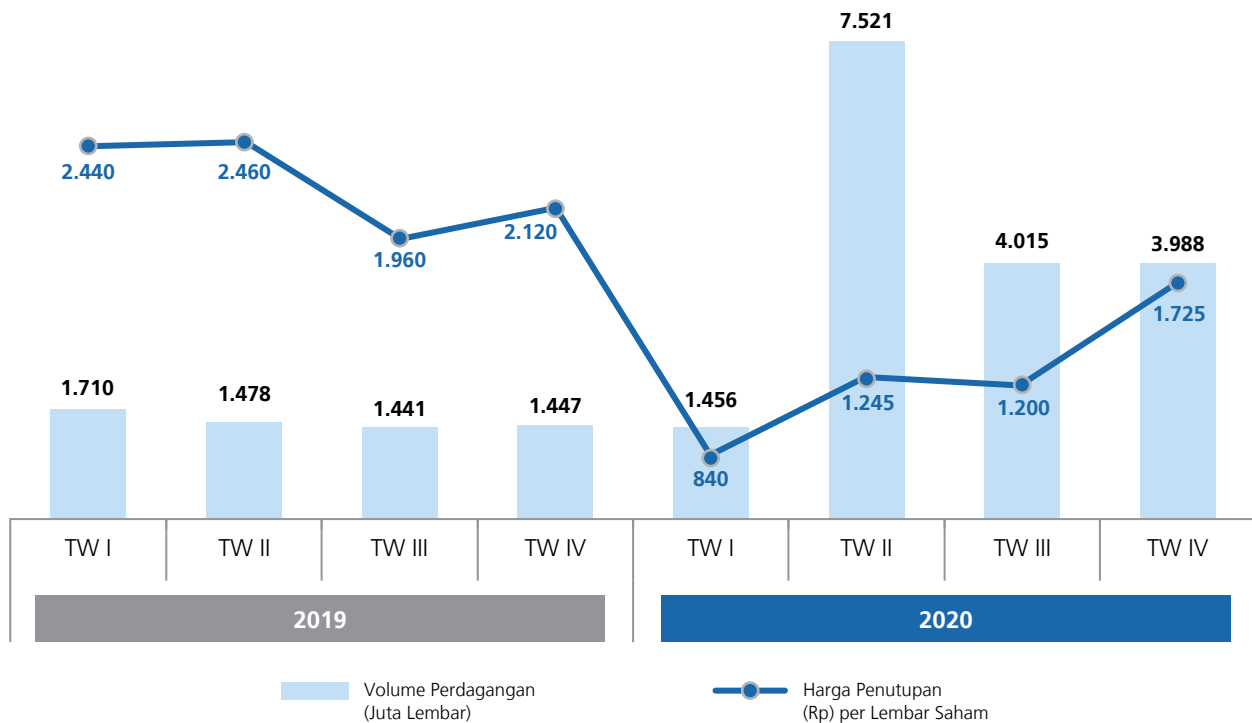
Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham BBTN 2019-2020

Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)	Volume Perdagangan (Juta Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2020							
Triwulan I	2.150	2.160	820	840	10.590	1.456	8,90
Triwulan II	840	1.245	745	1.245	10.590	7.521	13,18
Triwulan III	1.250	1.590	1.145	1.200	10.590	4.015	12,71
Triwulan IV	1.220	2.000	1.210	1.725	10.590	3.988	18,27
2019							
Triwulan I	2.560	2.790	2.260	2.440	10.590	1.710	25,84
Triwulan II	2.440	2.740	2.240	2.460	10.590	1.478	26,05
Triwulan III	2.490	2.520	1.960	1.960	10.590	1.441	20,76
Triwulan IV	1.970	2.220	1.795	2.120	10.590	1.447	22,45

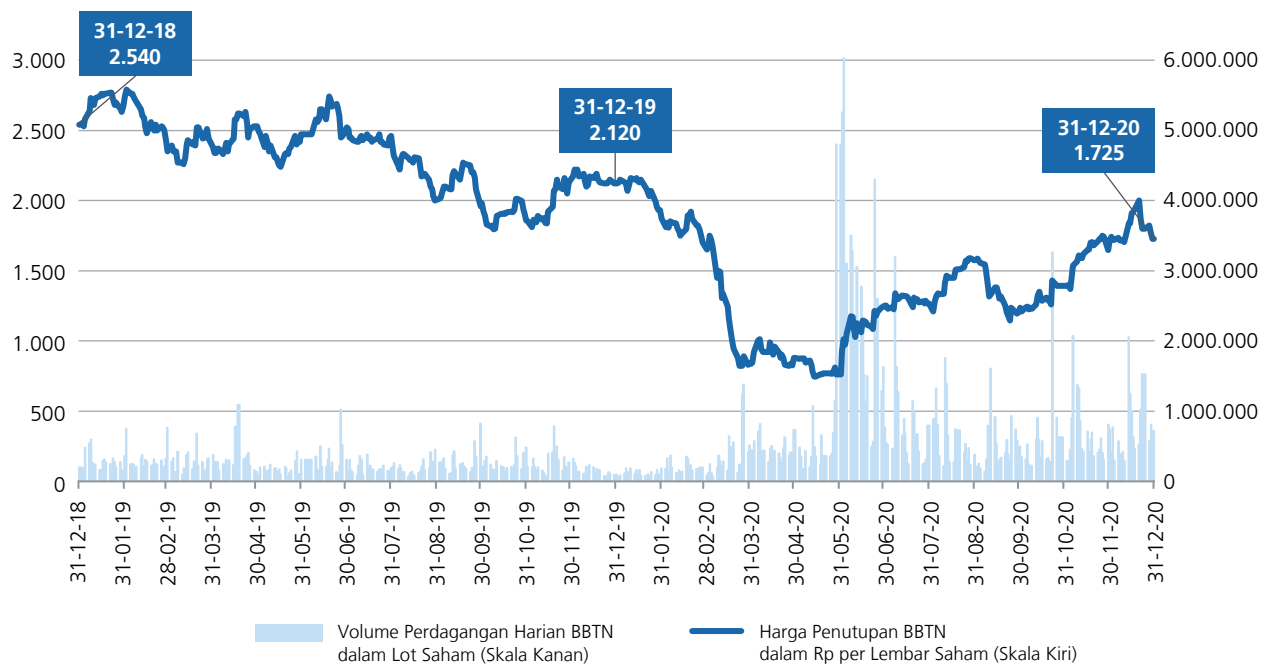
Grafik Pergerakan Harga Saham BBTN dan IHSG Tahun 2019-2020



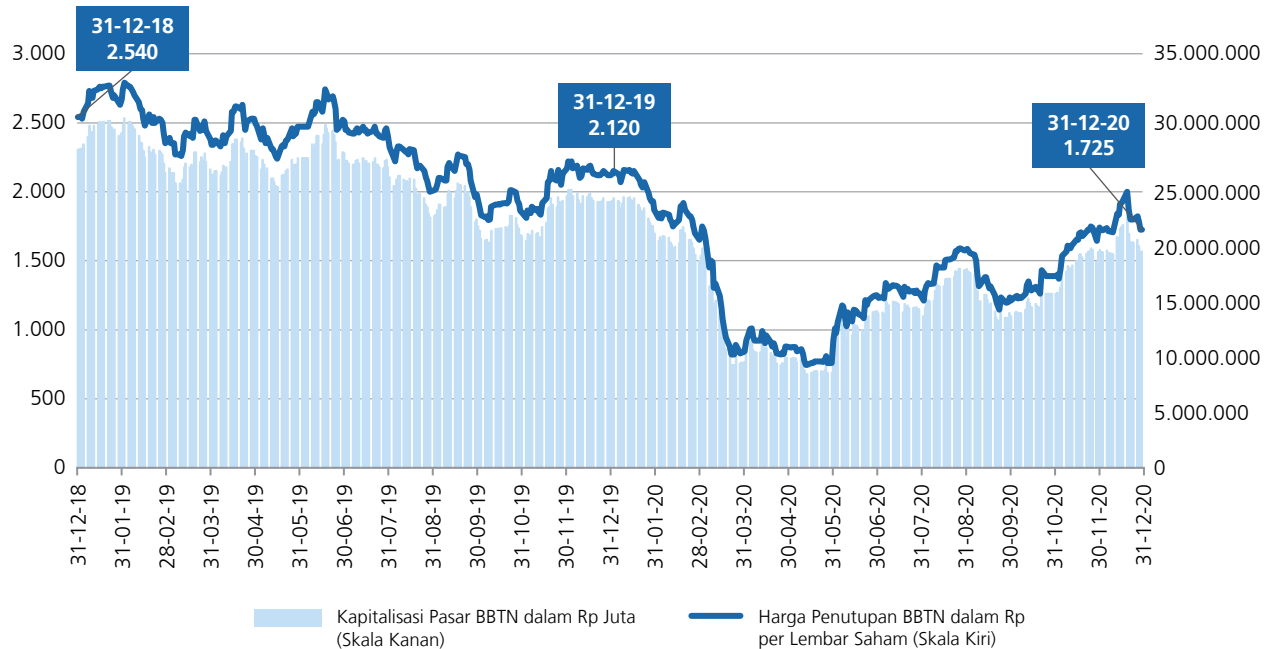
Grafik Volume Perdagangan Saham BBTN Tahun 2019-2020



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Perdagangan Harian Saham BBTN Tahun 2019 – 2020



Grafik Kapitalisasi Pasar Saham BBTN Tahun 2019 – 2020



Tabel Ringkasan Informasi Saham BBTN 2016-2020

Indikator	BBTN 2020	BBTN 2019	BBTN 2018	BBTN 2017	BBTN 2016
Harga Pembukaan (Rp per Lembar Saham)	2.150	2.560	3.560	1.745	1.300
Harga Tertinggi (Rp per Lembar Saham)	2.160	2.790	3.840	3.570	2.050
Harga Terendah (Rp per Lembar Saham)	745	1.795	2.050	1.700	1.295
Harga Penutupan (Rp per Lembar Saham)	1.725	2.120	2.540	3.570	1.740
Volume Perdagangan (Juta Lembar)	16.981	6.076	7.079	4.992	4.982
Nilai Buku Per Saham (Rp)	1.887	2.251	2.251	2.046	1.806
Price to Book Value (kali)	0,91	0,94	1,13	1,75	0,96
Price to Earning Ratio (kali)	11,40	107,29	9,58	12,49	7,04
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)	18,27	22,45	26,90	37,81	18,43

Sepanjang tahun 2020, selain termasuk dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap Index, Bank BTN juga berhasil masuk dalam daftar konstituen beberapa Indeks Saham terkemuka sebagai berikut:

Indeks	Periode
SRI-KEHATI	Desember 2020 – Mei 2021
Investor33	Desember 2020 – Mei 2021
IDX ESG Leaders	Desember 2020 – Maret 2021
LQ45	November 2020 – Januari 2021
IDX BUMN20	November 2020 – Januari 2021
IDX30	November 2020 – Januari 2021
IDX80	Agustus 2020 – Januari 2021
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Composite	Agustus 2020 – Januari 2021
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Liquid	Agustus 2020 – Januari 2021
Kompas100	Agustus 2020 – Januari 2021
PEFINDO i-Grade	Oktober – Desember 2020
Infobank15	Januari – Juni 2020

Aksi Korporasi

Pada tahun 2020, Perseroan menerbitkan 4 (empat) obligasi antara lain:

Obligasi	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	Nilai Nominal (Jutaan)	Tingkat bunga tetap per tahun	Jatuh tempo
Junior Global Bond Bank BTN	23 Januari 2020	USD300	4,20%	23 Januari 2025
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri A	19 Agustus 2020	Rp577.000	6,75%	29 Agustus 2021
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri B	19 Agustus 2020	Rp727.000	7,80%	19 Agustus 2023
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri C	19 Agustus 2020	Rp196.000	8,40%	19 Agustus 2025

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Informasi Obligasi

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat
									2020	2019	2018	
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	28 Juni 2011	10	IDR	1.300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	28 Juni 2021	9,5%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	5 Juni 2012	10	IDR	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	5 Juni 2022	7,9%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2013	10	IDR	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	27 Maret 2023	7,9%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	8 Juli 2015	7	IDR	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	8 Juli 2022	10,0%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	8 Juli 2015	10	IDR	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	8 Juli 2025	10,5%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	30 Agustus 2016	5	IDR	1.653.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	30 Agustus 2021	8,75%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	13 Juli 2017	5	IDR	1.295.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2022	8,50%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	13 Juli 2017	7	IDR	853.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2024	8,70%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	13 Juli 2017	10	IDR	1.386.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2027	8,90%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	28 Juni 2019	3	IDR	1.168.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	28 Juni 2022	8,75%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	-	Bank Mega
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	28 Juni 2019	5	IDR	1.219.500	100% dari jumlah pokok Obligasi	28 Juni 2024	9,00%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	-	Bank Mega
Junior Global Bond Bank BTN	23 Januari 2020	5	USD	300	100% dari jumlah pokok Obligasi	23 Januari 2025	4,20%	Belum Jatuh Tempo	Ba3 Moody's	-	-	Citicorp International Limited
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A	19 Agustus 2020	370 (hari)	IDR	577.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	29 Agustus 2021	6,75%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	-	-	Bank BJB

Uraian	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat
									2020	2019	2018	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B	19 Agustus 2020	3	IDR	727.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	19 Agustus 2023	7,80%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	-	-	Bank BJB
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C	19 Agustus 2020	5	IDR	196.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	19 Agustus 2025	8,40%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	-	-	Bank BJB

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak menerbitkan sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dengan demikian Perseroan tidak memiliki informasi mengenai sukuk.

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak menerbitkan obligasi konversi, dengan demikian Perseroan tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

Rating Perusahaan 2020

Rating Perseroan per Mei 2020 adalah idAA+ sesuai peringkat yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Laporan Analisis Perusahaan

No	Perusahaan	Analisis	Tanggal	Rekomendasi	Target Price (Rp)
1.	Mandiri Sekuritas	Kresna Hutabarat	28 Desember 2020	Buy	2.500
2.	Danareksa	Eka Savitri	22 Desember 2020	Buy	2.400
3.	UOB Kay Hian	Raphon Prima	4 Desember 2020	Buy	2.400
4.	RHB Research	Ghibran Al Imran	14 Desember 2020	Buy	2.300
5.	Sinarmas Sekuritas	Evan Lie Hadiwidjaja	29 Desember 2020	Buy	2.250
6.	Bahana Securities	Prasetya Gunadi	19 Desember 2020	Buy	2.200
7.	Nomura	Tushar Mohata	23 Desember 2020	Buy	2.175
8.	Sucorinvest Central Gani	Edward Lowis	26 November 2020	Buy	2.100
9.	Ciptadana Sekuritas	Erni M Siahaan	4 Desember 2020	Buy	2.025
10.	OCBC Sekuritas	Isfhan Helmy	13 November 2020	Buy	2.000
11.	Indo Premier Securities	Jovent Muliadi	6 November 2020	Buy	2.000
12.	Aldiracita Sekuritas	Agus Pramono	23 Oktober 2020	Buy	2.000
13.	Yuanta Securities	Yap Swie Cu	23 Desember 2020	Hold	1.940
14.	Trimegah Securities	Willinoy Sitorus	4 Desember 2020	Buy	1.900
15.	BCA Sekuritas	Tirta Ng	12 November 2020	Buy	1.900
16.	Panin Sekuritas	Nico Laurens	23 Oktober 2020	Buy	1.900
17.	Maybank Kim Eng	Rahmi Sari Marina	9 Desember 2020	Hold	1.800
18.	Credit Suisse	Gregorius Gary	1 Desember 2020	Outperform	1.800
19.	UBS	Joshua Tanja	22 Oktober 2020	Buy	1.725
20.	Samuel Sekuritas Indonesia	Suria Dharma	23 Oktober 2020	Buy	1.700
21.	CGS-CIMB	Laurensius Teiseran	22 Oktober 2020	Add	1.700
22.	Korea Investment & Securities	Edward Ariadi Tanuwijaya	18 September 2020	Hold	1.400
23.	CLSA	Sarina Lesmina	22 Oktober 2020	Outperform	1.380
24.	Morgan Stanley	Mulya Chandra	22 Oktober 2020	Equalwt/In-line	1.373
25.	Macquarie	Jayden Vantarakis	30 November 2020	Underperform	1.300

Peristiwa Penting di Tahun 2020



JANUARI



3 Januari

2020, Tetap Fokus Pembiayaan Rumah untuk Dorong Perekonomian Nasional

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. fokus pada pembiayaan rumah untuk mendukung perekonomian nasional dengan tetap berhati-hati mengingat kondisi geo politik dan ekonomi yang masih belum menentu di tahun tikus logam. Namun demikian, Perseroan tetap memasang target konservatif pertumbuhan kredit di level 10% pada 2020. Perseroan juga akan berfokus untuk tetap mendorong ketersediaan dana murah dengan melakukan inovasi produk tabungan berbasis *digital* agar banyak masyarakat menabung di Bank Tabungan.



7 Januari

Gandeng Kejaksaan

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N Mansury berbincang santai dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono dan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Chandra M. Hamzah usai menyaksikan penandatanganan MOU antara Perseroan dengan Kejaksaan. Adapun lingkup kerjasama menyangkut penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu perseroan dalam mengamankan aktiva Bank BTN sebagai risiko hukum yang perlu dilindungi dalam rangka menjaga kekayaan negara dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.



10 Januari

Pembukaan Rapat Kerja Nasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury bersama Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Chandra Hamzah menarik busur panah pada acara seremoni pembukaan Rapat Kerja Nasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2020. Pada Rakernas PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertema “Memperkuat budaya inovasi dan integritas untuk bisnis yang lebih berkualitas”, manajemen Perseroan berkomitmen menerapkan model bisnis baru untuk menjawab tantangan pasar dan fokus melakukan perbaikan kualitas bisnis Perseroan pada tahun 2020. Perseroan juga menetapkan target bisnis 2020, diantaranya pertumbuhan Kredit sekitar 10% dan Dana Pihak Ketiga atau DPK dapat tumbuh sekitar 14% dibandingkan tahun 2019.



MARET



10 Maret

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Ajak *Developer* Perkuat Sektor Properti di Tengah Perlambatan Ekonomi

Menghadapi potensi perlambatan ekonomi akibat merebaknya COVID-19, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengajak para *stakeholder* sektor properti khususnya para *developer* untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga pertumbuhan sektor properti, demikian disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Pahala N. Mansury saat membuka acara *Developer Gathering* dengan tema “*The Power of Synergy*, Kolaborasi yang produktif dan inovatif untuk menjadi yang terdepan.”



12 Maret

Gelar RUPST, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Optimis Bisnis Perseroan *on Track* Pada 2020

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2019. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimis dengan bisnis Perseroan pada tahun 2020 *on track*, dengan capaian laba hingga Rp3 triliun.



APRIL



14 April

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Serahkan Ventilator

Direktur Finance, Planning & Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L. P. Napitupulu berbincang santai dengan Staf Khusus III Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga di Gedung Kementerian BUMN. Dalam kesempatan itu, Perseroan juga menyerahkan alat ventilator yang dikoordinasi oleh Kementerian BUMN untuk diteruskan ke Rumah Sakit yang merawat pasien positif COVID-19. Bantuan ini merupakan kegiatan CSR Perseroan untuk mendukung Pemerintah dalam menanggulangi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersama Satuan Tugas COVID-19 Kementerian BUMN. Sebelumnya, Perseroan juga turut menyumbangkan ratusan baju hazmat dan ribuan vitamin untuk membantu meningkatkan proteksi para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di Sidoarjo.



MEI



5 Mei

Atasi Dampak COVID-19, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dukung Kegiatan Sosial Kejagung

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury bersama Kepala Jaksa Agung ST Burhanuddin secara simbolis memasukkan sembako ke dalam mobil box untuk didistribusikan. Paket bantuan sembako berjumlah 3.000 paket diberikan Perseroan sebagai bentuk dukungan kepada *stakeholder* perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial terkait pandemi COVID-19. Sesuai jadwal, bantuan sosial tersebut akan disalurkan Kejagung kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di 6 wilayah Jakarta melalui Kejaksaan Negeri Depok, Bekasi, Tangerang, Cikarang, Cianjur, dan Cibinong. Kegiatan ini termasuk dalam CSR Perseroan dalam mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah sosial akibat pandemi COVID-19.



15 Mei

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Serahkan Paket Sembako

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan alat kesehatan kepada perwakilan pegawai anorganik perseroan di Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.. Adapun 505 paket sembako dan alat kesehatan diserahkan kepada pegawai anorganik Perseroan seperti petugas *cleaning service*, satpam, jurumudi, teknisi maupun petugas parkir sebagai bentuk kepedulian sosial Perseroan di tengah pandemi COVID-19 dan menghadapi Idul Fitri 1441 H. Selama pandemi berlangsung, Perseroan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemanusiaan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dengan total nilai bantuan mencapai sekitar Rp4 miliar.



15 Mei

Pandemi COVID-19, Laba dan Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Masih Tumbuh

Memasuki kuartal II/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis tetap mampu mencatatkan kinerja *on track* kendati kondisi industri perbankan dan ekonomi nasional tengah mengalami kontraksi akibat pandemi. Kinerja tersebut ditopang bisnis yang tetap tumbuh, langkah efisiensi, dan upaya mempertebal likuiditas serta pencadangan yang telah dilakukan Perseroan sejak tahun lalu. Data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merekam Perseroan menghasilkan pendapatan bunga senilai Rp6,17 triliun dan laba operasional sebelum provisi tercatat sebesar Rp870 miliar.

JUNI



9 Juni

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Raih Piagam Muri

Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar menerima Piagam dari Museum Rekor Indonesia sebagai perusahaan yang melakukan webinar dengan peserta terbanyak dari Manajer MURI Awan Rahargo dan disaksikan Ketua MURI Jaya Suprana lewat layar ZOOM. Apresiasi dari MURI tersebut diraih Perseroan atas suksesnya penyelenggaraan webinar yang dilakukan lewat aplikasi Zoom dan disaksikan lewat *channel* Youtube resmi Perseroan dengan jumlah peserta mencapai 1.537 peserta. Webinar bertajuk Strategi Bisnis Menghadapi Dampak COVID-19 yang diselenggarakan tanggal 20 Mei 2020 lalu tersebut diikuti para pengembang di seluruh Indonesia yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Properti sepele REI, APERSI dan Himperra.



18 Juni

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sosialisasikan *Whistle Blower System* ke Mitra Bisnis

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury memperkenalkan *Whistle Blower System* bertajuk WBS BTN SIIPS dan *e-Mitra Operation* dihadapan para *stakeholder* diantaranya, REI, APERSI, Himperra, IPPAT dan sekitar 800 orang mitra kerja Perseroan sebagai peserta webinar pada acara *Business Partnership Gathering*. Sosialisasi WBS BTN SIIPS merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan produktivitas, *compliance* dan tata kelola perusahaan agar lebih transparan dan efisien. Selain itu dengan *e-Mitra Operation* berbasis *web* diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses bisnis mitra kerja Perseroan terutama dalam masa pandemi COVID-19.



Juli



14 Juli

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Optimalkan Pinjaman dari SMF untuk KPR

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury bersama Direktur Finance, Planning & Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L. P. Napitupulu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo dan Direktur SMF Heliantopo menunjukkan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pinjaman sebesar Rp 850 miliar. Dana tersebut akan disalurkan Perseroan dalam bentuk KPR Subsidi baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah.



21 Juli

Terbitkan Obligasi Dukong Sektor Riil

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury, didampingi Direktur Finance, Planning & Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon L. P. Napitupulu dan Direktur PT Mandiri Sekuritas, Dannif Danusaputro dan Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Winang Budoyo berbincang bersama saat acara *Public Expose* Obligasi Berkelanjutan IV tahap I senilai Rp1,5 triliun. Hasil penjualan obligasi akan digunakan Perseroan untuk mendukung ekspansi kredit guna mendorong sektor riil di bidang perumahan bangkit, khususnya di tengah pandemi COVID-19.



Agustus



15 Agustus

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cetak 24 Ribu Calon *Developer* Muda

Direktur Finance, Planning, & Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L. P. Napitupulu didampingi Head of Investor Relations and Research Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Winang Budoyo tersenyum bersama para lulusan terbaik dalam prosesi Wisuda Mini MBA *in Property* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. secara *virtual*. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meluluskan 168 peserta didik program Mini MBA *in Property*. Program tersebut merupakan program Pendidikan komprehensif untuk mencetak calon pengembang muda. Secara total, Perseroan telah mencetak lebih dari 24.000 calon *developer* muda hingga medio Agustus 2020 dan diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan capaian program sejuta rumah dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



19 Agustus

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan POLRI Jalin Kerja Sama Bidang Jasa Layanan Perbankan

Direktur Operation, IT & Digital Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Andi Nirwoto menunjukkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani bersama Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Drs Sutrisno Yudi Hermawan didampingi oleh Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar dan Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. M.Yut Penta dan Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Consumer Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Suryanti Agustinar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjalin kerja sama bidang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan yang melingkupi diantaranya pemberian fasilitas KPR baik subsidi maupun non subsidi, *cash management*, *payroll*, kredit konsumen dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut merupakan strategi Perseroan mempermudah akses kepada jajaran POLRI untuk mendapatkan pembiayaan dan layanan perbankan yang berkualitas.



22 Agustus

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Gelar IPEX Virtual 4D Perdana di Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berfoto bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto serta Komisioner BP Tapera Adi Setianto usai membuka Indonesia Properti Expo Virtual 4D pertama di Indonesia disaksikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto. IPEX Virtual 4D PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjadi ajang pameran properti virtual pertama Perseroan yang dapat diakses di situs ipex.btnproperti.co.id. IPEX Virtual 4D melibatkan lebih dari 200 *developer* yang menawarkan lebih dari 500 proyek hunian di Jabodetabek serta sejumlah provinsi di Indonesia dengan promosi yg sangat menarik selama pameran berlangsung dari 22 Agustus sampai dengan 30 September 2020.



September



23 September

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Iluni UI Jalin Kerja Sama

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury didampingi Direktur Finance, Planning & Treasury Nixon L. P. Napitupulu bersama Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahardian memamerkan naskah Nota Kesepahaman usai penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Melalui MoU tersebut, kedua institusi bekerja sama menggelar kegiatan Ruang Temu *Property Developer*, sebuah program pelatihan level dasar untuk alumni UI yang berniat terjun sebagai pelaku usaha pengembangan properti. Kerja sama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan ILUNI UI juga terbuka untuk program riset di bidang perumahan, konsultasi di bidang perumahan, serta kerja sama lainnya yang menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak.



OKTOBER



8 Oktober

Dukung UMKM, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Gandeng KoinWorks

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury bersama CFO KoinWorks Mark Brunny menyaksikan Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar dan CEO & Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan KoinWorks tentang Pemberian Pinjaman dengan Skema *Supply Chain Financing* melalui platform KoinWorks. Kerja sama strategis tersebut merupakan upaya Perseroan untuk mendukung pembangunan pondasi perekonomian yang kuat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui sektor UMKM. Lewat kerja sama ini, calon debitur UMKM di sektor properti dapat mengakses kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui KoinWorks hingga Rp1 miliar. Kredit dapat langsung diterima calon debitur berdokumen lengkap dalam 5 hari.



26 Oktober

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Resmikan Lokasi Baru Kantor Cabang Pembantu Kementerian PUPR

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury bersama Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti Eko Susetyowati dan Dirjen Penyediaan Perumahan H. Khalawi menggunting pita dalam acara seremonial pembukaan lokasi baru Kantor Cabang Pembantu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Kementerian PUPR.



November



11 November

Dukung Energi Ramah Lingkungan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Gandeng PLN

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury didampingi jajaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar dan Jasmin menunjukkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) kepada Direktur Utama PT PLN (Persero). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjalin kerja sama dengan PLN untuk mendukung gerakan konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi. Melalui kerja sama tersebut, Perseroan mendorong dan memberikan akses kepada mitra pengembangnya untuk menggunakan kompor induksi pada proyek perumahannya. Di lain pihak PLN memberikan kemudahan kepada mitra kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang menerapkan program konversi tersebut. Kerja sama lainnya yang dijalin adalah kerja sama pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan serta kerja sama sistem sistem informasi *monitoring* pemakaian listrik rumah debitur KPR. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi perumahan di Tanah Air yang dibiayai perseroan sekaligus mendukung gerakan energi yang ramah lingkungan.



Desember



10 Desember

Potret Perayaan 44 Tahun KPR BTN Kuasai Pasar

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury, Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto kompak mengacungkan jempol di sela pemotongan tumpeng serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 Kredit Pemilikan Rumah (KPR).



13 Desember

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Apresiasi Para Pengembang

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury didampingi Direktur Consumer and Commercial Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar memberikan penghargaan bagi para pengembang. Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi Perseroan atas dukungan para pengembang dalam membantu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyediakan rumah berkualitas bagi masyarakat. Hingga kini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. didukung lebih dari 5.000 pengembang untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Laporan Dewan Komisaris

Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen

Di tengah kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2020. Jumlah nilai penyaluran Kredit Konsumer tahun 2020 sebesar Rp190,87 miliar, meningkat 3,16% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,03 miliar. Jumlah nilai penyaluran produk Perbankan Komersial tahun 2020 sebesar Rp233,71 triliun, meningkat 26,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,12 triliun.

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas jalannya kepengurusan Perseroan sepanjang tahun 2020. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Direksi yang mampu memberikan kinerja yang terbaik di tengah kondisi lingkungan bisnis yang cukup menantang di tahun 2020.



Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris, khususnya pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau keputusan RUPS.

Laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi:

1. Rencana Bisnis Bank 2020-2022 dan realisasinya.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan dan realisasinya.
3. Kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi;
4. Tingkat Kesehatan Bank;
5. Pelaksanaan pengendalian intern secara umum;
6. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan/*Good Corporate Governance*;
7. *Review* dan Evaluasi Tindakan lanjut hasil/temuan Audit Internal/Eksternal Bank.
8. Tugas-tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari RUPS.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Sesuai ketentuan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Nasihat disampaikan Dewan Komisaris pada saat rapat dengan Direksi, yang hasilnya disampaikan dalam risalah rapat dan/atau surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris bersama Direksi juga menuangkan kesepakatan bersama yang di dalamnya terdapat komitmen-komitmen Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Sepanjang tahun 2020 telah diselenggarakan 18 (delapan belas) kali rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan 3 (tiga) kali rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja operasional dan keuangan Direksi. Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industri. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian Direksi dalam menghadapi tantangan maupun menangkap peluang yang terjadi pada kondisi perekonomian dan industri.

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok awalnya masih berlanjut di awal tahun 2020, namun munculnya pandemi COVID-19 seolah menutupi ketegangan yang terjadi. Pandemi virus yang berawal dari Tiongkok ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dengan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global. Krisis kesehatan yang muncul akibat pandemi COVID-19 bergeser ke krisis sosial karena beberapa negara melakukan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun ternyata pengendalian aktivitas tersebut berujung pada berkurangnya interaksi ekonomi yang justru menimbulkan krisis ekonomi dan krisis keuangan karena terganggunya interaksi pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi terkoreksi menjadi negatif di tahun 2020 karena banyak negara yang harus mengurangi aktivitas ekonominya.

Awalnya, Pemerintah memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% (YoY) di tahun 2020, namun dikoreksi menjadi (0,4%) – 2,3% di periode Maret-April 2020. Namun prakiraan ini diubah pada bulan Agustus 2020 menjadi (1,1%) – 0,2% setelah angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 (dua) tahun 2020 menunjukkan kontraksi yang lebih besar daripada prakiraan Pemerintah yaitu terkontraksi sebesar 5,32% (YoY). Walaupun sedikit mengalami penguatan, Pemerintah tetap merevisi ke bawah prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjadi (1,7%) – (0,6%).

Hal ini sejalan dengan prakiraan yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), IMF, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global dan nasional juga berdampak pada industri perbankan. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan, karena ketidakpastian kondisi ekonomi dan meningkatnya potensi kredit yang macet membuat penyaluran kredit menjadi terhambat baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Akibatnya, pertumbuhan kredit turun dari 6,1% (YoY) di Januari 2020 menjadi (2,4%) (YoY) di Desember 2020. Namun demikian, kredit Bank Himbara masih dapat tumbuh sebesar 0,63% dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tumbuh sebesar 5,22%, serta Bank Syariah tumbuh sebesar 9,50% jika dibandingkan tahun 2019.

Di tengah kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2020. Jumlah nilai penyaluran Kredit Konsumer tahun 2020 sebesar Rp190,87 miliar, meningkat 3,16% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,03 miliar. Jumlah nilai penyaluran produk Perbankan Komersial tahun 2020 sebesar Rp233,71 triliun, meningkat 26,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,12 triliun. Di sisi lain, peningkatan kinerja operasional juga terlihat pada segmen syariah. Posisi Jumlah Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah sampai dengan tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25,06 triliun dan Rp23,83 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebesar Rp23,61 triliun dan Rp21,86 triliun. Nilai penyaluran Pembiayaan Syariah Konsumer mengalami kenaikan menjadi Rp4,12 triliun, meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp3,88 triliun.

Dari sisi keuangan, pada tahun 2020 Perseroan juga telah mencatatkan kinerja yang baik. Aset tahun 2020 sebesar Rp361,21 triliun, meningkat 15,85% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp311,78 triliun. Selain itu, laba operasional juga mengalami peningkatan. Laba operasional tahun 2020 sebesar Rp2,33 triliun, meningkat 346,61% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,52 triliun.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industri perbankan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dasar penilaian yang menjadi pertimbangan Dewan Komisaris meliputi keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bank serta *trend* pertumbuhan kinerja Bank.

Secara perlahan pertumbuhan ekonomi nasional sudah menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi bulan September 2020 tumbuh positif 5,05%, secara *Quarter to Quarter* (QtQ), lebih tinggi dibanding bulan Juni 2020 yang tumbuh negatif (4,19%) (QtQ). Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didorong stimulus fiskal Pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk mendukung kebijakan insentif usaha, program kesehatan, usaha korporasi, UMKM dan perlindungan sosial, yang salah satunya adalah dengan menambahkan anggaran program perumahan subsidi di tahun 2020.

Dengan mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi dan rencana vaksinasi COVID-19, diprediksi optimisme pertumbuhan akan berlanjut di tahun 2021. Optimisme tersebut juga dipengaruhi oleh berlanjutnya dukungan stimulus fiskal Pemerintah pada Program PEN dan stabilitas ekonomi nasional yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan di tahun 2021, yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang stabil di kisaran 2%-3% dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar (USD) yang semakin terkendali di kisaran Rp14.000/USD.

Untuk mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah kembali melanjutkan program PEN di tahun 2021, dengan alokasi anggaran sebesar Rp356,5 triliun di tahun 2021, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan perlindungan sosial dan mendorong UMKM dengan menempatkan dana di perbankan. Sejalan dengan keberlanjutan stimulus fiskal Pemerintah, Bank Indonesia diprediksi juga akan kembali melanjutkan kebijakan moneter yang tetap akomodatif dengan menetapkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Repo yang diprediksi akan tetap dan terdapat ruang penurunan, untuk mendukung penyaluran kredit. Sehingga dengan sinergi stimulus fiskal dan ekspansi moneter tersebut, diproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan nasional dapat tumbuh di atas 7% (YoY) di tahun 2021.

Disrupsi layanan keuangan secara *digital* yang semakin masif, juga merupakan peluang dalam mengembangkan bisnis layanan perbankan ke depan. Pada Agustus 2020, volume transaksi *digital banking* nasional meningkat 52,69% (YoY), lebih tinggi dibanding Juli 2020 yang sebesar 38,81% (YoY). Hal tersebut didorong oleh *virtual* dan *stay at home lifestyle*, sehingga mempercepat perluasan penetrasi *fintech* dan *e-commerce*. Kondisi tersebut merupakan peluang yang akan dioptimalkan oleh Perseroan untuk mengembangkan layanan melalui pengembangan fitur dan *partnership* dengan *e-commerce* dan *fintech*.

Pandangan atas Penerapan Good Corporate Governance

Perseroan menerapkan seluruh prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban

semata, namun merupakan suatu kebutuhan dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG terlihat dari internalisasi *governance principles* ke dalam *governance framework* yang terdiri dari *governance structure* dan *governance process* yang efektif, sehingga menghasilkan *governance outcome* yang memuaskan, sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Pada proses jalannya *governance structure*, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan *review* secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan menciptakan Perseroan yang sehat. Fungsi Manajemen Risiko juga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam sistem pengendalian internal Perseroan khususnya terkait komponen *risk assessment* dalam COSO *internal control framework*. Selain itu, penerapan Fungsi Manajemen Risiko didasarkan pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang juga menjadi acuan manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. *Review* terhadap PKMR telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyempurnakan panduan kebijakan manajemen risiko.

Penerapan sistem manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan *shareholder value*. Perseroan menerapkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko-risiko secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir

ancaman dan memaksimalkan peluang dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip manajemen risiko yang paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern di Perseroan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penunjang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian *intern* sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal Perseroan telah sesuai dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian sudah berjalan dengan baik.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggungjawab di Perseroan.

Pelanggaran atau penyimpangan yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang secara signifikan berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis atau mengancam keselamatan individu Perseroan. Adapun beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain adalah:

1. Perbuatan *fraud*/kecurangan;
2. Pencurian/Pengambilan/Penggelapan/Penipuan;
3. Benturan Kepentingan;
4. Penyuapan/Gratifikasi;
5. Penyalahgunaan Wewenang;
6. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku Tidak Etis;
7. Pembocoran Informasi; dan
8. Pelanggaran Terhadap Ketentuan dan Perundangan.

Terkait dengan pelaksanaan WBS, Dewan Komisaris berperan melakukan evaluasi apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi. Pengelola WBS oleh pihak independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan melakukan validasi dan memutuskan layak atau tidaknya dilakukan audit khusus yang investigasi lanjutan/pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus (IAD)/Tim Auditor Eksternal. Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan Perseroan.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pengelolaan laporan pengaduan serta tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Pengaduan yang masuk selama periode 2020 berjumlah 115 pengaduan yang terdiri dari 8 (delapan) pengaduan melalui Surat/PO BOX, 53 (lima puluh tiga) pengaduan melalui SMS/Handphone/Datang Langsung/Whatsapp dan 54 (lima puluh empat) pengaduan melalui Email/Website. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk 101 (seratus satu) pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 14 (empat belas) pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus).

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing-masing Komite. Adapun dasar penilaian kinerja Komite mencakup (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi bulanan (Laporan Kinerja Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi), memberikan saran atas *draft* RBB, RKAP dan RAKB, melakukan pertemuan rutin dan diskusi dengan IAD dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, serta melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan keuangan Triwulanan, Tahunan dan *Annual Report* yang akan dipublikasikan. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan *Enterprise Risk Management Division* secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Perseroan, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang di dalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tugas Remunerasi dan Nominasi Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (UUS), Nominasi Talent internal Perseroan satu tingkat di bawah Direksi (BoD-1), *Performance Management System* serta mengevaluasi Kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan *Human Capital (Human Capital Management) and Learning Development*.

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun buku Komite-Komite telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup efektif.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019	20 Desember 2019
Heru Budi Hartono	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Andin Hadiyanto	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020

Penutup

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perseroan dengan baik di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Perseroan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sungguh berharap, ke depannya seluruh jajaran Perseroan dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2021
Atas Nama Dewan Komisaris



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen

Laporan Direksi —

Nixon L. P. Napitupulu
Plt. Direktur Utama

— Pencapaian target Perseroan secara keseluruhan baik, berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Dari sisi pendapatan bunga berhasil melampaui target sebesar 100,34%. Pencapaian target pendapatan tersebut sejalan dengan pencapaian target laba bersih Perseroan yang mencapai 147,65%.

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perseroan selama tahun 2020. Tantangan yang terjadi di tahun 2020, khususnya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerjanya dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan strategi bisnis yang tepat.



Pencapaian kinerja baik operasi maupun bisnis Perseroan sebagai pelaku usaha perbankan patut menjadi apresiasi bagi kita semua, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keseluruhan pencapaian Perseroan. Di tengah masa pandemi COVID-19, perbaikan *business process* Perseroan mampu membuahkan hasil yang cukup membanggakan.

Berikut beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas kepengurusan Perseroan oleh Direksi.

Profil Singkat Perseroan

Aktivitas Utama Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tanggal 23 Maret

2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Produk dan Jasa

Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa Perseroan meliputi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut.

Produk

Produk yang dihasilkan Perseroan meliputi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Produk Perbankan Konvensional meliputi:

- Perbankan Konsumer yang terdiri dari Produk Kredit Konsumer dan Produk Simpanan Konsumer.
- Perbankan Komersial yang terdiri dari Produk Kredit Komersial, termasuk Kredit UMKM dan Produk Simpanan Komersial.

Produk Perbankan Syariah meliputi Unit Usaha Syariah yang terdiri dari Produk Pembiayaan Syariah dan Produk Simpanan Syariah.

Jasa

Jasa yang dihasilkan Perseroan meliputi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah. Jasa Perbankan Konvensional meliputi:

- Kartu Konsumer
- *Wealth Management*
- *Electronic Channel* ATM
- CDM (*Cash Deposit Machine*)
- ATM Non Tunai (Kiosk)
- *SMS Banking*
- *Mobile Banking*
- *Internet Banking*
- *Virtual Account*
- *Electronic Data Capture* (EDC)
- *Cash Management*

- *Branchless Banking*
- Portal BTN Properti
- Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya

Jasa Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah meliputi:

- Kartu Debit Visa BTN Syariah
- Kiriman Uang
- *BTN Cash Management*
- *Payment Point* BTN iB
- *Payroll* BTN iB
- Penerimaan Biaya Perjalanan Haji
- SPP *Online* BTN iB
- Program Pengembangan Operasional BTN iB
- Garansi Bank BTN iB
- *Safe Deposit Box* BTN iB

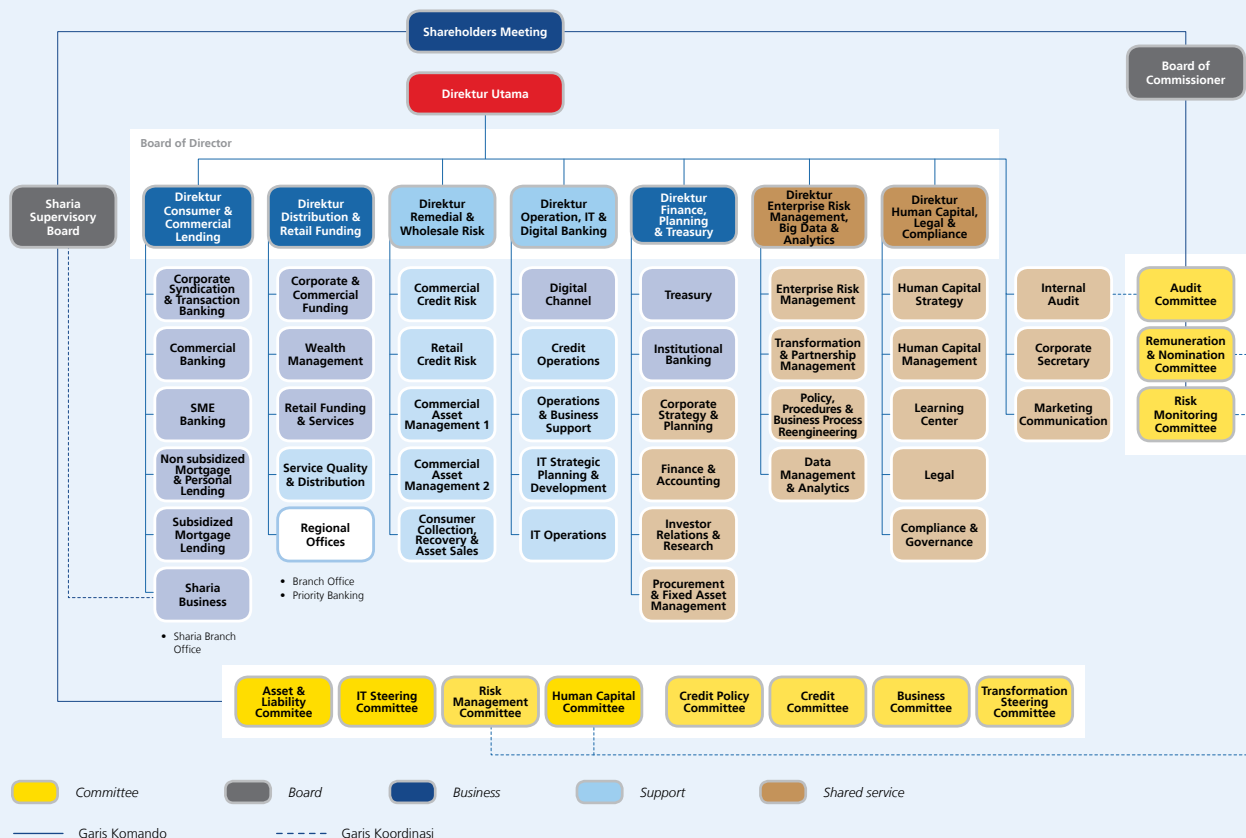
Jaringan Kerja dan Jaringan Kantor

Jaringan kerja, jumlah, jenis dan lokasi kantor adalah sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional: 6 Kantor Wilayah, 78 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 247 Kantor Kas, 56 *Payment Point*, 2.922 Kantor Pos Online dan 23 Mobil Kas Keliling.
- Jaringan Perbankan Syariah: 25 Kantor Cabang Syariah, 59 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, dan 12 *Payment Point* Syariah.

Struktur Organisasi

Perseroan telah menetapkan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha Perseroan. Struktur organisasi per November 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2020, jumlah pegawai yang dimiliki Perseroan adalah sebanyak 11.224 orang dengan rincian tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2020	2019
Pasca Sarjana	411	414
Sarjana	8.396	8.546
Sarjana Muda	1738	1.921
SLTA	679	766
Jumlah	11.224	11.647

Selama tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang meliputi *Leadership, Sales & Service, Credit & Risk, Business & Sharia Banking* dan *Operational Banking*. Pelatihan dan pengembangan kompetensi telah diikuti oleh seluruh level jabatan dari Dewan Komisaris, Direksi, Executive Vice President, Senior Vice President, Vice President, Assistant Vice President, Senior Manager, Manager, Assistant Manager, hingga Staff. Biaya pengembangan kompetensi yang telah dikeluarkan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp41,99 miliar.

Teknologi Informasi

Perseroan memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi. Di sisi lain, pengembangan Teknologi Informasi secara berkelanjutan juga dapat menjadikan sistem manajemen risiko yang dimiliki Perseroan berjalan dengan efektif.

Sepanjang tahun 2020, *progress* pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Total Inisiatif	Jumlah
DC 01 - Digital Platform Implementation	4
DC 02 - Transaction Channel Optimization	214
DC 03 - CRM Implementation	13
FD 01 - Wealth Management System Enhancement	15
FD 02 - Money Implementation	5
LD 01 - Loan Origination Enhancement	78
LD 02 - Credit Card System Implementation	2
OE 03 - HC System Enhancement	14
OE 05 - IT Sourcing Strategy Optimization	14
OE 08 - PMO Assistance Implementation	3
OE 11 - Enterprise Integration & Open API	80
OE 12 - Core Banking Enhancement	30
OE 15 - Integrated IT Monitoring Implementation	7
OE 17 - IT EA Assessment and Implementation	1
OE 18 - EDW & Analytics Platform Assessment	52
OE 19 - Master Data Management Enhancement	2
OE 20 - Advanced Big Data Capability	1
OE 22 - Enterprise Risk Management & Legal Application Enhancement	18
OE 23 - Anti-Fraud System Enhancement	2
OE 25 - IT Procedure Development	1

Total Inisiatif	Jumlah
OE 26 - Identity & Access Management Enhancement	5
OE 27 - Payment System Integration and Automation	17
OE 28 - Budgeting Planning & Control (BPC) System Implementation	1
OE 29 - Procurement & Asset System Enhancement	3
OE 31 - Content Management System Implementation	2
PR 03 - Syariah IT Review (Spin Off Assessment)	1
TB 01 - Treasury System Enhancement	11
TB 02 - Branch System Re-alignment	12
TB 03 - Cash Management System Enhancement	16
TB 04 - Supply Chain Finance Implementation	2
TB 05 - Trade Finance System Implementation	3

Analisis Kinerja Perseroan

Tahun 2020 dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga pada dasarnya tidak ada yang bisa mengukur dampaknya terhadap perekonomian global. Pada bulan Oktober 2020, International Monetary Fund (IMF) mengeluarkan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 4,4%. Prediksi ini adalah prediksi yang ke empat kali dari IMF sepanjang tahun 2020 ini karena memang sulit untuk mengukur dampak dari pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk diketahui, pada bulan Januari 2020 IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,3% di tahun 2020. Prediksi ini dikoreksi menjadi (3,0%) di bulan April, kemudian turun lagi menjadi (4,9%) di bulan Juni dan akhirnya di bulan Oktober dikoreksi lagi menjadi (4,4%). Perekonomian global diperkirakan akan kembali *rebound* di tahun 2021 sejalan dengan program vaksinasi global yang akan mengurangi dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, perbaikan ekonomi global diperkirakan bertahap dan baru akan mencapai kondisi seperti sebelum pandemi pada tahun 2022.

Sementara itu, untuk memitigasi penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi. Namun pembatasan ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang turun menjadi 2,97% (YoY) di kuartal I 2020. Pertumbuhan PDB bahkan mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif di kuartal II dan kuartal III yaitu masing-masing sebesar (5,32%) (YoY) dan (3,49%) (YoY). Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan kuartalannya, pertumbuhan PDB sudah mulai menunjukkan perbaikan karena pada kuartal III 2020 sudah tumbuh 5,05% *Quarter over Quarter* (QoQ), yang jauh lebih tinggi daripada pertumbuhannya di kuartal II sebesar (4,19%) (QoQ).

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program stimulus yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah mengeluarkan stimulus dalam bentuk tambahan belanja dan pembiayaan negara sebesar Rp695,2 triliun, sementara di sisi moneter BI mengeluarkan kebijakan moneter yang longgar dalam bentuk tambahan likuiditas, dan OJK mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Untuk mendorong kinerja sektor perbankan, Pemerintah melakukan penempatan dana Pemerintah pada perbankan sebesar Rp66,7 triliun yang telah disalurkan untuk kredit sektor riil sebesar Rp323,8 triliun atau perbankan dapat memberikan *leverage* sebesar 4,8 kali. Stimulus yang diberikan Pemerintah tersebut berdampak pada stabilnya pertumbuhan kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mulai tumbuh positif pada beberapa bulan terakhir.

Untuk menjaga kualitas kredit sektor perbankan dari ancaman kredit macet di tengah meluasnya pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi perbankan yang awalnya akan berakhir tanggal 31 Maret 2021, namun akhirnya diperpanjang sampai 31 Maret 2022. Hingga akhir Desember 2020, restrukturisasi perbankan telah mencapai Rp971 triliun atau 18% dari total kredit dari sekitar 7,6 juta debitur Usaha Kecil Menengah (UKM) dan korporasi. Kebijakan ini menghasilkan profil risiko perbankan yang terkendali dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* pada level 3,06% dan rasio NPL *net* sebesar 0,98%. Selain itu, permodalan perbankan cukup tinggi, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 23,78% yang pada tahun 2019 sebesar 23,31%.

Sejalan dengan itu, likuiditas perbankan masih cukup memadai ditandai oleh alat likuid perbankan yang terus meningkat mencapai sebesar Rp2.111 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.251 triliun, dan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh sebesar 11,11% (YoY). Alat likuid *liquidity coverage ratio/non-core deposit* berada pada level 146,72%, jauh di atas *threshold*-nya sebesar 50% dan 262,78%, lebih tinggi dari *threshold*-nya.

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri, Perseroan menargetkan kredit yang diberikan sebesar Rp267.282 miliar dan simpanan nasabah sebesar Rp244.288 miliar di tahun 2020. Tingkat suku bunga penghimpunan dana yang ditetapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Suku Bunga Tabungan

Strata Saldo	Suku Bunga
< 1 Juta	0,00%
≥ 1 Juta - ≤ 50 Juta	0,25%
> 50 Juta - ≤ 500 Juta	0,50%
>500 Juta - ≤ 1 Miliar	1,00%
>1 Miliar - ≤ 2 Miliar	1,50%
>2 miliar	2,00%

Suku Bunga Giro

Strata Saldo	Suku Bunga
≤ 10 Juta	0,00%
≥ 10 Juta - 100 Juta	0,50%
> 100 Juta – 500 Juta	1,00%
>500 Juta – 1 Miliar	1,50%
>1 Miliar	1,90%

Suku Bunga Deposito

Strata Saldo	Jangka Waktu (Bulan)					
	1	2	3	6	12	24
< 100 Juta	4,00%	4,00%	4,00%	4,25%	4,25%	4,25%
≥ 100 Juta - < 500 Juta	4,50%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
≥ 500 Juta – 2 Miliar	4,00%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
>2 Miliar	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

Sedangkan, tingkat suku bunga untuk penyediaan dana yaitu sebesar 9,90% untuk kredit korporasi dan kredit retail, 9,95% untuk KPR, serta 11,25% untuk Non KPR.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri tersebut, Direksi telah menetapkan strategi utama Bank yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas bisnis dengan tiga prioritas utama yaitu meningkatkan profitabilitas, perbaikan proses dan kualitas kredit dan pembenahan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan sumber daya manusia (SDM). Fokus strategi bisnis Perseroan terdiri atas Strategi Pendanaan, Strategi Perkreditan dan Strategi *Fee Based Income* sebagai berikut:

1. Strategi Pendanaan

Dalam strategi pendanaan, Direksi fokus pada rekomposisi pendanaan dan meningkatkan kontribusi DPK Ritel yang meliputi:

- Rekomposisi sebagian dana *wholesale* jatuh tempo dengan DPK dan *wholesale* baru dengan *rate* yang lebih rendah.
- Meningkatkan kontribusi Deposito Ritel.
- Mengembangkan CASA berbasis transaksional.

2. Strategi Perkreditan

Dalam strategi perkreditan, Direksi fokus pada peningkatan kontribusi kredit *margin* tinggi, perbaikan proses dan kualitas yang meliputi:

- Meningkatkan KPR Non Subsidi di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi ketergantungan pada KPR subsidi.
 - Meningkatkan kredit bermargin tinggi.
 - Melanjutkan perbaikan proses bisnis dan pembenahan dokumen kredit.
 - Fokus pada penurunan NPL dan kolektibilitas.
3. Strategi *Fee Based Income*
- Dalam strategi *fee based income* (FBI), Direksi fokus pada pengembangan *fee based income* berbasis transaksi dan layanan yang meliputi:
- Mengembangkan *fee* dari transaksi *electronic channel*.
 - Meningkatkan *fee treasury* dan mengembangkan sumber FBI baru.

Dalam pembenahan infrastruktur TI, Direksi menetapkan strategi penguatan TI yang difokuskan untuk mendukung inisiatif *low cost and transaction banking*, pengembangan sistem perkreditan dan efisiensi proses melalui otomatisasi proses *back-end* sebagai berikut:

- Pengembangan aplikasi BTN *Property Portal* berbasis *mobile apps* dan integrasi *property portal* dengan *Loan Origination System* (LOS).

2. Membentuk solusi *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mengetahui *360 degree customer view*, *profiling* dan peningkatan kapabilitas pelayanan nasabah.
3. Mengembangkan aplikasi *internet banking and mobile banking* melalui peningkatan *platform* dan integrasi antar sistem seperti *iColl*, *iCash* dan *property portal*.
4. Mengembangkan *management tools* untuk aktivitas *marketing* dan *sales* dengan membentuk *digital marketing and sales tools*.
5. Perbaikan secara menyeluruh sistem *wealth management*:
 - a. Mengembangkan *Electronic Data Warehouse* sebagai *data analytics* unit sales.
 - b. Meningkatkan kapabilitas *data mining* untuk *cross sell* dari segmen lain.
6. Peningkatan *operational supporting tools* saat ini, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko.
7. Memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja:
 - a. Optimalisasi implementasi *risk profiling* – *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Loss Event Default Database* (LED) dan Peta Kepatuhan.
 - b. Pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM).
8. Integrasi *Loan Origination System* dan penambahan *iCremo* untuk melakukan *monitoring* penyaluran kredit.
9. *Reengineering* proses bisnis pembiayaan yang lebih mengarah pada model sentralisasi melalui digitalisasi sistem *back office* untuk mengautomasi proses dan menghubungkan ke berbagai *database*.

Sedangkan dalam pembenahan SDM, Direksi fokus terhadap penguatan bidang SDM yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan penerapan budaya kerja SIIPS (Sinergi, Integritas, Inovasi, Profesionalisme dan Spirit Mencapai Keunggulan):
 - a. Melaksanakan program *Sales Culture*
 - b. Melaksanakan program *Performance Culture*
 - c. Melaksanakan program *Governance Culture*
 - d. Melaksanakan program *Learning Culture*
2. Penguatan penerapan *performance based culture*:
 - a. Program *incentive* untuk *benefit* dan produktivitas pegawai.
 - b. Perbaikan *cascading* dan sinkronisasi KPI dari level unit sampai dengan individu.
3. Menyusun *strategic man power planning* berbasis produktivitas unit kerja.
4. Memperkuat internalisasi *employer value proposition* melalui aktivitas rekrutmen terarah untuk menarik *top talent*.
5. Optimalisasi metode *e-learning* dalam mengembangkan kapabilitas pegawai melalui portal dan aplikasi BTN *Digital Room for E-Learning Modules* (BTN Dream).

6. *Tracking* dan *monitoring* produktivitas pegawai yang menjalankan *Working From Home* (WFH) secara *digital*, melalui aplikasi BTN B-Gate dan WFH for Bitniz.
7. Melakukan program 3C (*Cross Selling* dengan target minimal *sales call* 20 (dua puluh) nasabah per hari, *Celansing Data Pipeline* serta *Updating Data* dan *Collection* melalui aplikasi *mobile collection*) bagi pegawai yang sedang menjalankan *Work From Home* (WFH).

Dengan menerapkan strategi bisnis tersebut, dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi ini, kinerja Perseroan tahun 2020 telah memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Pencapaian target Perseroan secara keseluruhan baik, berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Pencapaian target aset sebesar 111,20% yang melampaui target. Demikian pula dengan pencapaian target simpanan dari nasabah yang mencapai 114,26%, pencapaian tersebut didukung oleh tercapainya target giro dan deposito yang masing-masing sebesar 119,26% dan 118,94%. Meskipun kredit yang diberikan sedikit berada di bawah target mencapai 97,32% yang disebabkan tidak terserapnya kuota KPR ke nasabah Perseroan karena pandemi COVID-19, sehingga penyaluran KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi mengalami penurunan. Akan tetapi pencapaian target ekuitas berhasil melampaui target sebesar 116,39%.

Dari sisi pendapatan bunga juga berhasil melampaui target sebesar 100,34%. Pencapaian target pendapatan tersebut sejalan dengan pencapaian target laba bersih Perseroan yang mencapai 147,65%. Hal tersebut karena Perseroan dapat menurunkan *Cost of Fund* (CoF) yang signifikan, meningkatkan pendapatan *Fee Based Income* (FBI) serta efisiensi Biaya Operasional Pendapatan Operasional Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (BOPO CKPN).

Dari sisi kinerja operasional, jumlah nilai produk perbankan konsumen tahun 2020 sebesar Rp256,65 triliun, meningkat 2,40% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp250,63 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan produk kredit konsumen sebesar 3,16% atau Rp5,84 triliun. Jumlah nilai penyaluran Kredit Konsumen tahun 2020 sebesar Rp190,87 miliar, meningkat 3,16% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,03 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan Kredit Perumahan sebesar 3,09% atau Rp5,57 miliar. Jumlah Dana Simpanan Konsumen tahun 2020 sebesar Rp65,78 triliun, meningkat 0,17% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp65,67 triliun. Pada masa pandemi COVID-19 jumlah dana simpanan konsumen masih tumbuh, pertumbuhan tersebut khususnya berasal dari kontribusi Deposito Berjangka (deposito ritel) yang sebesar 11,98% atau Rp2,90 triliun.

Dari segmen perbankan komersial, Jumlah nilai penyaluran produk Perbankan Komersial tahun 2020 sebesar Rp233,71 triliun, meningkat 26,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,12 triliun. Hal tersebut berasal dari kenaikan produk Simpanan Komersial sebesar 37,40% atau Rp51,59 triliun. Jumlah nilai penyaluran Kredit UMKM tahun 2020 sebesar Rp2,00 triliun, meningkat 1,67% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,97 triliun. Hal tersebut berasal dari kenaikan penyaluran *Linkage* Program sebesar Rp47,60 miliar dan KUMK sebesar Rp55,89 miliar.

Dari segmen syariah, posisi tahun 2020 sebagian besar dikontribusikan dari Pembiayaan Syariah yang terdiri atas Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Posisi Jumlah Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah sampai dengan tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25,06 triliun dan Rp23,83 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebesar Rp23,61 triliun dan Rp21,86 triliun. Nilai penyaluran Pembiayaan Syariah Konsumer mengalami kenaikan sebanyak Rp4,12 triliun dibanding tahun 2019 Rp3,88 triliun. Perseroan mencatatkan volume pembiayaan Konsumer pada tahun 2019 sebanyak 23.271 pembiayaan dan mengalami kenaikan 1.944 pembiayaan pada tahun 2020 dengan volume sebanyak 25.215 pembiayaan. Total pembiayaan Konsumer Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp4,15 triliun, meningkat 6,87% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3,88 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB sebesar 5.745,45%. Sejalan dengan hal tersebut, volume pembiayaan Syariah juga meningkat 8,35% dari 23.271 pembiayaan kredit menjadi 25.215 pembiayaan kredit.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga mencatatkan hasil yang baik pada kinerja keuangan. Aset tahun 2020 sebesar Rp361,21 triliun, meningkat 15,85% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp311,78 triliun. Selain itu, laba operasional juga mengalami peningkatan. Laba operasional tahun 2020 sebesar Rp2,33 triliun, meningkat 346,61% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,52 triliun.

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2020 tidak lepas dari kemampuan Bank dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi. Di tahun 2020, Kendala-kendala yang dihadapi Perseroan antara lain, pendanaan yang masih didominasi oleh dana mahal dan terpapar risiko konsentrasi likuiditas. Portfolio kredit perumahan juga sangat dominan yaitu mencapai 90% (eksposur *maturity miss match*), dimana beberapa produk memiliki *yield* rendah dengan risiko yang tinggi. Selain itu, kinerja NPL cenderung memburuk dan rasio kolektibilitas 2 masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perseroan juga menghadapi kendala pada SDM, yaitu penempatan pegawai di Kantor Cabang masih dominan pada unit *support* dan kredit.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Perseroan telah memiliki strategi yaitu dengan mengembangkan penjualan produk secara *bundling* pada nasabah konsumer dan komersial. Perseroan juga akan mengoptimalkan inisiatif perbaikan pada proses bisnis kredit. Perseroan akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah untuk mengupayakan strategi *liquidity fund* akibat penundaan pembayaran pokok kredit dari relaksasi debitur yang terdampak COVID-19. Ke depannya, Perseroan akan lebih selektif dalam penyaluran baru kredit KPR Non Subsidi, Komersial dan Korporasi.

Analisis Tentang Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi dunia sudah mulai pulih dengan adanya rencana vaksinasi COVID-19, dan diprediksi optimisme pertumbuhan akan berlanjut di tahun 2021. Optimisme tersebut juga dipengaruhi oleh berlanjutnya dukungan stimulus fiskal Pemerintah pada Program PEN dan stabilitas ekonomi nasional yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan di tahun 2021, yang ditunjang oleh tingkat inflasi yang stabil di kisaran 2%-3% dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar (USD) yang semakin terkendali di kisaran Rp14.000/USD.

Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi di Masa Mendatang-Prospek Sektor Perumahan Nasional dan Potensi Pengembangannya

Di tengah tantangan pandemi, sektor properti masih mencatatkan kinerja yang positif di saat sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Pada bulan Juni 2020, sektor properti masih dapat tumbuh 2,3% (YoY), pertumbuhan ini salah satunya dipengaruhi oleh penambahan anggaran untuk program KPR Subsidi Pemerintah sebesar Rp1,5 triliun sehingga alokasi KPR Subsidi tahun 2020 meningkat menjadi lebih dari 300 ribu unit.

Memperhatikan pertumbuhan sektor properti tersebut, optimisme pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 akan memberikan kontribusi positif terhadap potensi sektor properti ke depan, khususnya pada proyeksi pertumbuhan bisnis KPR. Selain pemulihan ekonomi, Potensi peningkatan bisnis KPR ke depan juga akan di dorong oleh realisasi program KPR Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang dimulai di tahun 2021 dan sudah mulai berjalannya proyek pembangunan perumahan terutama pada segmen menengah-atas yang sebelumnya sempat tertunda karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah.

Rasio KPR terhadap PDB yang masih rendah juga merupakan peluang yang akan dikembangkan Perseroan untuk memperluas bisnis perumahan ke depannya. Dengan komitmen keberlanjutan Program Sejuta Rumah Pemerintah dan meningkatnya populasi *middle income* yang didominasi oleh generasi millennial dan segmen *emerging affluent* juga menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk memperluas fokusnya dalam mengembangkan bisnis perumahan ke depan, khususnya dalam meningkatkan pangsa pasar di segmen millennial dan *emerging affluent*. Untuk menangkap potensi pertumbuhan tersebut, di tahun depan Perseroan akan meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi dengan menyasar *Top Developers* dan *direct selling* KPR kepada konsumen (*Direct to Consumer*) melalui kerja sama dengan agen properti nasional dan individu.

Selanjutnya, sebagai sektor yang memiliki *multiplier effect* kepada 178 sub-sektor industri, pengembangan *value chain* dari bisnis perumahan juga menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan Perseroan. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang menyasar perluasan *value chain* bisnis konstruksi yaitu akuisisi lahan, bahan bangunan, pengembangan lahan dan properti, jasa konstruksi dan pembiayaan pada pengembang (*developer*). Dengan demikian, prospek Perseroan ke depan akan sangat baik.

Perkembangan Penerapan *Corporate Governance*

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan *Self Assessment* secara berkala dalam setiap tahunnya pada akhir bulan Juni dan Desember. Standar penerapan tata kelola selain mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga telah mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan penilaian sendiri *self assessment* penerapan tata kelola Perusahaan pada bulan Juni 2020 dan bulan Desember 2020. Hasil dari penilaian tersebut, diperoleh peringkat 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). Skor CGPI Perseroan pada tahun 2020 sebesar 89,62 dengan predikat "Sangat Terpercaya".

Berdasarkan *assessment* tersebut, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut antara lain:

1. Perseroan telah mencanangkan transformasi yang didukung oleh pengembangan model operasi baru yang mencakup:
 - a. *Business Process Improvement*.
 - b. *Network and Distribution Design*.
 - c. Menyempurnakan *organization design* seperti meningkatkan peran *risk management* dan peningkatan kapasitas *human capital*.
2. Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal (*Risk Control*) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui komite audit.
3. Perseroan telah berupaya melakukan pemutakhiran kebijakan dan sistem manajemen risiko.
4. Perseroan telah melakukan pengembangan dan pemutakhiran kebijakan dan pedoman pengungkapan keterbukaan informasi perusahaan.
5. Perseroan telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Perseroan telah mengoptimalkan internalisasi dan sosialisasi anti *fraud* untuk seluruh karyawan melalui berbagai media.
7. Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan *review* secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku guna mendukung strategi pertumbuhan kinerja.

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN. Bank BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu *“Top 3 Indonesian PLCs”* dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori *“ASEAN Asset Class Thresholds.”* Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun buku 2019 adalah sebesar 110,29.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Personalialia
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI)
7. *Transformation Steering Committee*
8. Komite Bisnis

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. Komite Manajemen Risiko terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan Komite yang berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) Perseroan. Selama tahun 2020, ALCO telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan Komite yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan. Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kredit merupakan Komite yang bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Selama tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan 76 (tujuh puluh enam) kali agenda rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Personalialia memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2020, Komite Personalialia telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Teknologi Infomasi berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Perseroan. Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Infomasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Transformation Steering Committee berperan dalam proses transformasi Perseroan. Selama tahun 2020, *Transformation Steering Committee* telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis membantu Direksi dalam merumuskan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan produk Perseroan. Selama tahun 2020, Komite Bisnis telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Direksi

Direksi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang. Direksi wajib dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Seorang diantara anggota Direksi dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. Seorang di antara anggota Direksi wajib ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Selain itu, penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, telah terjadi sekali perubahan komposisi Direksi. Perubahan Komposisi Direksi disajikan sebagai berikut.

Periode Direksi Periode 1 Januari – 23 Desember 2020

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 23 Desember 2020 yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Pahala N. Mansury	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Februari 2020
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Finance, Planning, and Treasury	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017	25 Juli 2017
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018 dan menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Compliance pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.	10 September 2018
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

Periode 23 Desember - 31 Desember 2020

Pada tanggal 23 Desember 2020, Bapak Pahala N. Mansury telah dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN, sehingga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maka jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dinyatakan berakhir terhitung sejak dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN.

Mengingat posisi Direktur Utama lowong, maka Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 Desember 2020 menunjuk Bapak Nixon L. P. Napitupulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perseroan. Sehingga Komposisi Direksi periode 23 Desember – 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Nixon L. P. Napitupulu	Plt. Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017	25 Juli 2017
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018 dan menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Compliance pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019.	10 September 2018
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

Penutup

Pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan kontribusi semua pihak. Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh investor. Demikian pula kepada regulator, nasabah, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah tercipta.

Kepada seluruh karyawan Insan Perseroan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan. Semoga perjalanan di tahun 2020 dapat menjadi evaluasi bagi Perseroan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2021
Atas Nama Direksi

Nixon L. P. Napitupulu
Plt. Direktur Utama

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan —

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2021



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen



Eko D. Heripoerwanto
Komisaris



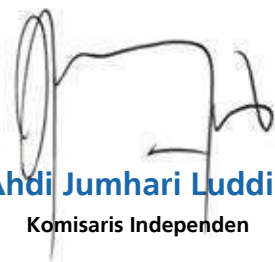
Heru Budi Hartono
Komisaris



Andin Hadiyanto
Komisaris



Armand B. Arief
Komisaris Independen

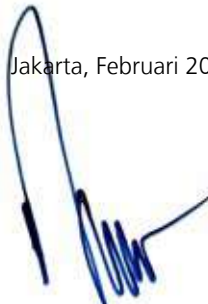


Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2021



Nixon L. P. Napitupulu

Plt. Direktur Utama



Hirwandi Gafar

Direktur Consumer
and Commercial Lending



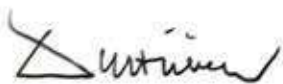
Yossi Istanto

Direktur Human Capital,
Legal and Compliance



Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Remedial
and Wholesale Risk



Andi Nirwoto

Direktur Operation,
IT and Digital Banking



Jasmin

Direktur Distribution
and Retail Funding



Setiyo Wibowo

Direktur Enterprise Risk Management,
Big Data and Analytics

Profil Perusahaan





Identitas Perusahaan



Nama Perusahaan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nama Panggilan

Bank BTN



Status Perseroan

Perseroan Terbatas (PT)/Perusahaan Terbuka/
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Bidang Usaha

Bank Umum, termasuk melakukan kegiatan
Bank berdasarkan prinsip syariah



Tanggal Pendirian

9 Februari 1950



Dasar Hukum Pendirian

- Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 tentang Perubahan Undang-undang Postspaarbank (Staatblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 Tanggal 22 Juni 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara No. 86 Tahun 1953).
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Akta pendirian Bank sebagai Persero No. 136 Tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta.



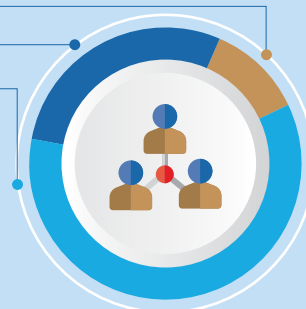
Kepemilikan

- Pemerintah Republik Indonesia 60,00%
- Publik Domestik 28,76%
- Publik Asing 11,24%

11,24%

28,76%

60,00%





Modal Dasar

Rp10.239.216.000.000,-

Terbagi atas:

- 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500,-
- 20.478.431.999 lembar saham Seri B dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500,-



Data Jaringan Usaha

- Jaringan Perbankan Konvensional: 6 Kantor Wilayah, 78 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 247 Kantor Kas, 56 *Payment Point*, 2.922 Kantor Pos *Online* dan 23 Mobil Kas Keliling.
- Jaringan Perbankan Syariah: 25 Kantor Cabang Syariah, 59 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, dan 12 *Payment Point* Syariah.



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 51,71% atau sejumlah 10.590.000.000,- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.295.000.000.000,- yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp500,-
- 10.589.999.999 lembar saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.294.999.999.500,-.



Jumlah Karyawan

11.224 Orang

Per 31 Desember 2020



Alamat Kantor Pusat

Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, Indonesia



Contact Address

☎ (021) 6336789
☎ (021) 6346704
@ csd@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id
Call Center: 1500-286

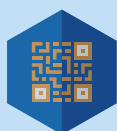
Media Sosial :

f BankBTNcoid
🐦 @BankBTNcoid
📷 BankBTN
📺 Bank BTN



Pencatatan di Bursa Saham

17 Desember 2009, Bursa Efek Indonesia



Kode Saham

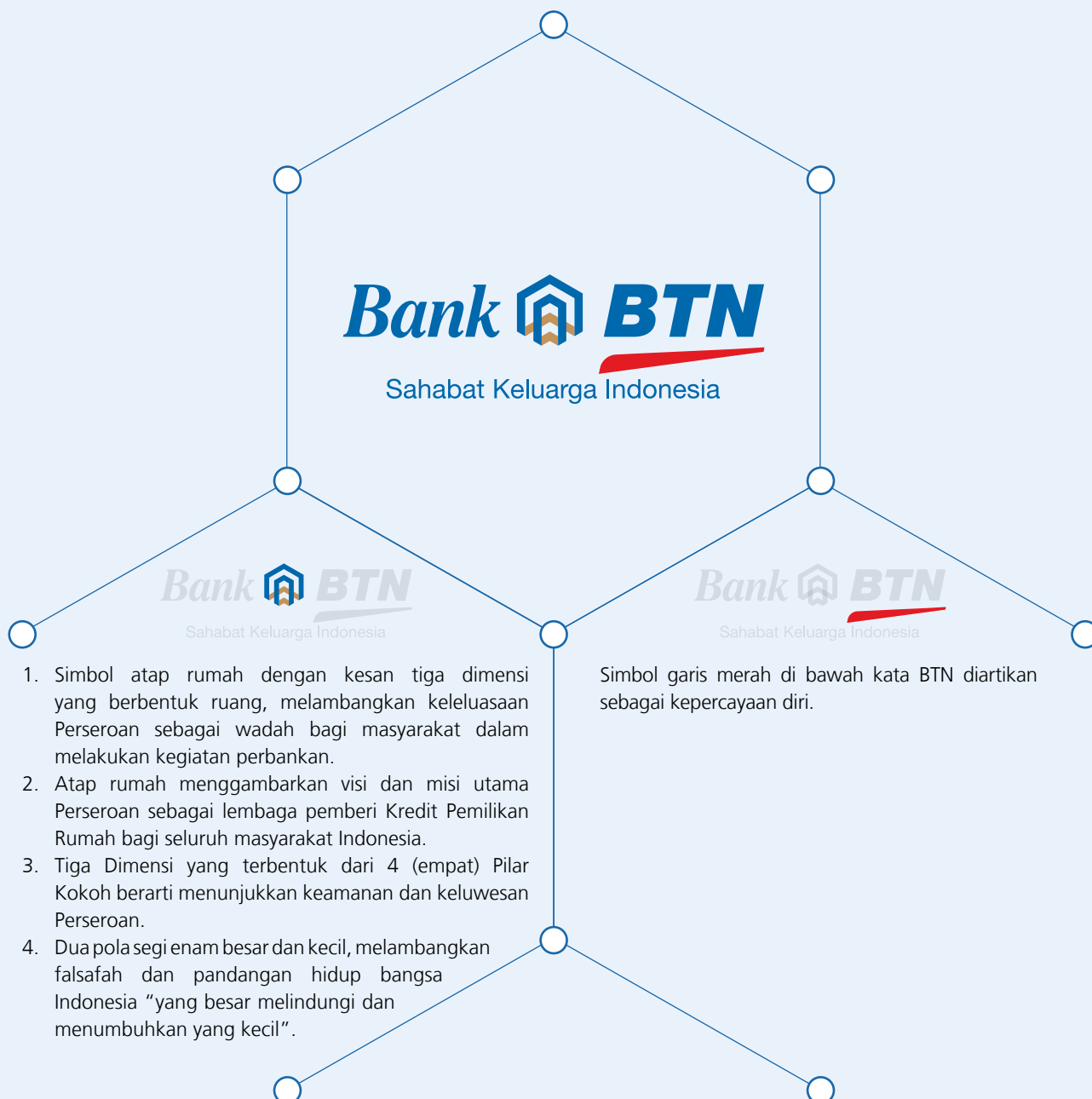
BBTN



Kontak Perusahaan

Sekretaris Perusahaan
Ari Kurniawan
Menara BTN
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
☎ (021) 6336789 ext. 2003
☎ (021) 6336719
@ ari.kurniawan@btn.co.id

Brand Perusahaan



Warna biru melambangkan kematangan Perseroan yang berpengalaman dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional.



Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan sebagai bank yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.



Warna merah melambangkan kepercayaan diri Perseroan sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia.

Riwayat Singkat Perusahaan —



Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 103 Kantor Cabang (termasuk 25 Kantor Cabang Syariah), 373 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 59 Kantor Cabang Pembantu Syariah), 254 Kantor Kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.990 SOPP, Payment Point 56, Payment Point Syariah 12 dan Kantor Pos Online 2.922.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, sejak tanggal 22 Juni 1963 nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai Bank Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Perseroan diubah menjadi Perseroan Terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Perseroan sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai Bank Devisa.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Perseroan mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran

dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH 01.02 tahun 2009.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Maret 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 21 April 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Perseroan berdasarkan prinsip syariah.

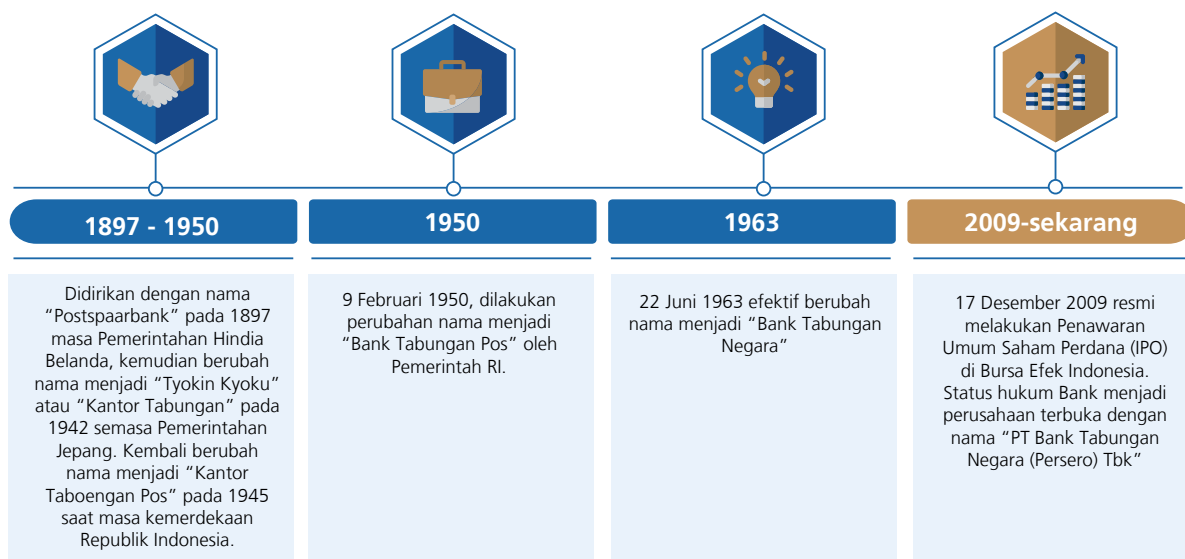
Perseroan berdomisili di Jakarta dan Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 103 Kantor Cabang (termasuk 25 Kantor Cabang Syariah), 373 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 59 Kantor Cabang Pembantu Syariah), 254 Kantor Kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.990 SOPP, *Payment Point* 56, *Payment Point* Syariah 12 dan Kantor Pos Online 2.922 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 103 Kantor Cabang (termasuk 25 Kantor Cabang Syariah), 379 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 53 Kantor Cabang Pembantu Syariah), 366 Kantor Kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 3.014 SOPP (*System on-line Payment Point/ Kantor Pos online*) (tidak diaudit).

Keterangan Perubahan Nama

Seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi seperti saat ini; mulai dari nama Bank Tabungan Pos pada tahun 1950 hingga menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Adapun bidang usaha yang dapat dilakukan Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut ini:

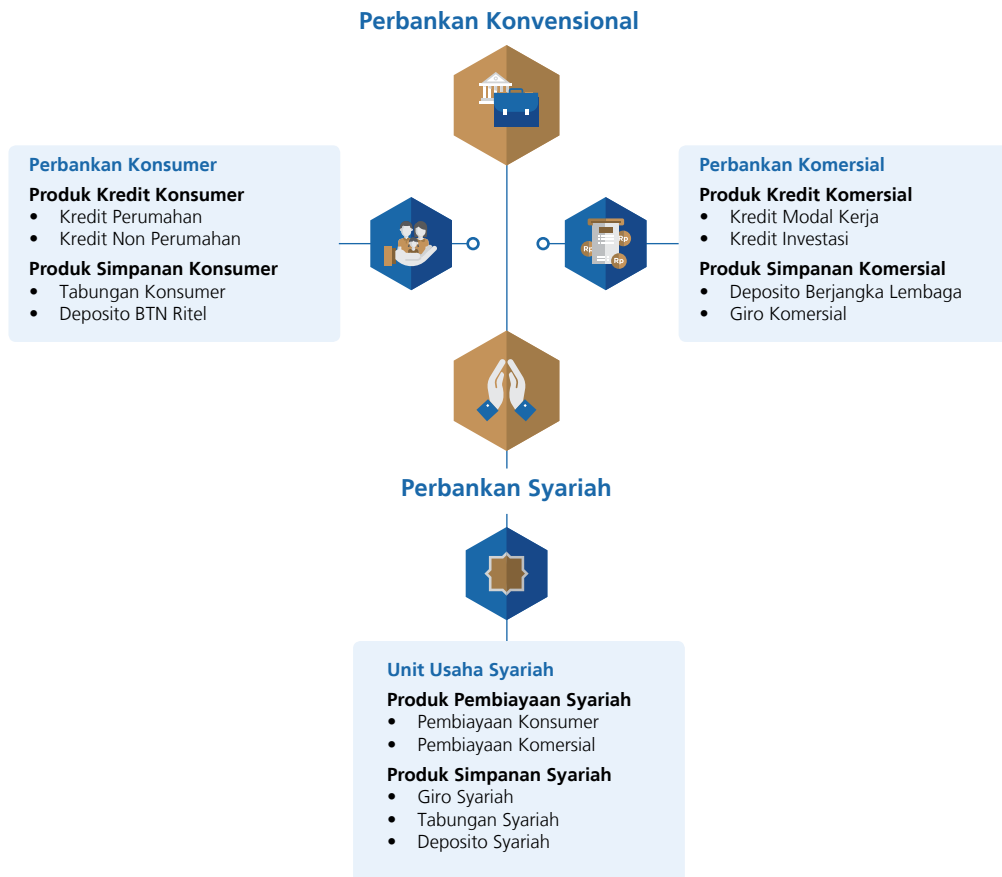
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan
Kegiatan Usaha Utama	
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;	√
2. Memberikan kredit;	√
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;	√
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: - Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; - Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah; - Sertifikat Bank Indonesia (SBI); - Obligasi - Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;	√
6. Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;	√
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;	√
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;	√
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;	-
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;	-
11. Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;	√
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;	√
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;	√
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;	-
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;	-
16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;	√
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, <i>commercial banking</i> , dan <i>investment banking</i> lainnya;	√
18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;	√
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	√
Kegiatan Usaha Penunjang	
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	√

Produk dan Jasa

Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa Perseroan meliputi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan,

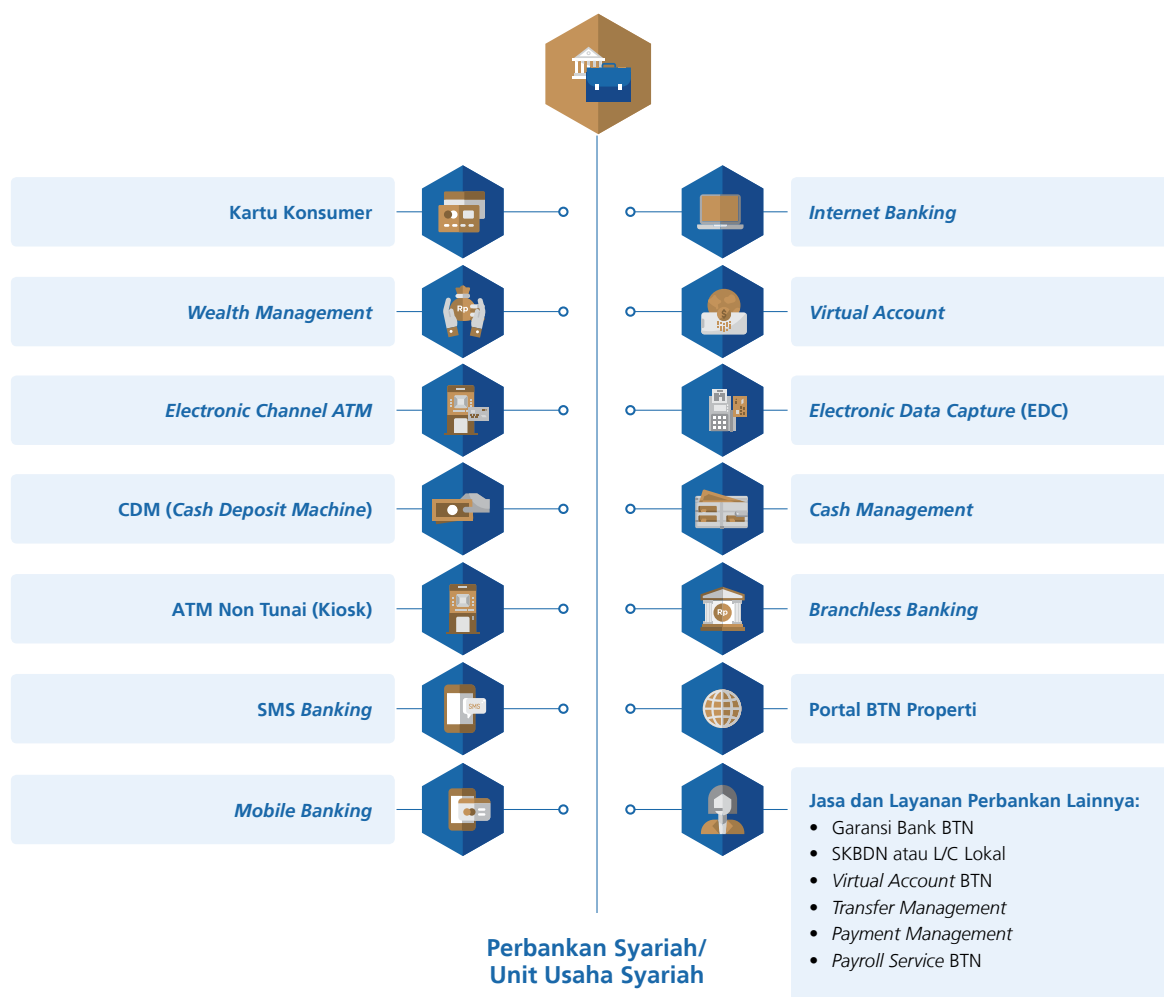
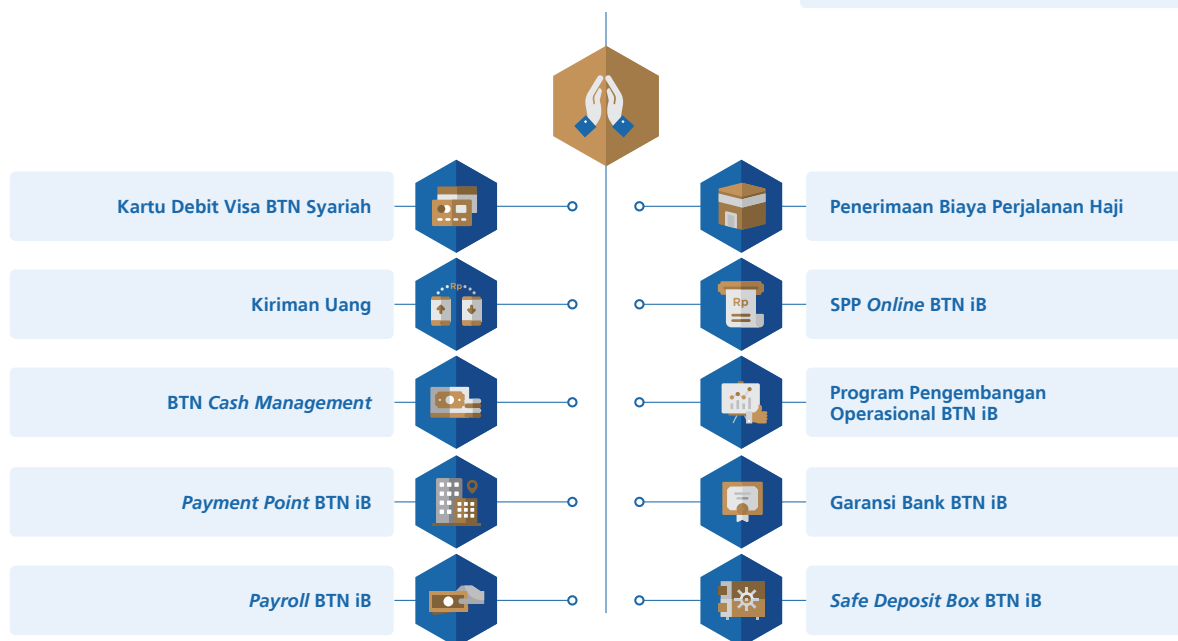
Pengembangan Produk dan Jasa Perseroan

PRODUK



JASA

Perbankan Konvensional

Perbankan Syariah/
Unit Usaha Syariah

Ragam Produk

Perbankan Konvensional

Perbankan Konsumer

1. Produk Kredit Konsumer

a. Kredit Perumahan

- KPR BTN Subsidi
Program untuk Pemilikan Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.
- KPR BTN Mikro
Produk dengan kemudahan untuk membeli lahan atau rumah, ataupun renovasi rumah secara bertahap serta untuk membangun rumah di atas lahan yang sudah dimiliki pemohon, yang diprioritaskan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.
- KPR Non Subsidi
Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR Non Subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN, dan KP Ruko.
 - KPR BTN Platinum
Kredit pemilikan rumah untuk keperluan pembelian rumah dari *developer* ataupun *non developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.
 - KPR Gaeesss!
Merupakan pengembangan fitur dari produk KPR/KPA BTN Platinum untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah atau apartemen untuk calon debitur dari segmentasi generasi millennial (21-35 tahun) dengan berbagai kemudahan dan keunggulan.
 - KPR Atlet
Program khusus untuk produk KPR/KPA BTN Platinum yang diperuntukkan bagi atlet-atlet Indonesia maupun pengurus Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
- KPA BTN
Kredit pemilikan apartemen untuk keperluan pembelian apartemen dari *developer* ataupun *non developer*, baik untuk pembelian apartemen baru atau *second*, pembelian apartemen siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

• KP Ruko BTN

Kredit pemilikan ruko untuk membeli unit rumah toko, rumah usaha, rumah kantor, maupun kios dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

• Kredit Perumahan Lainnya

• Kredit Agunan Rumah BTN

Fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan.

• Kredit Bangun Rumah BTN

Fasilitas kredit bagi yang ingin membangun rumah di atas tanah milik sendiri.

• Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

Pinjaman Uang Muka Perumahan Fasilitas pinjaman uang muka perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan KPR BTN Subsidi.

b. Kredit Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pra Pensiunan (Kring BTN Pra Pensiun), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana BTN, Kredit Pegawai.

• Kredit Ringan BTN (Kring BTN)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai pemohon.

• Kredit Ringan BTN Pra Pensiun (Kring BTN Pra Pensiun)

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji dan uang pensiun) yang gajinya belum atau telah disalurkan melalui Bank, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Jangka waktu pembiayaan ini dapat melintasi masa pensiun debitur.

• Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiun)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/POLRI, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui rekening di Perseroan.

• Kredit Swadana BTN

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun

deposito yang disimpan di Perseroan dengan maksimal kredit 90% dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- Kredit Pegawai
Fasilitas kredit lunak bagi karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

2. Produk Simpanan Konsumer

a. Tabungan Konsumer

- Tabungan BTN Batara
Tabungan serba bisa yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi untuk menunjang aktivitas keuangan nasabah.
- Tabungan BTN Prima
Tabungan investasi dengan berbagai keuntungan yang mengantarkan nasabah pada kehidupan lebih baik.
- TabunganKu
Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)
Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- Tabungan BTN e'BATARAPOS
Tabungan yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat karena dapat melakukan transaksi di Kantor Pos *Online* seluruh Indonesia.
- Tabungan BTN Cermat
Tabungan yang memberikan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui EDC dan rekening ponsel sampai ke pelosok negeri tanpa harus datang ke kantor Bank. Tabungan yang digunakan dalam program Laku Pandai.
- Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan transaksi pasar modal.
- Tabungan BTN Siap!
Tabungan berjangka yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan masa depan nasabah.
- Tabungan BTN Felas
Produk yang dapat digunakan untuk menabung, bertransaksi, dan berinvestasi dalam mata uang asing. Tersedia dalam mata uang USD dan SGD.
- Tabungan Simuda Rumahku
Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan pemuda usia 18-30 tahun sebagai sarana edukasi perencanaan kepemilikan rumah sejak dini.

b. Deposito BTN Ritel

Deposito Bank BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Manfaat Deposito Bank BTN adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

Perbankan Komersial

1. Produk Kredit Komersial

a. Kredit Perumahan

- Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi BTN
Fasilitas kredit yang ditujukan untuk pengembang. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios, dan lainnya) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran, dan lainnya) berikut sarana dan prasarannya sepanjang berdasarkan penilaian Perseroan layak/*feasible* untuk diberikan kredit. Pada kredit ini, Perseroan memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi.
- Kredit Pemilikan Lahan (KPL) BTN
Kredit yang diberikan kepada pengembang untuk pembelian lahan perumahan sederhana/bersubsidi yang pembangunannya dibiayai oleh Bank BTN.

b. Kredit Non Perumahan

- Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, Linkage Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. *Linkage Program* mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi). Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Konstruksi, Investasi, Modal Kerja, Modal Kerja Kontraktor dan Sindikasi.
- Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) BTN
Kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dengan kriteria UMKM. Kredit dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan maksimal plafon sampai dengan Rp5 Miliar.
 - Program Kemitraan
Program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi Tangguh dan mandiri.
 - Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- Kredit *Linkage* BTN
Fasilitas kredit yang diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskan/dijamin kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Kredit Korporasi
Kredit Korporasi adalah kredit yang diberikan kepada Debitur berbentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau kebutuhan investasi.
 - Kredit Modal Kerja (KMK) BTN
Kredit Modal Kerja (*Working Capital Loan*) adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai modal kerja dari suatu perusahaan.
 - Kredit Investasi BTN
Kredit Investasi (*Investment Loan*) adalah kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan dari suatu perusahaan.
 - Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)
Fasilitas kredit modal kerja untuk membantu kontraktor menyelesaikan pekerjaan mereka berdasarkan kontrak tertentu dalam jumlah hingga 60% dari nilai kontrak.
 - Kredit Sindikasi
Kredit Sindikasi adalah salah satu sistem pembiayaan kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, maupun sebagai *guarantor*) dimana beberapa Bank secara bersama-sama membiayai proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama.
 - Giro Lembaga
Giro lembaga merupakan rekening atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, badan usaha/badan hukum (termasuk di dalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat) dan semua badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - Giro Gabungan (*Joint Account*)
Giro gabungan (*joint account*) merupakan rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan/lembaga, perorangan dan/atau gabungan dari keduanya.
 - Jenis Giro BTN berdasarkan Jenis Valuta
 - Giro BTN Rupiah
Giro BTN Rupiah merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan dengan menggunakan Cek/BG, media penarikan lainnya, atau dengan BTN *Cash Management System (i-Cash/CMS)*.
 - Giro BTN Valas
Giro BTN Valas merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan Surat Perintah Pembayaran.
- b. Deposito Berjangka Lembaga
Merupakan Simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang Rupiah atau Valuta Asing dengan suku bunga yang menarik dan bersaing
- Deposito BTN Rupiah
Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.
 - Deposito BTN Valas
Deposito BTN Valas merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD) dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.
 - Deposito *On Call* Lembaga
Deposito *On Call* BTN merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD) dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 35 hari yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo sesuai perjanjian antara nasabah dan bank.

2. Produk Simpanan Komersial

a. Giro BTN

Giro BTN merupakan produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG, media penarikan lainnya, atau dengan BTN *Cash Management System (i-Cash/CMS)*.

- Jenis Giro BTN berdasarkan kepemilikan
- Giro Perorangan
Giro perorangan merupakan rekening atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha dan penarikannya dapat melalui Cek/BG, ATM dan media penarikan lainnya.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Uraian terkait Produk Pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumer

- a. KPR BTN Subsidi iB
KPR BTN Subsidi iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan *margin* rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Marjin (SSM) Menggunakan akad "*Murabahah*" (jual beli) serta skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Menggunakan akad *Musarakah Mutanaqisah* (MMQ) dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Susun, atau apartemen yang merupakan program pemerintah.
- b. KPR BTN Platinum iB
Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "*Murabahah*" (jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun *Second*.
- c. Pembiayaan Properti BTN iB (KPR HITS)
Produk Pembiayaan dengan menggunakan akad "*Musarakah Mutanaqisah*" (*sharing* kepemilikan) yang disewakan ke nasabah dengan angsuran fleksibel, dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, aset barang lainnya maupun sistem *refinancing*.
- d. KPR BTN Indent iB
Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara *indent* (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad "*istishna*" (jual beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.
- e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB
Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "*Murabahah*" (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.
- f. Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB
Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad "*Qardh, Rahn dan Ijarah*" yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gada.

- g. Pembiayaan Multijasa BTN iB
Pembiayaan dengan akad "*Kafalah bil Ujroh*" yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti: Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya *travelling* (perjalanan wisata), Paket biaya Umrah/Haji Plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- h. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB
Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad "*Murabahah*" yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, furniture dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.
- i. Pembiayaan Emasku BTN iB
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad "*Murabahah*" yang digunakan untuk pembelian emas batangan dengan cicilan tetap selama jangka waktu.
- j. Pembiayaan Talangan Haji
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad "*Qard*" yang digunakan untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

2. Pembiayaan Komersial

- a. Pembiayaan Konstruksi BTN iB
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dan industri ikutannya dengan menggunakan prinsip akad "*Musarakah*" (kerja sama), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
- b. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip akad "*Mudharabah*" (bagi hasil), atau "*Musarakah*" (kerja sama) yang diberikan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
- c. Pembiayaan Investasi BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip "*Murabahah*" (jual beli) atau "*Musarakah*" (kerja sama) yang diberikan kepada nasabah lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

- d. Pembiayaan KUR BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip "*Musarakah*" (kerjasama) atau "*Murabahah*" (jual beli) yang diberikan kepada usaha produktif dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan dan Lembaga *Linkage* untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, dengan rencana pengembalian sesuai *cashflow* nasabah.
- e. Pembiayaan Sindikasi BTN iB
Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad "*Mudharabah*" (bagi hasil), "*Musarakah*" (kerja sama), "*Murabahah*" (bagi hasil), atau "*Ijarah*" (sewa).

Produk Simpanan Syariah

1. Giro Syariah

- a. Giro BTN iB
Produk simpanan dengan prinsip "*Wadiah*" (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.
- b. Giro BTN Prima iB
Produk simpanan dengan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

2. Tabungan Syariah

- a. Tabungan BTN Batara iB
Produk simpanan dana dengan akad "*Wadiah*" (titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
- b. Tabungan BTN Prima iB
Produk simpanan dana berakad "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
- c. Tabungan BTN Haji iB dan Umroh iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad "*Mudharabah*" (bagi hasil) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

- d. TabunganKu iB
Produk simpanan dengan akad "*Wadiah*" (titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Tabungan BTN Qurban iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- f. Tabungan BTN Sempel iB
Produk Simpanan khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.
- g. Tabungan BTN Emas iB
Produk tabungan dengan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" yang digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam mempersiapkan dana untuk pembelian emas dan kebutuhan lain nasabah dimasa yang akan datang.

3. Deposito Syariah

- a. Deposito BTN iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman, dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil). Deposito ini dapat perorangan maupun lembaga.
- b. Deposito *On Call* iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil). Deposito ini dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga.

Jasa dan Layanan

Jasa dan layanan perbankan yang dimiliki Perseroan di antaranya berupa kartu konsumen, *wealth management*, *electronic channel*, dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth Management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksadana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM dan Kiosk, CDM, *Internet Banking*, *Cash Management*, SMS *Banking*, dan *Mobile Banking*. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa *trading*, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Perbankan Konvensional

1. Kartu Konsumer

a. Kartu Debit BTN

Berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus sebagai kartu debit yang mempermudah nasabah membayar transaksi dan keperluan belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat serta dapat digunakan untuk belanja *online* di berbagai *merchant online* (untuk beberapa jenis kartu ATM BTN). Kartu ATM Debit BTN saat ini memiliki varian yang cukup banyak yang disesuaikan dengan segmen tabungan. Varian kartu ATM Debit BTN antara lain adalah Kartu ATM Tabunganku, Kartu ATM Institusi, Kartu Debit BTN Visa Regular, Kartu Debit BTN Visa e'Batarapos, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa Syariah, Kartu Debit BTN Visa Gold, dan Kartu Debit BTN Visa Platinum untuk nasabah prioritas Bank BTN.

Kartu Kredit BTN membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat.

b. Kartu Suka-suka BTN

Kartu Debit Visa pertama dengan desain kartu yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing nasabah atau komunitas, serta dapat digunakan di seluruh jaringan VISA diseluruh dunia.

c. Debit BTN Online VBV (*Verified by Visa*)

Dengan Debit BTN Online VBV (*Verified by Visa*), nasabah dan dengan mudah bertransaksi *online* dengan kartu debit BTN Syariah (*e-Commerce*).

2. Wealth Management

Keberadaan bisnis *Wealth Management* memberi kontribusi dalam perolehan pendapatan melalui *fee based income* yang berasal dari penjualan produk *non banking* baik *Bancassurance*, Reksadana, maupun instrumen investasi yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam pengembangan bisnis *Wealth Management* bidang proteksi, Perseroan bekerja sama dengan beberapa mitra asuransi besar PT Zurich Topaz Life, PT Asuransi Sinarmas MSIG dan PT Asuransi Binagriya Upakara. Sedangkan dalam pengembangan produk investasi, Perseroan bekerja sama dengan mitra investasi PT. Trimegah Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Manulife Asset Management Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Insight Investment Management dan PT Mandiri Manajemen Investasi dan PT Sucorinvest Asset Management. Tahun ini Perseroan juga menjadi bagian dalam penjualan produk Sukuk Negara Ritel (SR), *Saving Bonds* Ritel (SBR), Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Tabungan (ST).

Pada tahun 2021 jaringan *Wealth Management* telah memiliki 44 *Outlet* BTN Prioritas dan 8 *Lounge* BTN Prioritas yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Layanan yang diberikan terdiri dari *Airport Executive Lounge*, *Airport Handling*, *Airport Transfer*, *Concierge Service*, *Merchant Discount*, *SMS Market Update*, Bingkisan Ulang Tahun dan Hari Raya, *Meeting Room*, *E-Consolidated Statement*, *Safe Deposit Box* dan *Priority Event*.

3. Electronic Channel ATM

Layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi-lokasi premium seperti Gallery ATM di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

4. CDM (*Cash Deposit Machine*)

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai sehingga memudahkan dalam bertransaksi, cepat dan *realtime*. Dapat menerima denominasi uang Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

5. ATM Non Tunai (Kiosk)

Sebuah mesin yang berdimensi kompak tampak modern, *touchscreen* dan mirip sebuah mesin ATM namun tidak dapat melayani penarikan uang tunai. Dapat berfungsi sebagai media promosi dan melayani transaksi finansial non tunai.

6. SMS Banking

Layanan aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) yang dapat diakses baik melalui pengiriman teks ke nomor akses 3555 atau melalui perintah USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Nasabah dapat mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* di kantor cabang Perseroan.

7. Mobile Banking

Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi *iMobile* BTN dari Google Play, Blackberry World dan Apple Store. Koneksi jalur data internet sehingga lebih murah dan efisien. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

8. Internet Banking

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media internet. Alamat website: <https://internetbanking.btn.co.id> dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Perseroan. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

9. Virtual Account

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerja sama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

10. Electronic Data Capture (EDC)

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online*.

11. Cash Management

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet. Alamat website: <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator.

12. Branchless Banking

Layanan jasa perbankan bagi nasabah bank yang dilakukan di luar wilayah jaringan kantor bank melalui kerja sama pemanfaatan jaringan teknologi informasi dengan perusahaan telekomunikasi dan atau kerja sama dengan agen yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendorong terwujudnya layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau disebut LAKU PANDAI.

13. Portal BTN Properti

Layanan khusus berbasis portal properti yang memudahkan calon debitur dalam hal pencarian *listing* proyek yang telah bekerja sama dengan Bank BTN, simulasi angsuran, pengajuan KPR/KPA secara *online*, *online live chat* 24 jam, serta fitur-fitur lainnya. Portal BTN Properti juga melengkapi fiturnya dengan teknologi 4D *Tour Service* yang memungkinkan calon debitur mendapatkan gambaran *real* terhadap unit properti yang dipilih.

14. Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumen lainnya untuk meningkatkan *Fee Based Income*, seperti pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran internet dan TV berlangganan, pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa. Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain:

a. Garansi Bank BTN

Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya (*wanprestasi*) dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

b. SKBDN atau L/C Lokal

Adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

- Melakukan pembayaran kepada Penerima atau *order*-nya atau mengaksep membayar wesel yang diterima oleh Bank
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau *order*-nya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, atau
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima.

c. Virtual Account BTN

Layanan bagi nasabah Giro Lembaga BTN berupa akun *virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan monitoring penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

d. Transfer Management

Transfer management merupakan layanan bank kepada nasabah Lembaga untuk membantu nasabah melakukan transfer dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (transfer ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). Transfer dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kode mata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).

e. *Payment Management*

Payment management merupakan bentuk kerja sama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;

- Edu *Payment/SPP Online* BTN
- Edu *Payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara *online real time*.
- *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dan lainnya).
- Pembayaran Pajak.
- Pembayaran pembelian produk Pertamina.
- Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan.
- Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI).
- Pembayaran Tagihan Rumah Sakit.
- Bank Operasional I dan II.

f. *Payroll Service* BTN

Payroll Service merupakan bentuk kerja sama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah membayar honor atau gaji karyawannya.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

1. Kartu Debit Visa BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri.

2. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama rekening Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

3. BTN Cash Management

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi *web-browser* yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

4. *Payment Point* BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin dan tetap seperti tagihan pembayaran uang pendidikan.

5. *Payroll* BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.

6. Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari Siskohat.

7. *SPP Online* BTN iB

Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan *delivery channel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *realtime* dan *online*.

8. Program Pengembangan Operasional BTN iB

Program yang diberikan kepada Nasabah lembaga dalam bentuk dana, barang, maupun fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran operasional Nasabah dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

9. Garansi Bank BTN iB

Jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan untuk suatu kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan Nasabah dengan akad "*Kafalah*" (Garansi).

10. *Safe Deposit Box* BTN iB

Tempat dalam bentuk Boks yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu dan dilengkapi system pengamanan untuk menjamin keamanan barang berharga atau dokumen penting yang disimpan dari bahaya kebakaran, perampokan, dan lainnya. Akad yang digunakan adalah "*Ijarah*" (Sewa).

Peta Wilayah Usaha

KALIMANTAN

Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	7
Kantor Cabang Pembantu	21
Kantor Kas	10
Kantor Cabang Syariah	2
Kantor Cabang Pembantu Syariah	2
Kantor Kas Syariah	1
Outlet Prioritas	5
Kantor Pos	290
ATM	116



SUMATERA

Kantor Wilayah	1
Kantor Cabang	12
Kantor Cabang Pembantu	48
Kantor Kas	28
Kantor Cabang Syariah	6
Kantor Cabang Pembantu Syariah	12
Kantor Kas Syariah	2
Outlet Prioritas	8
Kantor Pos	695
ATM	287

JAWA

Kantor Wilayah	4
Kantor Cabang	47
Kantor Cabang Pembantu	210
Kantor Kas	186
Kantor Cabang Syariah	14
Kantor Cabang Pembantu Syariah	42
Kantor Kas Syariah	4
Outlet Prioritas	27
Kantor Pos	1.612
ATM	1.471

BALI DAN NUSA TENGGARA

Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	3
Kantor Cabang Pembantu	13
Kantor Kas	6
Kantor Cabang Syariah	1
Kantor Cabang Pembantu Syariah	-
Kantor Kas Syariah	-
Outlet Prioritas	2
Kantor Pos	140
ATM	55

SULAWESI

Kantor Wilayah	1
Kantor Cabang	6
Kantor Cabang Pembantu	24
Kantor Kas	13
Kantor Cabang Syariah	2
Kantor Cabang Pembantu Syariah	3
Kantor Kas Syariah	-
Outlet Prioritas	2
Kantor Pos	126
ATM	127



Sulawesi

Papua dan Maluku

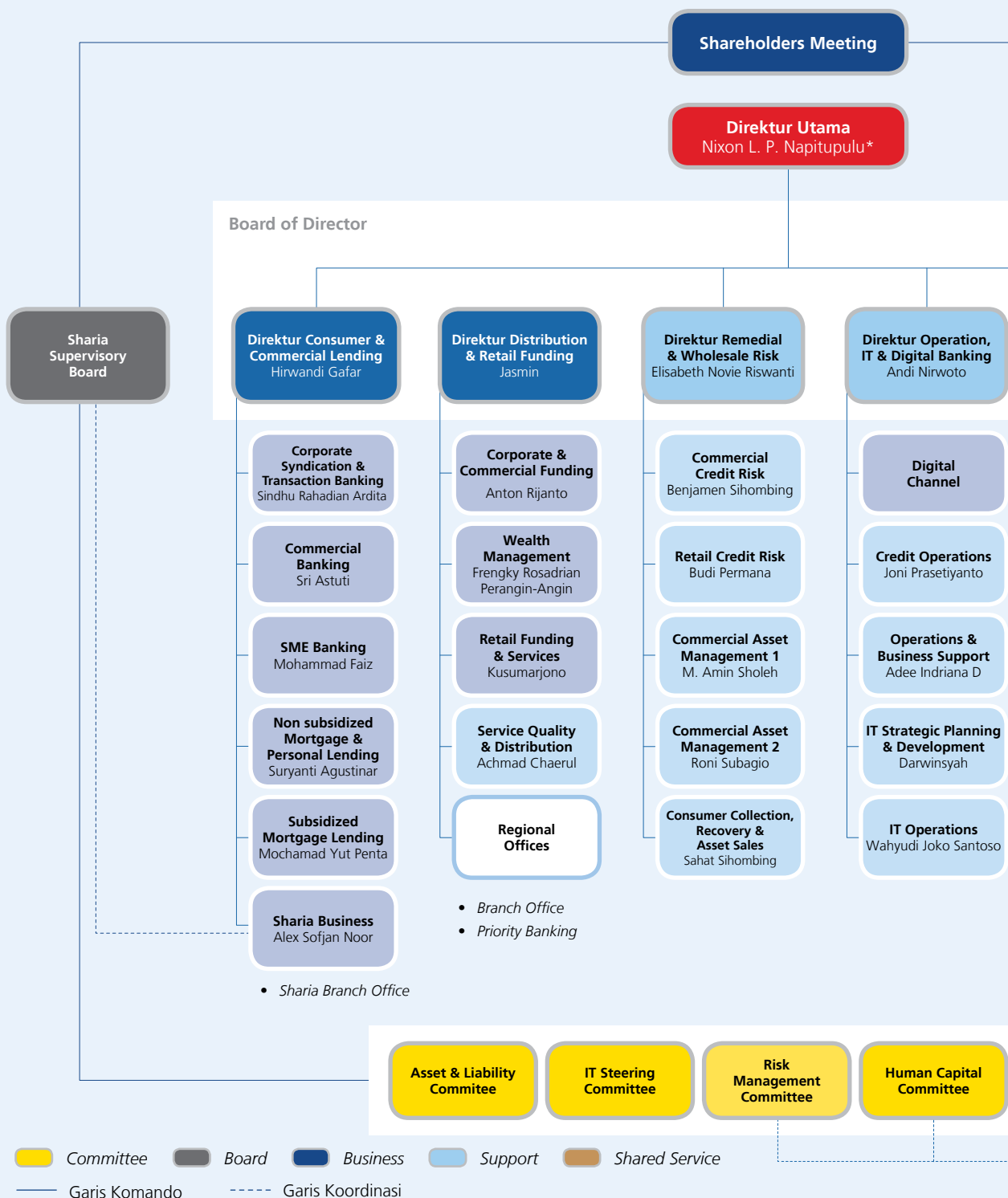
Jenis Kantor	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Cabang Syariah	25	25	24	24	23
Kantor Cabang Pembantu Syariah	59	53	48	42	36
Kantor Kas Syariah	7	7	8	7	6
Payment Point Syariah	12	12	13	13	11
Total Jaringan Kantor Syariah	103	97	93	86	76
ATM	2.086	2.159	2.126	1.964	1.964

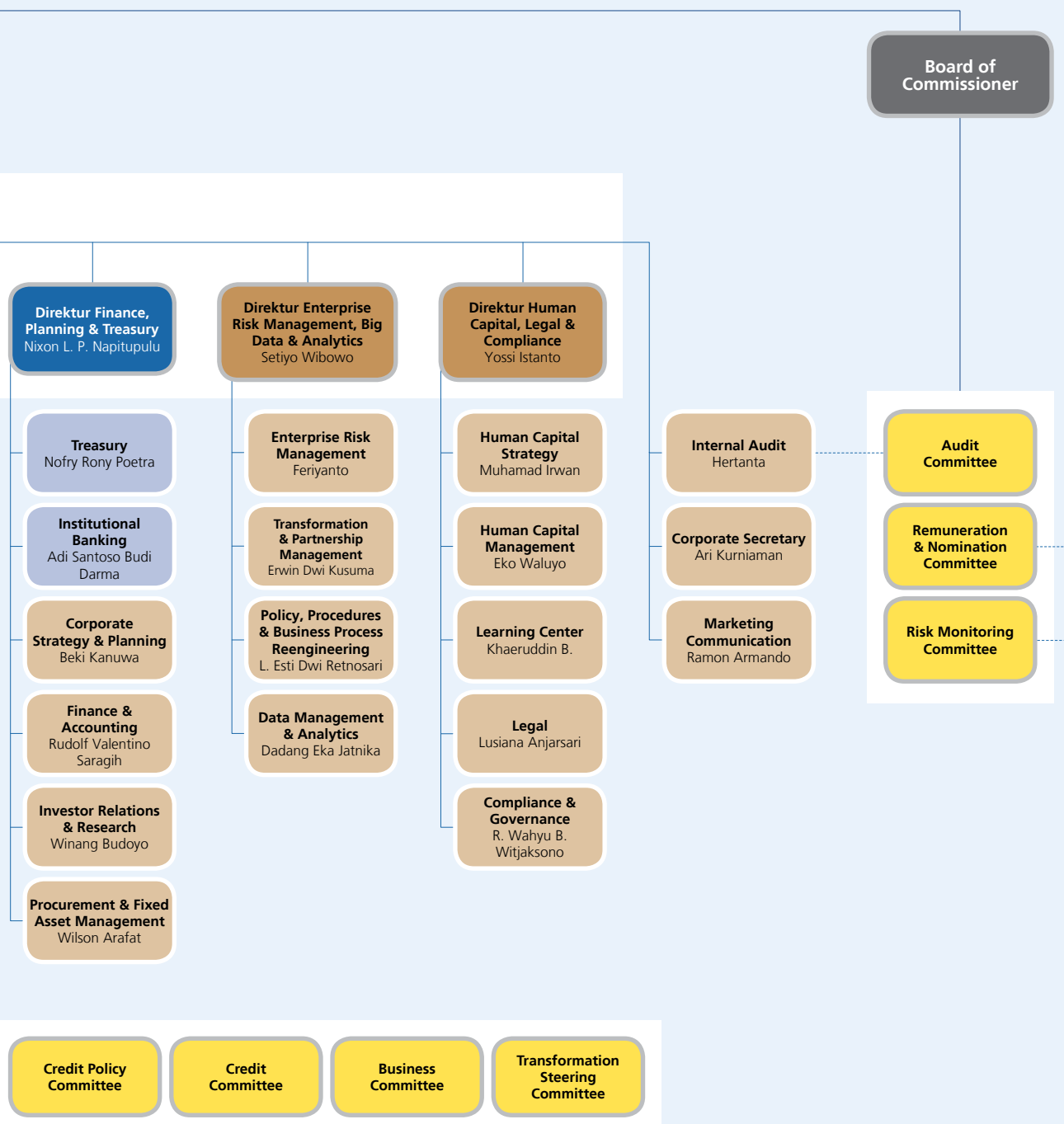
MALUKU DAN PAPUA

Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	3
Kantor Cabang Pembantu	3
Kantor Kas	5
Kantor Cabang Syariah	-
Kantor Cabang Pembantu Syariah	-
Kantor Kas Syariah	-
Outlet Prioritas	3
Kantor Pos	59
ATM	30

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perseroan Per 31 Desember 2020, yang telah ditetapkan pada tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut.





* Plt. Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury

Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan

VISI



"Menjadi the Best Mortgage Bank in Southeast Asia di Tahun 2025."



REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Visi dan Misi secara berkala ditinjau dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Hasil review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan di tahun 2020 dan rekomendasi dari McKinsey dinyatakan bahwa perumusan Visi dan Misi baru sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Visi dan Misi baru telah ditetapkan dalam *Corporate Strategy* BTN 2021-2025 dan telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank 2021-2023.

BUDAYA PERUSAHAAN



AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.



KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.



HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

MISI



Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.



Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.



Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.



Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi *digital*.



Menjadi *home of Indonesia's best talent*.

L



LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

A



ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

K



KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis.

18 (Delapan Belas) Panduan Perilaku AKHLAK bagi BTNers



Profil Dewan Komisaris



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

53 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Indonesia (1995)



Sertifikasi

- Sertifikasi UKMR Level 1 Komisaris oleh Ikatan Bankir Indonesia (2019).
- Sertifikasi UKMR Level 2 Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2020).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2014-2015).
- Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm (2012-sekarang).
- Pimpinan/Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2007-2011).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm (2012-sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.



Eko D. Heripoerwanto

Komisaris



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

59 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1987).
- Master (S2) in City Planning, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat (1994).
- Doktor (S3) bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (2009).



Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 1 Komisaris oleh LSPP (2019).



Pengalaman Kerja

- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR (2019-sekarang).
- Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan (2016).
- Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR (2015-2016).
- Asdep Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian PUPR (2013-2015).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya sejak 17 Mei 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan.



Periode Jabatan

17 Mei 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR (2019-sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.


Heru Budi Hartono
Komisaris

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia


Domisili

Jakarta Timur


Usia

55 Tahun Per Desember 2020


Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana (1984).
- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana (1995)


Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 1 Komisaris oleh LSPP (2019).


Pengalaman Kerja

- Kepala Sekretariat Presiden (2017-sekarang).
- Komisaris PT Bank DKI (2015-2018).
- Wali Kota Jakarta Utara (2014-2015).


Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.


Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama


Jabatan Rangkap

Kepala Sekretariat Presiden (2017-sekarang).


Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.


Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.


Andin Hadiyanto

Komisaris


Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia


Domisili

Bekasi


Usia

56 Tahun Per Desember 2020


Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989).
- Master of Art (M.A) (S2) dari Nagoya University, Jepang (1999).
- Doctor (S3) of Philosophy dari Nagoya University, Jepang (2000).


Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 1 Komisaris oleh LSPP (2020).


Pengalaman Kerja

- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-sekarang).
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional (2018-2019).
- Direktur Eksekutif pada World Bank Group, Washington DC, Amerika Serikat (2016 – 2018).


Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.


Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama


Jabatan Rangkap

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-sekarang).


Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.


Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.



Armand B. Arief
Komisaris Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Pusat



Usia

68 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Business Administration dari Suffolk University, Boston, Amerika Serikat (1979).
- Master (S2) Business Administration dari Curry College, Massachusetts, Amerika Serikat (1982).



Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 4 oleh LSPP (2017).



Pengalaman Kerja

- Komisioner dan Senior Consultant of Dunamis Organization Services (2016-12 Februari 2020).
- Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia (2017-2018).
- Direktur Utama PT Bank UOB Buana (2007-2015).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.



Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Timur



Usia

66 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1982).
- Master (S2) of Science bidang Policy Economics dari University of Illinois, Chicago, Amerika Serikat (1989).



Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 5 Komisaris oleh LSPP (2018).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk (2019).
- Komisaris Independen PT Bank DKI (2015-2018).
- Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.

Profil Dewan Pengawas Syariah



**Prof. Dr. H.
Muhammad Quraish
Shihab, MA**

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

77 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) bidang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1967).
- Pascasarjana (S2) bidang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1969).
- Doktor (S3) bidang dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1982).



Sertifikasi

Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (2020)



Pengalaman Kerja

- Pendiri dan Anggota Council of Muslim Elders (2014-sekarang).
- Anggota Eminent Person Group Indonesia Malaysia Person Group Indonesia Malaysia (2010).
- Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Arab, Mesir dan Jibuti (1998-2002).
- Menteri Departemen Agama (1998).
- Anggota Dewan Riset Nasional (1995-1999).
- Anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998).
- Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997).
- Anggota DPS Bank Muamalat (1992-1999).
- Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1992-1998).
- Anggota Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI (1989-sekarang).
- Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988-1996).
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1985-1998).
- Anggota MPR-RI periode 1982-1987 dan periode 1987-2002.
- Wakil Rektor IAIN Alauddin (1974-1980).
- Pembantu Pimpinan Koordinator Antar Kepolisian Indonesia Timur dalam Bidang Mental (1973-1975).
- Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta se Indonesia Timur (Kopertis Wilayah Timur) (1967-1980).



Riwayat Penunjukan

- Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya sejak 22 Januari 2019 berdasarkan Surat OJK No. SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.



Periode Jabatan

22 Januari 2019 – RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI (1989-sekarang).
- Pendiri dan Anggota Council of Muslim Elders (2014-sekarang).
- Anggota DPS USS CIMB Niaga (2009-sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN



Muhammad Gunawan
Yasni, SE, Ak., MM,
CIFA, FIIS, CRP, CA

Anggota Dewan Pengawas
Syariah (Berakhir menjabat
sejak Maret 2020)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Kota Tangerang



Usia

51 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) bidang dari Universitas Indonesia (1993).
- Pascasarjana (S2) bidang dari STIE Prasetya Mulya (1995).



Sertifikasi

Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (2020)



Pengalaman Kerja

- Dewan Pengawas Syariah di BATASA Sharia Fund (2003-2007).
- SIMAS Sharia Insurance (2004-2005).
- Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (2006-2009).
- State Owned Indonesia Exim Bank (2007-2012).
- Wakil Sekretaris – Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2015-2020).
- Dosen Kajian Timur Tengah-Islam Pascasarjana Universitas Indonesia



Riwayat Penunjukan

- Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya sejak 22 Januari 2019 berdasarkan Surat OJK No. SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.



Periode Jabatan

22 Januari 2019 – RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota DPS BRI Syariah
- Ketua Merangkap Anggota DPS pada Manulife Asset Management Indonesia
- Ketua DPS Asuransi Astra Buana



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.



**Dr. H. Mohamad
Hidayat, MBA, MH**

**Anggota Dewan Pengawas
Syariah**



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta



Usia

53 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Fakultas Syariah dari IAIN Jakarta (1992).
- Master (S2) of Business Administration (MBA) dari IPWI Jakarta.
- Pasca Sarjana (S2) bidang dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003).
- Doktor (S3) di bidang Islamic Economic and Finance dari Universitas Trisakti, Jakarta (2014).



Sertifikasi

Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (2020)



Pengalaman Kerja

- Dewan Pleno DSN-MUI.
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Dosen S-2 Pada Indonesian Banking School, Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia, dan Program IEF Universitas Trisakti.
- Advisor/supervisor pada beberapa lembaga keuangan/non keuangan syariah.
- Pengasuh Ponpes Tahfiz Al Qurna Al Wasiah Jakarta.
- Khotib tetap Masjid Istana Presiden dan Masjid Wakil Presiden RI, OJK, BI, dan lainnya.
- Penulis Buku, Mubaligh dan lainnya.



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya sejak hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.



Periode Jabatan

22 Januari 2019 – RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota DPS Bank Syariah Mandiri
- Anggota DPS PT Asuransi Manulife
- Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah
- Anggota DPS PT BRIIngin Life Syariah



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN.

Profil Direksi



Nixon L. P. Napitupulu

Plt. Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Utara



Usia

51 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1994).



Sertifikasi

- Sertifikasi UKMR Level 4 LSPP (2014)
- Sertifikasi UKMR Level 5 LSPP (2017)
- Treasury Dealer Level Advance oleh BNSP (2020)



Pengalaman Kerja

- Direktur Finance, Planning and Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (27 November 2019-saat ini).
- Direktur Finance, Treasury, & Strategy PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (29 Agustus 2019-27 November 2019).
- Direktur Collection & Asset Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (28 Desember 2017-29 Agustus 2019).
- Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos (2015-2017).
- Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).
- Head of Priority Project Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015).
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014).
- Pj Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2013).
- Group Head Micro Network Development Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2012).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur pertama kali sejak 17 Maret 2017 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan. Menjabat sebagai Plt. Direktur Utama melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 Desember 2020.



Periode Jabatan

17 Maret 2017 - RUPS Tahun 2022, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

1.220.800 lembar; 0,0115279%



Pahala N. Mansury

Direktur Utama
(Berhenti menjabat sejak
23 Desember 2020)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

50 Tahun Per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994).
- Master (S2) MBA Finance dari Leonard N. Stern School of Business, Amerika Serikat (1999).



Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (2019)



Pengalaman Kerja

- Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) (2018-2019)
- Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018)
- Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019)



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 – 23 Desember 2020



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

453.100 lembar; 0,0042786% (Per November 2020)



Hirwandi Gafar

**Direktur Consumer
and Commercial Lending**



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

52 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik/Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1992).



Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 5 (2020)



Pengalaman Kerja

- Head of Commercial Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2019).
- Head of Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2019).
- Head of Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2014-2019).
- Head of Business Development Subsidized Mortgage Department PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2013-2014).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Consumer and Commercial Lending untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

56.000 lembar; 0,0005288%



Yossi Istanto

Direktur Human Capital,
Legal and Compliance



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

47 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1996).
- Magister (S2) Hukum Bisnis dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (2004).



Sertifikasi

- Sertifikasi Legal Auditor BNSP (2016)
- Sertifikasi UKMR Level 5 (2018)
- Sertifikasi Dasar Bidang Dana Pensiun (2018)
- Sertifikasi Kurator & Pengurus Angkatan (2020)



Pengalaman Kerja

- Kepala Legal Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2017-2018).
- Kepala Legal & Loan Document Desk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2014-2017).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Human Capital, Legal and Compliance untuk pertama kalinya sejak 23 Maret 2018 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Compliance sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan.



Periode Jabatan

23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

70.200 lembar; 0,0006629%



Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Remedial
and Wholesale Risk



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi



Usia

53 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum bidang Perdata dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991).



Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (2019)



Pengalaman Kerja

- Asset Management Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2017-2019).
- Small & Medium Lending Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2015-2017).
- Commercial Housing Loan Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2013-2015).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Remedial and Wholesale Risk untuk pertama kalinya sejak 29 Agustus 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

29 Agustus 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

25.000 lembar; 0,0002361%



Andi Nirwoto

Direktur Operation,
IT and Digital Banking



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta



Usia

50 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).
- Master (S2) of Finance dari Universitas Gadjah Mada/University of Lexington Kentucky, Amerika Serikat (1997).



Sertifikasi

Sertifikasi UKMR Level 5 oleh LSPP (2019)



Pengalaman Kerja

- General Manager Operational Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).
- General Manager Divisi Solusi & Security Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Deputy General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2014).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operation, IT and Digital Banking untuk pertama kalinya sejak 23 Maret 2018 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan.



Periode Jabatan

23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

70.200 lembar; 0,0006629%



Jasmin

Direktur Distribution
and Retail Funding



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

55 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988).
- Gelar (S2) International Bussiness dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998).



Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (2019)



Pengalaman Kerja

- SEVP Consumer & Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019).
- Regional CEO IV/JKT 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018).
- Regional Manager IV-Jakarta Thamrin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Distribution and Retail Funding untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN



Setiyo Wibowo

Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Tangerang Selatan



Usia

44 Tahun Per Desember 2020



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1999).
- Gelar (S2) MBA in Finance & Banking dari KDI School of Public Policy and Management, Korea Selatan (2009).
- Executive Leadership Program - IMD Business School, Swiss (2016).



Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (2019)



Pengalaman Kerja

- Group Head Consumer Credit Risk & Analytics PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019).
- Group Head Credit Portofolio Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2018).
- Group Head Consumer Deposit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2017).



Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham Utama/Pengendali.



Kepemilikan Saham pada Perseroan

Tidak memiliki saham BBTN

Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi



Ari Kurniaman

PJ Corporate Secretary Division
Head/Vice President



Kewarganegaraan

Indonesia



Domisili

Jawa Barat



Usia

48 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

S1 Hukum Universitas Padjajaran.



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Cawang.
- 2017 menjabat Deputy Branch Manager Bandung.
- 2014 menjabat sebagai Legal Litigation & Claim Departement Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 12 Maret 2020



Hertanta

Internal Audit Division Head/
Sr. Vice President



Kewarganegaraan

Indonesia



Domisili

Jakarta



Usia

56 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran tahun 2005



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Internal Audit Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Human Capital Strategy Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Commercial Risk Division Head.
- 2015 Enterprise Risk Management Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 01 Maret 2019

Profil Pejabat Eksekutif



Anton Rijanto

**Corporate & Commercial Funding
Division Head**



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Tangerang



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Hasanudin tahun 2004.



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Commercial Funding & Services Division Head.
- 2017 menjabat sebagai PJ Commercial Funding & Service Division Head.
- 2016 menjabat sebagai Branch Manager.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 23 September 2019



Erwin Dwi Kusuma

**Transformation & Partnership
Management Division Head**



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Surabaya Timur



Usia
41 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Institut
Sepuluh November tahun 2002



Riwayat Profesi

- 2019 – 2020 menjabat sebagai Enterprise Risk Management Division Head.
- 2017 - 2018 menjabat sebagai Retail Risk Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 09 September 2020



Ramon Armando

**Marketing Communication
Division Head merangkap sebagai
Digital Channel Division Head.**



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
46 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Perdagangan dari The
University of Sydney Tahun 1998.



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai Marketing Communication Division Head.
- 2020 merangkap sebagai Digital Channel Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 01 Mei 2020



Dadang Eka Jatnika
Data Management & Analytics
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bogor



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Akuntansi dari
Universitas Diponegoro tahun 2006



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Human Capital Strategy Division Head
- 2017 menjabat sebagai Finance & Accounting Division Head.
- 2017 menjabat sebagai PLT Policy & Procedure Desk Head.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 09 September 2020



Rudolf Valentino Saragih
Finance & Accounting
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Barat



Usia
53 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S1) Ekonomi/Akuntansi
Universitas Sumatera Utara tahun 1994.



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Credit Operations Division Head.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 31 Mei 2019



Joni Prasetyanto
Credit Operations
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
52 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Hukum Bisnis dari
Universitas Indonesia tahun 2004



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Sharia Division Head
- 2017 menjabat sebagai Regional Office 3 Head



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 31 Mei 2019



Eko Waluyo

Human Capital Management
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

- Magister (S-2) Manajemen dari University of Kentucky tahun 2004
- Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2004



Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai HC Management & Culture Spec. Division Head.
- 2015 menjabat sebagai Corporate Secretary Division Head



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 07 Februari 2019



Wilson Arafat

Procurement & Fixed Asset
Management Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Barat



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Ekonomi/Manajemen Pemasaran, Universitas Gadjah Mada 2014



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Procurement and Fixed Asset Management Division.
- 2016 menjabat sebagai Transformation Management Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 02 Desember 2019



Adi Santoso Budi Darma

Institutional Banking
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
55 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila tahun 1988



Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai Institutional Banking Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 1 Juni 2017



Mohammad Faiz

Small Medium Enterprise Banking
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Hukum Universitas
Islam Indonesia tahun 1995



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai SME Lending Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Branch Manager KC Kelapa Gading Square
- 2016 menjabat sebagai Branch Manager KC Jkt Cawang



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 30 September
2019



L. Esti Dwi Retnosari

Policy, Procedure & BPR
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Fakultas Ekonomika
dan Bisnis - Universitas Gajah Mada



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Policy & Procedure Division Head.
- 2018 menjabat sebagai PLT. Policy & Procedure Desk Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 16 September
2019



Sindhu Rahadian Ardita

Corporate Syndication &
Transaction Banking Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Pusat



Usia
47 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Gadjah Mada tahun
2004



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Corporate & Loan Syndication Division.
- 2017 menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Syndication and Transactional Banking.
- 2014 -2017 menjabat sebagai Kepala Institutional Banking.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 19 November
2019



Sahat Sihombing

Consumer Collection, Recovery
& Asset Sales Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
54 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Doktor (S-3) Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2019.



Riwayat Profesi

- 2019 - 2020 sebagai Kepala Divisi Retail Risk.
- 2017- 2019 menjabat sebagai Kepala Divisi Enterprise Risk Management.
- 2017 menjabat sebagai Kepala Divisi Strategic, Innovation & Performance.
- 2016 Kepala Divisi Wealth Management.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 05 Juni 2020



Kusumarjono

Retail Funding & Service
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
52 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi, Universitas Lampung, 1990



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Bandung
- 2019 menjabat sebagai Strategic Planning & Analytic Department Head
- 2017 menjabat sebagai Strategic Planning Department Head



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 18 Mei 2020



Achmad Chaerul

Service Quality & Distribution
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
50 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2002



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Corporate Secretary Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Regional Office V (Makassar) Head.
- 2016 menjabat sebagai Branch Manager Makassar.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 01 Mei 2020



Alex Sofyan Noor

Sharia Business Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
54 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia tahun 1991



Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai Commercial Lending Division Head
- 2016 menjabat sebagai Regional Office 3 Head
- 2015 menjabat sebagai Branch Manager KC Bekasi



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 31 Mei 2019



Beki Kanuwa

Corporate Strategy & Planning Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
47 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung tahun 1996



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Corp Strategy & Alliances Management Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Corp. Strategy & Performance Management Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 18 November 2019



R. Wahyu B. Witjaksono

Compliance & Governance Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi Barat



Usia
50 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2004



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PLT. Compliance & Governance Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Internal Audit.
- 2017 menjabat sebagai Auditor Coordination Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 01 Desember 2018



Adee Indriana D

Operation & Business Support
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
48 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi
Pembangunan dari Universitas
Sebelah Maret tahun 1995



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Operation & Business Support Division Head.
- 2016 menjabat sebagai Digital Banking Development Department Head



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 07 Februari 2019



Suryanti Agustinar

Non Subsidized Mortgage &
Personal Lending Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Selatan



Usia
55 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Gadjah Mada tahun
1997



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Non Subsidized Mortgage Lending Division Head.
- 2014 menjabat sebagai Non Subsidized & Consumer Lending Divisi.
- 2013 menjabat sebagai Branch Manager Bekasi.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 01 Oktober 2019



M. Amin Sholeh

Commercial Asset Management 1
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Banyuwangi



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen
dari Universitas Sebelah Maret tahun
1993



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PJ Asset Management Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Banjarmasin.
- 2017 menjabat sebagai Commercial Loan Monitor & Restruct Department Head.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 12 November
2019



Roni Subagio

Commercial Asset Management 2
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
52 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Sarjana (S-1) Ekonomi/Akuntansi
dari Universitas Brawijaya tahun
1993



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PLT.
Commercial Risk Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Credit
Risk Housing Departement Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 01 Mei 2020



Frengky Rosadrian Perangin-Angin

Wealth Management
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
45 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Sarjana (S1) Ekonomi dan Keuangan
dari University of Oregon tahun
1997



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai Wealth
Management Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 17 Desember
2020



Lusiana Anjarsari

Legal Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Selatan



Usia
46 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir

Magister (S-2) Hukum/Hukum
Ekonomi, Universitas Indonesia 2002



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Legal
Division Head.
- 2018 menjabat sebagai PLT Legal
Division Head.



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 5 September
2019



Darwinsyah

IT Strategic Planning &
Development Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Teknik Komputer dari
Gunadarma tahun 1995



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai IT Strategic Planning & Development Division Head.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 01 Juni 2020



Wahyudi Joko Santoso

IT Operations Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari STIE
Indonesia Banking School tahun
2019



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PJ IT Operations Division Head.
- 2017 menjabat sebagai IT Security Policy, Risk & Governance DH.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 09 September
2019



Nofry Rony Poetra

Treasury Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
52 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Business
Administration, The George
Washington University, USA



Riwayat Profesi

- 2016 Treasury Division Head.
- 2014 menjabat sebagai Treasury Division Head
- 2013 Menjabat Sebagai Institutional Banking Division Head.
- 2012 menjabat sebagai Post Office Alliance Desk Head



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 21 April 2014



Mochamad Yut Penta
Subsidized Mortgage Lending
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bandung



Usia
50 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen
Universitas Gadjah Mada 2004



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Subsidized Mortgage Lending Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Roll Out Project Lead.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 18 November 2019



Sri Astuti
Commercial Banking
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Yogyakarta



Usia
47 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi, Universitas
Islam Indonesia 1995



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PJ. Commercial Banking Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Corporate & Loan Syndication Departement Head.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 31 Desember 2019



Muhamad Irwan
Human Capital Strategy
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Utara



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi Universitas
Pancasila 1996



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PLT. Transformation Management Office Head.
- 2018 menjabat sebagai Infrastructure & GRC Transformation DH.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 09 September 2020



Benjamin Sihombing
Commercial Credit Risk Division
Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
50 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi/Manajemen
Universitas Sumatera Utara, 1993



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai PJ Regional Office IV (Batam) Head.
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Bekasi.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 01 Juni 2020



Khaeruddin B.
Learning Center Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Tangerang



Usia
54 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Gadjah Mada tahun
1999



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai School of Operational Banking Department Head.
- 2017 menjabat sebagai Associate School of Operational Banking.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 03 Februari 2020



Feriyanto
Enterprise Risk Management
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
52 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Gadjah Mada tahun
2001



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Kelapa Gading Square.
- 2016 menjabat sebagai Deputy Branch Manager Business Kelapa Gading Square.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 09 September
2020



Winang Budoyo

Investor Relations & Research
Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Tangerang



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Master (S-2) of Economic Studies
dari University of Queensland,
Australia tahun 2002



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai Investor Relations & Research Division dan Chief Economist
- 2018 menjabat sebagai Investor Relations Department Head dan Chief Economist
- 2016 menjabat sebagai Chief Economist



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 01 Februari 2020



Budi Permana

Retail Credit Risk Division Head



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
48 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi dari
Universitas Syiah Kuala tahun 1997



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai PJ Retail Risk Division Head
- 2020 menjabat sebagai Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division Head
- 2019 menjabat sebagai Commercial Asset Sales I Department Head



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 05 Juni 2020



Manahan Hutapea

Regional Office I Head (Bekasi)



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
52 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi dari
Universitas Sumatera Utara



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Regional Office Head
- 2018 menjabat sebagai Regional Office IV Head, General Management
- 2017 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, General Management



Riwayat Jabatan

Menjabat sejak: 18 November 2019



Dewi Fitrianingrum

Regional Office II Head
(Jakarta Banten)



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Jakarta Selatan



Usia
53 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Gadjah Mada tahun
1998



Riwayat Profesi

- 2017 menjabat sebagai Regional Office 2 Head
- 2015 menjabat sebagai Commercial Funding & Services Division Head



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 01 Oktober 2017



Paulus Hes

Regional Office III Head
(Surabaya)



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Medan



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Teknik Pertambangan
dari Institut Teknologi Bandung
tahun 1995



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai PLT Regional Office III Head.
- 2019 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business Regional Office III.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 01 Oktober 2020



Nurwidi Purboyo

Regional Office IV Head
(Batam)



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Surabaya



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Sarjana (S-1) Ekonomi dari
Universitas Airlangga tahun 1992



Riwayat Profesi

- 2020 menjabat sebagai PJ Regional Office 4 Head.
- 2019 menjabat sebagai DRM Support Regional Office 3.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 01 Juni 2020



Edward Alimin Sjarief

Regional Office V Head
(Makassar)



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
51 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen dari
Universitas Terbuka tahun 2013



Riwayat Profesi

- 2019 menjabat sebagai Regional Office Head.
- 2015 menjabat sebagai Sharia Business Deputy.



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 5 September 2019



Ferry Sipahutar

Regional Office VI Head
(Semarang)



Kewarganegaraan
Indonesia



Domisili
Citeureup



Usia
49 Tahun Per Desember 2020.



Pendidikan Terakhir
Magister (S-2) Manajemen, UGM &
University of Kentucky USA, 2004



Riwayat Profesi

- 2018 menjabat sebagai Retail Funding & Service Division Head
- 2016 menjabat sebagai Service Quality & Network Division Head



Riwayat Jabatan
Menjabat sejak: 18 Mei 2020

Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

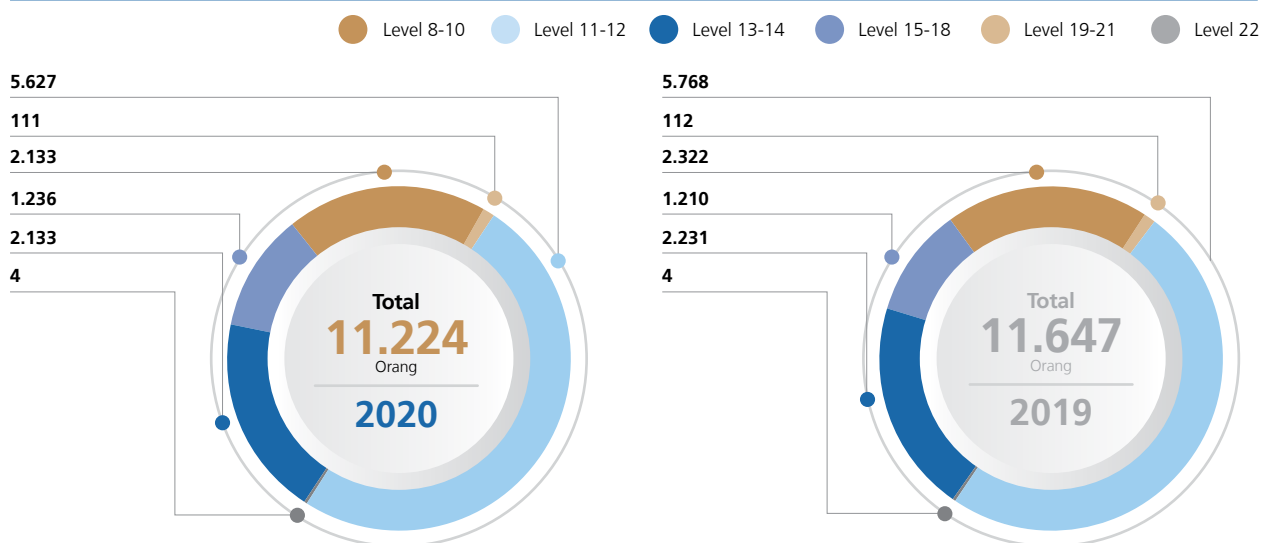
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

(dalam satuan orang)

Level Organisasi	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Level 22	2	2	4	2	2	4
Level 19-21	92	19	111	93	19	112
Level 15-18	919	317	1.236	910	300	1.210
Level 13-14	1.379	754	2.133	1.503	819	2.322
Level 11-12	2.880	2.747	5.627	2.950	2.818	5.768
Level 8-10	849	1.264	2.113	885	1.346	2.231
Jumlah	6.121	5.103	11.224	6.343	5.304	11.647

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

(dalam satuan orang)



Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

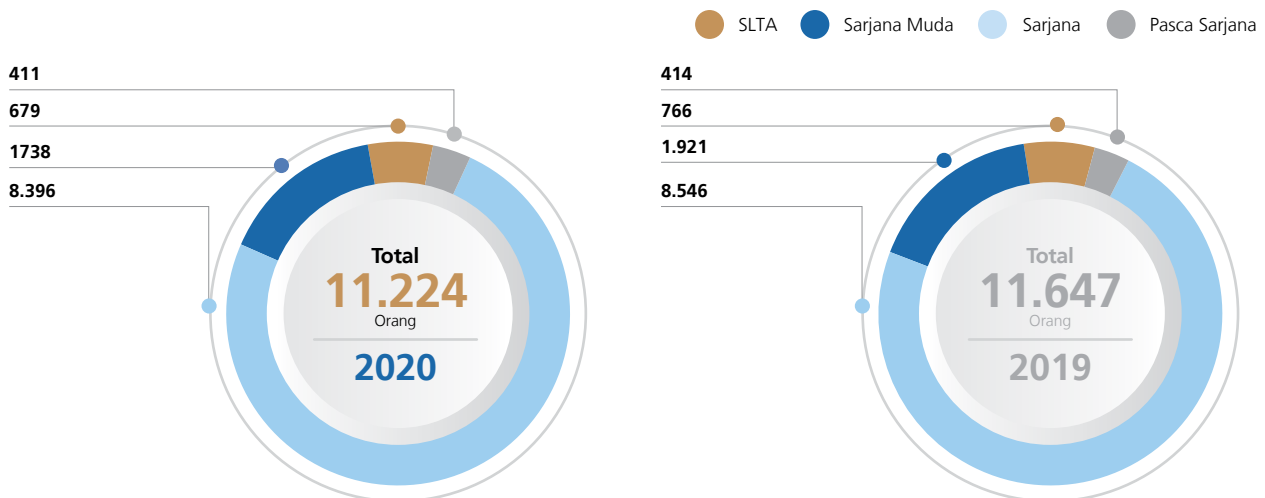
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pasca Sarjana	294	117	411	303	111	414
Sarjana	4.822	3.574	8.396	4.895	3.651	8.546
Sarjana Muda	754	984	1.738	847	1.074	1.921
SLTA	251	428	679	298	468	766
Jumlah	6.121	5.103	11.224	6.343	5.304	11.647

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)



Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

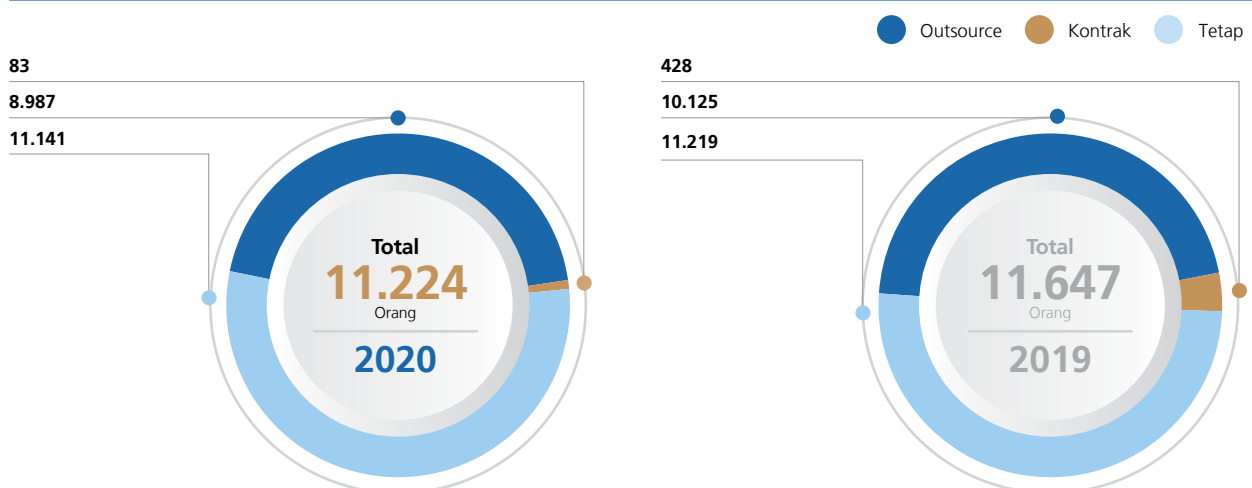
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap	6.064	5.077	11.141	6.150	5.069	11.219
Kontak	57	26	83	193	235	428
Jumlah Tanpa Pegawai <i>Outsource</i>	6.121	5.103	11.224	6.343	5.304	11.647
<i>Outsource</i>	7.831	1.156	8.987	9.113	1.013	10.125
Jumlah Termasuk Pegawai <i>Outsource</i>	13.952	6.259	20.211	15.456	6.317	21.772

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)



Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

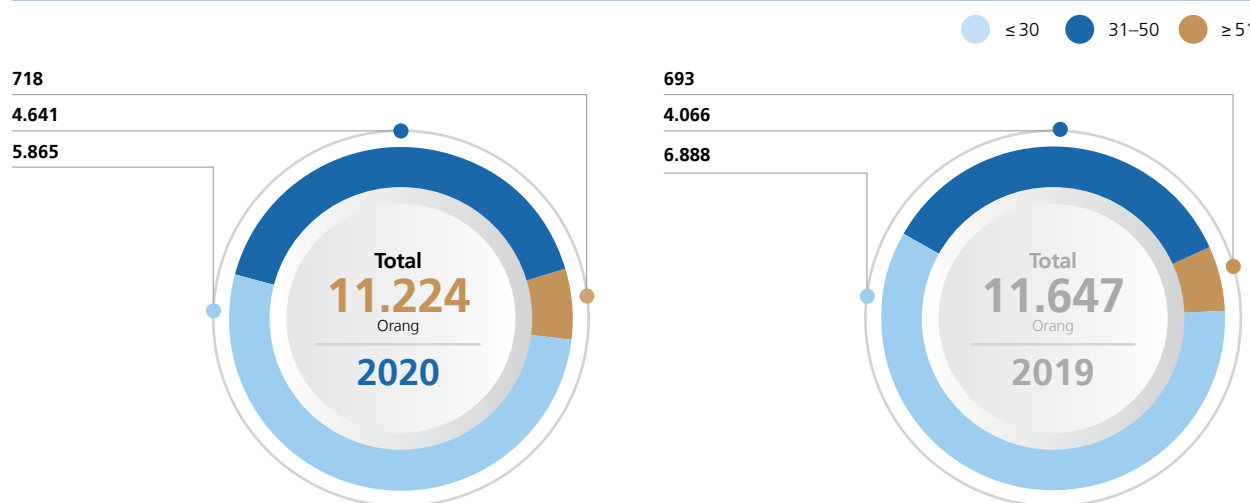
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
≥ 51	478	240	718	466	227	693
31–50	2.594	2.047	4.641	2.313	1.753	4.066
≤ 30	3.049	2.816	5.865	3.564	3.324	6.888
Jumlah	6.121	5.103	11.224	6.343	5.304	11.647

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)



Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

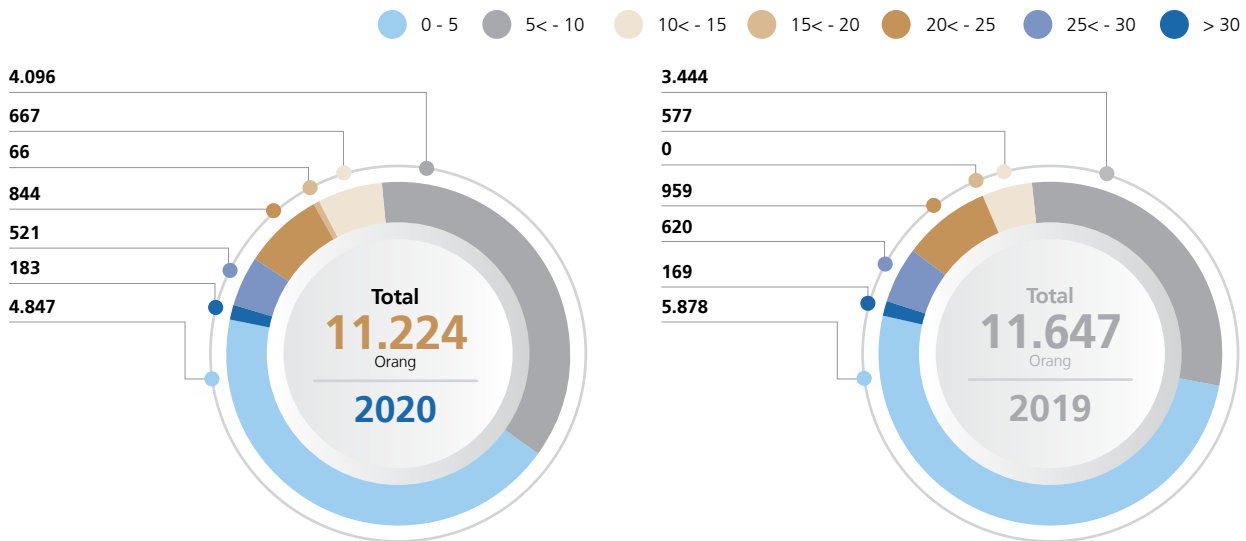
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)

Masa Kerja (Tahun)	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
>30	116	67	183	127	42	169
25< - 30	291	230	521	369	251	620
20< - 25	709	135	844	765	194	959
15< - 20	0	66	66	-	-	-
10< - 15	294	373	667	232	345	577
5< - 10	2.120	1.976	4.096	1.562	1.882	3.444
0 - 5	2.591	2.256	4.847	3.288	2.590	5.878
Jumlah	6.121	5.103	11.224	6.343	5.304	11.647

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

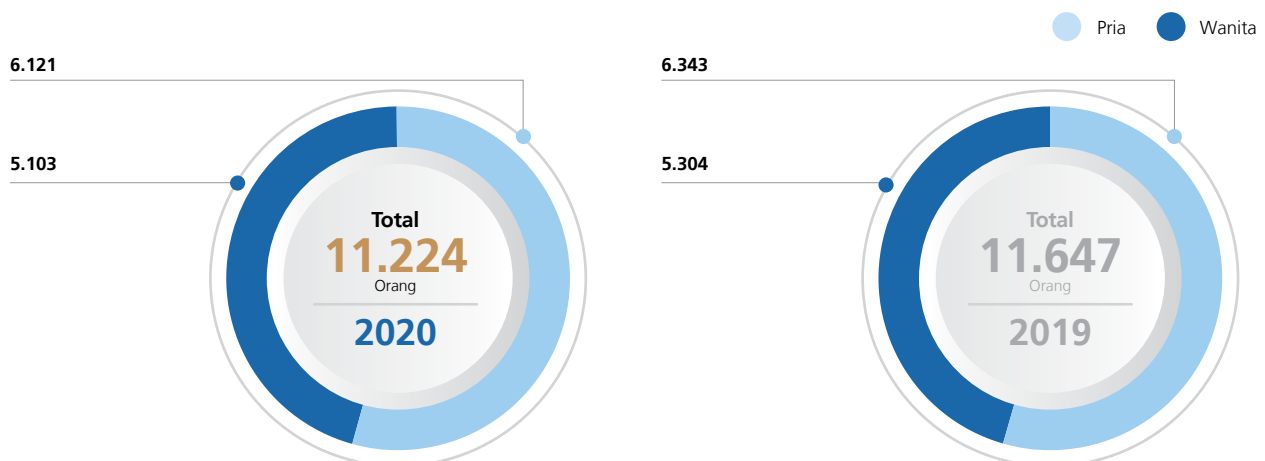
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2020	2019
Pria	6.121	6.343
Wanita	5.103	5.304
Jumlah	11.224	11.647

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

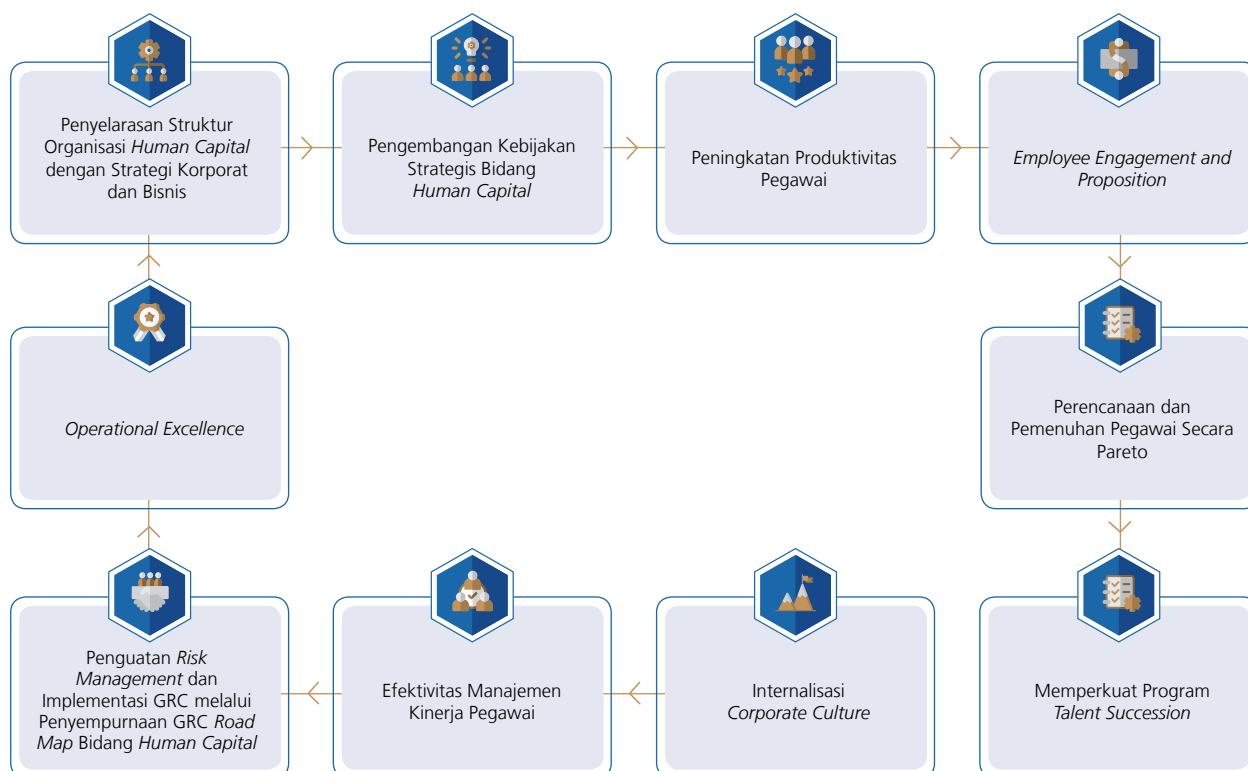


Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kebijakan

Perseroan menekankan pentingnya pengelolaan SDM atau *Human Capital* sebagai modal utama bagi Perseroan untuk menghadirkan produk dan jasanya, mewujudkan operasional dan *service excellence*, serta menciptakan organisasi yang mampu menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis secara

berkelanjutan. Perseroan memandang pegawai sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan besar terhadap laju perkembangan Perseroan. Untuk itu, Perseroan merumuskan kebijakan strategis terkait pengembangan *Human Capital* yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan talenta pribadi dari setiap pegawai.



Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Pengembangan kompetensi SDM berupa pendidikan dan pelatihan menjadi agenda prioritas bagi Perseroan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Berikut tabel jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai Perseroan berdasarkan level jabatan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing masing level organisasi pada periode Januari hingga Desember 2020.

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2020

No	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Jenis Pelatihan
1	KOMISARIS			6	6	100%	
		Leadership	Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		6		100%
		Sales & Service	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang sales and service		0		0%

No	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Jenis Pelatihan
		Credit & Risk	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		0		0%
		Business & Sharia Banking	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		0		0%
		Operational Banking	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		2		33%
2	DIREKSI			8	8	100%	
		Leadership	Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		0		0%
		Sales & Service	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		1		12,5%
		Credit & Risk	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		0		0%
		Business & Sharia Banking	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		1		12,5%
		Operational Banking	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		4		50%
3	EXECUTIVE VICE PRESIDENT			4	4	100%	
		Leadership	Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		3		75%
		Sales & Service	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		2		50%
		Credit & Risk	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		1		25%
		Business & Sharia Banking	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		0		0%
		Operational Banking	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		4		100%

No	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Jenis Pelatihan
4	SENIOR VICE PRESIDENT			11	10	91%	
	Leadership		Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		9		82%
	Sales & Service		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang sales and service		8		73%
	Credit & Risk		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		1		9%
	Business & Sharia Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang Sharia Banking		1		9%
	Operational Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		10		91%
5	VICE PRESIDENT			100	99	99%	
	Leadership		Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		85		85%
	Sales & Service		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang sales and service		82		82%
	Credit & Risk		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		52		52%
	Business & Sharia Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang Sharia Banking		2		2%
	Operational Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		99		99%
6	ASSISTANT VICE PRESIDENT			157	157	100%	
	Leadership		Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		128		82%
	Sales & Service		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang sales and service		141		90%
	Credit & Risk		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		74		47%

No	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Jenis Pelatihan
		<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		14		9%
		<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		157		100%
7	SENIOR MANAGER			183	181	99%	
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		144		79%
		<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		159		87%
		<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		96		52%
		<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		26		14%
		<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		180		98%
8	MANAGER			896	888	99%	
		<i>Leadership</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		559		62%
		<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		758		85%
		<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		434		48%
		<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		286		32%
		<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		887		99%

No	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Jenis Pelatihan
9	ASSISTANT MANAGER			2.133	2.123	99%	
	Leadership		Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		838		39%
	Sales & Service		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang sales and service		1744		82%
	Credit & Risk		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		807		38%
	Business & Sharia Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang Sharia Banking		475		22%
	Operational Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		2.123		100%
10	STAFF			7.740	7.733	99%	
	Leadership		Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		913		12%
	Sales & Service		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang sales and service		6.246		81%
	Credit & Risk		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di bidang kredit dan risiko kredit		1.996		26%
	Business & Sharia Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum, dan sebagainya dalam bidang Sharia Banking		3.537		46%
	Operational Banking		Meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		7.726		99%
JUMLAH TOTAL				11.244	11.195	99%	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan *training* baik dari segi pembaharuan materi, metode penyampaian *training*, kualitas pengajar maupun fasilitas *training*, Perseroan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai yang terbagi dalam 4 (empat) level evaluasi (Metode *Kirk Patrick*), yaitu:

- Level 1 (L1) adalah evaluasi untuk menilai reaksi peserta terhadap penyelenggaraan *training*. Hal ini mencakup kesesuaian materi, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi dan ketersediaan fasilitas *training*.
- Level 2 (L2) adalah evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani *training*. Evaluasi ini dapat berupa ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi *training*.
- Level 3 (L3) adalah evaluasi untuk menilai implementasi materi *training* dan perubahan perilaku peserta *training* sebelum dan setelah *training* berlangsung. Evaluasi ini dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah *training* dilaksanakan. Proses penilaiannya dilakukan dengan metode multirater yaitu meminta penilaian/pendapat dari pegawai, atasan, rekan kerja, bawahan dari pegawai tersebut.
- Level 4 (L4) adalah evaluasi untuk menilai dampak *training* yang telah diikuti pegawai terhadap peningkatan kinerjanya. Evaluasi ini dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak berlangsungnya *training*.

Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan 2.639 kelas *training* dengan jumlah 123.343 peserta.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Tahun 2020 Perseroan telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tercatat mengalami penyusutan sebesar 56,1% dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan Perseroan menetapkan metode *delivery blended learning* yang menggabungkan *online learning* dan *classroom* sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas dari masing-masing program pendidikan dan pelatihan serta masih sejalan untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai salah satunya melalui kompetensi yang dimiliki. Selain itu dengan adanya pandemi COVID-19, terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dilaksanakan dengan metode *Classroom*, harus dikonversi menjadi *Virtual Classroom* untuk mengurangi penyebaran COVID-19, sehingga diperoleh penghematan yang cukup besar atas kegiatan tersebut. Adapun besaran biaya pengembangan kompetensi pegawai secara total dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi

Biaya Pengembangan Kompetensi (dalam jutaan Rp)		Pertumbuhan	
2020	2019	Dalam mata uang (Rp)	Dalam persen
41.993	95.714	-53.721	-56,1

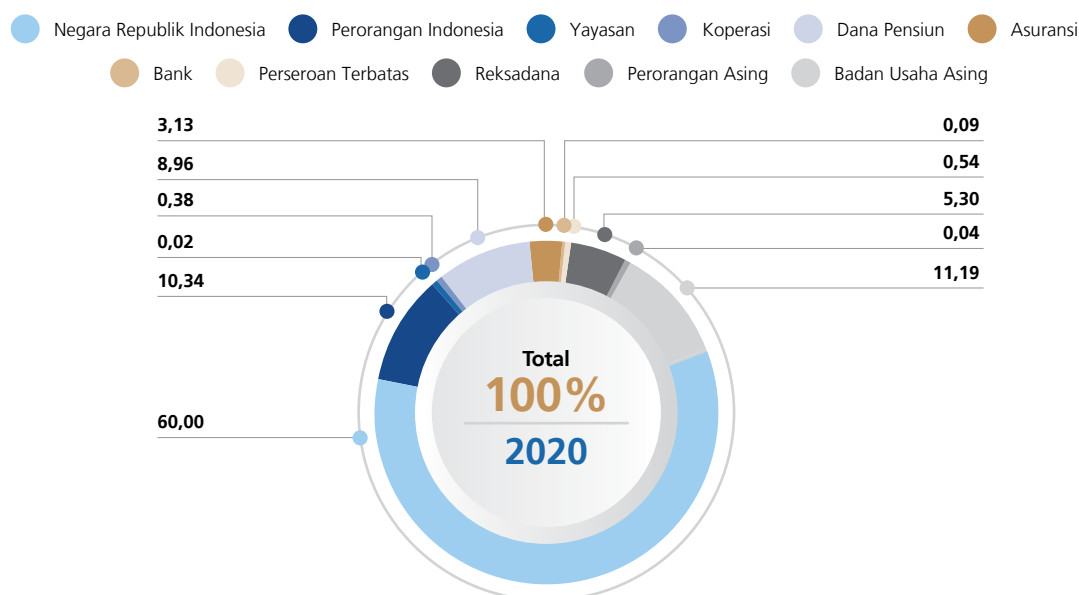
Komposisi Pemegang Saham

Tabel Komposisi Pemegang Saham Perseroan Per Desember 2020

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
DOMESTIK			
Negara Republik Indonesia	1	6.354.000.000	60,00
Perorangan Indonesia	37.840	1.095.134.519	10,34
Koperasi	9	2.215.700	0,02
Yayasan	13	40.159.647	0,38
Dana Pensiun	105	948.900.365	8,96
Asuransi	66	331.966.114	3,13
Bank	1	9.965.200	0,09
Perseroan Terbatas	105	57.031.140	0,54
Reksadana	200	560.777.261	5,30
Sub Total	38.340	9.400.149.946	88,76
ASING			
Perorangan Asing	97	4.706.240	0,04
Badan Usaha Asing	206	1.185.143.814	11,19
Sub Total	303	1.189.850.054	11,24
TOTAL	38.643	10.590.000.000	100,00

Diagram Komposisi Pemegang Saham Perseroan Per Desember 2020

(dalam %)



Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Perseroan

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Dana Pensiun	389.275.808	3,68
2.	PT TASPEN	Dana Pensiun	230.794.200	2,18
3.	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Dana Pensiun	132.537.500	1,25
4.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	Badan Usaha Asing	127.975.700	1,21
5.	JPMBSAS UCITS CLT RE-HANDELSBANKENTILLVAXTMARKNAD TEMA	Badan Usaha Asing	122.000.000	1,15
6.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Reksadana	89.112.000	0,84
7.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 23	Badan Usaha Asing	87.288.600	0,82
8.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	Dana Pensiun	77.756.000	0,73
9.	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP	Badan Usaha Asing	73.217.100	0,69
10.	PT AIA FINL - UL EQUITY	Asuransi	53.156.082	0,50
11.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	51.021.199	0,48
12.	MANULIFE DANA EKUITAS	Asuransi	49.833.836	0,47
13.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	46.921.038	0,44
14.	RD PREMIER ETF INDO STATE- OWNED COMPANIES-889064000	Reksadana	41.782.878	0,39
15.	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF-2144613424	Badan Usaha Asing	41.100.276	0,39
16.	REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA	Reksadana	37.200.000	0,35
17.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	Badan Usaha Asing	30.958.796	0,29
18.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIO	Badan Usaha Asing	29.991.935	0,28
19.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REP	Asuransi	28.000.000	0,26
20.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	Badan Usaha Asing	27.316.427	0,26

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Perseroan

Nama Investor	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	6.354.000.000	60,00

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

No.	Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
DOMESTIK				
1.	Perorangan Indonesia	37.840	1.095.134.519	10,34
2.	Koperasi	9	2.215.700	0,02
3.	Yayasan	13	40.159.647	0,38
4.	Dana Pensiun	105	948.900.365	8,96
5.	Asuransi	66	331.966.114	3,13
6.	Bank	1	9.965.200	0,09
7.	Perseroan Terbatas	105	57.031.140	0,54
8.	Reksadana	200	560.777.261	5,30
Sub Total		38.339	3.046.149.946	28,76
INTERNATIONAL				
1.	Perorangan Asing	97	4.706.240	0,04
2.	Badan Usaha Asing	206	1.185.143.814	11,19
Sub Total		303	1.189.850.054	11,24
Total		38.642	4.236.000.000	40,00

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
DEWAN KOMISARIS				
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	-	0,0000000
2.	Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	-	0,0000000
3.	Heru Budi Hartono	Komisaris	-	0,0000000
4.	Andin Hadiyanto	Komisaris	-	0,0000000
5.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	0,0000000
6.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	-	0,0000000
DIREKSI				
1.	Nixon L. P. Napitupulu	Plt. Direktur Utama	1.220.800	0,0115279
2.	Pahala N. Mansury*	Direktur Utama	-	0,0000000
3.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	56.000	0,0005288
4.	Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal and Compliance	70.200	0,0006629
5.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	25.000	0,0002361
6.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT and Digital Banking	70.200	0,0006629
7.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	-	0,0000000
8.	Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics	-	0,0000000
Total			1.442.200	0,0136185

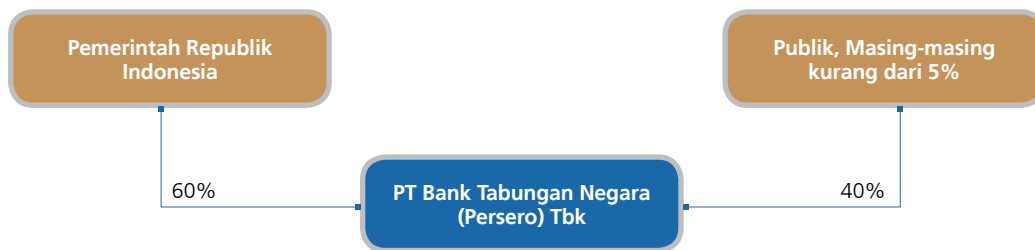
*Berhenti menjabat sejak 23 Desember 2020

Sampai dengan Desember 2020, tidak terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2020 maupun tanggal disampaikan data/informasi ini, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Struktur Grup Perusahaan



Per 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Kronologi Penerbitan Saham

Pencatatan Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*)

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat. Pencapaian IPO (*Initial Public Offering*) tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan *oversubscribe* sebanyak 2,04 kali dengan nilai *proceed* sebesar Rp1,88 triliun. Hal tersebut mendapatkan penghargaan “Best IPO in Indonesia 2009” dari majalah The Asset dan “Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009” dari Publisher Alpha South Asia (Hong Kong).

Aksi Korporasi	Penawaran Umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>)
Tahun Penerbitan Saham	17 Desember 2009
Jumlah Saham yang Ditawarkan	2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan
Nilai Nominal Saham	Rp500 per lembar saham
Harga Penawaran	Rp800 per lembar saham
Jumlah Saham Sebelum IPO	0 lembar saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah IPO	8.623.285.575 lembar saham Seri B
Pencatatan Bursa	Bursa Efek Indonesia

Penawaran Umum Terbatas I – *Rights Issue*

Pada tanggal 23 November 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (*floating shares*). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal sekaligus untuk mendukung pertumbuhan kredit, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN.

Aksi Korporasi	Penawaran Umum Terbatas I - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/ <i>Rights Issue</i>
Jumlah Saham yang Ditawarkan	1.512.857.500 Saham Seri B
Nilai Nominal Saham	Rp500
Harga Pelaksanaan	Rp1.235
Jumlah Saham Tercatat Sebelum <i>Rights Issue</i>	8.859.291.500
Jumlah Saham Tercatat Setelah <i>Rights Issue</i>	10.481.074.500 lembar saham
Jumlah Dana (<i>Proceeds</i>) Diterima	Rp1.868.379.012.500
Rasio Konversi	555.000 Saham Lama berhak atas 94.943 HMETD
Dilusi Kepemilikan	14,61% sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% setelah pelaksanaan MESOP
Periode Perdagangan HMETD	23 - 29 November 2012
Periode Pelaksanaan HMETD	23 - 29 November 2012
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	23 November 2012
Pencatatan Bursa	Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi Serta Efek Lainnya

Kronologi pencatatan efek lainnya yang dilakukan Perseroan terdiri dari pencatatan Obligasi, Sekuritisasi KPR, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), dengan kronologis sebagai berikut:

Kronologi Penerbitan Obligasi

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi Perseroan

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)	Harga Penawaran	
Obligasi Bank BTN I Tahun 1989	25 Juli 1989	5	IDR	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN II Tahun 1990	21 April 1990	5	IDR	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN III Tahun 1991	25 November 1991	5	IDR	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN IV Tahun 1992	31 Desember 1992	5	IDR	100.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN V Tahun 1993	29 Januari 1993	5	IDR	150.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VI Tahun 1995	8 Desember 1995	5	IDR	350.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VII Tahun 1996	27 Juni 1995	5	IDR	200.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VIII Tahun 1997	27 Juni 1997	5	IDR	400.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN IX Tahun 2003	18 September 2003	5	IDR	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN X Tahun 2004	10 Mei 2004	5	IDR	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Subordinasi BTN I Tahun 2004	10 Mei 2004	10	IDR	250.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005	28 Juni 2005	5	IDR	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XII Tahun 2006	19 September 2006	10	IDR	1.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A	29 Mei 2009	3	IDR	300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B	29 Mei 2009	4	IDR	300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat
				2020	2019	2018	
	25 Juli 1994	18,75% tetap	Lunas	-	-	-	-
	1 Juni 1995	16,25% tetap	Lunas	-	-	-	-
	11 November 1996	20,00% tetap	Lunas	-	-	-	-
	23 Januari 1996	17,00% tetap	Lunas	-	-	-	-
	31 Juli 1998	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-	-
	21 Desember 2000	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-	-
	22 Juli 2001	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-	-
	18 Juli 2002	14,15% tetap	Lunas	-	-	-	-
	2 Oktober 2008	12,50% tetap	Lunas	-	-	-	-
	25 Mei 2009	12,20% tetap	Lunas	-	-	-	-
	25 Mei 2014*	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan	Lunas	-	-	-	-
	6 Juli 2010	12,00% tetap	Lunas	-	-	-	-
	19 September 2016	12,75% tetap	Lunas	-	-	-	-
	29 Mei 2012	11,75% tetap	Lunas	-	-	-	-
	29 Mei 2013	12,00% tetap	Lunas	-	-	-	-

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)	Harga Penawaran
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C	29 Mei 2009	5	IDR	900.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Bank BTN XIV Tahun 2010	11 Juni 2010	10	IDR	1.650.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	28 Juni 2011	10	IDR	1.300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	5 Juni 2012	10	IDR	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2013	10	IDR	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri A	8 Juli 2015	3	IDR	900.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	8 Juli 2015	5	IDR	500.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	8 Juli 2015	7	IDR	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	8 Juli 2015	10	IDR	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A	30 Agustus 2016	3	IDR	1.347.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	30 Agustus 2016	5	IDR	1.653.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A	13 Juli 2017	3	IDR	1.466.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	13 Juli 2017	5	IDR	1.295.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	13 Juli 2017	7	IDR	853.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	13 Juli 2017	10	IDR	1.386.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	28 Juni 2019	370 Hari	IDR	1.756.500	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	28 Juni 2019	3	IDR	1.168.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	28 Juni 2019	5	IDR	1.219.500	100% dari jumlah pokok Obligasi
Junior Global Bond Bank BTN	23 Januari 2020	5	USD	300	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A	19 Agustus 2020	370 (hari)	IDR	577.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B	19 Agustus 2020	3	IDR	727.000	100% dari jumlah pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C	19 Agustus 2020	5	IDR	196.000	100% dari jumlah pokok Obligasi

*Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009.

Nama Bursa Tempat Obligasi Perusahaan Dicatatkan

Seluruh Obligasi Bank BTN dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat			Wali Amanat
				2020	2019	2018	
	29 Mei 2014	12,25% tetap	Lunas	-	-	-	-
	11 Juni 2020	10,25% tetap	Lunas	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	28 Juni 2021	9,50% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	5 Juni 2022	7,90% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	27 Maret 2023	7,90% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	8 Juli 2018	9,625% tetap	Lunas	-	-	idAA+	Bank Mega
	8 Juli 2020	9,875% tetap	Lunas	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	8 Juli 2022	10,00% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	8 Juli 2025	10,50% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	30 Agustus 2019	8,20% tetap	Lunas	-	idAA+	idAA+	Bank Mega
	30 Agustus 2021	8,75% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	13 Juli 2020	8,30% tetap	Lunas	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
	13 Juli 2022	8,50% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
	13 Juli 2024	8,70% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
	13 Juli 2027	8,90% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank BJB
	8 Juli 2020	7,750% tetap	Lunas	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	28 Juni 2022	8,750% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	28 Juni 2024	9,000% tetap	Belum Jatuh Tempo	idAA+	idAA+	idAA+	Bank Mega
	23 Januari 2025	4,20%	Belum Jatuh Tempo	Ba3 Moody's	-	-	Citicorp International Limited
	29 Agustus 2021	6,75%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	-	-	Bank BJB
	19 Agustus 2023	7,80%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	-	-	Bank BJB
	19 Agustus 2025	8,40%	Belum Jatuh Tempo	idAA+	-	-	Bank BJB

Kronologi Sekuritisasi KPR

Tabel Sekuritisasi KPR

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Kelas	Nominal (Rp)	
1	KIK-EBA DSMF 01	111.111.108.501	A	100.000.000.000	
			B	11.111.108.501	
2	KIK-EBA DSMF 02	391.305.329.159	A	360.000.000.000	
			B	31.305.329.159	
3	KIK-EBA DBTN 01	750.000.230.717	A	688.500.000.000	
			B	61.500.230.717	
4	KIK-EBA DBTN 02	703.450.414.156	A	645.000.000.000	
			B	58.450.414.156	
5	KIK-EBA DBTN 03	1.000.000.005.997	A	925.000.000.000	
			B	75.000.005.997	
6	KIK-EBA DBTN 04	1.000.000.005.941	A1	403.000.000.000	
			A2	525.000.000.000	
			B	72.000.005.941	
7	KIK-EBA DBTN 05	1.500.000.001.615	A1	723.500.000.000	
			A2	647.500.000.000	
			B	129.000.001.615	
8	EBA-SP SMF-BTN 01	200.000.000.041	A	181.600.000.000	
			B	18.400.000.041	
9	EBA-SP SMF-BTN 02	1.000.000.000.000	A1	400.000.000.000	
			A2	513.000.000.000	
			B	87.000.000.000	
10	EBA-SP SMF-BTN 03	1.000.000.000.000	A1	200.000.000.000	
			A2	713.000.000.000	
			B	87.000.000.000	
11	EBA-SP SMF-BTN 04	2.000.000.000.000	A1	700.000.000.000	
			A2	1.124.000.000.000	
			B	176.000.000.000	
12	EBA-SP SMF-BTN 05	2.000.000.000.000	A1	574.000.000.000	
			A2	1.142.000.000.000	
			M	24.000.000.000	
			B	260.000.000.000	
13	EBA-SP SMF-BTN 06	631.000.543.015	A	576.734.000.000	
			B	54.266.543.015	
TOTAL		12.286.867.639.142	12.286.867.639.142		

	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Kelas A
	11 Februari 2009	10 Januari 2018	5,30	13,000%	idAAA
	10 November 2009	10 Desember 2019	5,63	11,000%	idAAA
	27 December 2010	27 September 2019	5,35	9,250%	idAAA
	16 November 2011	27 Februari 2021	5,94	8,750%	idAAA
	12 December 2012	07 Januari 2023	6,35	7,750%	idAAA
	20 Desember 2013	26 Februari 2022	5,57	A1 = 8,90% A2 = 9,50%	idAAA
	28 November 2014	07 September 2025	6,72	A1 = 10% A2 = 10,25%	idAAA
	27 November 2015	07 Maret 2022	3,95	8,60%	idAAA
	31 Oktober 2016	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15% A1 = 8,75%	idAAA
	28 April 2017	07 Januari 2028	7,78	A1 = 8,00% A2 = 8,40%	idAAA
	28 Februari 2018	07 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00% A2 = 7,50%	idAAA
	27 November 2019	07 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50% A2 = 8,75% M = 10,40%	idAAA idA
	30 Desember 2020	07 Juli 2032	6,08	6,50%	idAAA

Kronologi Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit*

Tabel Kronologi Pencatatan *Negotiable Certificate of Deposit*

Jenis NCD	Nominal Penerbitan (Rp)	Tanggal Transaksi	Seri	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri (Rp)
NCD Tahap I	625.000.000.000	5 Desember 2014	A	6 bulan	4 Juni 2015	9,00%	280.000.000.000
			B	12 bulan	27 November 2015	9,25%	45.000.000.000
			C	15 bulan	26 Februari 2016	9,50%	300.000.000.000
NCD Tahap II	1.005.000.000.000	26 Februari 2015	A	6 bulan	26 Agustus 2015	9,00%	470.000.000.000
			B	12 bulan	18 Februari 2016	9,25%	85.000.000.000
			C	15 bulan	19 Mei 2016	9,50%	10.000.000.000
			D	18 bulan	18 Agustus 2016	9,70%	440.000.000.000
NCD Tahap III	500.000.000.000	17 Februari 2015	-	5 bulan	15 Juli 2015	9,00%	500.000.000.000
NCD Tahap IV	1.110.000.000.000	30 April 2015	A	6 bulan	30 Oktober 2015	8,75%	330.000.000.000
			B	12 bulan	2 Mei 2016	9,00%	620.000.000.000
			C	18 bulan	31 Oktober 2016	9,25%	160.000.000.000
NCD Tahap I 2016	740.000.000.000	9 Juni 2016	-	3 bulan	9 September 2016	6,85%	740.000.000.000
NCD Tahap II 2016	1.115.000.000.000	5 Agustus 2016	A	3 bulan	3 November 2016	7,19%	440.000.000.000
			B	6 bulan	1 Februari 2017	7,47%	275.000.000.000
			C	12 bulan	10 Agustus 2017	7,80%	400.000.000.000
NCD Tahap III 2016	371.000.000.000	30 November 2016	A	3 bulan	28 Februari 2017	7,04%	20.000.000.000
			B	6 bulan	29 Mei 2017	7,26%	351.000.000.000
NCD Tahap IV 2016	500.000.000.000	29 Desember 2016	A	3 bulan	29 Maret 2017	7,75%	315.000.000.000
			B	6 bulan	3 Juli 2017	7,74%	185.000.000.000
NCD Tahap V 2016	500.000.000.000	30 Desember 2016	-	6 bulan	3 Juli 2017	7,73%	500.000.000.000
NCD Tahap I 2017	1.735.000.000.000	21 Februari 2017	A	6 bulan	22 Agustus 2017	7,28%	1.195.000.000.000
			B	12 bulan	16 Februari 2018	7,43%	540.000.000.000
NCD Tahap III 2017	550.000.000.000	3 Oktober 2017	-	12 bulan	2 Oktober 2018	6,50%	550.000.000.000
NCD Tahap II 2017	1.050.000.000.000	5 Oktober 2017	A	6 bulan	3 April 2018	6,00%	230.000.000.000
			B	12 bulan	5 Oktober 2018	6,25%	820.000.000.000
NCD Tahap IV 2017	540.000.000.000	13 Desember 2017	A	6 bulan	12 Juni 2018	5,90%	160.000.000.000
			B	12 bulan	13 Desember 2018	6,20%	320.000.000.000
			C	24 bulan	13 Desember 2019	6,60%	60.000.000.000
NCD Tahap I 2018	1.440.000.000.000	3 April 2018	A	6 bulan	2 Oktober 2018	5,90%	830.000.000.000
			B	12 bulan	2 April 2019	6,20%	610.000.000.000
NCD Tahap II 2018	690.000.000.000	18 Juli 2018	A	6 bulan	15 Januari 2019	7,60%	520.000.000.000
			B	12 bulan	16 Juli 2019	7,70%	170.000.000.000
NCD Tahap III 2018	2.020.000.000.000	5 November 2018	A	6 bulan	7 Mei 2019	8,30%	1.340.000.000.000
			B	9 bulan	2 Agustus 2019	8,40%	170.000.000.000
			C	12 bulan	5 November 2019	8,50%	510.000.000.000
NCD Tahap IV 2018	340.000.000.000	10 Desember 2018	A	3 bulan	12 Maret 2019	8,00%	80.000.000.000
			B	6 bulan	11 Juni 2019	8,40%	260.000.000.000
Jumlah	14.831.000.000.000						14.831.000.000.000

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal

BANK KUSTODIAN	
Nama	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon	(021) 5152855
Faksimili	(021) 52991199
Email	helpdesk@ksei.co.id
Situs Web	www.ksei.co.id
Bentuk Jasa	Kustodian dan Agen Pembayaran
Periode Penugasan	Sepanjang umur Efek Bersifat Utang
Biaya	Rp10.000.000 (<i>Annual Fee</i> /Efek Bersifat Utang) dan 0,05% dari Bunga Efek Bersifat Utang minimum Rp2.500.000, maksimum Rp 10.000.000 (Agen Pembayaran)

BIRO ADMINISTRASI EFEK	
Nama	PT Datindo Entrycom
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120 - Indonesia
Telepon	(021) 3508077
Faksimili	(021) 3508077
Email	corporatesecretary@datindo.com
Situs Web	https://www.datindo.com
Bentuk Jasa	Biro Administrasi Efek untuk Saham
Periode Penugasan	9 Desember 2009 – sekarang
Biaya	Rp445.366.900

WALI AMANAT	
Nama	PT Bank Mega Tbk
Alamat	Menara Bank Mega, Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia
Telepon	(021) 79175000
Faksimili	(021) 79187100
Email	waliamanat@bankmega.com
Situs Web	www.bankmega.com
Bentuk Jasa	Wali Amanat Obligasi Bank BTN
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi
Biaya	Rp20.000.000 - Rp79.000.000

WALI AMANAT

Nama	Citicorp International Limited
Alamat	9/F, Citi Tower, One Bay East, 83 Hi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
Telepon	-
Faksimili	+852 26213183
Email	Apac.at.operations@citi.com
Situs Web	www.citibank.com.hk
Bentuk Jasa	Trustee Junior Global Bond Bank BTN
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi
Biaya	USD4.770

WALI AMANAT

Nama	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Alamat	Menara Taspen Lantai 1, Jalan Jend Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon	(021) 2511448
Faksimili	(021) 2511508
Email	trustee_custody@bankbjb.co.id
Situs Web	www.bankbjb.co.id
Bentuk Jasa	Wali Amanat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi
Biaya	Rp85.000.000 – Rp99.000.000

PEMERINGKAT EFEK

Nama	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Alamat	Panin Tower, Senayan City 17 th Floor, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia
Telepon	(021) 72782380
Faksimili	(021) 72782370
Email	-
Situs Web	www.pefindo.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	1 Maret 2019 - 1 Maret 2020
Biaya	Rp192.500.000

Nama	PT Fitch Ratings Indonesia
Alamat	DBS Bank Tower 24 th Floor Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940 Indonesia
Telepon	(021) 29886800
Faksimili	(021) 29886822
Email	-
Situs Web	www.fitchratings.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	Sepanjang umur Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
Biaya	Rp110.000.000

Profesi Penunjang Pasar Modal

AKUNTAN PUBLIK	
Nama	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
Alamat	Gedung Indonesia Stock Exchange, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Telepon	(021) 52895000
Faksimili	(021) 52894100
Email	-
Situs Web	https://www.ey.com/id
Bentuk Jasa	Audit Laporan Keuangan
Periode Penugasan	31 Desember 2020
Biaya	Rp3.249.000.000

KONSULTAN HUKUM	
Nama	Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Alamat	Pacific Century Place Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kac 52-53 Jakarta 12190 Indonesia
Telepon	(021) 29608888
Faksimili	(021) 29608999
Email	-
Situs Web	www.hhp.co.id
Bentuk Jasa	Profesi/Lembaga Penunjang RUPST
Periode Penugasan	Sepanjang kegiatan RUPST 2020
Biaya	Rp 78.000.000,-

NOTARIS	
Nama	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Alamat	Jl. Suryo No.54, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180
Telepon	(021) 29236060
Faksimili	(021) 29236070
Email	notarisgeneralmail@ashoyaratam.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Profesi/Lembaga Penunjang RUPS
Periode Penugasan	Sepanjang kegiatan RUPS Tahunan 2020
Biaya	Rp34.650.000

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan



1

2

3

1. 1st-The Best Corporate Secretary & Corporate Communication-V-2020

Acara:

Corporate Secretary Award V 2020

Penyelenggara:

Economic Review

Tanggal:

7 Februari 2020

2. Top 100 Most Valuable Brands 2020

Acara:

Indonesia's Most Valuable Brands 2020

Penyelenggara:

SWA

Tanggal:

6 Juni 2020

3. Top 3 Indonesia PLCs

Acara:

Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2019

Penyelenggara:

ASEAN Capital Markets Forum

Tanggal:

9 Juni 2020

4. ASEAN Asset Class Thresholds ditingkat Negara-Negara ASEAN

Acara:

Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2019

Penyelenggara:

ASEAN Capital Markets Forum

Tanggal:

9 Juni 2020

5. Best Millennial's Choice Brand in Home Loan Category

Acara:

Indonesia Millennial Top Brand Award

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

19 Juni 2020

6. 20 Pilar Finansial Indonesia 2020

Acara:

20 Pilar Finansial Indonesia Award 2020

Penyelenggara:

Iconomics

Tanggal:

16 Juli 2020



4

5

6

7

8

7. 1st Best ATM Public Area

Acara:

Banking Service Excellence Award 2020

Penyelenggara:

Infobank

Tanggal:

23 Juli 2020

8. Best Leader For Business Sustainability Through Business Innovation, Market Segmentation, Business Expansion And Product Development Kategori BUMN Bank Buku III

Acara:

Indonesia Financial Top Leader

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

23 Juli 2020

9. Bank Berpredikat Sehat Kategori Buku 3 Dengan Aset Diatas 100 Triliun Rupiah

Acara:

Indonesia Best Bank Award

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

19 Agustus 2020



9



10



11



12



13

10. The 14th Ranking of Indonesia The Best Public Companies Based on WAI (Overall) 2020, The 4th Ranking of Indonesia The Best Public Companies Based on WAI 2020

Acara:

Indonesia Best Wealth Creators 2020

Penyelenggara:

SWA

Tanggal:

10 September 2020

11. TOP GRC 2020 #4 Stars

Acara:

TOP GRC Awards 2020

Penyelenggara:

Majalah Top Business

Tanggal:

28 September 2020

12. The Most Committed GRC Leader 2020

Acara:

TOP GRC Awards 2020

Penyelenggara:

Majalah Top Business

Tanggal:

28 September 2020

13. The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020

Acara:

TOP GRC Awards 2020

Penyelenggara:

Majalah Top Business

Tanggal:

28 September 2020

14. The Indonesia Living Legend Companies

Acara:

Indonesia Living Legend Companies Award 2020

Penyelenggara:

SWA

Tanggal:

28 September 2020

15. The High Performing Board of Commissioners on GRC 2020

Acara:

TOP BUSINESS TOP GRC 2020

Penyelenggara:

Top Bisnis

Tanggal:

7 Oktober 2020



14



15



16



17

16. Top Bank 2020 Predikat Gold Kategori BUKU 3

Acara:

Top Bank Award 2020

Penyelenggara:

Iconomics

Tanggal:

28 Oktober 2020

17. Best PKBL For Indonesia CSR/PKBL Award With Outstanding Program in Housing Development Partnership For Community

Acara:

CSR and PKBL Award 2020

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

23 September 2020



18

18. Successful Business in Pandemic Era

Acara:

Indonesia Outstanding Performers in Pandemic Era 2020

Penyelenggara:

SWA

Tanggal:

6 November 2020



19

19. 1st The Best IT for Public Company kategori Bank BUKU III Asset > 100T

Acara:

Indonesia Information Technology Award III 2020

Penyelenggara:

Economic Review

Tanggal:

6 November 2020



20

20. Inovasi Menghadirkan Akses Kepemilikan Hunian Rakyat Terjangkau Saat Pandemi

Acara:

Gatra Award

Penyelenggara:

Gatra

Tanggal:

12 November 2020



21

21. Peringkat Keterbukaan IHSKG-ESG Terbaik

Acara:

ESG Awards 2020

Penyelenggara:

Berita Satu Media Holdings - Majalah Investor

Tanggal:

17 November 2020

22. Peringkat Keterbukaan ESG Bank BUMN Terbaik, Peringkat Keterbukaan Environmental (E) Bank BUMN Terbaik, Peringkat Keterbukaan Sosial (S) Bank BUMN Terbaik

Acara:

ESG Awards 2020

Penyelenggara:

Berita Satu Media Holdings - Majalah Investor

Tanggal:

17 November 2020



23



24

23. Appreciation for Extra Ordinary Achievement and Social Awareness Kategori Terbaik dan Konsisten dalam Pembiayaan Rumah Rakyat

Acara:

15th Annual Property & Bank Award 2020

Penyelenggara:

Property Bank dan Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan

Tanggal:

20 November 2020

24. Excellent Financial Performance of Indonesia Best BUMN Award 2020

Acara:

BUMN Award 2020

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

27 November 2020



25

25. Digital Business Transformation of HR Management and Transaction Services

Acara:

BUMN Award 2020

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

27 November 2020



26

26. Banker of The Year 2020

Acara:

4th Infobank Top 100 Bankers

Penyelenggara:

Infobank

Tanggal:

1 Desember 2020



27

27. The Best Bank in Mortgage Market

Acara:

CNBC Indonesia Award

Penyelenggara:

CNBC

Tanggal:

9 Desember 2020



28

28. The 1st Winner Indonesia Best CFO 2020

Acara:

Indonesia Best CFO 2020

Penyelenggara:

SWA

Tanggal:

10 Desember 2020



29

29. Indonesia Most Trusted Companies

Acara:

Penghargaan CGPI 2019

Penyelenggara:

IICG & SWA

Tanggal:

17 Desember 2020



30

30. Indonesia Best Brand Award For 10 Consecutive Years 2010-2020 kategori KPR

Acara:

Indonesia Best Brand Award Best Platinum 2020

Penyelenggara:

SWA & MARS Indonesia Digital

Tanggal:

18 Desember 2020

Sertifikasi

1. ISO 9001:2015

Validasi:

15 September 2020 – 11 Agustus 2023

Penerima Sertifikasi:

Internal Audit Division; Compliance and Governance Division; Enterprise Risk Management Division

Dikeluarkan Oleh:

SGS



1

2. ISO 37001:2016

Validasi:

11 Agustus 2020 – 10 Agustus 2023

Penerima Sertifikasi:

Commercial Banking Division (CMBD), Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD), Procurement & Fixed Asset Management Division (PFAD)

Dikeluarkan Oleh:

Komite Akreditasi Nasional



2

Nama dan Alamat Entitas Anak, Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan —



Kantor Wilayah

Kantor Wilayah 1

Kantor Wilayah Jawa Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 19
Bekasi 17143
☎ (021) 88953281, 88953282
✉ (021) 8849519
✉ kantorwilayah1@btn.co.id

Kantor Wilayah 4

Kantor Wilayah Sumatera
Komplek Perkantoran Batam Center
Jl. Engku Putri No. 1, Kel. Belian,
Kec. Nongsa Batam Center
☎ (0778) 7711331, 7711215, 7711661
✉ kantorwilayah4@btn.co.id

Kantor Wilayah 2

Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten
Gedung Yodya Tower Lt. 3
Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003
RW 011, Kel. Cipinang Cempedak
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
☎ (021) 2301184, 31901656, 3905775
✉ kantorwilayah2@btn.co.id

Kantor Wilayah 5

Kantor Wilayah Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Papua
Jl. Sultan Hassanudin No. 1
Makassar
☎ (0411) 5070760
✉ kantorwilayah5@btn.co.id

Kantor Wilayah 3

Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara
Jl. Raya Darmo No. 123-125 Surabaya
Jawa Timur 60241
☎ (031) 5661704, 5661204
✉ (031) 5661696
✉ kantorwilayah3@btn.co.id

Kantor Wilayah 6

Kantor Wilayah Jawa Tengah & DIY
Jl. M.T. Haryono No. 717
Semarang 50242
☎ (024) 8455932
✉ kantorwilayah6@btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 1

Kantor Cabang Bandung

Jl. Jawa No. 7 Bandung 40117
 ☎ (022) 4232112, 4241036, 4241034
 📠 (022) 4204562
 ✉ kc.bandung@btn.co.id

Kantor Cabang Cimahi

Jl. Jend. Amir Machmud/Raya Timur No. 475 Cimahi 40524
 ☎ (022) 6651644, 6651645
 📠 (022) 6652586
 ✉ kc.cimahi@btn.co.id

Kantor Cabang Cibubur

Ruko Madison Blok B1 No. 6-8 Cibubur Time Square
 Jl. Raya Alternatif Transyogi Km. 3 Cibubur-Bekasi 17435
 ☎ (021) 84300071, 84300073
 ✉ kc.cibubur@btn.co.id

Kantor Cabang Cikarang

Pertokoan Cikarang Center City Blok B No 2, 3, 5, 6
 Jl. Raya Cikarang - Cibarusah, Kabupaten Bekasi 17750
 ☎ (021) 22180085, 22180086
 📠 (021) 8936418
 ✉ kc.cikarang@btn.co.id

Kantor Cabang Bekasi

Jl. Jend. Sudirman No. 19 Bekasi 17143
 ☎ (021) 8840649
 📠 (021) 8849519
 ✉ kc.bekasi@btn.co.id

Kantor Cabang Bandung Timur

Jl. Raya Cinunuk No. 223 A Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
 ☎ (022) 7816883
 📠 (022) 7838482, 7816876
 ✉ kc.bandungtimur@btn.co.id

Kantor Cabang Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 101 Tasikmalaya 46112
 ☎ (0265) 334464, 334465
 📠 (0265) 330884
 ✉ kc.tasikmalaya@btn.co.id

Kantor Cabang Purwakarta

Jl. RE. Martadinata No. 1 Purwakarta 41114
 ☎ (0264) 201024, 210830, 210831, 206637
 📠 (0264) 201591
 ✉ kc.purwakarta@btn.co.id

Kantor Cabang Karawang

Jl. Kertabumi No. 29 A-D, Karawang 41311 Jawa Barat
 ☎ (0267) 412282, 412283
 📠 (0267) 412247
 ✉ kc.karawang@btn.co.id

Kantor Cabang Bogor

Jl. Pengadilan No. 13-15 Bogor 16121
 ☎ (0251) 8311700
 📠 (0251) 8323007, 8351432
 ✉ kc.bogor@btn.co.id

Kantor Cabang Sukabumi

Jl. Jendral Sudirman No. 49, Kel. Sriwedari, Kec. Gunung Puyuh Sukabumi - Jawa Barat
 ☎ (0266) 223446, 235951
 📠 (0266) 223447
 ✉ kc.sukabumi@btn.co.id

Kantor Cabang Harapan Indah Bekasi

Ruko Office Park Harapan Indah Blok OP Kavling No. OP1-01 & OP1-02 Harapan Indah - Bekasi 17132
 ☎ (021) 88386971(hunting), 88386972, 88386974
 📠 (021) 88386974
 ✉ kc.harapanindah@btn.co.id

Kantor Cabang Cirebon

Jl. Siliwangi No. 16 Cirebon 45121
 ☎ (0231) 209143, 209153
 📠 (0231) 209777
 ✉ kc.cirebon@btn.co.id

Kantor Cabang Depok

Jl. Margonda Raya No. 186 Depok 16423
 ☎ (021) 7751236, 7751237
 📠 (021) 7772927
 ✉ kc.depok@btn.co.id

Kantor Cabang Cibinong

Ruko Cibinong City Centre Blok B20-21 & D20-21 Jl. Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec. Cibinong - Kab. Bogor
 ☎ (021) 83721442
 📠 -
 ✉ kc.cibinong@btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 2

Kantor Cabang Jakarta Kuningan

Plaza Jamsostek
Jl. HR. Rasuna Said Kav.112-114 Blok B
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan
☎ (021) 52964652
☎ (021) 52964974
✉ kc.jakartakuningan@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk

Jl. Angrek No. 01 Kel. Kelapa Dua
Kec. Kebon Jeruk Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11550
☎ (021) 53666345
☎ (021) 59666344
✉ kc.jakartakebonjeruk@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Melawai

Jl. Melawai Raya No. 19 C-D,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
☎ (021) 27517843, 27517840
☎ (021) 27517858
✉ kc.jakartamelawai@btn.co.id

Kantor Cabang Ciputat

Jl. Dewi Sartika No. 21 Ciputat
Tangerang Selatan 15411
☎ (021) 7445145
☎ (021) 7490968, 7402731
✉ kc.ciputat@btn.co.id

Kantor Cabang Karawaci

Perumnas Karawaci I
Jl. Cendrawasih No. 1
Tangerang 15115
☎ (021) 5517849, 5517850
☎ (021) 5524367, 5511420
✉ kc.karawaci@btn.co.id

Kantor Cabang Kelapa Gading Square

Gedung Emerald Tower
Jl. Boulevard Barat Blok XB No. 3
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
☎ (021) 45866883, 45866884
☎ (021) 45866885
✉ kc.kelapagadingsquare@btn.co.id

Kantor Cabang Bumi Serpong Damai

Kompleks BSD, Ruko Sektor VII E
Blok K No. 8 Jl. Raya Serpong,
Tangerang 15310
☎ (021) 5372235, 5372237
☎ (021) 5372238
✉ kc.bumiserpongdamai@btn.co.id

Kantor Cabang Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01
Tangerang 15118
☎ (021) 5539363
☎ (021) 5537977, 5581186
✉ kc.tangerang@btn.co.id

Kantor Cabang Cilegon

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 49
Cilegon 42414
☎ (0254) 391766, 392681, 393479
☎ (0254) 393480
✉ kc.cilegon@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Harmoni

Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130
☎ (021) 6336789, 6332666, 2310490
☎ (021) 6386593, 6332676, 6333021
✉ kc.jakartaharmoni@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Cawang

Gedung Yodya Tower Lt. 1-2
Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003,
RW 011 Kel. Cipinang Cempedak
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
☎ (021) 22986826, 22986827
☎ (021) 21012381
✉ kc.jakartacawang@btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Pluit

Jl. Pluit Kencana Raya No. 79, Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
☎ (021) 97115586
☎ (021) 66601530
✉ kc.jakartapluit@btn.co.id

Kantor Cabang Bintaro Jaya

CBD Bintaro Blok B7 No. A3 - 04A,
Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren
Tangerang Selatan
☎ (021) 22215981
☎ (021) 22215983
✉ kc.bintarojaya@btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 3

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Pemuda No. 50 Surabaya 60271
 ☎ (031) 5353513, 5353519
 📠 (031) 5345073, 5458002
 ✉ kc.surabaya@btn.co.id

Kantor Cabang Kupang

Jl. Jend. Sudirman No. 87
 Kupang 85119
 ☎ (0380) 831004
 📠 (0380) 833741
 ✉ kc.kupang@btn.co.id

Kantor Cabang Gresik

Kompleks Pertokoan Multi Sarana
 Plaza Blok C 01 No. 1
 Jl. Gubernur Suryo, Gresik 61118
 ☎ (031) 3973455
 📠 (031) 3973456
 ✉ kc.gresik@btn.co.id

Kantor Cabang Denpasar

Jl. Dewi Sartika No. 2 Denpasar 80114
 ☎ (0361) 243811
 📠 (0361) 243815
 ✉ kc.denpasar@btn.co.id

Kantor Cabang Bangkalan

Jl. Teuku Umar No. 16
 Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, 69116
 ☎ (031) 3098929, 3098831, 3098930
 📠 (031) 3098834
 ✉ kc.bangkalan@btn.co.id

Kantor Cabang Surabaya Bukit Darmo

Jl. Mayjend HR Muhammad Kav. 399
 Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal
 ☎ (031) 7323344, 7322146, 7322147
 📠 (031) 7232899
 ✉ kc.surabayabukitdarmo@btn.co.id

Kantor Cabang Malang

Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4
 Malang 65119
 ☎ (0341) 323956
 📠 (0341) 323959, 350050
 ✉ kc.malang@btn.co.id

Kantor Cabang Madiun

Jl. Dr. Sutomo No. 38, Madiun 63116
 ☎ (0351) 451460, 459034, 459034,
 457927, 459500
 📠 (0351) 463510
 ✉ kc.madiun@btn.co.id

Kantor Cabang Mojokerto

Jl. Majapahit No. 130 - 134 Blok1-2
 Mojokerto 61323
 ☎ (0321) 323850, 323853
 📠 (0321) 323853

Kantor Cabang Sidoarjo

Jl. Ahmad Yani No. 15
 Sidoarjo 61212
 ☎ (031) 8929211, 8957949, 8957950
 📠 (031) 8957951
 ✉ kc.sidoarjo@btn.co.id

Kantor Cabang Jember

Jl. A. Yani No. 05 Jember 68118
 ☎ (0331) 484611, 489292, 489266
 📠 (0331) 484617
 ✉ kc.jember@btn.co.id

Kantor Cabang Banyuwangi

Jl. Brawijaya No. B-1 dan B-2 Kel. Sobo,
 Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi 68418
 ☎ (0333) 414490, 415690
 📠 (0333) 415676
 ✉ kc.banyuwangi@btn.co.id

Kantor Cabang Mataram

Jl. Pejanggik No. 99-101 Cakranegara
 Mataram 83121
 ☎ (0370) 631186, 638289
 📠 (0370) 634542
 ✉ kc.mataram@btn.co.id

Kantor Cabang Kediri

Jl. Diponegoro No. 22 - 24 Kediri 64121
 ☎ (0354) 691260, 691262
 📠 (0354) 691265
 ✉ kc.kediri@btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 4

Kantor Cabang Medan

Jl. Pemuda No. 10A Medan 20151
 ☎ (061) 4149777
 📠 (061) 4158112, 4153203
 ✉ kc.medan@btn.co.id

Kantor Cabang Padang

Jl. H. R. Rasuna Said No. 3, Jati Baru
 Padang Tim, Kota Padang 25129
 ☎ (0751) 31903, 32094, 32096
 📠 (0751) 31900, 34938
 ✉ kc.padang@btn.co.id

Kantor Cabang Bengkulu

Jl. Soeprapto No. 7 - 8, Bengkulu 38223
 ☎ (0736) 20875
 📠 (0736) 20874
 ✉ kc.bengkulu@btn.co.id

Kantor Cabang Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 No. 125
 Palembang 30128
 ☎ (0711) 411175, 410552
 📠 (0711) 410854
 ✉ kc.palembang@btn.co.id

Kantor Cabang Jambi

Jl. H. M. Yusuf Singdikane No. 146, Jambi
 ☎ (0741) 61793, 61792
 📠 (0741) 62665
 ✉ kc.jambi@btn.co.id

Kantor Cabang Tanjung Pinang

Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Plaza
 Bintan Center Blok Bunga No. 9-12
 Tanjung Pinang
 ☎ (0771) 7447101, 7447088
 📠 (0771) 7447082
 ✉ kc.tanjungpinang@btn.co.id

Kantor Cabang Batam

Jl. Engku Putri No.1, Kel. Belian
 Nongsa Batam Center
 ☎ (0778) 470630, 470625, 470628
 📠 (0778) 457262, 453923
 ✉ kc.batam@btn.co.id

Kantor Cabang Pematang Siantar

Jl. Sutomo No. 5 G-H, Kel. Proklamasi
 Kec. Pematang Siantar Barat
 Pematang Siantar
 ☎ (0622) 28887
 📠 (0622) 24020
 ✉ kc.pematangsiantar@btn.co.id

Kantor Cabang Pangkal Pinang

Jl. Perniagaan, Mall Bangka Trade
 Center B11 - B14 - Pangkal Pinang
 ☎ (0717) 423748
 📠 (0717) 488706
 ✉ kc.pangkalpinang@btn.co.id

Kantor Cabang Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No. 393
 Pekanbaru 28116
 ☎ (0761) 40494, 40185, 40188
 📠 (0761) 32271, 44776
 ✉ kc.pekanbaru@btn.co.id

Kantor Cabang Bandar Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88
 Bandar Lampung 35215
 ☎ (0721) 489253, 489255, 484778,
 483256
 📠 (0721) 489252
 ✉ kc.bandarlampung@btn.co.id

Kantor Cabang Banda Aceh

Jl. Sri Ratu Afiatuddin No. 19 - 23 ,
 Gampong Peunayong, Banda Aceh
 ☎ (0651) 35756, 35757
 📠 (0651) 35758
 ✉ kc.bandaaceh@btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 5

Kantor Cabang Makassar

Jl. Kajaolalido No. 4 Makassar 90111
 ☎ (0411) 316016, 316011
 📠 (0411) 316388
 ✉ kc.makassar@btn.co.id

Kantor Cabang Kendari

Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Square
 Blok. A6-7 Kendari 93117
 ☎ (0401) 322101
 📠 (0401) 322502
 ✉ kc.kendari@btn.co.id

Kantor Cabang Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 141, Balikpapan
 ☎ (0542) 420333
 📠 (0542) 420896
 ✉ kc.balikpapan@btn.co.id

Kantor Cabang Pontianak

Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78122
 ☎ (0561) 740163
 📠 (0561) 740168
 ✉ kc.pontianak@btn.co.id

Kantor Cabang Samarinda

Jl. RE. Martadinata No. 01
 Samarinda 75127
 ☎ (0541) 736930, 731695, 731510
 📠 (0541) 737698
 ✉ kc.samarinda@btn.co.id

Kantor Cabang Gorontalo

Jl. Prof. HB. Yasin No. 55, Kel Limba U2,
 Kota Selatan - Gorontalo
 ☎ +62 435 830490, 829481
 📠 +62 435 826707, 823943
 ✉ kc.gorontalo@btn.co.id

Kantor Cabang Jayapura

Jl. Koti No. 22 Jayapura 99111
 ☎ (0967) 537970, 537971
 📠 (0967) 533373
 ✉ kc.jayapura@btn.co.id

Kantor Cabang Manado

Jl. Wolter Monginsidi No. 56
 Manado 95115
 ☎ (0431) 868095, 855504, 855505
 📠 (0431) 868013, 863416
 ✉ kc.manado@btn.co.id

Kantor Cabang Ternate

Jl. Pahlawan Revolusi (Samping Kantor Pos
 Ternate) Kel. Gamalama, Ternate Tengah
 Maluku Utara
 ☎ (0921) 3111330
 📠 (0921) 3126968
 ✉ kc.ternate@btn.co.id

Kantor Cabang Banjarmasin

Jl. R. E. Martadinata No. 4
 Banjarmasin 70111
 ☎ (0511) 4368133, 4366669, 4366670
 📠 (0511) 4366492, 43363964
 ✉ kc.banjarmasin@btn.co.id

Kantor Cabang Ambon

Jl. Diponegoro No. 75B Ambon
 ☎ (0911) 355882, 354471, 348552,
 355882
 📠 (0911) 348559
 ✉ kc.ambon@btn.co.id

Kantor Cabang Panakukang

Jl. Hertasning Blok I No. 2
 Makassar 90222
 ☎ (0411) 868831, 868833
 📠 (0411) 868833
 ✉ kc.panakukang@btn.co.id

Kantor Cabang Banjarbaru

Jl. Ahmad Yani Km 33 RT 01 RW 01
 Loktabak Utara, Banjarbaru
 Kalimantan Selatan 71114
 ☎ (0511) 774116, 774171
 📠 (0511) 774116
 ✉ kc.banjarbaru@btn.co.id

Kantor Cabang Palu

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Palu 94111
 ☎ (0451) 424555, 428555
 📠 (0451) 425993
 ✉ kc.palu@btn.co.id

Kantor Cabang Tarakan

Jl. Mulawarman No.10 RT.73
 Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat,
 Kota Tarakan
 ☎ (0551) 24322
 📠 -
 ✉ kc.tarakan@btn.co.id

Kantor Cabang Palangkaraya

Jl. Diponegoro No. 23
 Palangkaraya 73111
 ☎ (0536) 3223407, 3222698, 3224136
 📠 (0536) 3221020
 ✉ kc.palangkaraya@btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 6

Kantor Cabang Semarang

Jl. M.T. Haryono No. 717
Semarang 50242
☎ (024) 312151, 446166
☎ (024) 312186
✉ kc.semarang@btn.co.id

Kantor Cabang Pekalongan

Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan 51113
☎ (0285) 433883, 433884, 433484, 433917, 413222
☎ (0285) 433926, 413902
✉ kc.pekalongan@btn.co.id

Kantor Cabang Kudus

Jl. Ahmad Yani No. 45 Kel. Panjunan
Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59312
☎ (0291) 438732
☎ (0291) 4250112
✉ kc.kudus@btn.co.id

Kantor Cabang Yogyakarta

Jl. Jend. Sudirman No. 71
Yogyakarta 55223
☎ (0274) 589898, 581014, 581016
☎ (0274) 561289
✉ kc.yogyakarta@btn.co.id

Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Jend. Sudirman No. 431
Purwokerto 53116
☎ (0281) 641114
☎ (0281) 638386
✉ kc.purwokerto@btn.co.id

Kantor Cabang Magelang

Jl. Tentara Pelajar No. 40, Magelang
☎ (0293) 3215983
☎ (0293) 3215463
✉ kc.magelang@btn.co.id

Kantor Cabang Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 282 Solo 57141
☎ (0271) 726930
☎ (0271) 726931
✉ kc.solo@btn.co.id

Kantor Cabang Tegal

Jl. Gajah Mada No. 33 - Tegal
☎ (0283) 343050, 343835, 323038
☎ (0283) 357439
✉ kc.tegal@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah

Kantor Cabang Syariah Wilayah 1

Kantor Cabang Syariah Bekasi

Jl. Jend. Ahmad Yani Blok A.IV No. 5-6 dan Blok B No. 1 Kel. Kayuringin Jaya
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
☎ (021) 8893333
☎ (021) 88956655
✉ kcs.bekasi@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bogor

Jl. Jendral Sudirman No. 01,
Kec. Bogor Tengah, Bogor 16121
☎ (0251) 8327171, 8327575
☎ (0251) 8324567
✉ kcs.bogor@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya

Jl. Yudanegara No. 10 Kel. Yudanegara
Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya 46112
☎ (0265) 310612, 7296566, 7296567, 7296568
☎ (0265) 310613
✉ kcs.tasikmalaya@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bandung

Jl. Diponegoro No. 8, Bandung
Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan
Bandung 40115
☎ (022) 4265472, 4265473, 4265474
☎ (022) 4265385
✉ kcs.bandung@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Cirebon

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo
No. 91 Indramayu Cirebon
☎ (0231) 235485, 235486, 235488
☎ (0231) 205790
✉ kcs.cirebon@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 2

Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni

Jl. Suryo Pranoto No. 9 B-D Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10130
☎ (021) 3860617, 3860620, 3864265
☎ (021) 3447271, (021) 3857706
✉ kcs.jakartaharmoni@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Serang

Jl. Jend Ahmad Yani No. 175, Cipete Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang - Banten
☎ (0254) 7915869
☎ (0254) 7915900
✉ kcs.cilegon@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu

Ruko Grand Palace Blok G & H, Jl. Raya Ps. Minggu Km 16 Pancoran - Jakarta Selatan
☎ (021) 7993662, 7993015
☎ (021) 7993174
✉ kcs.pasarminggu@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tangerang

Jl. Serpong Raya, Ruko Villa Melati Mas Blok. SR-1 No. 23-24 Serpong Tangerang 15320
☎ (021) 5370773
☎ (021) 5370744
✉ kcs.tangerang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 3

Kantor Cabang Syariah Surabaya

Jl. Diponegoro No. 29 Surabaya 60271
☎ (031) 5666363, 5610518
☎ (031) 5610519
✉ kcs.surabaya@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 4

Kantor Cabang Syariah Batam

Jl. Sriwijaya Komp. Regency Park Lot 29 Pelita - Batam 29432
☎ (0778) 421921, 437880
☎ (0778) 422126
✉ kcs.batam@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Palembang

Jl. Veteran No. 325 - 329, Palembang 30114
☎ (0711) 355417, 355963
☎ (0711) 313366
✉ kcs.palembang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Mataram

Jl. Pejanggik No. 18-19 Kel. Cakranegara Kab. Mataram
☎ (0370) 7503646
✉ kcs.mataram@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Kel. Sidomulyo Timur Kec. Tampan Pekanbaru
☎ (0761) 7891314
☎ (0761) 7891313
✉ kcs.pekanbaru@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Jl. Teuku Umar No. 430-432 Kel. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Banda Aceh 23236
☎ (0651) 40330
☎ (0651) 40331
✉ kcs.bandaaceh@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Malang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 87 Kel. Rampil Celaket, Kec. Klojen Kota Malang 65112
☎ (0341) 3012469
☎ (0341) 579777
✉ kcs.malang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Medan

Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Medan
☎ (061) 4144554
☎ (061) 4144546
✉ kcs.medan@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 5

Kantor Cabang Syariah Makassar

Jl. Slamet Riyadi No. 7 A Kel. Bulogading,
Kec. Ujung Pandang 90111
☎ (0411) 3613399, 3613499
☎ (0411) 320785
✉ kcs.makassar@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No. 565 - 566
Balikpapan 76114
☎ (0542) 742260, 742258
☎ (0542) 742229
✉ kcs.balikpapan@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Jl. Jend Ahmad Yani KM 5,5 No. 456
Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan
☎ (0511) 3250530, 3250540, 3250560
☎ (0511) 3260900
✉ kcs.banjarmasin@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Kendari

Jl. MT Hariyono Desa/Kelurahan
Bende, Kecamatan Baruga,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
✉ kcs.kendari@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 6

Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Jl. Faridan M Noto No. 10, Kota Baru
Gondokusuman Yogyakarta 55224
☎ (0274) 551055, 512467
☎ (0274) 551056
✉ kcs.yogyakarta@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Solo

Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 332
Solo 57141
☎ (0271) 712127, 7008978, 7008947
☎ (0271) 717276
✉ kcs.solo@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Semarang

Jl. Achmad Yani No. 181 Kel. Wonodri Kec.
Semarang Selatan, Kota Semarang
☎ (024) 8449918, 8449919
☎ (024) 8410825
✉ kcs.semarang@btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tegal

Jl. Gajah Mada No. 107, Kel. Pekauman
Kec. Tegal Barat Kota Tegal
Jawa Tengah 52113
☎ (0283) 342923, 342933
☎ (0283) 342913
✉ kcs.tegal@btn.co.id

Sampai dengan 31 Desember
2020, Perseroan tidak memiliki
Entitas Anak.

Jaringan Mitra Usaha

Perseroan senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha, dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan juga menjalankan berbagai kemitraan bisnis dalam rangka penyediaan layanan produk perbankan serta kenyamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Perseroan dengan mitra usaha di antaranya sebagai berikut:

Instansi/Lembaga	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Telkomsel	TCASH-BTN
Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	KPR Atlet
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Konstruksi Properti
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kredit Investasi
Blue Bird	Pembiayaan Perumahan
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	Kredit KPR
PT SMF	Kredit KPR
Grab Indonesia	Kredit KPR
Gojek	Kredit KPR
PNM	Program Kemitraan

Informasi Pada Website Perseroan

Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.btn.co.id. Situs web ini berisi informasi terkini tentang korporasi Perseroan, baik itu *login E-Banking* bagi nasabah, informasi seputar korporasi dan produk-produk Perseroan, profil, pengelolaan organisasi dan transparansi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan situs web sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Struktur grup perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	✓	Struktur Grup Perusahaan dalam bentuk tabel, https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami
Isi Kode Etik	✓	https://www.btn.co.id/id/Tata-Kelola pada kanal "Tata Kelola Perusahaan"
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	✓	https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home pada kanal "RUPS"
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)	✓	https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home pada kanal "Laporan Perusahaan"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	✓	https://www.btn.co.id/Tentang-Kami pada kanal "Kepemimpinan"
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	✓	https://www.btn.co.id/id/Tata-Kelola pada kanal "Tata Kelola Perusahaan"

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Sertifikasi: Pembekalan dan Ujian Sertifikasi UKMR Level 1 Komisaris	18 Januari 2020, Jakarta	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
		Sertifikasi: Pembekalan dan Ujian Sertifikasi UKMR Level 2 Komisaris	8 Februari 2020, Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Seminar: <i>Management Trends for Directors and Commisioners, dan Challanges of Professionalism at The Board.</i>	9 November 2020, Virtual Learning	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Eko D Heripoerwanto	Komisaris	Seminar: <i>Management Trends for Directors and Commisioners, dan Challanges of Professionalism at The Board.</i>	9 November 2020, Virtual Learning	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Heru Budi Hartono	Komisaris	Seminar: <i>Management Trends for Directors and Commisioners, dan Challanges of Professionalism at The Board.</i>	9 November 2020, Virtual Learning	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Andin Hadiyanto	Komisaris	Sertifikasi: Pembekalan dan Ujian Sertifikasi UKMR Level 1 Komisaris	18 Januari 2020, Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Seminar: <i>Management Trends for Directors and Commisioners, dan Challanges of Professionalism at The Board.</i>	9 November 2020, Virtual Learning	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Armand B Arief	Komisaris Independen	Seminar: <i>Management Trends for Directors and Commisioners, dan Challanges of Professionalism at The Board.</i>	9 November 2020, Virtual Learning	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Seminar: <i>Management Trends for Directors and Commisioners, dan Challanges of Professionalism at The Board.</i>	9 November 2020, Virtual Learning	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Nixon L. P. Napitupulu	Plt. Direktur Utama	Sertifikasi: <i>Treasury Dealer Level Advance</i>	11 Juni 2020, <i>Virtual Learning</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	<i>Workshop: Asean Financials Forum</i>	8 Januari 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Corporate Commercial and Risk</i>	11 Februari 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Anti Bribery Management System</i>	12 Februari 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Penyusunan Informasi Keuangan BUMN</i>	13 Februari 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Rencana Akselerasi Percepatan Penyelesaian Kredit Bermasalah</i>	18 Februari 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Pembahasan Penyelesaian NPL Consumer</i>	5 Maret 2020, Jakarta	Internal
		<i>Webinar: Deloitte Conference</i>	25 Juni 2020, <i>Virtual Learning</i>	Deloitte Indonesia
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Sertifikasi: UKMR Level 5	31 Januari 2020, Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Pelatihan: Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	1 Agustus 2020, Jakarta	Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal and Compliance	Sertifikasi: Kepatuhan & AML Level 3 (Eksekutif)	22-23 Januari 2020, Jakarta	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar: <i>Leadership, Entrepreneurship dan Innovation in the Global Economy (Refreshment UKMR Level 5)</i>	25-28 Maret 2020, Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		Sertifikasi: Kurator & Pengurus Angkatan VI Tahun 2020	3-15 Agustus 2020, <i>Virtual Learning</i>	Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	<i>Workshop: Anti Bribery Management System</i>	12 Februari 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Pembahasan Penyelesaian NPL Consumer</i>	5 Maret 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Penyusunan Corporate Plan Bank BTN 2021 - 2025</i>	26 Agustus 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: Corporate Culture Transformation Executive</i>	30 September 2020, Jakarta	Internal
		<i>Workshop: BPI Konsumer McKinsey</i>	24 November 2020, Jakarta	McKinsey
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT and Digital Banking	Sepanjang tahun 2020, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi.		
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Sertifikasi: UKMR Level 5	17 Januari 2020, Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics	Sertifikasi: UKMR Level 5	17 Januari 2020, Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

*Berhenti menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak mengikuti program kompetensi yang berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Audit Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Ahdi Jumhari Luddin	Ketua	Pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Adi Prakoso	Anggota	Sertifikasi: <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch XV</i>	22 – 25 September 2020, <i>Virtual Learning</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Sertifikasi: <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch XV</i>	22 – 25 September 2020, <i>Virtual Learning</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Armand B Arief	Ketua	Pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Eko D Heripoerwanto	Anggota	Pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Heru Budi Hartono	Anggota	Pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Yuki Noviani Kohar	Anggota	Sepanjang tahun 2020, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi.		

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Ari Kurniaman	Sekretaris Perusahaan	Seminar: Strategi Bisnis Menghadapi Dampak COVID-19	28 Mei 2020, <i>Virtual Learning</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Sertifikasi: <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Perbankan Level 3	14 Juli 2020, <i>Virtual Learning</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Pembekalan 4DX: <i>Champion Summit</i>	9 Oktober 2020, <i>Virtual Learning</i>	Dunamis Organization Services

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Sepanjang tahun 2020, Unit Internal Audit Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hertanta	Internal Audit Division Head	Seminar: Strategi Bisnis Menghadapi Dampak COVID-19	28 Mei 2020, <i>Virtual Learning</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Live Online Course PSAK 71	5 Juni 2020, <i>Virtual Learning</i>	Deloitte Indonesia
		Pembekalan 4DX: <i>Champion Summit</i>	9 Oktober 2020, <i>Virtual Learning</i>	Dunamis Organization Services
		<i>Workshop: Implementing Combined Assurance</i>	19-20 November 2020, <i>Virtual Learning</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPAI)
		<i>Sertification in Audit Committee Practices (CACP) Batch XV 22</i>	22 - 25 September 2020, <i>Virtual Learning</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Ricky R. S. Patinggi	Deputy Internal Audit Division	Pelatihan: BPI <i>High Level</i>	6-7 Maret 2020, Jakarta	Coaching Indonesia
		Live Online Course PSAK 71	5 Juni 2020, <i>Virtual Learning</i>	Deloitte Indonesia
		Seminar: Standar Audit Internal dan Kode Etik Profesi	30-31 Oktober 2020, <i>Virtual Learning</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPAI)
		Pembekalan 4DX: Managers Implementation	11-12 Desember 2020, <i>Virtual Learning</i>	Dunamis Organization Services

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

BANK BTN



Tinjauan Perekonomian —

Analisis Perekonomian Global

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok awalnya masih berlanjut di awal tahun 2020, namun munculnya pandemi COVID-19 seolah menutupi ketegangan yang terjadi. Pandemi virus yang berawal dari Tiongkok ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dengan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global.

Krisis Kesehatan yang muncul akibat pandemi COVID-19 bergeser ke krisis sosial karena beberapa negara melakukan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun ternyata pengendalian aktivitas tersebut berujung pada berkurangnya interaksi ekonomi yang justru menimbulkan krisis ekonomi dan krisis keuangan karena terganggunya interaksi pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi terkoreksi menjadi negatif di tahun 2020 karena banyak negara yang harus mengurangi aktivitas ekonominya.

Pandemi virus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga pada dasarnya tidak ada yang bisa mengukur dampaknya terhadap perekonomian global. Pada bulan Oktober 2020, *International Monetary Fund* (IMF) mengeluarkan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar (4,4%) (YoY). Prediksi ini adalah prediksi yang keempat kali dari IMF sepanjang tahun 2020 ini karena memang sulit untuk mengukur dampak dari pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk diketahui, pada bulan Januari 2020 IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,3% (YoY) di tahun 2020. Prediksi ini dikoreksi menjadi (3,0%) (YoY) di bulan April, kemudian turun lagi menjadi (4,9%) (YoY) di bulan Juni dan akhirnya di bulan Oktober dikoreksi lagi menjadi (4,4%) (YoY).

Kemungkinan turunnya pertumbuhan ekonomi AS ditanggapi oleh bank sentral AS (*The Fed*) dengan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 150 *basis points* (bps) menjadi 0,25% pada bulan Maret 2020. Sampai dengan akhir tahun 2020, the Fed masih mempertahankan suku bunga acuan pada level 0,25% tersebut dan diperkirakan masih akan bertahan pada level tersebut paling tidak sampai akhir tahun 2021. Dampak pelemahan ekonomi global juga direspon oleh beberapa negara dengan melakukan stimulus fiskal dan memperlonggar kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan bank sentralnya.

Perekonomian global diperkirakan akan kembali *rebound* di tahun 2021 sejalan dengan program vaksinasi global yang akan mengurangi dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, perbaikan ekonomi global diperkirakan bertahap dan baru akan mencapai kondisi seperti sebelum pandemi pada tahun 2022.

Analisis Perekonomian Indonesia

Karena pandemi ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada yang bisa mengukur dampaknya terhadap perekonomian global. Akibatnya sampai dengan Oktober 2020, banyak Lembaga internasional yang merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti terlihat pada tabel 1 di bawah. Baik keempat Lembaga Internasional maupun Pemerintah paling tidak sudah empat kali melakukan revisi karena memang telah terjadi perubahan yang signifikan sebagai akibat dari pandemi ini.

Awalnya Pemerintah memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% (YoY) di tahun 2020, namun dikoreksi menjadi (0,4%) – 2,3% di periode Maret-April 2020. Namun prakiraan ini diubah pada bulan Agustus 2020 menjadi (1,1%) – 0,2% setelah angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 (dua) tahun 2020 menunjukkan kontraksi yang lebih besar daripada prakiraan Pemerintah yaitu terkonsentrasi sebesar 5,32% (YoY). Walaupun sedikit mengalami penguatan, Pemerintah tetap merevisi ke bawah prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjadi (1,7%) – (0,6%). Hal ini sejalan dengan prakiraan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), IMF, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Tabel 1 - Beberapa Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2021 (% YoY)

Institusi	2020				2021	
	Sebelum COVID-19	Maret-April 2020	Agustus 2020	September-Oktober 2020	Agustus 2020	September-Oktober 2020
Pemerintah	5,3%	(0,4%) – 2,3%	(1,1%) – 0,2%	(1,7%) – (-0,6%)	4,5% – 5,5%	4,5% – 5,5%
ADB	5,2%	2,5%	(1,0%)	(1,0%)	5,30%	5,3%
IMF	5,1%	0,5%	(0,3%)	0,0%	6,10%	6,1%
World Bank	5,1%	(3,5%) – 2,1%	0,00%	(2%) – (1,6%)	4,80%	3,0% – 4,4%
OECD	5,0%	4,8%	(3,9%) – (2,8%)	(3,3%)	(Not Available)	5,3%

Sumber: Kementerian Keuangan “Informasi APBN 2021 Desember 2020”, ADB “Developing Asia’s Economic Outlook September 2020”, IMF “World Economic Outlook Oktober 2020”, World Bank “World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2020”, dan OECD “OECD Economic Outlook December 2020”

Untuk memitigasi penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi. Namun pembatasan ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB Indonesia yang turun menjadi 2,97% (YoY) di kuartal I 2020. Pertumbuhan PDB bahkan mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif di kuartal II dan kuartal III yaitu masing-masing sebesar (5,32%) (YoY) dan (3,49%) (YoY). Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan kuartalannya, pertumbuhan PDB sudah mulai menunjukkan perbaikan karena pada kuartal III 2020 sudah tumbuh 5,05% *Quarter over Quarter* (QoQ), yang jauh lebih tinggi daripada pertumbuhannya di kuartal II sebesar (4,19%) (QoQ).

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program stimulus yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah mengeluarkan stimulus dalam bentuk tambahan belanja dan pembiayaan negara sebesar Rp695,2 triliun, sementara di sisi moneter BI mengeluarkan kebijakan moneter yang longgar dalam bentuk tambahan likuiditas, dan OJK mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan moneter BI yang longgar juga dilaksanakan dalam bentuk penurunan suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate/BI7DRRR) sebesar 125 bps sepanjang tahun 2020, yaitu dari 5,00% pada awal tahun 2020 menjadi 3,75% pada akhir tahun 2020.

Kebijakan moneter yang longgar ini sebagai upaya BI untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Strategi operasi moneter tetap diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif. Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian.

Pemerintah memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0% (YoY) di tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB yang berkontraksi antara (1,7%) sampai dengan (0,6%) (YoY) di tahun 2020. Harga-harga barang di tahun 2021 diperkirakan akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi, namun pengendalian inflasi yang telah teruji dengan baik menyebabkan inflasi diperkirakan berada di level 3,0% (YoY). Sementara itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pasar global sehingga tekanan terhadap Rupiah masih berlanjut dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS diperkirakan sebesar Rp14.600. Harga minyak dunia diproyeksikan bertahan di level USD45/*barel* seiring dengan permintaan komoditas yang berlanjut di tahun mendatang.

Tabel 2. Indikator Ekonomi Indonesia

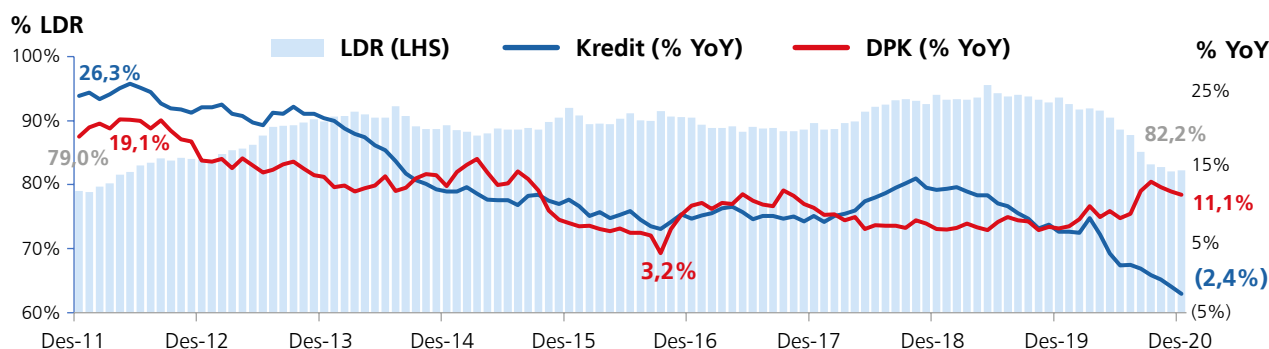
Indikator	Satuan	Outlook 2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	(%, YoY)	(1,7) sampai dengan (0,6)	5,0
Inflasi	(%)	1,5	3,0
Nilai Tukar Rupiah	(Rp/US\$)	14.650	14.600
Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan	(%)	3,5	7,29
Harga Minyak	(USD/ <i>barel</i>)	39	45
<i>Lifting</i> Minyak	(ribu <i>barel</i> /hari)	705	705
<i>Lifting</i> Gas	(ribu <i>barel</i> setara minyak/hari)	992	1.007

Sumber: Kementerian Keuangan “Informasi APBN 2021 Desember 2020”

Analisis Industri Perbankan

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan, karena ketidakpastian kondisi ekonomi dan meningkatnya potensi kredit yang macet membuat penyaluran kredit menjadi terhambat baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Akibatnya, pertumbuhan kredit turun dari 6,1% (YoY) di Januari 2020 menjadi (2,4%) (YoY) di Desember 2020. Namun demikian, kredit Bank Himbara masih dapat tumbuh sebesar 0,63% dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tumbuh sebesar 5,22%, serta Bank Syariah tumbuh sebesar 9,50% jika dibandingkan tahun 2019.

Grafik Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Loan to Deposit Ratio (LDR) Sektor Perbankan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Statistik Perbankan Indonesia Oktober 2020", berbagai sumber OJK

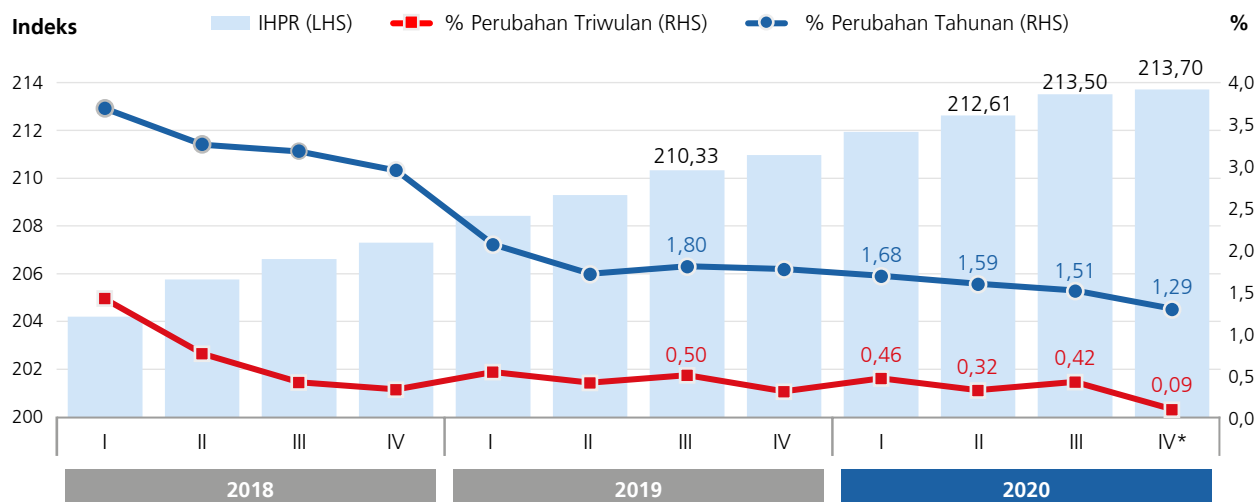
Untuk mendorong kinerja sektor perbankan, Pemerintah melakukan penempatan dana Pemerintah pada perbankan sebesar Rp66,7 triliun yang telah disalurkan untuk kredit sektor riil sebesar Rp323,8 triliun atau perbankan dapat memberikan *leverage* sebesar 4,8 kali. Stimulus yang diberikan Pemerintah tersebut berdampak pada stabilnya pertumbuhan kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mulai tumbuh positif secara pada beberapa bulan terakhir.

Untuk menjaga kualitas kredit sektor perbankan dari ancaman kredit macet di tengah meluasnya pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi perbankan yang awalnya akan berakhir tanggal 31 Maret 2021, namun akhirnya diperpanjang sampai 31 Maret 2022. Hingga akhir Desember 2020, restrukturisasi perbankan telah mencapai Rp971 triliun atau 18% dari total kredit dari sekitar 7,6 juta debitur Usaha Kecil Menengah (UKM) dan korporasi. Kebijakan ini menghasilkan profil risiko perbankan yang terkendali dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* pada level 3,06% setelah pada tahun 2019 berada pada level 2,53%, dan rasio NPL *net* sebesar 0,98% setelah pada tahun 2019 berada pada level 1,19%. Selain itu, permodalan perbankan cukup tinggi, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 23,78% yang pada tahun 2019 sebesar 23,31%.

Sejalan dengan itu, likuiditas perbankan masih cukup memadai ditandai oleh alat likuid perbankan yang terus meningkat mencapai sebesar Rp2.111 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.251 triliun, dan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh sebesar 11,11% (YoY). Alat likuid *liquidity coverage ratio/non-core deposit* berada pada level 146,72%, jauh di atas *threshold*-nya sebesar 50% dan 262,78%, lebih tinggi dari *threshold*-nya.

Tinjauan Industri Perumahan

Berdasarkan data Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia, pada kuartal III tahun 2020 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) mengalami pertumbuhan yang relatif stabil sebesar 0,42% (QoQ) dan 1,51% (YoY) dibandingkan dengan kuartal sebelumnya masing-masing sebesar 0,32% (QoQ) dan 1,59% (YoY). Relatif stabilnya pertumbuhan ini bersumber dari naiknya pertumbuhan indeks harga rumah tipe menengah yang dapat mengkompensasi penurunan indeks harga rumah tipe kecil dan besar. Namun demikian, adanya pandemi COVID-19 dan diterapkannya PSBB mendorong penurunan penjualan properti residensial primer pada kuartal III tahun 2020, yang tercermin dari meningkatnya kontraksi pertumbuhan menjadi (30,93%) (YoY) dari (25,60%) (YoY) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR)

*) Perkiraan

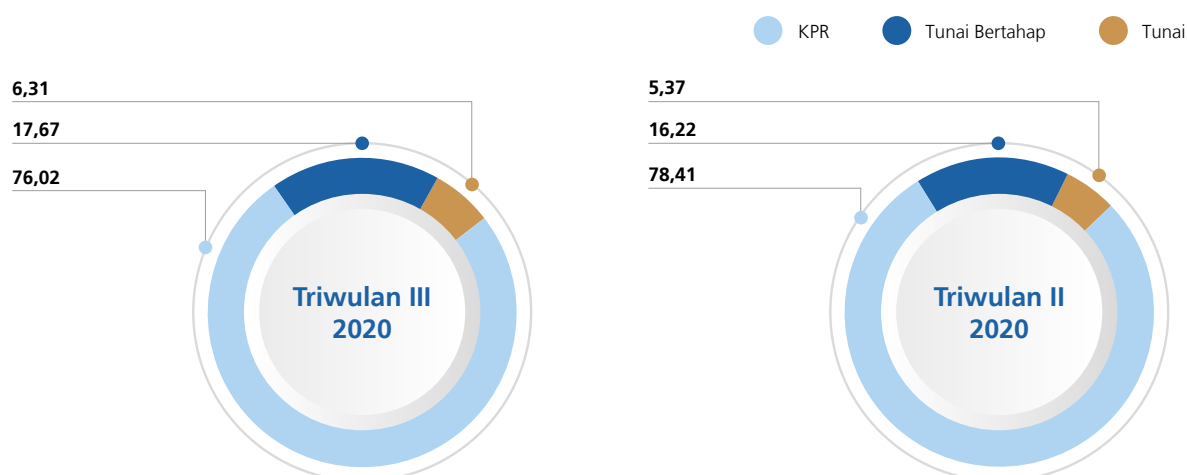
Sumber: Bank Indonesia "Survei Harga Properti Residensial Kuartal III 2020"

Harga properti residensial diperkirakan akan terus turun di kuartal IV tahun 2020, baik secara kuartalan maupun tahunan. Estimasi penurunan ini didorong oleh turunnya pertumbuhan harga rumah semua tipe baik secara kuartalan maupun tahunan. Penurunan pertumbuhan harga ini tidak terlepas dari masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020. Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi pada awal tahun 2021 akan dapat menjadi *game changer* yang akan mendorong keyakinan masyarakat untuk kembali membeli rumah di tahun 2021.

Dari sisi pembiayaan konsumen, persentase jumlah konsumen yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian properti residensial pada kuartal III tahun 2020 sebesar 76,02%, turun dari 78,41% pada kuartal sebelumnya. Sementara itu, konsumen yang melakukan pembelian dengan tunai bertahap sebesar 17,67% dan sisanya sebesar 6,31% dengan pembayaran tunai.

Sumber Pembiayaan Konsumen Membeli Properti Residensial dan Konsumen Pembeli Properti Residensial

(dalam %)



Sumber: Bank Indonesia "Survei Harga Properti Residensial Kuartal III 2020"

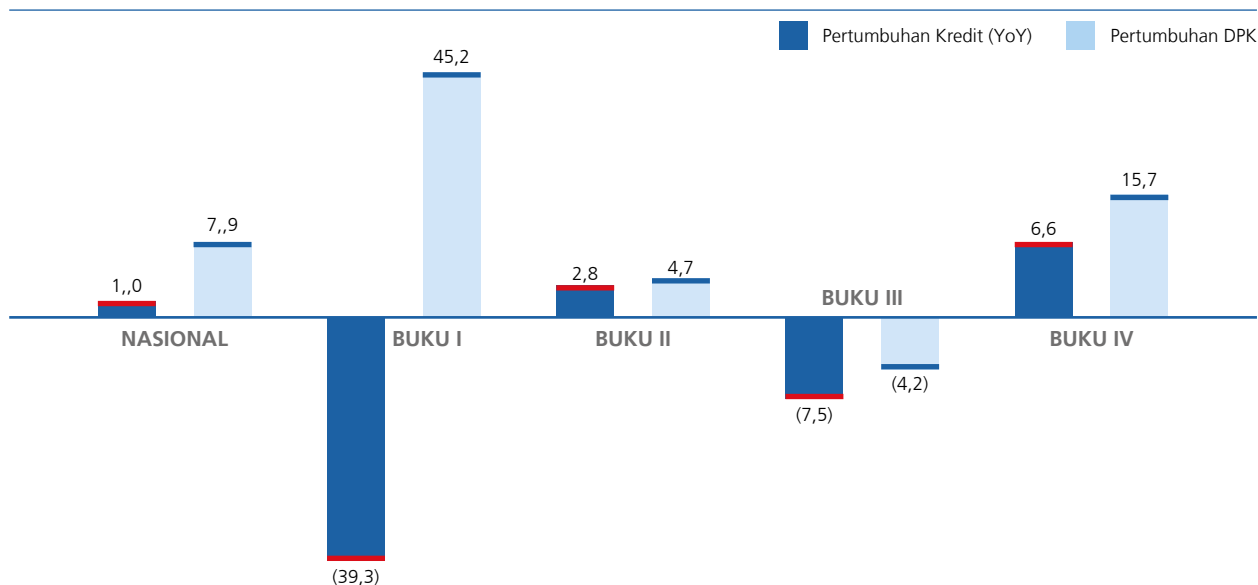
Pertumbuhan KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada kuartal III tahun 2020 sebesar 0,62% (QoQ) dan 2,05% (YoY). Pertumbuhan tahunan dari KPR dan KPA terus menunjukkan tren yang menurun sejak kuartal I tahun 2019 seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia.

Analisis Posisi Perseroan dalam Industri Perbankan

Meskipun di tengah tantangan pandemi, kredit nasional masih dapat tetap tumbuh, meskipun masih terbatas. Sampai dengan bulan Agustus 2020, kredit tumbuh 1,04% (YoY) sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,9% (YoY), hal ini diakibatkan oleh kinerja korporasi yang tertekan dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi. Secara garis besar, pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Agustus 2020 masih dikontrol oleh Bank BUKU IV, dimana pada bulan Agustus 2020 untuk kredit dan DPK Bank BUKU IV masing-masing tumbuh 6,6% (YoY) dan 15,7% (YoY).

Grafik Pertumbuhan Kredit dan DPK Perbankan Nasional

(dalam %)



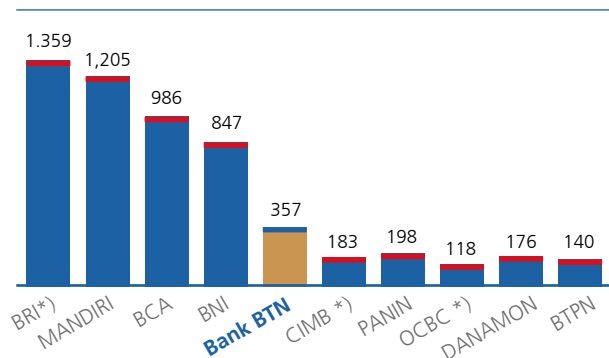
Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agustus 2020

Stabilitas sektor perbankan nasional masih terjaga, meskipun masih terdapat risiko dari meluasnya dampak pandemi. Sampai dengan Agustus 2020, total restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai 18,64% dari total kredit. Namun demikian, kesehatan sektor perbankan nasional masih terjaga yang ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (CAR) bulan Agustus 2020 yang sebesar 23,39% dan kualitas kredit yang masih rendah (rasio NPL *Gross* 3,22% dan NPL *Netto* sebesar 1,14%). Ke depan, intermediasi perbankan diperkirakan kembali membaik sejalan prospek pemulihan ekonomi domestik dan kebijakan Bank Indonesia tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Untuk menggambarkan posisi Perseroan di antara *Top 10* (sepuluh) Perbankan Nasional per September 2020 dapat disampaikan pada penjelasan sebagai berikut:

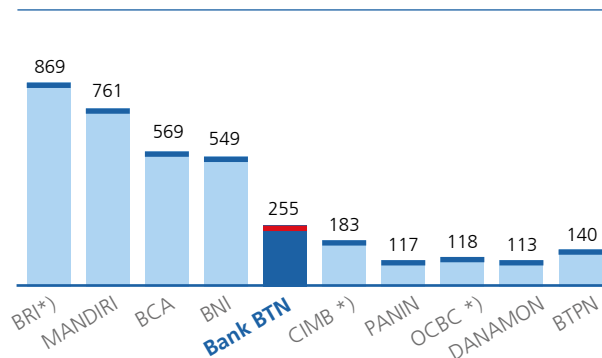
Posisi Ke-5 Secara Size Aset

(dalam Triliun)



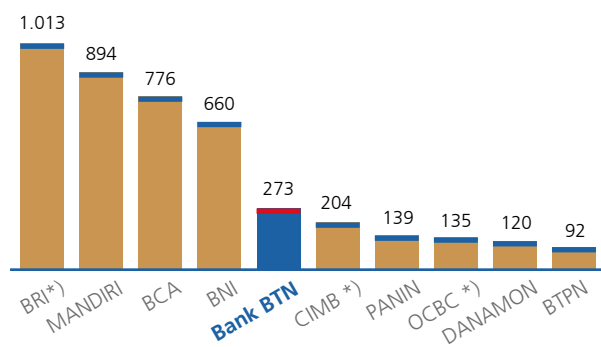
Posisi Ke-5 Untuk Size Kredit

(dalam Triliun)



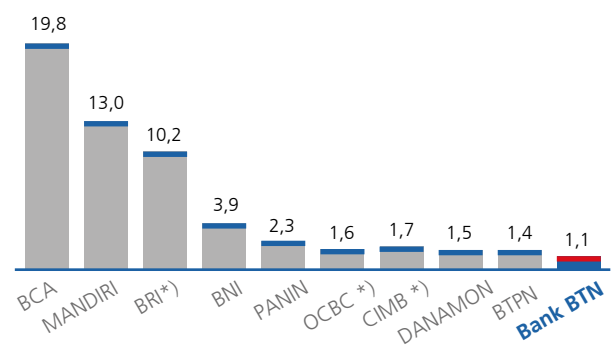
Posisi Ke-5 Untuk Size DPK

(dalam Triliun)



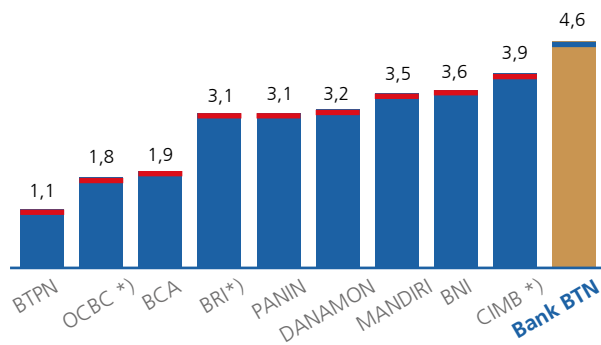
Posisi Ke-5 Untuk Laba

(dalam Triliun)



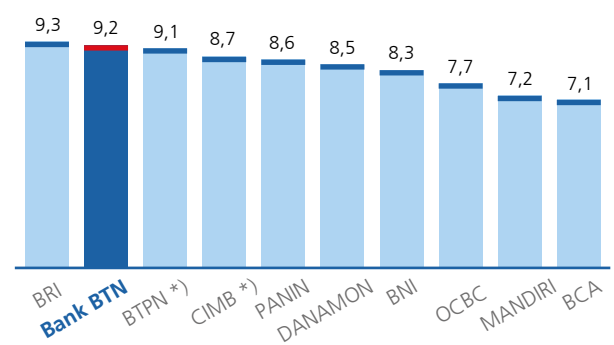
Posisi Ke-10 Untuk NPL

(dalam %)



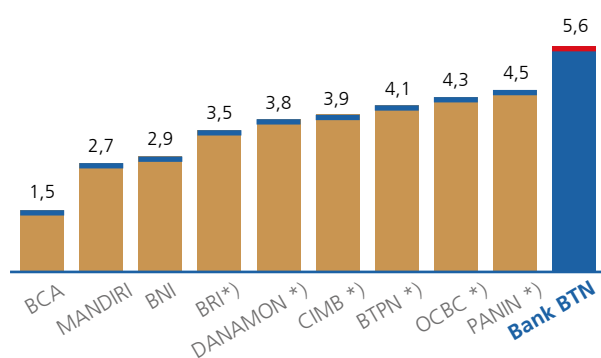
Posisi Ke-2 Untuk Yield

(dalam %)



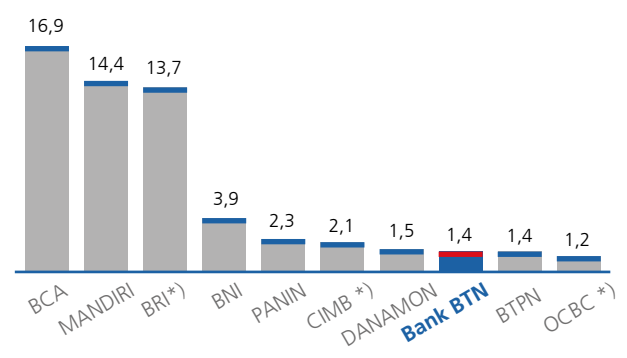
Posisi Ke-2 Untuk Cost of Fund/CoF

(dalam %)



Posisi Ke-7 Untuk Fee Based Income/FBI

(dalam Triliun)



*) Menggunakan Publikasi Juni 2020

Sumber: Laporan Publikasi Perbankan September 2020

Tinjauan Operasional

Strategi Perseroan Tahun 2020

Mempertimbangkan analisis *SWOT* dan perkembangan ekonomi domestik, maka landasan strategi bisnis tahun 2020 difokuskan untuk meningkatkan kualitas bisnis dengan tiga prioritas utama yaitu meningkatkan profitabilitas, perbaikan proses dan kualitas kredit dan pembenahan infrastruktur IT dan SDM.

Tema Kebijakan Umum Direksi dan Fokus Strategi 2020

"FOKUS PERBAIKAN KUALITAS BISNIS"



Strategi Pendanaan

Rekomposisi Pendanaan dan Meningkatkan Kontribusi DPK Ritel

- Rekomposisi sebagian dana *wholesale* jatuh tempo dengan DPK dan *wholesale* baru dengan *rate* lebih rendah.
- Meningkatkan Kontribusi Deposito Ritel.
- Mengembangkan CASA berbasis transaksional.



Strategi Perkreditan

Meningkatkan Kontribusi Kredit Margin Tinggi, Perbaikan Proses dan Kualitas

- Meningkatkan KPR Non Subsidi di segmen MBR untuk mengurangi ketergantungan pada KPR Subsidi.
- Meningkatkan Kredit bermargin tinggi.
- Melanjutkan perbaikan proses bisnis dan pembenahan dokumen kredit.
- Fokus pada penurunan NPL dan kolektibilitas.



Strategi Fee Based Income

Mengembangkan Fee Based Income berbasis transaksi dan layanan

- Mengembangkan *fee* dari transaksi *electronic channel*.
- Meningkatkan *fee treasury* dan mengembangkan sumber FBI baru.



Corporate Action : Action permodalan dan transaksi anak usaha untuk mengembangkan bisnis.



SDM : Pengembangan kompetensi pegawai dan organisasi untuk mengembangkan produktivitas.



IT : Mengembangkan otomatisasi proses *back-end*, implementasi *digital banking* dan ekosistem KPR *digital*.



Manajemen Risiko : Memperkuat penerapan manajemen risiko pada proses bisnis dan operasional.

Fokus Strategis Bisnis

Fokus strategi bisnis Perseroan terdiri atas Strategi Pendanaan, Strategi Perkreditan dan Strategi *Fee Based Income* yang diuraikan sebagai berikut.

Strategi Bidang Pendanaan

1. Strategi Pengembangan *Current Account Saving Account (CASA)*

- Meningkatkan penjualan produk secara *bundling* melalui program BTN Solusi.
- Meningkatkan akuisisi dan transaksi *e-channel* dengan mengembangkan *mobile banking*, fitur *payment* pada *e-channel*, pengembangan EDC *Acquirer* dan program promo *merchant*.
- Mengembangkan *sales activity management* melalui implementasi inisiatif *microplanning* di kantor cabang dan *outlet*.
- Program re-aktivasi tabungan debitur KPR yang sudah tutup dan lunas.
- Memperbaiki *Key Performance Indikator (KPI)* pengumpulan DPK.
- Mengembangkan produk DPK yang mendorong transaksional (Tabungan Bisnis dan Program Giro *Merchant*).
- Membangun *marketing communication* secara terintegrasi untuk reposisi tabungan bagi segmen menengah dan debitur KPR Non Subsidi.
- Mengembangkan *virtual account*, *monitoring*, rekening giro dan *cash management* untuk debitur Komersial dan Korporasi.

2. Strategi Pengelolaan Dana Institusi

- Meningkatkan akuisisi Satuan Kerja (SATKER) Pemerintah dan Interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk mengembangkan dana murah institusi segmen Pemerintahan
- Meningkatkan akuisisi dan utilisasi *cash management* pada nasabah lembaga dan korporasi
- Program akuisisi nasabah *payroll* melalui penjualan produk secara *bundling* (BTN Solusi).

3. Rekomposisi Dana Mahal (Deposito dan *Wholesale*)

- Rekomposisi deposito komersial dengan meningkatkan kontribusi deposito ritel dan komersial di bawah Rp2 miliar.
- Program peningkatan akuisisi deposito ritel di cabang dan *outlet* termasuk prioritas.
- Membagi sales layanan prioritas menjadi *farmer* dan *hunter* untuk meningkatkan produktivitas *Priority Banking Officer (PBO)*.
- Repricing* deposito dan dana *wholesale* yang jatuh tempo, dengan *rate* yang lebih rendah.

4. Optimalisasi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Meningkatkan Likuiditas Melalui Alternatif Pinjaman atau Pendanaan Pemerintah Akibat Penundaan Pembayaran Pokok Kredit dari Restrukturisasi Kredit Terdampak COVID-19

Strategi Bidang Kredit

1. Mengoptimalkan Porsi Perseroan Pada Program KPR Subsidi Pemerintah

- Mengoptimalkan porsi Perseroan pada tambahan kuota KPR Subsidi, KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di tahun 2020 yang menasar Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan *fixed income*.
- Mengembangkan berbagai skema dan program kepemilikan rumah, termasuk bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), dan TAPERA.
- Partnership* dengan *stakeholder* perumahan untuk mencetak pengembang baru di segmen Subsidi dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program MBA Mini *in Property and School of Developers*.

2. Selektif Pada Pengembangan Bisnis KPR Non Subsidi, *Personal Loan* dan Kredit Korporasi

- Partnership* untuk membangun perumahan yang terjangkau diperkotaan melalui proyek *Transit Oriented Development (TOD)* untuk rumah susun atau apartemen yang bekerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.
- Mengembangkan skema KPR MBR dengan memaksimalkan stok rumah proyek subsidi dan program KPR Harapan untuk pembiayaan harga rumah Rp150 juta-Rp300 juta secara selektif yang menasar segmen *fixed income*.
- Mengembangkan kerja sama KPR dan *personal loan* dari Program BTN Solusi.
- Meningkatkan akuisisi KPR pada segmen *millennial* melalui program KPR Gaeess!
- Meningkatkan kontribusi penjualan KPR Non Subsidi secara *online* melalui *mobile apps* BTN Properti dan portal BTN Properti dengan optimalisasi program KPR *from Home*.
- Mengembangkan kredit *personal loan* melalui program *bundling* BTN – Solusi, KAR Flexy, kerja sama TASPEN dan *joint finance* BTPN.
- Meningkatkan kredit korporasi secara selektif, dengan menasar segmen BUMN.
- Program KPR dan KPA *takeover* cicilan bertahap.
- Program Kredit Agunan Rumah (KAR) *top up*.
- Pembelian portofolio kredit *high yield*.

Strategi Bidang Perbaikan Kualitas Kredit

1. Memperbaiki Proses Inisiasi Kredit (*Loan Origination*)

- Optimalisasi *Regional Loan Processing Center* (RLPC).
- Regionalisasi untuk kredit dengan plafon di bawah Rp100 miliar ke kantor wilayah.
- Sentralisasi pengelolaan debitur BUMN dan Non BUMN di atas Rp100 miliar.
- Mengembangkan *decision engine* untuk *credit approval*.
- Mengembangkan *credit scoring model*.
- Asuransi untuk kredit KPR di bawah Rp500 Juta dan kredit komersial di bawah Rp10 miliar.
- Pengembangan dan implementasi *rating developer*.
- Implementasi *management stock*.
- Automatisasi dan digitalisasi proses KPR.

2. Memperkuat *Collection Management System*

- Memperkuat fungsi *desk coll*.
- Memperbaiki kualitas data debitur.
- Mengembangkan *collection system* (*collection scoring, collection system, mobile collection*).
- Memperbaiki proses bisnis restrukturisasi dan kualitas kredit yang sudah direstrukturisasi.
- Memperbaiki *consumer collection*, termasuk *monitoring* Tenaga Alih Daya (TAD) *collection, icoll usage* dan *contact tracing*.

3. Mempercepat Penyelesaian Kredit NPL

- Memperluas *channel* penjualan, melalui portal rumah murah dan *partnership* dengan e-commerce di bidang properti (olx, rumah123).
- Membentuk unit kerja baru untuk mempercepat penyelesaian NPL dan sentralisasi penanganan akun NPL yang besar.
- Meningkatkan penjualan kredit macet secara *bulk* melalui kerjasama investor, penjualan PPA, PAB, *Secondary Mortgage Facility* (SMF) dan jalur hukum.
- Mengembangkan *exit strategy* melalui Kerja sama KPR *Recycle* dengan pihak ketiga (kolektor/*cessie transfer* termasuk PPA, litigasi, NP *sales*, dan investor baru seperti TASPEN dan BPJS).

4. Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Berupa Relaksasi Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Bagi Debitur Yang Terdampak COVID-19 sebagaimana POJK No. 11/POJK No.03/2020, dengan Persyaratan dan Mekanisme Sebagai Berikut:

- Kolektibilitas debitur berada pada Kolektibilitas 1 (satu) dan Kolektibilitas 2 (dua) pada Posisi 29 Februari 2020.
- Kemampuan mengangsur debitur diprediksi menurun akibat dampak sosial-ekonomi pada beberapa sektor ekonomi yang terdampak signifikan atas pandemik COVID-19.

- Restrukturisasi dapat dilakukan secara *bulk*.
- Restrukturisasi dapat diinisiasi oleh Perseroan, apabila debitur tidak bisa ditemui dan dipastikan tempat kerja atau usaha tutup akibat dampak COVID-19.

5. Memperluas *Channel* Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak COVID-19, Melalui Portal Rumah Murah BTN.

Strategi Bidang *Fee Based Income* (FBI)

1. Mengembangkan *Fee* dari Transaksi *E-Channel*

- Akselerasi kerja sama *merchant*, untuk meningkatkan *usage e-channel* nasabah.
- Meningkatkan fitur dan layanan *e-channel*, untuk menambah akuisisi user *mobile banking* dan *Cash Management System* (CMS).
- Meningkatkan *trade finance* dan *transaction banking*, untuk meningkatkan *fee based* segmen korporasi.

2. Meningkatkan *Fee* Transaksi *Treasury* dan Mengembangkan Sumber FBI Baru

- Memperkuat organisasi *treasury* untuk meningkatkan transaksi dari sisi *treasury*.
- Mengembangkan produk dan kerjasama bisnis *wealth management* untuk meningkatkan *Asset Under Management* (AUM) Non DPK.
- Mengembangkan sumber-sumber FBI baru seperti *trade finance*, *fee remitansi* dan transaksi *agent banking*.
- Penjualan produk *treasury* dan sekuritisasi *retail* kepada nasabah BTN Prioritas.

Inisiatif Pilar *Enabler*

Inisiatif Pilar *enabler* terdiri atas Strategi Permodalan dan Strategi Infrastruktur IT, Strategi Penerapan *Governance, Risk dan Compliance* (GRC) dan Strategi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang diuraikan sebagai berikut.

Strategi Permodalan

Melakukan *action* permodalan untuk mengembangkan bisnis melalui peningkatan profitabilitas dan pinjaman *subdebt* sebesar Rp4 triliun – Rp5 triliun.

Strategi Infrastruktur IT

Strategi penguatan IT difokuskan untuk mendukung inisiatif *low cost and transaction banking*, pengembangan sistem perkreditan dan efisiensi proses melalui otomatisasi proses *back-end*.

- Pengembangan aplikasi BTN *Property Portal* berbasis *mobile apps* dan integrasi *property portal* dengan *Loan Origination System* (LOS).
- Membentuk solusi *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mengetahui *360 degree customer view, profiling* dan peningkatan kapabilitas pelayanan nasabah.

3. Mengembangkan aplikasi *internet banking and mobile banking* melalui peningkatan *platform* dan integrasi antar sistem seperti *iColl*, *iCash* dan *property portal*.
4. Mengembangkan *management tools* untuk aktivitas *marketing* dan *sales* dengan membentuk *digital marketing and sales tools*.
5. Perbaikan secara menyeluruh sistem *wealth management*
 - a. Mengembangkan *Electronic Data Warehouse* sebagai *data analytics* unit sales.
 - b. Meningkatkan kapabilitas *data mining* untuk *cross sell* dari segmen lain.
6. Peningkatan *operational supporting tools* saat ini, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko
7. Memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja
 - a. Optimalisasi implementasi *risk profiling – Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Loss Event Default Database (LED)* dan Peta Kepatuhan.
 - b. Pengembangan *Credit Scoring Model (CSM)*.
8. Integrasi *Loan Origination System* dan penambahan iCremo untuk melakukan monitoring penyaluran kredit.
9. *Reengineering* proses bisnis pembiayaan yang lebih mengarah pada model sentralisasi melalui digitalisasi sistem *back office* untuk mengautomasi proses dan menghubungkan ke berbagai *database*.
 - c. Melaksanakan program *Governance Culture*
 - d. Melaksanakan program *Learning Culture*
2. Penguatan penerapan *performance based culture*
 - a. Program *incentive* untuk benefit dan produktivitas pegawai.
 - b. Perbaikan *cascading* dan sinkronisasi KPI dari level unit sampai dengan individu.
3. Menyusun *strategic man power planning* berbasis produktivitas unit kerja.
4. Memperkuat internalisasi *employer value proposition* melalui aktivitas rekrutmen terarah untuk menarik *top talent*.
5. Optimalisasi metode *e-learning* dalam mengembangkan kapabilitas pegawai melalui portal dan aplikasi BTN *Digital Room for E- Learning Modules* (BTN Dream).
6. *Tracking* dan monitoring produktivitas pegawai yang menjalankan *Working From Home (WFH)* secara *digital*, melalui aplikasi BTN B-Gate dan WFH for Bitniz.
7. Melakukan program 3C (*Cross Selling* dengan target minimal *sales call* 20 (dua puluh) nasabah per hari, *Cleansing Data Pipeline* serta *Updating Data* dan *Collection* melalui aplikasi *mobile collection*) bagi pegawai yang sedang menjalankan *Work From Home (WFH)*.

Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Strategi Penerapan Governance, Risk dan Compliance (GRC)

Penerapan GRC yang terintegrasi diimplementasikan melalui perbaikan proses bisnis secara *continue* dan peningkatan kapabilitas organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG serta pengelolaan risiko secara terintegrasi dan komprehensif. Adapun inisiatif strategis untuk mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *reengineering* proses pemberian kredit, *collection*, *remedial* dan proses utama lainnya.
2. Melaksanakan penerapan *integrated GRC* dengan melakukan pemantauan terhadap *Key Performance Indicator (KPI)*, *Key Risk Indicator (KRI)*, dan *Key Compliance Indicator (KCI)*.
3. Meningkatkan standar *corporate governance* menurut 11 pilar BI/OJK, *standar Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dan standar *sustainability finance*.

Strategi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara garis besar, penguatan bidang SDM di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan penerapan budaya kerja SIIPS (Sinergi, Integritas, Inovasi, Profesionalisme dan Spirit Mencapai Keunggulan)
 - a. Melaksanakan program *Sales Culture*
 - b. Melaksanakan program *Performance Culture*

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Perseroan dalam penerapan manajemen risiko dan kepatuhan ditujukan untuk memperkuat pilar-pilar pengelolaan risiko operasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam aktivitas operasional bisnis Perseroan.

1. Strategi Pengelolaan Dampak COVID-19

Memperhatikan upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial dan tahapan *New Normal* yang akan diberlakukan Pemerintah, di tahun 2020 Perseroan telah menyusun berbagai kebijakan manajemen risiko agar aktivitas bisnis dan operasional Perseroan dapat berjalan, diantaranya adalah:

- a. Aktivasi *Business Continuity Management (BCM)*, Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
- b. Mengaktifkan *Business Continuity Plan (BCP)*, dengan melakukan *split operation* Divisi Kritis ke lokasi *Work Recovery Area (WRA)*.
- c. Pembentukan Tim *Taskforce* untuk memonitoring dan kecukupan likuiditas, kualitas kredit, produktivitas *outlet* dan pengajuan restrukturisasi kredit.
- d. Melakukan *split operation* untuk memastikan *physical distancing* pada beberapa *Working Remote Area (WRA)*.

- e. Pemberlakuan kebijakan *Work From Home* (WFH), bagi Kantor Pusat, Wilayah dan Cabang sebanyak 30% - 70% pada masing-masing unit kerja.
- f. *Monitoring* produktivitas pegawai WFH secara digital melalui aplikasi *B-Gate* dan WFH for Bitniz.
- g. Penyesuaian dan pengurangan jam operasional dan layanan kantor, selama masa pembatasan sosial dan transisi pemberlakuan *New Normal* dan layanan kantor, menjadi pukul 08.00 – 16.00
- h. Penutupan sementara beberapa *outlet* (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas) di daerah yang terkena pandemi COVID-19.
- i. Penerapan protokol kesehatan untuk memitigasi penyebaran COVID pada lingkungan kerja, melalui:
 - Pengecekan suhu tubuh pegawai, nasabah dan tamu.
 - Penggunaan masker, sarung tangan, *face shield*, menyediakan *hand sanitizer*, dan penerapan *physical distancing*, penyemprotan disinfektan.
 - Pemasangan sekat pembatas.

2. Manajemen Risiko untuk Mempersiapkan Implementasi *New Normal*

Untuk menyiapkan implementasi *new normal*, di awal Juni tahun 2020 Perseroan telah Menyusun beberapa protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan WFH dan *Work From Office* (WFO).
- b. Menyediakan dan memonitor kelengkapan fasilitas *safety work* (*thermogun*, masker, sarung tangan, *face shield*).
- c. Pelaksanaan *cloud meeting* baik pada agenda Rapat Direksi, Rapat Internal maupun Rapat bersama pihak eksternal.
- d. Fasilitas Insidental (antar jemput pegawai).
- e. Melanjutkan *split operation*, penutupan/pembukaan *outlet* di daerah terkena pandemi COVID-19.
- f. Protokol *physical distancing* (antar pegawai, antar pegawai dengan nasabah, antar nasabah/pihak ketiga).

3. Review Kebijakan Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko, Perseroan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan *review* dan/atau pengkinian. Dengan mengacu pada beberapa peraturan dan *best practice* manajemen risiko, antara lain mencakup Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kerangka Kerja *Basel Accord* dan/atau

perkembangan bisnis Perseroan, dilakukan *review* kebijakan manajemen risiko sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan penyusunan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pengelolaan risiko, hasil analisis lingkungan bisnis dan/atau spirit perbaikan bisnis di masa depan. Hal ini merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dimana Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Perseroan dalam mengelola Risiko. *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dievaluasi agar sejalan dengan *Trigger Level Recovery Plan* dan menjadi acuan dalam penyusunan strategi bisnis di dalam RKAP 2020.
- b. Melakukan *review* atas beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan risiko Perseroan terutama untuk keperluan internal.

4. Peraturan Internal Tentang Kerangka Kerja Validasi Model Risiko

Perseroan telah memiliki Peraturan intern tentang kerangka kerja validasi model risiko yang mencakup model risiko kredit dan model risiko pasar dengan strategi membangun *risk scoring model* yang lebih efektif.

5. Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat Utilisasi *Risk Management Tools*

- a. Implementasi sistem pemantauan monitoring risiko pasar/*Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) dan risiko likuiditas (modul pelaporan *Liquidity Coverage Ratio/LCR*, *stress testing*, laporan tekanan dan profil risiko likuiditas).
- b. Melakukan Pelaporan IRRBB ke OJK
Dengan terbitnya SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) Bagi Bank Umum, Perseroan telah melakukan persiapan data untuk laporan IRRBB ke OJK pertama kali pada bulan Juli 2019 untuk Posisi Juni 2019.
- c. Melakukan *Enhancement* aplikasi monitoring Risiko Likuiditas
Sesuai POJK No.50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*) bagi Bank Umum, maka dilakukan *enhancement* berupa penambahan modul pelaporan NSFR yang direncanakan awal tahun 2019.

- d. *Pemanfaatan Terminal Bloomberg*
Pemanfaatan Terminal *Bloomberg* mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif yang mampu:
 - Menyediakan data pasar terkait *Market Risk* mendukung penyediaan data pasar terkait *Market Risk*, meliputi: *Yield Curve*, *VaR Surat berharga* dan *Market Price*.
 - Pelaksanaan *mark to market* harian.
 - Sebagai bahan analisis eksposur risiko pasar yang lebih komprehensif.
 - Menyediakan data dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas dan risiko kredit.
- e. *Roadmap implementasi manajemen risiko Perseroan 2020 sampai dengan 2022*
Dalam membangun penerapan manajemen risiko yang semakin baik dan handal, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, Perseroan memperkuat peran manajemen risiko dengan *create value through optimizing The Effective Risk Management*. Dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*, Optimalisasi *Integrated Risk Management*, *Risk Based Performance*, Optimalisasi *Credit Risk Datamart*, *Internal Credit Rating (ICR)*, *Credit Scoring Model (CSM)*, Implementasi PSAK 71, Pengembangan *Behavioral Scoring* dan *Collection Scoring* (termasuk backtesting model, Optimalisasi LED, RCSA dan *Key Risk Indicator (KRI)*), serta *Risk Based Bank Operational*. Pengembangan manajemen risiko tersebut keseluruhannya guna mendukung tercapainya *effective capital*, *optimal earnings*, *controlled risk* dan Tata Kelola yang Baik.
- f. *Credit Scoring Model (CSM) Enhancement*
Review dan evaluasi parameter CSM untuk mendapatkan parameter yang presisi dalam pemberian kredit kepada calon debitur yang rendah potensi risikonya.
- g. *Internal Credit Rating (ICR) Enhancement*
ICR akan di-review secara komprehensif meliputi parameter, kebijakan dan alur bisnis, utilitas/ penggunaan dan sistemnya untuk mendapatkan *rating-rating* debitur komersial yang lebih presisi dalam rangka memperbaiki kualitas kredit komersial.
- h. *Risk Premium*
Produk-produk kredit, baik konsumen maupun komersial, membutuhkan *pricing* yang kompetitif di pasar tetapi tetap memperhatikan tingkat risiko (*risk base*) dengan menambahkan *risk premium* dalam komponen suku bunga kredit. *Risk premium* dapat dibedakan antara debitur prima (*low risk*) dan debitur biasa, sehingga perlu sistem dalam perhitungan *risk premium* yang lebih presisi dengan metodologi yang benar.
- i. *Probability of Default (PD)*, *Loss Given Default (LGD)* dan *Exposure at Default (EAD)*
Komponen PD, LGD dan EAD diperlukan dalam perhitungan CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai) Perseroan. Penerapan PSAK 71 di tahun 2020 menggunakan pemodelan CKPN yang berbeda dengan CKPN versi PSAK 50/55 sehingga diperlukan sistem baru yang memadai.
- j. *Operational Risk Tools*
Perseroan saat ini dalam pengukuran risiko operasional telah memiliki aplikasi LED dan RCSA. Untuk periode selanjutnya Perseroan akan menginisiasi aplikasi pengukuran risiko operasional lainnya yaitu *Key Risk Indicator (KRI)*. Selanjutnya Perseroan akan mengintegrasikan ketiga aplikasi tersebut menjadi perangkat risiko operasional.
- k. *Business Continuity Management (BCM)*
Melakukan *review* terhadap kebijakan BCM meliputi:
 - Review kebijakan *Business Impact Analysis (BIA)*.
 - Update kebijakan *Business Continuity Plan (BCP)*.
 - Update penentuan *work recovery area* unit kerja.
- l. Melanjutkan program kerja/penyusunan dan pengembangan berikut:
 - Kajian Kebijakan, produk dan aktivitas baru.
 - Berdasarkan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), salah satu wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah mengkaji usulan aktivitas dan/ atau produk baru yang dikembangkan oleh *risk taking unit* atau unit bisnis. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Perseroan untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem, kebijakan dan prosedur yang digunakan, serta dampaknya terhadap eksposur risiko Perseroan secara parsial maupun keseluruhan. Kajian atas kebijakan tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:
 - Kajian yang berkaitan dengan proses bisnis khususnya risiko operasional terkait proses bisnis dan struktur organisasi, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
 - Kajian yang dilakukan atas aktivitas penyediaan dana dalam hal ini adalah kajian atas prosedur dan kebijakan perkreditan serta produk kredit.
 - Kajian atas kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan risiko pasar dan likuiditas termasuk produk dana.

m. *Monitoring dan Stress testing*

- Melakukan *monitoring* posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- Melakukan *stress testing idiosyncratic* untuk risiko pasar, likuiditas dan kredit secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophic*.
- *Monitoring Recovery Plan*
Monitoring Recovery Plan dilakukan secara bulanan dan disampaikan pada forum *Performance Review* dan Rapat ALCO bulanan. Selain itu, Perseroan akan melakukan pengkinian atas dokumen *Recovery Plan* paling lambat bulan November 2019 dan disampaikan kepada OJK dan Kementerian BUMN selaku PSP apabila terdapat perubahan *trigger level* dan opsi pemulihan.

n. Internalisasi Budaya Risiko

- Meningkatkan sinergi antara satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit intern sebagai *three lines of defense*.
- Implementasi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Budaya Risiko kepada seluruh insan BTN-ers di unit kerja.
- Menyampaikan program *risk awareness* melalui sms dan *email blast*.
- *Sharing* pengetahuan manajemen risiko melalui media buletin internal dan *BTN Smart Share*.
- Implementasi aplikasi manajemen risiko (*RCSA* dan *LED*).

o. *Maintenance implementasi ISO di ERMD melalui Surveillance ISO 9001:2015 di Enterprise Risk Management Division untuk meningkatkan standar layanan mutu ERMD kepada seluruh stakeholders.*p. Revaluasi dan *Stress Testing* pemodelan PSAK 71.

6. Laporan Profil Risiko

Laporan Profil Risiko adalah laporan tentang penilaian eksposur risiko Perseroan yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan yang merupakan *Inherent Risk* (IR) dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang di dalamnya mencakup Tata Kelola Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen (SIM), Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sistem Pengendalian Risiko. Kedua komponen utama dalam laporan profil risiko yakni *Inherent Risk* (IR) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dipadukan untuk setiap risiko sehingga menghasilkan tingkat risiko yang selanjutnya digabungkan dalam

peringkat risiko komposit. Perseroan menyajikan laporan profil risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya paling lambat dilaporkan 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan harus sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dasar pelaporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

7. Risk Based Bank Rating (RBBR)/Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Laporan RBBR merupakan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Perseroan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan. Perseroan wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perseroan secara individual kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan posisi akhir bulan Desember. Dasar pelaporan RBBR kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, regulator perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator perbankan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perseroan secara umum dilaksanakan oleh Unit Kerja *Compliance and Governance Division* berada di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan. Selain bertanggungjawab dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan, Unit Kerja *Compliance and Governance Division* juga turut mengelola penerapan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance*) serta pengelolaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Perseroan.

1. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

a. Budaya Kepatuhan

Seluruh jajaran insan BTN-ers wajib dan bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan. Budaya kepatuhan ditumbuhkan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* tentang kepatuhan dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya pada masing-masing unit kerja. Pelaksanaan *awareness*, antara lain melalui pembekalan dan internalisasi budaya kepatuhan dalam bentuk pembekalan kepada pegawai baru dan *refreshment* bagi pegawai *existing*.

b. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Unit Kerja *Compliance and Governance Division* berkoordinasi dengan *Enterprise Risk Management Division (ERMD)* melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

c. Tingkat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan langkah untuk pengharmonisasian antara kepentingan komersial Perseroan dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan regulator perbankan, peraturan perundang-undangan maupun ketentuan otoritas pengawas lainnya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi dan *monitoring* ketentuan internal.

Secara berkala dan berkelanjutan, Perseroan melalui Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review dan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku sebagai bagian dari rangkaian proses untuk menciptakan dan membangun budaya kepatuhan dari setiap unit bisnis di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, serta untuk memastikan bahwa ketentuan internal Perseroan senantiasa sesuai, tidak melanggar dan mengacu pada peraturan regulator yang berlaku.

- Kajian dan Opini Kepatuhan

Sebagaimana diatur dalam peraturan pembentukan ketentuan internal Perseroan, Satuan Kerja Kepatuhan bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Legal melakukan kajian atas seluruh *draft* kebijakan internal Perseroan yang akan diterbitkan serta kajian atas produk dan aktivitas baru yang akan diluncurkan. Kajian kepatuhan dimaksud adalah untuk upaya memastikan

bahwa kebijakan serta produk dan aktivitas baru dimaksud telah sesuai, tidak melanggar dan mengacu pada ketentuan regulator terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sosialisasi Ketentuan

Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa memberikan sosialisasi atas ketentuan pihak eksternal yang baru dikeluarkan oleh regulator serta peraturan perundang-undangan. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah ringkasan pokok-pokok ketentuan yang baru serta *gap analysis* antara operasional atau ketentuan internal Perseroan dengan ketentuan yang baru dikeluarkan. Pokok-pokok ketentuan regulator serta hasil *gap analysis* menjadi materi sosialisasi tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait serta memonitor penerapan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.

- Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Regulator dan Otoritas Yang Berwenang.

- Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi seluruh komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator dan otoritas berwenang tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan bersama-sama dengan Satuan Kerja Audit Internal secara terus menerus melakukan monitoring kepada unit-unit kerja terhadap seluruh komitmen yang diwajibkan. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari hasil audit, ketentuan Otoritas Jasa keuangan, regulasi perbankan dan otoritas yang berwenang lainnya maupun kewajiban pelaporan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan secara berkala dalam Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi *monitoring* kepatuhan pelaksanaan operasional perbankan dan transaksi yang dilakukan di operasional kantor wilayah dan kantor cabang telah sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan regulator yang berlaku, Perseroan memiliki organ yang ditempatkan di kantor wilayah dan kantor cabang yang dilaksanakan oleh *Regional Compliance Supervisory Officer (RCSO)* untuk kantor wilayah dan *Branch Compliance Supervisory Officer (BCSO)* untuk kantor cabang yang bertugas untuk melakukan *review* dan monitoring atas kepatuhan kantor wilayah dan kantor cabang serta mendorong efektifitas fungsi *Internal Control* manajemen kantor wilayah dan kantor cabang dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Perseroan berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan penerapan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, Perseroan menerapkan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT ini Perseroan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi adalah memastikan Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.
- b. Sistem Informasi Manajemen
Dalam mendorong penerapan program APU dan PPT yang efektif, Perseroan memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif dan akan terus dilakukan penyempurnaan secara berkesinambungan sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku dan pengalaman Perseroan.
- c. Pelatihan Penerapan Program APU dan PPT
Untuk mendorong penerapan program APU dan PPT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT yang berkesinambungan kepada pejabat dan pegawai kantor cabang serta kantor pusat baik melalui media klasikal maupun melalui media *digital*.
- d. Pelaporan
Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Perseroan menyampaikan laporan antara lain Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Pelaporan Transaksi Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan pelaporan kepada aparat penegak hukum dan regulator.

Fungsi Internal Audit

Secara umum pelaksanaan internal audit Perseroan dilaksanakan dengan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) yang berfokus pada strategi dan aktivitas sesuai dengan Kebijakan Umum Direksi. Beberapa inisiatif terkait pengelolaan *internal audit* yang akan dilakukan adalah:

1. Pelaksanaan *audit mandatory* regulator dan audit berdasarkan *risk mapping* (*risk based audit*).
2. Pelaksanaan general audit tematik untuk *business process* Perseroan.
3. Pelaksanaan audit tematik untuk *information, communication and technology audit*.
4. Penguatan implementasi *3 lines of defence* melalui koordinasi antara *risk management unit, compliance unit* dan *internal audit unit* dengan *GRC Framework*.
5. Berkoordinasi dengan *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO) kantor cabang dan kantor wilayah untuk meningkatkan fungsi *monitoring* dan kontrol.
6. Penguatan *desk audit data analytic* dengan dukungan struktur organisasi dan infrastruktur TI yang memadai.
7. Pengembangan organisasi Audit Internal yang *in-line* dengan perkembangan proses bisnis dan organisasi Perseroan.
8. Pemutahiran kebijakan-kebijakan/peraturan internal audit sesuai dengan perkembangan regulasi.

Strategi Pengembangan Bisnis

Bidang Kredit

Mempertimbangkan kondisi dinamika makro dan implikasinya terhadap bisnis perumahan, strategi bisnis kredit difokuskan untuk mengoptimalkan porsi Perseroan pada penambahan kuota KPR Subsidi Pemerintah dan selektif dalam pengembangan bisnis kredit di segmen Non Subsidi, Komersial dan Korporasi.

Tabel 2.1 : Strategi Bidang Kredit Tahun 2020

Strategi	Inisiatif
1. Mengoptimalkan Porsi Perseroan pada program KPR Subsidi Pemerintah	a. Mengoptimalkan porsi Perseroan pada tambahan kuota KPR Subsidi, KPR BP2BT, dan TAPERA di tahun 2020 yang menyasar ASN, TNI, POLRI, dan <i>fixed income</i> b. Mengembangkan berbagai skema dan program kepemilikan rumah, termasuk bermitra dengan BUMN, BPJS TK dan TAPERA. c. <i>Partnership</i> dengan <i>stakeholder</i> perumahan untuk mencetak pengembang baru di segmen subsidi dan MBR melalui program <i>MBA Mini in Property and School of Developers</i> .

Strategi	Inisiatif
2. Selektif dalam penyaluran KPR Non Subsidi dan Personal Loan	a. <i>Partnership</i> dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk membangun perumahan yang terjangkau di perkotaan melalui proyek Transit <i>Oriented Development</i> (TOD), Rumah Susun atau Apartmen. b. Mengembangkan skema KPR MBR dengan memaksimalkan stok rumah proyek subsidi dan program KPR Harapan untuk pembiayaan harga rumah Rp150 juta c. Mengembangkan kerjasama KPR dan <i>personal loan</i> dari program BTN Solusi. d. Meningkatkan akuisisi KPR pada segmen <i>milieal</i> melalui program KPR Gaess. e. Meningkatkan kontribusi penjualan KPR Non Subsidi secara <i>online</i> melalui <i>mobile apps</i> BTN Properti dan portal BTN Properti dengan optimalisasi program KPR <i>from home</i>. f. Program KPR dan KPA <i>takeover</i> cicilan bertahap. g. Mengembangkan program KPR dan KRING <i>bundling</i> dengan BTN Solusi. h. Pembelian potofolio kredit <i>high yield</i>. i. Program KAR <i>Top Up</i>
3. Selektif dalam penyaluran Kredit Komersial dan Korporasi	Mengembangkan bisnis Kredit Korporasi di segmen BUMN

Memperbaiki Kualitas Kredit

Secara garis besar, fokus strategi kualitas kredit yang akan dijalankan di tahun 2020 adalah perbaikan proses bisnis dan pembenahan *collection management system* baik pada bisnis konsumen maupun komersial. Selain itu, memperhatikan dampak COVID-19, Perseroan juga melakukan kebijakan relaksasi restrukturisasi bagi debitur yang terdampak COVID-19 sebagaimana diatur pada POJK No. 11/POJK No. 03/2020.

Tabel 2.2 : Strategi Perbaikan Kualitas Kredit Tahun 2020

Strategi	Inisiatif
1. Memperbaiki proses inisiasi kredit (<i>loan origination</i>)	a. Optimalisasi <i>Regional Loan Processing Centre</i> (RLPC). b. Regionalisasi untuk kredit dengan <i>plafon</i> di bawah Rp100 miliar ke kantor wilayah. c. Sentralisasi pengelolaan debitur BUMN dan Non BUMN di atas Rp100 miliar d. Strategi asuransi untuk kredit KPR di bawah Rp500 juta dan kredit komersial di bawah Rp10 miliar. e. Mengembangkan <i>decision engine</i> untuk <i>credit approval</i>. f. Pengembangan dan implementasi <i>rating developer</i>. g. Implementasi <i>management stock</i>. h. Otomatisasi dan digitalisasi proses KPR dengan Integrasi <i>Loan Origination System</i> (LOS) konsumen, komersial dan BTN properti.
2. Memperkuat <i>collection management system</i>	a. Memperkuat fungsi <i>desk call</i>. b. Memperbaiki kualitas data debitur untuk meningkatkan <i>contacted rate</i>. c. Mengembangkan <i>collection system</i> (<i>collection scoring</i>, <i>collection system</i>, <i>mobile collection</i>). d. Memperbaiki proses bisnis restrukturisasi dan kualitas kredit yang sudah direstrukturisasi. e. Program tabungan untuk debitur yang di restrukturisasi untuk menjaga <i>repayment capacity</i> debitur pasca restrukturisasi kredit.
3. Mempercepat penyelesaian kredit macet	a. Memperluas <i>channel</i> penjualan, melalui portal rumah murah dan <i>partnership</i> dengan <i>e-commerce</i> (olx, rumah123, dan <i>e-commerce property agency</i> lainnya). b. Membentuk unit kerja baru untuk mempercepat penyelesaian NPL dan sentralisasi penanganan akun NPL besar. c. Meningkatkan penjualan kredit macet secara <i>bulk</i> melalui kerjasama investor, penjualan PPA, PAB, SMF dan jalur hukum. d. Mengembangkan <i>exit strategy</i> melalui kerjasama KPR <i>Recycle</i> dengan pihak ketiga (kolektor/<i>cassie transfer</i> termasuk PPA, litigasi, NP sales, dan investor baru seperti TASPEN dan BPJS).
4. Strategi kredit terdampak COVID-19	a. Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit berupa relaksasi penundaan pembayaran pokok dan bunga bagi debitur yang terdampak COVID-19 sebagaimana POJK No.11/POJK No.03/2020. b. Memperluas <i>channel</i> pengajuan restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, melalui portal rumah murah BTN.

Bidang Pendanaan

Strategi pendanaan difokuskan untuk mengembangkan CASA dan peningkatan DPK Ritel melalui program peningkatan transaksi dan penjualan produk secara *bundling*. Khusus di tahun 2020, strategi pendanaan juga akan dipertajam dengan mengupayakan *liquidity fund* untuk menjaga likuiditas pada tingkatan yang aman akibat penundaan pembayaran pokok kredit dari restrukturisasi kredit yang terdampak COVID-19.

Table 2.3: Funding Sector Strategy

Strategi	Inisiatif
1. Strategi Tabungan dan Dana Kontribusi Ritel	a. Membangun <i>marketing communication</i> secara terintegrasi untuk reposisi tabungan bagi segmen menengah dan debitur KPR Non Subsidi. b. Meningkatkan penjualan produk secara <i>bundling</i> melalui program BTN Solusi. c. Meningkatkan akuisisi dan transaksi <i>e-channel</i> dengan mengembangkan <i>mobile banking</i>, fitur <i>payment e-channel</i>, program promo <i>merchant</i>. d. Menjadikan Perseroan sebagai bank operasional nasabah BUMN dan turunnya melalui peningkatan akuisisi dan utilisasi <i>cash management</i>. e. Mengembangkan produk tabungan yang mendorong transaksional dengan pengembangan produk tabungan bisnis. f. Program re-aktivasi tabungan debitur KPR yang sudah lunas. g. Intensifikasi kerjasama Tabungan Pensiunan, khususnya yang bersal dari PT Taspen (Persero). h. Mengembangkan <i>sales activity management</i> melalui implementasi inisiatif <i>microplanning</i> di kantor cabang dan outlet. i. Meningkatkan produktivitas <i>Priority Banking Officer</i> dalam mengakuisisi nasabah. j. Memperbaiki KPI penghimpunan DPK, khususnya DPK Ritel.
2. Strategi CASA segmen lembaga	a. Meningkatkan SATKER Pemerintahan dan Interkoneksi SPAN untuk mengembangkan dana murah institusi segmen Pemerintahan. b. Program akuisisi nasabah <i>payroll</i> melalui penjualan produk secara <i>bundling</i> (BTN Solusi). c. Akuisisi dana BLU melalui produk <i>bundling</i>. d. Optimalisasi kerjasama institusi, terutama Pengadilan Negeri (PN). e. Menjadikan Perseroan sebagai bank operasional nasabah BUMN dan turunannya melalui peningkatan akuisisi dan utilisasi <i>cash management</i>. f. Mengembangkan CASA di segmen <i>private</i>. g. Memperluas kerjasama pendanaan di segmen <i>education</i>. h. Mengembangkan <i>virtual account</i>, <i>monitoring</i>, rekening giro dan <i>cash management</i> untuk debitur komersial dan korporasi.
3. Strategi <i>liquidity fund</i> dan dana <i>wholesale</i>	a. <i>Repricing</i> dana <i>wholesale</i> yang jatuh tempo, dengan <i>rate</i> yang lebih rendah. b. Pinjaman Luar Negeri untuk menjaga kecukupan likuiditas guna mengantisipasi terbatasnya jumlah pembiayaan jangka panjang dari dalam negeri. c. Meningkatkan likuiditas melalui optimalisasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan alternatif pinjaman atau pendanaan Pemerintah akibat penundaan pembayaran pokok kredit dari restrukturisasi kredit terdampak COVID-19.

Bidang Permodalan

Untuk mendukung penyaluran KPR dalam rangka program Sejuta Rumah dibutuhkan permodalan yang cukup dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum Perseroan sesuai Basel III. Upaya penguatan permodalan tahun 2020 difokuskan kepada peningkatan laba/profitabilitas dan penerbitan obligasi/pinjaman subordinasi melalui pasar dalam negeri ataupun *global market* (pasar luar negeri) sebesar USD300 Juta yang telah dilakukan pada bulan Januari tahun 2020.

Pembentukan Anak Usaha dan Pertumbuhan *Fee Based Income* (FBI)

Memperhatikan potensi *captive market* dan peluang bisnis yang dapat diperluas, di tahun 2020 Perseroan akan melakukan strategi pertumbuhan anorganik yang difokuskan pada:

1. Aktivitas penyertaan modal pada rencana anorganik di bidang manajemen investasi.
2. Membentuk anorganik di bidang perusahaan modal ventura, untuk mendukung gagasan sinergi BUMN, LinkAja dan memperluas penetrasi pasar Perseroan di sektor perumahan dan industri ikutannya.
3. Membentuk anorganik di bidang asuransi jiwa atau kerugian, untuk meningkatkan pertumbuhan FBI dari pertumbuhan nasabah *captive* yang bersumber dari KPR dan sebagai inisiatif dalam menawarkan *one stop solution* bagi kebutuhan keuangan keluarga.

Sementara itu, fokus strategi untuk meningkatkan kontribusi *Fee Based Income* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Strategi Bidang *Fee Based Income*

Strategi	Inisiatif
1. Strategi <i>fee based</i> berbasis transaksi	a. Akselerasi kerja sama <i>merchant</i> untuk meningkatkan <i>usage</i> dan transaksi <i>member e-channel</i> . b. Sinergi BUMN dengan mendukung program-program dari LinkAja melalui rencana pengembangan produk Direct Debit LinkAja. c. Mengembangkan metode dan program promosi pembayaran dan pembelian dengan berbagai <i>merchant</i> dan <i>e-commerce</i> (<i>Top up e-wallet</i> , pembayaran kartu kredit, BPJS, dan sebagainya). d. <i>Cleansing</i> data nasabah untuk <i>marketing</i> yang lebih masif. e. Menjadikan registrasi dan aktivasi <i>e-channel</i> sebagai KPI pada <i>staff frontline</i> .
2. Meningkatkan <i>trade finance</i> dan <i>transaction banking</i>	a. Melakukan kegiatan pemasaran untuk menawarkan <i>cash management system</i> kepada nasabah eksisting. b. Program pemasaran produk <i>trade finance</i> . c. Mengembangkan organisasi khusus untuk meningkatkan <i>transaction banking</i> . d. Program <i>reward</i> untuk meningkatkan <i>trade finance</i> .
3. Mengembangkan <i>fee based treasury</i> dan sumber FBI baru	a. Meningkatkan volume dan profitabilitas transaksi <i>treasury</i> . b. Menambah jumlah <i>trader</i> berpengalaman di tim <i>treasury</i> . c. Mengembangkan sistem OPICS untuk meningkatkan transaksi. d. Penjualan produk <i>treasury</i> dan sekuritasasi retail kepada nasabah BTN Prioritas. e. Mengembangkan produk dan kerjasama bisnis <i>wealth management</i> untuk meningkatkan AUM Non DPK.

Bidang Perbaikan Proses Bisnis dan Infrastruktur *Information Technology* (IT)

Strategi dan program kerja pengembangan infrastruktur TI tahun 2020 difokuskan untuk mendukung strategi bisnis pada pertumbuhan dana *low cost*, pertumbuhan FBI *digital banking*, dan efisiensi operasional yang dirangkum sebagai berikut:

- Mengembangkan strategi *digital banking*.
- Mengembangkan organisasi IT untuk membangun *big data* dan *digital banking*.
- Menjalankan *project charter* yang sudah disusun pada IT *Project Charter* di tahun 2020.
- Melakukan digitalisasi dan otomatisasi proses *back-end*
 - Pengembangan sistem HC dan HR *Analytics*.
 - Pengembangan web *e-mitra* untuk *management* mitra yang dimiliki oleh pengadaan.
 - Integrasi *iLoan* Konsumer, Komersial, *iDocs* Konsumer, *iDocs* Komersial dan web *e-Mitra Operation*.
 - Integrasi aplikasi *hardcat* dengan *E-Proc* dan pengembangan aplikasi *management stock*.
 - Pengembangan sistem anti *fraud*.
- Meningkatkan kapabilitas IT dalam melakukan *in house*
 - Shifting core banking* menjadi belanja modal.
 - Pengembangan arsitektur IT dan organisasi IT.
 - Meningkatkan kapabilitas pegawai dan pemenuhan *programmer*.

Penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) yang Terintegrasi

Memperhatikan perkembangan implikasi pandemi COVID, pada Revisi RBB tahun 2020 – 2022, Perseroan telah menyusun strategi manajemen risiko agar aktivitas bisnis dan operasional masih tetap berjalan. Selanjutnya, rencana penerapan manajemen risiko mengusung satu konsep yaitu “*Integrated GRC* yang komprehensif”. Secara garis besar strategi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 : Strategi Bidang *Risk, Governance and Compliance*

Strategi	Inisiatif
1. Mitigasi risiko bisnis dan operasional Perseroan dalam menghadapi pandemi COVID-19	a. Melakukan <i>stress test</i> dan restrukturisasi untuk portofolio kredit yang terdampak COVID-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang mekanismenya dilakukan secara <i>prudent</i> . b. Membentuk tim <i>task force</i> untuk <i>monitoring</i> kualitas kredit, kecukupannya likuiditas dan produktivitas <i>outlet</i> selama masa pandemi. c. Meningkatkan <i>cash on hand</i> di Kantor Cabang dan <i>outlet</i> (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas) sebesar 20% sampai dengan 30%. d. Melakukan penutupan sementara pada beberapa <i>outlet</i> didaerah yang terkena pandemi COVID-19. e. Pemberlakuan WFH 30%-70% pada masing-masing unit kerja.

Strategi	Inisiatif
	f. Pemberlakuan <i>split operation</i> untuk <i>working recovery area</i> unit kerja kritikal. g. Menerapkan protokol <i>physical distancing</i> dan pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker dan penyemprotan disinfektan pada seluruh lingkungan kerja.
2. Memperkuat internalisasi budaya manajemen risiko di seluruh jajaran unit kerja	a. Meningkatkan kapabilitas manajemen risiko dan internalisasi budaya risiko melalui <i>Boardgame</i> SOP. b. <i>Surveillance</i> sertifikat ISO 9001:2015. c. Penyusunan Pendoman Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. d. Melaksanakan penerapan <i>integrated</i> GRC dan pemantauan KPI, KRI dan KCI.
3. Meningkatkan kapabilitas <i>Corporate Governance</i>	a. Meningkatkan <i>compliance awareness</i> untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha. b. Mengembangkan aplikasi <i>digital compliance</i> . c. Mengembangkan <i>frame work three lines of defense</i> . d. Implementasi <i>compliance risk assessment</i> yang terintegrasi dengan GRC roadmap. e. Optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai standar mutu <i>Surveillance</i> ISO 9001:2015.
4. Meningkatkan peran AML dan APU PPT berbasis <i>compliance mandatory regulatory</i>	a. Peningkatan <i>awareness</i> atas penerapan dan pengelolaan APU dan PPT di Perseroan. b. Memperkuat program APU PPT yang sejalan dengan APU PPT berbasis <i>compliance mandatory regulatory</i> . c. Program <i>zero tolerance to fraud and defect</i> .

Strategi Pengembangan SDM dan Kebijakan Remunerasi

Strategi Perseroan dalam menunjang pengembangan bisnis dilakukan dengan mengembangkan sistem pengembangan dan pengelolaan *human capital* dan kebijakan remunerasi yang baik dengan berbasis kinerja dan penerapan *Good Corporate Governance*. Adapun strategi *human capital* yang akan dilakukan sejalan dengan rencana transformasi Perseroan yaitu:

1. Memperkuat penerapan budaya kerja SIIPS.
2. Implementasi *Performance Management* dan *Benefit* untuk mendorong produktivitas pegawai.
3. Memperkuat penerapan *performance based culture*.
4. Optimalisasi struktur organisasi untuk pencapaian target bisnis Perseroan.
5. Akselerasi perencanaan karir pegawai untuk pengembangan kompetensi pegawai.
6. *Succession planning* untuk mempersiapkan kompetensi talenta terbaik menghadapi *Industri 4.0* dan *Holdingisasi* BUMN.
7. Pengelolaan *outsourcing* secara efisien dan efektif.
8. *Talent retention* untuk peningkatan *engagement* pegawai.
9. Menjalankan Tata Kelola Sistem *Remunerasi* sesuai *best practice*.
10. Efisiensi biaya tenaga kerja untuk mendorong kinerja korporat dan produktivitas pegawai.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2020

Perseroan telah menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produk-produk Perseroan. Termasuk dalam strategi pemasaran ini adalah pengembangan produk-produk inovasi yang memiliki permintaan pasar yang sedang diminati oleh masyarakat. Perseroan juga meningkatkan efektivitas kerjasama dalam pemasaran dan pengembangan produk baru.

Strategi pemasaran yang telah dilakukan Perseroan tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pembiayaan perumahan bagi generasi milenial di wilayah perkotaan. Sesuai dengan demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh generasi milenial, maka Perseroan telah meluncurkan produk Program KPR Gaeesss for Millennials untuk usia 21-35 tahun.



2. Pengembangan produk *bundling* serta aktivasi rekening untuk dapat meningkatkan jumlah tabungan yang bisa dikumpulkan seperti Promo Indosat Exclusive Benefit, Promo Pengguna Eksisting Tokopedia Menggunakan *Virtual Account* Perseroan, Program Kolaborasi *Sneakers Bank BTN X Sage Footwear*.



3. Pengembangan berbagai skema dan program kepemilikan rumah, termasuk bermitra dengan BUMN, BPJSTK dan Tapera seperti Bantuan Perumahan PNS, MLT BPJS Ketenagakerjaan – PUMP, MLT BPJS Ketenagakerjaan – KPR Subsidi.





4. Mengadakan pameran-pameran properti secara *online* (*Digital Property Expo*)
5. Pengembangan *channel* transaksi elektronik, otomatisasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kemitraan dengan ekosistem *digital* melalui *BTN Internet Banking*, *BTN Mobile Banking*, *Debit BTN Online*, *BTN Cash Management*, *LinkAja*.

Mobile Banking and Internet Banking Marketing Strategy 2020

Improve Digital Marketing



Meningkatkan saluran pemasaran digital antara lain, *Search Engine Optimization* (SEO)/*Search Engine Marketing* (SEM) *display advertising*, *email marketing*, *Social Media Marketing* (SMM) dan *Referral*.



Melakukan Pemetaan terhadap pengguna *Mobile Banking* dan *Internet Banking* untuk meningkatkan layanan yang tepat (*customer Journey*).



Meningkatkan Konten Marketing yang kreatif dan fokus ke Segmentasi pengguna yang akan di tuju.

Increase User



Effective Promotion and Campaigns



Melakukan *promotion and campaigns* yang memperhatikan demografis dan segmen pengguna.



Promotion and campaigns yang berkelanjutan dengan memperhatikan biaya yang efisien.



Mengacu pada *360-degree advertising* (*through the line/TTL*) yang menggunakan metode *Above the Line* (ATL) dan *Below the Line* (BTL).

Increase Transaction



Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI) Campaign

Perseroan tahun 2020 melakukan HGCTHI campaign yang menjadi *umbrella campaign* dari campaign Perseroan lainnya. Dengan HGCTHI Campaign, Perseroan berhasil meningkatkan peringkat *brand awareness* dari yang sebelumnya pada tahun 2019 peringkat 8 (delapan), menjadi peringkat 6 (enam) pada akhir tahun 2020. (Data survei BRRM Nielsen tahun 2020). Selain itu, Perseroan juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian BUMN di ajang BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) Award. Perseroan menjadi peringkat 2 (dua) kategori *Social Media & Corporate Communication* BCOOMS 2021 atas kinerja campaign 2020.

Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI)

			
Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini, tapi juga soal persiapan nikah, sekolah lagi dan lain-lain.	Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini, tapi juga soal masa depan SDM kita.	Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini, tapi juga soal nanti harus punya rumah sendiri.	Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini, tapi juga soal cara-cara dan inovasi baru transaksi perbankan.

Di samping itu Perseroan juga melakukan strategi pemasaran berupa promo dengan bekerjasama dengan:

1. LinkAja

Cashback saldo LinkAja sebesar Rp71.000 dengan jumlah *top up* sebesar Rp250.000.



2. Tokopedia

E-Voucher Tokopedia sebesar Rp50.000 diberikan kepada nasabah yang melakukan pembelian minimal Rp171.000 di Tokopedia.

3. PDAM

Cashback sebesar 10% maksimal Rp15.000 dengan minimal pembayaran PDAM sebesar Rp71.000.

4. Gopay

Cashback saldo Gopay sebesar Rp25.000 diberikan kepada nasabah yang melakukan *top up* Gopay senilai Rp71.000 melalui *e-channel* Perseroan.

5. OVO

Cashback OVO Points sebesar Rp15.000 diberikan kepada nasabah yang melakukan *top up* OVO senilai Rp71.000 melalui *BTN Mobile Banking*.

6. Mitra 10

Minimum transaksi sebesar Rp2.000.000 mendapatkan diskon 10% dengan maksimal potongan diskon sebesar Rp710.000.

7. Krisna Oleh-Oleh

Minimum transaksi sebesar Rp350.000 mendapatkan diskon 10% dengan maksimal potongan diskon sebesar Rp71.000.

8. Holycow Steak Hotel

Minimum transaksi sebesar Rp400.000 mendapatkan diskon 10% dengan maksimal potongan diskon sebesar Rp71.000.

Pangsa Pasar

Pangsa Pasar Perseroan dari sisi aset November 2020 sebesar 4,07%, meningkat 0,31% dibandingkan dengan November 2019 yang sebesar 3,76%. Kenaikan pangsa pasar tersebut karena adanya penambahan modal melalui *Junior Global Bond* BTN (USD) dan subordinasi, serta adanya peningkatan laba Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, pangsa pasar dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan sebesar 0,46%, dari 3,46% di November 2019 menjadi 3,92% di tahun 2020. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan adanya kebijakan Pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan dari sisi kredit yang diberikan November tahun 2020 sedikit turun sebesar 0,22%, dari 3,08% di November 2019 menjadi 2,86% di November 2020, hal tersebut karena turunnya penyaluran kredit dari KPR Subsidi.

Tabel Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	November 2020	November 2019	Kenaikan/ Penurunan
Aset	Industri Perbankan	9.053.446	8.410.906	642.540
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	368.208	316.114	52.094
	Pangsa Pasar (%)	4,07%	3,76%	0,31%
Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	7.282.936	6.684.541	598.395
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	285.239	231.108	54.131
	Pangsa Pasar (%)	3,92%	3,46%	0,46%
Kredit yang Diberikan	Industri Perbankan	9.018.532	8.193.227	825.305
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	258.358	252.035	6.323
	Pangsa Pasar (%)	2,86%	3,08%	(0,22%)

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (SPI OJK) November 2020

Grafik Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam %)

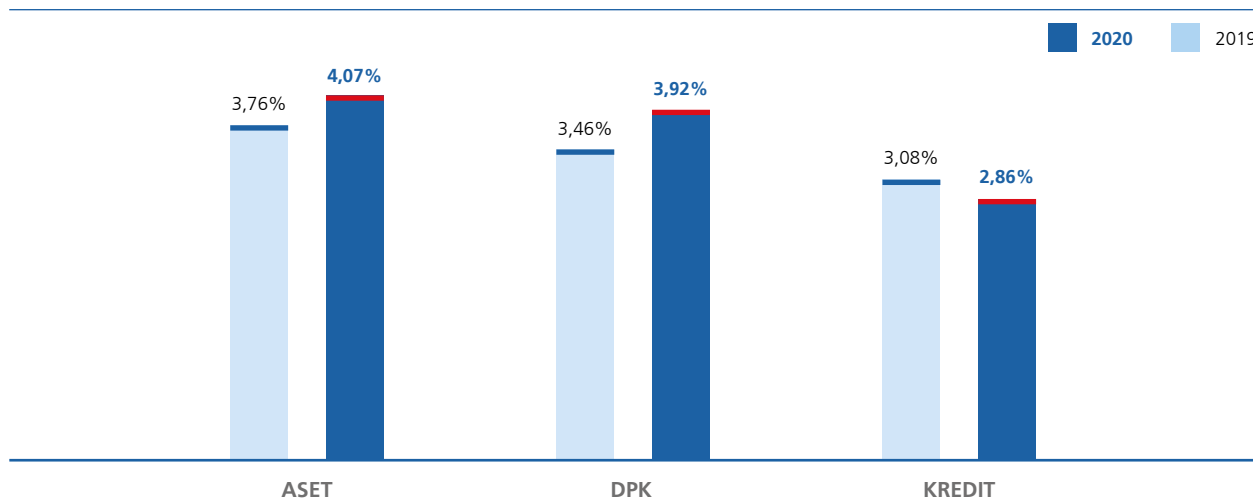
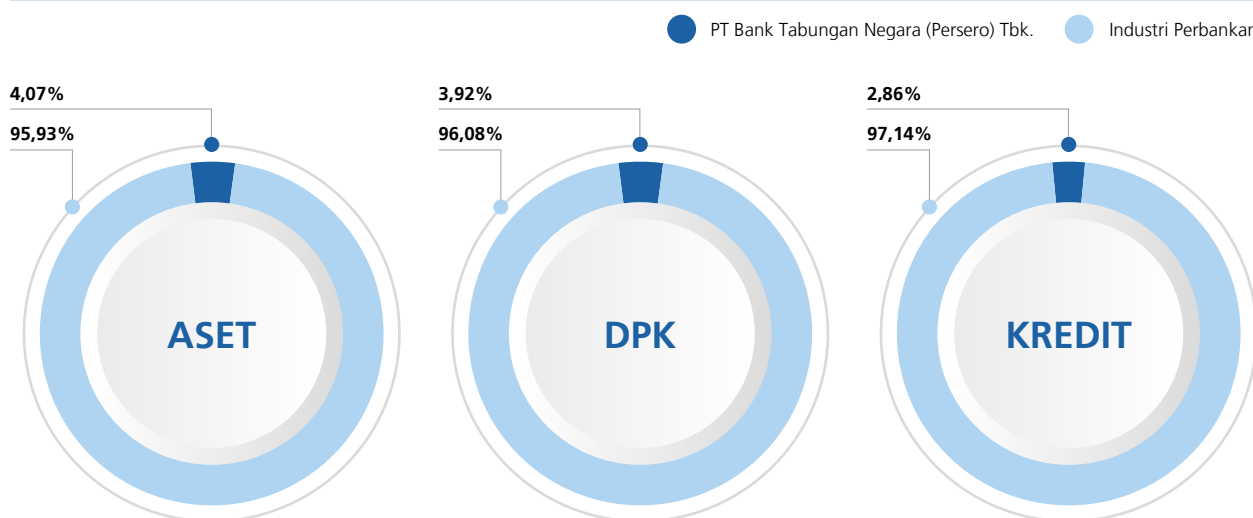
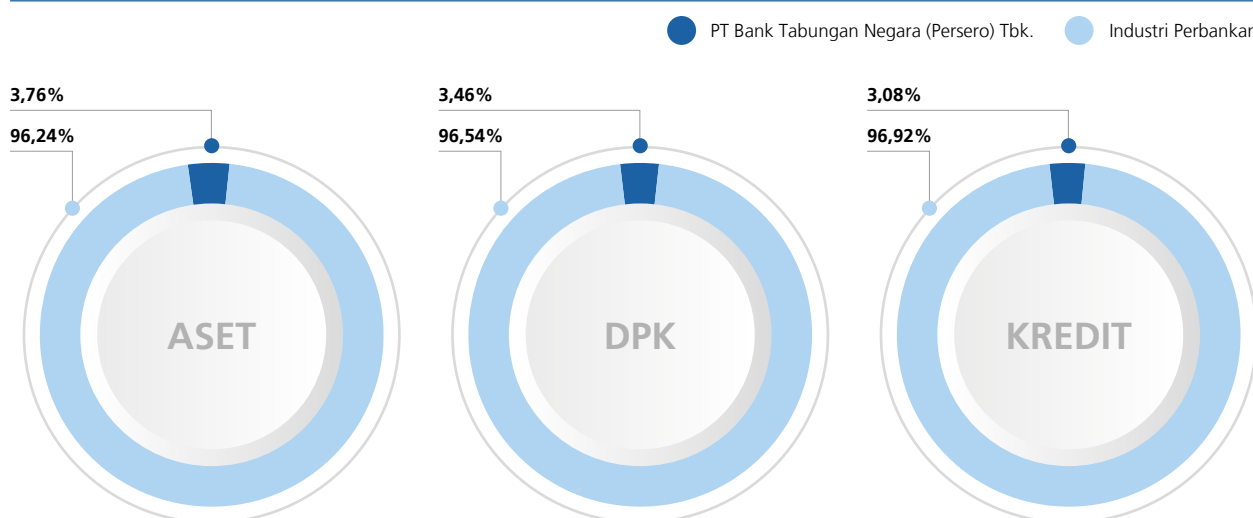


Diagram Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia November 2020

(dalam %)

**Diagram Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia November 2019**

(dalam %)



Sebagai Perseroan yang berfokus pada pembiayaan KPR/KPA berikut adalah perbandingan pangsa pasar Perseroan dibandingkan dengan bank lainnya.

Tabel Pangsa Pasar Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen

dalam miliar rupiah

No.	Bank	September 2020		September 2019		Growth	
		Outstanding	Market Share	Outstanding	Market Share	Outstanding	Market Share
1.	Bank Lain	57.781	11,34%	56.501	11,31%	1.280	0,02%
2.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **)	203.936	40,01%	200.743	40,19%	3.193	(0,18%)
3.	BCA *)	89.309	17,52%	92.138	18,45%	(2.829)	(0,93%)

No.	Bank	September 2020		September 2019		Growth	
		Outstanding	Market Share	Outstanding	Market Share	Outstanding	Market Share
4.	BNI	45.465	8,92%	43.067	8,62%	2.398	0,30%
5.	MANDIRI	42.980	8,43%	43.200	8,65%	(220)	(0,22%)
6.	CIMB NIAGA	35.410	6,95%	32.820	6,57%	2.590	0,38%
7.	BRI	34.830	6,83%	31.000	6,21%	3.830	0,63%
8.	TOTAL BANK	509.711	100,00%	499.469	100,00%	10.242	-

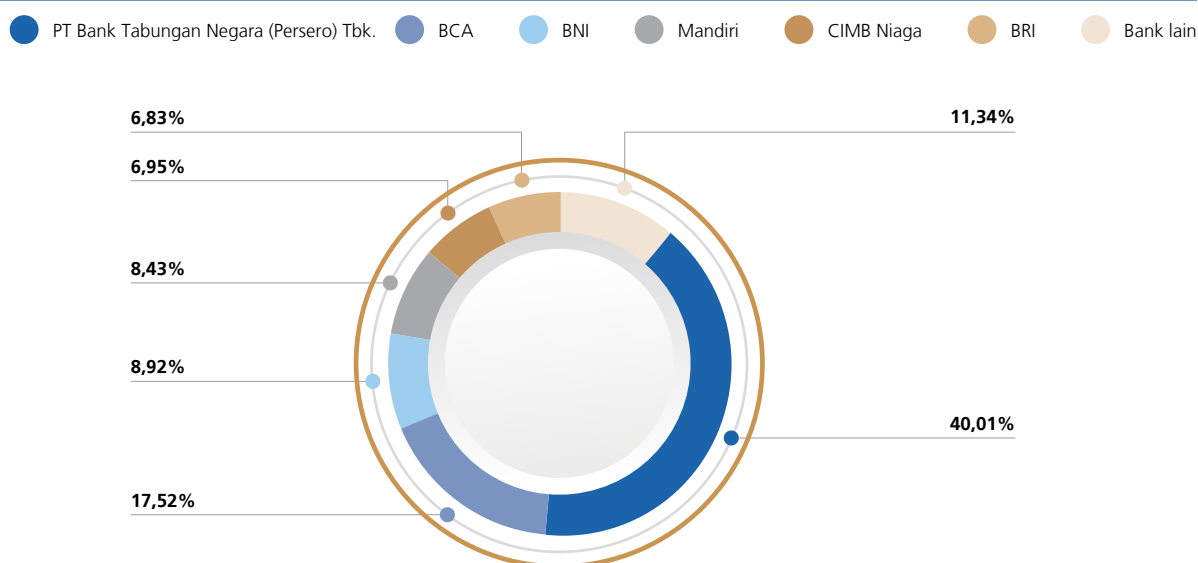
Sumber: *Analyst Meeting* Perbankan dan Total Bank dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI BI) I.15

*) Termasuk *mortgage loans* untuk *commercial investment*, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai *commercial* dan *SME loans*

**) Termasuk Syariah sebesar Rp20,34 triliun dan *equity loan*

Grafik Pangsa Pasar Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen

(dalam %)



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen usaha Perseroan tercermin dari penyajian pelaporan operasi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2015) tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi pelaporan segmen Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana Perseroan terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Perseroan beroperasi.

Perseroan telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Perseroan terlibat. Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

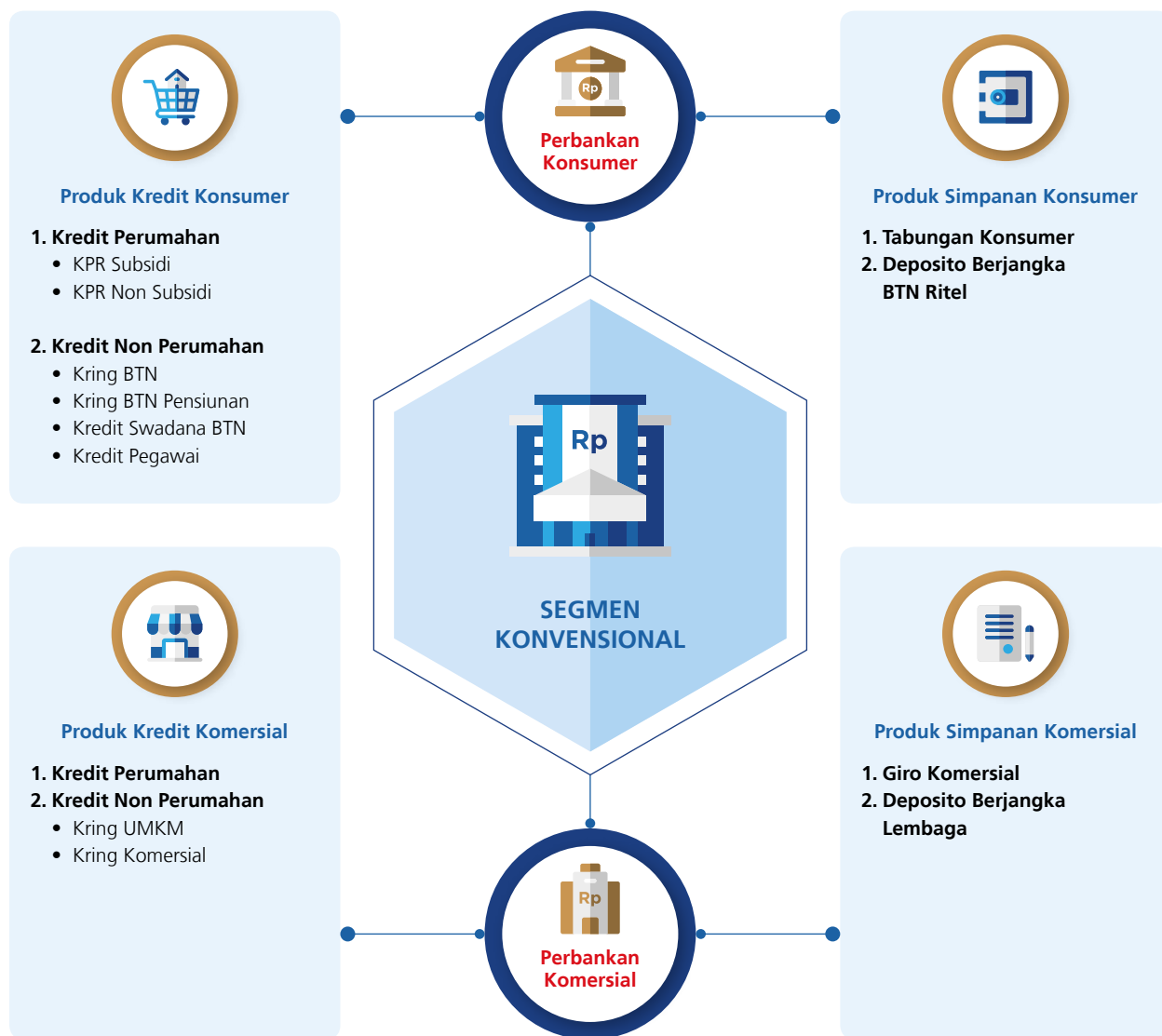
Segmen usaha Perseroan berdasarkan jenis usaha mencakup 2 (dua) segmen utama, yaitu segmen Konvensional dan segmen Syariah.

Segmen Konvensional sebagai segmen bisnis utama Perseroan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan Perseroan. Sedangkan segmen Syariah yang dikembangkan oleh Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya sejalan dengan berbagai upaya dan inisiatif Perseroan.

Segmen Konvensional

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional

Pengembangan Produk dan Jasa pada Segmen Konvensional



Sekilas tentang kinerja dari segmen Konvensional dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Tabel Kinerja Segmen Konvensional

Produk Segmen Konvensional	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Perbankan Konsumer	256.650.586	52,34%	250.629.098	57,52%	6.021.488	11,03%
Perbankan Komersial	233.711.944	47,66%	185.123.514	42,48%	48.588.429	88,97%
Jumlah Penyaluran Kredit dan Simpanan pada Segmen Konvensional	490.362.530	100,00%	435.752.612	100,00%	54.609.918	100,00%

Dari komposisi di atas, terlihat bahwa kegiatan bisnis segmen Konvensional Perseroan sebagian besar berkontribusi dari Perbankan Konsumer yang terdiri dari Kredit Konsumer, serta Simpanan Konsumer mencakup penghimpunan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan dan Deposito Retail.

Rincian kinerja masing-masing produk dari segmen Konvensional dapat dilihat di bawah ini:

Perbankan Konsumer

Portofolio produk Perseroan pada Perbankan Konsumer terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Konsumer dan Produk Simpanan Konsumer.

Nilai dan volume penyaluran produk Perbankan Konsumer dapat dilihat di bawah ini:

Tabel Nilai Penyaluran Produk Perbankan Konsumer

Produk Segmen Konvensional	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Perbankan Konsumer Produk Kredit Konsumer	190.872.775	74,37%	185.028.314	73,83%	5.844.461	3,16%
Produk Simpanan Konsumer	65.777.811	25,63%	65.600.784	26,17%	177.027	0,27%
Jumlah Nilai Produk Perbankan Konsumer	256.650.586	100,00%	250.629.098	100,00%	6.021.488	2,40%

Jumlah nilai produk Perbankan Konsumer tahun 2020 sebesar Rp256,65 triliun, meningkat 2,40% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp250,63 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan produk Kredit Konsumer sebesar 3,16% atau Rp5,84 triliun.

Tabel Volume Penyaluran Produk Perbankan Konsumer

Jenis Produk Perbankan Konsumer	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Konsumer (unit)	138.633	186.760	(48.127)	(25,77%)
Produk Simpanan Konsumer (rekening)	1.320.192	1.299.441	20.751	1,60%

Volume penyaluran produk Kredit Konsumer tahun 2020 sebanyak 138.633 unit, turun 25,77% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 186.760 unit. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah Kredit Perumahan dari KPR Non Subsidi dan Kredit Perumahan Lainnya. Meskipun demikian, volume produk Simpanan Konsumer berhasil meningkat 1,60% dari 1.299.441 rekening di tahun 2019 menjadi 1.320.192 rekening di tahun 2020.

Rincian masing-masing produk adalah sebagai berikut.

Kredit Konsumer

Perseroan menyediakan produk Kredit Konsumer yang terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Untuk produk Kredit Perumahan diklasifikasikan menjadi KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, dan Kredit Perumahan Lainnya. Seluruh produk kredit perorangan konsumer disalurkan dalam mata uang Rupiah.

Tabel Nilai Penyaluran Produk Kredit Konsumer

Jenis Kredit Konsumer	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kredit Perumahan				
KPR Subsidi	107.130	99.499	7.630	7.67%
KPR Non Subsidi	71.575	72.872	(1.297)	(1,78%)
Kredit Perumahan Lainnya	7.183	7.947	(764)	(9,61%)
Jumlah Kredit Perumahan	185.888	180.318	5.570	3,09%
Kredit Non Perumahan	4.985	4.710	275	5,84%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konsumer	190.873	185.028	5.844	3,16%

Jumlah nilai penyaluran Kredit Konsumer tahun 2020 sebesar Rp190,87 miliar, meningkat 3,16% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,03 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan Kredit Perumahan sebesar 3,09% atau Rp5,57 miliar.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Konsumer

Jenis Kredit Konsumer	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Kredit Perumahan				
KPR Subsidi	102.024	135.118	(33.094)	(24,49%)
KPR Non Subsidi	17.692	31.103	(13.411)	(43,12%)
Kredit Perumahan Lainnya	3.315	6.134	(2.819)	(45,96%)
Jumlah Kredit Perumahan	123.031	172.355	(49.324)	(28,62%)
Kredit Non Perumahan	15.602	14.405	1.197	8,31%
Volume Penyaluran Kredit Konsumer	138.633	186.760	(48.127)	(25,77%)

Volume penyaluran Kredit Konsumer tahun 2020 sebanyak 138.633 unit, turun 25,77% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 186.760 unit. Penurunan tersebut berasal dari turunnya Kredit Perumahan KPR Subsidi sebanyak 33.094 unit atau 24,49%.

Uraian masing-masing penyaluran Kredit Konsumer dapat dilihat di bawah ini:

Kredit Perumahan

KPR Subsidi

Sejak tahun 1976 hingga saat ini, skema penyaluran KPR Subsidi terus berganti; meski demikian Perseroan tetap konsisten menyalurkan KPR Subsidi. KPR Subsidi merupakan program pemilikan rumah dari Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. KPR Subsidi ini memberikan suku

bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. KPR Subsidi Perseroan senantiasa menyediakan berbagai kemudahan dan biaya yang ringan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Perseroan pertama kali mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan KPR Subsidi sesuai Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974, dengan realisasi KPR pertama berlangsung pada tanggal 10 Desember 1976. Perseroan menyalurkan KPR Subsidi bekerja sama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketentuan mengenai penyaluran KPR Subsidi terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Permen PUPR) No. 21/PRT/M/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permen PUPR No. 26/PRT/M/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pembeli rumah pertama kali yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh KPR Subsidi dengan bunga rendah dan tetap selama jangka waktu KPR. Berdasarkan program subsidi Pemerintah saat ini, KPR Subsidi diberikan kepada nasabah yang belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp4 juta per bulan untuk membeli rumah tapak dan maksimal penghasilan sebesar Rp7 juta per bulan untuk pembelian rumah susun. Harga rumah terikat pada batas harga tertentu. Nasabah harus menyampaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada saat pengajuan kredit.

Perseroan menyalurkan KPR subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Perseroan menyalurkan KPR dengan skema SSB.

Adapun ketentuan pemberian KPR SSB Tapak dan KPR SSB Susun adalah sebagai berikut:

1. Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah tapak atau susun dikurangi dengan uang muka.
2. Suku bunga KPR per tahun paling tinggi BI *rate* atau acuan lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah ditambah 5% yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama operasional antara Bank Pelaksana dengan Pejabat Perbendaharaan Satker.
3. Dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud pada butir (2) lebih tinggi dari suku bunga KPR Non Subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka suku bunga KPR SSB Tapak dan Susun menggunakan suku bunga KPR Non Subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana.
4. Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% (lima perseratus) per tahun sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.
5. Suku bunga sebagaimana dimaksud pada butir (4) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
6. Jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR SSB Tapak dan Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR SSB Tapak dan Susun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
7. Subsidi bunga kredit perumahan yang dibayar Pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (2) dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud pada butir (4)

Perseroan menyalurkan kredit KPR Subsidi melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. KPR BTN Sejahtera Tapak
2. KPR BTN Sejahtera Susun
3. KPR SSA/SSB Tapak
4. KPR SSA/SSB Susun
5. KPR BTN Mikro
6. KPR BP2BT
7. KPR BTN MBR

Penyaluran kredit KPR Subsidi untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Produk KPR Subsidi

KPR Subsidi	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
KPR BTN Sejahtera Tapak	3.663.328	9.563.566	(5.900.237)	(61,69%)
KPR BTN Sejahtera Susun	187.927	5.418	182.508	3368,57%
KPR SSA/SSB Tapak	10.449.771	7.446.324	3.003.446	40,33%
KPR SSA/SSB Susun	753	4.943	(4.190)	(84,77%)
KPR BTN Mikro	-	145	(145)	(100,00%)
KPR BP2BT	35.105	291.023	(255.918)	(87,94%)
KPR BTN MBR	-	238	(238)	(100,00%)
Jumlah Nilai Penyaluran KPR Subsidi	14.336.884	17.311.658	(2.974.774)	(17,18%)

Jumlah nilai penyaluran KPR Subsidi tahun 2020 sebesar Rp14,34 triliun, turun 17,18% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp17,31 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya KPR BTN Sejahtera Tapak sebesar 61,69% atau Rp5,90 triliun.

Tabel Volume Penyaluran KPR Subsidi

KPR Subsidi	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
KPR BTN Sejahtera Tapak	26.935	74.076	(47.141)	(63,64%)
KPR BTN Sejahtera Susun	1.354	35	1.319	3.768,57%
KPR SSA/SSB Tapak	73.408	57.908	15.500	26,77%
KPR SSA/SSB Susun	5	33	(28)	(84,85%)
KPR BTN Mikro	-	4	(4)	(100,00%)
KPR BP2BT	322	3.060	(2.738)	(89,48%)
KPR BTN MBR	-	2	(2)	(100,00%)
Volume Penyaluran KPR Subsidi	102.024	135.118	(33.094)	(24,49%)

Volume penyaluran KPR Subsidi tahun 2020 sebanyak 102.024 unit, turun 24,49% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 135.118 unit. Hal tersebut berasal dari turunnya jumlah unit penyaluran KPR BTN Sejahtera Tapak sebanyak 47.141 unit dari 74.076 unit di tahun 2019 menjadi 26.935 unit di tahun 2020.

KPR Non Subsidi

Selain KPR Subsidi, Perseroan juga memiliki berbagai layanan KPR Non Subsidi yang menargetkan nasabah berpenghasilan menengah ke atas dengan suku bunga mengambang (*floating*). Jangka waktu yang ditawarkan maksimal selama 25 (dua puluh lima) tahun untuk KPR Non Subsidi dan maksimal 15 (lima belas) tahun untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Ruko. KPR Non Subsidi Perseroan memberikan layanan untuk keperluan pembelian rumah dari *developer* ataupun non *developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

Ketentuan uang muka minimal 15% atau sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio *Loan to Value*.

Perseroan menyalurkan kredit KPR Non Subsidi melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. KPR BTN Platinum
2. KPA BTN
3. Kredit Ruko BTN

Penyaluran kredit KPR Non Subsidi untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Produk KPR Non Subsidi

KPR Non Subsidi	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
KPR BTN Platinum	5.417.587	10.118.137	(4.700.549)	(46,46%)
KPA BTN	140.533	418.577	(278.044)	(66,43%)
Kredit Ruko BTN	13.645	115.010	(101.365)	(88,14%)
Jumlah Nilai Penyaluran KPR Non Subsidi	5.517.765	10.651.724	(5.133.959)	(48,20%)

Jumlah nilai penyaluran KPR Non Subsidi tahun 2020 sebesar Rp5,52 triliun, turun 48,20% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp10,65 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya KPR BTN Platinum sebesar 46,46% atau Rp4,70 triliun.

Tabel Volume Penyaluran KPR Non Subsidi

KPR Non Subsidi	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
KPR BTN Platinum	17.267	29.859	(12.592)	(42,17%)
KPA BTN	397	1.098	(701)	(63,84%)
Kredit Ruko BTN	28	146	(118)	(80,82%)
Volume Penyaluran KPR Non Subsidi	17.692	31.103	(13.411)	(43,12%)

Volume penyaluran KPR Non Subsidi tahun 2020 sebanyak 17.692 unit, turun 43,12% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 31.103 unit. Hal tersebut berasal dari turunnya jumlah unit penyaluran KPR BTN Platinum sebanyak 12.592 unit dari 29.859 unit di tahun 2019 menjadi 17.267 unit di tahun 2020.

Kredit Perumahan Lainnya

Perseroan juga menawarkan jenis-jenis kredit perumahan serta Kredit Konsumer Lainnya, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kredit Perumahan Lainnya merupakan upaya Perseroan dalam mengembangkan bisnis sekaligus ditujukan untuk membantu konsumen memiliki hunian dengan keuntungan dan kemudahan yang tinggi.

Perseroan menyalurkan Kredit Perumahan Lainnya melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Agunan Rumah
2. Kredit Bangun Rumah
3. Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR-KB) BPJS Ketenagakerjaan
4. Tambahan Uang Muka Perumahan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (TBUM Bapertarum)

Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya

Kredit Perumahan Lainnya	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kredit Agunan Rumah	676.319	1.353.008	(676.689)	(50,01%)
Kredit Bangun Rumah	3.418	4.937	(1.518)	(30,77%)
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	-	591	(591)	(100,00%)
TBUM Bapertarum	-	-	-	-
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	679.737	1.358.536	(678.799)	(49,97%)

Jumlah nilai penyaluran Kredit Perumahan Lainnya tahun 2020 sebesar Rp679,74 miliar, turun 49,97% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,36 triliun. Hal tersebut berasal dari penurunan Kredit Agunan Rumah sebesar 50,01%, selain itu tidak ada nya PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya

Kredit Perumahan Lainnya	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Kredit Agunan Rumah	3.299	6.094	(2.795)	(45,86%)
Kredit Bangun Rumah	16	24	(8)	(33,33%)
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	-	16	(16)	(100,00%)
TBUM Bapertarum	-	-	-	-
Volume Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	3.315	6.134	(2.819)	(45,96%)

Volume penyaluran Kredit Perumahan Lainnya tahun 2020 sebanyak 3.315 unit, turun 45,96% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 6.134 unit. Hal tersebut berasal dari turunnya jumlah unit penyaluran Kredit Agunan Rumah sebanyak 2.795 unit dari 6.094 unit di tahun 2019 menjadi 3.299 unit di tahun 2020.

Kredit Non Perumahan

Perseroan memberikan Kredit Konsumer Lainnya, di luar Kredit Perumahan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah kredit. Perseroan menyalurkan Kredit Non Perumahan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kring BTN
2. Kring BTN Pensiunan
3. Kredit Swadana BTN
4. Kredit Pegawai

Penyaluran Kredit Non Perumahan untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kring BTN	790.235	891.181	(100.946)	(11,33%)
Kring BTN Pensiunan	244.372	106.565	137.807	129,32%
Kredit Swadana BTN	2.312.531	2.429.292	(116.760)	(4,81%)
Kredit Pegawai	877.342	690.203	187.139	27,11%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Non Perumahan	4.224.480	4.117.240	107.240	2,60%

Jumlah penyaluran Kredit Non Perumahan tahun 2020 sebesar Rp4,22 triliun, meningkat 2,60% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp4,12 triliun. Hal tersebut berasal dari meningkatnya Kring BTN Pensiunan sebesar 129,32% dan Kredit Pegawai sebesar 27,11%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Kring BTN	7.801	9.610	(1.809)	(18,82%)
Kring BTN Pensiunan	3.315	1.007	2.308	229,20%
Kredit Swadana BTN	1.724	1.597	127	7,95%
Kredit Pegawai	2.762	2.191	571	26,06%
Volume Penyaluran Kredit Non Perumahan	15.602	14.405	1.197	8,31%

Volume penyaluran Kredit Non Perumahan tahun 2020 sebanyak 15.602 unit, meningkat 8,31% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 14.405 unit. Hal tersebut berasal kenaikan jumlah unit Kring BTN Pensiunan sebanyak 2.308 atau 229,20%

Simpanan Konsumer

Perseroan menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan simpanan kepada nasabah, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Melalui penyediaan produk tersebut, Perseroan berupaya untuk menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sumber dana berbiaya murah yang sejalan dengan strategi Perseroan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

Tabel Jumlah Dana Simpanan Konsumer

Simpanan Konsumer	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Tabungan Konsumer	38.701.919	41.486.867	(2.784.948)	(6,71%)
Deposito Berjangka	27.077.755	24.181.802	2.895.953	11,98%
Jumlah Dana Simpanan Konsumer	65.779.674	65.668.669	111.005	0,17%

Jumlah Dana Simpanan Konsumer tahun 2020 sebesar Rp65,78 triliun, meningkat 0,17% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp65,67 triliun. Pada masa pandemi COVID-19 jumlah dana simpanan konsumer masih tumbuh, pertumbuhan tersebut dikontribusikan dari Deposito Berjangka (deposito ritel) yang sebesar 11,98% atau Rp2,90 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Simpanan Konsumer

Simpanan Konsumer	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Tabungan Konsumer	8.277.494	8.025.760	251.734	3,04%
Deposito Berjangka	93.847	88.704	5.143	5,80%
Jumlah Rekening Simpanan Konsumer	8.371.341	8.114.464	256.877	3,17%

Meskipun Pandemi COVID-19 menyebabkan keterbatasan gerak dalam melakukan penawaran produk, Perseroan berhasil meningkatkan jumlah rekening nasabah. Jumlah Rekening Simpanan Konsumer tahun 2020 sebesar 8.371.341 rekening, meningkat 3,17% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 8.114.464 rekening. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan Tabungan Konsumer sebesar 251.734 rekening yang dipengaruhi oleh kontribusi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang seluruh Indonesia dan *cross selling* dengan mengoptimalkan *database* yang dimiliki Perseroan.

Tabungan Konsumer

Tabungan Konsumer yang dimiliki Perseroan memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi pembelian dan pembayaran melalui *channel* Perseroan untuk menunjang aktivitas keuangan konsumen. Tabungan Konsumer Perseroan dikembangkan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Tabungan Batara
2. Tabungan BTN Pensiunan
3. Tabungan Batara Pendidik
4. Tabungan Batara Prima
5. Tabungan Batara *Tax Amnesty*
6. Tabungan BTN Batara RDN
7. Tabungan Lainnya, meliputi beberapa produk yaitu:
 - a. Tabungan BTN Junior
 - b. Tabungan BTN Juara
 - c. TabunganKu
 - d. Tabungan BTN Sempel
 - e. Tabungan Cermat
 - f. Tabungan BTN Perumahan
 - g. Tabungan BTN Haji Reguler*
 - h. Tabungan BTN Haji Plus*
 - i. Tabungan BTN Siap!
 - j. Tabungan Felas
 - k. Tabungan Simuda Rumahku
8. Tabungan Pos, meliputi beberapa produk yaitu:
 - a. Tabungan Tabanas Batara
 - b. Tabungan eBatarapos

Kinerja masing-masing produk Tabungan Konsumer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Tabungan Konsumer

Tabungan Konsumer	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Tabungan Batara	14.696.894	17.772.993	(3.076.099)	(17,31%)
Tabungan BTN Pensiunan	175.934	136.472	39.462	28,92%
Tabungan Batara Pendidik	176.241	125.612	50.629	40,31%
Tabungan Batara Prima	18.580.148	18.525.172	54.976	0,30%
Tabungan Batara <i>Tax Amnesty</i>	897	1.431	(534)	(37,32%)
Tabungan KPR Mass	106.439	92.013	14.426	15,68%
Tabungan BTN Batara RDN	2.026	2.238	(212)	(9,47%)
Tabungan Lainnya				
Tabungan BTN Junior	785.422	823.278	(37.856)	(4,60%)
Tabungan BTN Juara	683.550	643.413	40.137	6,24%
TabunganKu	864.779	776.364	88.415	11,39%
Tabungan BTN Simpel	92.843	80.441	12.402	15,42%
Tabungan Cermat	29.381	66.745	(37.364)	(55,98%)
Tabungan BTN Perumahan	27.409	31.662	(4.253)	(13,43%)
Tabungan BTN Haji Reguler	1	7.022	(7.021)	(99,99%)
Tabungan BTN Haji Plus	-	1.098	(1.098)	(100,00%)
Tabungan BTN Siap!	45.009	24.856	20.153	81,08%
Tabungan Felas	21.822	58.648	(36.826)	(62,79%)
Tabungan Simuda Rumahku	264	256	8	3,13%
	1.935.285	2.513.783	(578.498)	(23,01%)
Tabungan Pos				
Tabungan Tabanas Batara	23.866	30.884	(7.018)	(22,72%)
Tabungan eBatarapos	2.388.995	2.287.941	101.054	4,42%
	2.412.861	2.318.825	94.036	4,06%
Jumlah Tabungan Konsumer	38.701.919	41.488.540	(2.786.619)	(6,71%)

*) Tabungan Haji migrasi ke Syariah

Jumlah Tabungan Konsumer tahun 2020 sebesar Rp38,70 triliun, menurun 6,71% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp41,49 triliun. Penurunan tersebut khususnya berasal dari turunnya Tabungan Batara sebesar Rp3,71 miliar.

Tabel Jumlah Rekening Tabungan Konsumer

Simpanan Konsumer	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Tabungan Batara	2.247.831	2.085.641	162.190	7,78%
Tabungan BTN Pensiunan	13.556	11.855	1.701	14,35%
Tabungan Batara Pendidik	73.099	36.587	36.512	99,80%
Tabungan Batara Prima	29.117	31.595	(2.478)	(7,84%)
Tabungan Batara <i>Tax Amnesty</i>	25	30	(5)	(16,67%)
Tabungan KPR Mass	106.562	98.874	7.688	7,78%
Tabungan BTN Batara RDN	2.777	2.263	514	22,71%

Simpanan Konsumer	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Tabungan Lainnya				
Tabungan BTN Junior	1.097.714	1.095.654	2.060	0,19%
Tabungan BTN Juara	699.549	804.345	(104.796)	(13,03%)
TabunganKu	1.297.708	452.446	845.262	186,82%
Tabungan BTN Simpel	724.905	716.369	8.536	1,19%
Tabungan Cermat	954.409	1.649.514	(695.105)	(42,14%)
Tabungan BTN Perumahan	3.355	3.651	(296)	(8,11%)
Tabungan BTN Haji Reguler	3	33.678	(33.675)	(99,99%)
Tabungan BTN Haji Plus	259	306	(47)	(15,36%)
Tabungan BTN Siap!	38.141	9.710	28.431	292,80%
Tabungan Felas	222	222	-	-
Tabungan Simuda Rumahku	64	195	(131)	(67,18%)
	4.816.329	4.766.090	50.239	1,05%
Tabungan Pos				
Tabungan Tabanas Batara	6.717	11.753	(5.036)	(42,85%)
Tabungan eBatarapos	981.481	982.982	(1.501)	(0,15%)
	988.198	994.735	(6.537)	(0,66%)
Jumlah Rekening Tabungan Konsumer	8.277.494	8.027.670	249.824	3,11%

Jumlah Rekening Tabungan Konsumer tahun 2020 sebesar 8.277.494 rekening, meningkat 3,11% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 8.027.670 rekening. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan TabunganKu sebesar 845.262 rekening dan Tabungan Batara sebesar 162.190 rekening.

Deposito Berjangka BTN Ritel

Produk deposito berjangka Perseroan memberikan kemudahan kepada konsumen atau nasabah untuk investasi berjangka dengan benefit yang tinggi. Investasi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga yang menarik dan bersaing. Produk Deposito Berjangka BTN Ritel ditawarkan dengan jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan; serta *Deposito On Call*.

Kinerja masing-masing produk Deposito Berjangka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Deposito Berjangka

Deposito Berjangka	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
1 bulan	12.979.749	10.065.397	2.914.352	28,95%
2 bulan	368.961	416.830	(47.869)	(11,48%)
3 bulan	12.336.826	12.358.227	(21.401)	(0,17%)
4 Bulan	-	65.927	(65.927)	(100,00%)
6 bulan	773.842	782.190	(8.348)	(1,07%)
12 bulan	404.889	372.752	32.137	8,62%
24 bulan	30.461	25.433	5.028	19,77%
<i>Deposito On Call</i>	183.026	95.046	87.980	92,57%
Jumlah Deposito Berjangka	27.077.755	24.181.802	2.895.953	11,98%

Jumlah Deposito Berjangka tahun 2020 sebesar Rp27,08 triliun, meningkat 11,98% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp24,18 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan jenis Deposito Berjangka 1 (satu) bulan sebesar Rp2,91 triliun. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah Rekening Deposito Berjangka sebesar 5,80% dari 88.704 rekening di tahun 2019 menjadi 93.847 rekening di tahun 2020.

Tabel Jumlah Rekening Deposito Berjangka

Deposito Berjangka	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
1 bulan	60.970	57.147	3.823	6,69%
2 bulan	1.661	1.261	400	31,72%
3 bulan	21.276	21.326	(50)	(0,23%)
4 Bulan	-	24	(24)	(100,00%)
6 bulan	7.178	6.336	842	13,29%
12 bulan	2.444	2.338	106	4,53%
24 bulan	290	241	49	20,33%
<i>Deposito On Call</i>	28	31	(3)	(9,68%)
Jumlah Rekening Deposito Berjangka	93.847	88.704	5.143	5,80%

Perbankan Komersial

Portofolio produk Perseroan pada Perbankan Komersial terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Komersial dan Produk Simpanan Komersial.

Nilai dan volume penyaluran produk Perbankan Komersial dapat dilihat di bawah ini.

Tabel Nilai Penyaluran Produk Perbankan Komersial

Jenis Produk Perbankan Komersial	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Produk Kredit Komersial	44.186.175	18,91%	47.184.222	25,49%	(2.998.046)	(6,35%)
Produk Simpanan Komersial	189.525.768	81,09%	137.939.293	74,51%	51.586.475	37,40%
Jumlah Nilai Penyaluran Produk Perbankan Komersial	233.711.944	100,00%	185.123.514	100,00%	48.588.430	26,25%

Jumlah nilai penyaluran produk Perbankan Komersial tahun 2020 sebesar Rp233,71 triliun, meningkat 26,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp185,12 triliun. Hal tersebut berasal dari kenaikan produk Simpanan Komersial sebesar 37,40% atau Rp51,59 triliun.

Tabel Volume Penyaluran Produk Perbankan Komersial

Jenis Produk Perbankan Komersial	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Komersial (Unit)	7.118	10.640	(3.522)	(33,10%)
Produk Simpanan Komersial (Rekening)	21.404	23.455	(2.051)	(8,74%)

Volume penyaluran produk Kredit Komersial tahun 2020 sebanyak 7.118 unit, turun 33,10% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 10.640 unit. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah Kredit Perumahan dari Kredit Konstruksi. Demikian pula dengan volume produk Simpanan Konsumer turun 8,74% dari 23.455 rekening di tahun 2019 menjadi 21.404 rekening di tahun 2020.

Rincian masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Kredit Komersial

Perseroan menyediakan produk Kredit Perbankan Komersial untuk memberikan beragam solusi bagi konsumen dengan produk yang terdiri dari produk Kredit Perumahan dan Kredit Non Perumahan. Kredit Perumahan berupa Kredit Konstruksi, sedangkan Kredit Non Perumahan terdiri dari Kredit UMKM dan Kredit Komersial.

Rincian informasi terkait kinerja produk Kredit Komersial Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Produk Kredit Komersial

Jenis Kredit Komersial	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kredit Perumahan				
Kredit Konstruksi	4.530.443	9.639.825	(5.109.381)	(53,00%)
Kredit Non Perumahan				
Kredit UMKM	2.002.732	1.969.908	32.824	1,67%
Kredit Komersial Lainnya	8.883.353	14.352.555	(5.469.202)	(38,11%)
Jumlah Penyaluran Kredit Komersial	15.416.528	25.962.288	(10.545.759)	(40,62%)

Jumlah nilai penyaluran produk Kredit Komersial tahun 2020 sebesar Rp15,42 triliun, turun 40,62% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp25,96 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya penyaluran Kredit Perumahan dari Kredit Konstruksi sebesar 53,00% serta Kredit Non Perumahan dari Kredit Komersial sebesar 38,11%.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Komersial

Jenis Kredit Komersial	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Kredit Perumahan				
Kredit Konstruksi	2.935	5.837	(2.902)	(49,72%)
Kredit Non Perumahan				
Kredit UMKM	3.954	4.423	(469)	(10,60%)
Kredit Komersial Lainnya	229	380	(151)	(39,74%)
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Komersial	7.118	10.640	(3.522)	(33,10%)

Volume penyaluran produk Kredit Komersial tahun 2020 sebanyak 7.118 unit, turun 33,10% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 10.640 unit. Hal tersebut disebabkan turunnya seluruh volume penyaluran Kredit Komersial dari Kredit Konstruksi sebanyak 2.902 unit, Kredit UMKM sebanyak 469 unit dan Kredit Komersial sebanyak 151 unit.

Kredit Perumahan

Kredit Konstruksi

Perseroan memberikan beragam solusi pembangunan properti dengan banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Perseroan menyediakan kredit konstruksi kepada pengembang perumahan untuk tujuan modal kerja yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan apartemen. Untuk jenis kredit ini, Perseroan memberikan kredit maksimal hingga 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi dengan suku bunga mengambang. Fasilitas kredit konstruksi memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan komersial untuk melakukan pengembangan dalam pembangunan bangunan horizontal maupun bangunan vertikal/*high rise building* termasuk sarana dan prasarananya.

Kredit Konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung Program Sejuta Rumah karena penyaluran kredit tersebut mampu menciptakan *supply* rumah. Dalam membuat keputusan untuk membiayai kredit konstruksi, Perseroan memperhitungkan periode jatuh tempo berdasarkan perkiraan masa konstruksi. Kredit konstruksi dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang akan dibangun di atas tanah.

Nasabah perbankan komersial yang telah mendapatkan Kredit Konstruksi BTN juga dapat memperoleh Kredit Kepemilikan Lahan, dimana Perseroan menyediakan kredit untuk tujuan memperoleh lahan yang akan digunakan untuk membangun hunian dan apartemen bersubsidi, dalam jumlah sampai dengan 70% dari biaya. Jangka waktu kredit ini mengikuti jangka waktu kredit konstruksinya dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai. dengan tiga tahun dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai.

Perseroan menyalurkan Kredit Konstruksi melalui 2 (dua) produk sebagai berikut:

1. Kredit Konstruksi BTN
2. Kredit Konstruksi Korporasi

Penyaluran Kredit Konstruksi untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Kinerja masing-masing produk Kredit Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Produk Kredit Konstruksi

Jenis Kredit Konstruksi	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kredit Konstruksi BTN	3.938.153	9.513.505	(5.575.352)	(58,60%)
Kredit Konstruksi Korporasi	592.290	126.320	465.970	368,88%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konstruksi	4.530.443	9.639.825	(5.109.382)	(53,00%)

Jumlah nilai penyaluran Kredit Konstruksi tahun 2020 sebesar Rp4,53 triliun, turun 53,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp9,64 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya penyaluran Kredit Konstruksi BTN sebesar 58,60%.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Konstruksi

Jenis Kredit Konstruksi	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Kredit Konstruksi BTN	2.920	5.836	(2.916)	(49,97%)
Kredit Konstruksi Korporasi	15	1	14	1.400,00%
Jumlah Volume Kredit Konstruksi	2.935	5.837	(2.902)	(49,72%)

Volume penyaluran Kredit Konstruksi tahun 2020 sebanyak 2.935 unit, turun 49,72% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 5.837 unit. Hal tersebut disebabkan turunnya volume Kredit Konstruksi sebanyak 2.916 unit dari 5.836 unit di tahun 2019 menjadi 2.920 unit di tahun 2020.

Kredit Non Perumahan

Kredit Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Perseroan menyediakan Kredit UMKM sebagai solusi bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertujuan menyalurkan pembiayaan usaha yang produktif. Perseroan menyalurkan Kredit UMKM melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK)
3. Kredit Modal Kerja (KMK)
4. Kredit Investasi UMKM
5. KMK Kontraktor UMKM
6. Linkage Program

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Produk Kredit UMKM

Jenis Kredit UMKM	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
KUR	97.160	91.870	5.290	5,76%
KUMK	1.673.739	1.617.846	55.893	3,45%
KMK	167.804	214.249	(46.445)	(21,68%)
Kredit Investasi UMKM	4.241	11.797	(7.555)	(64,04%)
KMK Kontraktor UMKM	9.786	31.745	(21.959)	(69,17%)
Linkage Program	50.000	2.400	47.600	1.983,33%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit UMKM	2.002.732	1.969.907	32.824	1,67%

Jumlah nilai penyaluran Kredit UMKM tahun 2020 sebesar Rp2,00 triliun, meningkat 1,67% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,97 triliun. Hal tersebut berasal dari kenaikan penyaluran *Linkage Program* sebesar Rp47,60 miliar dan KUMK sebesar Rp55,89 miliar.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit UMKM

Jenis Kredit UMKM	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
KUR	493	517	(24)	(4,64%)
KUMK	3.304	3.639	(335)	(9,21%)
KMK	139	229	(90)	(39,30%)
Kredit Investasi UMKM	6	8	(2)	(25,00%)
KMK Kontraktor UMKM	11	28	(17)	(60,71%)
<i>Linkage Program</i>	1	2	(1)	(50,00%)
Jumlah Volume Penyaluran Kredit UMKM	3.954	4.423	(469)	(10,60%)

Volume penyaluran Kredit UMKM tahun 2020 sebanyak 3.954 unit, turun 10,60% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 4.423 unit. Hal tersebut disebabkan turunnya volume KUMK sebanyak 335 unit atau 9,21%.

Kredit Komersial

Perseroan memasarkan Kredit Non Perumahan berupa Kredit Komersial selain dengan memberikan bunga yang kompetitif juga pelayanan prima yang ditawarkan. Kredit Komersial disalurkan Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Investasi
3. KMK Kontraktor

Kinerja masing-masing produk Kredit Komersial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Produk Kredit Komersial

Jenis Kredit Komersial	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
KMK	7.692.969	7.015.557	677.412	9,66%
Kredit Investasi	660.066	5.238.289	(4.578.223)	(87,40%)
KMK Kontraktor	530.137	2.098.709	(1.568.572)	(74,74%)
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Komersial	8.883.352	14.352.555	(5.469.203)	(38,11%)

Jumlah nilai penyaluran Kredit Komersial tahun 2020 sebesar Rp8,88 triliun, turun 38,11% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp14,35 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya penyaluran Kredit Investasi sebesar Rp4,58 triliun.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Komersial

Jenis Kredit Komersial	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
KMK	154	188	(34)	(18,09%)
Kredit Investasi	25	67	(42)	(62,69%)
KMK Kontraktor	50	125	(75)	(60,00%)
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Komersial	229	380	(151)	(39,74%)

Volume penyaluran Kredit Komersial tahun 2020 sebanyak 229 unit, turun 39,74% dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 380 unit. Hal tersebut disebabkan turunnya volume KMK Kontraktor sebanyak 75 unit atau 60,00%.

Simpanan Komersial

Perseroan menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen Perbankan Komersial yang meliputi Giro dan Deposito Berjangka Lembaga.

Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Komersial Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

Tabel Jumlah Dana Simpanan Komersial

Jenis Simpanan Komersial	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Giro Komersial	68.601.732	48.113.096	20.488.636	42,58%
Deposito Berjangka Lembaga	120.925.993	89.787.221	31.138.772	34,68%
Jumlah Dana Simpanan Komersial	189.527.725	137.900.317	51.627.408	37,44%

Jumlah Dana Simpanan Komersial tahun 2020 sebesar Rp189,53 triliun, meningkat 37,44% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp137,90 triliun. Hal tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Deposito Berjangka Lembaga sebesar Rp31,14 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Simpanan Komersial

Jenis Simpanan Komersial	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Giro Komersial	49.818	48.669	1.149	2,36%
Deposito Berjangka Lembaga	9.216	9.696	(480)	(4,95%)
Jumlah Rekening Simpanan Komersial	59.034	58.365	669	1,15%

Jumlah Rekening Dana Simpanan Komersial tahun 2020 sebesar 59.034 rekening, meningkat 1,15% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 58.365 rekening. Hal tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Giro Komersial sebesar 1.149 rekening.

Uraian masing-masing produk Simpanan Komersial dapat dilihat di bawah ini:

Giro Komersial

Perseroan memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Giro melalui Giro FLPP dan Giro Non FLPP. Kinerja masing-masing produk Giro Komersial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Dana Giro Komersial

Jenis Giro Komersial	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Giro Non FLPP	23.505.558	26.883.785	(3.378.227)	(12,57%)
Giro FLPP	45.095.174	21.229.311	23.865.863	112,42%
Jumlah Dana Giro Komersial	68.600.732	48.113.096	20.487.636	42,58%

Jumlah Dana Giro Komersial tahun 2020 sebesar Rp68,60 triliun, meningkat 42,58% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp48,11 triliun. Hal tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Giro FLPP sebesar Rp23,87 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Giro Komersial

Jenis Giro Komersial	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Giro Non FLPP	49.812	48.663	1.149	2,36%
Giro FLPP	6	6	-	-
Jumlah Rekening Giro Komersial	49.818	48.669	1.149	2,36%

Jumlah Rekening Giro Komersial tahun 2020 sebesar 49.818 rekening, meningkat 2,36% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 48.669 rekening. Hal tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Giro Non FLPP sebesar 1.149 rekening.

Deposito Berjangka Lembaga

Perseroan juga memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Deposito Berjangka Lembaga melalui produk Deposito Berjangka Lembaga dan *On Call Current Account* Lembaga. Kinerja masing-masing produk Deposito Berjangka Lembaga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga

Jenis Deposito Berjangka Lembaga	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Deposito Berjangka Lembaga	120.051.693	88.605.059	31.446.634	35,49%
Deposito <i>On Call</i> Lembaga	874.300	1.182.162	(307.862)	(26,04%)
Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga	120.925.993	89.787.221	31.138.772	34,68%

Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga tahun 2020 sebesar Rp120,93 triliun, meningkat 34,68% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp89,79 triliun. Hal tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Deposito Berjangka Lembaga sebesar Rp31,45 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga

Jenis Deposito Berjangka Lembaga	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Deposito Berjangka Lembaga	9.155	9.569	(414)	(4,33%)
Deposito <i>On Call</i> Lembaga	61	127	(66)	(51,97%)
Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga	9.216	9.696	(480)	(4,95%)

Jumlah Rekening Dana Deposito Berjangka Lembaga tahun 2020 sebesar 9.216 rekening, menurun 4,95% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 9.696 rekening. Hal tersebut terutama berasal dari turunnya jumlah rekening dari Deposito Berjangka Lembaga sebesar 414 rekening.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

Uraian pendapatan dan profitabilitas segmen konvensional disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

Segmen Konvensional	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan segmen	22.947.252	23.271.432	(324.180)	(1,39%)
Beban segmen	(14.834.638)	(15.325.002)	490.364	(3,20%)
Pendapatan segmen - neto	8.112.614	7.946.430	166.184	2,09%
Pendapatan operasional lainnya	2.433.218	2.035.424	397.794	19,54%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.818.757)	(3.099.614)	1.280.857	(41,32%)
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi-bersih	(3.784)	-	(3.784)	(100,00%)
Beban operasional lainnya	(6.330.144)	(6.599.177)	269.033	(4,08%)
Laba operasional	2.393.147	283.063	2.110.084	745,45%
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(257.148)	(110.461)	(146.687)	132,80%

Segmen Konvensional	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Posisi Keuangan				
Total aset	334.200.414	288.173.171	46.027.243	15,97%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	320.010.199	268.291.413	51.718.786	19,28%

Pendapatan Segmen Konvensional

Pendapatan neto segmen konvensional tahun 2020 sebesar Rp8,11 triliun, meningkat 2,09% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7,95 triliun.

Profitabilitas Segmen Konvensional

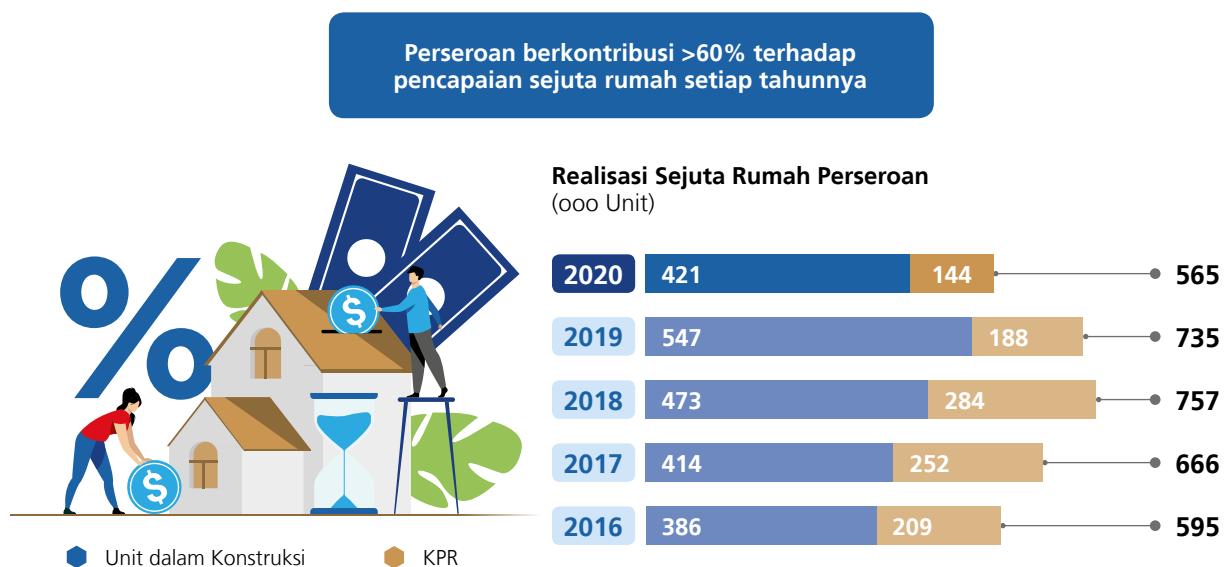
Laba operasional segmen konvensional tahun 2020 sebesar sebesar Rp2,39 triliun, meningkat 745,45% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp0,28 triliun.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Konvensional

Perseroan fokus dan pengemban amanat utama program Sejuta Rumah Pemerintah, Perseroan memiliki *positioning* yang kuat pada bisnis perumahan, terutama pada segmen menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini dibuktikan dengan total *market share* KPR Perseroan pada September 2020 yang mencapai 40,01% yang realisasinya dominan pada perumahan segmen MBR yang ditunjukkan dengan komposisi KPR Subsidi sebesar 56,13% dari total kredit yang disalurkan Perseroan. Sejalan dengan *positioning* bisnis tersebut, Perseroan telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

Untuk memperkuat perannya di sektor perumahan dan mempercepat penyelesaian *backlog* kepemilikan rumah, Perseroan juga telah mengembangkan perannya yang tidak terbatas sebagai lembaga pembiayaan, namun juga berperan sebagai *partner* bagi seluruh *stakeholder* perumahan baik dari sisi *supply* dan *demand* untuk memperluas pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi segmen MBR.

Gambar Kontribusi Perseroan pada Program Sejuta Rumah Nasional



Sumber : Laporan Sejuta Rumah



Sumber : Laporan Sejuta Rumah

Segmen Syariah

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

Perseroan juga mengembangkan model perbankan dengan menganut sistem Syariah. Segmen usaha Syariah menyediakan produk simpanan dan pembiayaan bersifat konsumen dan komersial. Kinerja produk dari segmen Syariah diuraikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah, dengan masing-masing uraian sebagai berikut:



Tabel Produk Segmen Syariah

Jenis Produk Segmen Syariah	Posisi 2020		Posisi 2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pembiayaan Syariah	25.062.047	51,26%	23.612.620	19,52%	1.449.427	6,14%
Simpanan Syariah	23.831.409	48,74%	21.861.284	80,48%	1.970.125	9,01%
Jumlah Pembiayaan dan Simpanan pada Segmen Syariah	48.893.456	100,00%	45.473.904	100,00%	3.419.552	7,52%

Keterangan: Posisi merupakan posisi awal sejak adanya BTN Syariah/Unit Usaha Syariah.

Dari komposisi di atas, terlihat bahwa kegiatan bisnis Segmen Syariah posisi tahun 2020 sebagian besar dikontribusikan dari Pembiayaan Syariah yang terdiri atas Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Posisi Jumlah Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah sampai dengan tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25,06 triliun dan Rp23,83 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebesar Rp23,61 triliun dan Rp21,86 triliun.

Pembiayaan Syariah

Perseroan juga melakukan pembiayaan perumahan dan non perumahan melalui mekanisme Syariah, dengan klasifikasi produk pembiayaan Unit Usaha Syariah ke dalam jenis konsumer dan komersial. Rincian informasi terkait kinerja produk Pembiayaan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel dan di bawah ini:

Tabel Jenis Pembiayaan Syariah

Jenis Pembiayaan Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pembiayaan Konsumer	4.120.430	3.879.900	240.530	6,20%
Pembiayaan Komersial	538.482	1.422.579	(884.097)	(62,15%)
Jumlah Pembiayaan Syariah	4.658.912	5.302.479	(643.567)	(12,14%)

Jumlah Pembiayaan Syariah tahun 2020 sebesar Rp4,66 triliun, turun 12,14% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,42 triliun. Penurunan tersebut khususnya berasal dari turunnya Pembiayaan Syariah Komersial sebesar Rp884,10 miliar. Hal tersebut dipengaruhi karena pada tahun 2020 strategi Unit Usaha Syariah berfokus pada penyempurnaan bisnis proses, perbaikan kualitas portofolio pembiayaan. Meskipun demikian, Pembiayaan Konsumer Syariah berhasil meningkat 6,20% dari Rp3,88 triliun di tahun 2019 menjadi Rp4,12 triliun di tahun 2020.

Tabel Volume Pembiayaan Segmen Syariah

Jenis Pembiayaan Segmen Syariah	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Pembiayaan Konsumer	25.215	23.271	1.944	8,35%
Pembiayaan Komersial	923	2.249	(1.326)	(58,96%)
Jumlah Volume Pembiayaan Syariah	26.138	25.520	618	2,42%

Jumlah volume pembiayaan Syariah tahun 2020 sebesar 26.138 pembiayaan, meningkat 2,42% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 25.520 pembiayaan. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan volume Pembiayaan Konsumer Syariah sebesar 8,35% atau 1.944 pembiayaan.

Uraian masing-masing produk Pembiayaan Syariah dapat dilihat di bawah ini:

Pembiayaan Konsumer Syariah

Pembiayaan Konsumer Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan, meliputi:
 - a. KPR Subsidi
 - KPR BP2BT iB
 - KPR Sejahtera Tapak iB
 - KPR Sejahtera Susun iB
 - KPR SSM Tapak iB
 - KPR SSM Susun iB
 - b. KPR Non Subsidi
 - KPR Platinum iB
 - KPR Indent iB
 - c. Non KPR
 - Pembiayaan Bangun Rumah iB
2. Pembiayaan Non Perumahan, meliputi:
 - a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB
 - b. Pembiayaan Gadai iB
 - c. Pembiayaan Multijasa iB
 - d. Pembiayaan Multimanfaat iB
 - e. Pembiayaan Emasku

Penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah untuk masing-masing jenis produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pembiayaan Konsumer Syariah

Jenis Pembiayaan Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pembiayaan Perumahan				
KPR Subsidi				
KPR BP2BT iB	28.679	136.662	(107.983)	(79,01%)
KPR Sejahtera Tapak iB	770.964	698.168	72.796	10,43%
KPR Sejahtera Susun iB	-	-	-	-
KPR SSM Tapak iB	1.927.885	1.117.577	810.308	72,51%
KPR SSM Susun iB	-	7.801	(7.801)	(100,00%)
	2.727.528	1.960.208	767.320	39,14%
KPR Non Subsidi				
KPR Platinum iB	922.388	1.176.171	(253.783)	(21,58%)
KPR Indent iB	440.342	670.493	(230.151)	(34,33%)
	1.362.730	1.846.664	(483.934)	(26,21%)
Non KPR				
Pembiayaan Bangun Rumah iB	3.166	6.407	(3.241)	(50,59%)
Jumlah Pembiayaan Perumahan	4.093.424	3.813.279	280.145	7,35%
Pembiayaan Non Perumahan				
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	943	462	481	104,11%
Pembiayaan Gadai iB	846	1.067	(221)	(20,71%)
Pembiayaan Multijasa iB	2.795	6.507	(3.712)	(57,05%)
Pembiayaan Multimanfaat iB	22.196	58.501	(36.305)	(62,06%)
Pembiayaan Emasku iB	226	84	142	169,05%
Jumlah Pembiayaan Non Perumahan	27.006	66.621	(39.615)	(59,46%)
Jumlah Pembiayaan Konsumer Syariah	4.120.430	3.879.900	240.530	6,20%

Total pembiayaan Konsumer Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp4,12 triliun, meningkat 6,20% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3,88 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Pembiayaan KPR SSM Tapak iB sebesar Rp810,31 miliar. Sejalan dengan hal tersebut, volume pembiayaan Syariah juga meningkat 8,35% dari 23.271 Pembiayaan Kredit menjadi 25.215 Pembiayaan Kredit.

Tabel Volume Pembiayaan Konsumer Syariah

Jenis Pembiayaan Syariah	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Pembiayaan Perumahan				
KPR Subsidi				
KPR BP2BT iB	296	1.515	(1.219)	(80,46%)
KPR Sejahtera Tapak iB	5.885	5.557	328	5,90%
KPR Sejahtera Susun iB	-	-	-	-
KPR SSM Tapak iB	14.020	8.943	5.077	56,77%
KPR SSM Susun iB	-	33	(33)	(100,00%)
	20.201	16.048	4.153	25,88%
KPR Non Subsidi				
KPR Platinum iB	3.318	4.197	(879)	(20,94%)
KPR Indent iB	1.135	1.761	(626)	(35,55%)
	4.453	5.958	1.505	(25,26%)
Non KPR				
Pembiayaan Bangun Rumah iB	19	44	(25)	(56,82%)
	19	44	(25)	(56,82%)
Jumlah Pembiayaan Perumahan	24.673	22.050	2.623	11,90%
Pembiayaan Non Perumahan				
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	10	5	5	100,00%
Pembiayaan Gadai iB	80	76	4	5,26%
Pembiayaan Multijasa iB	55	133	(78)	(58,65%)
Pembiayaan Multimanfaat iB	392	1.005	(613)	(61,00%)
Pembiayaan Emasku iB	5	2	3	150,00%
Jumlah Pembiayaan Non Perumahan	542	1.221	(679)	(55,61%)
Jumlah Volume Pembiayaan Konsumer Syariah	25.215	23.271	1.944	8,35%

Pembiayaan Komersial Syariah

Pembiayaan Komersial Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan
 - a. Kredit Yasa Griya iB
2. Pembiayaan Non Perumahan
 - a. UMKM Syariah
 - b. Pembiayaan Modal Kerja iB
 - c. Pembiayaan Investasi iB

Penyaluran Pembiayaan Komersial Syariah untuk masing-masing jenis produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pembiayaan Komersial Syariah

Jenis Pembiayaan Komersial Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pembiayaan Perumahan				
Kredit Yasa Griya iB	499.442	1.341.878	(842.436)	(62,78%)
	499.442	1.341.878	(842.436)	(62,78%)
Pembiayaan Non Perumahan				
UMKM Syariah	-	-	-	-
Pembiayaan Modal Kerja iB	27.140	61.450	(34.310)	(55,83%)
Pembiayaan Investasi iB	11.900	19.251	(7.351)	(38,19%)
	39.040	80.701	(41.661)	(51,62%)
Jumlah Pembiayan Komersial Syariah	538.482	1.422.579	(884.097)	(62,15%)

Tabel Volume Pembiayaan Komersial Syariah

Jenis Pembiayaan Syariah	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Unit)	(%)
Pembiayaan Perumahan				
Kredit Yasa Griya iB	904	2.210	(1.306)	(59,10%)
	904	2.210	(1.306)	(59,10%)
Pembiayaan Non Perumahan				
UMKM Syariah	-	-	-	-
Pembiayaan Modal Kerja iB	17	18	(1)	(5,56%)
Pembiayaan Investasi iB	2	21	(19)	(90,48%)
	19	39	(20)	(51,28%)
Jumlah Pembiayaan Komersial Syariah	932	2.249	(1.317)	(58,56%)

Perseroan mencatatkan penyaluran pembiayaan Komersial Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp538,48 miliar turun 62,15% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,42 triliun. Nilai penyaluran pembiayaan komersial ini turun disebabkan Strategi Unit Usaha Syariah ditahun 2020 berfokus pada penyempurnaan bisnis proses kualitas portofolio pembiayaan.

Simpanan Syariah

Perseroan juga melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui Unit Usaha Syariah melalui produk Giro, Tabungan, dan Deposito Syariah. Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan di bawah ini:

Tabel Dana Simpanan Syariah

Jenis Simpanan Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Giro Syariah	3.443.782	4.007.722	(563.940)	(14,07%)
Tabungan Syariah	4.019.352	4.152.815	(133.463)	(3,21%)
Deposito Syariah	16.368.275	13.699.901	2.668.374	19,48%
Jumlah Dana Simpanan Syariah	23.831.409	21.860.438	1.970.971	9,02%

Jumlah Dana Simpanan Syariah tahun 2020 sebesar Rp23,83 triliun, meningkat 9,02% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp21,86 triliun. Deposito Syariah berkontribusi cukup besar terhadap jumlah Simpanan Syariah, dengan komposisi Rp16,36 triliun dari total Dana Simpanan Syariah mencapai Rp23,83 triliun di tahun 2020.

Tabel Jumlah Rekening Simpanan Syariah

Jenis Simpanan Syariah	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Giro Syariah	12.619	10.920	1.699	15,56%
Tabungan Syariah	843.386	755.479	87.907	11,64%
Deposito Syariah	10.437	7.348	3.089	42,04%
Jumlah Rekening Simpanan Syariah	866.442	773.747	92.695	11,98%

Dari segi jumlah rekening, di tahun 2020 Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga dari Simpanan Rekening Syariah sebanyak 866.422 rekening, meningkat 11,98% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 773.747 rekening. Kontribusi terbesar berasal dari jumlah rekening Tabungan Syariah yang meningkat menjadi 843.386 rekening di tahun 2020.

Giro Syariah

Simpanan Syariah dalam bentuk Giro diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB. Kinerja masing-masing produk Giro Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Dana Giro Syariah

Jenis Giro Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Giro BTN iB	3.085.096	2.593.010	492.084	18,98%
Giro BTN Prima iB	358.686	1.414.712	(1.056.026)	(74,65%)
Jumlah Dana Giro Syariah	3.443.782	4.007.722	(563.940)	(14,07%)

Jumlah dana Giro Syariah tahun 2020 sebesar Rp3,44 triliun, turun 14,07% atau Rp563,94 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp4,01 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya Giro BTN Prima iB sebesar Rp1,06 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Giro Syariah

Jenis Simpanan Syariah	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Giro BTN iB	10.728	9.136	1.592	17,43%
Giro BTN Prima iB	1.891	1.784	107	6,00%
Jumlah Rekening Giro Syariah	12.619	10.920	1.699	15,56%

Di sisi lain, Jumlah Rekening Giro Syariah berhasil tumbuh sebesar 15,56% atau 1.699 rekening, dari 10.920 rekening di tahun 2019 menjadi 12.619 rekening di tahun 2020. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan rekening Giro BTN iB yang sebesar 17,43% atau 1.592 rekening.

Tabungan Syariah

Simpanan Syariah dalam bentuk Tabungan diberikan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Tabungan BTN Batara iB
2. Tabungan BTN Prima iB
3. Tabungan BTN Haji iB
4. TabunganKu iB
5. Tabungan BTN Qurban iB
6. Tabungan Simpel BTN iB
7. Tabungan Emas BTN iB

Kinerja masing-masing produk Tabungan Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Dana Tabungan Syariah

Jenis Giro Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Tabungan BTN Batara iB	896.224	780.388	115.836	14,84%
Tabungan BTN Prima iB	2.914.166	3.166.824	(252.658)	(7,98%)
Tabungan BTN Haji iB	194.871	191.922	2.949	1,54%
TabunganKu iB	6.011	5.967	44	0,74%
Tabungan BTN Qurban iB	3.163	2.588	575	22,22%
Tabungan Simpel BTN iB	2.974	3.535	(561)	(15,87%)
Tabungan Emas BTN iB	1.944	1.591	353	22,19%
Jumlah Dana Tabungan Syariah	4.019.353	4.152.815	(133.462)	(3,21%)

Jumlah Dana Tabungan Syariah tahun 2020 sebesar Rp4,02 triliun, turun 3,21% atau Rp133,46 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp4,15 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya Tabungan BTN Prima iB sebesar Rp252,66 miliar.

Tabel Rekening Tabungan Syariah

Jenis Tabungan Syariah	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Tabungan BTN Batara iB	487.294	435.594	51.700	11,87%
Tabungan BTN Prima iB	132.527	127.879	4.648	3,63%
Tabungan BTN Haji iB	142.726	116.946	25.780	22,04%
TabunganKu iB	13.804	11.375	2.429	21,35%
Tabungan BTN Qurban iB	6.114	5.235	879	16,79%
Tabungan Simpel BTN iB	58.538	57.137	1.401	2,45%
Tabungan Emas BTN iB	2.383	1.313	1.070	81,49%
Jumlah Rekening Dana Tabungan Syariah	843.386	755.479	87.907	11,64%

Jumlah Rekening Tabungan Syariah berhasil tumbuh sebesar 11,64% atau 87.907 rekening, dari 755.479 rekening di tahun 2019 menjadi 843.386 rekening di tahun 2020. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan rekening Tabungan BTN Batara iB yang sebesar 11,87% atau 51.700 rekening.

Deposito Syariah

Simpanan Syariah dalam bentuk Deposito diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Deposito BTN iB baik untuk perorangan maupun untuk lembaga, serta Deposito *On Call* iB.

Kinerja masing-masing produk Deposito Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Dana Deposito Syariah

Jenis Deposito Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Deposito BTN iB (Perorangan)	970.220	732.712	237.508	32,41%
Deposito BTN iB (Lembaga)	15.370.906	12.898.957	2.471.949	19,16%
Deposito <i>On Call</i> iB	27.150	68.232	(41.082)	(60,21%)
Jumlah Deposito Syariah	16.368.275	13.669.901	2.668.374	19,74%

Jumlah Deposito Syariah tahun 2020 sebesar Rp16,37 triliun, meningkat 19,74% atau Rp2,67 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp13,67 triliun. Hal tersebut berasal dari pertumbuhan Deposito BTN iB (Lembaga) sebesar Rp2,47 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Deposito Syariah

Jenis Deposito Syariah	2020 (Rekening)	2019 (Rekening)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rekening)	(%)
Deposito BTN iB (Perorangan)	8.969	6.184	2.785	45,04%
Deposito BTN iB (Lembaga)	1.448	1.144	304	26,57%
Deposito <i>On Call</i> iB	20	20	-	-
Jumlah Rekening Deposito Syariah	10.437	7.348	3.089	42,04%

Jumlah Rekening Deposito Syariah meningkat sebesar 42,04% atau 3.089 rekening, dari 7.348 rekening di tahun 2019 menjadi 10.437 rekening di tahun 2020. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan rekening Deposito BTN iB (Perorangan) yang sebesar 45,04% atau 2.785 rekening.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

Uraian pendapatan dan profitabilitas segmen syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

Segmen Syariah	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan segmen	2.158.528	2.448.442	(289.914)	(11,84%)
Beban segmen	(1.357.299)	(1.433.071)	75.772	(5,29%)
Pendapatan segmen - neto	801.229	1.015.371	(214.142)	(21,09%)
Pendapatan operasional lainnya	81.389	74.428	(6.961)	9,35%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(439.722)	(387.051)	(52.671)	13,61%
Beban operasional lainnya	(505.758)	(464.038)	(41.720)	8,99%
Laba (Rugi) Operasional	(62.862)	238.710	(301.572)	(126,33%)
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	197.720	(250)	197.970	(79.188,00%)
Posisi Keuangan				
Total aset	33.032.487	28.385.675	4.646.812	16,37%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	27.234.857	24.431.238	2.803.619	11,48%

Pendapatan Segmen Syariah

Pendapatan neto Segmen Syariah tahun 2020 sebesar Rp0,80 triliun, menurun 21,09% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,02 triliun.

Profitabilitas Segmen Syariah

Laba (rugi) operasional Segmen Syariah tahun 2020 sebesar (Rp62,86) miliar, menurun 126,33% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp238,71 miliar.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Syariah

Perbankan Syariah Indonesia tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang tumbuh secara agresif. Per Desember 2020 aset keuangan syariah tumbuh 16,37%. Dimana perbankan syariah menyumbang 9,14% dari total Aset Perseroan secara keseluruhan atau sebesar Rp33,03 triliun. Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan harus melakukan transformasi menjadi perbankan syariah berdaya saing tinggi dan berperan lebih nyata. Beberapa hal yang menjadi tantangan UUS Perseroan diantaranya adalah memiliki keunikan model bisnis/produk, mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, SDM berkualitas, serta TI yang mutakhir.

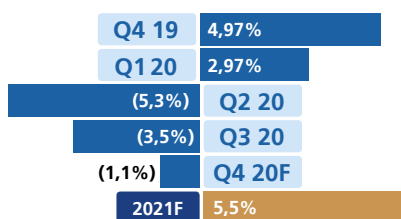
Prospek Usaha dan Strategi ke Depan

Secara perlahan pertumbuhan ekonomi nasional sudah menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi bulan September 2020 tumbuh positif 5,05%, secara *Quarter to Quarter* (QtQ), lebih tinggi dibanding bulan Juni 2020 yang tumbuh (4,19%) (QtQ). Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didorong stimulus fiskal Pemerintah pada Program PEN, untuk mendukung kebijakan insentif usaha, program kesehatan, usaha korporasi, UMKM dan perlindungan sosial, yang salah satunya adalah dengan menambahkan anggaran program perumahan subsidi di tahun 2020.

Dengan mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi dan rencana vaksinasi COVID-19, diprediksi optimisme pertumbuhan akan berlanjut di tahun 2021. Optimisme tersebut juga dipengaruhi oleh berlanjutnya dukungan stimulus fiskal Pemerintah pada Program PEN dan stabilitas ekonomi nasional yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan di tahun 2021, yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang stabil di kisaran 2%-3% dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar (USD) yang semakin terkendali di kisaran Rp14.000/USD.

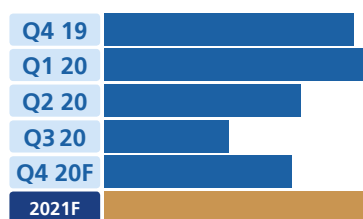
Grafik Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (YoY)



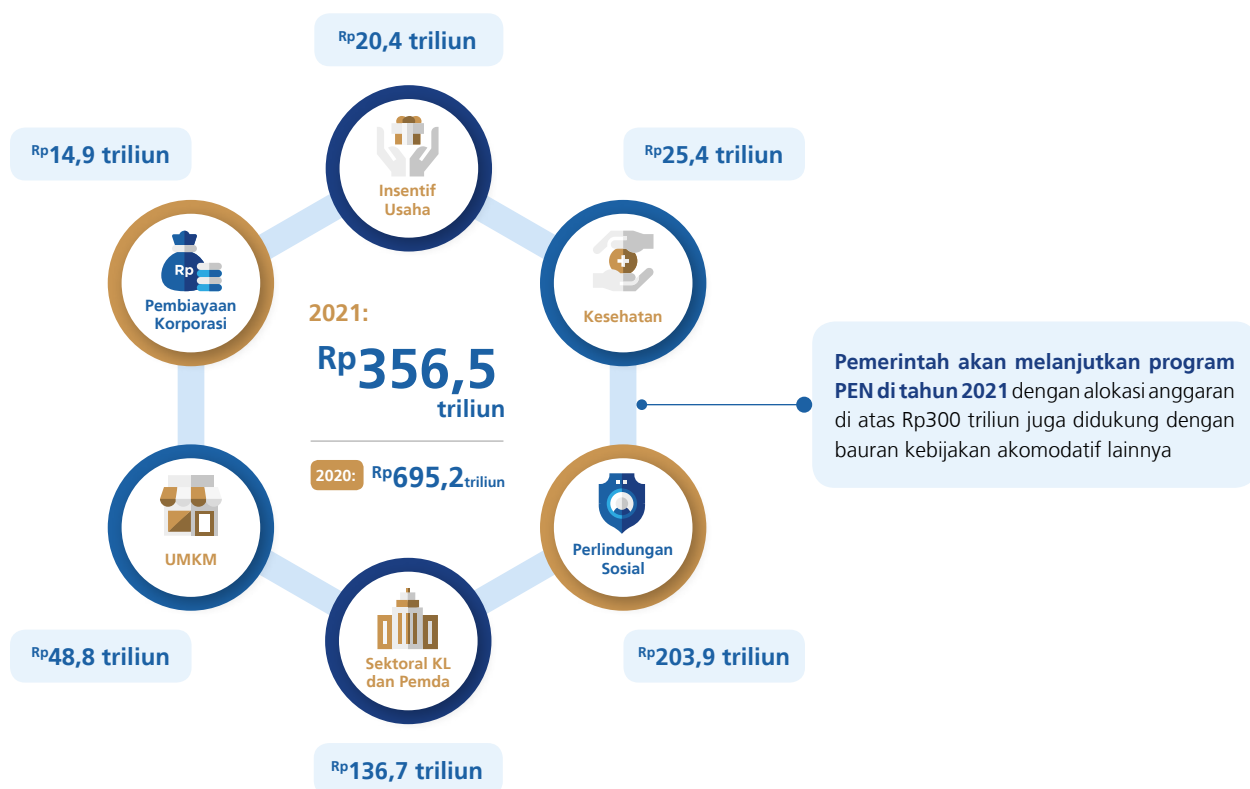
Pertumbuhan ekonomi 2021 diprediksi akan **rebound**, setelah mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun masih negatif, pertumbuhan ekonomi pada September 2020 secara QtQ, tumbuh 5,05%.

Tingkat Inflasi (%)



Tingkat Inflasi tahun 2021 diprediksi masih terjaga pada kisaran **± 3%** yang dipengaruhi terjaganya volatilitas nilai tukar pada kisaran Rp14.000/USD, artinya stabilitas ekonomi nasional cukup kuat.

Alokasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 (Rp Triliun)



Sumber: RAPBN 2021 dan Aspirasi Pemegang Saham 2021

Untuk mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah kembali melanjutkan program PEN di tahun 2021, dengan alokasi anggaran sebesar Rp356,5 triliun di tahun 2021, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan perlindungan sosial dan mendorong UMKM dengan menempatkan dana di perbankan. Sejalan dengan keberlanjutan stimulus fiskal Pemerintah, Bank Indonesia diprediksi juga akan kembali melanjutkan kebijakan moneter yang tetap akomodatif dengan menetapkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days *Repo* yang diprediksi akan tetap dan terdapat ruang penurunan, untuk mendukung penyaluran kredit. Sehingga dengan sinergi stimulus fiskal dan ekspansi moneter tersebut, diproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan nasional dapat tumbuh di atas 7% (YoY) di tahun 2021.

Disrupsi layanan keuangan secara *digital* yang semakin masif, juga merupakan peluang dalam mengembangkan bisnis layanan perbankan kedepan. Pada Agustus 2020, volume transaksi *digital banking* nasional meningkat 52,69% (YoY), lebih tinggi dibanding Juli 2020 yang sebesar 38,81% (YoY). Hal tersebut didorong oleh *virtual* dan *stay at home life style*, sehingga mempercepat perluasan penetrasi *fintech* dan *e-commerce*. Kondisi tersebut merupakan peluang yang akan dioptimalkan oleh Perseroan untuk mengembangkan layanan melalui pengembangan fitur dan *partnership* dengan *e-commerce* dan *fintech*.

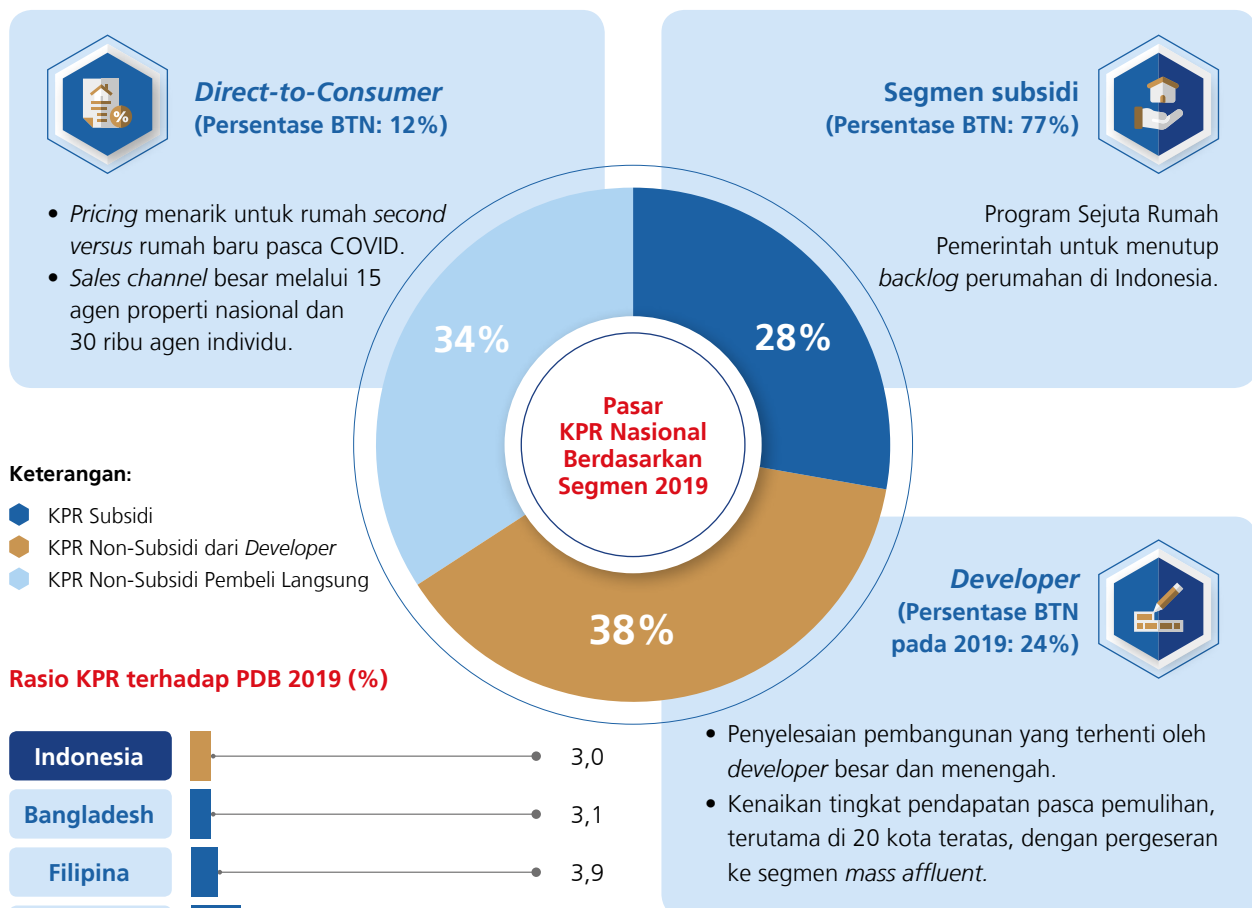
Prospek Sektor Perumahan Nasional dan Potensi Pengembangannya

Di tengah tantangan pandemi, sektor properti masih mencatatkan kinerja yang positif di saat sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Pada bulan Juni 2020, sektor properti masih dapat tumbuh 2,3% (YoY), pertumbuhan ini salah satunya dipengaruhi oleh penambahan anggaran untuk program KPR Subsidi Pemerintah sebesar Rp1,5 triliun sehingga alokasi KPR Subsidi tahun 2020 meningkat menjadi lebih dari 300 ribu unit.

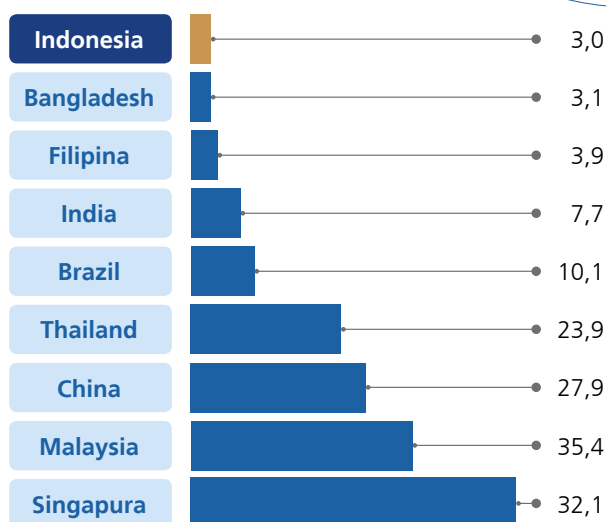
Memperhatikan pertumbuhan sektor properti tersebut, optimisme pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 akan memberikan kontribusi positif terhadap potensi sektor properti ke depan, khususnya pada proyeksi pertumbuhan bisnis KPR. Selain pemulihan ekonomi, Potensi peningkatan bisnis KPR ke depan juga akan di dorong oleh realisasi program KPR Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang dimulai di tahun 2021 dan sudah mulai berjalannya proyek pembangunan perumahan terutama pada segmen menengah-atas yang sebelumnya sempat tertunda karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah.

Rasio KPR terhadap PDB yang masih rendah juga merupakan peluang yang akan dikembangkan Perseroan untuk memperluas bisnis perumahan ke depannya. Dengan komitmen keberlanjutan Program Sejuta Rumah Pemerintah dan meningkatnya populasi *middle income* yang didominasi oleh generasi millennial dan segmen *emerging affluent* juga menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk memperluas fokusnya dalam mengembangkan bisnis perumahan ke depan, khususnya dalam meningkatkan pangsa pasar di segmen millennial dan *emerging affluent*. Untuk menangkap potensi pertumbuhan tersebut, di tahun depan Perseroan akan meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi dengan menasar *Top Developers* dan *direct selling* KPR kepada konsumen (*Direct to Consumer*) melalui kerja sama dengan agen properti nasional dan individu.

Gambar Peluang Pengembangan Bisnis KPR



Rasio KPR terhadap PDB 2019 (%)



Sumber: Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Bank Tabungan Negara Tbk. 2021-2025

Selanjutnya, sebagai sektor yang memiliki *multiplier effect* kepada 178 sub-sektor industri, pengembangan *value chain* dari bisnis perumahan juga menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan Perseroan. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang menasar perluasan *value chain* bisnis konstruksi yaitu akuisisi lahan, bahan bangunan, pengembangan lahan dan properti, jasa konstruksi dan pembiayaan pada pengembang (*developer*).

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Gambar Perluasan Value Chain Bisnis Perumahan



Sumber: Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Bank Tabungan Negara Tbk. 2021-2025



Pengembangan Lahan dan Properti



Jasa Konstruksi



Pengembang



~160-170 ribu

- 6 (enam) pemain teratas mencapai ~70% *market share* (revenue).
- ~20 ribu pemain merupakan perusahaan konstruksi menengah hingga atas.
- ~85% perusahaan konstruksi SME.

6 ribu

- Pasar terkonsentrasi tinggi dengan pemain BUMN besar mencakup 70-80% *market share*.
- Fokus utama pada pengembangan infrastruktur Pemerintah.

~11-12 ribu

- 10 (sepuluh) pemain teratas mencapai 70% *market share* (revenue).
- ~400-500 pemain menengah.
- Sisa ~80-90% adalah *developer* SME dengan fokus regional.

500-530

670-700

N/A

N/A

370-400

340-360

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BTN terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
KAS	1.429.426	1.369.167	60.259	4,40%
GIRO PADA BANK INDONESIA	11.107.672	15.512.329	(4.404.657)	(28,39%)
GIRO PADA BANK LAIN				
Pihak ketiga	2.995.233	391.877	2.603.356	664,33%
Pihak berelasi	221.896	357.624	(135.728)	(37,95%)
	3.217.129	749.501	2.467.628	329,24%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.808)	(1.632)	(176)	10,78%
	3.215.321	747.869	2.467.452	329,93%
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN				
Pihak ketiga	19.830.096	10.996.115	8.833.981	80,34%
Pihak berelasi	337	101.078	(100.741)	(99,67%)
	19.830.433	11.097.193	8.733.240	78,70%
EFEK-EFEK				
Pihak ketiga				
Nilai wajar melalui laba rugi	836.662	4.189.398	(3.352.736)	(80,03%)
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	187.136	1.422.811	(1.235.675)	(86,85%)
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	99.608	373.379	(273.771)	(73,32%)
	1.123.406	5.985.588	(4.862.182)	(81,23%)
Pihak berelasi				
Nilai wajar melalui laba rugi	701.925	-	701.925	100,00%
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	1.247.848	1.206.536	41.312	3,42%
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	132.787	919.925	(787.138)	(85,57%)
	2.082.560	2.126.461	(43.901)	(2,06%)
	3.205.966	8.112.049	(4.906.083)	(60,48%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.000)	(27.378)	25.378	(92,69%)
	3.203.966	8.084.671	(4.880.705)	(60,37%)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
OBLIGASI PEMERINTAH				
Nilai wajar melalui laba rugi	19.441.763	1.232.204	18.209.559	1.477,80%
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	33.019.094	6.147.729	26.871.365	437,09%
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	3.826.894	3.673.668	153.226	4,17%
	56.287.751	11.053.601	45.234.150	409,23%
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI				
Pihak ketiga	954.955	1.675.221	(720.266)	(43,00%)
Pihak berelasi	-	200.000	(200.000)	(100,00%)
	954.955	1.875.221	(920.266)	(49,08%)
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH				
Kredit yang diberikan				
Pihak ketiga	217.711.277	214.807.263	2.904.014	1,35%
Pihak berelasi	17.340.839	17.405.276	(64.437)	(0,37%)
	235.052.116	232.212.539	2.839.577	1,22%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.151.936)	(5.425.908)	(6.726.028)	123,96%
	222.900.180	226.786.631	(3.886.451)	(1,71%)
Pembiayaan/piutang syariah				
Pihak ketiga	25.059.007	23.609.204	1.449.803	6,14%
Pihak berelasi	3.040	3.416	(376)	(11,01%)
	25.062.047	23.612.620	1.449.427	6,14%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(909.007)	(690.258)	(218.749)	31,69%
	24.153.040	22.922.362	1.230.678	5,37%
	247.053.220	249.708.993	(2.655.773)	(1,06%)
TAGIHAN SPOT SUKU BUNGA				
Pihak ketiga	70.386	-	70.386	100,00%
TAGIHAN AKSEPTASI				
Pihak berelasi	196.071	487.052	(290.981)	(59,74%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.393)	-	(1.393)	(100,00%)
	194.678	487.052	(292.374)	(60,03%)
PENYERTAAN SAHAM				
Pihak ketiga	-	270	(270)	(100,00%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(270)	(270)	(100,00%)
ASET TETAP				
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	8.512.185	8.108.086	404.099	4,98%
Akumulasi penyusutan	(3.054.306)	(2.707.428)	(346.878)	12,81%
	5.457.879	5.400.658	57.221	1,06%
ASET HAK GUNA	360.566	-	360.566	100,00%
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	6.285.574	3.210.772	3.074.802	95,77%
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	1.972.393	629.105	1.343.288	213,52%
ASET LAIN-LAIN	3.784.186	2.600.197	1.183.929	45,53%
TOTAL ASET	361.208.406	311.776.828	49.431.518	15,85%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	4.765.276	1.999.183	2.766.093	138,36%
SIMPANAN DARI NASABAH				
Giro				
Pihak ketiga	16.546.465	9.583.560	6.962.905	72,65%
Pihak berelasi	52.054.300	38.524.556	13.529.744	35,12%
	68.600.765	48.108.116	20.492.649	42,60%
Giro Wadiah				
Pihak ketiga	946.930	917.455	29.475	3,21%
Pihak berelasi	2.138.165	1.675.555	462.610	27,61%
	3.085.095	2.593.010	492.085	18,98%
	71.685.860	50.701.126	20.984.734	41,39%
Tabungan				
Pihak ketiga	38.279.792	41.212.905	(2.933.113)	(7,12%)
Pihak berelasi	420.345	272.004	148.341	54,54%
	38.700.137	41.484.909	(2.784.772)	(6,71%)
Tabungan Wadiah				
Pihak ketiga	903.998	789.042	114.956	14,57%
Pihak berelasi	1.211	847	364	42,98%
	905.209	789.889	115.320	14,60%
	39.605.346	42.274.798	(2.669.452)	(6,31%)
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	60.918.288	61.281.176	(362.888)	(0,59%)
Pihak berelasi	86.940.320	52.648.592	34.291.728	65,13%
	147.858.608	113.929.768	33.928.840	29,78%
Total simpanan dari nasabah	259.149.814	206.905.692	52.244.122	25,25%
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Pihak ketiga	29.880	4.509.238	(4.479.358)	(99,34%)
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI				
Pihak ketiga	-	935.000	(935.000)	(100,00%)
LIABILITAS AKSEPTASI				
Pihak berelasi	196.071	487.052	(290.981)	(59,74%)
LIABILITAS SPOT SUKU BUNGA				
Pihak ketiga	22.787	-	22.787	100,00%
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN				
Pihak ketiga	10.835.733	14.405.980	(3.570.247)	(24,78%)
Pihak berelasi	4.974.733	5.377.572	(402.839)	(7,49%)
	15.810.466	19.783.552	(3.973.086)	(20,08%)
PINJAMAN YANG DITERIMA				
Pihak ketiga	6.798.082	8.681.368	(1.883.286)	(21,69%)
Pihak berelasi	17.009.056	13.784.289	3.224.767	23,39%
	23.807.138	22.465.657	1.341.481	5,97%
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	726.914	630.002	96.912	15,38%
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	6.489	-	6.489	100,00%

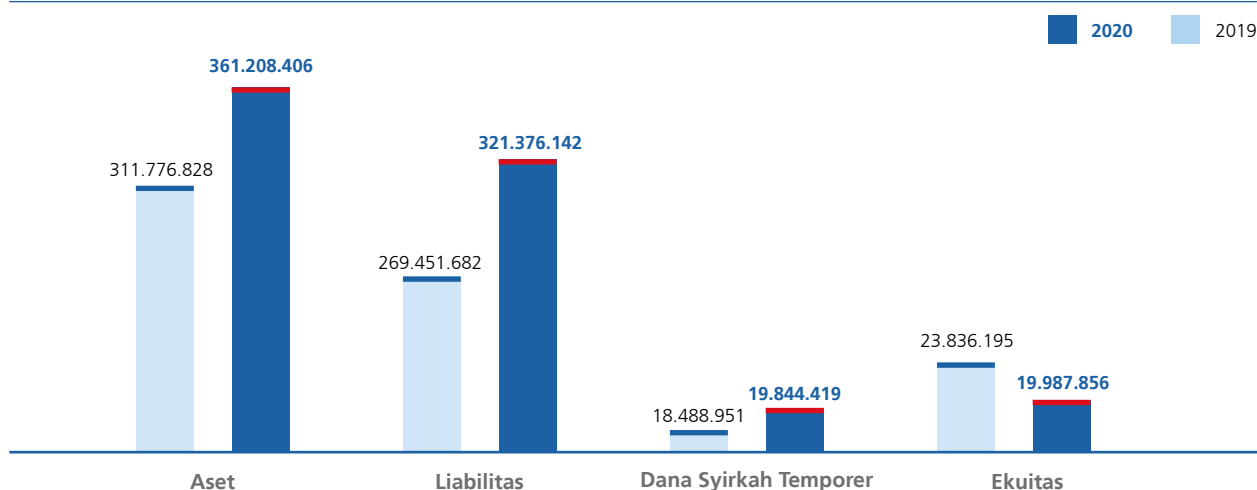
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	6.666.875	5.736.637	930.238	16,22%
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI				
Pihak ketiga	4.194.554	-	4.194.554	100,00%
Pihak berelasi	5.999.878	5.999.669	209	0,00%
	10.194.432	5.999.669	4.194.763	69,92%
TOTAL LIABILITAS	321.376.142	269.451.682	51.924.460	19,27%
DANA SYIRKAH TEMPORER				
SIMPANAN NASABAH				
Giro Mudharabah				
Pihak ketiga	341.683	826.682	(484.999)	(58,67%)
Pihak berelasi	17.003	588.030	(571.027)	(97,11%)
	358.686	1.414.712	(1.056.026)	(74,65%)
Tabungan Mudharabah				
Pihak ketiga	2.683.283	3.226.349	(543.066)	(16,83%)
Pihak berelasi	430.860	136.577	294.283	215,47%
	3.114.143	3.362.926	(248.783)	(7,40%)
Deposito berjangka Mudharabah				
Pihak ketiga	11.022.780	11.661.400	(638.620)	(5,48%)
Pihak berelasi	5.345.495	2.038.501	3.306.994	162,23%
	16.368.275	13.699.901	2.668.374	19,48%
Total simpanan nasabah	19.841.104	18.477.539	1.363.565	7,38%
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Giro Mudharabah				
Pihak ketiga	176	243	(67)	(27,57%)
Tabungan Mudharabah				
Pihak ketiga	2.139	3.299	(1.160)	(35,16%)
Deposito berjangka Mudharabah				
Pihak ketiga	1.000	7.870	(6.870)	(87,29%)
Total simpanan dari bank lain	3.315	11.412	(8.097)	(70,95%)
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	19.844.419	18.488.951	1.355.468	7,33%
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	-	-
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	-	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, setelah pajak tangguhan	1.100.019	11.460	1.088.559	9.498,77%
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan	(531.674)	(194.707)	(336.967)	173,06%
Bagian efektif Lindung Nilai - Arus Kas	(1.239)	-	(1.239)	(100,00%)
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	3.307.991	-	-
Saldo laba*)				
Telah ditentukan penggunaannya	7.004.198	12.995.995	(5.991.797)	(46,10%)
Belum ditentukan penggunaannya	1.759.096	366.002	1.393.094	380,62%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
TOTAL EKUITAS	19.987.845	23.836.195	(3.848.350)	(16,14%)
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	361.208.406	311.776.828	49.431.578	15,85%

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 juta telah dieliminasi akibat kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)



Aset

Aset tahun 2020 sebesar Rp361,21 triliun, meningkat 15,85% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp311,78 triliun.

Kas

Kas tahun 2020 sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 4,40% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,37 triliun. Kas terdiri dari Kas dalam ATM dan Kas dalam KASHANAH dengan denominasi dalam Indonesia Rupiah dan dalam mata uang asing. Kenaikan kas Rp0,06 triliun atau 4,40% disebabkan terutama oleh peningkatan kas dalam KASHANAH, kas dalam ATM serta kas dalam perjalanan yang meningkat seiring dengan kegiatan operasional dari Perseroan di akhir tahun.

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp11,11 triliun, menurun 28,39% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp15,51 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya peraturan baru dalam PADG 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang mengharuskan Bank memenuhi persyaratan GWM utama dalam Rupiah sebesar 3%, yang mana pada tahun sebelumnya Bank Wajib memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah sebesar 6%.

Giro Pada Bank Lain

Giro Pada Bank Lain menampilkan akun nostro dari Bank yang digunakan untuk operasi harian dan penyelesaian transaksi antar bank seperti pinjam meminjam antar bank, perdagangan, dan transaksi treasuri. Giro pada Bank lain tahun 2020 sebesar Rp3,22 triliun, meningkat 329,93% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,75 triliun karena kegiatan operasional Bank terutama menjelang akhir tahun.

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Akun ini menampilkan penempatan di Bank Indonesia dan Bank Lain. Akun ini mengalami fluktuasi tergantung pada kelebihan likuiditas Bank (pendanaan dikurangi pembiayaan pada kredit dan portofolio investasi). Pada 31 Desember 2020, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mengalami kenaikan sebesar Rp8,7 triliun atau 78,70% dikarenakan meningkatnya *Deposit Facility* di Bank Indonesia (Fasilitas Bank Indonesia) sebesar Rp4,6 triliun atau 40,95%. Hal ini terjadi karena Bank memiliki kelebihan likuiditas terutama karena peningkatan dana dari simpanan nasabah.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia				
<i>Deposit Facility</i>	8.997.751	4.300.000	4.697.751	109,25%
<i>Deposit Facility Sharia</i>	2.585.000	1.834.000	751.000	40,95%
Sertifikat Bank Indonesia - Syariah	947.105	350.000	597.105	170,60%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	100.000	(100.000)	(100,00%)
Penempatan Pada Bank Lain				
Tabungan	337	1.078	(741)	100,00%
Total	19.830.433	11.097.193	8.733.240	78,70%

Efek-Efek

Efek-Efek - Neto terdiri atas investasi yang diklasifikasi sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi, Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya diukur dengan menggunakan Nilai Wajar dan Biaya Perolehan. Efek-Efek menurun sebesar Rp4,9 triliun atau 60,37% terutama disebabkan karena penjualan efek-efek terutama Sertifikat Bank Indonesia. Perseroan mengalihkan investasinya terutama ke obligasi Pemerintah.

Tabel Efek-Efek

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Nilai Wajar melalui Laba Rugi	1.538.587	4.189.398	(2.650.811)	(63,27%)
Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya	1.434.984	2.629.347	(1.194.363)	(45,42%)
Biaya Perolehan Diamortisasi	232.395	1.293.304	(1.060.909)	(82,03%)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.000)	(27.378)	25.378	(92,69%)
Neto	3.203.966	8.084.671	(4.880.705)	(60,37%)

Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah bertambah sebesar Rp45,2 triliun atau 409,23% terutama dikarenakan pembelian obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi, sebesar Rp27,2 triliun dan Nilai Wajar melalui pendapatan komprehensi lainnya diukur dengan menggunakan nilai wajar sebesar Rp18,2 triliun untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang diterima yang diterima dari simpanan dari nasabah

Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tahun 2020 sebesar Rp0,95 triliun, menurun 49,08% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp1,88 triliun. Penurunan terutama dikarenakan pelunasan atas transaksi efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan Jiwasraya.

Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah-gross mengalami kenaikan sebesar Rp4,2 triliun karena pemberian kredit baru di 2020. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) naik sebesar Rp6,9 triliun terutama karena penerapan PSAK 71. Oleh karena kenaikan CKPN lebih besar dari kenaikan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah sehingga saldo net turun sebesar Rp2,6 triliun.

Tagihan Spot Suku Bunga

Tagihan *spot* suku bunga tahun 2020 sebesar Rp70,39 miliar, meningkat 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0.

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi tahun 2020 sebesar Rp194,68 miliar, menurun 60,03% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp487,05 miliar.

Aset Tetap

Aset tetap tahun 2020 sebesar Rp5,46 triliun, meningkat 1,06% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp5,40 triliun.

Aset Hak Guna

Aset hak guna tahun 2020 sebesar Rp360,57 miliar, meningkat 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0.

Bunga yang Masih Akan Diterima

Bunga yang masih akan diterima tahun 2020 sebesar Rp6,29 triliun, meningkat 95,77% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp3,21 triliun. Kenaikan lainnya berasal dari obligasi Pemerintah terutama karena meningkatnya saldo obligasi Pemerintah di 2020.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Aset pajak tangguhan – neto tahun 2020 sebesar Rp1,97 triliun, meningkat 213,52% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp629,11 miliar. Aset pajak tangguhan meningkat sebesar Rp1,3 triliun terutama berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai dampak dari penerapan PSAK 71 sebesar Rp1,5 triliun.

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain tahun 2020 sebesar Rp3,78 triliun, meningkat 45,53% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp2,60 triliun. Peningkatan pada lainnya terutama disebabkan peningkatan transaksi kliring (nota kredit) terkait dengan penyelesaian transaksi Giro Pada Bank Lain.

Tabel Aset Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan Kepada Pihak Ketiga	1.005.939	920.408	85.531	4,83%
Beban Dibayar Dimuka	386.848	803.479	(416.631)	(51,85%)
Uang Muka Pajak	402.428	402.428	-	-
Beban yang ditangguhkan untuk karyawan	497.968	288.899	209.069	72,37%
Aset Terbengkalai	77.591	77.591	-	-
Aset Isthisna dalam Penyelesaian	513	92	421	457,61%
Lainnya	1.412.899	107.300	1.305.539	1.216,72%
Aset Lainnya	3.784.186	2.600.197	1.183.929	43,95%

Liabilitas

Liabilitas tahun 2020 sebesar Rp321,38 triliun, meningkat 19,27% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp269,45 triliun.

Liabilitas Segera

Liabilitas segera tahun 2020 sebesar Rp4,77 triliun, meningkat 138,36% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp2,00 triliun. Liabilitas lancar naik sebesar Rp2 triliun terutama karena kenaikan liabilitas perantara transaksi sebesar Rp1,9 triliun

Simpanan Dari Nasabah

Simpanan nasabah tahun 2020 sebesar Rp 259,15 triliun meningkat 25,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp206,91 triliun. Simpanan dari nasabah mengalami kenaikan sebesar Rp52,2 triliun dikarenakan meningkatnya giro dan deposito sebesar Rp54 triliun.

Tabel Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro	68.600.765	48.108.116	20.492.649	42,60%
Giro Wadiah	3.085.095	2.593.010	492.085	18,98%
Tabungan	38.700.137	41.484.909	(2.784.772)	(6,71%)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tabungan Wadiah	905.209	789.889	115.320	14,60%
Deposito	147.858.608	113.929.768	33.928.840	29,78%
Total Simpanan dari Nasabah	259.149.814	206.905.692	52.244.122	25,25%

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain dan institusi keuangan menampilkan kewajiban kepada Bank lain, termasuk domestik atau antar negara, dalam bentuk Giro, Tabungan, *Deposito on Call*, Deposito dan *Interbank Call Money*. Tahun 2020 simpanan bank lain sebesar Rp 29,88 miliar, mengalami penurunan 99,34% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp4,51 triliun. Penurunan terutama dikarenakan penurunan pada produk deposito sebesar Rp4,49 triliun atau 99,77%.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
<i>Time deposits</i>	10.370	4.499.170	(4.488.800)	(99,77%)
<i>Demand deposits</i>	19.510	10.068	9.442	93,78%
Total deposits from other banks	29.880	4.509.238	(4.479.358)	(99,34%)

Efek-Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali tahun 2020 sebesar Rp0, menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp935,00 miliar.

Liabilitas Spot Suku Bunga

Liabilitas spot suku bunga tahun 2020 sebesar Rp22,79 miliar, meningkat 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0.

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi tahun 2020 sebesar Rp196,07 miliar, menurun 59,74% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp487,05 miliar.

Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat Berharga yang diterbitkan menurun sebesar Rp3,97 triliun atau 20,08% dari Rp19,78 triliun di tahun 2019 menjadi Rp15,81 triliun, hal ini terutama dikarenakan adanya pelunasan saat jatuh tempo atas surat berharga yang diterbitkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel Surat Berharga

(dalam triliun Rupiah)

Surat Berharga	Nominal
Obligasi BTN XIV 2010	1,6 triliun
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	0,5 triliun
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A	1,4 triliun
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	1,1 triliun

Penurunannya dikompensasi dengan penerbitan obligasi bertahap IV Tahap I Seri A yang diterbitkan di 2020 dengan nilai sebesar Rp1,5 triliun.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima tahun 2020 sebesar Rp23,81 triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,34 triliun atau 5,97% dengan penambahan pinjaman terbesar di tahun 2020 yang berasal dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2,22 triliun yang akan didistribusikan sebagai bagian dari program 1 (satu) Juta Rumah dan Rumah Sejahtera untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta adanya tambahan pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebesar Rp1,99 triliun. Hal ini dikompensasi dengan pelunasan pinjaman dari PT Bank DKI, PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank ANZ Indonesia.

Tabel Pinjaman Yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Bank Central Asia Tbk.	4.000.000	5.000.000	(1.000.000)	(20,00%)
PT Bank DKI	-	997.581	(997.581)	(100,00%)
PT Bank ICBC Indonesia	799.289	798.644	645	0,08%
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	499.152	(499.152)	(100,00%)
PT Bank Danamon Tbk.	1.998.793	-	1.998.793	100,00%
PT Bank ANZ Indonesia (USD)	-	1.385.991	(1.385.991)	(100,00%)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	15.012.510	12.785.356	2.227.154	17,42%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.996.546	998.933	997.613	100%
Total Pinjaman Yang Diterima	23.807.138	22.465.657	1.341.481	5,97%

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Bunga yang masih harus dibayar tahun 2020 sebesar Rp726,91 miliar, meningkat 15,38% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp630,00 miliar.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tahun 2020 sebesar Rp6,49 miliar, meningkat 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0.

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-Lain

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-Lain meningkat Rp0,9 triliun dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama terjadi pada kenaikan imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp0,4 triliun dan lainnya sebesar Rp0,8 triliun yang teruma disebabkan karena transaksi kliring terkait dengan Giro pada Bank Lain.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Bonus dan Tantiem	394.472	351.402	43.070	12,26%
Imbalan Kerja Jangka Panjang	871.463	404.408	467.055	115,49%
Dana Jaminan Pengembang	4.198.387	4.578.611	(380.224)	(8,30%)
Lainnya	1.202.553	402.216	800.337	198,98%
Liabilitas Lain-Lain	6.666.875	5.736.637	930.238	16,22%

Pinjaman Subordinasi dan Efek-Efek Subordinasi

Obligasi subordinasi pada tahun 2020 naik sebesar USD300 juta setara Rp4,2 triliun terutama berasal dari penerbitan Obligasi Subordinasi *Junior Global Bond*.

Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer tahun 2020 sebesar Rp19,84 triliun, meningkat 7,33% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp18,49 triliun. Dana syirkah temporer meningkat Rp1,4 triliun terutama karena peningkatan deposito mudharabah sebesar Rp2,6 triliun yang dikompensasi dengan penurunan giro mudharabah sebesar Rp1,0 triliun.

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah tahun 2020 sebesar Rp19,84 triliun, meningkat 7,38% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp18,48 triliun.

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2020 sebesar Rp3,32 miliar, menurun 70,95% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp11,41 miliar.

Ekuitas

Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp19,99 triliun, menurun 16,14% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp23,84 triliun.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2020 sebesar Rp5,30 triliun, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp5,30 triliun.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tahun 2020 sebesar Rp2,05 triliun, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp2,05 triliun.

Keuntungan (Kerugian) Neto yang Belum Direalisasi atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur Menurut Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif, Setelah Pajak Tangguhan

Keuntungan neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diukur dengan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain meningkat sebesar Rp1,0 triliun dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama dikarenakan meningkatnya saldo obligasi Pemerintah dari sebelumnya sebesar Rp11 triliun pada 31 Desember 2019 menjadi Rp56 triliun pada 31 Desember 2020 serta peningkatan harga pasar dari obligasi Pemerintah dari yang berkisar antara 83,84% sampai dengan 129,05% pada 31 Desember 2019 menjadi berkisar antara 86,58% sampai dengan 129,42% pada 31 Desember 2020.

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan tahun 2020 sebesar (Rp531,67) miliar, meningkat 173,06% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar (Rp194,71) miliar.

Bagian Efektif Lindung Nilai - Arus Kas

Bagian efektif lindung nilai - arus kas tahun 2020 sebesar (Rp1,24) miliar, menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap tahun 2020 sebesar Rp3,31 triliun, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp3,31 triliun.

Saldo Laba

Penurunan dalam saldo laba terutama dikarenakan oleh pengurangan pada saldo laba akibat dari peningkatan signifikan pada saldo cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan sehubungan dengan implementasi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp6 triliun, yang dikompensasi dengan laba tahun berjalan Rp1,6 triliun.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

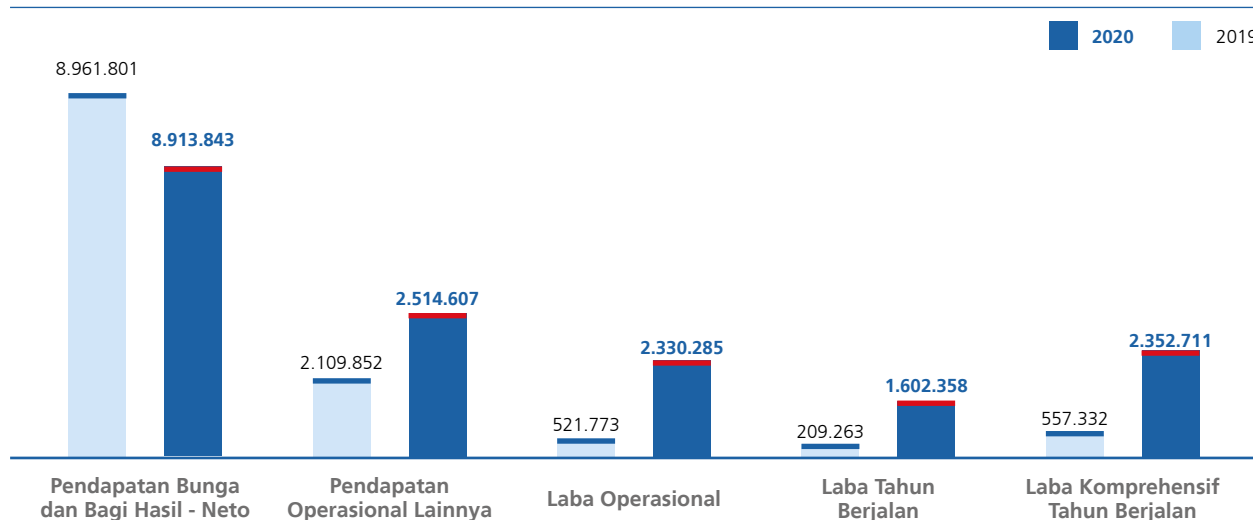
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	22.947.252	23.271.432	(291.066)	(1,39%)
Bunga	2.158.528	2.448.442	(289.914)	(11,84%)
Bagi hasil dan margin unit syariah	25.105.780	25.719.874	(614.094)	(2,39%)
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				
Bunga	(14.687.492)	(15.167.294)	479.802	(3,16%)
Beban pendanaan lainnya	(147.146)	(157.708)	10.562	(6,70%)
Bonus Simpanan Wadiah	(21.782)	(15.641)	(6.141)	39,26%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah	(1.335.517)	(1.417.430)	81.913	(5,78%)
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(16.191.937)	(16.758.073)	566.136	(3,38%)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.913.843	8.961.801	(47.958)	(0,54%)
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	760.751	832.556	(71.805)	(8,62%)
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	275.538	113.399	162.139	142,98%
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	356.168	478.339	(122.171)	(25,54%)
Keuntungan dari penjualan obligasi Pemerintah - neto	308.351	144.553	163.798	113,31%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	18.493	20.894	(2.401)	(11,49%)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi Pemerintah - neto	87.011	1.745	85.266	4.886,30%
Lain-lain	708.295	518.366	189.929	36,64%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	2.514.607	2.109.852	404.755	19,18%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.258.479)	(3.486.665)	1.228.186	(35,23%)
Beban Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontijensi	(3.784)	-	(3.784)	100,00%
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(3.103.552)	(3.425.022)	321.470	(9,39%)
Gaji dan tunjangan karyawan	(2.977.208)	(2.863.955)	(113.253)	3,95%
Premi program penjaminan Pemerintah	(469.360)	(467.791)	(1.569)	0,34%
Lain-lain	(285.782)	(306.447)	20.665	(6,74%)
Total Beban Operasional Lainnya	(6.835.902)	(7.063.215)	227.313	(3,22%)
LABA OPERASIONAL	2.330.285	521.773	1.808.512	346,61%
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(59.428)	(110.711)	51.283	(46,32%)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.270.857	411.062	1.859.795	452,44%
BEBAN PAJAK	(668.499)	(201.799)	(466.700)	231,27%
LABA TAHUN BERJALAN	1.602.358	209.263	1.393.095	665,71%
Pendapatan Komprehensif Lain:				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Revaluasi Aset Tetap	-	341.000	(341.000)	(100,00%)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(397.512)	(132.869)	(264.643)	199,18%
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	60.545	21.048	39.497	187,65%
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	1.342.481	148.613	1.193.867	803,34%
Bagian Efektif Lindung Nilai – Arus Kas	(1.239)	-	(1.239)	100,00%
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(253.922)	(29.723)	(224.199)	754,29%
Total laba komprehensif tahun berjalan	2.352.711	557.332	1.795.379	322,14%
LABA PER SAHAM				
Dasar (nilai penuh)	151	20	131	655,00%

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan bunga dan bagi hasil tahun 2020 sebesar Rp25,11 triliun, menurun 2,39% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp25,72 triliun. Penurunan pendapatan bunga dan bagi hasil terutama disebabkan penurunan pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp1,1 triliun sehubungan dengan turunnya tingkat suku bunga rata-rata kredit dari 9,88% pada tahun 2019 menjadi 9,12% pada tahun 2020.

Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus

Beban bunga, bagi hasil dan bonus tahun 2020 sebesar Rp16,19 triliun, menurun 3,38% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp16,76 triliun. Penurunan beban bunga dan bonus terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga deposito sebesar Rp0,6 triliun sehubungan dengan turunnya tingkat suku bunga rata-rata deposito dari 5,59% pada tahun 2019 menjadi 5,26% pada tahun 2020.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto

Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto tahun 2020 sebesar Rp8,91 triliun, menurun 0,54% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp8,96 triliun.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya tahun 2020 sebesar Rp2,51 triliun, meningkat 19,18% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp2,11 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan dari penerimaan hapus buku sebesar Rp0,1 triliun dan peningkatan keuntungan dari penjualan obligasi Pemerintah sebesar Rp0,1 triliun.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya tahun 2020 sebesar Rp6,84 triliun, menurun 3,22% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp7,06 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan beban umum dan administrasi berupa penurunan beban promosi sebesar Rp0,1 triliun, beban kantor Rp0,1 triliun dan beban sewa sebesar Rp0,1 triliun.

Laba Operasional

Laba operasional tahun 2020 sebesar Rp2,33 triliun, meningkat 346,61% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,52 triliun.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto

Beban bukan operasional tahun 2020 sebesar Rp59,43 miliar, menurun 46,32% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp110,71 miliar.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum pajak tahun 2020 sebesar Rp2,27 triliun, meningkat 452,44% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,41 triliun.

Beban Pajak

Beban pajak tahun 2020 sebesar Rp668,5 miliar, meningkat 231,27% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp201,80 miliar.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan di tahun 2020 sebesar Rp1,60 triliun, meningkat 665,71% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,21 triliun.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2020 sebesar Rp2,35 triliun, meningkat 322,14% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp0,56 triliun.

Laba Per Saham

Laba per saham tahun 2020 sebesar Rp151 meningkat 655,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp20.

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas

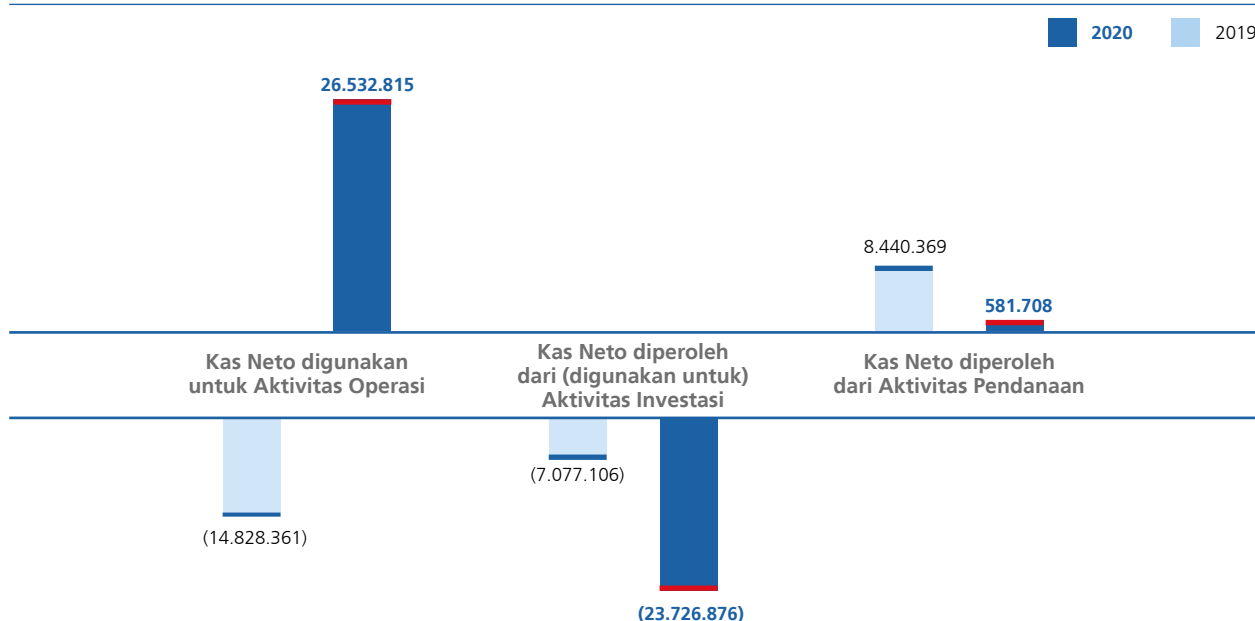
(dalam jutaan Rupiah)

Description	2020	2019	Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITASI OPERASI				
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan margin	22.025.695	25.453.902	(3.428.207)	(13,47%)
Penerimaan kredit yang Telah dihapusbukukan	331.915	153.997	177.918	115,53%
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(16.095.612)	(16.646.046)	550.434	(3,31%)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(341.466)	(590.027)	248.561	(42,13%)
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-	6.710	(6.710)	(100,00%)
Beban operasional lainnya - neto	(3.986.344)	(4.845.107)	858.763	(17,72%)
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	(59.428)	(110.711)	51.283	(46,32%)
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.874.760	3.422.718	(1.547.958)	(45,23%)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				
Penempatan pada bank lain	(595.305)	(351.800)	(243.505)	69,22%
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	172.622	2.452.777	(2.280.155)	(92,96%)
Obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	(18.122.548)	1.547.115	(19.669.663)	(1.271,38%)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(7.255.860)	(18.229.537)	10.973.677	(60,20%)
Aset lain-lain	(1.285.447)	300.335	(1.585.782)	(528,00%)
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi: liabilities:				
Liabilitas segera	2.446.942	(301.002)	2.747.944	(912,93%)
Simpanan dari nasabah				
Giro	20.492.649	(5.565.072)	26.057.721	(468,24%)
Giro Wadiah	492.085	(188.844)	680.929	(360,58%)
Tabungan	(2.784.772)	3.134.070	(5.918.842)	(188,85%)
Tabungan Wadiah	115.320	23.565	91.755	389,37%
Deposito berjangka	33.928.841	(1.532.515)	35.461.356	(2.313,93%)
Simpanan dari bank lain	(4.479.357)	1.516.659	(5.996.016)	(395,34%)
Liabilitas lain-lain	177.416	(734.052)	911.468	(124,17%)
Dana syirkah temporer	1.355.469	(322.778)	1.678.247	(519,94%)
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Operasi	26.532.815	(14.828.361)	41.361.176	(278,93%)

Description	2020	2019	Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.061.584	-	1.061.584	100%
Pembelian aset tetap	(798.086)	(366.561)	(431.525)	117,72%
(Kenaikan) Penurunan efek-efek yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	1.082.203	(718.350)	1.800.553	(250,65%)
(Kenaikan) Penurunan obligasi Pemerintah yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	(25.844.225)	(2.085.930)	(23.758.295)	1.138,98%
Penerimaan dari obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-
Pembelian obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(148.619)	(947.963)	799.344	(84,32%)
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	(1.083.081)	1.083.081	(100,00%)
Pembelian efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	920.267	(1.875.221)	2.795.488	(149,08%)
Penerimaan efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	-	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(23.726.876)	(7.077.106)	(16.649.770)	235,26%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.493.811	4.144.000	(2.650.189)	(63,95%)
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(5.322.500)	(5.122.930)	(199.570)	3,90%
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(935.000)	-	(935.000)	100%
Pembayaran dividen	(20.927)	(561.585)	540.658	(96,27%)
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	9.141.448	11.001.654	(1.860.206)	(16,91%)
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(7.823.008)	(4.020.720)	(3.802.288)	94,57%
Penerimaan dari pinjaman subordinasi	4.047.884	2.999.950	1.047.934	34,93%
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	581.708	8.440.369	(7.858.661)	(93,11%)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	3.387.647	(13.465.098)	16.852.745	(125,16%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	31.249.908	44.715.006	(13.465.098)	(30,11%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	34.637.555	31.249.908	3.387.647	10,84%
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut				
Kas	1.429.426	1.369.167	60.259	4,40%
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	15.512.329	(4.404.657)	(28,39%)
Giro pada Bank Lain	3.217.129	749.501	2.467.628	329,24%
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	18.883.328	10.745.393	8.137.935	75,73%
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	2.873.518	(2.873.518)	(100,00%)

Grafik Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp26,53 triliun, meningkat 278,93% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp14,83 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp23,73 triliun, meningkat 235,26% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7,08 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp0,58 triliun, menurun 93,11% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp8,44 triliun.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Perseroan. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga dan pemeringkatan efek yang diterbitkan.

Kemampuan Perseroan membayar kewajiban atau utang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi parameter bagi Perseroan dalam menghitung kemampuan Perseroan menyediakan cadangan likuiditas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Rasio likuiditas dipakai untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Salah satu parameter utama dalam rasio likuiditas adalah pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Perseroan menjaga GWM Utama dan GWM Sekunder yang pada tahun 2018 telah berubah menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM).

Tabel Likuiditas

(dalam %)

Kategori	Mata Uang	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Poin	Persentase
Konvensional	Rupiah Utama	3,16%	6,61%	(3,45%)	(52,19%)
	PLM	17,43%	5,24%	12,19%	232,63%
	Dolar AS	4,63%	8,28%	(3,65%)	(44,08%)
Syariah	Rupiah	3,15%	4,64%	(1,49%)	(32,11%)

Parameter berikutnya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Loan to Funding Ratio* (LFR) yang telah diubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) pada tahun 2018. LDR merupakan salah satu parameter untuk mengukur rasio

likuiditas yang sehat. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga (simpanan nasabah). LDR Perseroan di tahun 2020 sebesar 93,19%, menurun dibandingkan rasio tahun 2019 sebesar 113,50%.

Rasio Intermediasi Makroprudential adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain ditambahkan surat berharga yang dimiliki, terhadap:

1. Dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
2. Surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan.

Perseroan juga mengelola cadangan likuiditas dalam bentuk *secondary reserve* yang juga menjadi komponen likuiditas dalam bentuk *High Quality Liquid Asset*, yang ditetapkan dalam jumlah optimal dalam rentang di atas batas minimum *secondary reserve* setiap hari sebagai pendukung kebutuhan likuiditas Perseroan dan pemeliharaan GWM dan PLM yg telah di tentukan oleh Bank Indonesia. Posisi *secondary reserve* Perseroan selalu terjaga di atas batas minimum *secondary reserve* selama tahun 2020.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan bisnis perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sesuai dengan peraturan BI, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR yang ditetapkan Bank Indonesia untuk bank dengan profil risiko "2" adalah sebesar 9,25%.

Jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II"). Dalam rangka perhitungan Risiko Pasar, Perseroan dapat memasukkan komponen Modal Pelengkap Tambahan ("Tier III") yaitu Pinjaman Subordinasi berjangka pendek yang memenuhi kriteria tertentu sebagai komponen Modal. Total modal Perseroan di tahun 2020 mencapai Rp25,00 triliun terdiri dari modal inti dan pelengkap masing-masing sebesar Rp17,63 triliun dan Rp7,37 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi total modal tahun 2019 yang mencapai Rp23,35 triliun dengan modal inti dan pelengkap masing-masing senilai Rp21,04 triliun dan Rp2,31 triliun.

Dengan membandingkan total modal dengan ATMR Perseroan sebesar Rp129,25 triliun di tahun 2020, rasio CAR adalah sebesar 19,34% lebih tinggi dibandingkan dengan rasio CAR tahun 2019 sebesar 17,32%. Sementara itu, CAR untuk modal inti sebesar 13,64% di tahun 2020, lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 15,60%.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan Perseroan yaitu Obligasi. Efek-efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang diterbitkan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Peringkat	
	2020	2019
BBTN XV 2011	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan I Tahap I 2012	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 Seri C	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 Seri D	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan II Tahap II 2016 Seri B	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 seri B	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 seri C	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 seri D	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap II 2019 seri B	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap II 2019 seri C	idAA+	idAA+
Junior Global Bond Bank BTN (USD)	Ba3	-

Keterangan	Peringkat	
	2020	2019
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri A	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri B	idAA+	idAA+
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri C	idAA+	idAA+

Tabel Arti Peringkat Efek

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	idAA+	Obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
Moody's	Ba3	Obligasi berperingkat Ba merupakan obligasi dengan elemen spekulatif dan dapat berisiko.

Rasio Profitabilitas dan Efisiensi

Untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi kinerja Perseroan, rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh perbankan adalah Laba sebelum pajak terhadap Aset atau *Return On Assets* (RoA), Laba setelah pajak terhadap Ekuitas atau *Return On Equity* (RoE), Marjin Bunga Bersih atau *Net Interest Margin* (NIM), dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Perseroan memiliki komitmen menjaga kualitas aset produktif ditengah ekspansi kredit dan bisnis perbankan lainnya.

Tabel Rasio Keuangan Lain

(dalam %)

Uraian	2020	2019	Perubahan
<i>Return on Assets</i> (RoA)	0,69%	0,13%	0,56%
<i>Return on Equity</i> (RoE)	10,02%	1,00%	9,02%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	3,06%	3,32%	(0,26%)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	91,61%	98,12%	(6,51%)

RoA dan RoE Perseroan tahun 2020 masing masing sebesar 0,69% dan 10,02%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,13% dan 1,00%. Sedangkan untuk NIM sedikit mengalami penurunan sebesar 0,26% menjadi 3,06%. Demikian pula dengan BOPO yang turun sebesar 6,51% menjadi 91,61%.

Kolektibilitas Piutang

Rasio NPL *netto* (dengan syariah) sebesar 2,06%, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,96%. Demikian pula dengan NPL *gross* (dengan syariah) yang menurun menjadi 4,37% di tahun 2020 dari sebelumnya yang sebesar 4,78%.

Tabel Kolektibilitas

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2020		2019	
	Tanpa Syariah	Dengan Syariah	Tanpa Syariah	Dengan Syariah
KOLEKTIBILITAS				
Lancar	208.792,04	230.512,14	197.396,10	217.344,38
Dalam Perhatian Khusus	16.733,14	18.562,33	24.370,50	26.250,51
Performing Loan (PL)	225.525,18	249.074,47	221.766,60	243.594,89
Kurang Lancar	335,34	514,56	2.567,83	3.087,66
Diragukan	299,98	553,74	1.223,34	1.395,63
Macet	8.891,62	9.971,39	6.654,73	7.746,94
Non Performing Loan (NPL)	9.526,93	11.039,69	10.445,90	12.230,23
PL + NPL	235.052,12	260.114,16	232.212,50	255.825,12

Uraian	2020		2019	
	Tanpa Syariah	Dengan Syariah	Tanpa Syariah	Dengan Syariah
PL	95,95%	95,76%	95,50%	95,22%
NPL Gross	4,05%	4,37%	4,50%	4,78%
KAP	65,14	64,16	60,42	59,29
NPL Netto	1,83%	2,06%	2,71%	2,96%

Tabel Hapus Buku Kredit Macet

(dalam miliar Rupiah)

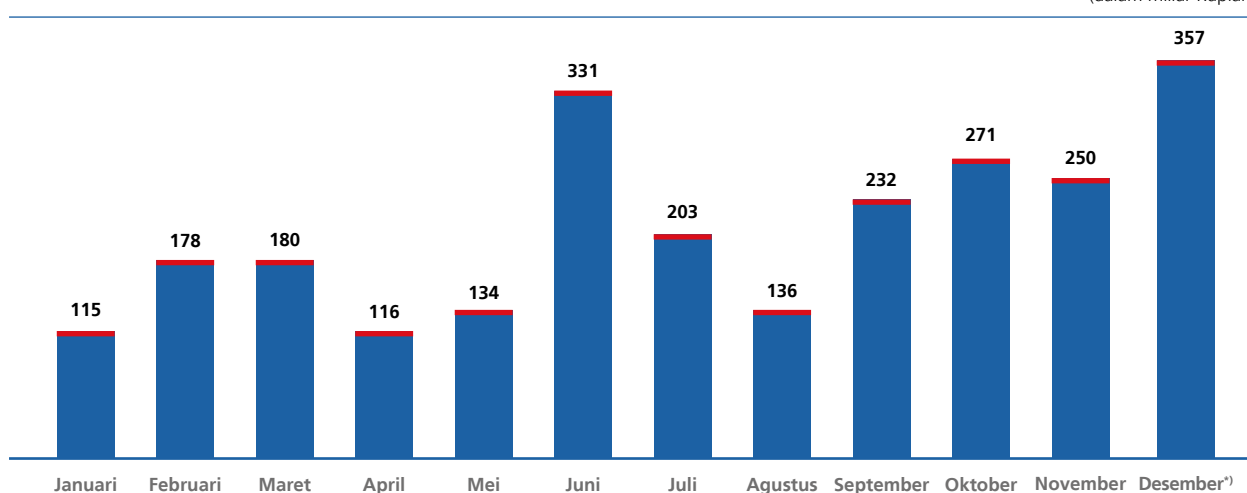
Uraian	Jumlah Debitur	Nilai Hapus Buku
Konvensional	13.103	2.701,53
Syariah	886	267,56
Total	13.989	2.969,09

Akselerasi Pertumbuhan *Fee Based Income*

Pendapatan operasional selain bunga bulan Januari 2020 sebesar Rp115 miliar, meningkat signifikan Rp2,39 triliun atau 2073,05% menjadi Rp2,50 triliun di bulan Desember 2020. Hal tersebut karena meningkatnya aktivitas *treasury* serta adanya kenaikan pendapatan admin kredit dan DPK dimana pada masa pandemi COVID-19 banyak nasabah yang beralih menggunakan *digital banking*.

Grafik Pendapatan Operasional Selain Bunga Januari-Desember 2020

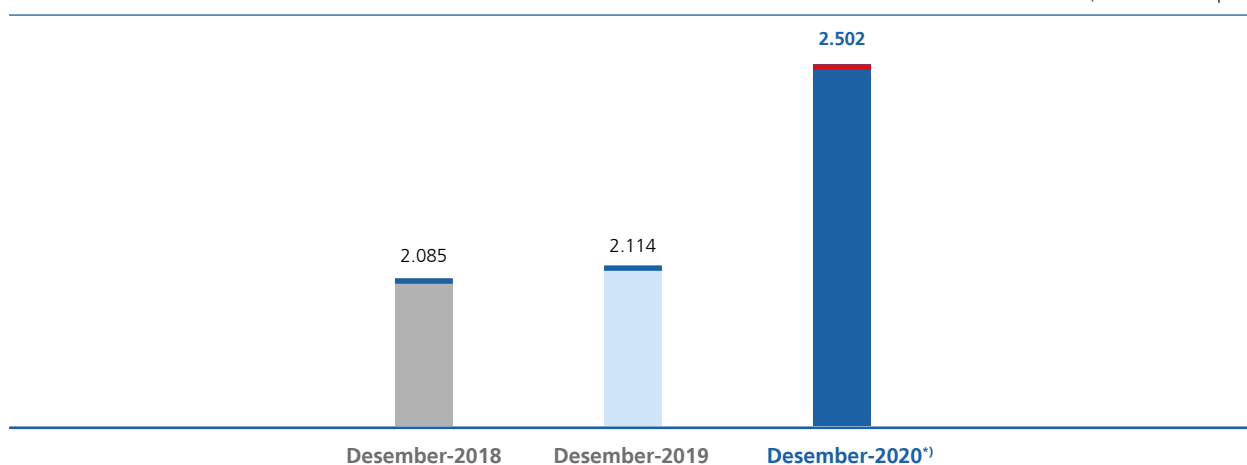
(dalam miliar Rupiah)



*) Unaudited

Grafik Pendapatan Operasional Selain Bunga 2018-2020

(dalam miliar Rupiah)



*) Unaudited

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Rencana Permodalan yang disusun Perseroan mengacu kepada kajian perkembangan ekonomi terkini, di samping berdasarkan kepada penelaahan dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan. Direksi dalam menyusun Rencana Permodalan yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan merencanakan dan mengkaji bersama-sama secara rutin kebutuhan permodalan dengan didukung data-data analisis. Dalam perencanaan tersebut, Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Perseroan sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan.

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki Perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha sekarang dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Di samping itu, penetapan kebijakan permodalan ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, modal Perseroan terdiri dari:

1. Modal Inti, yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif).
2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Jumlah modal inti Perseroan di tahun 2020 adalah sebesar Rp24,96 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp21,04 triliun. Sedangkan jumlah modal pelengkap Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp7,36 triliun lebih tinggi dibanding modal pelengkap tahun 2019 sebesar Rp2,31 triliun.

Rincian Struktur Permodalan

Perseroan memiliki kemampuan permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Berikut adalah rincian struktur permodalan Perseroan.

Tabel Rincian Struktur Permodalan

Uraian	Satuan	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Nominal	%
I. Modal inti (<i>Tier 1</i>)	Rp-juta	17.625.854	21.037.417	(3.411.563)	(16,22%)
1. Modal Inti Utama (<i>Common Equity Tier - CET 1</i>)	Rp-juta	17.625.854	21.037.417	(3.411.563)	(16,22%)
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham <i>Treasury</i>)	Rp-juta	5.295.000	5.295.000	-	-
1.2 Cadangan Tambahan Modal	Rp-juta	14.303.247	16.371.522	(2.068.275)	(12,63%)
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	Rp-juta	-	-	-	-
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	Rp-juta	(1.972.393)	(629.105)	(1.343.288)	213,52%
2. Modal Inti Tambahan (<i>Additional Tier - AT 1</i>)	Rp-juta	-	-	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	Rp-juta	-	-	-	-
2.2 Agio/Disagio	Rp-juta	-	-	-	-
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	Rp-juta	-	-	-	-
II. Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	Rp-juta	7.369.372	2.313.208	5.056.164	218,58%
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i>	Rp-juta	6.051.432	999.719	5.051.713	505,31%
2. Agio/Disagio	Rp-juta	-	-	-	-
3. Cadangan umum PPA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	Rp-juta	1.317.940	1.413.489	(95.549)	(6,76%)
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	Rp-juta	-	-	-	-
Total Modal	Rp-juta	24.995.226	23.350.625	1.644.601	7,04%

Uraian	Satuan	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Nominal	%
Aset Tertimbang Menurut Risiko					
ATMR untuk risiko kredit	Rp-juta	105.435.208	113.079.144	(7.643.936)	(6,76%)
ATMR untuk risiko pasar	Rp-juta	1.612.039	801.774	810.265	101,06%
ATMR untuk risiko operasional	Rp-juta	22.202.534	20.963.355	1.239.179	5,91%
Total ATMR	Rp-juta	129.249.781	134.844.273	(5.594.492)	(4,15%)
Rasio KPMM sesuai Profil Risiko	%	9,25%	9,18%	0,07%	-
Rasio CET 1	%	13,64%	15,60%	(1,96%)	-
Rasio Tier 1	%	13,64%	15,60%	(1,96%)	-
Rasio Tier 2	%	5,70%	1,72%	3,98%	-
Rasio KPMM	%	19,34%	17,32%	2,02%	-

Praktik Manajemen Risiko

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Perseroan telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Kuantitatif Exposure Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 25 ayat (1) b. Bank wajib menambahkan laporan informasi exposure risiko dan permodalan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Perseroan dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite and Risk Tolerance*), Perseroan sedang melakukan *backtesting Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dalam rangka melakukan review terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat. Perseroan saat ini juga sedang melakukan *pilot project Commercial Banking Center* (CBC) dimana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian

kredit komersial, Perseroan juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen Monitoring pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring* (iCremo) yakni aplikasi untuk kredit komersial yang berfungsi untuk melakukan proses monitoring kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Sedangkan pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM). Pengelolaan debitur kredit konsumen Kolektibilitas 2 (dua) dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection and Remedial* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari *Retail Risk Division* (*Regional Loan Processing Center*) dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis.

Uraian terkait pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak, Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi, serta Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	69.080.764	-	-	-	69.080.764
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.367.695	32.722	-	-	9.400.417
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.053.244	44.525	753	821	6.099.343
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	84.451.981	52.234.472	33.438.229	34.063.671	204.188.353
6	Kredit Beragun Properti Komersial	12.615.246	6.050.246	1.801.672	1.633.499	22.100.663
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	664.790	496.705	250.894	279.433	1.691.822
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.894.745	1.114.585	590.191	1.350.164	4.949.685
9	Tagihan kepada Korporasi	7.040.638	2.081.727	1.078.080	584.525	10.784.970
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.938.733	1.546.276	767.095	882.658	5.134.762
11	Aset Lainnya	4.878.988	2.459.556	732.322	1.133.338	9.204.204
TOTAL		197.986.824	66.060.814	38.659.236	39.928.109	342.634.983

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	59.093.086	1.762.734	3.349.100	4.875.844	-	69.080.764
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.918.076	2.625.397	284.112	4.572.832	-	9.400.417
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5.478.309	302.854	318.180	-	-	6.099.343
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.558.466	5.689.030	12.023.589	182.917.268	-	204.188.353
6	Kredit Beragun Properti Komersial	7.268.937	11.078.398	3.176.459	576.869	-	22.100.663
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	111.217	131.928	457.551	991.126	-	1.691.822
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.104.460	1.396.001	874.507	1.574.717	-	4.949.685
9	Tagihan kepada Korporasi	3.521.841	2.417.527	1.621.070	3.224.532	-	10.784.970
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.483.678	1.300.834	414.467	1.935.783	-	5.134.762
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	9.204.204	9.204.204
TOTAL		83.538.070	26.704.703	22.519.035	200.668.971	9.204.204	342.634.983

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain	Total
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	38.958.285	-	-	-	38.958.285
	3.339.189	250.140	-	-	3.589.329
	-	-	-	-	-
	2.790.167	19.943	340	27	2.810.477
	80.152.465	49.882.191	32.628.363	32.872.192	195.535.211
	12.234.661	6.505.065	2.442.192	2.083.431	23.265.349
	678.704	469.099	238.079	247.271	1.633.153
	1.640.195	1.230.662	597.989	1.340.471	4.809.317
	17.358.013	2.831.219	1.038.499	761.397	21.989.128
	1.845.938	1.668.021	791.117	1.124.163	5.429.239
	6.686.348	2.602.220	964.821	1.437.288	11.690.677
	165.683.965	65.458.560	38.701.400	39.866.240	309.710.165

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	34.956.151	1.078.463	635.960	2.287.711	-	38.958.285
	1.469.443	1.331.159	657.427	131.300	-	3.589.329
	-	-	-	-	-	-
	2.577.608	94.849	138.020	-	-	2.810.477
	388.191	2.615.800	6.615.737	185.915.483	-	195.535.211
	4.251.239	10.620.005	7.767.197	626.908	-	23.265.349
	3.619	40.402	115.438	1.473.694	-	1.633.153
	543.237	678.550	650.407	2.937.123	-	4.809.317
	6.618.928	3.885.836	1.573.627	9.910.737	-	21.989.128
	1.566.503	748.209	289.408	2.825.119	-	5.429.239
	-	-	-	-	11.690.677	11.690.677
	52.374.919	21.093.273	18.443.221	206.108.075	11.690.677	309.710.165

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2020					
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	126.511	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	1.695.668	-	-
6	Konstruksi	-	2.637.877	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	864.615	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	4.033.589	-	200.000
10	Perantara Keuangan	34.606.608	-	-	5.899.343
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	34.474.156	42.157	-	-
Total		69.080.764	9.400.417	-	6.099.343

(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31 Desember 2020							
	-	-	-	3.150	3.157	2.030	-
	-	-	-	947	3.113	281	-
	-	-	-	1.429	6.863	10.276	-
	-	-	-	12.878	50.413	10.462	-
	-	-	-	10.512	40.067	2.148	-
	-	22.100.663	-	591.742	4.977.119	2.180.195	-
	-	-	-	118.920	1.362.868	90.239	-
	-	-	-	17.158	165.222	150.234	-
	-	-	-	15.450	352.812	5.555	-
	-	-	-	8.973	10.244	15.041	-
	-	-	-	22.932	1.783.254	72.089	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	10.465	168.176	16.320	-
	-	-	-	10.533	208.211	2.224	-
	-	-	-	9.442	102.198	86.022	-
	-	-	-	7.370	-	2.727	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	17.798	138.726	18.742	-
	204.188.353	-	1.691.822	4.086.405	1.087.912	2.470.177	-
	-	-	-	3.581	324.615	-	9.204.204
	204.188.353	22.100.663	1.691.822	4.949.685	10.784.970	5.134.762	9.204.204

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
31 Desember 2019						
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	166.169	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	79.419	-	-	
6	Konstruksi	-	2.560.745	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	591.667	-	392.388	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	30.743	-	-	
10	Perantara Keuangan	29.435.517	-	-	2.418.089	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	127.863	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	32.723	-	-	
20	Lainnya	9.522.768	-	-	-	
Total		38.958.285	3.589.329	-	2.810.477	

(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
31 Desember 2019							
-	-	-	2.658	2.689	6.286	-	
-	-	-	421	3.582	2.805	-	
-	-	-	334	17.989	24.746	-	
-	-	-	12.338	40.320	32.523	-	
-	-	-	6.693	1.552.782	4.062	-	
-	22.080.950	-	447.919	7.261.377	1.647.061	-	
-	7.123	-	130.302	2.896.820	151.252	-	
-	-	-	16.429	396.387	24.388	-	
-	-	-	7.280	4.405.329	5.275	-	
-	-	-	12.623	350.785	22.405	-	
-	1.176.626	-	26.157	1.855.367	148.604	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	14.126	220.821	21.927	-	
-	-	-	9.562	371.679	4.425	-	
-	650	-	8.258	1.425.128	127.230	-	
-	-	-	5.386	3.216	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	17.924	173.198	28.380	-	
195.535.211	-	1.633.153	4.068.588	1.011.659	3.177.870	-	
-	-	-	22.319	-	-	11.690.677	
195.535.211	23.265.349	1.633.153	4.809.317	21.989.128	5.429.239	11.690.677	

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan	196.859.593	66.270.738	39.002.815	40.687.224	342.820.370
2.	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	79.633.270	41.334.013	28.178.388	29.687.089	178.832.760
	a. Belum jatuh tempo	75.418.110	39.123.980	27.010.161	28.081.885	169.634.136
	b. Telah jatuh tempo	4.215.160	2.210.033	1.168.227	1.605.204	9.198.624
3.	CKPN - Individual	4.683.477	2.149.722	879.262	1.609.485	9.321.946
4.	CKPN Kolektif	2.347.442	806.662	171.456	307.551	3.633.111
5.	Tagihan yang dihapus buku	896.442	628.782	368.933	1.073.524	2.967.681

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2020							
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	10.795	76	2.365	1.297	1.221	7.725
2	Perikanan	4.614	113	552	273	66	4.260
3	Pertambangan dan Penggalian	152.511	3.811	14.143	7.431	3.390	2.739
4	Industri Pengolahan	104.363	4.031	39.558	32.680	742	32.794
5	Listrik, Gas dan Air	1.753.866	3.640	4.410	5.472	985	6.341
6	Konstruksi	35.110.934	6.353.751	3.910.023	4.193.248	2.623.418	1.079.260
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.601.402	148.446	179.629	144.489	29.786	376.900
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	683.647	142.720	375.493	351.037	2.335	18.331
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.628.108	14.120	23.556	20.703	5.589	28.966
10	Perantara Keuangan	40.563.858	6.692	35.104	23.649	2.144	24.620
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.440.961	982.999	455.448	868.314	110.976	110.674

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019				
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-Lain	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
158.074.117	64.674.544	38.606.653	40.451.343	301.806.657
7.000.721	2.476.519	575.704	1.748.126	11.801.070
6.217.850	2.080.736	300.763	694.937	9.294.286
782.871	395.783	274.941	1.053.189	2.506.784
1.593.542	711.297	347.167	1.330.368	3.982.374
780.133	624.529	336.400	422.010	2.163.072
127.472	215.272	174.743	184.623	702.110

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2020							
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	267.689	117.021	26.485	72.666	11.519	982
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.624	39.031	4.289	15.839	3.640	1.978
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	244.620	11.558	28.213	16.250	27.944	4.000
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	12.742	66	5.360	2.645	106	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	194.118	-	959	517	3.759	124
19	Bukan Lapangan Usaha	217.148.128	161.806.061	4.093.037	3.565.436	805.491	1.267.987
20	Lainnya	35.661.390	-	-	-	-	-
Total		342.820.370	169.634.136	9.198.624	9.321.946	3.633.111	2.967.681

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - kolektif	Tagihan yang dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2019							
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	16.417	-	1.111	1.111	3.732	9.404
2	Perikanan	8.806	-	-	-	2.000	-
3	Pertambangan dan Penggalian	54.306	10.947	5.959	6.855	4.383	3.161
4	Industri Pengolahan	294.456	765	43.300	31.202	12.125	24.773
5	Listrik, Gas dan Air	1.652.650	2.900	6.281	9.292	894	-
6	Konstruksi	35.277.545	7.392.607	1.386.853	2.730.464	800.810	332.267
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.377.730	82.985	186.191	163.681	81.881	214.124
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	727.889	509.849	32.240	177.055	2.807	31.590
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.486.130	16.482	29.198	34.736	4.191	269
10	Perantara Keuangan	32.281.561	-	27.607	24.406	43.327	2.356
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.726.329	1.170.185	332.969	319.194	30.214	11.855
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	273.056	10.621	4.004	6.706	9.754	1.535
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	412.765	35.400	2.004	15.979	11.464	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	1.669.350	-	22.460	9.400	100.101	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	14.423	5.020	-	5.821	1	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	227.229	-	120	120	8.139	-
19	Bukan Lapangan Usaha	206.940.840	56.525	426.487	446.352	1.047.249	70.776
20	Lainnya	9.365.175	-	-	-	-	-
Total		301.806.657	9.294.286	2.506.784	3.982.374	2.163.072	702.110

**Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	3.982.374	2.163.072	1.347.507	1.972.786
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	158.585	2.018.261	3.032.089	495.174
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	158.585	2.018.261	3.032.089	495.174
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan		-	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(1.589.670)	(1.378.008)	(397.222)	(304.888)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	4.294.145	3.306.299	-	-
Saldo Akhir CKPN		6.845.434	6.109.624	3.982.374	2.163.072

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

31 Desember 2020						
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih			
			Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	60.953.883
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		78.837	42.156	50.003	309.662
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		3.730.181	67.541	226.916	45.722
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-

	31 Desember 2020								
	Tagihan Bersih								
	Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	8.126.881	69.080.764
	-	-	-	-	-	-	-	8.919.759	9.400.417
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	2.028.983	6.099.343
	-	-	-	-	-	-	-	204.188.353	204.188.353
	-	-	-	-	-	-	-	22.100.663	22.100.663
	-	-	-	-	-	-	-	1.691.822	1.691.822
	-	-	-	-	-	-	-	4.949.685	4.949.685
	-	-	-	-	-	-	-	10.784.970	10.784.970
	-	-	-	-	-	-	-	5.134.762	5.134.762
	-	-	-	-	-	-	-	9.204.204	9.204.204

31 Desember 2019						
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih			
		Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		80.157	-	-	8.744.289
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		209.438	-	54.675	212.568
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		717.525	66.319	52.512	116.008
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-

Sedangkan untuk Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Transaksi *Derivatif Over the Counter*
Perseroan tidak memiliki transaksi derivatif per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.
2. Transaksi *Repo*
Uraian terkait Transaksi *Repo* dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Transaksi Repo
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	954.955		954.955	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		954.955	-	954.955	-

	31 Desember 2019								
	Tagihan Bersih								
	Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	30.133.839	38.958.285
	-	-	-	-	-	-	-	3.112.648	3.589.329
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.858.113	2.810.477
	-	-	-	-	-	-	-	195.535.211	195.535.211
	-	-	-	-	-	-	-	23.265.349	23.265.349
	-	-	-	-	-	-	-	1.633.153	1.633.153
	-	-	-	-	-	-	-	4.809.317	4.809.317
	-	-	-	-	-	-	-	21.989.128	21.989.128
	-	-	-	-	-	-	-	5.429.239	5.429.239
	-	-	-	-	-	-	-	11.690.677	11.690.677

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019			
	Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.947.820	(946.852)	2.000.968	1.000.484
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.947.820	(946.852)	2.000.968	1.000.484

3. Transaksi *Reverse Repo*

Perseroan tidak memiliki transaksi *Reverse Repo* per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Perseroan melakukan *pre screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	68.125.809	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	120.993	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	5.782.390	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	129.703.117	31.310.374	43.174.861	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	224.120	157.723	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	854.450	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	820.645	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.425.143	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		70.629.521	136.584.868	31.310.374	43.174.861	-	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		-	-	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	954.955	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
Total Counterparty Credit Risk		954.955	-	-	-	-	

memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisa dan mengevaluasi kelayakan kredit, dan melakukan pengikatan kredit secara *legal*. Perseroan telah mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan area/wilayah geografis tempat mereka beroperasi dan mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan sektor industri untuk melihat konsentrasi risiko kredit. Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit dan Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2020						ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	45 %	50 %	75 %	100 %	150 %	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.279.424	-	-	-	-	4.663.910	427.214
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	316.953	-	-	-	-	1.314.955	120.450
	-	-	-	-	-	-	48.879.418	4.477.355
	-	-	-	22.090.492	-	-	22.090.492	2.023.489
	-	1.691.822	-	-	-	-	845.911	77.485
	-	-	4.563.017	-	-	-	3.453.807	316.369
	-	-	-	8.740.903	-	-	8.740.903	800.667
	-	-	-	1.512.067	2.802.050	-	5.879.271	538.541
	-	-	-	7.701.470	77.591	-	7.817.857	716.116
	-	11.288.199	4.563.017	40.044.932	2.879.641	-	103.686.524	9.497.686
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	10.171	-	-	10.171	932
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4.825	-	-	-	3.619	332
	-	-	-	1.189.617	-	-	1.189.617	108.969
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4.825	1.199.788	-	-	1.203.407	110.233
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	36.957.317	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	378.916	131.664	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.258.749	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	120.004.447	33.535.873	41.994.891	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	165.018	221.980	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.504.883	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	664.590	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.369.168	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		41.375.302	123.281.430	33.535.873	41.994.891	-	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		-	-	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.000.968	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
Total Counterparty Credit Risk		2.000.968	-	-	-	-	

	31 Desember 2019						ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3.078.594	-	-	-	-	1.565.630	143.412
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	551.728	-	-	-	-	727.614	66.649
	-	-	-	-	-	-	47.083.070	4.312.809
	-	-	-	23.237.603	-	-	23.237.601	2.128.564
	-	1.633.153	-	-	-	-	816.577	74.798
	-	-	4.398.577	-	-	-	3.343.329	306.249
	-	-	-	17.302.393	-	-	17.302.393	1.584.899
	-	-	-	2.343.688	2.420.961	-	6.108.047	559.497
	-	-	-	10.243.918	77.591	-	10.360.304	949.004
	-	5.263.475	4.398.577	53.127.602	2.498.552	-	110.544.565	10.125.881
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	156	-	-	-	-	78	7
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	27.746	-	-	27.746	2.542
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	23.742	-	-	-	17.806	1.631
	-	-	-	2.181.852	-	-	2.181.852	199.858
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	156	23.742	2.209.598	-	-	2.227.482	204.038
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	68.125.809	-	-	-	-	68.125.809
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.400.417	-	-	-	-	9.400.417
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.099.343	-	-	-	-	6.099.343
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	204.188.353	-	-	114.859.297	-	89.329.056
6	Kredit Beragun Properti Komersial	22.090.492	-	-	-	-	22.090.492
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.691.822	-	-	-	-	1.691.822
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.944.860	224.120	-	157.722	-	4.563.018
9	Tagihan Kepada Korporasi	9.595.353	854.450	-	-	-	8.740.903
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	5.134.762	-	-	820.645	-	4.314.117
11	Aset Lainnya	9.204.204	-	-	-	-	9.204.204
Total Eksposur Neraca		340.475.415	1.078.570	-	115.837.664	-	223.559.181
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	10.171	-	-	-	-	10.171
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.825	-	-	-	-	4.825
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.189.617	-	-	-	-	1.189.617
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		1.204.613	-	-	-	-	1.204.613
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	954.955	-	-	-	-	954.955
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		954.955	-	-	-	-	954.955

	31 Desember 2019					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)- [(10)+(11)+(12)+(13)]
	36.957.317	-	-	-	-	36.957.317
	3.589.174	378.915	-	-	-	3.210.259
	-	-	-	-	-	-
	2.810.477	-	-	-	-	2.810.477
	195.535.211	-	-	103.829.588	-	91.705.623
	23.237.603	-	-	-	-	23.237.603
	1.633.153	-	-	-	-	1.633.153
	4.785.575	165.018	-	221.980	-	4.398.577
	19.807.276	2.504.883	-	-	-	17.302.393
	5.429.239	-	-	664.590	-	4.764.649
	11.690.677	-	-	-	-	11.690.677
	305.475.702	3.048.816	-	104.716.158	-	197.710.728
	-	-	-	-	-	-
	156	-	-	-	-	156
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	27.746	-	-	-	-	27.746
	-	-	-	-	-	-
	23.742	-	-	-	-	23.742
	2.181.852	-	-	-	-	2.181.852
	-	-	-	-	-	-
	2.233.496	-	-	-	-	2.233.496
	2.000.968	-	-	-	-	2.000.968
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.000.968	-	-	-	-	2.000.968

Risiko Kredit: Sekuritisasi Aset

Tujuan Perseroan melakukan sekuritisasi adalah mentransformasi aset yang tidak likuid menjadi aset yang likuid dalam bentuk surat berharga/*securities* yang dapat diperjualbelikan (disebut dengan *Asset Backed Securities* – ABS atau Efek Beragun Aset – EBA). Sekuritisasi Aset KPR dilakukan Perseroan antara lain sebagai upaya untuk mitigasi *maturity mismatch*, alternatif sumber pendanaan KPR, dan peningkatan *lending capacity*. Fungsi yang dijalankan oleh Perseroan dalam transaksi sekuritisasi meliputi *Originator*, *Servicer*, dan *Investor*. Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah (kumpulan tagihan), Perseroan telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Atas sekuritisasi KPR (Efek Beragun Aset), Perseroan mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Perseroan telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi Perseroan menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan tersebut.

Uraian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

Tabel Sekuritisasi Aset, Peringkat dan Lembaga Pemeringkat

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Nominal Class A (Rp)	Nominal Class M (Rp)	Nominal Class B (Rp)
1	KIK EBA 4/DBTN02	703.450.414.156	645.000.000.000	-	58.450.414.156
2	KIK EBA 5/DBTN03	1.000.000.005.997	925.000.000.000	-	75.000.005.977
3	KIK EBA 6/DBTN04	1.000.000.005.941	A1 = 403.000.000.000 A2 = 525.000.000.000	-	72.000.005.941
4	KIK EBA 7/DBTN05	1.500.000.001.615	A1 = 723.500.000.000 A2 = 647.500.000.000	-	129.000.001.615
5	EBA SP 1/SPBTN1	200.000.000.041	181.600.000.000	-	18.400.000.041
6	EBA SP 2/SPBTN2	1.000.000.000.000	A1 = 400.000.000.000 A2 = 513.000.000.000	-	87.000.000.000
7	EBA SP 3/SPBTN3	1.000.000.000.000	A1 = 200.000.000.000 A2 = 713.000.000.000	-	87.000.000.000
8	EBA SP 4/SPBTN4	2.000.000.000.000	A1 = 700.000.000.000 A2 = 1.124.000.000.000	-	176.000.000.000
9	EBA SP 5/SPBTN5	2.000.000.000.000	A1 = 574.000.000.000 A2 = 1.142.000.000.000	24.000.000.000	260.000.000.000
10	EBA SP 6/SPBTN6	631.000.543.015	576.734.000.000	-	54.266.543.015
TOTAL		11.034.450.970.765	9.993.334.000.000	24.000.000.000	1.017.116.970.745

(dalam Rupiah Penuh)

	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Pefindo
	16 November 2011	27 Februari 2021	5,94	8,750%	id.AAA
	12 Desember 2012	7 Januari 2023	6,35	7,750%	id.AAA
	20 Desember 2013	26 Februari 2022	5,57	A1 = 8,90% A2 = 9,50%	id.AAA
	28 November 2014	7 September 2025	6,72	A1 = 10% A2 = 10,25%	id.AAA
	27 November 2015	7 Maret 2022	2,08	8,60%	id.AAA
	31 Oktober 2016	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15% A2 = 8,75%	id.AAA
	28 April 2017	7 Juli 2029	7,78	A1 = 8,00% A2 = 8,40%	id.AAA
	28 Februari 2018	7 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00% A2 = 7,50%	id.AAA
	27 November 2019	7 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50% A2 = 8,75%	id.AAA
	30 Desember 2020	7 Juli 2032	6,08	A = 6,50%	id.AAA

Transaksi Sekuritisasi

No	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2020					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
1.	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal						
	- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	12.286.867	-	-	-	332.727	-
2.	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-	-	-
3.	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-	-	-
4.	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	12.286.867	-	-	-	-	-
5.	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian	-	-	-	-	-	-
6.	Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-	-	-
	a. Senior tranche						
	- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Junior tranche						
	- Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-

Uraian Transaksi Sekuritisasi dan Ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi – Perseroan bertindak sebagai kreditur asal dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Aktivitas Sekuritisasi - Perseroan Bertindak sebagai Kreditur Asal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Underlying Asset	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.286.867	-	11.655.866	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-

	31 Desember 2019				
	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR
		Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo		
	11.655.866	-	-	-	307.096
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	11.655.866	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

No.	Underlying Asset	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan/ (Kerugian) Penjualan
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Aset Lainnya	-	-	-	-
Total		12.286.867	-	11.655.866	-

Uraian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

Eksposur Aset di Neraca

**Tabel Eksposur Aset di Neraca
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	68.125.809	-	-	36.957.317	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.400.417	4.663.910	4.663.910	3.589.174	1.755.087	1.565.630
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	6.099.343	1.314.955	1.314.955	2.810.477	727.614	727.614
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	204.188.353	62.954.065	48.879.418	195.535.211	59.812.420	47.083.070
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	22.090.492	22.090.492	22.090.492	23.237.603	23.237.603	23.237.601
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.691.822	845.911	845.911	1.633.153	816.577	816.577
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.944.860	3.708.645	3.453.807	4.785.575	3.589.182	3.343.329
9.	Tagihan Kepada Korporasi	9.595.353	9.595.353	8.740.903	19.807.276	19.807.276	17.302.393
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	5.134.762	6.536.957	5.879.271	5.429.239	6.642.657	6.108.047
11.	Aset Lainnya	9.204.204	7.817.857	7.817.857	11.690.677	10.360.304	10.360.304
Total		340.475.415	119.528.145	103.686.524	305.475.702	126.748.719	110.544.565

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

**Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	156	78	78
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	10.171	10.171	10.171	27.746	27.746	27.746
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.825	3.619	3.619	23.742	17.806	17.806
9.	Tagihan Kepada Korporasi	1.189.617	1.189.617	1.189.617	2.181.852	2.181.852	2.181.852
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		1.204.613	1.203.406	1.203.408	2.233.496	2.227.483	2.227.483

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	954.955	-	-	2.000.968	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total		954.955	-	-	2.000.968	-	-

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*) Perseroan tidak memiliki risiko kredit akibat kegagalan setelmen per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2020.

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Eksposur Sekuritisasi

**Tabel Eksposur Sekuritisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	332.727	-	307.096
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total		-	332.727	-	307.096

Eksposure Kredit Derivatif

**Tabel Eksposur Kredit Derivatif
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA risk weighted assets)	-	212.549	-	-
Total		-	212.549	-	-

Total Pengukuran Risiko Kredit

**Tabel Pengukuran Risiko Kredit
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	105.435.208	113.079.144
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Perseroan dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi *spot*. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat derivatif. Dalam perhitungan KPMM, Perseroan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Uraian terkait Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1.	Risiko Suku Bunga	116.424	1.455.297	30.070	375.874
	a) Risiko Spesifik	2.005	25.068	-	-
	b) Risiko Umum	114.418	1.430.230	30.070	375.874
2.	Risiko Nilai Tukar	12.539	156.742	34.072	425.900
3.	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4.	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5.	Risiko <i>Option</i>	-	-	-	-
Total		128.963	1.612.039	64.142	801.774

Eksposure Interest Rate in the Banking Book (IRRBB)

Interest Rate In The Banking Book (IRRBB) merupakan bagian dari risiko suku bunga dimana fokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas Perseroan. Dalam pengukuran dan perhitungan IRRBB, Perseroan menerapkan 6 (enam) jenis skenario *shock* suku bunga untuk perhitungan ΔEVE yaitu *Parallel Up*, *Parallel Down*, *Steeper*, *Flattener*, *Short Rates Up*, dan *Short Rates Down*. Sedangkan untuk perhitungan ΔNII menggunakan 2 skenario *shock* yaitu *Parallel Up* dan *Parallel Down*. Perseroan mengukur perubahan NII (ΔNII) sebagai penurunan maksimum dari NII saat terjadi skenario peningkatan atau penurunan suku bunga. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan.

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2020 dan 30 September 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	ΔEVE		ΔNII	
	T	T-1	T	T-1
<i>Parallel up</i>	(1.302.738)	(1.799.047)	(2.824.545)	(5.978.866)
<i>Parallel down</i>	3.196.256	3.015.642	2.117.610	5.048.886
<i>Steeper</i>	(1.920.186)	(1.954.623)	-	-
<i>Flattener</i>	2.080.964	1.660.865	-	-
<i>Short rate up</i>	435.689	172.550	-	-
<i>Short rate down</i>	(901.717)	(440.762)	-	-
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	1.920.186	1.954.623	2.824.545	5.978.866
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Project Income</i> (untuk ΔNII)	17.595.326	16.331.839	9.827.677	8.968.125
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Project Income</i> (untuk ΔNII)	10,91%	11,97%	28,74%	66,67%

Berdasarkan portofolio Perseroan saat ini, apabila terjadi perubahan suku bunga sesuai dengan skenario *parallel shock up* sebesar ± 400 bps akan berdampak terhadap perubahan pendapatan bunga dan beban bunga Perseroan sebesar 28,74% terhadap target NII Perseroan. Adapun potensi kerugian maksimum nilai ekonomis dari ekuitas yang dialami Perseroan apabila terjadi perubahan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat sesuai dengan skenario *steepener* maka potensi kerugian maksimum terhadap Ekuitas Modal Inti (Tier 1) yang akan dialami Perseroan sebesar Rp1,92 triliun dan bila dibanding dengan total Modal Inti (Tier 1) sebesar 10,91% namun masih berada dibawah ketentuan limit OJK sebesar 15% dari modal inti (Tier 1).

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Uraian terkait risiko operasional dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang digunakan	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (rata-rata terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (rata-rata terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar	11.841.351.388.241	1.776.202.708.236	22.202.533.852.952	10.891.192.756.698	1.633.678.913.505	20.420.986.418.809

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Table Profil Maturitas Rupiah per 31 Desember 2020

Pos-Pos	Saldo			
		s.d 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu	
a	b	c	d	
I. NERACA				
A. ASET				
1. Kas	1.418.595	1.418.595	-	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	26.651.371	25.719.266	-	
a. Giro	10.123.034	10.123.034	-	
b. SBI	947.105	15.000	-	
c. Lainnya ¹⁾	15.581.232	15.581.232	-	
3. Penempatan pada bank lain	2.867.242	2.867.242	-	
4. Surat Berharga**)	47.250.025	422.463	3.520.726	
a. SUN	44.599.471	-	3.272.346	
1) diperdagangkan	18.753.601	-	3.165.723	
2) tersedia untuk di jual	22.572.518	-	106.623	
3) dimiliki hingga jatuh tempo	3.273.352	-	-	
4) pinjaman yang diberikan pada piutang	-	-	-	
b. Surat Berharga Korporasi	2.650.554	422.463	248.380	
1) diperdagangkan	1.558.532	422.463	238.380	
2) tersedia untuk dijual	859.615	-	10.000	
3) dimiliki hingga jatuh tempo	232.407	-	-	
4) pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	
c. lainnya ²⁾	-	-	-	
5. Kredit yang Diberikan	260.120.998	464.170	77.732	
a. Belum Jatuh Tempo ³⁾	257.999.111	216.714	77.732	
b. Sudah Jatuh Tempo***)	2.121.887	247.456	-	
6. Tagihan lainnya	1.151.026	954.955	-	
a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	954.955	954.955	-	
b. Lainnya ⁴⁾	196.072	-	-	
7. Penyertaan Saham	-	-	-	
8. Lain-lain ⁵⁾	10.749.663	-	-	
Total Aset	350.208.919	31.846.690	3.598.458	
B. KEWAJIBAN				
1. Dana Pihak Ketiga	265.403.502	94.674.806	18.126.244	
a. Giro	63.853.992	38.252.636	-	
b. Tabungan	39.583.443	39.583.443	-	
c. Simpanan Berjangka	161.966.067	16.838.727	18.126.244	
1) Deposito on call	775.000	585.727	160.623	
2) Deposito Berjangka	161.191.067	16.253.000	17.965.620	
3) Lainnya ⁶⁾	-	-	-	
2. Kewajiban Kepada Bank Indonesia	-	-	-	
3. Kewajiban Kepada bank lain	35.089	-	31.775	
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	15.810.465	-	-	
a. Obligasi	15.810.465	-	-	
b. Subordinasi ****)	-	-	-	
c. Lainnya ⁷⁾	-	-	-	
5. Pinjaman yang Diterima	29.807.017	-	-	
a. Pinjaman Subordinasi *****)	5.999.878	-	-	
b. Lainnya ⁸⁾	23.807.139	-	-	
6. Kewajiban Lainnya	196.072	196.072	-	
a. Kewajiban atas surat berharga yang di jual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	
b. Lainnya ⁹⁾	196.072	196.072	-	
7. Lain-lain ¹⁰⁾	11.136.625	-	-	
Total Kewajiban	322.388.769	94.870.877	18.158.018	
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	27.820.151	(63.024.187)	(14.559.561)	

(dalam jutaan Rupiah)

Jatuh Tempo					
	> 2 Minggu s.d 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	e	f	g	h	i
-	-	-	-	-	-
15.000	203.872	322.519	390.714	-	-
-	-	-	-	-	-
15.000	203.872	322.519	390.714	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.821.478	6.938.205	3.659.481	4.459.768	25.427.904	-
2.821.478	6.930.413	3.565.739	3.950.768	24.058.727	-
892.308	6.587.678	3.380.046	3.531.768	1.196.078	-
10.004	-	125.693	169.000	22.161.198	-
1.919.166	342.735	60.000	250.000	701.451	-
-	-	-	-	-	-
-	7.792	93.742	509.000	1.369.176	-
-	7.772	-	-	889.917	-
-	-	152	499.000	350.464	-
-	20	93.591	10.000	128.796	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.290.296	1.063.913	1.757.722	5.256.832	249.210.333	-
2.290.296	868.318	1.552.975	4.702.882	248.290.194	-
-	195.594	204.747	553.951	920.139	-
-	-	196.072	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	196.072	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10.749.663	-	-	-	-	-
15.876.437	8.205.990	5.935.793	10.107.314	274.638.237	-
56.439.365	40.573.501	17.247.539	4.791.686	33.550.361	-
-	-	-	-	25.601.356	-
-	-	-	-	-	-
56.439.365	40.573.501	17.247.539	4.791.686	7.949.005	-
28.650	-	-	-	-	-
56.410.715	40.573.501	17.247.539	4.791.686	7.949.005	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.314	-	-	1.000	-	-
-	-	1.300.000	2.230.000	12.280.465	-
-	-	1.300.000	2.230.000	12.280.465	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
854.911	500.000	7.500.000	8.618.000	12.334.106	-
-	-	3.000.000	-	2.999.878	-
854.911	500.000	4.500.000	8.618.000	9.334.228	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.136.625	-	-	-	-	-
68.433.215	41.073.501	26.047.539	15.640.686	58.164.932	-
(52.556.778)	(32.867.511)	(20.111.745)	(5.533.372)	216.473.304	-

Pos-Pos	Saldo			
		s.d 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu	
a	b	c	d	
II. REKENING ADMINISTRATIF				
A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF	12.781.885	-	-	
1. Komitmen	-	-	-	
a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	
b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-	
1) Spot	-	-	-	
2) Derivat ¹¹⁾	-	-	-	
c. Lainnya ¹²⁾	-	-	-	
2. Kontijensi ^{*****)}	12.781.885	-	-	
Total Tagihan Rekening Administratif	12.781.885	-	-	
B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF	18.218.474	-	-	
1. Komitmen	17.063.602	-	-	
a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	14.979.890	-	-	
b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	35.440	-	-	
c. Posisi Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2.035.875	-	-	
1) Spot	-	-	-	
2) Derivat ¹¹⁾	2.035.875	-	-	
d. Lainnya ¹³⁾	12.397	-	-	
2. Kontijensi ^{*****)}	1.154.872	-	-	
Total Kewajiban Rekening Administratif	18.218.474	-	-	
Selisih Tagihan Dan Kewajiban Dalam Rekening Administratif	5.436.588	-	-	
Selisih ((Ia-Ib) + (Iia-lib))	22.383.562	(63.024.187)	(14.559.561)	
Selisih Kumulatif	22.383.562	(63.024.187)	(14.559.561)	

Table Profil Maturitas Rupiah Per 31 Desember 2019

Pos-Pos	Saldo			
		s.d 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu	
a	b	c	d	
I. NERACA				
A. ASET				
1. Kas	1.363.761	1.363.761	-	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	26.396.987	23.656.165	-	
a. Giro	15.047.165	15.047.165	-	
b. SBI	5.215.822	2.475.000	-	
c. Lainnya ¹⁾	6.134.000	6.134.000	-	
3. Penempatan pada bank lain	852.550	200.145	-	
4. Surat Berharga ²⁾	12.338.032	1.049.357	173.293	
a. SUN	7.837.729	1.049.357	173.293	
1) diperdagangkan	1.019.551	373.000	-	
2) tersedia untuk di jual	4.118.277	676.357	173.293	
3) dimiliki hingga jatuh tempo	2.699.901	-	-	
4) pinjaman yang diberikan pada piutang	-	-	-	
b. Surat Berharga Korporasi	4.500.303	-	-	
1) diperdagangkan	-	-	-	
2) tersedia untuk dijual	2.222.433	-	-	
3) dimiliki hingga jatuh tempo	2.277.870	-	-	
4) pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	
c. lainnya ²⁾	-	-	-	
5. Kredit yang Diberikan	255.804.383	-	-	
a. Belum Jatuh Tempo ³⁾	254.165.823	-	-	
b. Sudah Jatuh Tempo ^{***)}	1.638.560	-	-	
6. Tagihan lainnya	2.386.159	-	-	
a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1.875.956	-	-	
b. Lainnya ⁴⁾	510.203	-	-	
7. Penyertaan Saham	270	-	-	
8. Lain-lain ⁵⁾	9.227.474	-	-	
Total Aset	308.369.616	26.269.428	173.293	

Jatuh Tempo					
	> 2 Minggu s.d 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	e	f	g	h	i
12.781.885	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12.781.885	-	-	-	-	-
12.781.885	-	-	-	-	-
17.200.536	-	-	-	-	1.017.938
16.045.664	-	-	-	-	1.017.938
14.979.890	-	-	-	-	-
35.440	-	-	-	-	-
1.017.938	-	-	-	-	1.017.938
-	-	-	-	-	-
1.017.938	-	-	-	-	1.017.938
12.397	-	-	-	-	-
1.154.872	-	-	-	-	-
17.200.536	-	-	-	-	1.017.938
(4.418.651)	-	-	-	-	(1.017.938)
(56.975.429)	(32.867.511)	(20.111.745)	(5.533.372)	215.455.367	
(56.975.429)	(32.867.511)	(20.111.745)	(5.533.372)	215.455.367	

(dalam jutaan Rupiah)

Jatuh Tempo					
	> 2 Minggu s.d 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	e	f	g	h	i
	-	-	-	-	-
400.000	2.006.579	85.000	249.243	-	-
-	-	-	-	-	-
400.000	2.006.579	85.000	249.243	-	-
-	-	-	-	-	-
-	30.000	48.000	150.000	424.405	
357.307	713.316	845.000	2.004.010	7.195.749	
357.307	633.316	660.000	1.435.010	3.529.446	
-	54.808	200.000	10	391.733	
357.307	478.508	460.000	200.000	1.772.812	
-	100.000	-	1.235.000	1.364.901	
-	-	-	-	-	-
-	80.000	185.000	569.000	3.666.303	
-	-	-	-	-	-
-	80.000	165.000	255.000	1.772.433	
-	-	20.000	314.000	1.943.870	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
983.038	3.415.436	2.288.086	6.368.759	242.749.064	
983.038	3.243.116	2.063.157	6.079.307	241.797.206	
-	172.320	224.929	289.452	951.859	
-	205.000	-	25.000	2.156.159	
-	205.000	-	25.000	1.645.956	
-	-	-	-	510.203	
-	-	-	-	270	
682.643	-	-	-	8.544.831	
2.422.988	6.370.331	3.266.086	8.797.012	261.070.209	

Pos-Pos	Saldo	s.d 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu
		c	d
a	b		
B. KEWAJIBAN			
1. Dana Pihak Ketiga	219.998.262	93.073.221	12.920.495
a. Giro	50.694.900	29.435.888	-
b. Tabungan	42.216.151	42.216.151	-
c. Simpanan Berjangka	127.087.211	21.421.182	12.920.495
1) Deposit on call	1.294.403	31.692	3.578
2) Deposito Berjangka	125.792.808	21.389.491	12.916.917
3) Lainnya ⁶⁾	-	-	-
2. Kewajiban Kepada Bank Indonesia	-	-	-
3. Kewajiban Kepada bank lain	4.521.828	469	7.690
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	19.783.552	-	-
a. Obligasi	19.783.552	-	-
b. Subordinasi ^{****)}	-	-	-
c. Lainnya ⁷⁾	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima	27.084.468	1.000.000	-
a. Pinjaman Subordinasi ^{****)}	2.999.719	-	-
b. Lainnya ⁸⁾	24.084.749	1.000.000	-
6. Kewajiban Lainnya	1.456.994	-	-
a. Kewajiban atas surat berharga yang di jual dengan janji dibeli kembali (Repo)	946.852	-	-
b. Lainnya ⁹⁾	510.142	-	-
7. Lain-lain ¹⁰⁾	11.025.277	-	-
Total Kewajiban	283.870.382	94.073.690	12.928.185
SELISIH ASET DENGAN KEWAJIBAN DALAM NERACA	24.499.235	(67.804.262)	(12.754.892)
II. REKENING ADMINISTRATIF			
A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF	10.319.293	-	-
1. Komitmen	-	-	-
a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-
b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-
1) Spot	-	-	-
2) Derivat ¹¹⁾	-	-	-
c. Lainnya ¹²⁾	-	-	-
2. Kontijensi ^{*****)}	10.319.293	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	10.319.293	-	-
B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF	16.917.408	-	-
1. Komitmen	14.853.073	-	-
a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	14.771.985	-	-
b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	81.088	-	-
c. Posisi Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-
1) Spot	-	-	-
2) Derivat ¹¹⁾	-	-	-
d. Lainnya ¹³⁾	-	-	-
2. Kontijensi ^{*****)}	2.064.334	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif	16.917.408	-	-
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(6.598.115)	-	-
Selisih ((Ia-Ib) + (Iia-Iib))	17.901.119	(67.804.262)	(12.754.892)
Selisih Kumulatif	17.901.119	(67.804.262)	(12.754.892)

Jatuh Tempo					
	> 2 Minggu s.d 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
	e	f	g	h	i
	40.322.738	33.767.145	10.518.184	4.567.550	24.828.929
	-	-	-	-	21.259.012
	-	-	-	-	-
	40.322.738	33.767.145	10.518.184	4.567.550	3.569.917
	26.455	18.777	110	129	1.213.662
	40.296.282	33.748.368	10.518.074	4.567.421	2.356.255
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	15.091	356	-	9	4.498.214
	-	-	1.650.000	5.375.500	12.758.052
	-	-	1.650.000	5.375.500	12.758.052
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	5.000.000	3.300.000	17.784.468
	-	-	-	-	2.999.719
	-	-	5.000.000	3.300.000	14.784.749
	-	-	-	946.852	510.142
	-	-	-	946.852	-
	-	-	-	-	510.142
	11.025.277	-	-	-	-
	51.363.106	33.767.501	17.168.184	14.189.911	60.379.805
	(48.940.118)	(27.397.170)	(13.902.098)	(5.392.899)	200.690.404
	10.319.293	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	10.319.293	-	-	-	-
	10.319.293	-	-	-	-
	16.917.408	-	-	-	-
	14.853.073	-	-	-	-
	14.771.985	-	-	-	-
	81.088	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	2.064.334	-	-	-	-
	16.917.408	-	-	-	-
	(6.598.115)	-	-	-	-
	(55.538.233)	(27.397.170)	(13.902.098)	(5.392.899)	200.690.404
	(55.538.233)	(27.397.170)	(13.902.098)	(5.392.899)	200.690.404

Table Profil Maturitas Valas per 31 Desember 2020

POS - POS	Saldo		
		s.d. 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu
a	b	c	d
I. NERACA			
A. ASET			
1. Kas	6.547	6.547	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia	4.286.397	4.286.397	-
3. Penempatan pada bank lain	2.169.733	2.169.733	-
4. Surat Berharga **)	12.264.276	-	-
a. SUN	11.688.907	-	-
1) diperdagangkan	688.888	-	-
2) tersedia untuk dijual	10.446.577	-	-
3) dimiliki hingga jatuh tempo	553.442	-	-
4) Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-
b. Surat Berharga Korporasi	575.369	-	-
1) diperdagangkan	-	-	-
2) tersedia untuk dijual	575.369	-	-
3) dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-
4) Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-
c. Lainnya ²⁾	-	-	-
5. Kredit yang Diberikan	-	-	-
a. Belum Jatuh Tempo	-	-	-
b. Sudah Jatuh Tempo ***)	-	-	-
6. Tagihan lainnya	-	-	-
a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual ke	-	-	-
b. Lainnya ³⁾	-	-	-
7. Lain-lain ⁴⁾	373.633	-	-
Total Aset	19.100.585	6.462.677	-
B. KEWAJIBAN			
1. Dana Pihak Ketiga	13.731.486	8.698.649	124.010
a. Giro	7.831.868	7.831.868	-
b. Tabungan	21.822	21.822	-
c. Simpanan Berjangka	5.877.795	844.959	124.010
1) Deposit on call	-	-	-
2) Deposito Berjangka	5.877.795	844.959	124.010
3) Lainnya ⁵⁾	-	-	-
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	4.194.553	-	-
a. Obligasi	-	-	-
b. Subordinasi ****)	4.194.553	-	-
c. Lainnya ⁶⁾	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima	-	-	-
a. Pinjaman Subordinasi *****)	-	-	-
b. Lainnya ⁷⁾	-	-	-
6. Kewajiban Lainnya	-	-	-
a. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli	-	-	-
b. Lainnya ⁸⁾	-	-	-
7. Lain-lain	1.902.138	-	-
Total Kewajiban	19.828.178	8.698.649	124.010
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	(727.592)	(2.235.972)	(124.010)
II. REKENING ADMINISTRATIF			
A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF			
1. Komitmen	2.136.798	-	-
a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	2.107.500	-	-
b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-
1) Spot	2.107.500	-	-
2) Derivatif ⁹⁾	-	-	-
c. Lainnya ¹⁰⁾	2.107.500	-	-
2. Kontijensi *****)	29.298	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	2.136.798	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

[illegible]

POS - POS	Saldo			
		s.d. 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu	
a	b	c	d	
B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF	21.177	-	-	
1. Komitmen	-	-	-	
a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	-	-	-	
b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	
c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-	
1) Spot	-	-	-	
2) Derivatif ⁹⁾	-	-	-	
d. Lainnya ¹⁾	-	-	-	
2. Kontijensi *****)	21.177	-	-	
Total Kewajiban Rekening Administratif	21.177	-	-	
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening	2.115.621	-	-	
Selisih ((Ia-Ib)+(Iia-Iib))	1.388.028	(2.235.972)	(124.010)	
Selisih Kumulatif	1.388.028	(2.235.972)	(124.010)	

Table Profil Maturitas Valas per 31 Desember 2019

POS - POS	Saldo			
		s.d. 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu	
a	b	c	d	
I. NERACA				
A. ASET				
1. Kas	5.406	5.406	-	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	4.987.590	4.987.590	-	
3. Penempatan pada bank lain	591.353	591.353	-	
4. Surat Berharga **)	2.172.950	-	-	
a. SUN	-	-	-	
1) diperdagangkan	-	-	-	
2) tersedia untuk dijual	-	-	-	
3) dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	
4) Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	
b. Surat Berharga Korporasi	2.172.950	-	-	
1) diperdagangkan	213.305	-	-	
2) tersedia untuk dijual	1.282.676	-	-	
3) dimiliki hingga jatuh tempo	676.969	-	-	
4) Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	
c. Lainnya ²⁾	-	-	-	
5. Kredit yang Diberikan	-	-	-	
a. Belum Jatuh Tempo	-	-	-	
b. Sudah Jatuh Tempo ***)	-	-	-	
6. Tagihan lainnya	-	-	-	
a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual ke	-	-	-	
b. Lainnya ³⁾	-	-	-	
7. Lain-lain ⁴⁾	49.057	-	-	
Total Aset	7.806.356	5.584.349	-	

JATUH TEMPO *)					
	> 2 Minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan
e	f	g	h	i	
21.177	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
21.177	-	-	-	-	-
21.177	-	-	-	-	-
1.061.871	-	-	-	-	1.053.750
(657.798)	(3.198.766)	(1.136.849)	(169.051)	(169.051)	8.910.474
657.798)	(3.198.766)	(1.136.849)	(169.051)	(169.051)	8.910.474

(dalam jutaan Rupiah)

JATUH TEMPO *)					
	> 2 Minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan
e	f	g	h	i	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	266.544	-	-	-	1.906.406
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	266.544	-	-	-	1.906.406
-	-	-	-	-	213.305
-	-	-	-	-	1.282.676
-	266.544	-	-	-	410.425
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	49,057
-	266.544	-	-	-	1.955.463

POS - POS	Saldo		
		s.d. 1 Minggu	> 1 Minggu s.d 2 Minggu
a	b	c	d
B. KEWAJIBAN			
1. Dana Pihak Ketiga	5.403.098	855.305	115.992
a. Giro	7.073	7.073	-
b. Tabungan	58.648	58.648	-
c. Simpanan Berjangka	5.337.378	789.585	115.992
1) Deposit on call	48.589	48.589	-
2) Deposito Berjangka	5.288.789	740.996	115.992
3) Lainnya ⁵⁾	-	-	-
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
a. Obligasi	-	-	-
b. Subordinasi *****)	-	-	-
c. Lainnya ⁶⁾	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima	1.384.557	1.384.557	-
a. Pinjaman Subordinasi *****)	-	-	-
b. Lainnya ⁷⁾	1.384.557	1.384.557	-
6. Kewajiban Lainnya	-	-	-
a. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli	-	-	-
b. Lainnya ⁸⁾	-	-	-
7. Lain-lain	21.667	-	-
Total Kewajiban	6.809.322	2.239.862	115.992
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	997.034	3.344.487	(115.992)
II. REKENING ADMINISTRATIF			
A. TAGIHAN REKENING ADMINISTRATIF			
1. Komitmen	164.739	-	-
a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-
b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-
1) Spot	-	-	-
2) Derivatif ⁹⁾	-	-	-
c. Lainnya ¹⁰⁾	-	-	-
2. Kontijensi *****)	-	-	-
	164.739	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	164.739	-	-
B. KEWAJIBAN REKENING ADMINISTRATIF			
1. Komitmen	92.820	-	-
a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	-	-	-
b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-
c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-
1) Spot	-	-	-
2) Derivatif ⁹⁾	-	-	-
d. Lainnya ¹⁰⁾	-	-	-
2. Kontijensi *****)	92.820	-	-
Total Kewajiban Rekening Administratif	92.820	-	-
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening	71.920	-	-
Selisih ((Ia-Ib)+(Iia-Iib))	1.068.954	3.344.487	(115.992)
Selisih Kumulatif	1.068.954	3.344.487	(115.992)

JATUH TEMPO *)					
	> 2 Minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan
	e	f	g	h	i
	3.985.752	313.551	11.009	121.489	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	3.985.752	313.551	11.009	121.489	-
	-	-	-	-	-
	3.985.752	313.551	11.009	121.489	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	21.667	-	-	-	-
	4.007.419	313.551	11.009	121.489	-
	(4.007.419)	(47.007)	(11.009)	(121.489)	1.955.463
	1.083.048	164.739	-	-	-
	1.053.750	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1.053.750	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1.053.750	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	29.298	164.739	-	-	-
	164.739	-	-	-	-
	92.820	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	92.820	-	-	-	-
	92.820	-	-	-	-
	71.920	-	-	-	-
	(3.935.499)	(47.007)	(11.009)	(121.489)	1.955.463
	(3.935.499)	(47.007)	(11.009)	(121.489)	1.955.463

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Uraian mengenai ikatan Material investasi barang modal yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal

(dalam Rupiah Penuh)

Nama Pihak	Jenis Ikatan	Nilai Ikatan
PT Mitra Transaksi Indonesia	Pengadaan EDC <i>Partner Operational Support</i>	27.450.000.000
PT Mckinsey Indonesia	Pekerjaan Jasa Konsultasi <i>Business Process Improvement Consumer Lending, SME dan Commercial Lending dan Corporate Plan Tahun 2020-2025</i>	20.000.000.000
PT Kemala Inti Solusi	Pengadaan <i>Upgrade CPU dan Memory Server HPE C7000 Environment DC Sentul dan DC Surabaya</i>	10.750.000.000

Perseroan melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Adapun sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melakukan ikatan material berasal dari dana internal Perseroan. Dikarenakan mata uang yang digunakan untuk investasi barang modal adalah IDR atau Rupiah dan nilai pengadaan yang tercantum pada perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan Penyedia juga ditetapkan dalam mata uang Rupiah maka tidak diperlukan adanya langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Investasi Barang Modal

Perseroan Melakukan investasi barang modal dalam bentuk Tanah, Gedung/ Ruang Kantor, Bangunan Lainnya, *Hardware* Komputer, Mesin, Kendaraan, Perlengkapan Kantor, Aset Tetap dan Inventaris Lainnya. Sampai dengan tahun 2020, jumlah investasi barang modal sebesar Rp8,49 triliun.

Tabel Investasi Barang Modal

(dalam Rupiah Penuh)

Jenis	Tujuan	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2019
Tanah	Operasional Perseroan	3.970.390.749.399	3.970.390.749.399
Gedung/ Ruang Kantor	Operasional Perseroan	1.593.079.676.609	1.507.809.063.473
Bangunan Lainnya	Operasional Perseroan	56.367.896.991	78.281.400
<i>Hardware</i> Komputer	Operasional Perseroan	1.836.753.184.594	1.562.967.099.477
Mesin	Operasional Perseroan	438.011.796.748	421.759.850.310
Kendaraan	Operasional Perseroan	2.631.065.442	2.830.365.442
Perlengkapan Kantor	Operasional Perseroan	554.032.077.183	521.365.420.897
Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	Operasional Perseroan	39.471.960.864	35.236.303.315
Total		8.490.738.407.830	8.022.437.133.713

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang/Modal

Selama tahun 2020, Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi hutang/modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
KOMITMEN		
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	13.039.190	15.865.327
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3.148.038	2.793.877
Liabilitas Kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan	(764.042)	(2.009.682)
Kontinjensi - neto	2.383.996	784.195

Perjanjian dan Perikatan

Berikut adalah uraian perjanjian dan perikatan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020:

1. Pada tanggal 5 November 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Sigma Cipta Caraka sehubungan dengan Pengadaan *Upgrade Core Banking Syariah* dengan nilai kontrak sebesar Rp9.500 juta.
2. Pada tanggal 24 Februari 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Hanoman Cendikia Interaktif sehubungan dengan Pengadaan Open Contract Pengembangan Middleware Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.750 juta.
3. Pada tanggal 24 Januari 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Abhimata Persada sehubungan dengan Pengadaan Fusion Capital Opics Treasury System Upgrade dengan nilai kontrak sebesar Rp5.240 juta.
4. Pada tanggal 23 Desember 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Taruna Bangun Perkasa sehubungan dengan Renovasi Mekanikal Elektrikal Gedung KC Depok dengan nilai kontrak sebesar Rp5.350 juta.
5. Pada tanggal 11 Desember 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Alekxa Putra Sejati sehubungan dengan Renovasi dan Relayout KC Ciputat dengan nilai kontrak sebesar Rp5.340 juta.
6. Pada tanggal 7 Oktober 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Alekxa Putra Sejati sehubungan dengan Renovasi dan Relayout Gedung KC Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp5.250 juta.
7. Pada tanggal 23 September 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Renovasi Gedung Perseroan KC Jakarta Kuningan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.285 juta.
8. Pada tanggal 9 Januari 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Renovasi dan Relayout Gedung Perseroan KC Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp5.930 juta.
9. Pada tanggal 7 Januari 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Emerio Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Implementasi Sistem PSAK 71 selama 175 (seratus tujuh puluh lima hari) dengan masa garansi 10 (sepuluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp8.000 juta.

Pencapaian Target dan Target ke Depan

Pencapaian Target 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Uraian perbandingan target dan realisasi keuangan Perseroan tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Perseroan dan Realisasi Keuangan 2020

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Rencana 2020	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	361.208	324.840	111,20%
Kredit Yang Diberikan*)	260.114	267.282	97,32%
Liabilitas	321.276	307.666	104,42%
Simpanan Dari Nasabah	279.135	244.288	114,26%
Giro	72.045	60.409	119,26%
Tabungan	42.719	45.688	93,50%
Deposito	164.371	138.191	118,94%
Ekuitas	19.988	17.174	116,39%
Laba (Rugi)			
Pendapatan Bunga	25.106	25.020	100,34%
Pendapatan Operasional Selain Bunga	2.514	2.106	119,37%
Laba Sebelum Pajak	2.271	1.364	166,50%
Laba Bersih	1.602	1.085	147,65%
Rasio Keuangan			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	19,34%	16,70%	115,81%
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,37%	4,50%	97,11%
Return on Assets (ROA)	0,69%	0,44%	156,82%
Return on Equity (ROE)	10,02%	7,26%	138,02%

*) Termasuk Pembiayaan Syariah

Berdasarkan rincian tabel di atas, pencapaian target Perseroan secara keseluruhan baik, berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya pada Rencana Bisnis Perseroan. Pencapaian target aset sebesar 111,20% yang melampaui target. Demikian pula dengan pencapaian target simpanan dari nasabah yang mencapai 114,26%, pencapaian tersebut didukung oleh tercapainya target giro dan deposito yang masing-masing sebesar 119,26% dan 118,94%. Meskipun kredit yang diberikan sedikit berada di bawah target mencapai 97,32% yang disebabkan tidak terserapnya kuota KPR ke nasabah Perseroan karena pandemi COVID, sehingga penyaluran KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi mengalami penurunan. Akan tetapi pencapaian target ekuitas berhasil melampaui target sebesar 116,39%.

Dari sisi pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga juga berhasil melampaui target yang masing-masing sebesar 100,34% dan 119,37%. Pencapaian target pendapatan tersebut sejalan dengan pencapaian target laba bersih Perseroan yang mencapai 147,65%. Hal tersebut karena Perseroan dapat menurunkan *Cost of Fund* (CoF) yang signifikan, meningkatkan pendapatan *Fee Based Income* (FBI) serta efisiensi Biaya Operasional Pendapatan Operasional Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (BOPO CKPN).

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran Perseroan tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

No	Jenis	Deskripsi	Progress Desember 2020
A Produk			
1	Sekuritisasi Tahap I	Suatu proses transformasi atas tagihan yang tidak dapat diperdagangkan menjadi instrumen yang dapat diperdagangkan atas portofolio tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Aset Keuangan yang terpilih (Tagihan atau Kumpulan Tagihan) milik Perseroan, atau atas pendapatan bunga portofolio tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Aset Keuangan milik Perseroan.	Selesai/Go live, realisasi 29 Desember 2020.
2	Sekuritisasi Tahap II	Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal (nilai <i>par/par value</i>) dan waktu jatuh tempo tertentu.	Dilakukan penundaan di tahun 2020 dan dilaksanakan di tahun 2021 sesuai memo Direksi No 610/M/IBD/CM/X/2020. Penundaan transaksi sekuritisasi tahap II dikarenakan <i>timeline</i> yang tidak memungkinkan di lakukan di tahun 2020. Mengingat Sekuritisasi Tahap I baru terbit di tanggal 30 Desember 2020.
3	Obligasi/MTN/ Sukuk Tahap I	Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal (nilai <i>par/par value</i>) dan waktu jatuh tempo tertentu.	Selesai/go live, realisasi 19 Agustus 2020.
4	Obligasi/MTN/ Sukuk Tahap II	Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal (nilai <i>par/par value</i>) dan waktu jatuh tempo tertentu.	Dilakukan penundaan di tahun 2020 dan dilaksanakan di tahun 2021 sesuai memo Direksi No. 610/M/IBD/CM/X/2020. Penundaan penerbitan obligasi Tahap II dikarenakan kondisi likuiditas dan kondisi pasar.
5	Efek Bersifat Utang	Efek bersifat utang yg diterbitkan dalam upaya penyaluran dana Tapera.	Pengajuan ijin/laporan kepada OJK.
6	Call Spread Option	Gabungan antara <i>beli call option</i> dan jual <i>call option</i> yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan <i>strikeprice</i> yang berbeda dan nominal yang sama. Beberapa perusahaan memiliki kewajiban dan pendapatan dalam mata uang yang berbeda. Jika suatu perusahaan memiliki utang dalam mata uang USD sedangkan pendapatan perusahaan dalam IDR maka dalam kondisi tersebut perusahaan memiliki atau dapat terekspos risiko nilai tukar. Jika waktu jatuh tempo utang mata uang USD menguat maka perusahaan berisiko untuk membeli USD dalam harga yang lebih mahal. Perusahaan dapat melakukan lindung nilai dengan <i>call spread option</i> , keunggulan utama <i>call spread option</i> adalah biaya <i>premi</i> yang lebih murah. Karena memasang posisi jual <i>option</i> dimana penjual mendapatkan pembayaran <i>premi</i> .	Pembuatan Surat Edaran (SE) Standar Operasional Prosedur (SOP).
7	Dual Currency Investment	Merupakan sebuah produk Investasi yang dapat memberikan tingkat pengembalian <i>return</i> lebih tinggi dibandingkan deposito. (mata uang investasi dapat berubah menjadi mata uang lain /alternatif)	Carry over 2021.
8	Marked Linked Deposits	Merupakan kombinasi antara instrumen non derivatif (penempatan dana), dan instrumen non derivatif, seperti <i>Interest Rate Swap</i> (IRS) dan <i>Option</i> .	Carry over 2021.
9	USD Junior Global Bond	Penerbitan Obligasi Subordinasi dalam mata uang USD. Rincian sebagaimana PAB terlampir.	Go live 24 Januari 2020 Surat OJK No. S-166/PB.31/2019 tanggal 14 November 2019.

No	Jenis	Deskripsi	Progress Desember 2020
B Aktivitas			
1	Idebit BTN E-Commerce Debit BTN Online	Layanan yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi belanja <i>online</i> di <i>Merchant Online</i> menggunakan Kartu ATM/Debit Perseroan Berlogo Nasional melalui jaringan ALTO.	Pengajuan Izin ke BI.
2	BSecure BTN E-Commerce Debit BTN Online	Layanan yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi belanja <i>online</i> di <i>Merchant Online</i> menggunakan Kartu ATM/Debit Perseroan Berlogo Nasional melalui jaringan ATM Bersama.	Pengajuan Izin ke BI.
3	BTN <i>Virtual Account</i> dan <i>Corporate Card</i>	Kartu yang diperuntukkan kepada nasabah perorangan di instansi lembaga untuk dapat menggunakan transaksi perbankan seperti: tarik tunai, <i>transfer</i> dan debit dengan <i>source fund</i> adalah <i>virtual account</i> yang terhubung dengan giro lembaga atau tidak.	Pengujian (termasuk IT).
4	Kartu Kredit (<i>Managed Service</i>)	Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Perseroan dimana tata kelola dilakukan oleh Perseroan dibantu dengan pihak yang bekerjasama dengan Perseroan. Dalam pelaksanaannya Perseroan bertindak sebagai penerbit kartu kredit.	<i>Carry Over</i> 2021.
5	<i>Mobile Application</i> Kartu Kredit	<i>Mobile application</i> kartu kredit Perseroan adalah aplikasi <i>mobile</i> yang dibuat dan dikembangkan oleh Perseroan dibantu dengan pihak yang bekerjasama dengan Perseroan, dalam pelaksanaannya <i>mobile application</i> kartu kredit Perseroan yang dikembangkan harus mampu mengakomodir semua kebutuhan <i>user</i> , pemasaran kartu kredit dan promosi kartu kredit sehingga dapat menciptakan <i>service excelent</i> pada produk kartu kredit Perseroan.	<i>Carry Over</i> 2021.
6	Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM (<i>Cardless Withdrawal</i>)	Penarikan Tunai di ATM tanpa menggunakan kartu (menggunakan menu di <i>mobile banking</i> dan <i>internet banking</i>).	Pengajuan ijin kepada OJK.
7	Pembayaran <i>Virtual Account</i> BTN melalui EDC	EDC Perseroan dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran <i>virtual account</i> Perseroan. Pembayaran tersebut merupakan kewajiban pelanggan yang dimiliki nasabah lembaga Perseroan.	Pengajuan ijin kepada OJK.
8	<i>Direct Debit</i> (pada aplikasi LinkAja)	Layanan transaksi menggunakan kartu debit yang tersimpan dalam aplikasi (<i>wallet</i>) LinkAja dengan terlebih dahulu melakukan proses registrasi (penambahan kartu).	Pengajuan ijin kepada OJK.
9	Aplikasi Laku Pandai BTN	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	<i>Go live</i> , Surat OJK No. S-68/PB.313/2020 tanggal 7 Juli 2020.
10	Jasa Kustodian	Kustodian fasilitas layanan untuk menyelenggarakan jasa penyimpanan, pengadministrasian dan penyelesaian transaksi nasabah pada surat-surat berharga yang ditransaksikan di bursa efek maupun diluar bursa (<i>over the counter</i>) serta penyimpanan harta kekayaan nasabah lainnya.	Penyusunan Struktur Organisasi Posisi <i>Advisor</i> Bank Kustodian telah terisi <i>Carry Over</i> 2021 (Triwulan II 2021).
11	EDC <i>Acquirer</i> BTN	Perseroan sebagai pemilik EDC dapat menerima transaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit Perseroan maupun bank lain untuk keperluan transaksi belanja, pembayaran berbagai tagihan serta untuk mendukung program-program Pemerintah.	Pengajuan Izin ke BI.

No	Jenis	Deskripsi	Progress Desember 2020
12	Anak Usaha Manajemen Investasi	Pendirian MI yaitu pendirian suatu korporasi baru yang mengelola berbagai sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan aset lainnya dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi <i>investor</i> .	Sedang dilakukan negosiasi ulang dengan mitra strategis untuk pendirian MI.
13	Anak Usaha Perusahaan Modal Ventura	Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (<i>investee company</i>) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian oligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.	Sedang dilakukan negosiasi ulang dengan mitra strategis untuk pendirian PMV.
14	Anak Usaha Asuransi Jiwa/ Kerugian	Perusahaan yang memberikan asuransi untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena sakit meninggalnya terlalu cepat (asuransi jiwa) atau kerugian lainnya (asuransi umum).	1. <i>Project Lotus Putra</i> dibatalkan oleh KBUMN yang disampaikan oleh Jiwassraya melalui Surat Jiwassraya No. 0005/S/U/CSP/1020 tentang Pengakhiran Perjanjian Pokok. 2. Pembentukan Anak Usaha asuransi jiwa/kerugian Perseroan tetap akan dilakukan dan di <i>carry over</i> pada tahun 2021.
15	Pinjaman Luar Negeri	Pinjaman Luar Negeri Perseroan yang untuk selanjutnya disebut PLN adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Perseroan kepada bukan penduduk dalam valuta asing.	Saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan JBIC, AIIB dan AFD.
16	Produk Reksadana Terproteksi	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Selesai, Persetujuan OJK No. S-57/PB313/2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 218 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 8 Juni 2020. Surat WMD No. 258/S/WMD/PVUSD/VII/2020 Tanggal 7 Juli 2020 Perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan aktivitas Baru Sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana.
17	Produk Reksadana Terproteksi	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Selesai, Persetujuan OJK No. S-87/PB313/2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 215 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 5 agustus 2020 Surat No.369/S/WMD/PVUSD/IX/2020 tanggal 29 september 2020 Perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagai Agen Penjual Reksadana.
18	Produk Reksadana Terproteksi	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Selesai, Persetujuan OJK No. S-137/PB313/2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Pemasaran Reksadana Penawaran Umum (Terproteksi Mandiri Seri 222) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 19 Oktober 2020.
19	Produk Reksadana Terproteksi	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Ditolak dikarenakan risiko bisnis dari emiten yang cukup besar.
20	Produk <i>Open End</i>	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Reksa dana yang pemegang unit penyertanya dapat menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi.
21	Produk <i>Open End</i>	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Reksa dana yang pemegang unit penyertanya dapat menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi.

No	Jenis	Deskripsi	Progress Desember 2020
22	Produk <i>Open End</i>	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.	Ditolak, Surat OJK No.S-124/PB.31/2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Pemasaran Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang Kerjasama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi.
23	Aplikasi i-Reksadana	Aplikasi I-Reksa Dana merupakan aplikasi <i>mobile</i> dengan sistem operasi Android yg dapat diakses oleh nasabah maupun calon nasabah untuk mengetahui <i>profile risk</i> individu. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya didalam aplikasi I-Reksa Dana ini menyediakan fitur swakelola <i>portfolio</i> untuk nasabah dengan fitur <i>inquiry portfolio</i> dan transaksi. Pengembangan akan mencakup penambahan fitur transaksi pada aplikasi <i>mobile</i> i-Reksa Dana, yang meliputi <i>subscription</i> , <i>redemption</i> , <i>switching</i> .	Pemenuhan Persyaratan OJK (hasil <i>meeting</i> dengan OJK pada 22 Desember 2020). <i>Carry over</i> tahun 2021 untuk dilanjutkan perijinan ke OJK Pengawas Bank.
24	Produk Asuransi <i>Unit Link</i>	Menambah varian produk <i>unit link</i> , dengan manfaat investasi sekaligus proteksi.	Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) <i>Bancassurance</i> untuk <i>project</i> Lotus Putra, namun <i>project</i> Lotus Putra dibatalkan.
25	Produk Asuransi <i>Endowment</i>	Menambah varian produk <i>endowment</i> , dengan <i>return</i> yang sesuai dengan yang dijanjikan di awal persetujuan pembelian produk (produk dengan manfaat investasi sekaligus proteksi).	Menambahkan varian produk <i>endowment</i> sebagai produk proteksi dengan manfaat dwiguna.
26	Produk Asuransi Umum/ <i>General Insurance</i>	Produk asuransi yang melindungi aset rumah dan properti nasabah, dari risiko kebakaran beserta perluasan jaminan yang ada.	Selesai, Persetujuan OJK No. S-91/PB313/2020 Tanggal 18 agustus Perihal Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru <i>Bancassurance</i> Asuransi Komprehensif Harta Benda/ <i>Property All Risk</i> Surat No.354/S/WMD/PVAsD/IX/2020 Perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa <i>Bancassurance</i> Produk Asuransi Komprehensif Harta Benda/ <i>Property All Risk</i> Kerjasama Perseroan dengan PT Asuransi Binagriya Upakara.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Wujud dari komitmen Perseroan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya dalam hal pengembangan kompetensi dapat terlihat dari jumlah realisasi peserta yang telah mengikuti pelatihan sebesar 124.684 peserta dari 11.224 pegawai, atau dengan kata lain rata-rata per pegawai yang telah mengikuti pelatihan adalah sebanyak 11 kali, meningkat 58% dibandingkan tahun 2019 dengan rata-rata 4,4 kali.

Pencapaian biaya pengembangan SDM sedikit di bawah target sebesar 83,98%. Meskipun demikian, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berhasil melampaui target sebesar 246,86%. Realisasi pengembangan SDM menyerap biaya sebesar Rp41,99 miliar, menyusut sebesar 56,1% dibandingkan tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp95,7 miliar. Hal ini dikarenakan Perseroan menetapkan metode *delivery blended learning* yang menggabungkan *online learning* dan *classroom* sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas dari masing-masing program pendidikan dan pelatihan serta masih sejalan untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai salah satunya melalui kompetensi yang dimiliki. Selain itu dengan adanya pandemi COVID-19, terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dilaksanakan dengan metode *classroom*, harus dikonversi menjadi *virtual classroom* untuk mengurangi penyebaran COVID-19, sehingga diperoleh penghematan yang cukup besar atas kegiatan tersebut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2020	Rencana 2020	Pencapaian
1	2	3	4
Biaya Pengembangan SDM	Rp41,99 miliar	Rp50,00 miliar	83,98%
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan yang terdiri dari pelatihan bidang:			
• <i>Leadership</i>			
• <i>Sales and Service</i>	124.684 peserta	50.508 peserta	246,86%
• <i>Credit and Risk</i>			
• <i>Business and Sharia Banking</i>			
• <i>Operational Banking</i>			

Target Kedepan

Rencana Bisnis Perseroan tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi makro dan mikro ekonomi. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi Perseroan.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Asumsi	2021
PDB	4,0% – 5,0%
Inflasi	3,01%
Suku Bunga Acuan BI7DRR	3,50%
Kurs	Rp14.000

Sumber: Rencana Bisnis PT Bank Tabungan Negara Tbk. Tahun 2021-2023

Adapun Rencana Bisnis Perseroan yang memuat proyeksi keuangan, pemasaran, dan pengembangan SDM satu tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

Proyeksi Keuangan Tahun 2021

Uraian proyeksi keuangan tahun 2021 Perseroan disajikan sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2021
Posisi Keuangan	
Aset	362.680
Kredit Yang Diberikan	285.531
Kredit	258.949
Pembiayaan Syariah	26.582
Liabilitas	342.059
Simpanan Dari Nasabah	288.218
Giro	71.027
Tabungan	43.707
Deposito	153.007
Dana Investasi <i>Revenue Sharing</i>	20.477
Ekuitas	20.621
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Pendapatan Bunga dan Bagi hasil (Pendapatan Bunga)	26.969
Pendapatan Operasional lainnya (Pendapatan Operasional Selain Bunga)	2.554
Laba Tahun Berjalan (Laba Tahun Berjalan)	2.801
Laba Komprehensif tahun Berjalan (Laba Tahun-Tahun Lalu)	3.092

Uraian	Proyeksi 2021
Rasio Keuangan (%)	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	17,75%
Non Performing Loan (NPL)	3,64%
Return on Assets (ROA)	0,98%
Return on Equity (ROE)	15,81%

Proyeksi Pemasaran Tahun 2021

Uraian proyeksi pemasaran tahun 2021 Perseroan disajikan sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pemasaran

Produk	Deskripsi
e-Deposito di e-Channel BTN - e-Deposito di Internet Banking - e-Deposito di Mobile Banking	Merupakan layanan perbankan dimana nasabah <i>create deposito</i> secara elektronik dan mandiri melalui e-channel (<i>Mobile Banking</i> dan <i>Internet Banking</i>) tanpa harus ke outlet Bank.
API Management and Sandbox untuk Digital Banking	Merupakan layanan <i>digital</i> bagi mitra/partner yang ingin bekerjasama dengan Perseroan. Mitra dapat lebih mudah untuk mengintegrasikan layanan <i>digital</i> mitra dengan produk-produk Perseroan melalui API Service Perseroan.
Obligasi PUB IV Tahap II	Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal (nilai <i>par/par value</i>) dan waktu jatuh tempo tertentu.
Sekuritisasi KPR BTN	Suatu proses transformasi atas tagihan yang tidak dapat diperdagangkan menjadi instrumen yang dapat diperdagangkan atas portofolio tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Aset Keuangan yang terpilih (Tagihan atau Kumpulan Tagihan) milik Perseroan, atau atas pendapatan bunga portofolio tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Aset Keuangan milik Perseroan. Transaksi Sekuritisasi Aset wajib memenuhi kriteria: a. Memiliki arus kas (<i>cashflow</i>). b. Dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Awal (<i>Originator</i>). c. Dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit.
Long Term Notes (LTN) Bank BTN Tahap I	Penerbitan surat berharga (efek) berupa <i>Long Term Note</i> (LTN) dari Bank Penyalur kepada Badan Pengelola (BP). Tapera ini adalah sehubungan dengan fungsi pemanfaatan dana Tapera yaitu sebagai Bank Penyalur. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 2016 Pasal 29 ayat (2) bahwa salah satu tugas Bank Penyalur adalah memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama.
Subordinasi (pinjaman/surat utang) dalam/luar negeri	- Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila Perseroan telah memenuhi persyaratan tertentu. Pelunasan atas kewajiban ini baru dapat dilakukan apabila seluruh dana atau simpanan yang ada dalam Perseroan dalam hal ini likuidasi telah dilunasi. - Surat utang subordinasi adalah surat utang yang tingkat kedudukannya berada di bawah surat utang lain sehingga baru akan dibayar kembali setelah surat utang dengan prioritas lebih tinggi telah dilunasi atau dilakukan pelunasan terlebih dahulu.
Dual Currency Investment (DCI)	Merupakan sebuah produk Investasi yang dapat memberikan tingkat pengembalian <i>return</i> lebih tinggi di bandingkan deposito. (mata uang investasi dapat berubah menjadi mata uang lain/alternatif).
Market Link Deposit (MLD)	Merupakan kombinasi antara instrumen non derivatif (penempatan dana), dan instrumen non derivatif, seperti <i>Interest Rate Swap</i> (IRS) dan Option.
Call Spread Option (CSO)	<i>Call Spread Option</i> adalah gabungan antara beli <i>call option</i> dan jual <i>call option</i> yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan <i>strikeprice</i> yang berbeda dan nominal yang sama.
Pembukaan Rekening Secara Online	Membuka rekening nasabah secara online tanpa harus mendatangi outlet Perseroan.
Sukuk	Sukuk jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan Perseroan dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu.
True Sales untuk Sekuritisasi (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset/KIK EBA) dan Non Sekuritisasi	Penjualan KPR iB MMQ kepada PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) atau Bank Syariah lain untuk sekuritisasi, selanjutnya PT SMF akan menerbitkan surat berharga sekuritisasi dengan nilai nominal dan tenor tertentu.
Pengembangan Fitur Pembelian dan Pembayaran di Mesin Electronic Data Capture (EDC)	Fitur pembelian dan pembayaran pada mesin EDC merupakan fitur layanan transaksi keuangan yang dikembangkan pada mesin EDC dalam rangka mendukung kegiatan inklusi keuangan, adapun fitur pembelian dan pembayaran yang dimaksud seperti pembelian pulsa, <i>top up e-wallet</i> , listrik, pembayaran tagihan, dan transaksi sejenis lainnya.

Produk	Deskripsi
Reksadana <i>Open End</i>	Reksa dana yang pemegang unit penyertaannya dapat menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi.
Kartu Kredit <i>Co-Branding</i>	Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank BRI dimana Perseroan hanya menjadi partner <i>co-brand</i> , sehingga portofolio ada di pihak Bank BRI.
<i>Mobile Apps</i> Kartu Kredit	<i>Mobile application</i> kartu kredit Perseroan berkonsep <i>API Base Connection</i> adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Perseroan dan terintegrasi melalui API ke dalam sistem Bank BRI.
Direct Debit Kartu Debit BTN dengan <i>e-Wallet</i>	Merupakan fitur <i>Source of Fund</i> di dalam aplikasi <i>e-Wallet</i> , di mana nasabah Perseroan dapat menggunakan fitur pembayaran menggunakan kartu debit sebagai <i>source of fund</i> .
Pendirian Fungsi Bank Kustodian	Bank Kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam kegiatannya terdapat proses operasional seperti penyelesaian transaksi efek, pelaporan kepada nasabah dan <i>regulator</i> , pembayaran pajak, perhitungan NAV, pencatatan serta pendaftaran dan administrasi <i>mutual fund</i> .
Pinjaman Jangka Panjang (Pinjaman Luar Negeri)	Pinjaman Luar Negeri Perseroan yang untuk selanjutnya disebut PLN adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Perseroan kepada bukan penduduk dalam valuta asing.
Reksadana Terproteksi (8 Produk)	Reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan memberikan 100% terhadap nilai investasi awal.
Anak Usaha Asuransi Jiwa	Pembentukan Anak Usaha Asuransi Jiwa atau Kerugian yang direncanakan melalui pembentukan perusahaan baru/penyertaan modal/akuisisi perusahaan yang telah ada.
Anak Usaha Perusahaan Modal Ventura	Pembentukan Anak Usaha Perusahaan Modal Ventura yang direncanakan melalui pembentukan perusahaan baru/penyertaan modal/akuisisi perusahaan yang telah ada.
Penjualan aset kredit bermasalah Perseroan secara <i>bulk</i>	Penjualan kredit bermasalah secara <i>bulk</i> dimana Perseroan akan mendapatkan surat berharga dari investor atas penjualan tersebut.
<i>Online Acquiring</i>	Perseroan dapat memproses transaksi (<i>acquiring</i>) kartu debit dan kartu kredit (<i>on us and off us</i>) pada <i>merchant online/e-commerce</i> .
<i>New Mobile Banking</i>	Pengembangan <i>mobile banking</i> baru.
<i>Internet Banking Business</i>	Merupakan layanan perbankan di desain khusus sesuai kebutuhan transaksi pelaku usaha kecil dan menengah.
Perubahan Tabungan BTN Emas iB (Tabungan Rencana iB)	Perubahan peruntukan produk yang semula ditujukan khusus untuk persiapan pembelian emas menjadi juga dapat digunakan untuk perencanaan lainnya dengan skema produk yang sama.
Kerjasama Operasional dengan MTI	Pemindahan sebagian besar kegiatan operasional EDC kepada pihak ketiga.
Platform ATM JALIN	Kerjasama Pengelolaan Operasional mesin ATM dan Platform ATM dengan JALIN.
EDC <i>Feature Development</i> - <i>Contactless</i> EDC - Tarik Tunai EDC - <i>Virtual Account</i> di EDC - <i>Redeem Points</i> EDC	- Perseroan dapat memproses transaksi (<i>acquiring</i>) kartu <i>prepaid</i> (<i>contactless</i>) pada <i>merchant</i> Perseroan. - Fitur tarik tunai yang dapat dilakukan melalui <i>channel</i> EDC Perseroan pada <i>merchant</i> yang bekerjasama. - Fitur pembayaran <i>virtual account</i> yang dapat dilakukan melalui <i>channel</i> EDC. - Nasabah dapat melakukan <i>redeem poin</i> Spekta ketika transaksi pada <i>merchant</i> melalui <i>channel</i> EDC Perseroan.
<i>Outgoing Transfer</i> EMQ	Layanan kiriman uang <i>outgoing transfer</i> ke luar negeri dengan bekerja sama dengan agen penyelenggara transfer dana.
<i>Outgoing Transfer</i> MoneyGram	Layanan kiriman uang <i>outgoing transfer</i> ke luar negeri dengan bekerja sama dengan agen penyelenggara transfer dana.
Aplikasi IREKSADANA	Aplikasi I-Reksa Dana merupakan aplikasi <i>mobile</i> dengan sistem operasi Android yg dapat diakses oleh Nasabah maupun calon nasabah untuk mengetahui <i>profile risk</i> individu. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya didalam aplikasi I-Reksa Dana ini menyediakan fitur swakelola portfolio untuk nasabah dengan fitur <i>inquiry portfolio</i> dan transaksi. Pengembangan akan mencakup penambahan fitur transaksi pada aplikasi <i>mobile</i> i-Reksa Dana, yang meliputi <i>subscription</i> , <i>redemption</i> , <i>switching</i> .
Produk Asuransi <i>Endowment</i>	Menambahkan varian produk <i>endowment</i> sebagai produk proteksi dengan manfaat dwiguna.
Produk Asuransi <i>Unit Link</i>	Menambah varian produk unit link, dengan manfaat investasi sekaligus proteksi.

Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2021

Strategi pengembangan kompetensi pegawai di tahun 2021 ditetapkan selaras dan mendukung implementasi *Corporate Plan* Perseroan tahun 2021-2025 dengan membangun SDM yang berkualitas yang mempunyai kapabilitas untuk mendukung pencapaian visi Perseroan. Untuk itu, pengembangan SDM ditetapkan selaras dan mendukung implementasi strategi Perseroan melalui pengembangan *leadership* dan *technical competencies* pada bidang *sales and service*, *credit and risk*, *business and sharia banking*, serta *operational banking*. Adapun inisiatif pengembangan SDM tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Continuously Enhance Training and Capability for Middle Office*
 - a. *Technical Competency Development*
 - Penguatan kompetensi teknis *sales* dan *marketing* bidang *funding* untuk mendukung peningkatan *low cost funding* dan *fee based income* (Konvensional dan Syariah).
 - Penguatan kompetensi teknis *lending* untuk mendukung perbaikan proses dan kualitas kredit (Konvensional dan Syariah).
 - Penguatan kompetensi Teknis Operations untuk *Operational Excellence* (Konvensional dan Syariah).
 - b. *Cross Selling Capability*
 - *Branch Sales Transformation*.

- c. *Digital and Global Competencies*
 - *Digital Talent Development Program*.
 - *Digital Leadership and Global Competencies Program*.
 - *Officer Development Program* (ODP) Khusus Bidang *Information Technology* (IT)
2. *Enhance Sharia Structuring Capabilities*

Pada tanggal 29 Desember tahun 2020 Perseroan memperoleh persetujuan dan telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) yang sudah diakui oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam:

1. Pengelolaan Transfer Dana
2. Pengelolaan Uang Tunai
3. Pengelolaan Uang Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing

Program peningkatan kapabilitas pegawai dilakukan dengan metode *blended learning*, dimana tidak hanya dilakukan melalui *classroom training*, tetapi juga melalui *experiential learning* antara lain program *on the job experience*, *feedback and coaching*, dan lainnya. Selain itu, pegawai diminta untuk melakukan *self-learning* (melalui *e-learning* dan/atau pengembangan lainnya seperti membaca, mengikuti *sharing* dan lain-lain).

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2021
Biaya Pengembangan <i>Leadership</i>	32,39
Biaya Pengembangan <i>Technical Competencies unit Sales and Service</i>	22,85
Biaya Pengembangan <i>Technical Competencies unit Credit and Risk</i>	24,25
Biaya Pengembangan <i>Technical Competencies unit Business and Sharia Banking</i>	19,96
Biaya Pengembangan <i>Technical Competencies unit Operational Banking (Supporting unit)</i>	23,10
Biaya pendukung pelaksanaan pelatihan	12,43
TOTAL	134,98

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Perseroan tidak memiliki uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah dan pembayaran dividen di antaranya adalah tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Manajemen merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian mengenai pengumuman dan pembayaran dividen Perseroan disajikan sebagai berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018-2019

Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Laba Bersih (Rp)	209.263.033.487	2.807.921.063.074
Dividen (Rp)	20.926.303.349	561.584.212.615
Jumlah Saham (Lembar)	10.590.000.000	10.590.000.000
Dividen Per Saham (Rp)	1,97	53,02
Dividend Pay Out Ratio (%)	10%	20%
Tanggal Pengumuman	16 Maret 2020	21 Mei 2019
Tanggal Pembayaran	15 April 2020	12 Juni 2019

Di tahun 2020, Perseroan membagikan dividen saham sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Maret 2020. Berdasarkan RUPS Tahunan 2020, Pemegang Saham memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp209.263.033.487,00 (dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juga tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

- Dividen sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp20.926.303.349 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp12.555.782.009,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp188.336.730.138 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Tahun 2020, Perseroan tidak memiliki program *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Oleh karena itu, Perseroan tidak menyampaikan tentang Jumlah saham ESOP/MSOP dan Realisasinya; Jangka Waktu; Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen Yang Berhak; dan Harga *Exercise*.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan telah menggunakan Rp1.500.000.000.000, seluruh nilai realisasi hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahap I Tahun 2020 ditetapkan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Berikut adalah realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	2	3	4	5	6
1	Penawaran Umum	19 Agustus 2020	1.500.000.000.000	6.188.943.464	1.493.811.056.536
Jumlah			1.500.000.000.000	6.188.943.464	1.493.811.056.536

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Transaksi Afiliasi

Afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Perseroan tidak memiliki transaksi material dengan pihak afiliasi di tahun 2020

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Perseroan tidak memiliki transaksi benturan kepentingan di tahun 2020

Transaksi Pihak Berelasi

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah Penuh)

	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
	Rencana Realisasi Kredit	Total	Realisasi Kredit	Total	
	7	8	9	10	11
	1.493.811.056.536	1.493.811.056.536	1.493.811.056.536	1.493.811.056.536	-
	1.493.811.056.536	1.493.811.056.536	1.493.811.056.536	1.493.811.056.536	-

Tabel Pihak Berelasi

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Obligasi Pemerintah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, Tagihan Derivatif, Surat Berharga yang Diterbitkan dan Pinjaman yang Diterima
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Bank Mandiri Taspen Pos	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain
PT BRI Agroniaga Tbk.	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang Diterbitkan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Indonesia Power	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-efek
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Timah (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT PP Properti Tbk.	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita Beton Precast Tbk.	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi, Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan surat berharga yang diberikan
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Permodalan Nasional Madani	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Wisma Seratus Sejahtera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Anugrah Bhumiarmaya S	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT PP Properti Jababeka Residen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Sinergi Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Commuter Property	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Rekayasa Engineering	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Wijaya Karya Krakatau	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Puspetindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Jasamarga Toll Road	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Inhutani IV	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jiwa Bringin dan Jiwa Sejahtera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT BNI Life Insurance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Jasaraharja Putera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
Perum Damri	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Infomedia Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Infomedia Solusi Humanika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Jasamarga Toll Road Operator	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT. Jasa Marga Toll Road Maintenance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan
PT PNM Ventura Syariah	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
Perum Jasa Tirta I	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Asuransi Asei Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Barata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT LEN Railway Systems	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Patra Trading	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Pos Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Peruri Digital Security	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Perseroan. Seluruh transaksi dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi dengan pihak lain. Perseroan menjamin bahwa seluruh transaksi bebas dari konflik kepentingan dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Berikut rincian realisasi transaksi pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan transaksi pihak berelasi dengan Manajemen Kunci.

**Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Karena Hubungan Kepemilikan Dengan Pemerintah Republik Indonesia**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
Aset		
Giro pada bank lain-neto	221.896	357.624
Penempatan pada BI dan bank lain-net	337	101.078
Efek-efek	2.082.560	2.126.461
Obligasi Pemerintah	56.287.751	11.053.601
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	200.000
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	17.218.144	17.289.222
Tagihan Akseptasi	196.071	487.052
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	76.006.759	31.615.038
CKPN dari pihak-pihak berelasi	(85.879)	(11.060)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi-neto	75.920.880	31.603.978
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	21,02%	10,14%
Liabilitas		
Simpanan nasabah	141.471.045	93.053.060
Liabilitas akseptasi	196.071	487.052
Surat-surat berharga yang diterbitkan	4.974.733	5.377.572
Pinjaman diterima	17.009.056	13.784.289
Pinjaman subordinasi	5.999.878	5.999.669
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	169.650.783	118.701.642
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	52,79%	44,05%

Uraian	2020	2019
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah	17.003	588.030
Tabungan Mudharabah	428.891	134.558
Deposito Mudharabah	5.341.952	2.034.644
Total dana syirkah untuk pihak-pihak berelasi	5.787.846	2.757.232
Persentase syirkah untuk pihak-pihak berelasi	29,17%	14,91%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		
Penempatan pada BI dan bank lain	1.410	18.351
Efek-efek	318.871	151.664
Obligasi Pemerintah	898.785	475.846
Simpanan Bank Lain	1.300	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.347
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.187.376	1.004.323
Total pendapatan bunga untuk pihak-pihak berelasi	2.407.742	1.653.531
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	9,59%	6,43%
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	4.922.168	4.762.165
Simpanan dari bank lain	1.300	-
Surat-surat Berharga	1.102.256	1.207.510
Pinjaman yang diterima	1.192.094	860.282
Pinjaman Subordinasi	534.242	273.167
Giro Mudharabah	927	4.978
Tabungan Mudharabah	6.064	3.792
Deposito Mudharabah	103.796	49.426
Total beban bunga untuk pihak-pihak berelasi	7.932.847	7.161.320
Persentase terhadap total beban bunga dan bagi hasil	48,56%	42,73%
Komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif		
Garansi yang diberikan	14.601	364.059
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	1,91%	18,12%

Tabel Transaksi Pihak Berelasi Dengan Manajemen Kunci

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
Aset		
Kredit yang diberikan	125.735	119.470
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(251)	(18)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	125.484	119.452
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	0,03%	0,04%
Liabilitas		
Simpanan nasabah	83.296	68.494
Kompensasi karyawan kunci	253.160	210.427
Total liabilitas dari manajemen kunci	336.456	278.921
Persentase terhadap total liabilitas	0,13%	0,10%

Uraian	2020	2019
Dana Syirkah Temporer		
Tabungan Mudharabah	1.969	2.019
Deposito Mudharabah	3.543	3.857
Total dana syirkah untuk pihak-pihak berelasi	5.512	5.876
Persentase syirkah untuk pihak-pihak berelasi	0,03%	0,03%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan	7.443	7.591
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,04%	0,03%
Beban Bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	171	3.182
Persentase terhadap total beban bunga dan bagi hasil	0,02%	0,02%
Beban gaji dan tunjangan		
Direksi	48.087	72.567
Dewan Komisaris	18.455	32.033
Karyawan Kunci	157.859	362.575
Total	224.401	467.175
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	7,53%	16,31%

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi

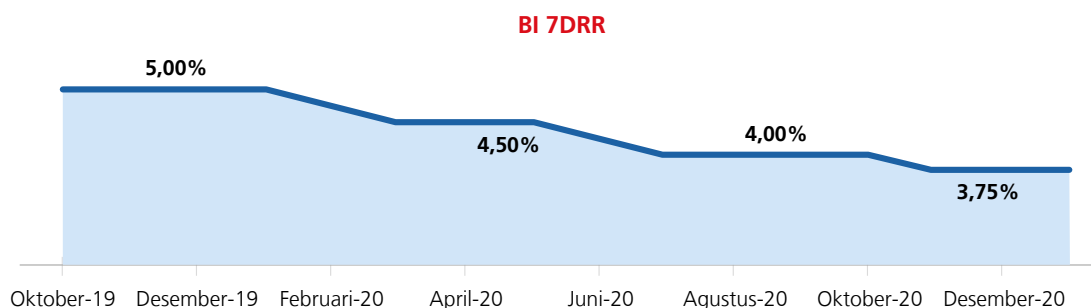
Seluruh transaksi telah melalui mekanisme *review* sesuai dengan jenis transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan transaksi antara lain analisis kredit untuk transaksi kredit kepada pihak berelasi. Demikian pula untuk transaksi investasi telah dilakukan analisis kelayakan investasi. Begitupula dengan transaksi pihak berelasi lainnya seperti garansi yang diterbitkan dan penempatan pada Bank lain.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang *prudent*. Seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

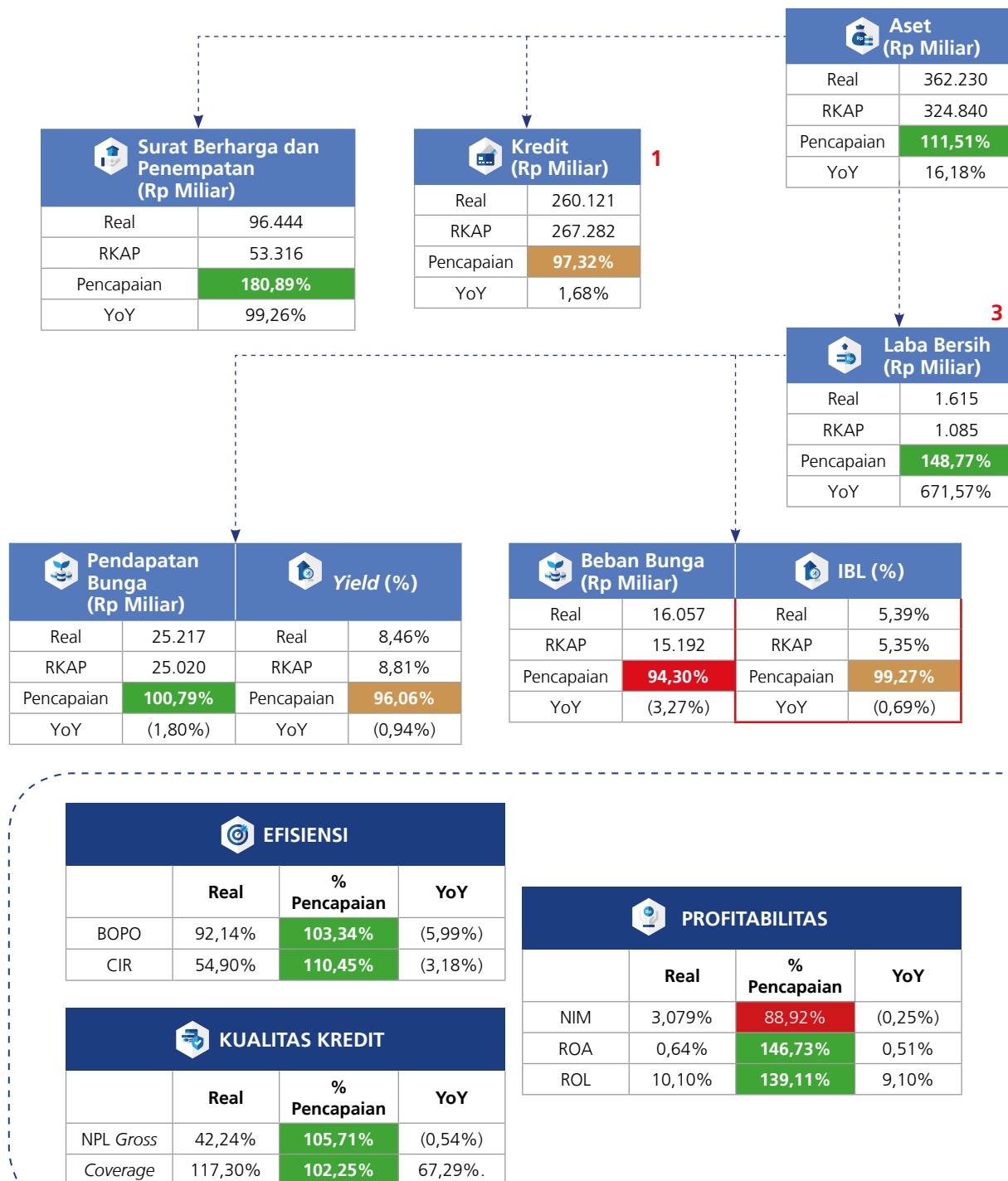
Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Perseroan

Sepanjang tahun 2020, suku bunga acuan terus bergerak turun sehingga suku bunga dana di *market* juga bergerak turun didorong oleh penurunan suku bunga acuan BI dan kondisi likuiditas di *market* yang semakin longgar. Berikut adalah data pergerakan suku bunga acuan BI 7 DRR sampai dengan Desember tahun 2020.



Perubahan suku bunga dan kondisi likuiditas di *market* menimbulkan dampak positif bagi *Cost of Fund* (CoF) Perseroan. CoF Perseroan pada Desember 2020 turun sebesar 0,69% (YoY).

Paparan Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Desember 2020^{*)}



^{*)} Unaudited

2

DPK (Rp Miliar)	
Real	279.135
RKAP	244.288
Pencapaian	114,26%
YoY	23,84%

Funding Lainnya (Rp Miliar)	
Real	49.847
RKAP	52.235
Pencapaian	95,43%
YoY	(7,21%)

Fee Bersih (Rp Miliar)	
Real	2.087
RKAP	2.070
Pencapaian	100,83%
YoY	0,36%

4

Beban CKPN (Rp Miliar)	
Real	2.158
RKAP	3.061
Pencapaian	129,49%
YoY	(38,11%)

5

Overhead Cost (Rp Miliar)	
Real	7.316
RKAP	7.605
Pencapaian	103,80%
YoY	1,85%

6

LIKUIDITAS			
	Real	% Pencapaian	YoY
CASA	41,11%	94,67%	(2,25%)
LDR	93,19%	114,83%	(20,31%)

PERMODALAN			
	Real	% Pencapaian	YoY
CAR	19,32%	115,63%	2,00%

Suku Bunga Dasar Kredit

Perseroan secara berkala memperbaharui SBDK sesuai dengan pergerakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan transformasi SBDK untuk memberikan kejelasan dan memudahkan nasabah dalam mempertimbangkan manfaat, biaya dan risiko kredit. SBDK juga meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

(dalam %)

Periode	Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2020	9,90%	9,90%	n/a	9,95%	11,25%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2019	11,00%	11,25%	n/a	10,75%	11,50%

Kualitas Aset Produktif

Perseroan memiliki komitmen menjaga kualitas aset produktif ditengah ekspansi kredit dan bisnis perbankan lainnya. Rincian kualitas aset produktif Perseroan disajikan sebagai berikut.

Tabel Kualitas Aset Produktif Tahun 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos - Pos	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.					
		31 Desember 2020					
		Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Jumlah
1.	Penempatan Pada Bank Lain	3.215.667	-	-	-	1.799	3.217.466
2.	Tagihan <i>Spot</i> dan Derivatif/ <i>Forward</i>	70.386	-	-	-	-	70.386
3.	Surat Berharga yang Dimiliki	59.023.291	27.901	7.645	69.846	365.034	59.493.717
4.	Surat Berharga yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (<i>Repo</i>)	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	954.955	-	-	-	-	954.955
6.	Tagihan Akseptasi	196.071	-	-	-	-	196.071
7.	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan yang Diberikan	289.525.748	25.339.184	1.300.718	897.369	15.715.473	332.778.492
8.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan Kontinjensi	13.501.230	119.240	24.739	16.598	188.827	13.850.634
11.	Agunan yang Diambil Alih	-	-	-	-	-	77.591

	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.					
	31 Desember 2019					
	Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Jumlah
	1.386.987	-	-	-	1.632	1.388.619
	-	-	-	-	-	-
	17.417.831	60.632	6.070	6.432	64.781	17.555.746
	1.071.864	-	-	-	-	1.071.864
	1.875.221	-	-	-	-	1.875.221
	974.104	-	-	-	-	974.104
	227.252.369	37.053.750	5.028.369	2.295.692	11.116.064	282.746.244
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	15.690.188	1.800.299	250.322	126.791	90.304	17.957.904
	-	-	-	-	-	77.591

Tabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2020				
		CKPN			PPKA Wajib Dibentuk	
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus
1.	Penempatan Pada Bank Lain	9	-	1.799	230.458	1.799
2.	Tagihan <i>Spot</i> dan Derivatif/ <i>Forward</i>	-	-	-	704	-
3.	Surat Berharga yang Dimiliki	-	-	2.000	27.355	402.498
4.	Surat Berharga yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (<i>Repo</i>)	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	1.393	-	-	1.961	-
7.	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan yang Diberikan	3.795.228	3.414.937	5.850.778	2.173.778	6.040.875
8.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
9.	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan Kontinjensi	6.489	-	-	13.995	5.962

Tabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

NO	Pos-Pos	31 Desember 2019			
		CKPN		PPKA Wajib Dibentuk	
		Individual	Kolektif	Umum	Khusus
1.	Penempatan Pada Bank Lain	1.625	7	8.490	1.625
2.	Tagihan <i>Spot</i> dan Derivatif/ <i>Forward</i>	-	-	-	-
3.	Surat Berharga yang Dimiliki	2.000	25.378	27.158	71.939
4.	Surat Berharga yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (<i>Repo</i>)	-	-	-	-
5.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	-	-	4.871	-
7.	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan yang Diberikan	3.978.472	2.137.694	2.158.247	5.241.954
8.	Penyertaan Modal	270	-	-	270
9.	Tagihan Lainnya	-	-	-	-
10.	Komitmen dan Kontinjensi	-	-	20.926	90.631

Aspek Perpajakan

Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada Negara sekaligus menunaikan kewajiban terkait perpajakan. Berikut disampaikan kontribusi Perseroan melalui pembayaran pajak di tahun 2019-2020.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh)

Uraian Pajak	Tahun 2020	Tahun 2019
Pajak Penghasilan (PPh Badan)	341.465.927.000	590.026.490.800
PPh 21 Perorangan	257.990.626.669	264.042.095.496
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24.152.640.627	17.366.799.311
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan	9.797.188.881	12.028.977.874
Pajak Lainnya	1.625.526.082.591	1.655.702.144.770
Total	2.258.932.465.768	2.539.166.508.251

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perseroan

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Dampak Terhadap Perseroan	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan Perseroan
1.	Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasionaional (PEN).	Penunjukan Jamkrindo dan Askrindo sebagai Penjaminan Pemerintah.	Adanya jaminan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman Modal Kerja yang diberikan. Berdampak signifikan bagi seluruh Perbankan Indonesia termasuk Perseroan, karena PP ini Pemerintah menjamin kredit-kredit oleh sektor UMKM dan korporasi yang terdampak COVID-19 melalui program PEN sehingga hal ini menjadi dasar bagi Perseroan dalam melakukan tindak lanjut atas kredit-kredit terdampak COVID-19 tersebut.	Penerbitan SE 31/SE/DIR/SMBD/2020 Perihal Penjaminan Kredit Modal Kerja Program pemulihan Ekonomi Nasional.
2.	POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Sebagaimana diubah terakhir dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Corona virus Disease</i> 2019.	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	Kebijakan restrukturisasi untuk debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan tentang restrukturisasi untuk debitur terdampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap NPL Perseroan dan pembentukan CKPN Perseroan.	Penerbitan Surat Edaran dan Surat Keputusan perihal Petunjuk Pelaksanaan Restrukturisasi Bagi Debitur Yang Terdampak Pandemi COVID-19, yaitu SE No. 12/SE/DIR/PPBD/2020 perihal Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Penyebaran <i>Corona virus Disease</i> 2019 (COVID-19) yang telah dicabut dan digantikan dengan SE No. 28/SE/DIR/PPBD/2020 dan SK No. 06/SK/DIR/CRSD/2020, 31/SK/DIR/CRSD/2020, 19/SK/DIR/PPBD/2020, dan 16/SK/DIR/PPBD/2020.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Dampak Terhadap Perseroan	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan Perseroan
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.	Perseroan membuat ketentuan internal mengenai Kredit Modal Kerja (KMK) PEN. Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan.	Penerbitan Surat Edaran No. 31/SE/DIR/SMBD/2020 perihal Penjaminan Kredit Modal Kerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Keputusan No. 17/SK/DIR/SMBD/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kredit Modal Kerja Program Pemulihan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan", memperkenalkan persyaratan baru untuk klasifikasi, pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Kebijakan akuntansi yang terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan diamandemen untuk memenuhi standar. Sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar, perbandingan tidak disajikan kembali dan dampak keuangan dari penerapan standar diakui dalam laba ditahan.
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan."
- PSAK 73: "Sewa". PSAK 73 disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

Perseroan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif dengan dampak kumulatif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo awal 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Perseroan meliputi:

1. Aset hak guna
Adopsi PSAK 73 menghasilkan pembayaran sewa minimum Perseroan di masa depan berdasarkan sewa yang tidak dapat dibatalkan untuk diakui sebagai liabilitas sewa yang disesuaikan dengan aset hak guna.
2. Liabilitas Sewa
Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan dan didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman *inkremental lessee* pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman *inkremental lessee* yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 7,27%.

Kategori sewa berikut ini diidentifikasi, di mana sebagai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2020, kontrak yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa operasi, sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru.

Pengaruh dari adopsi PSAK 71 dan PSAK 73 pada awal penerapan adalah, sebagai berikut:

Tabel Pengaruh dari Adopsi PSAK 71 dan PSAK 73

(dalam jutaan Rupiah)

Akun	Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan pada PSAK 55	Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan pada PSAK 71	Sebelum Penyesuaian	1 Januari 2020 Efek dari Penyesuaian Transisi Penerapan Awal PSAK No. 71 dan PSAK No. 73	Setelah Penyesuaian
Aset					
Aset-bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai					
Kas			1.369.167	-	1.369.167
Giro pada Bank Indonesia	Kredit dan Piutang	Biaya Perolehan Diamortisasi	15.512.329	-	15.512.329
Giro pada Bank Lain			747.869	(37)	747.832
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain			11.097.193	-	11.097.193
	Diperdagangkan	Nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4.189.398	710.795	4.900.193
Efek-efek	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	2.615.895	(559.081)	2.056.814
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Diamortisasi	1.279.378	(158.056)	1.121.322
	Diperdagangkan	Nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.232.204	-	1.232.204
Obligasi Pemerintah	Tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	6.147.729	-	6.147.729
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Diamortisasi	3.673.668	-	3.673.668
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Diamortisasi	1.875.221	-	1.875.221
Kredit yang diberikan	Kredit dan piutang	Biaya Perolehan Diamortisasi	226.786.631	(7.603.512)	219.183.119
Tagihan akseptasi	Kredit dan piutang	Biaya Perolehan Diamortisasi	487.052	(1.346)	485.706
Penyertaan saham	Kredit dan piutang	Nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-
Aset hak guna			-	424.485	424.485
Aset lain-lain	Kredit dan piutang	Biaya Perolehan Diamortisasi	2.600.197	(223.450)	2.376.747
Liabilitas					
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi			-	2.705	2.705
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain			5.736.637	300.520	6.037.157

Akun	Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan pada PSAK 55	Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan pada PSAK 71	Sebelum Penyesuaian	1 Januari 2020 Efek dari Penyesuaian Transisi Penerapan Awal PSAK No. 71 dan PSAK No. 73	Setelah Penyesuaian
Ekuitas					
Keuntungan (kerugian) yang Belum direalisasi atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain -Neto			11.460	112	11.572
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya			12.995.994	(7.713.539)	5.282.455

- PSAK No. 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas Tentang Prakarsa Pengungkapan", mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan Tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Untuk Rugi Yang Belum Direalisasi", mengklarifikasi:
 - Bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan.
 - Bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.
 - Bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut.
- Bahwa beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar bahwa entitas akan mencapai hal tersebut.
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur *investee-nya* pada nilai wajar atas dasar investasi per investasi.
- PSAK No. 53 (Amendemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham, Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham", bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK No. 111, "Akuntansi *Wa'd*", mengatur entitas yang memberi atau menerima *wa'd* tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd* ketika menjadi akad. PSAK No. 111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan *wa'd* pada transaksi lindung nilai dan *repo* syariah.

Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat Kesehatan Perseroan Mencerminkan Hasil Penilaian Kondisi Perseroan Yang Dilakukan Terhadap Risiko dan Kinerja Perseroan Yang Dapat Dilihat Dari Peringkat Akhir Hasil Penilaian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Dengan Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk - Based Bank Rating*) yang mencakup 4 (Empat) Faktor Yaitu:

1. Profil Risiko
2. Tata Kelola
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*).

Peringkat Kesehatan Perseroan Posisi Desember 2020 (*Self Assessment*) berada pada peringkat komposit 2 (dua) yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Meskipun terdapat ketidakpastian terhadap kondisi makro ekonomi baik di Indonesia maupun global yang terutama disebabkan oleh virus COVID-19, dengan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan serta

inovasi yang berkesinambungan, perubahan kondisi tersebut dapat diakomodir dengan baik oleh Perseroan. Dengan melakukan berbagai inisiatif strategi yang tepat, kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Assessment Manajemen Atas Hal-Hal Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Aseesment atas kelangsungan usaha Perseroan dilakukan melalui analisis *Strenght Weakness Opportunity Threat* (SWOT) dan Matriks *Threat Opportunity Weakness Strenght* (TOWS) yang disusun pada Rencana Bisnis Perseroan (RBB) Tahun 2020 – 2022 yang dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika ekonomi makro yang berdampak terhadap perubahan asumsi makro, isu eksternal yang mempengaruhi bisnis Perseroan, *positioning* Perseroan di antara Top 10 (Ten) Perbankan Nasional dan potret kinerja. Secara rinci, analisis SWOT dan Matriks TOWS Perseroan adalah sebagai berikut:

ANALISIS SWOT



Memperhatikan analisis SWOT tersebut di atas, telah disusun analisis TOWS yang menggambarkan *Growth Strategy* (*Strength – Opportunity*), *Combination Strategy* (*Strength – Weakness*), *Stability Strategy* (*Weakness – Opportunity*), dan *Sustainable Strategy* (*Weakness – Threat*) sebagai berikut.

ANALISIS TOWS



Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assesment

Strategi yang telah disusun berdasarkan analisis SWOT akan berjalan dengan baik dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang mulai membaik dengan rencana vaksinasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi bulan September 2020 tumbuh positif 5,05%, secara *Quarter to Quarter* (QtQ).
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi Pemerintah untuk mendukung kebijakan insentif usaha, program kesehatan, usaha korporasi, UMKM dan perlindungan sosial.
- *Positioning* yang kuat pada bisnis perumahan, terutama segmen subsidi dan *middle income*.
- Kinerja keuangan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.
- Tingkat Kesehatan Perseroan pada komposit 2 (dua), dengan kualifikasi sehat.

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Respon yang dilakukan Perseroan atas kebijakan moneter BI yang menurunkan suku bunga acuan BI serta memperhatikan kondisi likuiditas di *market* yang semakin longgar antara lain dengan kebijakan *pricing* suku bunga dana dan kredit sebagai berikut:

- 1. Penurunan suku bunga maksimum Deposito sepanjang tahun 2020**
 - a. Suku bunga deposito *counter rate* turun sebesar ± 150 bps
 - b. Suku bunga deposito *special rate* turun sebesar ± 225 bps.
- 2. Penurunan suku bunga *promo* dan *counter* kredit sepanjang tahun 2020**
 - a. KPR/KPA turun sebesar $\pm 70-120$ bps
 - b. Kredit Komersial BUMN
 - Kredit Investasi : turun sebesar ± 49 bps
 - KMK Kontraktor : turun sebesar ± 74 bps
 - Kredit Yasa Griya (KYG) : turun sebesar ± 65 bps
 - c. Kredit KUMK
 - KMK Kemitraan *bowhewer* BUMN: turun sebesar ± 75 bps
 - KMK Kemitraan *bowhewer* Non BUMN: turun sebesar ± 25 bps
- 3. Penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sepanjang tahun 2020**
 - a. Kredit Korporasi turun sebesar ± 110 bps
 - b. Kredit Ritel turun sebesar ± 135 bps
 - c. Kredit Konsumsi KPR turun sebesar ± 80 bps
 - d. Kredit Konsumsi Non KPR turun sebesar ± 25 bps

Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan memiliki *Standar Operating Prosedur* (SOP) terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar serta Penyediaan Dana Kepada Pihak Lain serta Surat Edaran Direksi Nomor 55/SE/DIR/CMLD/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Dalam Penyediaan dana kepada peminjam maupun kelompok peminjam, pihak terkait maupun selain pihak terkait dan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan, Perseroan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat penyediaan dana tersebut, oleh karenanya Perseroan harus memiliki kemampuan untuk mengelola konsentrasi portofolio penyediaan dana kepada peminjam maupun kelompok peminjam dimaksud.

Selain bentuk-bentuk penyediaan dana yang telah dikenal, berkenaan dengan pesatnya perkembangan perbankan terkini dengan munculnya produk-produk penyediaan dana yang inovatif, Perseroan harus mengembangkan teknik pengukuran terhadap beberapa bentuk risiko konsentrasi yang timbul dari penyediaan dana. Hal ini khususnya terdapat pada bentuk penyediaan dana tidak langsung ataupun penyediaan dana yang dikaitkan dengan tagihan yang diperkuat dengan jaminan ataupun agunan dalam berbagai bentuk.

Perseroan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, termasuk penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki

kepentingan terhadap Perseroan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaannya dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) disesuaikan dengan kemampuan permodalan Perseroan, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada peminjam atau kelompok tertentu. Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan antara lain pejabat atau pegawai Perseroan beserta keluarganya.

Kebijakan, pedoman dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan yang signifikan. Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur dan penetapan risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Tabel Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	-	-
2	Kepada 50 Debitur Inti *)	176	27.771.820
	a. <i>Single Debt</i>	45	13.774.399
	b. <i>Group</i>	131	13.997.421

*) Seluruh debitur kredit komersial

Transaksi Derivatif

Berikut adalah ikhtisar transaksi derivatif Perseroan tanggal 31 Desember 2020.

Tabel Ikhtisar Transaksi Derivatif tanggal 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Transaksi	Nilai Wajar		
	Nilai Kontrak (absolut setara Rupiah)	Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif
Pihak Berelasi			
Terkait nilai tukar			
1 Kontrak berjangka - beli	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
2 Kontrak berjangka - jual	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
3 <i>Swap</i> - beli	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
4 <i>Swap</i> - jual	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
5 <i>Option</i> - beli	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
Lain-lain (CCS)	2.138.250	188.663	20.332
Terkait suku bunga			
1 <i>Swap</i> - Suku Bunga	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
Total Pihak Berelasi	2.138.250	188.663	20.332

Transaksi	Nilai Wajar		
	Nilai Kontrak (absolut setara Rupiah)	Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif
Pihak Ketiga			
Terkait nilai tukar			
1 Kontrak berjangka - beli	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
2 Kontrak berjangka - jual	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
3 Swap - beli	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
4 Swap - jual	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
5 Option - beli	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
Lain-lain	-	-	-
Terkait suku bunga			
1 Swap - Suku Bunga	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	-	-	-
Total Pihak Ketiga	-	-	-
Total	2.138.250	188.663	20.332

Human Capital







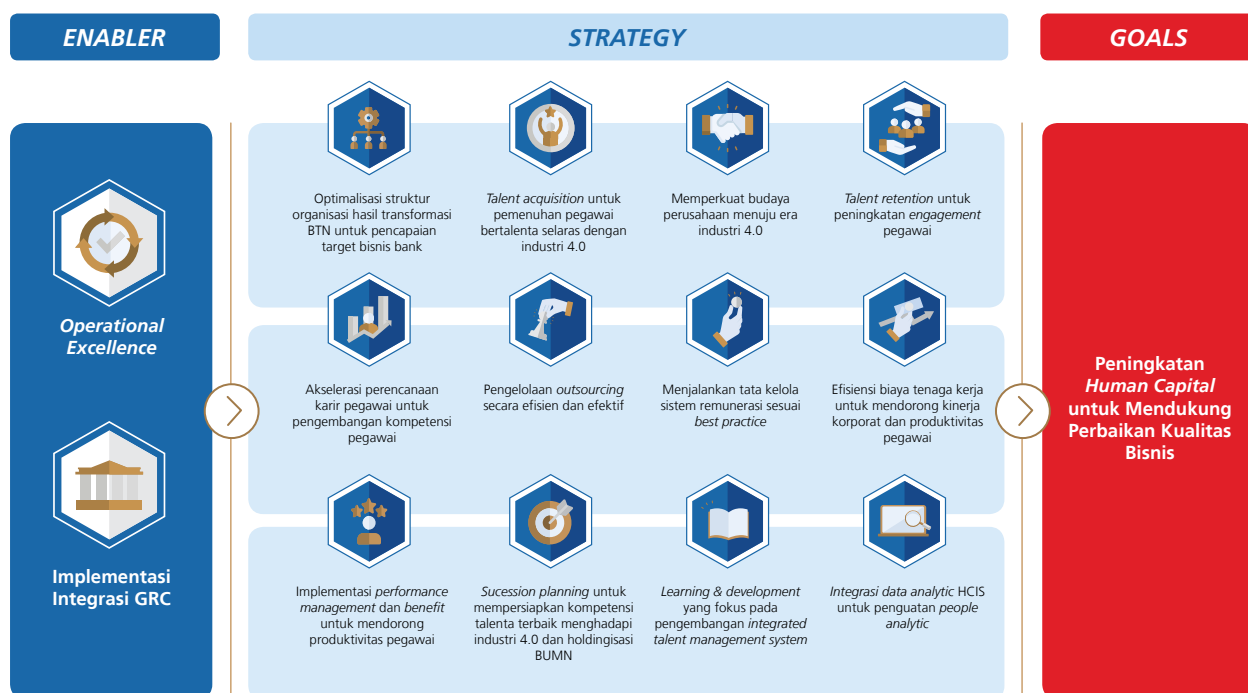
Perseroan memandang *Human Capital* (HC) sebagai faktor terpenting dalam mencapai keunggulan bersaing sekaligus memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam kegiatan usaha Perseroan. Industri perbankan yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan pelayanan membutuhkan kompetensi, integritas dan profesionalisme di seluruh unsur usaha. Pengelolaan *Human Capital* yang baik menjadi fondasi dalam menggerakkan kinerja Perseroan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Karena itu, Perseroan secara serius menempatkan *Human Capital* sebagai mitra strategis dalam menjalankan kegiatan usaha. Perseroan menjalankan strategi pengelolaan *Human Capital* dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk merespon tantangan dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan industri Perbankan yang dinamis, termasuk di dalamnya menjadi yang terdepan dalam *digital banking*. Selain itu, Perseroan juga senantiasa melakukan pengelolaan *Human Capital* sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah disusun mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Melalui Direktorat Human Capital, Legal and Compliance, Perseroan menyelenggarakan organisasi yang efektif dan efisien dengan memperhatikan beberapa faktor mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, sistem manajemen kinerja, disain jabatan dan karir, remunerasi dan *benefit*, analisis produktivitas serta hal terkait lainnya dengan *Human Capital*. Direktorat tersebut dipimpin oleh Direktur Human Capital, Legal and Compliance sebagaimana diatur dalam Ketetapan Direksi No. 01/KD/DIR/PPBD/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan *Human Capital*, Direktorat Human Capital, Legal and Compliance menjalankan melalui tiga Divisi yaitu Human Capital Management, Human Capital Strategy dan Learning Center Division.

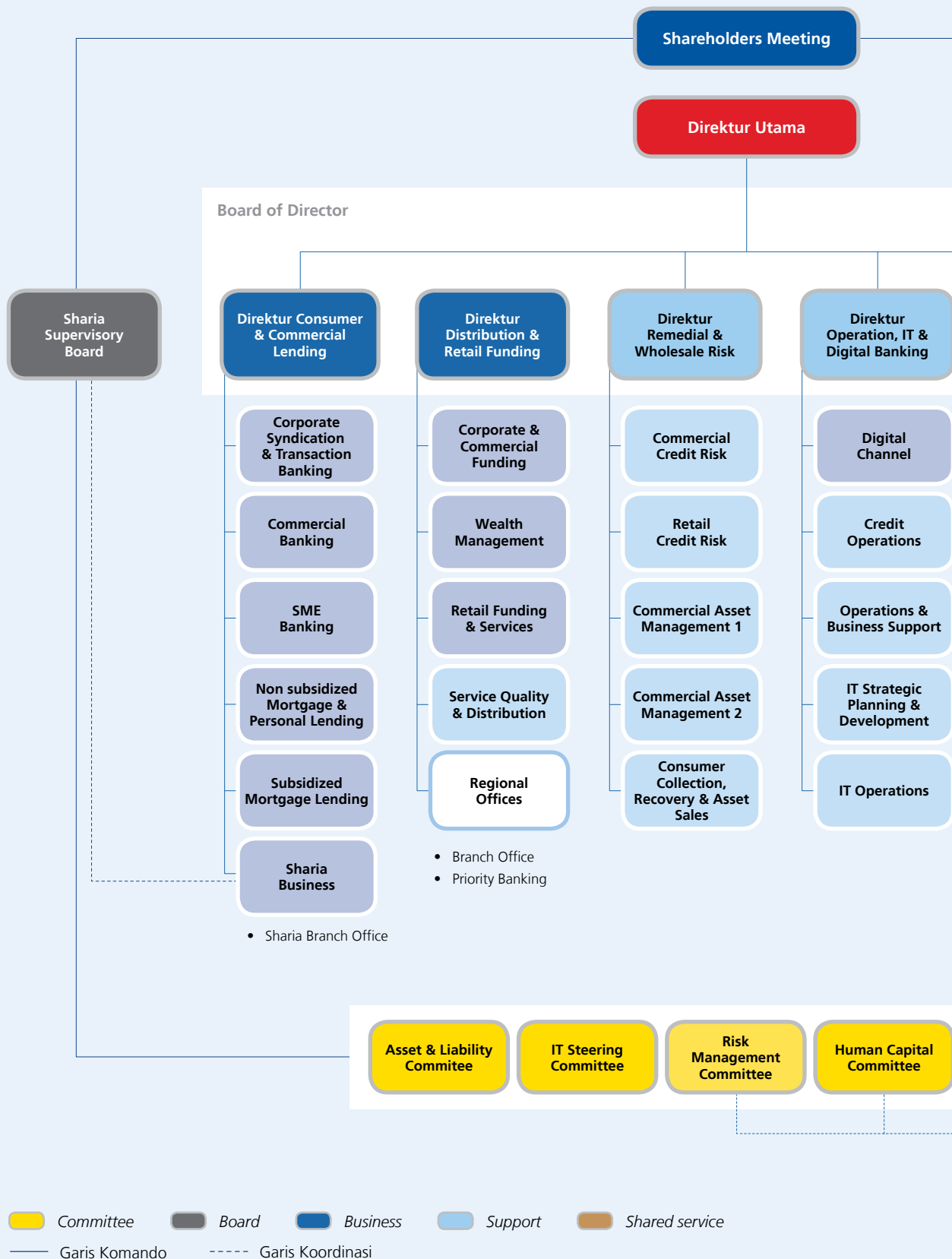
Kerangka Strategi Human Capital

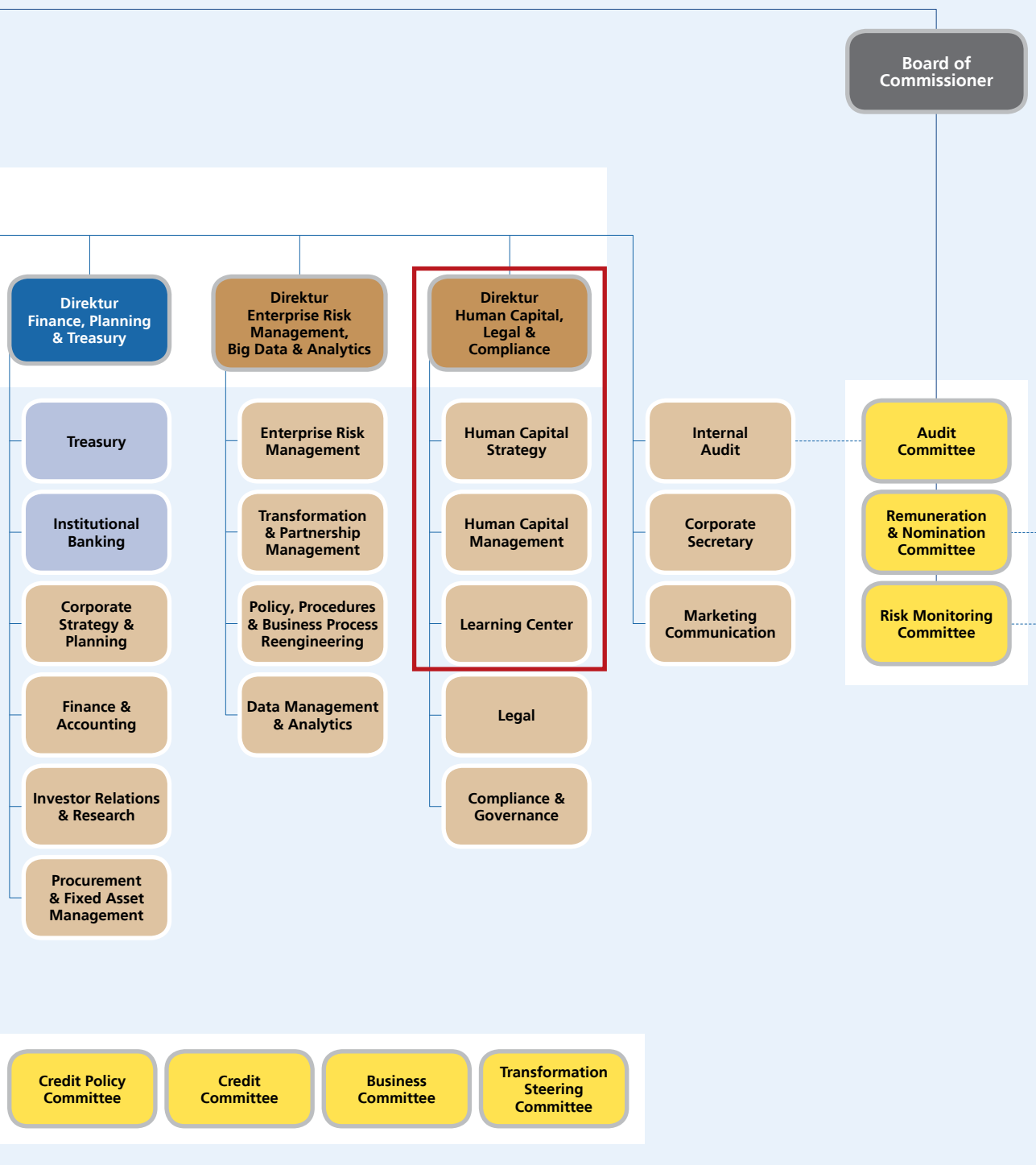
Road Map Strategic Human Capital tahun 2020 mencakup seluruh proses pengelolaan HC dalam menghadapi era Industri 4.0 dan rencana holdingisasi BUMN.



Profil Direktorat Human Capital

Direktorat Strategic Human Capital dipimpin oleh Direktur Human Capital, Legal & Compliance dan terdiri dari tiga Divisi yaitu Human Capital Management Division, Human Capital Strategy Division dan Learning Center Division. Masing-masing Divisi dalam Direktorat Strategic Human Capital memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan Human Capital baik organik maupun outsourcing.





Human Capital Strategy Division (HCSD) bertanggung jawab untuk mengelola strategi pengembangan dan pengelolaan organisasi serta human capital untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Mengembangkan strategi dan kebijakan terkait *human capital* untuk memenuhi kebutuhan pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.
- Mengembangkan strategi dan kebijakan terkait struktur organisasi, termasuk penentuan *job grading*, *job description* dan *role charter*, serta *manpower planning*, untuk memenuhi kebutuhan pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.
- Mengembangkan strategi dan kebijakan terkait career path, talent management dan *succession planning* untuk memenuhi kebutuhan pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.
- Mengembangkan strategi dan kebijakan terkait budaya perusahaan dan program *Employee Engagement* beserta *monitoring* efektivitas budaya perusahaan untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.

Human Capital Management Division (HCMD) bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan pelaksanaan strategi pengelolaan human capital management untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis BTN di antaranya yaitu:

- Mengelola dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penentuan struktur gaji dan kompensasi serta *review* tahunan untuk memastikan pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan aspek *Human Capital*.
- Mengelola dan mengawasi program rekrutmen, baik internal, *pro hire* dan *outsourcing*, untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
- Menjadi wakil perusahaan dalam pengelolaan hubungan dengan pekerja untuk memastikan alignment antara ekspektasi perusahaan dan ekspektasi pekerja.
- Mengelola dan mengawasi operasional proses *on boarding* karyawan baru, pembayaran gaji dan kompensasi, dan administrasi informasi karyawan dalam manajemen sistem informasi untuk mendukung operasional bisnis.
- Mengkoordinasikan interaksi dengan kantor wilayah terkait kinerja (*performance*), pemenuhan kebutuhan SDM (rekrutmen), perencanaan karir, dan pelatihan (*training*), untuk memenuhi kebutuhan bisnis kantor cabang per wilayah.

Learning Center Division (LCD) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memastikan pelaksanaan strategi pengembangan *human capital* Perseroan termasuk di dalamnya merencanakan, menganalisis, mendesain, menyusun strategi, mengembangkan, memberikan *learning solution*, mengkomunikasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional *training*, fasilitas, penyusunan *budget*, *database* and *reporting* termasuk *learning program monitoring and evaluation* untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai perusahaan.
- Mengelola dan mengawasi pengembangan kurikulum dan pelaksanaan *training* terkait *leadership*, bisnis dan *sharia*, kredit dan risiko, penjualan dan pelayanan serta pendukung kegiatan bisnis termasuk pengembangan program sertifikasi untuk setiap *role* berdasarkan kurikulum *school* untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai.
- Merumuskan *learning solution* berdasarkan *corporate culture*, *learning needs*, sumber lain yang dibutuhkan (internal dan eksternal) yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- Membangun kerjasama dengan berbagai pihak profesional, baik asosiasi profesi, regulator, lembaga riset, perguruan tinggi, dan *benchmarking* serta nara sumber profesi lainnya dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan.
- Memastikan hasil proses belajar-mengajar memberikan nilai tambah baik dari aspek peningkatan *knowledge* (L2), perubahan perilaku (L3) dan produktivitas Unit Kerja (L4) secara selektif dan memenuhi prinsip-prinsip *governance*, ketentuan Perseroan, regulasi dan prinsip *learning and development*.
- Merencanakan strategi pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan dan memastikan *delivery* yang efektif serta efisien untuk mendukung pencapaian target bisnis.
- Membangun peranan Learning Center Division sebagai *Center of Knowledge* yang terkait dengan *industry knowledge* dan berbagai proses pembelajaran.

Strategi Human Capital —

1. Optimalisasi Struktur Organisasi Hasil Transformasi Perseroan untuk Pencapaian Target Bisnis

Mendukung implementasi transformasi struktur organisasi yang *agile* dan berkapabilitas tinggi untuk pencapaian target bisnis Perseroan dengan me-review struktur organisasi, *job description*, *job specification*, *job grading*.

2. Talent Acquisition untuk Pemenuhan Pegawai Bertalenta Selaras dengan Industri 4.0

- Melakukan analisis beban kerja Pegawai yang mengacu pada peningkatan produktifitas pegawai.
- Melaksanakan program rekrutmen (reguler dan non reguler) yang fokus pada pemenuhan pegawai era industri 4.0.
- Melaksanakan program *positioning* Perseroan untuk lingkup pencari kerja (*survey*, *website blast*, *job fair*, media sosial, *campus sharing* dan lainnya).
- Perbaikan kualitas rekrutmen pegawai secara menyeluruh.

3. Pengelolaan Outsourcing Secara Efisien dan Efektif

- Melakukan pengelolaan anggaran dan kuantitas tenaga *outsourcing* non tenaga dasar secara efektif dan efisien.
- Perbaikan dan pembenahan *database outsourcing* non tenaga dasar secara kontinyu.
- Evaluasi *vendor outsourcing* non tenaga dasar secara selektif.
- Melakukan rekrutmen *outsourcing* non tenaga dasar sesuai kebutuhan.
- Peningkatan kompetensi pengelolaan tenaga *outsourcing* bagi GA/PIC di Kantor Cabang.
- Melakukan analisis beban kerja Tenaga Ahli Daya yang mengacu kepada peningkatan produktivitas pegawai.
- Melakukan Evaluasi/Review Kebijakan terkait pengelolaan Tenaga Ahli Daya.

4. Learning and Development yang Fokus pada Pengembangan Integrated Talent Management System

- Optimalisasi proses *learning and development* dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan *hard* dan *soft competency* pegawai.
- Optimalisasi *learning solution and knowledge management system* serta aplikasi DREAM untuk mendukung proses *e-learning and development*.

5. Talent Retention untuk Peningkatan Engagement Pegawai

- Melaksanakan program retensi pegawai.
- Implementasi *feedback* atas *Employee Engagement Satisfaction Index* 2019.
- *Monitoring Know Your Employee* (KYE) secara tersistem.
- Pelaksanaan *ER summit* kepada DSM dan Operation Manager.
- *Reenergizing* EVP Perseroan dengan cara melakukan evaluasi terhadap elemen dan *tagline* EVP Perseroan.
- Menyelenggarakan *Employee Engagement Event and Activity* sebagai upaya peningkatan *Employee Engagement Index* 2020.

6. Akselerasi Perencanaan Karir Pegawai untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai

- Melakukan program akselerasi perencanaan karir (rotasi dan promosi) secara terjadwal dan terstruktur.
- Implementasi *Talent Management System* (TMS) secara optimal.
- Peningkatan *knowledge* pegawai terhadap manajemen karir.
- Penyusunan kebijakan *Profile Match-Up/Talent Readiness*.

7. Sucession Planning untuk Mempersiapkan Kompetensi Talenta Terbaik Menghadapi Industri 4.0 dan Holdingisasi BUMN

- Implementasi perencanaan suksesi atau *top talent* secara optimal untuk pemenuhan pegawai pada jabatan kunci.
- Mempersiapkan jalur *talent mobility* dengan anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi.
- Melakukan *talent profiling* pegawai melalui program *assessment* sesuai dengan kompetensi 4.0.
- Mengembangkan kompetensi talent untuk program holdingisasi BUMN.
- Melaksanakan *feedback session* atas hasil *assessment* pegawai.
- Penyempurnaan kebijakan pemetaan *talent* dan perencanaan suksesi.
- Implementasi program *assessment online* pegawai melalui ASTONIA untuk mendukung digitalisasi Bank.

8. Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Untuk Mendorong Kinerja Korporat dan Produktivitas Pegawai

- Alokasi biaya tenaga kerja seluruh unit kerja secara tepat waktu dan tepat guna.
- *Monitoring* realisasi biaya tenaga kerja secara rutin dan terjadwal.
- Program peningkatan *awareness* pegawai terkait efisiensi biaya tenaga kerja dan produktivitas secara kontinu.

9. Menjalankan Tata Kelola Sistem Remunerasi Sesuai *Best Practice*

- Me-review kebijakan remunerasi dengan memperhatikan praktek di pasar (market) dan berkeadilan (*fairness*) antara lain rekomposisi gaji pegawai dan tunjangan regional/kemahalan.
- Penyempurnaan kebijakan kompensasi variabel (Jasa Produksi) yang berpedoman pada prinsip memberikan motivasi, adil, konsisten, transparan, dan selaras dengan bisnis Perseroan.
- Penyusunan kebijakan manfaat kesehatan pasca kerja dan Tunjangan Hari Tua bagi peserta PPIP.

10. Memperkuat Budaya Perusahaan Menuju Era Industri 4.0

- Implementasi Aktivitas Program Budaya 2020.
- Melaksanakan *Change Agent and Change Leader* Forum 2020.
- Melakukan Evaluasi/Review Program Budaya 2020.
- Menyelenggarakan *Innovation Awards* 2020.

11. Implementasi *Performance Management* dan *Benefit* Untuk Mendorong Produktivitas Pegawai

- Program individual *incentive* untuk *benefit* dan produktivitas pegawai segmen bisnis.
- Implementasi *performance management system* (PMS) untuk SMK 2020 secara akurat dan tepat waktu.

- Sinkronisasi *Key Performance Individu* (KPI) Individu secara kontinu untuk pencapaian target korporat dan produktivitas pegawai.
- *Review* dan penyesuaian *compensation and benefit* pegawai dan eksekutif untuk menghadapi holdingisasi BUMN.
- Mengembangkan skema remunerasi *talent mobility* dengan anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi secara efektif dan efisien.
- Implementasi program kesehatan pasca kerja bagi pegawai peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

12. Integrasi *Data Analytic* HCIS Untuk Penguatan *People Analytic*

- Pengembangan *Human Capital Information System* (HCIS) atas implementasi transformasi *Strategic Human Capital*.
- *Enhancement* sistem *surrounding* HCIS (B-Gate dan lainnya).
- *Crash* program digitalisasi arsip kepegawaian.
- Optimalisasi penggunaan data *analytic* modul HCIS.
- Sosialisasi *roll out* sistem HCIS ke unit kerja (*all modul*).

13. Implementasi integrasi *Governance, Risk, and Compliance* dan *Operational Excellence*

- Melaksanakan proses penyelesaian klaim *benefit* pegawai secara tepat waktu.
- Penyelesaian laporan eksternal secara tepat waktu.
- Penyelesaian temuan audit secara tepat waktu.

Pengembangan Organisasi —

Manpower Planning

Perseroan menerapkan rancangan organisasi serta jumlah pegawai yang efektif dan efisien agar selaras dengan strategi serta sasaran bisnis jangka pendek dan jangka Panjang dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko melalui penyusunan *Manpower Planning* setiap tahun. Di tahun 2020, *Manpower Planning* disusun secara efektif dan efisien dengan berbasiskan pada produktivitas pegawai. *Manpower Planning* melibatkan seluruh unit kerja untuk mengidentifikasi jumlah dan kebutuhan rekrutmen pegawai, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kinerja sesuai dengan standar formasi dalam mendukung pelaksanaan strategi bisnis Perseroan. Proses ini ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan pertumbuhan bisnis dan kondisi Perseroan.

Manajemen Human Capital —

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Sesuai dengan arahan Direksi dan melihat situasi Pandemi COVID-19 di tahun 2020, Direksi memutuskan agar proses rekrutmen di tahun 2020 mengarah pada *zero growth* dan *zero recruitment*. Rekrutmen dilakukan hanya untuk posisi-posisi tertentu yang *urgent* sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan organisasi. Selama tahun 2020, telah direkrut pegawai sebanyak 15 pegawai untuk posisi-posisi strategis dan memiliki keahlian-keahlian serta kriteria khusus.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

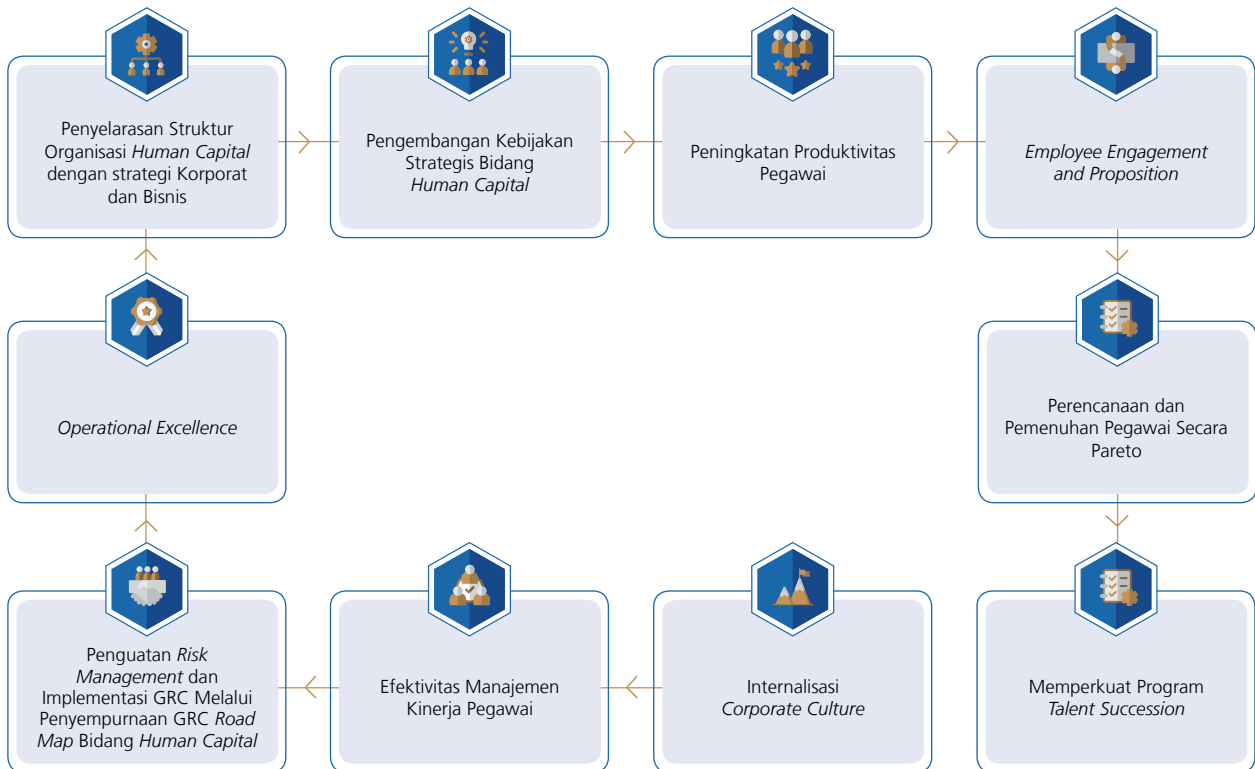
Sumber daya manusia merupakan kunci penting untuk mencapai tujuan organisasi, untuk dapat mencapai tujuan organisasi, Perseroan memerlukan pegawai yang kompeten. Untuk itu Perseroan harus melakukan pengembangan dan pendidikan yang terencana bagi para pegawai di setiap level sebagai salah satu strategi yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan dan kebutuhan organisasi.

Untuk mencapai visi dan misinya, Perseroan menetapkan strategi untuk mendayagunakan sumber daya manusia dengan cara yang paling efektif dan efisien. Selain itu, Perseroan juga memandang perlu untuk memiliki suatu sistem yang dapat menjadi landasan yang obyektif dalam meningkatkan kualitas Pegawai. Untuk keperluan tersebut, Perseroan menetapkan suatu desain dan perencanaan kebijakan program pembelajaran dan pengembangan perilaku (*Soft Competency*) sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pegawai secara berkesinambungan.

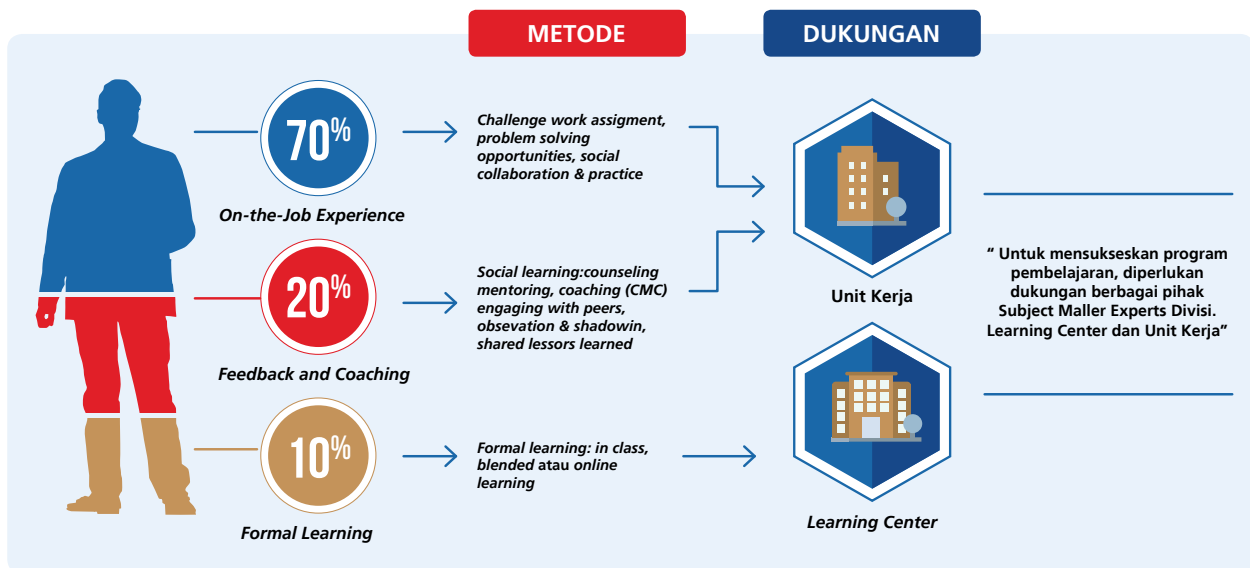
Pembelajaran dan pengembangan pegawai bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam mencapai target kinerjanya. Mengembangkan kompetensi pegawai tidak hanya menyampaikan informasi kepada pegawai sebagai peserta pembelajaran dan pengembangan, tetapi juga mengembangkan perilaku, cara berpikir, dan penguasaan pegawai terhadap hal yang mereka pelajari. Dalam rangka hal tersebut, Learning Center Division mendesain kurikulum program pembelajaran dan pengembangan perilaku yang diyakini dapat mengembangkan kompetensi pegawai.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Perseroan menekankan pentingnya pengelolaan SDM atau *Human Capital* sebagai modal utama bagi Perseroan untuk menghadirkan produk dan jasanya, mewujudkan operasional dan *service excellence*, serta menciptakan organisasi yang mampu menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Perseroan memandang pegawai sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan besar terhadap laju perkembangan Perseroan. Untuk itu, Perseroan merumuskan kebijakan strategis terkait pengembangan *Human Capital* yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan talenta pribadi dari setiap pegawai.

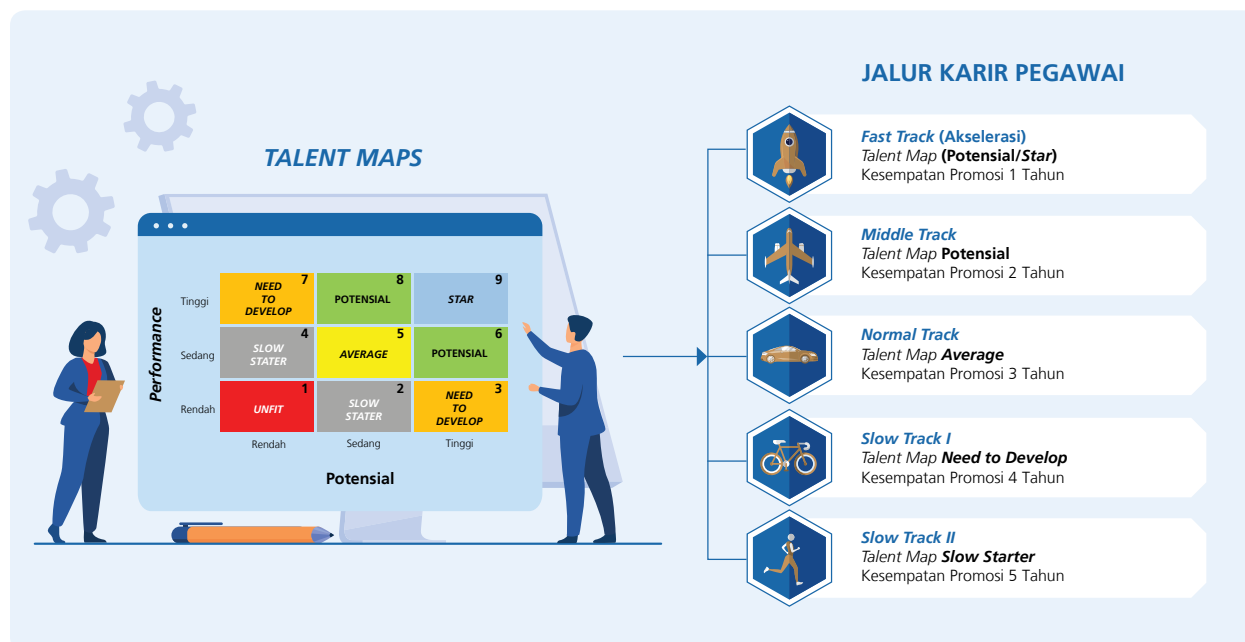


Delivery pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan model dan metode 70% *on the job Experience*, 20% *Feedback and Coaching*, dan 10% *Formal Learning* serta memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran.



Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Dalam hal menentukan pengembangan karir, Perseroan memiliki jalur karir yang berbeda-beda. Setiap jalur karir memiliki kecepatan karir dan kesempatan yang berbeda. Adapun jalur karir tersebut berdasarkan *talent map* masing-masing pegawai. Setiap pegawai dipetakan kedalam matriks *talent* yang disusun berdasarkan *Performance* dan Potensi dari pegawai, yaitu sebagai berikut:



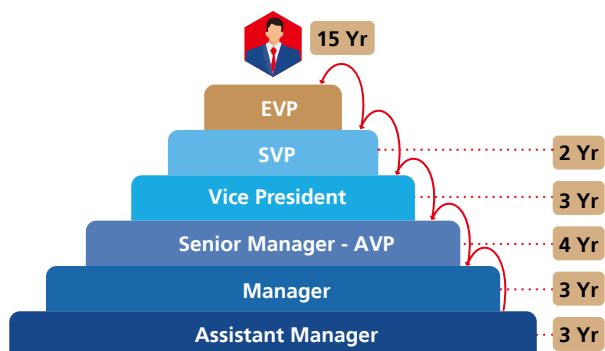
Selain *talent map*, Perseroan juga memiliki program *Job Posting*, yaitu suatu proses untuk mencari kandidat pada jabatan tertentu secara terbuka. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan secara luas kepada pegawai untuk mengembangkan karirnya.



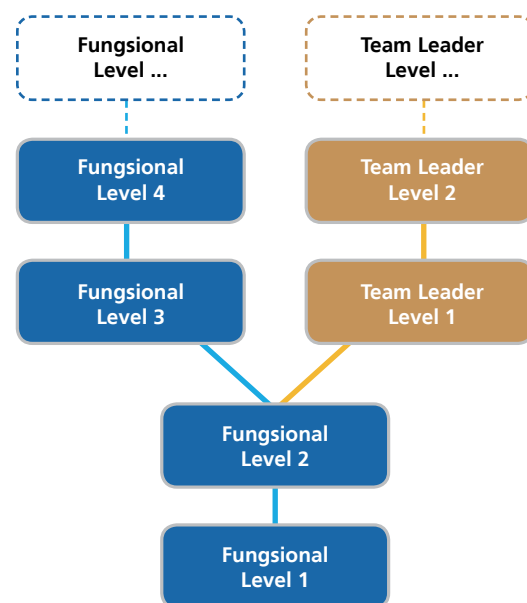
Dalam hal pengisian jabatan kunci, Perseroan memiliki proses untuk mempersiapkan suksesor untuk posisi kunci atau kritikal di organisasi tentunya berdasarkan proses nominasi dan seleksi pegawai yang potensial dengan tahapan sebagai berikut:



Perseroan juga memiliki program pengembangan karir untuk dapat mencetak pegawai muda sebagai calon pemimpin Perseroan dimasa mendatang, yaitu **BTN Millennials Program**. Program ini ditujukan bagi seluruh pegawai dibawah 35 tahun dan untuk *fresh graduate* yang memiliki *passion* kuat untuk menjadi pemimpin masa depan dan terus berkarya di Bank BTN.



Penempatan/pergerakan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain pada Perseroan bersifat "*Dual Path*" yaitu mengakomodir kebutuhan Perseroan terkait adanya jabatan yang membutuhkan *expertise* tertentu (fungsional) dan terdapat jabatan yang bersifat fungsi manajerial pada umumnya (manajerial). Pegawai berkesempatan menjalani kedua jalur pergerakan baik manajerial maupun fungsional. Penetapan manajerial maupun fungsional bergantung dari kebutuhan Perseroan, kompetensi dan kapabilitas pegawai, serta aspirasi dari individu yang bersangkutan.



Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja didapat berdasarkan skor Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SMK). Adapun komponen dalam SMK pegawai terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

a. Penilaian Kinerja (Bobot 90%)

Merupakan penilaian berdasarkan *key performance indicator* dari jabatan pegawai. Adapun Penilaian kinerja terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Komponen KPI (*Key Performance Indicator*) *Cascading* yaitu KPI yang didapatkan dari hasil *cascading* (sesuai tanggung jawab dan peran dari individu tersebut) terhadap KPI dari *layer* di atasnya atau KPI unit kerjanya. Komponen ini mencerminkan kontribusi suatu individu terhadap keberhasilan Unit Kerja nya. Adapun jenis *cascading* adalah sebagai berikut:

Fully Cascade : KPI Unit diturunkan sepenuhnya ke pegawai dengan target yang sama.

Partially Cascade : KPI Unit diturunkan ke pegawai dengan target/segmen yang telah dibagi (sesuai tanggung jawab individu).

Contributory Cascade : KPI Unit diturunkan ke pegawai dalam ukuran KPI lain yang dapat mendukung pencapaian KPI unit tersebut (sesuai peran pegawai).

- Komponen PI (*Performance Indicator*) yaitu ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Uraian Pekerjaan (*Job description*) pegawai. Komponen ini mencerminkan kinerja individu secara berdasarkan *job desc* nya.

b. Penilaian Implementasi Budaya (Bobot 10%)

Merupakan penilaian dari atasan langsung kepada pegawai berdasarkan penjabaran terhadap implementasi budaya perusahaan.

Kebijakan Remunerasi

Perseroan menerapkan sistem remunerasi guna memotivasi dan mempertahankan pegawai-pegawai terbaik serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan *Human Capital* yang berkualitas. Untuk mendukung strategi Perseroan dan mendorong kinerja yang optimal dan berkesinambungan. Perseroan menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko yang mengacu pada kinerja karyawan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik Penetapan remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Perseroan secara keseluruhan, namun tetap memperhatikan kemampuan Perseroan. Dalam mengimplementasikan kebijakan remunerasi perseroan memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan setelah rawat inap, melahirkan, rawat gigi, *General Check Up*, kacamata dan lainnya.

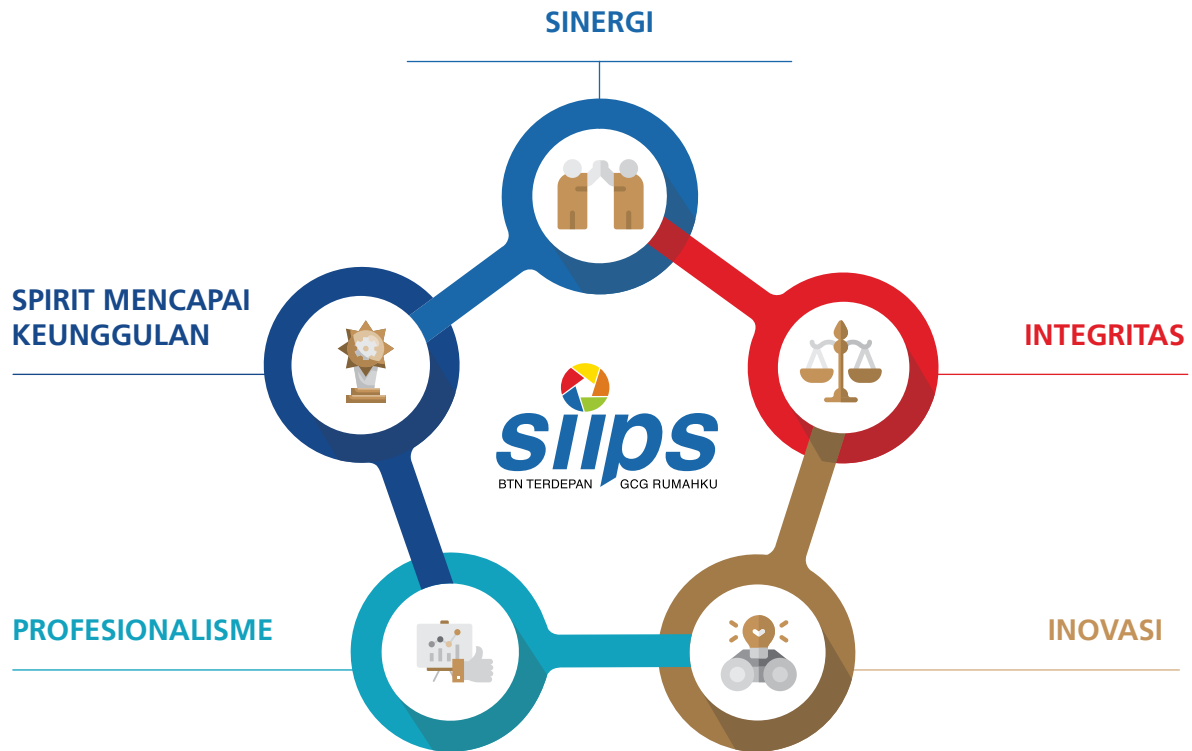
Selain itu, Perseroan juga memberikan remunerasi yang bersifat variabel antara lain, tunjangan Lokasi, tunjangan Jabatan yang diperuntukan untuk jabatan-jabatan tertentu, Uang Lembur, Uang Sandang untuk seluruh Pegawai, Bonus Insentif Penjualan serta Bonus Tahunan. Hal ini merupakan bentuk perhatian Perseroan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok pegawai, terutama untuk perumahan dan kebutuhan transportasi perseroan memberikan Fasilitas Kredit Pegawai.

Program Pensiun

Perseroan memberikan perhatian atas kesejahteraan pegawai menjelang pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Program tersebut diperuntukan bagi pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. MPP diselenggarakan selama 12 bulan sebagai kesempatan untuk mengikuti berbagai program pelatihan sehingga diharapkan dapat mendukung keberlangsungan hidup selepas pensiun.

Pelaksanaan program pensiun merupakan bentuk apresiasi kepada pegawai tetap atas kontribusinya di Perseroan. Pegawai tetap yang telah mencapai usia pensiun normal yaitu 56 tahun dan pegawai tetap dengan status teller staff, customer service staff dan sekretaris yang berusia 36 tahun berhak mendapatkan manfaat pensiun. Perseroan menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terdiri dari Program Manfaat Pasti dan Program Iuran Pasti sebagai hak pegawai tetap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun. Pada program Manfaat Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun sedangkan pada Program Iuran Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2,5% dari gaji yang bersangkutan, 7,5% dari Perseroan dan hasil pengembangannya. Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Dapen BTN).

Internalisasi Budaya



SINERGI

- Tulus, terbuka dan kolaborasi yang produktif
- Saling percaya dan menghargai



INTEGRITAS

- Konsisten dan disiplin
- Jujur dan berdedikasi



INOVASI

- Tanggap terhadap perubahan
- Kreatif dan Inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah



PROFESIONALISME

- Kompeten, intrapreneurship dan bertanggung jawab
- Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil



SPIRIT MENCAPAI KEUNGGLUAN

- Antusias, proaktif dan pantang menyerah
- Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan

Strategi Program Budaya Kerja Bank BTN 2020



Untuk mendukung tujuan Bank BTN dengan berlandaskan 5 (lima) Nilai dan 10 (sepuluh) Perilaku Utama SIIPS, terdapat empat pilar budaya yang menjadi pondasi utama Program Budaya Perusahaan Tahun 2020, yaitu:

1. Sales and Service Culture

Bertujuan untuk mendorong perilaku menjual, melayani dan berkoordinasi antar pegawai dalam rangka meningkatkan bisnis dan kinerja Bank BTN.

2. Risk and Governance Culture

Bertujuan agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada; dan meningkatkan *compliance awareness* di antara pegawai.

3. Performance Culture

Bertujuan untuk meningkatkan *risk awareness* dan memitigasi risiko terhadap pencapaian kinerja unit kerja melalui proses diskusi dan koordinasi di antara jajaran manajemen di unit kerja, dan;

4. Learning Culture

Bertujuan untuk membangun semangat mempelajari, memahami dan mengasah keterampilan (*skill*) terhadap berbagai ketentuan internal sehingga proses kerja menjadi standar dan lebih produktif.

Dengan menggunakan 4 (empat) tema tersebut, penerapan program budaya perusahaan Perseroan diharapkan dapat mendorong tercapainya Visi Perseroan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-7/MBU/07/2020 Tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Bahwa “Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi.” Maka SIIPS Bank BTN bertransformasi menjadi AKHLAK.

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis.

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.



AMANAH

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.



KOMPETEN

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.



HARMONIS

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.



LOYAL

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.



ADAPTIF

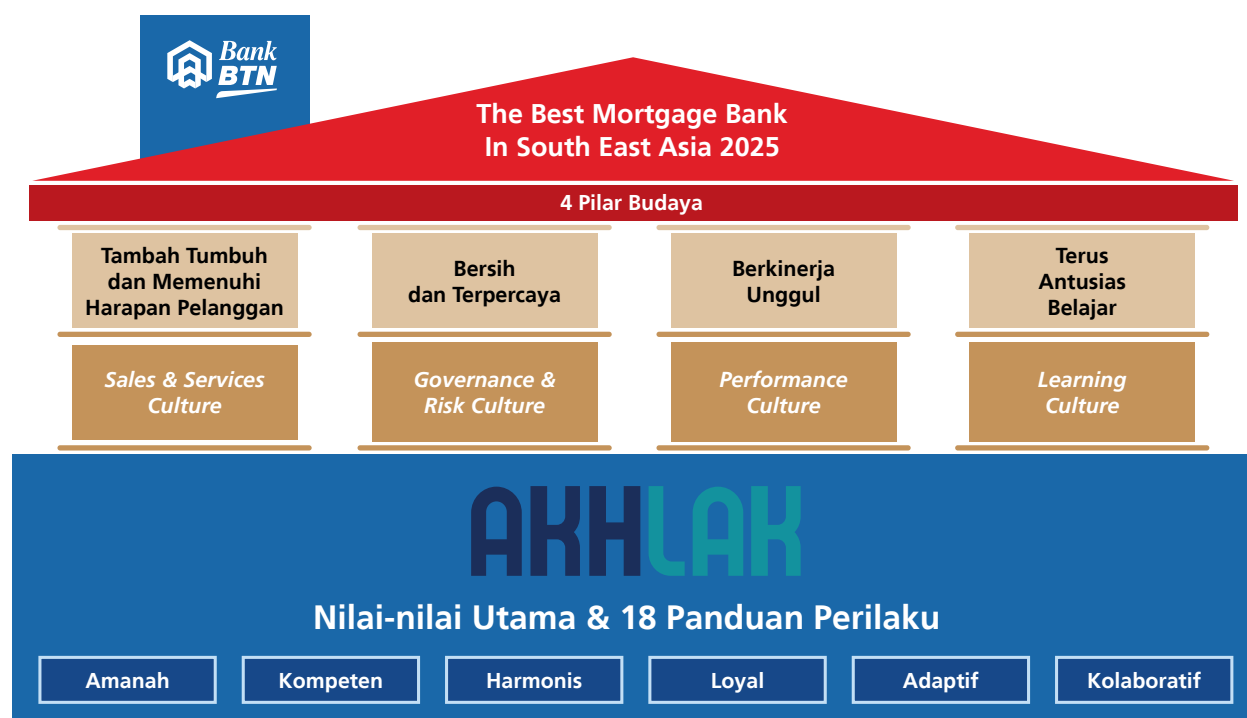
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.



KOLABORATIF

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dengan bertransformasinya SIIPS menjadi AKHLAK, maka semakin memperkuat 4 (empat) pilar yang telah disepakati bersama. Sehingga menjadi seperti berikut:



Teknologi Informasi





Perseroan menyadari bahwa pengelolaan Teknologi Informasi (TI) memegang peranan strategis untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan keamanan pengolahan data dan informasi. Selain itu, pengelolaan Teknologi Informasi yang baik juga dapat memberikan peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan *digital banking*. Menyadari hal tersebut, Perseroan memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi. Di sisi lain, pengembangan Teknologi Informasi secara berkelanjutan juga dapat menjadikan sistem manajemen risiko yang dimiliki Perseroan berjalan dengan efektif.

Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi —

Sesuai ketentuan OJK, Perseroan wajib memiliki Rencana Strategis TI yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha Perseroan dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Rencana Strategis TI dituangkan dalam dokumen yang menggambarkan visi dan misi TI Perseroan, strategi pendukung, serta prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam penggunaan TI.

Visi dan Misi Teknologi Informasi Perseroan

Visi TI BTN

“Menynergikan strategi bisnis dan teknologi Informasi dengan menyediakan layanan Teknologi Informasi kelas dunia untuk mencapai kemenangan pada Era *Digital*.”

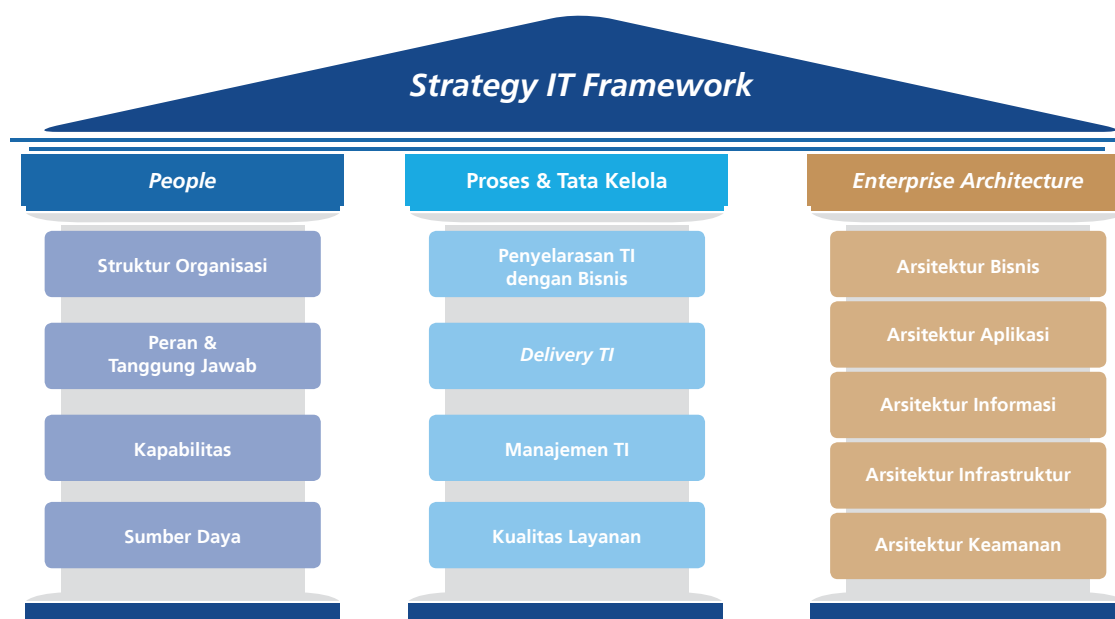
Misi TI BTN

“Menjadi mitra bisnis handal yang menyediakan layanan responsif dan akurat melalui teknologi mutakhir dan sistem integrasi terkemuka.”

Di dalam Rencana Strategis TI Perseroan dijelaskan mengenai kerangka kerja dan perencanaan strategi Teknologi Informasi dengan fungsi untuk:

1. Menyelaraskan perencanaan TI dengan perencanaan strategis di Perseroan;
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang terdapat pada Perseroan, terutama dalam aspek Teknologi Informasi;
3. Menghasilkan perencanaan strategi informasi bagi perusahaan untuk tiga tahun mendatang, yang dapat dipakai untuk pedoman dalam pengembangan TI;
4. Agar Perseroan mempunyai keunggulan kompetitif dalam bidang teknologi informasi melalui implementasi perencanaan TI yang disusun.

Tiga Pilar yang digunakan sebagai *framework* Strategi TI untuk mendukung pemahaman dan penilaian terhadap kondisi TI Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:

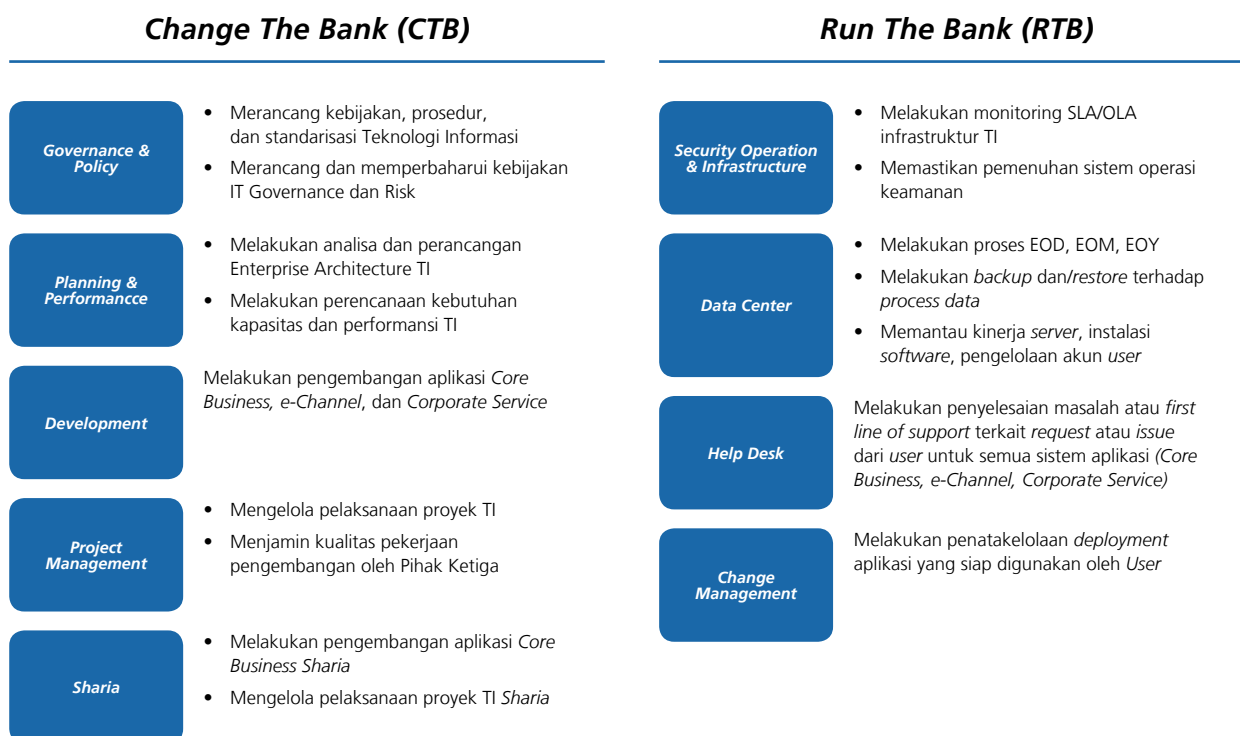


Dalam rangka mendukung kebijakan serta mencapai target *roadmap* Teknologi Informasi yang telah ditetapkan, Perseroan menerapkan beberapa strategi pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. *End-to-end Process Digitalisation and Automation*
 - a. Layanan Bank BTN dilakukan dengan menggunakan *channel digital*;
 - b. Otomasi pada proses *end-to-end business process*;
 - c. Pengadaan dan pengembangan integrasi open API internal dan eksternal yang mempermudah konektivitas.
2. *Customer 360°*
 - a. Informasi nasabah ritel dan korporat tersedia secara terpusat untuk semua bagian operasi bisnis (*front, middle, back office*);
 - b. Perencanaan strategi portofolio nasabah ritel dan korporat tersaji secara menyeluruh sehingga mampu memberikan *customer behaviour analytics* yang akurat.
3. *IT Service Excellence*
 - a. Organisasi TI mampu beroperasi dan mendukung transformasi Bank BTN melalui proses, prosedur, dan model kepatuhan yang *well-defined*;
 - b. Pelaksanaan *service management* IT yang optimal;
 - c. *Partnership* antara TI dan bisnis yang kolaboratif.

Profil Direktorat Teknologi Informasi

Sesuai kebijakan struktur organisasi Perseroan, satuan kerja TI terdiri atas 2 (dua) divisi yang berfungsi sebagai divisi pengembangan TI dan divisi operasional TI. Kedua divisi berperan dalam lingkup 'Change The Bank' dan 'Run The Bank'. Penjelasan lingkup pekerjaan kedua divisi tersebut seperti bagan di bawah ini:



Perseroan secara aktif meningkatkan kompetensi SDM internal di bidang Teknologi Informasi melalui pelatihan demi menjaga kualitas dan kompetensi SDM untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Berikut daftar *training* SDM Teknologi Informasi:

Materi Pendidikan & Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara
Certified Data Center Professional (CDCP)	9	Duta Kuningan
Certified Ethical Hacker (CEH)	1	Global Edu
COBIT 5	14	SGI Asia
ITIL V4	3	Global Edu
Arsitektur Microservice	8	Inixindo

Manajemen Teknologi Informasi

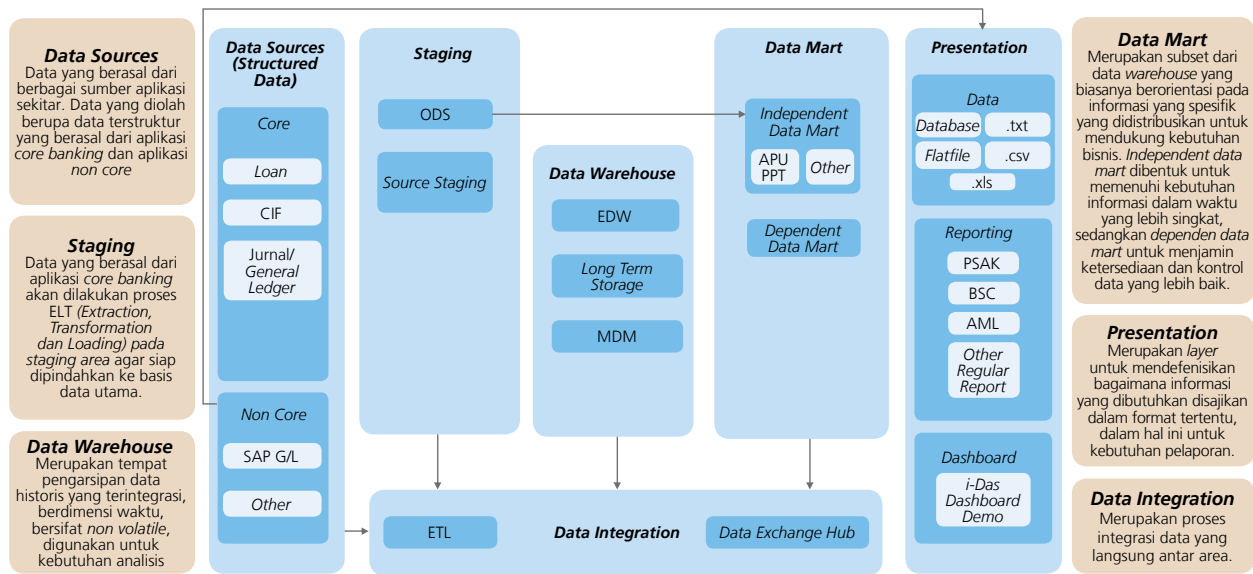
Strategi Teknologi Informasi

Sesuai Rencana Strategis Teknologi Informasi Perseroan Tahun 2019-2021, secara berkala divisi TI tetap melakukan *update progress* kepada direktur untuk mencapai

penyelarasan strategi pengembangan aplikasi TI demi mendukung strategi bisnis Perseroan. Berikut progress pengembangan TI yang dilakukan sepanjang tahun 2020:

Total Inisiatif	Jumlah	Persentase
DC 01 - Digital Platform Implementation	4	0,64%
DC 02 - Transaction Channel Optimization	214	34,02%
DC 03 - CRM Implementation	13	2,07%
FD 01 - Wealth Management System Enhancement	15	2,38%
FD 02 - Money Implementation	5	0,79%
LD 01 - Loan Origination Enhancement	78	12,40%
LD 02 - Credit Card System Implementation	2	0,32%
OE 03 - HC System Enhancement	14	2,23%
OE 05 - IT Sourcing Strategy Optimization	14	2,23%
OE 08 - PMO Assistance Implementation	3	0,48%
OE 11 - Enterprise Integration & Open API	80	12,72%
OE 12 - Core Banking Enhancement	30	4,77%
OE 15 - Integrated IT Monitoring Implementation	7	1,11%
OE 17 - IT EA Assessment and Implementation	1	0,16%
OE 18 - EDW & Analytics Platform Assessment	52	8,27%
OE 19 - Master Data Management Enhancement	2	0,32%
OE 20 - Advanced Big Data Capability	1	0,16%
OE 22 - Enterprise Risk Management & Legal Application Enhancement	18	2,86%
OE 23 - Anti-Fraud System Enhancement	2	0,32%
OE 25 - IT Procedure Development	1	0,16%
OE 26 - Identity & Access Management Enhancement	5	0,79%
OE 27 - Payment System Integration and Automation	17	2,70%
OE 28 - Budgeting Planning & Control (BPC) System Implementation	1	0,16%
OE 29 - Procurement & Asset System Enhancement	3	0,48%
OE 31 - Content Management System Implementation	2	0,32%
PR 03 - Syariah IT Review (Spin Off Assessment)	1	0,16%
TB 01 - Treasury System Enhancement	11	1,75%
TB 02 - Branch System Re-alignment	12	1,91%
TB 03 - Cash Management System Enhancement	16	2,54%
TB 04 - Supply Chain Finance Implementation	2	0,32%
TB 05 - Trade Finance System Implementation	3	0,48%

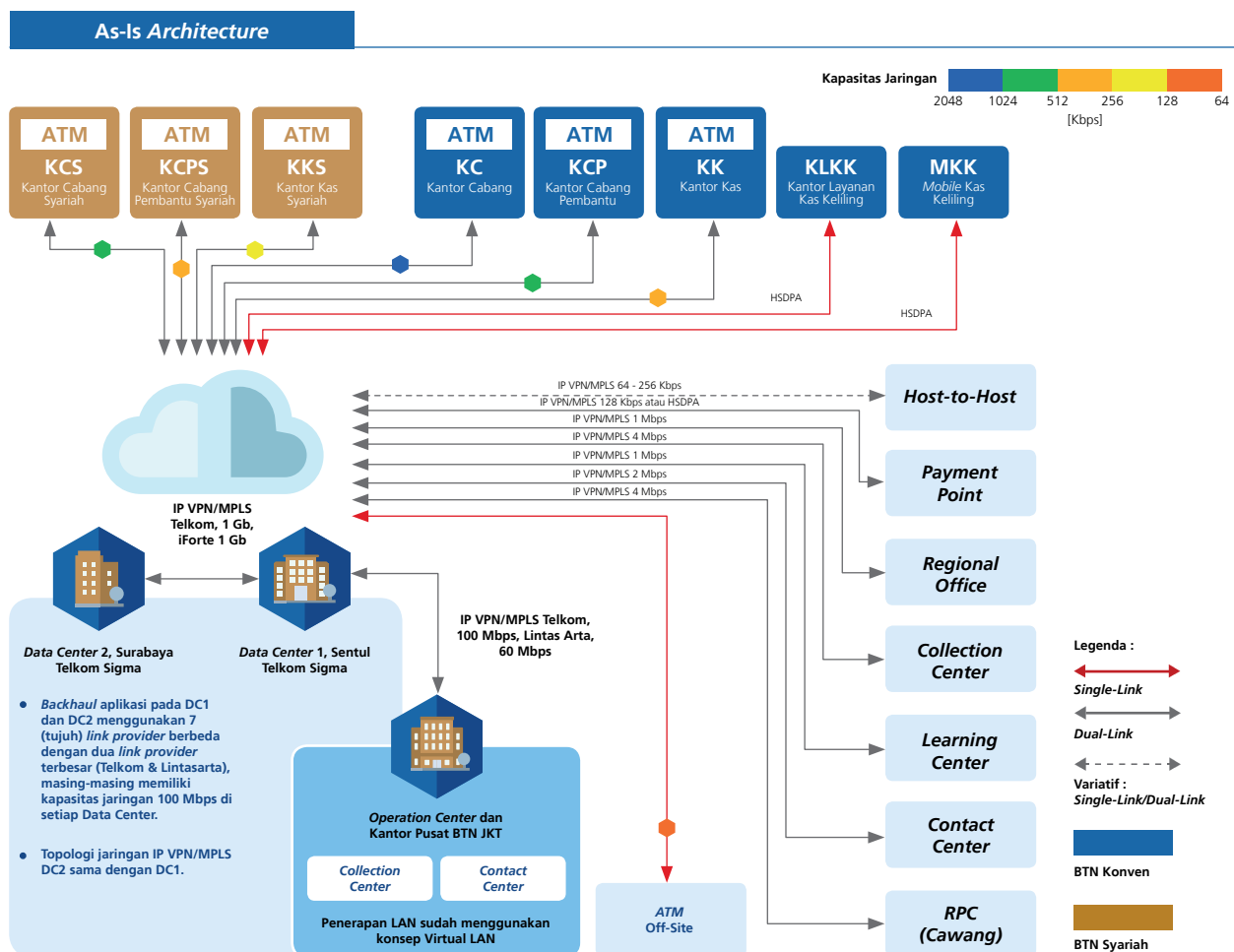
Arsitektur Teknologi Informasi



Desain arsitektur informasi di atas berdasarkan RSTI Perseroan Tahun 2019-2021.

Infrastruktur Teknologi Informasi

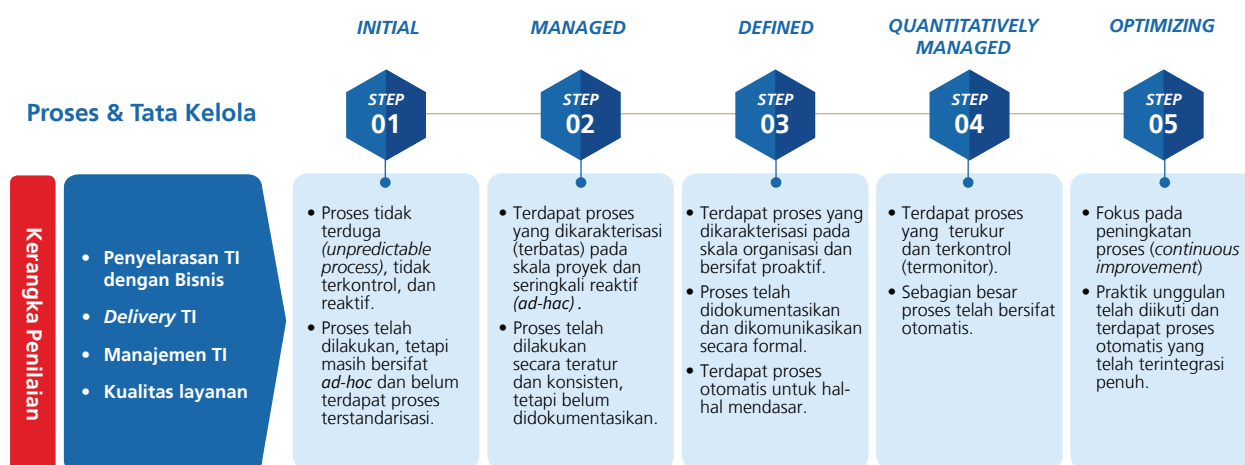
Infrastructure & Security Architecture



IT Governance

Terdapat 4 (empat) domain proses tata kelola TI Perseroan seperti yang dituliskan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Bank BTN Tahun 2019-2021. Penyusunan Proses dan Tata Kelola TI Perseroan, yaitu:

1. **Penyelarasan TI dengan Bisnis**
Fungsi perencanaan, manajemen, dan pemantauan kinerja organisasi TI untuk memastikan bahwa tujuannya sesuai dengan visi bisnis, arahan strategis, dan kebutuhan bisnis.
2. **Delivery TI**
Delivery dan implementasi layanan TI untuk mendukung kebutuhan bisnis, baik dari perspektif transformasi dan *Business-As-Usual* ("BAU"), serta manajemen dan pelaksanaan operasi TI sehari-hari.
3. **Manajemen TI**
Pengelolaan sumber daya manusia organisasi TI (perekrutan, penempatan, pengembangan staf), hubungan *vendor*/ pemasok, dan keuangan TI (anggaran, pengeluaran, manajemen aset).
4. **Kualitas Layanan**
Manajemen tingkat kualitas layanan dan kontinuitas TI dalam mendukung bisnis, dukungan pelanggan internal, manajemen risiko dan keamanan TI, serta definisi kebijakan dan pedoman TI.



Sesuai kerangka domain proses di atas, disebutkan terdapat 5 (lima) metode yang digunakan Manajemen Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap proses dan tata kelola TI Perseroan, seperti:

- **Initial**
 - Proses tidak terduga (*unpredictable process*), tidak terkontrol, dan reaktif.
 - Proses telah dilakukan, tetapi masih bersifat *ad-hoc* dan belum terdapat proses terstandarisasi.
- **Managed**
 - Terdapat proses yang dikarakterisasi (terbatas) pada skala proyek dan seringkali reaktif (*ad-hoc*).
 - Proses telah dilakukan secara teratur dan konsisten, tetapi belum didokumentasikan.
- **Defined**
 - Terdapat proses yang dikarakterisasi pada skala organisasi dan bersifat proaktif.
 - Proses telah didokumentasikan dan dikomunikasikan secara formal.
 - Terdapat proses otomatis untuk hal-hal mendasar.
- **Quantitatively Managed**
 - Terdapat proses yang terukur dan terkontrol (termonitor).
 - Sebagian besar proses telah bersifat otomatis.

- **Optimizing**
 - Fokus pada peningkatan proses (*continuous improvement*).
 - Praktik unggulan telah diikuti dan terdapat proses otomatis yang telah terintegrasi penuh.

Selain melakukan pengembangan, pengelolaan, dan operasional bisnis, Perseroan juga tetap menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi untuk seluruh lini Struktur Organisasi Teknologi Informasi. Kerangka kebijakan yang menjadi landasan tata kelola Teknologi Informasi telah disesuaikan dengan kebijakan regulator dengan mengadopsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan *International Best Practice*. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko dan ancaman-ancaman baru berdasarkan perkembangan teknologi informasi.

IT *Strategic Planning & Development Division* (ITPD) berfungsi memastikan seluruh komponen dan lini struktur organisasi TI mematuhi dan berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Disampaikan *list* dan komponen kebijakan TI Perseroan yang masih berlaku sebagai berikut:

POJK 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum				
SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum				
PKTKP 01/DIR/KD/PPD/2018 Tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP)				
Manajemen	Pengembangan dan Pengadaan	Operasional Teknologi Informasi	Jaringan Komunikasi	
Domain	PMS TI 01/PD/DIR/PPD/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Teknologi Informasi			
	SE No. 41/DIR/ICTD/2011 Perihal Pedoman Penerapan IT Risk Management & Lampirannya		SE No.59/DIR/ITPD/2017 Perihal Standarisasi Sistem Teknologi Informasi	
	SE No. 02/DIR/ICTD/2014 Perihal Petunjuk Operasional Penyelesaian Laporan Master Error			
	SE No. 05/DIR/DTI/1999 Perihal Pedoman Operasi Backup Data PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
	SE No. 04/DIR/DTI/1999 Perihal Pedoman Operasi Aplikasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)			
	Surat Direksi No. 33/DIR/ICTD/2011 Perihal Standard Operating Procedure (SOP) Teknologi Informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
	SK DIR No. 27/SK/DIR/ITPD/2019 Tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi 2019-2021			
	SK DIR No. 01/SK/DIR/ITPD/2019 Tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)			

Pengamanan Informasi	Rencana Pemulihan Bencana	Layanan Perbankan Elektronik	Penggunaan Pajak Penyedia Jasa TI	Penyediaan Jasa TI oleh Bank
		SE No. 18/DIR/RMD/2017 Perihal Kebijakan <i>Business Continuity Management</i> (BCM) dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) <i>Business Continuity Plan</i> (BCP)		
SE No. 64/DIR/ITPD/2017 Perihal Pedoman Keamanan Informasi		SE No. 35/DIR/ICTD/2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
SE No. 26/DIR/ICTD/2017 Perihal Perjanjian Kerahasiaan Informasi (<i>NonDisclosure Agreement</i>)		SE No. 23/DIR/ICTD/2011 Perihal Pedoman Penerapan <i>Business Continuity Plan</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
SE No. 17/DIR/DTI/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Pengamanan <i>Password/ Cryptographic Key/ Karakteristik Personal</i> (Sidik Jari, Retina, Suara)/PIN		SE No. 01/DIR/DTI/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan <i>Operating Procedure Disaster Recovery Center</i> (DRC)		

Strategi Teknologi Informasi Ke Depan —

1. Reprioritisasi diselaraskan dengan *corporate plan*.
2. Penguatan *internal capabilities* melalui penambahan *resources & IT sourcing strategy*.
3. Penyesuaian Struktur Organisasi TI dan penyempurnaan tata kelola sesuai dengan *best practice*.

Tata Kelola Perusahaan

Pada ajang ASEAN CG Scorecard (ACGS) yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hasilnya diumumkan pada tanggal 09 Juni 2020. Perseroan berhasil memperoleh penghargaan sebagai Top 3 Indonesia PLC's dan 10 perusahaan Indonesia sebagai ASEAN Asset Class Thresholds untuk penilaian GCG berdasarkan ASEAN CG Scorecard dengan perolehan score 110,29 poin yang meningkat sebesar 4,66 poin dari penilaian 2 (dua) tahun sebelumnya.







Sebagai bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta sebagai perusahaan publik, Perseroan menerapkan seluruh prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban semata, namun merupakan suatu kebutuhan dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG terlihat dari internalisasi *governance principles* ke dalam *governance framework* yang terdiri dari *governance structure* dan *governance process* yang efektif, sehingga menghasilkan *governance outcome* yang memuaskan, sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Pada proses jalannya *governance structure*, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Direksi menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan Perseroan secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan telah menjadi kebutuhan guna mencapai cita-cita Perseroan menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola

setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik. Selanjutnya penerapan GCG yang konsisten disertai dengan inovasi yang tiada henti baik dari sisi produk dan pelayanan akan menjamin kepercayaan seluruh pemangku kepentingan serta menumbuhkan budaya kerja yang dapat membuahkan hasil kinerja terbaik.

Pengakuan implementasi Tata Kelola juga tercermin dari adanya beberapa penghargaan bidang Tata Kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) baik di tingkat Regional (ASEAN) maupun nasional yang berasal dari regulator OJK maupun lembaga *expertise* GCG yang merupakan pihak independen seperti PT RSM Indonesia, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Berdasarkan kriteria penilaian dari OJK untuk *self assessment* tata kelola periode semester I 2020, Perseroan mendapatkan peringkat 2 atau kategori Baik yang mencerminkan Perseroan telah melakukan penerapan tata kelola yang baik.

Pada ajang ASEAN CG Scorecard (ACGS) yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hasilnya diumumkan pada tanggal 09 Juni 2020. Perseroan berhasil memperoleh penghargaan sebagai Top 3 Indonesia PLC's dan 10 perusahaan Indonesia sebagai ASEAN Asset Class

Thresholds untuk penilaian GCG berdasarkan ASEAN CG Scorecard dengan perolehan score 110,29 poin yang meningkat sebesar 4,66 poin dari penilaian 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada penilaian ACGS yang diselenggarakan oleh ACMF tahun 2018, Perseroan memperoleh Top 50 ASEAN PLC's dan Top 3 PLC's di Indonesia.

Perseroan senantiasa mengikuti *rating* dan *survey* Corporate Governance Perception Index (CGPI) selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut yang dinilai oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai lembaga riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance*. Pada ajang CGPI yang diselenggarakan tahun 2020 untuk penilaian praktik tata kelola tahun 2019, Perseroan memperoleh predikat "Perusahaan Sangat Terpercaya" (*The Most Trusted Company*) dengan skor 89,62 yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Perseroan juga mengikuti ajang TOP GRC yaitu kegiatan *corporate rating (award)* tahunan dari Majalah Top Business pada bidang Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan. Pada ajang TOP GRC, Perseroan berhasil memperoleh 3 (tiga) kategori sebagai berikut: TOP GRC 2020 # 4 Stars; *The Most Committed GRC Leader 2020* untuk Direktur Utama Perseroan; *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020* dan *The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020*.

Perseroan juga melakukan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian BUMN. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Perseroan telah berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 dalam bidang Kredit Komersial (*Commercial Lending*) dan bidang Pengadaan (*Procurement*), artinya Perseroan telah mendapatkan pengakuan bahwa dalam proses bisnis bidang perkreditan komersial dan pengadaan telah mengikuti standar SNI ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System*.

Sebagai perwujudan dari salah satu strategi inisiatif tahun 2020 perihal *Tone of the Top Compliance Culture Awareness* (pimpinan dan jajaran senior manager menjadi *role model*) dan menindaklanjuti komitmen dan kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT) dan Cegah Korupsi (CEK), Perseroan juga berinisiatif mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diterbitkan oleh KPK. Adapun Ahli Pembangun Integritas adalah personil bersertifikat yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Sejak tahun 2019, Perseroan telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti sertifikasi API. Pada tahun 2020, pegawai yang mengikuti sertifikasi API dan telah dinyatakan kompeten sebanyak 13 (tiga belas) orang. Sehingga total pegawai Perseroan selama tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah mengikuti sertifikasi API dan telah dinyatakan kompeten oleh KPK sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan —

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman-pedoman GCG yang diterbitkan oleh institusi nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard* yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Tujuan Penerapan Prinsip GCG —

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Hal tersebut akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Implementasi prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, dalam rangka menjadikan Perseroan sebagai bank lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Perseroan mengembangkan struktur GCG yang meliputi GCG *structure* dan GCG *soft structure* guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan usaha Perseroan, diharapkan akan mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan; menghasilkan kesinambungan usaha dalam jangka panjang; meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional; serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan.

Penerapan Prinsip GCG di Lingkup Bank BTN

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan termuat juga dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Prinsip GCG	Penjelasan	Penerapan Di Lingkup Bank BTN
 Transparansi	Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>).	- Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan dan non keuangan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. - Kebijakan Perseroan bersifat tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak. - Prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan kode etik Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. - Pemanfaatan situs web untuk transparansi kepada publik dengan mengacu kepada ASEAN Corporate Governance Scorecard.
 Akuntabilitas	Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.	- Target dan sasaran yang ditetapkan Perseroan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada <i>stakeholders</i>. - Perseroan menggunakan metode manajemen risiko dan audit internal serta auditor publik dalam pengelolaan dan pengawasan. - Perseroan menetapkan ukuran kinerja kepada seluruh jajaran dengan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan Nilai Budaya Perusahaan yang disebut "AKHLAK". - Perseroan menekankan pentingnya budaya anti korupsi, yang disosialisasikan kepada seluruh <i>stakeholders</i>. Salah satunya upaya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 Responsibilitas	Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.	- Perseroan memberikan definisi yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing organ yang sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi. - Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. - Perseroan sebagai <i>good corporate citizen</i> mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
 Independensi	Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholder</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).	Perseroan memiliki sejumlah perangkat kepatuhan yang diterapkan dengan tujuan memberikan batas yang wajar terhadap dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholder</i> manapun dan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
 Kewajaran dan Kesetaraan	Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>).	Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Komitmen Penerapan GCG Bank BTN

Dalam perjalanannya, Perseroan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan guna mencapai visi dan keberlanjutan usaha. Bagi Perseroan, penerapan GCG menjadi alat yang digunakan Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

Perseroan juga menyadari, perjalanan bisnis dari masa ke masa terus dihadapkan pada berbagai risiko yang semakin kompleks sehingga meningkatkan pula kebutuhan akan praktik terbaik penerapan GCG oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus meningkatkan penerapan tata kelola yang baik dengan perkembangan regulasi antara lain terkait dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Upaya penerapan GCG yang berkesinambungan juga dibutuhkan dalam rangka mencapai cita-cita Perseroan menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara. Untuk itulah, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG yang dimulai dengan penyediaan sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik. Selanjutnya, komitmen penerapan GCG yang konsisten dan berkesinambungan dilakukan Perseroan disertai dengan inovasi yang tiada henti baik dari sisi produk dan pelayanan guna menjamin kepercayaan setiap pemangku kepentingan. Hingga akhir periode tahun buku, penerapan GCG di lingkungan Perseroan memiliki manfaat yang besar, sehingga Perseroan memiliki pedoman dalam menjalankan roda bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*.

Keyakinan bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan membuahkan hasil yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian penting Perseroan sepanjang tahun 2020 dengan pencatatan kinerja yang cukup memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diperoleh. Perseroan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan.

Perseroan juga berhasil memperoleh pengakuan pihak eksternal dalam bentuk berbagai penghargaan baik terkait kinerja Perseroan, transparansi informasi dan juga implementasi GCG telah diperoleh pada tahun 2020, antara lain:

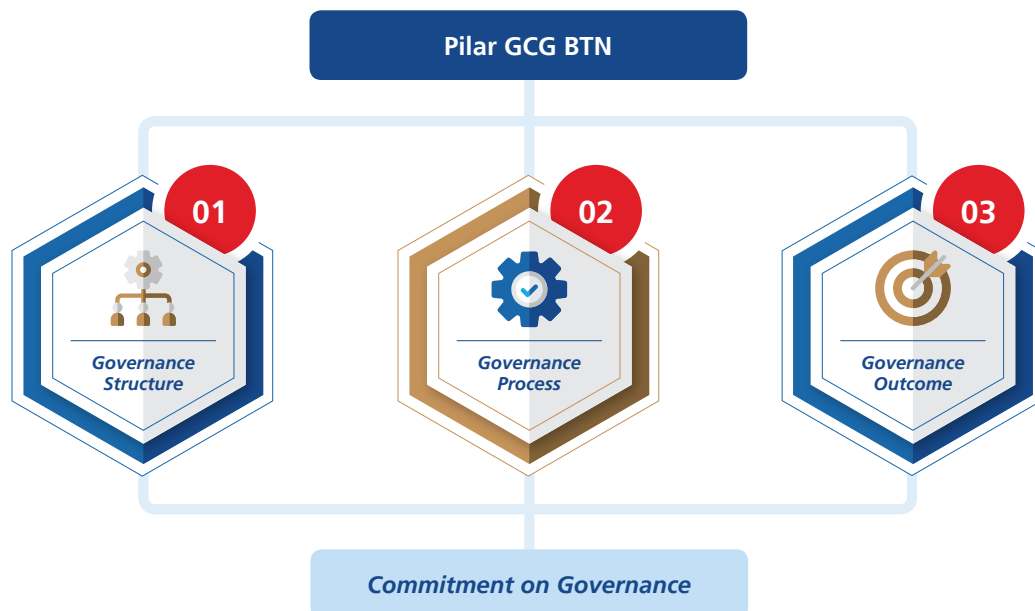
- *Top 3 Indonesia PLC's* dan 10 perusahaan Indonesia sebagai *ASEAN Asset Class Thresholds* dari ajang ASEAN Corporate Governance yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
- *The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2020 dari Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).
- Pada ajang TOP GRC yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business, Perseroan berhasil memperoleh 3 (tiga) kategori sebagai berikut: TOP GRC 2020 #4 Stars; *The Most Committed GRC Leader 2020* untuk Direktur Utama Perseroan; *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020* dan *The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020*.
- Perseroan berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam bidang Kredit Komersial (*Commercial Lending*) dan bidang Pengadaan (*Procurement*).
- Perseroan mengirimkan 13 (tiga belas) orang pegawai untuk mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan telah dinyatakan kompeten oleh KPK.

Keselarasan antara *stakeholder* dan Perseroan akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan Perseroan. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Perseroan di dalam persaingan global, dan tentu akan memberi jalan untuk perkembangan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Implementasi GCG yang Berkelanjutan di Lingkup Bank BTN —

Roadmap Tata Kelola Bank BTN

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan atas implementasi GCG, tidak hanya berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berdasarkan *best practice* yang berlaku internasional, antara lain berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Perseroan telah menyusun *Roadmap* GCG dalam rangka melakukan penguatan GCG dari waktu ke waktu yang meliputi 4 (empat) pilar GCG yaitu *Commitment on Governance*, *Governance Structure*, *Governance Mechanism* dan *Governance Outcome*. Penerapan ke-4 pilar GCG tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.



Periode 2019-2022, Perseroan telah menyusun *roadmap* Tata Kelola Bank yang selaras dengan rencana jangka panjang transformasi Perseroan, yaitu mempertimbangkan penerapan inisiatif *Integrated Governance Risk and Compliance* (IGRC), adanya rencana implementasi konglomerasi keuangan melalui pembentukan anak perusahaan serta rencana aksi keuangan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, *Roadmap* Tata Kelola tersebut akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan Perseroan, dengan sasaran akhir menjadi salah satu perusahaan dengan praktik tata kelola terbaik di masa mendatang.

Roadmap Tata kelola diawali pada tahun 2020 melalui penguatan bisnis tata kelola. Perseroan melakukan perbaikan *Business Process Improvement* (BPI) terhadap proses kredit komersial dan konsumen, salah satunya dengan upaya peningkatan kinerja di bidang perkreditan dengan melakukan ekspansi secara *prudent* sesuai dengan prinsip kehati-hatian disertai dengan strategi bisnis yang efektif dengan cara: Mengaktifkan peran Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Pembagian fungsi Bisnis dan *Risk* pada Komite Kredit, memperkuat fungsi dan peran Komite Kredit dalam pemberian kredit dan restrukturisasi antara lain melibatkan Legal Division (LGD) dan Compliance and Governance Division (CMGD) yang didahului dengan pra Rapat Komite Kredit (RKK) dan perbaikan bisnis proses dan penguatan kontrol berjenjang melalui implementasi *Business Process Improvement* (BPI).

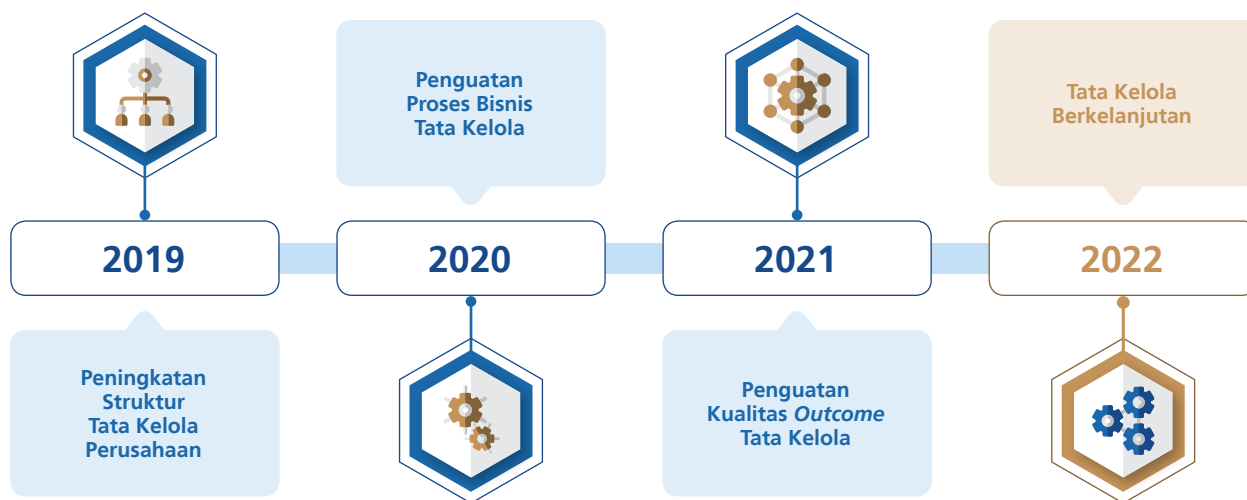
Penguatan bisnis tata kelola lainnya berupa penguatan dalam sistem pemrosesan kredit dengan menambahkan modul tambahan berupa *database* Pihak Terkait, hal ini dalam rangka untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku apabila berhubungan dengan Pihak Terkait Perseroan. Selain itu Perseroan telah melakukan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana yang diwajibkan oleh Kementerian BUMN dengan tujuan sebagai panduan Bank untuk memberikan kerangka yang sistematis dalam menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, dan meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tahun 2020 ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) difokuskan kepada bagian proses bisnis komersial dan pengadaan.

Tujuan akhir *Roadmap* yakni Tata Kelola yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan transformasi bisnis secara *prudent* melalui pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur. Efektivitas sistem dan governansi Perseroan diharapkan mampu menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi.

Adapun tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perseroan 2019-2022 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Roadmap Tata Kelola Tahun 2019-2022



Fokus Implementasi GCG Tahun 2020

Di tahun 2020, Perseroan menitikberatkan pada penguatan proses bisnis tata kelola. Perseroan telah melakukan perbaikan *Business Process Improvement* (BPI) kredit komersial dan kredit konsumen.

Adapun implementasi GCG tahun 2020 yang sejalan dengan *Roadmap* GCG Perseroan dilakukan melalui penerapan 3 (tiga) Pilar GCG sebagai berikut:

 Governance Structure	• Organ Utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) • Organ Pendukung (Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan) • Kebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris seperti: Board Manual, SKB, <i>Code of Conduct</i>, Piagam Komite, Kebijakan-kebijakan berbasis GCG
 Governance Process	• Memperkuat penerapan budaya yang didasarkan <i>core value</i> AKHLAK untuk mewujudkan Perseroan sebagai <i>The Best Mortgage Bank</i> di Asia Tenggara • Perbaikan <i>Business Process Improvement</i> (BPI), Pembentukan <i>Regional Processing Center</i> (RPC), dan lain-lain • Pengendalian Gratifikasi • Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Automatisasi dan digitalisasi proses bisnis • Melakukan pertumbuhan yang berkualitas
 Governance Outcome	• GCG Assessment (OJK) • <i>Third Party Assessment</i> • GCG Awareness • Laporan tata kelola • Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) Tata kelola • Pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan/<i>Sustainable Growth</i>

Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta Dewan Komisaris

Secara berkala, Perseroan terus melakukan penyempurnaan yang dibutuhkan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta Dewan Komisaris (*Board Manual*). Penyusunan *Board Manual* dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Direksi dan Dewan Komisaris, terutama dengan terbitnya Peraturan OJK No. 55 tahun 2016 dan Surat Edaran OJK No. 13 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Perseroan menindaklanjuti hal ini dengan menetapkan pedoman dan tata tertib kerja Direksi maupun Dewan Komisaris dalam keputusan masing-masing serta hubungan kerja di antara keduanya ke dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola

Perseroan terus melakukan penyempurnaan kebijakan tata kelola, pada tahun 2020 telah dilakukan penyempurnaan kebijakan tata kelola perusahaan berupa Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PTKP) sebagai acuan utama dalam menerapkan praktik kebijakan tata kelola perusahaan.

Program Zero Tolerance to Fraud and Zero Defect

Untuk menjamin setiap upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko terjadinya *fraud* berjalan efektif, maka Perseroan terus meningkatkan kepedulian Insan BTNers tentang aspek kepatuhan melalui sosialisasi secara berkesinambungan program Anti *fraud* dan membentuk Tim Anti Fraud. Strategi Anti *fraud* didukung oleh implementasi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Inisiatif Implementasi Integrated Governance, Risk and Compliance (IGRC)

Guna menciptakan bisnis Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kuat, sejak tahun 2018 Perseroan telah menerapkan *Integrated Governance Risk Compliance* (IGRC) yang merupakan kolaborasi antara beberapa unit kerja. Perseroan mengoptimalkan *Integrated Governance Risk Compliance* (IGRC) di setiap unit kerja yang mencakup komponen GCG, *Risk Management*, *Compliance*, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (*Code of Conduct*) dan *Anti Fraud*, sehingga Perseroan dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas unggul.

Dalam upaya penerapan IGRC, Perseroan menghadapi beberapa tantangan:

1. Mengoptimalkan pemahaman SOP yang komprehensif dalam mengintegrasikan IGRC bagi seluruh unit kerja.
2. Mengoptimalkan peran supervisi dalam mengintegrasikan fungsi GRC bagi seluruh unit kerja.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisien GRC bagi seluruh unit kerja.

Dengan menerapkan IGRC, Perseroan diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pencapaian kinerja unggul dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
2. Mengeliminasi antar unit kerja sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan kontrol yang memadai.
3. Menghilangkan redundansi data maupun aktivitas serupa dengan tujuan mengoptimalkan aktivitas sehingga lebih efisien.
4. Dorongan menjadi lebih maju dalam memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri.
5. Pelaksanaan manajemen perbankan yang baik sehingga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.

Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Profesional Berintegritas (PROFIT)

Semangat untuk menjalankan GCG secara lebih serius mendorong Bank merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengendalikan praktik Gratifikasi dan suap di lingkungan Bank. Hal ini merupakan bukti keseriusan untuk mendukung Indonesia bersih dari Korupsi dan menjadikan Perseroan merupakan Bank BUMN pertama yang memulai komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK. Sebagai bentuk komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perseroan, maka Perseroan wajib mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan. Sistem ini akan menjaga integritas seluruh pegawai dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap.

Perseroan telah menerapkan kerangka sistematis pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengadopsi Panduan Cegah Korupsi (CEK) yang diterbitkan KPK. Untuk mendukung hal tersebut Perseroan juga melakukan kerjasama dengan KPK dalam hal program pencegahan korupsi melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang didalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.

1. Perseroan bekerja sama dengan KPK dalam hal Anti Korupsi dan Gratifikasi melalui beberapa program: Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi.

2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.
3. *Self Assessment* atas *checklist* prosedur pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi (Program 'CEK' dan 'PROFIT').

Manfaat yang didapat oleh Perseroan dengan Program CEK PROFIT ini adalah dengan praktik penerapan bisnis yang bersih dari korupsi di lingkungan Perseroan, maka diharapkan Perseroan terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial, risiko hukum maupun reputasi. Perseroan adalah lembaga Perbankan pertama khususnya di HIMBARA yang mengadopsi Panduan pencegahan korupsi yang disusun oleh KPK serta melakukan kerjasama dengan KPK dalam gerakan PROFIT.

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas

Menindaklanjuti komitmen dan kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan korupsi di dunia usaha khususnya terkait keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta perwujudan dari salah satu strategi inisiatif tahun 2020 perihal *Tone of The Top Compliance Culture Awareness* (Pimpinan dan jajaran senior manager menjadi role model). Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai yang terdiri dari Divisi *Compliance and Governance Division (CMGD)*, *Internal Audit Division (IAD)* dan *Enterprise Risk Management Division (ERMD)* serta telah dinyatakan kompeten oleh Tim Asesor dan LSP-II KPK.

Inisiatif dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan juga menjalankan berbagai kebijakan pendukung dalam rangka memenuhi prinsip keuangan berkelanjutan, yang terdiri dari: (1) Prinsip investasi bertanggung jawab; (2) Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; (3) Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; (4) Prinsip tata kelola; (5) Prinsip komunikasi yang informatif; (6) Prinsip inklusif; (7) Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan (8) Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Pendekatan Perseroan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan telah tercermin dalam salah satu misi Perseroan yakni “Mempedulikan Kepentingan Masyarakat Sosial dan Lingkungan secara Berkelanjutan”. Perseroan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang (*long-term value creation*) tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan (*sustainable competitive advantage*), tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas serta adanya penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena Perseroan telah mengelola semua risiko (ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan lebih tepat.

Perseroan telah merumuskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ke dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan termasuk target waktu yang ingin disasar dalam jangka 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun (periode 2019-2023). Program-program yang dirumuskan dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan Perseroan meliputi perancangan dan penyusunan *Sustainability Policy & Strategy* (kebijakan dan penyesuaian struktur serta peran organisasi), penyesuaian dan peluncuran *Green Finance Product & Index*, serta pelaksanaan berbagai program keberlanjutan dan inisiatif lainnya.

Roadmap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bank BTN tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Sustainability Policy & Strategy	FASE I: Konsolidasi - Menyiapkan perangkat kebijakan dan model keuangan berkelanjutan - Penguatan Kelembagaan dan pembentukan struktur keuangan berkelanjutan	FASE II: Pemantapan		FASE II: Pengembangan	
Green Finance Product & Index	Kajian, Kebijakan Risiko Keberlanjutan, Identifikasi dan Pengukuran Risiko Sosial dan Lingkungan Green Lending, Green Bond, Green Index (SRI - Kehati) dan Kartu Kredit terkait Lingkungan dan Sosial				
Sustainability Program & Initiatives	Digitalisasi Proses dan Operasi. Green Office	Pengembangan Kapasitas Internal, Peningkatan Akses Layanan di Daerah Tertinggal (inklusi) Sustainability Report Program “Griya Daya BTN” Layanan Bank Ramah Disabilitas, Membentuk Gen-IH dan Kampanye Rumah Wi-Fi. Sustainability Finance Award			

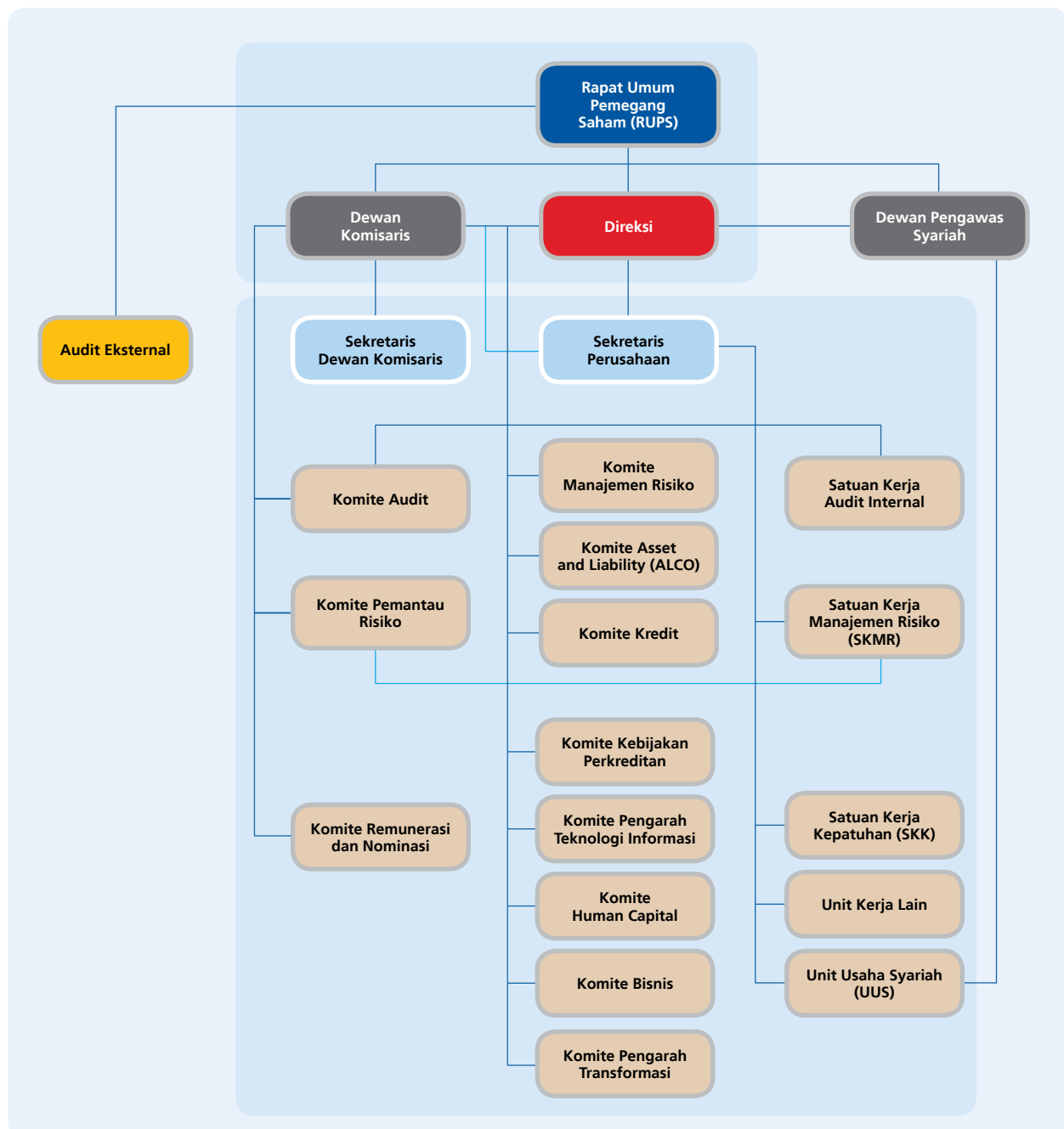
Penerapan Aspek, Prinsip, dan Best Practice Tata Kelola Perusahaan Lainnya

Salah satu upaya lain yang dijalankan Perseroan dalam rangka mengimplementasikan GCG yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan aspek dan prinsip tata kelola yang berlaku secara internasional. Beberapa prinsip tersebut di antaranya *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*, ASEAN CG Scorecard, CGPI, OECD, ASEAN Risk Award, dan praktik terbaik lainnya.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance Mechanism* dapat tercermin dalam berbagai *governance soft structure* yang dimiliki Perseroan dalam implementasi GCG yang akan menjadi *living document* bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi Perseroan.

Governance soft structure Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Pedoman GCG yang disahkan dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/DIR/PPD/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/KOM-BTN/2017 sebagai pembaharuan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja sebelumnya.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 sebagai pembaharuan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja sebelumnya.
4. Tata Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2017.
5. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015.
6. Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Surat Edaran No. 68/DIR/CMPD/2017.
7. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistle Blowing System – WBS*) dan *Anti Fraud* yang telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi SE No. 21/DIR/IAD/2014.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sebagai pemilik modal, pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya atas dasar prinsip kewajaran (*fairness*) sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha Perseroan.

Sebagai salah satu Perseroan Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 10.590.000.000 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 saham Seri B.

Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan Permodalan.
 - c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan presentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan.

Di luar hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

No.	Pemegang Saham	Per 31 Desember 2020		
		Jumlah	Saham	
			Lembar	%
1.	Negara RI	1	6.354.000.000	60,00%
2.	Publik			
	Publik Domestik	38.339	3.046.149.946	28,76%
	Publik Asing	303	1.189.850.054	11,24%
	Total	38.643	10.590.000.000	100,00%

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama/pengendali Bank BTN dengan kepemilikan sebesar 60,00%. 1 (satu) lembar saham adalah Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Sisanya yaitu Saham Seri B dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 0,01% dan publik masing-masing kurang dari 5% sebanyak 39,99% yang didapatkan dari mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perseroan. Sehingga tidak terdapat pemegang saham utama dan pengendali secara tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah Republik Indonesia/ Kepresidenan	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, Indonesia Telp : +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, Indonesia Telp : +62 21 29935678 Fax : +62 21 29935740 www.bumn.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan.
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek, tempat saham Perseroan dicatatkan.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut.

Tahapan Penyelenggara RUPS bagi Perusahaan Publik



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemimpin RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.

Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 40/DIR/CSD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Republika serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 4 Februari 2020.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Republika serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 19 Februari 2020.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 14.38 WIB – 17.00 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 16 Maret 2020.
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 154/CSD/CC/IV/2020, dan dipublikasikan di web Bursa dan web OJK pada tanggal 07 April 2020

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2020

Rapat dipimpin oleh Sdr. Eko Djoeli Heripoerwanto, selaku Komisaris, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Maret 2020 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 45/KOM/BTN/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pimpinan RUPS Tahunan 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
5.	Heru Budi Hartono	Komisaris	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Pahala Nugraha Mansury	Direktur Utama	Hadir
8.	Hirwandi Gafar	Direktur IT & Operation	Hadir
9.	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Finance, Planning, and Treasury	Hadir
10.	Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	Hadir
11.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Hadir
12.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Hadir
13.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Hadir
14.	Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Hadir
15.	Adi Prakoso	Komite Audit	Hadir
16.	Peter Eko Budi Darwito	Komite Audit	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 4 (empat) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.978.210.642 (99,78%)
 Tidak Setuju : 2.279.287 (0,03%)
 Abstain : 15.439.991 (0,19%)

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja-Ernst & Young sesuai Laporan No.00082/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja-Ernst & Young sesuai Laporan No.00163/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam Laporan-laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.983.892.733 (99,85%)
Tidak Setuju : 12.037.187 (0,15%)
Abstain : 0 (0,00%)

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp209.263.033.487 dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

- Dividen sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp20.926.303.349,- (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp12.555.782.009,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp188.336.730.138,- (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.761.733.839 (97,07%)
Tidak Setuju : 226.284.999 (2,83%)
Abstain : 7.911.082 (0,1%)

Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun 2019 serta gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2020.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk tahun 2019 serta gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2020.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.352.518.403 (91,95%)
Tidak Setuju : 630.780.617 (7,89%)
Abstain : 12.630.900 (0,16%)

Keputusan

- Menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.987.880.438 (99,9%)
Tidak Setuju : 0 (0%)
Abstain : 8.049.482 (0,1%)

Keputusan

Menyetujui dokumen Pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 6.810.909.868 (85,18%)
Tidak Setuju : 1.157.131.270 (14,47%)
Abstain : 27.888.782 (0,35%)

Keputusan

1. Menyetujui Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan minimal sebesar 105% (seratus lima persen).
2. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk memutuskan peningkatan manfaat pensiun dan/atau pemberian manfaat lain, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Pensiun Lain minimal sebesar 105% (seratus lima persen).
 - b. Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan kewajiban akuntansi sesuai PSAK No.24 tentang Imbalan Kerja, bagi Perseroan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Laporan dan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan

Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut.

Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 218/DIR/CSD/IV/2019 tanggal 02 April 2019, tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 10 April 2019.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 25 April 2019.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2019, pukul 14.30 WIB – 16.56 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 20 Mei 2019.
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 221/CSD/IRV/2019, dan dipublikasikan di web Bursa dan web OJK pada tanggal 21 Mei 2019.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam SH., MKn dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2019

Rapat dipimpin oleh I Wayan Agus Mertayasa selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2019 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 58/KOM/BTN/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Pimpinan RUPS Tahunan 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Hadir
3.	Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	Hadir
5.	Garuda Wiko	Komisaris Independen	Hadir
6.	Sumiyati	Komisaris	Hadir
7.	Maurin Sitorus	Komisaris	Hadir
8.	Iman Sugema	Komisaris	Hadir
9.	Maryono	Direktur Utama	Hadir
10.	Iman Nugroho Soeko	Direktur Finance & Treasury	Hadir
11.	Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	Hadir
12.	Oni Febriarto Rahardjo	Direktur Commercial Banking	Hadir
13.	Budi Satria	Direktur Consumer Banking	Hadir
14.	R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Strategy, Compliance & Risk	Hadir
15.	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Collection & Asset Management	Hadir
16.	Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	Hadir
17.	Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	Hadir
18.	Rachmat Supratman	Komite Audit	Hadir
19.	Adi Prakoso	Komite Audit	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.632.763.529 (99,78%)
 Tidak Setuju : 0 (0,00%)
 Abstain : 19.060.996 (0,22%)

Keputusan

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/07/0703- 2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. 00654/2.1032/AU.2/10/0703-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 8.643.826.120 (99,91%)
Tidak Setuju	: 7.621.100 (0,09%)
Abstain	: 377.305 (0,00%)

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.807.921.063.074,00 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

- Dividen sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp561.584.212.615,00 (lima ratus enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp336.950.527.569,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.246.336.850.459,00 (dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 8.610.196.157 (99,52%)
Tidak Setuju	: 40.648.463 (0,47%)
Abstain	: 979.905 (0,01%)

Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 8.189.716.596 (94,66%)
Tidak Setuju	: 385.321.593 (4,45%)
Abstain	: 76.786.336 (0,89%)

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Kelima**

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Tidak dilakukan pemungutan suara karena sifatnya merupakan laporan.

Keputusan

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja serta mengingat perlunya persetujuan dari Regulator, untuk itu Perseroan akan melakukan kajian kembali terhadap rencana pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan, maka untuk Mata Acara Kelima dari Rapat tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keenam**

Pengambilalihan Saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 6.887.596.349 (79,61%)
 Tidak Setuju : 1.550.036.176 (17,92%)
 Abstain : 214.192.000 (2,47%)

Keputusan

1. Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PNM") dalam PT PNM Investment Management ("PNMIM"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 85% atau setara dengan 93.500 lembar saham yang akan dilaksanakan secara bertahap.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan saham PNM dalam PNMIM, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Ketujuh**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.081.219.844 (81,85%)
 Tidak Setuju : 1.550.490.976 (17,92%)
 Abstain : 20.113.705 (0,23%)

Keputusan

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Iman Nugroho Soeko sebagai Direktur Finance & Treasury, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Strategy, Compliance & Risk	Direktur Compliance
2.	Direktur Finance & Treasury	Direktur Finance, Treasury & Strategy

- Mengalihkan penugasan Sdr. R. Mahelan Prabantarikso yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dari semula sebagai Direktur Strategy, Compliance & Risk menjadi Direktur Compliance dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan tersebut, serta menugaskan Sdr. Nixon L. P. Napitupulu untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Finance, Treasury & Strategy selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Collection & Asset Management sampai dengan diangkatnya Direktur Finance, Treasury & Strategy yang definitif.
- Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

1.	Direktur Utama	: Sdr. Maryono
2.	Direktur Commercial Banking	: Sdr. Oni Febriarto R.
3.	Direktur Consumer Banking	: Sdr. Budi Satria
4.	Direktur Compliance	: Sdr. R. Mahelan Prabantarikso
5.	Direktur Collection & Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury & Strategy	: Sdr. Nixon L. P. Napitupulu
6.	Direktur Distribution & Network	: Sdr. Dasuki Amsir
7.	Direktur Strategic Human Capital	: Sdr. Yossi Istanto
8.	Direktur IT & Operation	: Sdr. Andi Nirwoto

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat Ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1.	Sdr. I Wayan Agus Mertayasa	sebagai	Komisaris Utama/ Independen
2.	Sdr. Parman Nataatmadja	sebagai	Komisaris
3.	Sdr. Maurin Sitorus	sebagai	Komisaris

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1.	Sdr. Asmawi Syam	sebagai	Komisaris Utama/Independen
3.	Sdr. Eko D. Heripoerwanto	sebagai	Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

1.	Komisaris Utama	: Asmawi Syam
2.	Komisaris	: Iman Sugema
3.	Komisaris	: Eko D. Heripoerwanto
4.	Komisaris	: Sumiyati
5.	Komisaris Independen	: Garuda Wiko
6.	Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
7.	Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
8.	Komisaris Independen	: Arie Coerniadi

- Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 457/DIR/CSD/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Investor Daily serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 23 Juli 2019.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Investor Daily serta web Bursa, web BTN dan web OJK pada tanggal 07 Agustus 2019.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, pukul 15.35 WIB – 17.04 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Investor Daily serta web Bursa, web BTN dan web OJK pada tanggal 02 September 2019.
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 518/CSD/IR/IX/2019 tanggal 27 September 2019, dan dipublikasikan di web Bursa dan web OJK.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019

Rapat dipimpin oleh Sdr. Kamaruddin Sjam selaku Komisaris Independen yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 113/KOM/BTN/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pimpinan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Asmawi Syam	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Hadir
3.	Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	Hadir
5.	Garuda Wiko	Komisaris Independen	Hadir
6.	Sumiyati	Komisaris	Hadir
7.	Iman Sugema	Komisaris	Hadir
8.	Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
9.	Maryono	Direktur Utama	Hadir
10.	Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	Hadir
11.	Oni Febriarto Rahardjo	Direktur Commercial Banking	Hadir
12.	Budi Satria	Direktur Consumer Banking	Hadir
13.	R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Compliance	Hadir
14.	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Collection & Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury & Strategy	Hadir
15.	Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	Hadir
16.	Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	Hadir
17.	Rachmat Supratman	Komite Audit	Hadir
18.	Adi Prakoso	Komite Audit	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Tidak dilakukan pemungutan suara karena sifatnya merupakan laporan.

Keputusan

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Rencana Pembelian Saham Perusahaan Modal Ventura Secara Bertahap.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 5 (lima) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.112.342.637 (81,51%)

Tidak Setuju : 1.594.711.649 (18,28%)

Abstain : 18.120.400 (0,21%)

Keputusan

1. Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT Sarana Papua Ventura ("SPV"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 90% yang akan dilaksanakan secara bertahap.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan saham SPV, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.110.989.746 (81,50%)

Tidak Setuju : 1.595.911.930 (18,29%)

Abstain : 18.273.010 (0,21%)

Keputusan

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Memberhentikan dengan hormat Sdri. Sumiyati sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
2. Mengangkat Sdr. Marwanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Pengangkatan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1.	Komisaris Utama	: Asmawi Syam
2.	Komisaris	: Iman Sugema
3.	Komisaris	: Eko D. Heripoerwanto
4.	Komisaris	: Marwanto
5.	Komisaris Independen	: Garuda Wiko
6.	Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
7.	Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
8.	Komisaris Independen	: Arie Coerniadi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Maryono sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L. P. Napitupulu yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017 yang semula sebagai Direktur Collection & Asset Management menjadi Direktur Finance, Treasury, & Strategy, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Suprajarto sebagai Direktur Utama
 - b. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur Collection & Asset Management.
4. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

1.	Direktur Utama	: Suprajarto
2.	Direktur Strategic Human Capital	: Yossi Istanto
3.	Direktur Consumer Banking	: Budi Satria
4.	Direktur Commercial Banking	: Oni Febriarto R.
5.	Direktur Collection & Asset Management	: Elisabeth Novie Riswanti
6.	Direktur IT & Operation	: Andi Nirwoto
7.	Direktur Distribution & Network	: Dasuki Amsir
8.	Direktur Finance, Treasury, & Strategy	: Nixon L. P. Napitupulu
9.	Direktur Compliance	: R. Mahelan Prabantarkso

5. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tanggal 27 November 2019 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 587/DIR/CSD/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 11 September 2019.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 26 September 2019 untuk rencana RUPS 18 Oktober 2019. Sehubungan dengan adanya Surat BUMN No. S-1124/MBU/D5/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019, maka RUPS diundur menjadi 11 November 2019 sehingga ralat pemanggilan melalui melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 16 Oktober 2019. Selanjutnya terdapat Surat BUMN No.S-1195/MBU/D5/11/2019 tanggal 1 November 2019, maka RUPS diundur menjadi 27 November 2019 sehingga ralat pemanggilan melalui melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia serta web Bursa, web Bank BTN dan web OJK pada tanggal 05 November 2019.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2019, pukul 15.18 WIB – 16.07 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia serta web Bursa, web BTN dan web OJK pada tanggal 29 November 2019.
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 703/CSD/IR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, dan dipublikasikan di web Bursa dan web OJK.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI, M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tanggal 27 November 2019

Rapat dipimpin oleh Sdr. Asmawi Syam selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 166/KOM/BTN/XI/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Pimpinan RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 27 November 2019, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Asmawi Syam	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Hadir
3.	Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Komisaris Independen	Hadir
5.	Garuda Wiko	Komisaris Independen	Hadir
6.	Marwanto Harjowiryo	Komisaris	Hadir
7.	Iman Sugema	Komisaris	Hadir
8.	Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
9.	Oni Febriarto Rahardjo	Plt. Direktur Utama, Direktur Commercial Banking	Hadir
10.	Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	Hadir
11.	Budi Satria	Direktur Consumer Banking	Hadir
12.	R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Compliance	Hadir
13.	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Finance, Treasury & Strategy	Hadir
14.	Dasuki Amsir	Direktur Distribution & Network	Hadir
15.	Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	Hadir
16.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Collection & Asset Management	Hadir
17.	Peter Eko Budi Darwito	Komite Audit	Hadir
18.	Adi Prakoso	Komite Audit	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 27 November 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.544.433.283 (99,96%)
 Tidak Setuju : 2.421.000 (0,03%)
 Abstain : 393.890 (0,01%)

Keputusan

1. Memberhentikan Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 1. Budi Satria sebagai Direktur Consumer Banking;
 2. Oni Febriarto R. sebagai Direktur Commercial Banking;
 3. Dasuki Amsir sebagai Direktur Distribution & Network;
 4. R. Mahelan Prabantarikso sebagai Direktur Compliance;
 5. Asmawi Syam sebagai Komisaris Utama;
 6. Iman Sugema sebagai Komisaris;
 7. Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris;
 8. Garuda Wiko sebagai Komisaris Independen;
 9. Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai Komisaris Independen;
 10. Kamaruddin Sjam sebagai Komisaris Independen;
 11. Arie Coerniadi sebagai Komisaris Independen.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Consumer Banking	Direktur Consumer and Commercial Lending
2.	Direktur Commercial Banking	-
3.	Direktur Finance, Treasury & Strategy	Direktur Finance, Planning and Treasury
4.	Direktur Strategic Human Capital	Direktur Human Capital, Legal and Compliance
5.	Direktur Compliance	-
6.	Direktur Collection & Asset Management	Direktur Remedial and Wholesale Risk
7.	Direktur IT & Operation	Direktur Operation, IT and Digital Banking
8.	Direktur Distribution & Network	Direktur Distribution and Retail Funding
9.	-	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Finance, Treasury & Strategy	Direktur Finance, Planning and Treasury
2.	Yossi Istanto	Direktur Strategic Human Capital	Direktur Human Capital, Legal and Compliance
3.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Collection & Asset Management	Direktur Remedial and Wholesale Risk
4.	Andi Nirwoto	Direktur IT & Operation	Direktur Operation, IT and Digital Banking

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2016, RUPS Tahun Buku 2017, dan RUPSLB Tahun 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1. Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama;
2. Hirwandi Gafar sebagai Direktur Consumer and Commercial Lending;
3. Jasmin sebagai Direktur Distribution and Retail Funding;
4. Setiyo Wibowo sebagai Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics;
5. Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen;
6. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris;
7. Andin Hadiyanto sebagai Komisaris;
8. Armand B. Arief sebagai Komisaris Independen;
9. Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen.

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, serta pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Pahala Nugraha Mansury
 - 2) Direktur Consumer and Commercial Lending : Hirwandi Gafar
 - 3) Direktur Finance, Planning and Treasury : Nixon L. P. Napitupulu
 - 4) Direktur Human Capital, Legal and Compliance : Yossi Istanto
 - 5) Direktur Remedial and Wholesale Risk : Elisabeth Novie Riswanti
 - 6) Direktur Operation, IT and Digital Banking : Andi Nirwoto
 - 7) Direktur Distribution and Retail Funding : Jasmin
 - 8) Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics : Setiyo Wibowo
- b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Chandra Hamzah
 - 2) Komisaris : Eko D. Heripoerwanto
 - 3) Komisaris : Heru Budi Hartono
 - 4) Komisaris : Andin Hadiyanto
 - 5) Komisaris Independen : Armand B. Arief
 - 6) Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Status: Terealisasi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara pada setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris, serta untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama merupakan koordinator Dewan Komisaris, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas pengawasan.
4. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, dokumen-dokumen lainnya, persediaan barang-barang, memeriksa kekayaan Perseroan dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor/bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
3. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris.
8. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.

10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
11. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
12. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
13. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perseroan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan/atau anggota *Ex-Officio* Komite Remunerasi dan Nominasi.
14. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
15. Berhak diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan asset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali asset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menetapkan dan merubah logo Perseroan.
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.
5. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
7. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan
9. Piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
11. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
13. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - a. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan.
 - b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan Dewan Komisaris

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, mulai berlaku terhitung sejak penutupan RUPS.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur tersendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2017. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan
- Bab II** Landasan Hukum
- Bab III** Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan
- Bab IV** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - A. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
 - B. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris
 - C. Kriteria tambahan bagi anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen
 - D. Rangkap Jabatan
 - E. Pengangkatan dan Pemberhentian
 - F. Masa Jabatan
 - G. Tugas dan Tanggung Jawab
 - H. Kewajiban
 - I. Hak dan Wewenang
 - J. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
 - K. Larangan
 - L. Etika Jabatan
 - M. Waktu Kerja
 - N. Pengaturan Rapat
 - O. Kepemimpinan
 - P. Evaluasi Kinerja
 - Q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - R. Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris
- Bab V** Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- Bab VI** Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
- Bab VII** Mekanisme Perubahan
- Bab VIII** Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan pada penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilaksanakan tersebut mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik serta kompetensi dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris terdiri dari anggota Dewan Komisaris wakil Pemegang Saham Dwiwarna dan anggota Dewan Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
3. Seorang di antara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
5. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
6. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019	20 Desember 2019
Heru Budi Hartono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Andin Hadiyanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2020 tidak terdapat Dewan Komisaris baru, sehingga tidak dilaksanakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membuat pembagian tugas dan wewenang pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, yang diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Fokus atau pembidangan tugas pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan pada pembagian peran sebagai Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	- Koordinator Dewan Komisaris - Bidang Remunerasi dan Nominasi
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Manajemen Risiko dan <i>Compliance</i>
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Audit Internal dan Audit Eksternal
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Manajemen Risiko dan <i>Compliance</i>
Heru Budi Hartono	Komisaris	Bidang Remunerasi dan Nominasi
Andin Hadiyanto	Komisaris	Audit Internal dan Audit Eksternal

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Heru Budi Hartono	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andin Hadiyanto	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Partner	Assegaf Hamzah & Partners Law Firm
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	-	-
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	-	-
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian PUPR
Heru Budi Hartono	Komisaris	Kepala Sekretariat Presiden	Kementerian Sekretariat Negara
Andin Hadiyanto	Komisaris	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan Etika Jabatan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)
Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:
 - a. Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
 - b. Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
 - c. Memberikan informasi kepada pihak lain.
2. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut, maka anggota Benturan Kepentingan hendaknya senantiasa harus:
 - a. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

- b. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
 - c. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Benturan Kepentingan lain dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
 - d. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari Pelanggan atau seseorang pejabat Pemerintah atau Swasta untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2020, Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun Perusahaan lainnya.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Ada
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Heru Budi Hartono	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andin Hadiyanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Komisaris Independen

Per 31 Desember 2020 Perseroan memiliki Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) orang dari total jumlah Komisaris sebanyak 6 (enam) orang, atau sebesar 50% dari jumlah keanggotaan Dewan Komisaris, sehingga telah memenuhi ketentuan komposisi jumlah Komisaris Independen minimal 50% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan jalannya kegiatan usaha yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemangku kepentingan lainnya. Adapun pemenuhan kriteria independensi bagi masing-masing Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut.

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Chandra M. Hamzah	Armand Bachtiar Arief	Ahdi Jumhari Luddin
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	✓	✓	✓
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.	✓	✓	✓

Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara rinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercatum di bawah ini.



Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan Rapat (Internal) Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOMBTN/2017 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tanggal 10 Agustus 2017. Sedangkan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 November 2017. Sesuai dengan pedoman tersebut rapat Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris merupakan rapat yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan, akan tetapi apabila perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan sekurang-kurangnya membahas agenda meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - b. *Performance Review* (termasuk pembahasan tentang APU PPT).
 - c. Pelaksanaan GCG dan Tindak Lanjut temuan Audit Intern maupun Ekstern.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Terjadwal Dewan Komisaris dan wajib dihadiri oleh minimal setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang sudah dinyatakan efektif.

Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi maupun pihak terkait apabila diperlukan. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicatat dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Keputusan yang disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain:

1. Dewan Komisaris dapat menyetujui usul struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sesuai Anggaran Dasar dan keputusan RUPSLB tanggal 27 November 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Secara prinsip Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020.
3. Persetujuan Penetapan KAP Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai pemenang pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Rencana Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris, telah disepakati bahwa Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2020 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan setiap hari Rabu dan sesuai kebutuhan. Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini.
- Review/kajian terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya.
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai review/kajian yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Perseroan dan *performance review* kinerja keuangan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat Bersama Direksi sekurang-kurangnya dengan agenda Paparan Direksi mengenai kinerja perusahaan.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	08 Januari 2020	1. Surat Masuk Dewan Komisaris. 2. Informasi Terkini. 3. Resume Komite Audit atas Hasil Audit Internal. 4. Pendalaman atas Kasus BSP 5. Surat Edaran Direksi Nomor 5 Tahun 2011 perihal petunjuk Pelaksanaan Standarisasi Dokumen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
2.	15 Januari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Bank. 4. Lain-Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
3.	23 Januari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. <i>Update WBS</i> . 4. <i>Performance Review</i> Desember 2019. 5. Pinjaman Subordinasi dari SMF.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
4.	29 Januari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Tidak Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
5.	05 Februari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020. 4. Fasilitas <i>Credit Line</i> kepada PT Pertamina (Persero). 5. Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Tahun 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 6. <i>Progress</i> Laporan Pengawasan Semester II/2019.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
6.	12 Februari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Pengangkatan Kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i> . 4. <i>Recovery Plan</i> . 5. Pengaduan Nasabah an Melia Sri Wulandari, Notaris BTN KC Bandung dan KC Bandung Timur.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
7.	19 Februari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Paparan <i>Performance Review</i> Januari 2020 oleh Komite Audit. 4. Paparan Evaluasi Profil Risiko oleh Komite Pemantau Risiko. 5. Tindak Lanjut Rencana Penerbitan Obligasi dan Sekuritasi.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
8.	26 Februari 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Rencana Transaksi Sekuritasi KPR Bank BTN EBA-SP Tahun 2020. 4. <i>Progress</i> Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2019. 5. Daftar Pihak Terkait Bank.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
9.	04 Maret 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Rencana Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
10.	11 Maret 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Draft Skenario RUPST 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 4. Evaluasi atas Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
11.	26 Maret 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 11 dan 12 Maret 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
12.	01 April 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 26 Maret 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
13.	08 April 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 01 April 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
14.	15 April 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 08 April 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
15.	22 April 2020	1. Surat Masuk. 2. Paparan Komite Audit. 3. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 15 April 2020. 4. Informasi Terkini. 5. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
16.	29 April 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 22 April 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
17.	06 Mei 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 29 April 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
18.	13 Mei 2020	1. Surat Masuk. 2. Resume Hasil Audit 7 Divisi Kantor Pusat dan Komite Audit. 3. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 06 Mei 2020. 4. Informasi Terkini. 5. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Tidak Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
19.	20 Mei 2020	1. Surat Masuk. 2. <i>Performance Review</i> oleh Komite Audit. 3. Paparan Resume Hasil Audit oleh Komite Audit. 4. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 13 Mei 2020 5. Informasi Terkini. 6. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
20.	27 Mei 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 20 Mei 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
21.	03 Juni 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 27 Mei 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
22.	10 Juni 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 03 Juni 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
23.	17 Juni 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 10 Juni 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
24.	24 Juni 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 17 Juni 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Tidak Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir
25.	01 Juli 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 24 Juni 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
26.	08 Juli 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 01 Juli 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
27.	15 Juli 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
28.	22 Juli 2020	1. Surat Masuk. 2. Informasi Terkini. 3. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
29.	29 Juli 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 22 Juli 2020. 3. Informasi Terkini; Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
30.	05 Agustus 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 29 Juli 2020. 3. Informasi Terkini; Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
31.	12 Agustus 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 5 Agustus 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
32.	19 Agustus 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 12 Agustus 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
33.	26 Agustus 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 12 Agustus 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
34.	02 September 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 26 Agustus 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain. 5. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit pada Direktorat Operation, IT & Digital Banking. 6. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit pada Direktorat Consumer and Commercial Lending.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
35.	09 September 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 02 September 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain. 5. Mekanisme Penyusunan Peraturan Internal (termasuk addendum).	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
36.	16 September 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 9 September 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain. 5. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
37.	23 September 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 16 September 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain. 5. Hapus Buku Kredit.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
38.	07 Oktober 2020	1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 23 September 2020 dan sebelumnya 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
39.	14 Oktober 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 7 Oktober 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain; Draft Revisi SKB.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
40.	21 Oktober 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 14 Oktober 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain. 5. Pembahasan pengembangan PAB dan Jaringan Kantor, dan rencana Strategis tentang Distribution Network dengan Direktorat Distribution Direktorat Direktur Distribution & Ritel Funding.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
41.	27 Oktober 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 21 Oktober 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
42.	04 November 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 27 Oktober 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain. 5. Paparan Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics tentang Sentralisasi Komersial. 6. Tugas, Fungsi, Strategi, dan Infrastruktur dalam Rangka Rencana Perubahan Komposisi Subsidi dan Non Subsidi.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
43.	11 November 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 4 November 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
44.	18 November 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat tanggal 11 November 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
45.	25 November 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 18 November 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
46.	02 Desember 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 25 November 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
47.	08 Desember 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 02 Desember 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
48.	16 Desember 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 08 Desember 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
49.	23 Desember 2020	1. Surat Masuk. 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 16 Desember 2020. 3. Informasi Terkini. 4. Informasi Lain.	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
1.	8 Januari 2020	• <i>Subdebt</i> dengan SMF • <i>Junior Global Bond</i> • Sekuritisasi Aset • Temuan Hasil Audit • <i>Bancassurance</i> BTN dengan Sinarmas • SE Direksi Nomor 05 Tahun 2011 Perihal petunjuk Pelaksanaan Standarisasi Dokumen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Tidak Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
					Jasmin	Hadir
2.	23 Januari 2020	• Rencana Bisnis Bank 2019-2021 • <i>Performance Review</i> Desember 2019 • <i>Update WBS</i> • Lain-Lain	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Andi Nirwoto	Tidak Hadir
					Jasmin	Hadir
3.	29 Januari 2020	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2019 a. Tata Kelola b. Profil Risiko Triwulan IV/2019 c. Permodalan d. Rentabilitas Paparan tentang Whistleblowing System	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Andi Nirwoto	Tidak Hadir
					Jasmin	Tidak Hadir
4.	29 Februari 2020	• Penyesuaian Mata Acara RUPS Tahunan 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk • <i>Performance Review</i> Januari 2020 • Evaluasi Profil Risiko	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Tidak Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
					Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
5.	12 Maret 2020	• <i>Buyback</i> Saham dalam Rangka <i>Long Term Incentive</i> • Antisipasi terhadap Dampak Virus Corona pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
6.	1 April 2020	• <i>Stress test</i> dan Kondisi Terkini Bank BTN akibat COVID-19 • Kebijakan Restrukturisasi dan Relaksasi Kredit • Lain-lain (arahan Dewan Komisaris lain-lain dan tindak lanjut RUPST BTN Tahun 2020)	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
7.	22 April 2020	<i>Performance Review</i> sampai dengan Maret 2020	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
8.	20 Mei 2020	• Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris • <i>Performance Review</i> sampai dengan April 2020	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir	Jasmin	Hadir
9.	24 Juni 2020	• Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris • Fokus Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk • <i>Performance Review</i> sampai dengan Mei 2020	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Tidak Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
10.	8 Juli 2020	Rencana Penyertaan Modal pada Lotus Putra	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Tidak Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Tidak Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Tidak Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
					Andi Nirwoto	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Tidak Hadir
11.	15 Juli 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris <i>Performance Review</i> Bulan Mei dan Juni 2020 - Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko BTN	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
12.	22 Juli 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris - Kebijakan <i>Antibribery Management System</i> di BTN	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
13.	19 Agustus 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris - Progress Rencana Penyertaan pada PT Jiwasraya Putra <i>Performance Review</i> Juli 2020	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
14.	23 September 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris <i>Performance Review</i> Agustus 2020 <i>Summary 3 Batches Workshop managing People & Process for Boosting Performance</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
15.	21 Oktober 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris <i>Performance Review</i> September 2020	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
16.	20 November 2020	Rencana Bisnis Bank Tahun 2021-2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Tidak Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Tidak Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
					Andi Nirwoto	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Tidak Hadir
17.	25 November 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris <i>Performance Review</i> Oktober 2020 - RBB Tahun 2021 - 2023 dan RKAP Tahun 2021	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Tidak Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
18.	23 Desember 2020	- Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris <i>Performance Review</i> November 2020 - Agenda Lain	Chandra M. Hamzah	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
					Jasmin	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
1.	23 April 2020	Overview Unit Usaha Syariah	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Tidak Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Tidak Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
					Andi Nirwoto	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Tidak Hadir
2.	16 Juni 2020	- Pembahasan Revisi RBB - Pembahasan Rencana Penyertaan Lotus Putra - Rencana <i>Right Issue</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Tidak Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Tidak Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Tidak Hadir	Jasmin	Hadir
3.	11 November 2020	- Pembahasan RKAP 2021 - Pembahasan RBB 2021-2023	Chandra M. Hamzah	Hadir	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Armand Bachtiar Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
					Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali serta rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	49	48	98%	18	18	100%	3	3	100%
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	49	49	100%	18	18	100%	3	3	100%
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	49	47	96%	18	18	100%	3	3	100%
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	49	49	100%	18	17	94%	3	2	67%
Heru Budi Hartono	Komisaris	49	42	86%	18	14	78%	3	2	67%
Andin Hadiyanto	Komisaris	49	41	84%	18	17	94%	3	2	67%

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Sesuai ketentuan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Nasihat disampaikan Dewan Komisaris pada saat rapat dengan Direksi, melalui surat, pada saat rapat kerja ataupun kegiatan lainnya. Dewan Komisaris bersama Direksi juga menuangkan kesepakatan bersama yang di dalamnya terdapat komitmen-komitmen Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan nasihat kepada Direksi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap:
 - a. Rencana Bisnis Bank 2020-2022 dan realisasinya.
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan dan realisasinya.
 - c. Evaluasi pencapaian Kinerja Bulanan.
 - d. Cetak Biru Transformasi Perseroan.
 - e. Peraturan perundang-undangan, peraturan internal untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Perseroan.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - b. Mengawasi efektivitas penerapan Tata Kelola pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko, *compliance* dan Internal Audit.
 - c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - d. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan.
 - e. Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
 - f. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RJP, RBB dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - g. Memantau dan mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi.
4. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Melaksanakan *review* atas struktur organisasi.
9. Melaksanakan *review* atas budaya kerja perusahaan
10. Memberikan arahan dan saran-saran kepada Direksi atas pemberian kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Di samping itu, Dewan Komisaris juga memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN, yaitu penilaian sesuai dengan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016, serta *Assessment* pihak ketiga dengan menggunakan standar internasional yaitu ASEAN CG Scorecard.

Kebijakan Umum mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penyampaian laporan kinerja Dewan Komisaris yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS. RUPS merupakan rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Selain itu Dewan Komisaris juga memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN sebagai berikut:

1. Penilaian sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 Dewan Komisaris telah merumuskan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: aspek pengawasan dan pengarahannya, aspek pelaporan serta aspek dinamis (lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris);
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016; dan
3. *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu ASEAN CG Scorecard. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Bank berdasarkan ketentuan BI/OJK dan ASEAN CG Scorecard diuraikan pada bagian GCG *Assessment* dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Key Performance Indicator Dewan Komisaris Tahun 2020

No.	Program Kerja Dewan Komisaris	2020			Nilai	
		Target KPI	Realisasi KPI	Bobot	%	Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Aspek Pengawasan dan Pengarahan			65	(2) : (1)	((2/1)*3)
	1. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank	6	18	10	300,00	30,00
	2. <i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Perseroan	12	14	20	116,67	23,33
	3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tindak lanjut hasil/ temuan Audit Internal/Eksternal	6	11	10	183,33	18,33
	4. Memberi Persetujuan, Penasehatan dan Konsultasi kepada Direksi	6	30	10	500,00	50,00
	5. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi	12	61	15	508,33	76,25
II.	Aspek Pelaporan			15		
	1. Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Perseroan kepada RUPS	1	2	5	200,00	10,00
	2. Menyampaikan Laporan/Pendapat tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali (Kementerian BUMN) dan OJK (Regulator)	4	6	10	150,00	15,00

No.	Program Kerja Dewan Komisaris	2020			Nilai	
		Target KPI	Realisasi KPI	Bobot	%	Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III.	Aspek Kinerja Perusahaan	15				
	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Perseroan	6	9	15	150,00	22,50
IV.	Aspek Dinamis / Lain-Lain	5				
	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan Tugas dan Tanggung jawab Pengawasan	2	3	5	150,00	7,50
JUMLAH		55	154	100	280,00	280,00

Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Indikator Kinerja menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dewan Komisaris berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing-masing Komite. Adapun dasar penilaian kinerja Komite mencakup (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi bulanan (Laporan Kinerja Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi), memberikan saran atas *draft* RBB, RKAP dan RAKB, melakukan pertemuan rutin dan diskusi dengan IAD dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, serta melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan keuangan Triwulanan, Tahunan dan *Annual Report* yang akan dipublikasikan. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan *Enterprise Risk Management Division* secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Perseroan, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang di dalamnya terdapat *Risk Appetite dan Risk Tolerance* Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tugas Remunerasi dan Nominasi Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (UUS), Nominasi Talent internal Perseroan satu tingkat di bawah Direksi (BoD-1), *Performance Management System* serta mengevaluasi Kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan *Human Capital (Human Capital Management) and Learning Development*.

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun buku Komite-Komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu organ Perseroan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dalam Bidang Syariah serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Perseroan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Perseroan terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Perseroan terkait syariah:
 - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik produk baru yang akan dikeluarkan Perseroan terkait prinsip syariah.
 - b. Memastikan ketersediaan akad yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Perseroan untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
 - c. Mereview sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

- d. Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Perseroan.
 - e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Perseroan.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Perseroan.
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
 - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli *murabahah*.
 - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
 - e. Melakukan *review* terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Perseroan:
- a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPS, DPS diberi kewenangan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Perseroan di UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan internal dan akan yang digunakan pada produk dan aktivitas keuangan yang ada pada UUS.
2. *Mereview* dan menyetujui seluruh kebijakan internal, sistem, produk dan akad yang dikeluarkan oleh Perseroan/UUS yang terkait dengan prinsip syariah.
3. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Perseroan, UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
4. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direktur UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota DPS adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam Dewan Pengawas Syariah, ketentuan perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh.
 - e. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
 - f. Tidak pernah melakukan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).

2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* telah memperoleh persetujuan/surat rekomendasi dari DSN-MUI dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet OJK.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - f. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Perseroan ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.
10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimaksud menjadi tidak berlaku.

Piagam Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. 01/DPS-BTN/I/2020 tanggal 22 Januari 2020. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- Bagian I** Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah
- Bagian II** Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
- Bagian III** Keanggotaan, Komposisi Keanggotaan DPS
- Bagian IV** Remunerasi dan Fasilitas, Rapat, Risaalah
- Bagian V** Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
- Bagian VI** Lain-lain

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan.

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada DSN-MUI.
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.

Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS.

1 Januari – 31 Maret 2020

Selama periode 1 Januari – 31 Maret 2020, Komposisi Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019
Muhammad Gunawan Yasni, S.E.,Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019

31 Maret – 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Maret 2020, Bapak Muhammad Gunawan Yasni, S.E.,Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA berhenti menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dikarenakan beliau mengundurkan diri. Sehingga Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 31 Maret – 31 Desember 2020 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dengan memprioritaskan pada perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Perseroan. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Ketua Dewan Pengawas Syariah	CIMB Niaga
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Bank Syariah Mandiri
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi BRIngin Life Syariah
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT AJ Manulife Syariah
Muhammad Gunawan Yasni, S.E.,Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA*	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	BRI Syariah
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Manulife Asset Management Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi Astra Buana

*) Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Maret 2020

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi *financial* maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., CIFA, FII, CRP, CA*	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Maret 2020

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat DPS adalah forum musyawarah antara anggota DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bidang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan DSN-MUI apabila diperlukan.

Rapat DPS wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam situasi dan kebutuhan tertentu. DPS dapat menyelenggarakan rapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Undangan rapat harus secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota DPS dengan tanda terima atau surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Apabila terdapat kepentingan yang mendesak, undangan dapat dilakukan 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Rapat DPS harus dilakukan di wilayah Indonesia namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, maka keputusan rapat dianggap sah hanya apabila dihadiri oleh seluruh anggota DPS.

Dalam rapat DPS seorang anggota DPS tidak dapat mewakili anggota DPS lainnya yang berhalangan hadir. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang anggota DPS.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota DPS.

Rapat dipimpin oleh ketua DPS atau dalam hal ketua DPS berhalangan, salah satu anggota DPS ditunjuk sebagai ketua rapat. Rapat dapat diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antara peserta rapat) atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat DPS. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang Tahun 2020, DPS telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat DPS dan 1 (satu) kali rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi, serta 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan. Pada April 2020, bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi, DPS membahas *overview* Unit Usaha Syariah BTN. Kemudian, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada kondisi nasabah UUS BTN, pada bulan Mei 2020 DPS melakukan rapat untuk menerbitkan Opini DPS terkait restrukturisasi nasabah yang terdampak COVID-19. Sedangkan pada Desember 2020 DPS telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan terkait dengan isu-isu kepatuhan UUS Bank BTN.

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	22 Januari 2020	1. Laporan Pembukaan KCPS terkait Penerapan Qanun Aceh. 2. Rencana Pembahasan Sinkronisasi Akad-akad.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
			Muhammad Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA	Hadir
2.	11 Februari 2020	1. Finalisasi Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II 2019. 2. Fenomena Masyarakat Anti Riba.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
			Muhammad Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA	Hadir
3.	03 Maret 2020	Rencana Pemberian hadiah dalam bentuk ZISWAF kepada nasabah dalam rangka pengumpulan Dana Pihak Ketiga.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
			Muhammad Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA	Hadir
4.	12 Mei 2020	Restrukturisasi Pembiayaan Konsumer dan Komersial (normal dan terdampak COVID-19).	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
5.	21 Juli 2020	1. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi DPS Semester I Tahun 2020. 2. <i>Update</i> Terbaru Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah. 3. Perkembangan Qanun Aceh; Permohonan Opini Konversi.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
6.	29 September 2020	1. Laporan Hasil Uji Petik Pengawasan DPS di KCS Jakarta Harmoni. 2. Permohonan Opini Konversi Pembiayaan Komersial Dalam Rangka Implementasi Qanun Aceh Perkembangan Qanun Aceh. 3. Permohonan Opini Penjualan Aset <i>True Sale</i> Non Sekuritisasi dan Pelaksanaan Transaksi Treasury Syariah.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
7.	27 Oktober 2020	1. Permohonan Opini DPS perihal Penerbitan Sukuk untuk Pendanaan KPR Tapera. 2. Permohonan Opini DPS atas Rencana Penggunaan Peraturan Internal BTN Induk sebagai Acuan Transaksi Treasury UUS Bank BTN.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
8.	26 November 2020	Rencana Pengembangan Segmentasi Produk Pembiayaan Modal Kerja BTN iB	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
9.	01 Desember 2020	Rapat Koordinasi	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
10.	14 Desember 2020	Pembahasan Hasil Uji Petik DPS di KCS Tangerang	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
11.	22 Desember 2020	Pembahasan Hasil Uji Petik DPS di KCS Bekasi	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir
12.	26 Desember 2020	Evaluasi dan Pengarahan DPS	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, DPS telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 1 (satu) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota DPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	12	12	100%	1	1	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H.	Anggota	12	12	100%	1	1	100%
Muhammad Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., CIFA, FIIS, CRP, CA*	Anggota	3	3	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Maret 2020

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun tahun DPS telah mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah.

No.	Tanggal	Opini
1.	22 Januari 2020	Penyelesaian Pembiayaan Melalui Skema Novasi, Subrogasi, Cessie dan Lelang.
2.	11 Februari 2020	• Penyelesaian Dokumen Pokok. • Rencana Penerbitan Sukuk. • Fenomena Masyarakat AntiRiba.
3.	03 Maret 2020	Pemberian Hadiah Dalam Bentuk ZISWAF Kepada Nasabah Dalam Rangka Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
4.	12 Mei 2020	Restrukturisasi Pembiayaan Konsumer dan Komersial (normal dan terdampak COVID-19).
5.	20 Mei 2020	Penggunaan Fasilitas yang Dimiliki oleh BTN Induk Dalam Melakukan Transaksi di Pasar Uang pada UUS BTN.
6.	20 Juli 2020	Konversi produk KPR BTN Konvensional dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah
7.	29 Juli 2020	Pembelian Portfolio Kredit Pensiunan Pada BTPN Aceh
8.	29 Juli 2020	Konversi Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Pada BTN KC Banda Aceh.
9.	29 Juli 2020	Pengelolaan <i>Wealth Management</i> Pada UUS BTN
10.	29 September 2020	Konversi Pembiayaan Komersial dalam Rangka Implementasi Qanun Aceh.
11.	28 Oktober 2020	Penerbitan Sukuk untuk Pendanaan KPR Tapera.
12.	28 Oktober 2020	Rencana Penggunaan Peraturan Internal BTN Induk sebagai Acuan Transaksi <i>Treasury</i> UUS Bank BTN.

Informasi lebih rinci terkait Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Unit Usaha Syariah dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment*. Pada tahap kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi akan membicarakan hasil *self assessment* dan penilaian kinerja DPS dan menggunakannya sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS yaitu dengan melihat pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2020. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2020 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan bisnis Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi Perseroan sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut efektif.

Direksi

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggungjawab penuh atas jalannya pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Direksi.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektifitas pelaksanaan tugas pengurusan.
4. Memelihara hubungan dan soliditas antar sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Perseroan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
6. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Persyaratan Direksi

Persyaratan Direksi yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

- f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang BUMN, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
4. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
5. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS yang berlaku sejak penutupan RUPS. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemegang saham seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa, yakni mengajukan calon anggota Direksi, yang mana pencalonan mengikat bagi RUPS.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CPMPD/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan
- Bab II** Nilai-nilai
- Bab III** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
 - A. Struktur dan Komposisi Direksi
 - B. Persyaratan Anggota Direksi
 - C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
 - D. Rangkap Jabatan Direksi
 - E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
 - F. Masa Jabatan Direksi
 - G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - H. Kewajiban Direksi
 - I. Hak dan Wewenang Direksi
 - J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris
 - K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
 - L. Larangan
 - M. Transaparansi
 - N. Etika Kerja
 - O. Waktu Kerja
 - P. Pengaturan Rapat
 - Q. Kepemimpinan
 - R. Evaluasi Kinerja Direksi
 - S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - T. Komite

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang. Direksi wajib dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Seorang di antara anggota Direksi dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. Seorang di antara anggota Direksi wajib ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Selain itu, penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan.

Periode Direksi Periode 1 Januari – 23 Desember 2020

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 23 Desember 2020 yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Pahala Nugraha Mansury	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Februari 2020
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Finance, Planning, and Treasury	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017	25 Juli 2017
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

Periode 23 Desember - 31 Desember 2020

Pada tanggal 23 Desember 2020, Bapak Pahala Nugraha Mansury telah dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN, sehingga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maka jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya rangkap jabatan pada tanggal 23 Desember 2020.

Mengingat posisi Direktur Utama lowong, maka Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 Desember 2020 menunjuk Bapak Nixon L. P. Napitupulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perseroan. Sehingga Komposisi Direksi periode 23 Desember – 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BTN. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Nixon L. P. Napitupulu	Plt. Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017	25 Juli 2017
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Program pengenalan Direksi, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2020 tidak terdapat Direksi baru, sehingga tidak dilaksanakan program orientasi bagi anggota Direksi baru.

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap Internal Audit (IAD), Corporate Secretary (CSD) dan Marketing Communication (MCD).
Nixon L. P. Napitupulu**	Plt. Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap Internal Audit (IAD), Corporate Secretary (CSD) dan Marketing Communication (MCD).
	Direktur Finance, Planning, and Treasury	Melaksanakan supervisi terhadap Treasury Division (TRSD), Institutional Banking (IBD), Corporate Strategy & Planning (CSPD), Finance & Accounting (FAD), Procurement & Fixed Asset Management (PFAD) dan Investor Relations & Research (IRRD).
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Melaksanakan supervisi terhadap Corporate Syndication & Transaction Banking (CSTD), Commercial Banking (CMBD), SME Banking (SMBD), Non Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD), Subsidized Mortgage Lending (SMD) dan Sharia Business (SHAD).
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	Melaksanakan supervisi terhadap Human Capital Strategy (HCSD), Human Capital Management (HCMD), Learning Center (LCD), Legal (LGD) dan Compliance and Governance (CMGD).
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Melaksanakan supervisi terhadap Commercial Credit Risk (CRD), Retail Risk (RRD), Commercial Asset Management 1 (CAMD1), Commercial Asset Management 2 (CAMD 2) dan Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD).
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Melaksanakan supervisi terhadap Digital Channel (DCD), Credit Operation (COD), Operation & Business Support (OBSD), IT Strategic Planning & Development (ITPD) dan IT Opeation (ITOD).
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Melaksanakan supervisi terhadap Corporate & Commercial Funding (CMFD), Wealth Management (WMD), Retail Funding & Services (RFSD), Service Quality & Distribution (SQND) dan Regional Office (RO).
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Melaksanakan supervisi terhadap Enterprise Risk Management (ERMD), Transformation & Partnership Management (TPMD), Policy, Procedure & Bussines Process Reengineering (PPBD) dan Data Management & Analytics (DMD).

* Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

** Mulai menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

Hubungan Afiliasi Direksi

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nixon L. P. Napitupulu**	Plt. Direktur Utama														
	Direktur Finance, Planning, and Treasury	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

* Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

** Mulai menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
5. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	-	-
Nixon L. P. Napitupulu**	Plt. Direktur Utama	-	-
	Direktur Finance, Planning, and Treasury	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	-	-
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	-	-
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	-	-
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	-	-

* Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

** Mulai menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict interest*) yaitu suatu kondisi saat kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Bank BTN (Jumlah Lembar Saham)
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	453.100***
Nixon L. P. Napitupulu**	Plt. Direktur Utama	1.220.800
	Direktur Finance, Planning, and Treasury	
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	56.000
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	70.200
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	25.000
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	70.200
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Nihil
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Nihil

* Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

** Mulai menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

*** Kepemilikan Saham periode November 2020.

Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia.

Pengambilan keputusan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan pada pemungutan suara harus memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Rencana Rapat Direksi

Berdasarkan keputusan pada Rapat Direksi, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2020 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan setiap hari Senin dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite dibawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*). Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dan tanda terima yang memadai atau dengan pos paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	8 Januari 2020	Internal Direksi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
2.	17 Januari 2020	Struktur Organisasi Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Tidak Hadir
3.	17 Januari 2020	Paparan Kinerja Perseroan Desember 2019	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Tidak Hadir
4.	21 Januari 2020	BTN Solusi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Tidak Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
5.	22 Januari 2020	Performance Review Desember 2019	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
6.	23 Januari 2020	Penerbitan Obligasi dan Transaksi Sekuritas Tahun 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
7.	27 Januari 2020	PSAK 71 dan PSAK 73	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
8.	27 Januari 2020	Entry Meeting Audit BPK	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
9.	27 Januari 2020	Update Agenda RUPST 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
10.	27 Januari 2020	Koordinasi Acara HUT dan Komunikasi Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
11.	27 Januari 2020	BPI Fase II	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
12.	31 Januari 2020	Struktur Organisasi L 2	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
13.	31 Januari 2020	Rencana WO Januari 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
14.	10 Februari 2020	Update Agenda RUPST 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
15.	10 Februari 2020	Evaluasi dan Usulan Komite di bawah Supervisi Direksi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
16.	10 Februari 2020	Closing Meeting Penugasan Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
17.	10 Februari 2020	Rapat Komite Produk "KPR BTN Rumah Sederhana"	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
18.	10 Februari 2020	Program Budaya Perusahaan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
19.	10 Februari 2020	Update Temuan Audit	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
20.	10 Februari 2020	Strategi dan Pengembangan Merchant Acquiring	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
21.	17 Februari 2020	Usulan Hasil Evaluasi Realisasi dan Proses Kredit Konsumer Non Subsidi dan Subsidi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
22.	17 Februari 2020	Penyusunan Laporan Tahunan Bank BTN Tahun 2019	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
23.	24 Februari 2020	Prognosa Kinerja Februari 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
24.	24 Februari 2020	KPI dan <i>Dividend Policy</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
25.	26 Februari 2020	Tata Kelola Komite Kredit	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
26.	2 Maret 2020	Update Kinerja , Volume, Estimasi FBI, Kinerja NPL dan Dampaknya terhadap Laba	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
27.	2 Maret 2020	Update Skenario RUPST 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
28.	2 Maret 2020	KPI 2019/2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
29.	2 Maret 2020	Update Rencana Penyertaan Modal Pada PT Asuransi Jiwasraya Putra (Project Lotus Putra)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
30.	2 Maret 2020	Merchant Aquiring BTN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
31.	2 Maret 2020	Dampak Corona Terhadap Kinerja Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
32.	6 Maret 2020	<i>Business Continuity Plan 2019</i> Novel Corona (COVID-19)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
33.	9 Maret 2020	8 Inisiatif Strategi Perseroan dan CBC dan BPI Komersial	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
34.	9 Maret 2020	Aturan <i>Threshold</i> bagi Direksi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
35.	9 Maret 2020	<i>Update Materi RUPST 2020</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
36.	11 Maret 2020	Rencana Kunjungan dan Pengarahan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Perseroan ke Kantor Cabang	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
37.	16 Maret 2020	Prognosa Kinerja Maret 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
38.	16 Maret 2020	Pengadaan Jasa Konsultansi BPI SME & <i>Commercial Lending</i> dan <i>Corporate Plan</i> Tahun 2020 – 2025	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
39.	23 Maret 2020	KPTI	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
40.	23 Maret 2020	<i>Stress Testing</i> COVID-19 terhadap Kualitas Kredit dan Strategi Penyelesaian NPL di CAMD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
41.	23 Maret 2020	<i>Performance Review Februari 2020</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
42.	24 Maret 2020	<i>Manpower Planning and Culture Program 2020</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
43.	24 Maret 2020	Laporan Proses Pengadaan Underwriter Penerbitan Obligasi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
44.	24 Maret 2020	Laporan <i>Project Lotus Putra</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
45.	26 Maret 2020	Evaluasi Realisasi dan Proses Kredit Konsumer - RLPC dan Mekanisme Akad Kredit dengan Kondisi Terbatasnya Layanan di Kantor Pajak dan BPN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
46.	30 Maret 2020	Stress Testing Dampak Wabah COVID-19 terhadap Kualitas Kredit dan Pembiayaan Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
47.	30 Maret 2020	Prognosa Kinerja Maret 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
48.	30 Maret 2020	Usulan Percepatan Proses Untuk Calon Debitur Kategori <i>Low Risk</i> dan Usulan Relaksasi Ketentuan Pegawai Kontrak	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
49.	6 April 2020	Peningkatan Produktivitas Pegawai WFH	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
50.	6 April 2020	Usulan Proses dan Kebijakan KPR Subsidi Karena Dampak COVID-19, Strategi Penyaluran KPR Bersubsidi 2020, Strategi dan Kebijakan KPR Karena Dampak COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
51.	6 April 2020	Online Onboarding for Open Account Bank BTN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
52.	6 April 2020	Strategi Pencapaian FBI Ritel 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
53.	7 April 2020	Supervisi Direksi Pada Unit Kerja	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
54.	8 April 2020	Usulan Pembentukan Unit Pemutus Kredit Restrukturisasi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
55.	13 April 2020	Rapat Dana Pensiun	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
56.	13 April 2020	Merchant Aquiring BTN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
57.	13 April 2020	Kinerja Laporan Keuangan Maret 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
58.	13 April 2020	Review Portofolio Kredit Terdampak COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
59.	17 April 2020	Usulan Efisiensi Biaya Tahun 2020 Dampak Perlambatan Bisnis Akibat COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
60.	20 April 2020	Rencana Penerbitan Sukuk Perseroan Tahun 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
61.	20 April 2020	Penyaluran BLT dan Kartu Prakerja	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
62.	20 April 2020	Evaluasi Program Optimalisasi Produktivitas Pegawai WFH 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
63.	20 April 2020	Rencana Pengembangan Tabungan dan Giro	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
64.	23 April 2020	Rapat Bersama Direksi - Dewan Komisaris (<i>Overview UUS</i>)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
65.	27 April 2020	<i>Enhancement</i> SCF dan CMS	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
66.	27 April 2020	Segmentasi Kredit BUMN dan Review Struktur Organisasi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
67.	27 April 2020	Business Continuity Plan 2019 Novel Corona (COVID-19)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
68.	27 April 2020	Pembagian Debitur CAMD 1 dan CAMD 2	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
69.	4 Mei 2020	Kinerja Kualitas Kredit April 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
70.	4 Mei 2020	Pengelolaan LAR dan Watchlist	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
71.	4 Mei 2020	Optimalisasi Produktivitas Pegawai WFH Evaluasi Minggu III	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
72.	5 Mei 2020	Performance Review Maret 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
73.	11 Mei 2020	Roadmap Digital Channel BTN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
74.	11 Mei 2020	Usulan Guideline Revisi RBB BTN Tahun 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
75.	11 Mei 2020	Rekapitulasi Data Portofolio BTN Pemenuhan Data Himbara - PEN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
76.	11 Mei 2020	Branch Productivity	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
77.	12 Mei 2020	Potensi Restrukturisasi POJK 11/2020 dan Alternatif Skema Penyelesaian Kredit CAMD 2	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
78.	18 Mei 2020	Prognosa Kinerja Mei 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
79.	18 Mei 2020	Pengelolaan Tenaga Alih Daya	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
80.	18 Mei 2020	Optimalisasi Produktivitas Pegawai WFH Evaluasi Minggu V	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
81.	18 Mei 2020	Potensi Restrukturisasi POJK 11/2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
82.	18 Mei 2020	Overview Unit Usaha Syariah	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
83.	27 Mei 2020	Corporate Plan dan BPI	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
84.	27 Mei 2020	Progress Investasi di Anak Perusahaan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
85.	27 Mei 2020	Protokol <i>The New Normal</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
86.	28 Mei 2020	Kondisi Kolektibilitas Per Tanggal 26 Mei 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
87.	29 Mei 2020	Rapat Direksi Likuiditas	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
88.	30 Mei 2020	BCM dan <i>Review Tim Task Force</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
89.	3 Juni 2020	BCM - <i>Task Force</i> COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
90.	3 Juni 2020	Penawaran Penjualan Aset Kredit Bank Bukopin	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
91.	3 Juni 2020	FBI Review Per April 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
92.	8 Juni 2020	Kinerja Mei 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
93.	8 Juni 2020	Revisi RBB Perseroan Tahun 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
94.	8 Juni 2020	Rencana Penyertaan Modal pada Lotus Putra	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
95.	8 Juni 2020	Tindak Lanjut BTN - BP Tapera	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
96.	8 Juni 2020	Optimalisasi Penyerapan Kuota KPR Subsidi SSB	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
97.	12 Juni 2020	Sentralisasi Pengelolaan Debitur BUMN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
98.	15 Juni 2020	Implikasi PMK No. 64 dan 65 Tahun 2020 terhadap Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
99.	15 Juni 2020	Digitalisasi Proses Verifikasi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
100.	15 Juni 2020	Rencana Permodalan Perseroan 2020 - 2024	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
101.	15 Juni 2020	Evaluasi Mitra Manager Investasi Tahun 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
102.	15 Juni 2020	Usulan Pengembangan Tabungan BTN Prima	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
103.	16 Juni 2020	Rapat Bersama Direksi - Dewan Komisaris	Pahala Nugraha Mansury	Tidak Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
104.	19 Juni 2020	Strategi Pengembangan Bisnis BUMN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
105.	19 Juni 2020	Program Pengembangan Kring BTN Pensiunan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
106.	22 Juni 2020	Performance Review Mei 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
107.	22 Juni 2020	Update Progress BPI Consumer and Commercial	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
108.	22 Juni 2020	Strategi dan Pengembangan Tabungan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
109.	22 Juni 2020	Progress Report Inisiatif Strategi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
110.	22 Juni 2020	Laporan Progress Pengadaan Modernisasi Hardware Infrastruktur Critical IT & Hardware Refreshment	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
111.	29 Juni 2020	Usulan Kebijakan dalam Rangka Percepatan Penyaluran Kredit Triwulan III Tahun 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
112.	29 Juni 2020	Prognosa Juni 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
113.	29 Juni 2020	Strategi <i>Partnership</i> Unit Usaha Syariah	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
114.	29 Juni 2020	Strategi Pengembangan Tabungan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
115.	3 Juli 2020	<i>Business Continuity Management</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
116.	3 Juli 2020	ALCO	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
117.	6 Juli 2020	Usulan Alokasi Anggaran dan Fokus Penyaluran CSR dan PKBL	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
118.	6 Juli 2020	Perubahan Proses Pengajuan KPR <i>Online</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
119.	6 Juli 2020	<i>Progress</i> Inisiatif Strategis Direktorat HCLC	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
120.	7 Juli 2020	Pembelian sebagian portofolio Kredit Pensiunan Bank Bukopin	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
121.	13 Juli 2020	Kinerja Juni 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
122.	13 Juli 2020	Laporan Pengembangan Kartu Kredit Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
123.	13 Juli 2020	Progress Report Mei Inisiatif Strategis BTN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
124.	13 Juli 2020	Review Struktur Organisasi RLPC	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
125.	20 Juli 2020	Komite Manajemen Risiko (SMAP)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
126.	21 Juli 2020	Rencana Pembukaan Jasa Layanan Kustodian, Penerbitan Obligasi dan Penerbitan Transaksi Sekuritisasi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
127.	27 Juli 2020	Kerjasama <i>Supply Chain Financing</i> dengan KoinWorks	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
128.	27 Juli 2020	Struktur Organisasi CRSD dan CMGD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
129.	27 Juli 2020	<i>Review TAD Outsourcing</i> dan Sentralisasi Pengadaan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
130.	27 Juli 2020	Tinjauan <i>Management</i> ISO : 37001	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
131.	27 Juli 2020	Update Branchless Banking	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
132.	3 Agustus 2020	Jasa Layanan Kustodian	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
133.	3 Agustus 2020	COP, Sentralisasi Sewa Kendaraan dan Transportasi Online	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
134.	10 Agustus 2020	Update Persiapan Relaunching Point Spekta	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
135.	10 Agustus 2020	Strategi IRRD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
136.	10 Agustus 2020	Review Organisasi RLPC dan CMGD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
137.	10 Agustus 2020	Persiapan IPEX Virtual	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
138.	10 Agustus 2020	Review Program Stimulus Pemerintah dan Antisipasinya	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
139.	14 Agustus 2020	Performance Review Juli 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
140.	18 Agustus 2020	Review Struktur Organisasi CMGD dan RLPC	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
141.	18 Agustus 2020	Usulan Bisnis Proses Khusus KPR BTN Solusi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
142.	24 Agustus 2020	Joint Financing dengan Bank Mandiri Taspen Pos	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
143.	24 Agustus 2020	Hasil Review Job Grading	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
144.	24 Agustus 2020	Prognosa Kredit, Dana dan NPL Agustus 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
145.	24 Agustus 2020	Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
146.	1 September 2020	Materi HCMD (Dana Pensiun)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
147.	1 September 2020	Penjualan Aset Kredit Bermasalah	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
148.	1 September 2020	<i>Business Continuity Management</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
149.	1 September 2020	Proses Bisnis Bank Garansi <i>Online</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
150.	1 September 2020	Pengembangan SME di Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
151.	7 September 2020	Guideline Penyusunan RBB 2021-2023	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
152.	7 September 2020	Update Program Pemerintah terkait PEN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
153.	7 September 2020	Produktivitas Pegawai	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
154.	7 September 2020	Bisnis Proses Khusus untuk KPR BTN Solusi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
155.	7 September 2020	Usulan Revisi Ketetapan Direksi Berupa Ketentuan yang Bersifat Sementara	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
156.	7 September 2020	Rencana Pembangunan <i>Operation Center</i> dan Kantor Wilayah (Kemayoran) Banyuwangi dan Batam	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
157.	12 September 2020	Restrukturisasi Debitur Terdampak COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
158.	12 September 2020	Kinerja Agustus 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
159.	14 September 2020	<i>Performance Review</i> Agustus 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
160.	14 September 2020	<i>Account Strategy Debitur High Rise Building</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
161.	14 September 2020	Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit Internal (Audit Tematik Kualitas Kredit Komersial)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
162.	14 September 2020	Bisnis Proses Bank Garansi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
163.	21 September 2020	Usulan Penambahan Pendanaan Pada Dana Pensiun BTN (DP BTN) dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN (YKP BTN)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
164.	21 September 2020	Progress Transformasi PFAD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
165.	21 September 2020	New Bisnis Mobile Banking BTN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
166.	24 September 2020	Usulan Penyelesaian Kredit Melalui Mekanisme Cessie PT Graha Permata Propertindo	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
167.	24 September 2020	Usulan Penyelesaian Kredit Melalui Mekanisme Cessie PT Rajawali Core Indonesia	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
168.	28 September 2020	Town Hall Meeting COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
169.	28 September 2020	Usulan RJPP Perseroan 2020 - 2024	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
170.	28 September 2020	Meningkatkan Peran Sektor Perumahan Dalam Perekonomian Indonesia	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
171.	28 September 2020	Prognosa September 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
172.	28 September 2020	Assessment Kredit Restrukturisasi COVID-19	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
173.	2 Oktober 2020	Progress dan Rencana Kerja Peningkatan Tabungan dan Evaluasi Program Batara Spekta	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
174.	5 Oktober 2020	Taspen Life	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
175.	5 Oktober 2020	Penetapan WIG Corporate dan Direktorat dan Kick-Off Implementasi 4DX	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
176.	5 Oktober 2020	<i>Progress dan Strategi Penanganan Account Commercial NPL, High Risk, dan LAR</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
177.	5 Oktober 2020	<i>Progress Arahan Tindak Lanjut dan Masukan Dewan Komisaris</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
178.	5 Oktober 2020	<i>Bisnis Proses untuk Developer Rating Platinum/Gold dan Debitur Kolektif</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
179.	5 Oktober 2020	<i>Update Project Tiger (Asset Sales)</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
180.	8 Oktober 2020	Pembahasan Kasus PT PPM	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
181.	12 Oktober 2020	Kinerja September 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
182.	12 Oktober 2020	Regionalisasi Pengelolaan Kredit Segmen Komersial	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
183.	12 Oktober 2020	Pendampingan Implementasi Program Budaya Perusahaan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Tidak Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
184.	19 Oktober 2020	Performance Review September 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
185.	19 Oktober 2020	Analyst Meeting dan Publikasi Laporan Keuangan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
186.	19 Oktober 2020	Kajian Pembangunan Gedung <i>Operation Center</i> dan Kantor Wilayah	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
187.	19 Oktober 2020	Hasil Penilaian dan Usulan <i>Success Fee Advisor</i> Penjualan Aset Kredit Bermasalah	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
188.	19 Oktober 2020	<i>Commercial Banking Center</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
189.	28 Oktober 2020	<i>Corporate Plan</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
190.	28 Oktober 2020	Prognosa Kinerja Oktober 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
191.	28 Oktober 2020	Persetujuan <i>Improvement BPI Consumer</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
192.	28 Oktober 2020	Strategi Tabungan dan Rencana <i>Launching</i> Tabungan BTN Bisnis dan Investa	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
193.	28 Oktober 2020	Kebijakan KPR Non Subsidi dan Subsidi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
194.	28 Oktober 2020	<i>Joint Financing</i> dengan BTPN	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
195.	28 Oktober 2020	Usulan Direktur Pengganti Tugas Direktur	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
196.	2 November 2020	<i>Kick Off Insurance</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
197.	2 November 2020	<i>Kick Off NPL Sales</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
198.	2 November 2020	<i>Kick Off Project FBI</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
199.	2 November 2020	<i>Update Tabungan Batara Pos</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
200.	2 November 2020	Pemberian <i>Deferred</i> Bunga Kepada Calon Investor atas nama Putri Bintang Minut	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
201.	2 November 2020	Rencana Kerjasama dengan TNI AD (TWP - AD)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
202.	2 November 2020	Temuan APU PPT dari <i>Joint Audit</i> OJK & PPATK	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
203.	10 November 2020	Pembahasan RKAP 2021	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
204.	11 November 2020	Rapat Bersama Direksi - Dewan Komisaris	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
205.	13 November 2020	Strategi Tabungan, Rencana <i>Launching</i> Tabungan Investasi dan Tabungan Bisnis	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
206.	13 November 2020	Usulan Paramater dan Metodologi Penerapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Perseroan Tahun 2021	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
207.	13 November 2020	Summary Laporan Keuangan Oktober 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
208.	27 November 2020	Performance Review Oktober 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
209.	27 November 2020	Penyelesaian Kredit Bermasalah atas nama PT Park View oleh Cessor atas nama PT Ferreri Forbes	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
210.	27 November 2020	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2021	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
211.	27 November 2020	Strategi Dalam Pengelolaan Dana dan Penanganan Permasalahan TWP AD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Tidak Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
212.	28 November 2020	Rencana Bisnis Dana Pensiun 2021 dan Rencana Investasi Tahunan Dana Pensiun 2021	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
213.	28 November 2020	Kebijakan <i>Car Ownership Program</i> (COP) Perseroan	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
214.	30 November 2020	Optimalisasi Fungsi TPMD sebagai <i>Transformation Office</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
215.	30 November 2020	<i>Pilot Project Branch Control</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
216.	30 November 2020	Strategi dan Program Kerja <i>Fee Income Treasury</i>	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
217.	7 Desember 2020	Usulan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> 2021	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
218.	7 Desember 2020	Kebijakan COP dan Pengadaannya	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
219.	7 Desember 2020	Strategi Lanjutan dalam Pengelolaan Dana dan Penanganan Permasalahan TWP AD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
220.	14 Desember 2020	<i>Progress Report</i> Pengelolaan TWP AD	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Tidak Hadir
			Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
221.	14 Desember 2020	Wholesale Transaction Product Roadmap and Organization (DCD - CSTD)	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
222.	14 Desember 2020	Project Bank Garansi	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
223.	14 Desember 2020	Implementasi Sentralisasi Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional BTN dan Sentralisasi Pengadaan Laptop dan PC	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Tidak Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
224.	14 Desember 2020	Kinerja November 2020 dan Prognosa Desember 2020	Pahala Nugraha Mansury	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
225.	28 Desember 2020	Business Continuity Management	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
226.	28 Desember 2020	Usulan Revisi KPI Direksi	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir
227.	28 Desember 2020	Prognosa Desember 2020	Nixon L. P. Napitupulu	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir
			Yossi Istanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir
			Jasmin	Hadir
			Setiyo Wibowo	Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kali, dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi			Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	224	222	99%	17	16	94%	3	2	67%
Nixon L. P. Napitupulu**	Plt. Direktur Utama									
	Direktur Finance, Planning, and Treasury	227	225	99%	18	15	83%	3	2	67%
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	227	225	99%	18	15	83%	3	3	100%
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	227	222	97%	18	15	83%	3	2	67%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	227	222	97%	18	15	83%	3	2	67%
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	227	227	100%	18	14	78%	3	2	67%

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi			Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	227	217	95%	18	15	83%	3	2	67%
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	227	227	99%	18	17	94%	3	2	67%

*Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

**Mulai menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2020, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*.
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Laporan Pemenuhan Fungsi Kepatuhan.
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
5. Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit.

Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN CG Scorecard.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan *Annual Report* dan *Sustainability Report*.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Rapat menjadi bagian penting bagi Direksi khususnya dalam mengambil kebijakan strategis dan hal-hal lain yang membutuhkan persetujuan bersama, baik di antara Direksi maupun dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan Rapat Direksi selama tahun 2020 sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kali.

Keputusan-keputusan Direksi

Selain rapat Direksi yang sudah diagendakan dan menghasilkan sejumlah keputusan, sepanjang tahun 2020 juga Direksi telah menerbitkan berbagai Keputusan antara lain terkait perkreditan, pendanaan, transformasi, jaringan/*network*, sumber daya manusia, manajemen risiko dan rencana strategis.

Penilaian Kinerja Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum bagi Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham berdasarkan Kontrak Kinerja Manajemen, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan kinerja terhadap masing-masing Komite sebagai organ penunjang Direksi.

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pada tolok ukur penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Pelaksanaan penilaian Direksi dilakukan dengan beberapa kriteria dan alat ukur di antaranya:

1. *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi

Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Realisasi KPI masing-masing Anggota Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya di-review oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi. KPI bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis perusahaan, meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan, memastikan perusahaan beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi dan ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi perusahaan, mengakselerasi pertumbuhan kinerja perusahaan dan menilai kinerja Direksi secara adil.

Kinerja individu Direksi dapat dilihat secara khusus pada KPI individu yang terdiri dari KPI Bersama dan KPI Direktorat. KPI individu masing-masing Direksi di tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini:

Kategori	No.	KPI Revisi 2020			
			CCL	DRF	
Nilai Ekonomi Sosial untuk Indonesia	Finansial	1. <i>Profit After Tax</i>	●	●	
		2. CAR	●	●	
		3. PPOP			
		4. RAROC (<i>Risk Adjusted Return On Capital</i>) $\geq$ WACC			
		5. <i>Cost of Credit</i>	●	●	
	Sosial	6. <i>Loan to support special assignment</i> (Rp realisasi penyaluran <i>subsidized housing loan</i>)	●		
		7. <i>Gross Margin</i> penyaluran KPR subsidi (Yield - CoF)	●		
		8. <i>Loan to support development agenda for subsidized housing loan</i> (unit)	●		
Inovasi Bisnis Model		9. Implementasi PAB yang telah disetujui OJK	●	●	
		10. Hasil <i>survey</i> kepuasan pelanggan (<i>Customer Engagement Index</i>)		●	
		11. Perbaikan proses bisnis Kredit Konsumer (RPC)			
Kepemimpinan Teknologi		12. <i>Availability</i> layanan IT			
		13. Pertumbuhan nasabah <i>branchless banking</i>		●	
Peningkatan Investasi		14. CGPI Index			
		15. Tingkat kesehatan Bank			
Pengembangan Talenta		16. Pengesahan pembentukan klaster/subklaster BUMN Institute			
		17. Persetujuan Kementerian BUMN untuk Program Pengembangan Talenta lingkup Klaster/Subklaster termasuk di dalamnya program suksesi Direksi dan pengembangan <i>top talent</i> muda (≤ 40 tahun)			
		18. Employee Productivity			
		19. Employee engagement survey			
Usulan Indikator di luar kolegiat untuk menjadi KPI Bersama					
		Rasio Keuangan			
	a.	CIR (<i>Cost to Income Ratio</i>)	●	●	
	b.	<i>Coverage Ratio</i>	●	●	
	c.	CAR	●	●	
	d.	<i>Cost of Credit</i>	●	●	

CASCADING					
	RWR	OIDB	FPT	ERMBDA	HCLC
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•		•	•	
			•	•	
	•	•	•	•	•
	•	•			
	•			•	
		•			
					•
					•
					•
					•
					•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•

2. Rencana Kerja Direksi

Direksi telah menyusun Rencana Kerja 2020 sebagai sasaran atau fokus Perseroan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan Perseroan dan melaksanakan penugasan Pemegang Saham dan memenuhi target KPI yang telah disusun, yang terdiri dari:

No	Bidang	Kegiatan
1	Perkreditan	Memperkuat <i>positioning</i> bisnis di sektor perumahan dan mensukseskan Program Sejuta Rumah.
2	Kualitas Kredit dan implementasi PSAK 71	Perbaikan kualitas kredit difokuskan pada perbaikan proses perkreditan dan meningkatkan efektivitas <i>collection</i> .
3	Pendanaan	Melakukan peningkatan DPK <i>Low Cost</i> sebagai upaya untuk mendukung target pertumbuhan dan perbaikan profitabilitas.
4	<i>Fee Based Income</i> dan Pembentukan Anak Usaha	Meningkatkan NOA dan memperluas aktivitas korporat banking dan <i>treasury</i> dengan mengembangkan transaksi target nasabah komersial dan Lembaga.
5	Bisnis Syariah	Mengoptimalkan model <i>leveraging</i> yang salah satunya adalah <i>mirroring</i> fitur layanan BTN Syariah dengan layanan BTN Induk dan optimalisasi jaringan induk dalam menjual produk-produk syariah.
6	Permodalan	Meningkatkan profitabilitas BTN dan melakukan pinjaman/obligasi.
7	<i>Human Capital</i>	Meningkatkan Produktivitas Pegawai untuk Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan diselenggarakan dan dilandasi perkembangan era digitalisasi untuk memperkuat dan meningkatkan proses bisnis <i>human capital</i> .
8	Infrastruktur IT	Mempersiapkan Teknologi Informasi arsitektur yang mendukung strategi bisnis bank dalam meningkatkan pendanaan murah berbasis transaksi, efektivitas dan efisiensi operasional.
9	<i>Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, dan Compliance</i>	Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan GCG untuk meningkatkan <i>shareholder value</i> .
10	Pengembangan Jaringan (<i>Delivery Channel</i>)	Penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.

3. Penilaian GCG Direksi

Penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain itu Direksi memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN dengan kriteria: a) *Self-Assessment* GCG; b) ASEAN CG Scorecard.

a. *Self-Assessment* GCG

Dalam melakukan penilaian Direksi Perseroan secara *Self Assessment* GCG mengacu pada target-target RKAP yang telah ditetapkan di awal periode dan dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) Direksi yang berdasarkan pertanggung jawabannya pada aspek pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Perseroan aspek Direksi berdasarkan ketentuan BI/ OJK diuraikan pada bagian *GCG Assessment* dalam Laporan Tahunan ini

b. ASEAN CG Scorecard

Penilaian kinerja Direksi juga memperhitungkan *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu ASEAN CG Scorecard. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian ASEAN CG Scorecard diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Perseroan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Perseroan pada periode 2020, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Penilaian Kinerja Direksi telah dilakukan melalui KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual. KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KPI Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Personalia
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis

Selama tahun 2020, Direksi telah melakukan penilaian komite-komite di bawah Direksi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. Komite Manajemen Risiko terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan Komite yang berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) Perseroan. Selama tahun 2020, ALCO telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan Komite yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan. Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kredit merupakan Komite yang bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memutus pemberian

kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Selama tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan 76 (tujuh puluh enam) kali agenda rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Personalia memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2020, Komite Personalia telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Teknologi Informasi berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Perseroan. Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Transformasi berperan dalam proses transformasi Perseroan. Selama tahun 2020, Komite Pengarah Transformasi telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis membantu Direksi dalam merumuskan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan produk Perseroan. Selama tahun 2020, Komite Bisnis telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu *Financial*, *Customer*, *Business Process* serta *Learning and Growth*. Pencapaian KPI tahun 2020 untuk Sekretaris Perusahaan sebesar 98%, Unit Internal Audit sebesar 98% dan Unit Manajemen Risiko sebesar 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian semenara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris berperan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Selain itu, berdasarkan Salinan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 34, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perseroan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Berdasarkan Pasal 5 dan 34 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada satu BUMN maksimal selama 5 (lima) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dewan Komisaris sesuai peraturan Menteri BUMN tersebut adalah melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Siti Fauziyah
Sekretaris Dewan Komisaris

Domisili
Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir
Kebumen, 07 September 1973

Usia
47 Tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

- S1, Ekonomi Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto
- S2, Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta



Riwayat Jabatan

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (1 November 2017 - Sekarang)
- JF PKPNM pada Subkoordinator Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei dan Industri Lainnya, Kementerian BUMN (29 Desember 2020 – sekarang)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) (25 Juli 2014 -Mei 2018)



Dasar Pengangkatan

- Peraturan Menteri BUMN No. PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Dewan Komisaris No. 112/KOM/BTN/X/2020 perihal Pengangkatan Kembali Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1227/DIR/2020 tentang Penetapan Pengangkatan Kembali Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2020, sebagai berikut:

No	Tanggal	Acara/Kegiatan	Tema/Topik	Penyelenggara
1.	12-16 Oktober 2020 19-23 Oktober 2020	<i>Certified Risk Management Professional</i>	Manajemen Risiko	PPM Management – LSPMR- Kementerian BUMN
2.	9-11 Juli 2020	<i>Managing People & Process For Boosting Performance</i>	SDM	BTN
3.	29 Juni 2020- 3 Juli 2020	<i>E-Learning</i> Pengantar Manajemen Keuangan Negara Angkatan IV Tahun 2020	Keuangan	Kementerian Keuangan- Kementerian BUMN
4.	27 Juli 2020- 1 Agustus 2020	<i>E-Learning</i> Dasar-Dasar Penyusunan APBN Angkatan IV Tahun 2020	Keuangan	Kementerian Keuangan- Kementerian BUMN
5.	24 Agustus 2020- 28 Agustus 2020	<i>E-Learning</i> Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Angkatan IV Tahun 2020	Keuangan	Kementerian Keuangan- Kementerian BUMN

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam mendukung setiap kegiatannya yang mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan mengacu pada Program Kerja Dewan Komisaris yang disusun setiap tahun.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan peran sebagai pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan Dewan Komisaris menjalankan praktik GCG sesuai dengan peraturan yang ada. Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya, termasuk Penyiapan undangan rapat, Penyiapan bahan-bahan rapat, Pendokumentasian surat-surat dan Penyusunan risalah rapat.
3. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan Sekretaris Perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
12. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
13. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antar Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
7. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung Jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas internal auditor dan eksternal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
6. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukkan kembali dan pemberhentian Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit tahunan, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
11. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
12. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
15. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (Jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BTN No.01/DEKOM-BTN/IX/2020 tanggal 16 September 2020. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

Bagian I Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Komite Audit

Bagian II Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

- Tugas dan Wewenang Komite Audit
- Tanggung Jawab Komite Audit Dalam Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
- Kewajiban Komite Audit
- Akses dan Kerahasiaan Informasi
- Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
- Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit
- Rapat Komite Audit

- Pelaporan Komite Audit
- Penanganan Pengaduan atau Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan
- Masa Tugas
- Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang
- Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit
- Penghasilan Anggota Komite

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Dewan Komisaris, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, serta 2 (dua) orang Pihak Independen.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ahdi Jumhari Luddin	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Keuangan dan Ekonomi Makro
Adi Prakoso	Anggota	Pihak Independen	Audit, Perbankan dan Akuntansi
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit dan Keuangan

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Ahdi Jumhari Luddin

Ketua Komite Audit
Periode I (16 Maret 2020 - 15 Maret 2023)



Profil dapat dilihat pada bagian
 Profil Dewan Komisaris



Andin Hadiyanto

Anggota Komite Audit
Periode I (10 Juli 2020 - 9 Juli 2023)



Profil dapat dilihat pada bagian
 Profil Dewan Komisaris



Adi Prakoso

Anggota Komite Audit



Domisili

Depok



Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 15 Februari 1965



Usia

55 Tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1989)



Riwayat Jabatan

- *Section Head* di Urusan Administrasi Keuangan PT Bank Dagang Negara (Oktober 1991 - Januari 1996).
- Ketua Tim Audit Intern Bank Dagang Negara (1996-1997).
- *Quality Assurance Auditor* Bank Dagang Negara (1997-1999).
- Tim Merger Internal Audit Bank Mandiri (1999).
- Senior Investigator di Special Audit Department Bank Mandiri (1999-2010).
- *Team Leader* di *Wholesale Banking Audit Department* dan selanjutnya di *Counterpart Relation* Bank Mandiri (2010-2012).
- Kepala Internal Audit PT PANN Pembiayaan Maritim/Anak Perusahaan BUMN (2013 - 2018).



Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI
- *Chartered Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia.
- *Certified Fraud Examiner* (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner, USA.
- *Qualified Internal Auditor* (QIA) dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor.
- Sertifikat Kompetensi sebagai Audit Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).
- Sertifikat *Risk Management* Level 1 dan 2 dari BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan).



Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1303/DIR/2020 tentang Perubahan Susunan keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Periode Jabatan

Periode I (13 Maret 2018-12 Maret 2021)



Peter Eko Budi Darwito

Anggota Komite Audit



Domisili

Tangerang



Tempat, Tanggal Lahir

Sukoharjo, 27 Juli 1963



Usia

57 Tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987).
- Magister Agribisnis Jurusan Magister Manajemen, IPB Bogor pada (2000).



Riwayat Jabatan

- Inspektur/Kepala Audit Intern Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019).
- Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015 – 2018).
- Group Head/Kabag Kredit BRI kantor Cabang Khusus (2009 – 2014).
- Group Head/Kabag Kredit Program Kantor Pusat BRI (2005 – 2008).
- Senior Account Officer s/d Assisten Manager Kredit Bisnis Pertanian, Kredit Komersial & Kredit Korporasi BRI kantor Cabang Khusus (1990 – 1998).



Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI.
- Sertifikat Risk Management Level 3 dari LSPI BARA.



Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1303/DIR/2020 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Periode Jabatan

Periode I (19 November 2019-18 November 2022)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit meliputi:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami hukum/perbankan.
5. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan.
6. Wajib memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
11. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
12. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
13. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
14. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Ahdi Jumhari Luddin	Ketua	- S1, Ekonomi Akuntansi - S2, Policy Economic	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Andin Hadiyanto	Anggota	- S1, Ekonomi/Ilmu Ekonomi - S2, Graduate School of International Development, Master (MA) - S3, Graduate School of International Development, Doctor of Philosophy (PhD)	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO
Adi Prakoso	Anggota	S1, Ekonomi Jurusan Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di perbankan.
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	- S1, Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian - S2, Agribisnis Jurusan Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di perbankan.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Ahdi Jumhari Luddin	Andin Hadiyanto	Adi Prakoso	Peter Eko Budi Darwito
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Audit

Anggota Komite Audit tidak boleh memiliki rangkap jabatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.02/DEKOM-BTN/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada pasal 7- Persyaratan Keanggotaan Komite Audit ayat 10, 11 dan ayat 12. yaitu:

1. Ayat 10 "bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir".
2. Ayat 11 "bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen".
3. Ayat 12 "tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank".

Komite Audit	Rangkap Jabatan/di Perusahaan/Instansi lain
Ahdi Jumhari Luddin (Ketua Komite Audit)	-
Andin Hadiyanto (Anggota Komite Audit)	Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan – Kementerian Keuangan RI
Adi Prakoso (Anggota Komite Audit)	-
Peter Eko Budi Darwito (Anggota Komite Audit)	-

Sampai dengan 31 Desember 2020, susunan rangkap jabatan Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan yaitu Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua Komite pada lebih dari dua 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen).

Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota Komite yang dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah didokumentasikan secara baik.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	7 Januari 2020	1. Pembahasan Laporan Hasil Audit oleh IAD periode Desember 2020. 2. Pengawasan/ <i>Monitoring</i> Hasil Temuan Pemeriksaan IAD, OJK dan BPK. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
2.	14 Januari 2020	Pembahasan Pengadaan Konsultasi Kaji Ulang Kinerja IAD Tahun 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
3.	27 Januari 2020	Pengarahan Komite Audit Bank BTN terkait <i>draft Annual Audit Plan</i> IAD Tahun 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
4.	29 Januari 2020	Penyampaian Progres Audit Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 oleh KAP EY.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
5.	4 Februari 2020	Pembahasan Penetapan Pemenang KAP untuk Jasa Audit Tahun Buku 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
6.	13 Februari 2020	Pembahasan Persetujuan Draft Publikasi Laporan keuangan Per 31 Desember 2019 (audited).	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
7.	18 Februari 2020	Pembahasan Proses Pengadaan Konsultan Kaji Ulang Kinerja IAD tahun 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
8.	13 Mei 2020	Pembahasan Draft Publikasi Laporan Keuangan per 31 Maret 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
9.	2 Juni 2020	1. Pembahasan Laporan Komite Audit Triwulan I 2020. 2. Pembahasan Laporan Hasil Audit Khusus Kantor Cabang Surabaya oleh IAD. 3. Pembahasan Draft Surat Dewan Komisaris atas Hasil Audit Khusus Perseroan oleh OJK.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
10.	15 Juni 2020	Evaluasi Pelaksana Jasa Audit KAP Purwantono, Sungkoro & Surya Ernst & Young (KAPPSSEY) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
11.	23 Juni 2020	Diskusi Komite Audit dengan Konsultan PT KPMG Siddharta Advisory terkait Kaji Ulang Fungsi Audit Intern di Perseroan.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
12.	1 Juli 2020	Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Division.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
13.	21 Juli 2020	Pembahasan surat KPMG, Alur Pengaduan WBS melalui Dewan Komisaris dan Revisi Draft Piagam Komite Audit.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
14.	29 Juli 2020	Pembahasan Draft Publikasi Laporan Keuangan Per 30 Juni 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
15.	12 Agustus 2020	Pembahasan Revisi Draft Piagam Komite Audit.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
16.	18 Agustus 2020	Pembahasan Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris kepada IAD.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
17.	2 September 2020	- Pembahasan hasil Audit oleh IAD. - Persentase oleh Bapak Andi Nirwoto.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
18.	2 September 2020	Pembahasan <i>Monitoring</i> hasil Audit Internal dan Eksternal Direktorat CCL.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
19.	6 Oktober 2020	- Materi Realisasi Pelaksanaan Audit Plan 2020. - Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit oleh KPMG. - Tindak Lanjut Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Pengendalian Internal.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
20.	13 Oktober 2020	- Struktur Organisasi FAD. - Proses Penyusunan Laporan Keuangan. <i>Internal Control Over Financial Reporting</i>.	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
21.	13 dan 16 Oktober 2020	Pembahasan Draft Publikasi Laporan keuangan per 30 September 2020.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
22.	10 November 2020	Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perseroan termasuk Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM dan Implementasi selama ini.	- Ahdi Jumhari Luddin - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito
23.	14 Desember 2020	- Penyampaian <i>Concern</i> Dewan Komisaris terkait Kegiatan IAD. - Hasil Audit Audit IAD dan Tindak Lanjutnya serta Hasil Audit Sementara KAPPSSEY atas 6 (enam) Kantor Cabang. <i>Update</i> dari IAD terkait <i>Progress</i> Rencana <i>Piloting Branch Control</i> (BC) dan Regional Audit dan Control Supervisory (RACS).	- Ahdi Jumhari Luddin - Andin Hadiyanto - Adi Prakoso - Peter Eko Budi Darwito

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Ahdi Jumhari Luddin	Ketua	23	22	96%
Andin Hadiyanto	Anggota	23	15	65%
Adi Prakoso	Anggota	23	23	100%
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	23	23	100%

Penghasilan Komite Audit

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Penghasilan Anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Di samping itu Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kebijakan penghasilan/remunerasi Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ditetapkan Dewan Komisaris.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Program peningkatan kompetensi Komite Audit telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Komite Audit telah melaksanakan seluruh Rencana Kerja Komite Audit yang disusun pada awal tahun dan bahkan melampauinya akibat sangat aktifnya Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang otomatis harus diikuti oleh Komite Audit. Laporan kegiatan Komite Audit dapat dilihat dalam Laporan Komite Audit Triwulan I sampai dengan III 2020 yang sudah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Secara singkat tugas Komite Audit terkait memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan sudah dilaksanakan seluruhnya.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, antara lain berupa:

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi/persetujuan atas *annual audit plan* yang disusun Internal Audit Division tahun 2020.
2. Memberikan masukan terkait pengadaan Konsultan Independen yang melakukan kaji ulang atas fungsi internal audit, termasuk mengevaluasi hasil kaji ulang dan memastikan bahwa rekomendasi konsultan independen ditindaklanjuti.
3. Menginisiasi dan menetapkan kriteria pemilihan konsultan untuk kaji ulang fungsi Internal Audit Division tahun 2020.
4. Melakukan *monitoring* dan *review* atas seluruh Laporan Hasil Audit yang ditembuskan kepada Komite Audit serta menyusun beberapa surat Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai nasihat terkait hasil audit yang krusial.
5. Mengikuti beberapa *exit meeting* hasil audit umum yang dilakukan IAD (Internal Audit Division).
6. Secara rutin memantau tindak lanjut hasil audit IAD maupun audit eksternal.
7. Melakukan pertemuan rutin dan diskusi dengan IAD untuk evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian intern.
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan jasa audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan dan PKBL tahun 2019 untuk memastikan bahwa jasa audit telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar.
9. Merekomendasikan dan persetujuan KAP untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dalam RUPS.
10. Melakukan beberapa kali pertemuan dengan KAP untuk mengevaluasi *progress* dan hasil audit sementara KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2020.
11. Memberi masukan/saran dalam proses pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2021, antara lain masukan terkait kualifikasi KAP yang diharapkan dan mengikuti proses pengadaan sampai terpilih KAP pemenang serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas KAP untuk disampaikan kepada regulator.
12. Melalui *meeting* maupun surat, Dewan Komisaris mengharapkan penguatan peran IAD yang lebih independen, kuat, lugas dan tegas dalam pelaksanaan audit dan dalam memberikan rekomendasi hasil temuan termasuk temuan yang terkait *fraud*.
13. Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi *performance review* bulanan (Laporan Kinerja Perusahaan) yang disampaikan oleh Direksi.
14. Melakukan telaah atas draft Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Publikasi.
15. *Review* Piagam Komite Audit.
16. Memberikan saran atas draft RBB 2021-2023, RKAP 2021 dan RAKB 2021.
17. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian serta penilaian kinerja kepala SKAI.
18. Melakukan telaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
19. Melakukan pemantauan dan *review* terhadap pelaksanaan tugas Internal Audit Division dan Auditor Eksternal, termasuk memantau dan mereview hasil audit dan tindak lanjut penyelesaian temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Melakukan kajian atas hasil audit internal maupun eksternal untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Perseroan.
20. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan turut memberikan penjelasan dan atau masukan untuk hal hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.
21. Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan serta *Annual Report* yang akan dipublikasikan.
22. Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
23. Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK dan menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN.

24. Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Bidang Human Capital Management Division dan Learning Center Division sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengangkatan *human capital* sebagai *strategic assets* dan *strategic partners*, menganalisis kebijakan, *monitoring* pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
2. PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 mengenai Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.
5. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
8. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
11. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
13. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas Komite terkait Remunerasi adalah:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi.
 - Kebijakan atas remunerasi.
 - Besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi.
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Struktur remunerasi dapat berupa:
 - Gaji
 - Honorarium
 - Insentif
 - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan dalam Industrinya.
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan kinerja Perseroan.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

- f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
 - g. Mengevaluasi kebijakan *Human Capital* dan *monitoring* pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
 - h. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - i. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
 - k. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
 - Penilaian terhadap sistem tersebut.
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham.
 - Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
 - Sistem Kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 - l. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi
2. Tugas Komite terkait Nominasi adalah:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan.
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi nomenklatur dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - g. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - j. Melakukan *review* terhadap sistem manajemen *human capital* dan kebijakan pengembangan *human capital* mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
 - k. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi dan kebijakan sistem Manajemen *Human Capital*.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Me-*review*, memeriksa, melakukan analisis dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Perseroan.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang berasal bukan dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama maksimal 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak prerogatif Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/DEKOM-BTN/XII/2019 tanggal 19 November 2019. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai serta kebijakan *Human Capital* secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Adapun isi Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Bagian I** Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Komite
- Bagian II** Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite
- Bagian III** Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja, Akses Informasi, Komposisi dan Persyaratan Anggota
- Bagian IV** Rapat, Penganggaran dan Penghasilan Anggota Komite
- Bagian V** Pendidikan dan Tenaga Penunjang
- Bagian VI** Evaluasi dan Penutup

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit:

1. 3 (tiga) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang Komisaris.
3. 1 (satu) orang Pihak Independen
4. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai Perwakilan Pegawai.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Komisaris. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 (satu) Komisaris sebagai anggota serta 1 (satu) Pihak Independen dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif).

Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Ketua	Komisaris Utama Independen	Hukum dan Keuangan
Heru Budi Hartono	Anggota	Komisaris	<i>People Management</i> dan Keuangan
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Armand B. Arief	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis
I Nengah Rentaya	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi Moneter, Perbankan, <i>Human Capital Management and Learning Development</i> .
Eko Waluyo	Anggota Ex-Officio	Kepala Divisi Human Capital Management Division	<i>Human Capital</i> dan Keuangan

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Chandra M. Hamzah

**Ketua Komite Remunerasi
dan Nominasi**

Periode I (4 Mei 2020-3 Mei 2023)



Profil dapat dilihat pada bagian
Profil Dewan Komisaris



Heru Budi Hartono

**Anggota Komite Remunerasi
dan Nominasi**

**Periode I (16 Maret 2020-15 Maret
2023)**



Profil dapat dilihat pada bagian
Profil Dewan Komisaris



Ahdi Jumhari Luddin

**Anggota Komite Remunerasi
dan Nominasi**

**Periode I (16 Maret 2020-15 Maret
2023)**



Profil dapat dilihat pada bagian
Profil Dewan Komisaris



Armand B. Arief

**Anggota Komite Remunerasi
dan Nominasi**

Periode I (14 Mei 2020-13 Mei 2023)



Profil dapat dilihat pada bagian
Profil Dewan Komisaris



I Nengah Rentaya

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Domisili
Jakarta



Tempat, Tanggal Lahir
Bali, 8 Juli 1958



Usia
62 Tahun



Kewarganegaraan
Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987).
- *Master of International Affairs in Economic Policy and Management* dari Columbia University, NYC, USA (1993).
- *Certificate Program in Treasury Management* dari New York University, School of Continuing Education, NYC, USA, Summer Session Programme (1994).



Riwayat Jabatan

- Senior Vice President–Group Head of Learning Center (Corporate University) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2007-2014).
- Senior Vice President–Group Head of Human Capital Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2006-2007).
- Senior Vice President–Deputy Group Head of Human Capital Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003-2006).



Sertifikasi

- Training Certificate Coaching Program 60 hours (2013)
- The 4 Disciplines of Execution (4DX), Manager Certification Program - Gold Certificate (2012)



Dasar Pengangkatan

Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1305/DIR/2020 tentang Perubahan Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Periode Jabatan

Periode II (7 November 2019 - 6 November 2021)



Eko Waluyo

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Domisili
Bekasi



Tempat, Tanggal Lahir
Temanggung, 29 November 1971



Usia
49 tahun



Kewarganegaraan
Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (1995)
- Magister Manajemen (MM) di bidang finance dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Kentucky USA (2004).



Riwayat Jabatan

- Corporate Secretary Division Head (2015-2017)
- Department Head Investor Relations (2013-2015)
- Manager Investor Relations (2011-2013)
- Manager Investor Communication (2010-2011)
- Kepala Seksi Tim Sekuritas KPR (2006-2010)
- Dep. Manager Risk Management PT Sarana Multigriya Finansial (2006)
- Auditor Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2006-2007)



Sertifikasi

- Professional Coach Certification Program (2020)
- Certified Professional Human Resources (2018)
- UKMR Level 4 LSPP (2015)



Dasar Pengangkatan

Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1305/DIR/2020 tentang Perubahan Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Periode Jabatan

Periode II (6 Juni 2020 - 5 Juni 2022)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Syarat-syarat keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
3. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
4. Mewakili pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
6. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
7. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Perseroan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Chandra M. Hamzah	Ketua	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum
Heru Budi Hartono	Anggota	- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen - Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi - Master of Science bidang Policy Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Armand B. Arief	Anggota	- Sarjana Business Administration - Master Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
I Nengah Rentaya	Anggota	- Sarjana Ekonomi - Master of International Affairs	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Eko Waluyo	Anggota Ex-Officio	- Sarjana Akuntansi - Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Heru Budi Hartono	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	I Nengah Rentaya	Eko Waluyo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Heru Budi Hartono	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	I Nengah Rentaya	Eko Waluyo
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1.	15 Januari 2020	Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020	- Chandra M. Hamzah - Ahdi Jumhari Luddin - Armand B. Arief - Heru Budi Hartono - I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
2.	21 Januari 2020	Menyusun dan merekomendasikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur Utama, anggota Direksi baru, Direktur Kepatuhan dan Anggota Dewan Komisaris untuk kelengkapan Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.	- Chandra M. Hamzah - Armand B. Arief - Ahdi Jumhari Luddin - Heru Budi Hartono - I Nengah Rentaya	Nominasi
3.	29 Januari 2020	- Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 - Rencana Kegiatan Pendidikan Pegawai Tahun 2020	- Chandra M. Hamzah - Armand B. Arief - I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
4.	05 Februari 2020	Penanggguhan Masa Persiapan Pensiun Sdr. Hertanta - Kepala <i>Internal Audit Division</i> (IAD)/ Kepala SKAI	- Chandra M. Hamzah - Ahdi Jumhari Luddin - Armand B. Arief - I Nengah Rentaya	Nominasi
5.	12 Februari 2020	Rekomendasi Usulan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 serta Tantiem Tahun Buku 2019	- Chandra M. Hamzah - Ahdi Jumhari Luddin - Armand B. Arief - Heru Budi Hartono - I Nengah Rentaya	Remunerasi
6.	19 Februari 2020	- Penanggguhan Masa Persiapan Pensiun Sdr. Hertanta - Kepala <i>Internal Audit Division</i> (IAD)/ Kepala SKAI - Usulan Calon Kepala <i>Corporate Secretary Division</i>	- Chandra M. Hamzah - Ahdi Jumhari Luddin - Armand B. Arief - Heru Budi Hartono - I Nengah Rentaya	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
7.	15 April 2020	Membahas Kebijakan Talent, Talent Development and Succession Management Bank, terkait Nominasi Talent Pool BoD-1.	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Nominasi
8.	22 April 2020	Membahas Usulan Top Talent Bank (BoD and Top 20% Talent BoD-1) serta me-review Kebijakan Talent Pool, Talent BoD-1 dan Succession Management, Calon Nominasi Talent BoD-1	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Nominasi
9.	15 Mei 2020	Pembahasan Pengelolaan <i>Human Capital Management</i> , khususnya <i>Talent and Succession</i> bersama Dir. <i>Human Capital, Legal & Compliance</i>	• Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
10.	01 Juli 2020	Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2020	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Remunerasi
11.	26 Agustus 2020	1. Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan II tahun 2020	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
12.	16 September 2020	1. Revisi Surat Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi 2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
13.	21 Oktober 2020	Membahas rekomendasi Perilaku Utama Budaya Kerja Bank BTN selaras dgn Budaya Kerja AKHLAK.	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
14.	27 Oktober 2020	1. Review Penunjukan Direktur Supervisi Unit Usaha Syariah (UUS) 2. Rencana <i>Inhouse Training</i> Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Nominasi
15.	11 November 2020	1. Review dan Kajian Kebijakan Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai 2. Benchmarking Kebijakan Disiplin Pegawai Bank-Bank Himbara	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
16.	25 November 2020	1. Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2021 2. Pengangkatan kembali Sdr. Eko Waluyo sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>ex officio</i>)	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Nominasi
17.	02 Desember 2020	1. Penyusunan Laporan tentang Tanggapan dan Pengawasan Dekom atas Kinerja sd Triwulan III Tahun 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2. Membahas Revisi Program Kerja Dewan Komisaris dan Aspek Penilaian Kinerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2021.	• Chandra M. Hamzah • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Heru Budi Hartono • I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Ketua	17	17	100%
Heru Budi Hartono	Anggota	17	13	76%
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	17	17	100%
Armand B. Arief	Anggota	17	17	100%
I Nengah Rentaya	Anggota	17	17	100%
Eko Waluyo	Anggota <i>Ex-Officio</i>	-	-	-

Catatan: *) Sdr. Eko Waluyo sebagai anggota *Ex-Officio* Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diundang turut hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan konflik interest sebagai Pejabat/Pegawai.

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Penghasilan Anggota Lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Anggota Komite lain berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Di samping itu Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite lain tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kebijakan penghasilan/remunerasi Komite lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ditetapkan Dewan Komisaris.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Dalam tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tugas Remunerasi dan Nominasi Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (UUS), Nominasi Talent internal Perseroan satu tingkat di bawah Direksi (BoD-1) serta mengevaluasi Kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan *Human Capital (Human Capital Management) and Learning Development*. Beberapa arahan dan/atau penasihat Dewan Komisaris kepada Direksi mencakup beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Peningkatan peranan aktif jajaran Top Manajemen sebagai *Role Model* dalam proses penguatan Program internalisasi dan eksternalisasi Budaya Kerja Perseroan (*Corporate Culture*) SIIPS selaras dengan arahan Pemegang Saham untuk menerapkan *Core Values* AKHLAK, terutama fokus pada 8 (delapan) Perilaku Utama melalui 4 (empat) Pilar Tema Budaya sebagai prioritas yakni *Sales and Service Culture, Governance and Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture* sebagai bagian dari penguatan Program *Employee Value Proposition (EVP)*.
2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas kemampuan Pegawai sebagai bagian dari upaya penurunan dan pengendalian *Fraud*, sebagaimana temuan internal audit Perseroan bahwa salah satu penyebab kejadian *Fraud* adalah karena kekurangan Pegawai dan kemampuan Pegawai di beberapa unit kerja. Dalam hal ini, Dewan Komisaris kurang sependapat dengan alasan dimaksud, khususnya kekurangan jumlah Pegawai dan menyarankan Direksi agar melakukan *Work Load Analysis (span of control)* dengan lebih menekankan pada aspek Analisis Produktivitas Pegawai secara individu dan kapasitas yang diperlukan setiap unit kerja terlebih dahulu.
3. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Pegawai Unit Usaha Syariah (UUS), penguatan Manajemen Pengelolaan bisnis Usaha Syariah serta aspek Pengawasan kegiatan Syariah.
4. Me-review Kebijakan Disiplin Pegawai agar lebih tegas dan memberikan **Efek Jera** bagi Pelakunya dengan pertimbangan **Ada** atau **Tidak Ada**-nya unsur Kesengajaan, murni karena Kelalaian dan/atau pertimbangan signifikansi Dampaknya terhadap Kerugian *Financial* maupun *Citra/Image* Bank. Dalam hal pengenaan Sanksi terhadap Pelaku *Fraud*, Dewan Komisaris mengarahkan agar kategori jenis Sanksi Pelaku *Fraud*, dibuat lebih tegas dengan fokus pada 2 (dua) pertimbangan aspek yaitu **Ada Intensi** atau **Tidak Ada Intensi** untuk melakukan *Fraud*. Bila Ada Intensi untuk melakukan *Fraud*, berapapun Besaran Nominalnya, harus diberikan Sanksi kategori **Berat** yakni **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**. Demikian pula pengenaan Sanksi terhadap Pelaku perbuatan **Berulang**, harus diberikan jenis Sanksi yang lebih berat satu level lebih tinggi.

5. Terkait dengan pelaksanaan *Talent Mapping* Pegawai, Dewan Komisaris menyarankan agar proses Penilaian Kinerja harus *dilakukan review*, disetujui oleh Atasan Langsung dari Pegawai yang dinilai dan Atasan Penilai satu level lebih tinggi. Jika perlu disetujui oleh komite SDM terkait. Selama ini Dewan Komisaris sangat *concern* terhadap akurasi dan konsistensi terhadap hasil penilaian Kinerja kategori **Baik, Sangat Baik** atau **Istimewa** dan *Talent Mapping* kategori **Star, Potensial, Average, Need to Develop** dan **Slow Starter**, yang dinilai belum memenuhi harapan.
6. Dewan Komisaris juga *concern* terhadap Kebijakan *Performance Management System* Perseroan, khususnya mengenai Bobot Penilaian komponen *Leadership and Development* yang belum mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi dan memastikan fungsi Supervisi dalam organisasi berjalan dengan baik, menjadi sebagai berikut:
 - Bobot Penilaian untuk *Low level Management*: 80% KPI, 20% *Leadership and Development*.
 - Bobot Penilaian untuk *Middle Management*: 60% KPI, 40% *Leadership and Development*.
 - Bobot Penilaian untuk *Top Management*: 40% KPI, 60% *Leadership and Development*.
7. Sebagai bagian dari *Concept Meritocracy*, Dewan Komisaris menyarankan agar tidak memakai pertimbangan Senioritas. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir yakni berdasarkan pertimbangan Kinerja dan Potensi Pegawai.
8. Perlunya peningkatan komitmen para Supervisor untuk mendisiplinkan Pegawai Bawahannya yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, demikian pula terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan masalah yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
9. Berdasarkan pengamatan Unit Kerja dan laporan temuan Audit Internal Perseroan, masih ditemukannya perilaku "*Silo*" dalam Organisasi sehingga kurang solid dalam koordinasi dan kolaborasi antar individu maupun antar Unit Kerja. Seharusnya setiap individu/unit kerja lebih mengutamakan kepentingan Perseroan secara keseluruhan daripada kepentingan lainnya. Dewan Komisaris mengharapkan Direksi agar dapat melakukan pengarah kembali kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan Kerjasama yang lebih baik lagi dan menyelaraskan semua level dari jajaran paling atas sampai terbawah.
10. Direksi dan seluruh jajaran Manajemen Perseroan, harus lebih menggiatkan pelaksanaan *Coaching* maupun *Mentoring* kepada Pegawai Bawahan, *Coach* maupun *Mentor* harus lebih banyak memberikan motivasi (*encouraging*), menggali potensi, menginspirasi (*inspiring*), mendengarkan dari pada *telling and asking* dan lebih fokus pada upaya pengembangan *Strength* Potensi Pegawai dari pada *directing, blaming* atau *punishing* yang mengarah ke *non-productive situation*.
11. Untuk lebih meningkatkan efektivitas, setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan harus dilaporkan melalui *Whistleblowing System* untuk diproses lebih lanjut dan diberikan sanksi yang setimpal, dan sebaliknya bagi yang memberikan contoh perilaku tauladan harus mendapatkan *recognition* atau *reward* yang sifatnya membangun, memotivasi dan membangkitkan semangat berkontribusi lebih baik kepada Organisasi.

Adapun perincian kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Agenda
1.	Menyusun Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020.
2.	Menyusun dan membahas <i>Draft</i> Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020.
3.	Menyusun dan merekomendasikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur Utama untuk kelengkapan Dokumen untuk Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.
4.	Menyusun dan merekomendasikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai kelengkapan Dokumen untuk Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.
5.	Menyusun dan merekomendasikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur Kepatuhan untuk kelengkapan Dokumen Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.
6.	Menyusun dan merekomendasikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi untuk kelengkapan Dokumen Uji <i>Fit and Proper Test</i> OJK.
7.	Membuat kajian dan merekomendasikan persetujuan Penyelenggaraan Rencana Kegiatan Pendidikan Pegawai Tahun 2020.
8.	Menyusun kajian dan menyampaikan rekomendasi usulan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 serta Tantiem Tahun Buku 2019.
9.	Menyusun kajian dan menyampaikan rekomendasi Usulan Direksi tentang Penangguhan Masa Persiapan Pensiun Sdr. Hertanta – Kepala <i>Internal Audit Division</i> (IAD)/ Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
10.	Menyusun kajian dan menyampaikan rekomendasi Usulan Direksi tentang Calon Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.
11.	Menyusun kajian dan mereview Kebijakan <i>Talent, Talent Development and Succession Management</i> Bank BTN.

No.	Kegiatan/Agenda
12.	Menyusun kajian dan menyampaikan rekomendasi sebagai tindak lanjut Surat Menteri BUMN No. S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020, perihal Usulan Nominasi <i>Talent and Succession Management</i> Bank.
13.	Membahas Pengelolaan <i>Human Capital Management</i> , khususnya <i>Talent and Succession Management</i> bersama Direksi (Direktur HC and Legal).
14.	Menyiapkan materi terkait persiapan Wawancara Penjurian Top GRC Tahun 2020.
15.	Menyiapkan kajian dan rekomendasi atas Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-419/MBU/06/2020 tanggal 25 Juni 2020.
16.	Menyusun kajian dan menyampaikan Revisi Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020, sehubungan dengan adanya Revisi RKAP dan upaya penguatan aspek pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi serta menyesuaikan dengan hasil <i>benchmarking</i> KPI Dewan Komisaris Bank-Bank Himbara.
17.	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan II /2020 kepada OJK dan Kementerian BUMN terkait bidang tugas <i>Human Capital</i> .
18.	Melaksanakan kajian dan merekomendasikan Penyelarasan Perilaku Utama Budaya Kerja SIIPS dengan Perilaku Utama Budaya Kerja AKHLAK Kementerian BUMN, sesuai SE Menteri BUMN No. S-07/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020.
19.	Menyiapkan kajian dan menyampaikan rekomendasi atas Revisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Direksi dengan Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya Revisi Kebijakan yang terkait Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) – dari mekanisme Konsultasi menjadi mekanisme Informasi, revisi <i>threshold</i> dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kebijakan <i>Human Capital</i> .
20.	Me-review dan mengkaji penunjukan Direktur Supervisi Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai prosedur yang berlaku.
21.	Me-review Kajian Kebijakan Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai serta Studi Banding dengan Kebijakan Disiplin Pegawai Bank-Bank Himbara.
22.	Me-review dan menyiapkan tanggapan Komite KRN terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan RKAP 2021 Aspek Pengembangan SDM (<i>Human Capital</i>) terkait dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.
23.	Menyiapkan Kajian Dasar Hukum terkait dengan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam rangka upaya Penguatan Fungsi dan Peranan Pengawasan Dewan Komisaris (<i>Framework Governance</i>) selaras dengan Aspirasi Kementerian BUMN.
24.	Menyiapkan <i>draft</i> dan menyampaikan rekomendasi Program Kerja Dewan Komisaris dan Aspek Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021.
25.	Membuat kajian Statistik Data Kepegawaian terkait adanya Temuan OJK tentang <i>Mis-match Job Grade</i> Pegawai yang telah berlangsung cukup lama.
26.	Menyiapkan kajian Usulan Revisi KPI Direksi secara Kolegal dan KPI Direksi secara Individual Tahun 2020 dan Rancangan Usulan KPI Direksi Tahun 2021 dan KPI Individual Direksi Tahun 2021 terkait dengan adanya Permen BUMN No. PER- 08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dan Permen BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 serta Surat Kementerian BUMN No. S-1165/MBU/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 Perihal Usulan Revisi KPI Bank BTN Tahun 2020 oleh Kementerian BUMN.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi mengacu pada:

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian BUMN di bidang Sumber Daya Manusia/SDM mencakup:

- Percepatan transformasi pengelolaan SDM di BUMN.
- Peningkatan kapabilitas seluruh lapisan pegawai maupun manajemen senior.
- Penguatan *employer's brand*.
- Penataan posisi Direksi BUMN untuk mendapatkan pengurus yang professional.
- Penyiapan *talent* terbaik untuk menjadi pengurus BUMN.
- Penguatan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengembangan SDM.

Berkenaan dengan hal tersebut, langkah yang akan dilakukan terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan SDM yaitu:

- Meningkatkan ketrampilan dan memberi pelatihan kepada pegawai terutama terkait penerapan teknologi baru.
- Meningkatkan proses tata kelola.
- Membentuk kumpulan talenta (*Talent Pool*) di Kementerian BUMN dan BUMN.
- Menciptakan lingkungan inklusif.

Dalam hal pengembangan Talenta (*Talent*) BUMN dimaksud, Kementerian BUMN melakukan langkah-langkah pembinaan melalui:

- Meningkatkan keterampilan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja terkait teknologi baru.
- Meningkatkan proses Tata Kelola penunjukan Dewan Komisaris/Direksi.
- Membentuk kumpulan Talenta BUMN Tingkat Menengah (VP+).

Sehubungan dengan arah kebijakan dan aspirasi Kementerian BUMN tersebut, dukungan dan peranan aktif Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris sangat diperlukan, khususnya dalam pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring* kepada *Talent Millennial under 40's*. Dalam hal ini, *Coach* maupun *Mentor* harus lebih banyak memberikan motivasi (*encouraging*), menggali potensi, menginspirasi (*inspiring*), mendengarkan dari pada *telling and asking* dan lebih fokus pada upaya pengembangan Strength Potensi Pegawai dari pada *directing, blaming* atau *punishing* yang mengarah ke *non-productive situation* sehingga terbangun sinergi yang efektif dalam proses pengembangan para talenta. Oleh karena itu, Perseroan perlu meningkatkan peranan aktif Direksi dan seluruh jajaran Senior Manajemen sebagai *Role Model* dalam proses membangun Budaya Kerja Perseroan selaras dengan aspirasi Pemegang Saham untuk menerapkan *Core Values* AKHLAK, terutama fokus pada 8 (delapan) Perilaku Utama yakni *Sales and Service Culture, Governance and Risk Culture, Performance Culture, discipline of execution* dan *Learning Culture* sebagai bagian dari penguatan Program *Employee Value Proposition (EVP)*, sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas dan penurunan atau pengendalian *Fraud*.

Di samping itu, Perseroan juga melaksanakan proses seleksi *Talent Mapping* organisasi secara ketat, termasuk dalam penentuan penilaian Kinerja kategori **Baik, Sangat Baik** atau **Istimewa** dan *Talent Mapping* kategori **Star, Potensial**, maupun **Average**, diawali dengan penyempurnaan Kebijakan *Performance Management System*, khususnya mengenai Bobot Penilaian komponen *Leadership and Development* yang belum mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi dan memastikan fungsi supervisi dalam organisasi berjalan dengan baik serta pengembangan sistem *Meritocracy* berdasarkan pertimbangan kinerja dan potensi pegawai.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan organ tata kelola yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Negara BUMN perihal Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/DEKOM-BTN/XII/2019 tanggal 19 November 2019. Piagam Komite Pemantau Risiko bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pengendalian risiko (*risk management*), penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Tata Kelola Perusahaan menjadi lebih baik.

Adapun isi Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Bagian I** Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Komite
- Bagian II** Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite
- Bagian III** Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja, Akses Informasi, Komposisi dan Persyaratan Anggota
- Bagian IV** Rapat, Penganggaran dan Penghasilan Anggota Komite
- Bagian V** Pendidikan dan Tenaga Penunjang
- Bagian VI** Evaluasi dan Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi berkenaan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Memberikan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan manajemen risiko pada Perseroan.
4. Melakukan kajian/review atas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan Regulator.

5. Melakukan *review* pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari: Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Tata Kelola, Tingkat Permodalan.
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
7. Menyusun Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
8. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.
9. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
10. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan untuk Dewan Komisaris.
11. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. *Mereview*, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Perseroan dalam menjalankan tugasnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
3. 2 (dua) orang Pihak Independen yang membidangi dan menguasai manajemen risiko dan perbankan.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Dewan Komisaris yang diketuai oleh Komisaris Independen yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan perbankan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Armand B. Arief	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis
Eko D. Haripoerwanto	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Perumahan, Perencanaan Wilayah dan Kota
Heru Ratna Azimada	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko dan Perbankan
Yuki Noviani Kohar	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Kredit

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Armand B. Arief
Ketua Komite Pemantau Risiko
Periode I (14 Mei 2020-13 Mei 2023)

 Profil dapat dilihat pada bagian
Profil Dewan Komisaris



Eko D. Haripoerwanto
Anggota Komite Pemantau Risiko
Periode I (20 Desember 2019-19 Desember 2022)

 Profil dapat dilihat pada bagian
Profil Dewan Komisaris



Heru Ratna Azimada

Anggota Komite Pemantau Risiko



Domisili

Jakarta



Tempat, Tanggal Lahir

Magelang, 7 Desember 1949



Usia

71 tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1975)



Riwayat Jabatan

- *Executive Vice President*/Staf Ahli Direksi Bidang *Human Resources* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003).
- *Executive Vice President Training Group* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2001-2003).
- *Executive Vice President Coordinator (SEVP)* Bidang *Corporate, Government, Commercial* dan *Restructuring* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2000-2001).
- *Executive Vice President Corporate Banking* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1999).
- Direktur di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (1998-1999).



Sertifikasi

Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari IKAI.



Dasar Pengangkatan

Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1304/DIR/2020 tentang Perubahan Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Periode Jabatan

Periode II (30 November 2019 - 29 November 2021)



Yuki Noviani Kohar

Anggota Komite Pemantau Risiko



Domisili

Jakarta



Tempat, Tanggal Lahir

Bandung, 28 November 1961



Usia

59 tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Padjajaran, Bandung (1986)



Riwayat Jabatan

- *Vice President – Deputy GM Commercial Credit Division* PT Bank BNI (Persero) Tbk. (2010-2015).
- *Vice President, Group Head of Commercial Business Development* Bank Niaga (2007-2009).
- *Special Assignment sebagai Team Merger CIMB Niaga Representative Commercial Banking* (2007-2009).



Sertifikasi

Certification Risk Governance dari ERMA.



Dasar Pengangkatan

Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1304/DIR/2020 tentang Perubahan Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Periode Jabatan

Periode II (7 November 2019 - 6 November 2021)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Syarat-syarat keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
3. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
6. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
7. Memiliki keahlian dalam bidang keuangan, manajemen risiko, ekonomi makro, strategi manajemen, perbankan dan perkreditan.

Adapun kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Armand B. Arief	Ketua	• S1, Business Administration • S2, Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di perbankan.
Eko D. Heripoerwanto	Anggota	• S1, Planologi • S2, City Planning • S3, Pengelolaan SDA dan Lingkungan	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Heru Ratna Azimada	Anggota	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di perbankan
Yuki Noviani Kohar	Anggota	Sarjana Ekonomi Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 42 ayat 4.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Armand B. Arief	Eko D. Heripoerwanto	Heru Ratna Azimada	Yuki Noviani Kohar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Risiko

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali rapat yang dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	8 Januari 2020	- Konsultasi Kredit Modal Kerja BTN atas nama PT Taspen (Persero). - Transaksi <i>Corporate Action</i> Perseroan Tahun 2019. - Rencana Penerbitan Junior Global Bond PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
2.	15 Januari 2020	Rencana Penerbitan <i>Junior Global Bond</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
3.	23 Januari 2020	- Pinjaman Subordinasi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Konsultasi Pemberian <i>Credit Line</i> kepada PT Pertamina (Persero). - Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
4.	29 Januari 2020	Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Desember 2019 (Triwulan IV Tahun 2019)	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
5.	5 Februari 2020	Konsultasi Pemberian <i>Credit Line</i> kepada PT Pertamina (Persero)	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
6.	19 Februari 2020	Persetujuan Draft Dokumen Pengkianan <i>Recovery Plan</i> Tahun 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
7.	26 Februari 2020	<i>Corporate Action</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2020 Berupa Penerbitan Obligasi dan Sekuritisasi	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
8.	4 Maret 2020	Persetujuan Penurun Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN dan Pemberian Manfaat Pensiun serta Manfaat Lain Bagi Pensiunan pada tahun 2020	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
9.	9 Maret 2020	Revisi <i>Draft</i> Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi	- Armand B. Arief - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
10.	8 April 2020	- Pengkianan <i>Recovery Plan</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Evaluasi terhadap Implementasi <i>Business Process Improvement</i> sesuai Transformasi Bank BTN 2017-2022.	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
11.	6 Mei 2020	Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Konsumer yang Terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
12.	27 Mei 2020	Profil Risiko Triwulan I/2020	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar
13.	10 Juni 2020	Pengalokasian Penyaluran Dana Hibah Program Kemitraan Kepada PT Permodalan Nasional Madani (BUMN Khusus)	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
14.	1 Juli 2020	Persetujuan Usulan Penambahan Modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
15.	8 Juli 2020	Persetujuan atas Rencana Penyertaan Modal pada PT Asuransi Jiwasraya Putra (Lotus Putra)	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
16.	22 Juli 2020	Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Juni 2020, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Semester I/2020 dan Laporan KPMI Sesuai Profil Risiko Posisi Juni 2020	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
17.	5 Agustus 2020	Pengembangan Layanan e-Secure dan e-Commerce Debit BTN online	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
18.	12 Agustus 2020	Tanggapan Komisaris atas Penyampaian Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
19.	2 September 2020	Profil Risiko Triwulan II 2020	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
20.	16 September 2020	Penghapusbukuan Kredit dan Revisi Draft SKB	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada
21.	7 Oktober 2020	• Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 • Laporan Keputusan Komite Kredit Periode 26 Februari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 • Finalisasi Draft Revisi SKB	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
22.	14 Oktober 2020	• Persetujuan Dewan Komisaris atas Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait dengan Perseroan • Konsultasi Pemberian Kredit Korporasi - Kredit Investasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
23.	16 Oktober 2020	Pembatalan Rencana Penyertaan Modal pada PT Asuransi Jiwasraya Putra (Lotus Putra)	• Armand B. Arief • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
24.	27 Oktober 2020	• Profil Risiko Triwulan III/2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. • Review Revisi Draft Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi • Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Pemasaran Reksadana	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
25.	4 November 2020	Konsultasi Pemberian Kredit Korporasi - Kredit Investasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	• Armand B. Arief • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
26.	18 November 2020	RBB 2021-2023 dan RKAP 2021	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
27.	25 November 2020	Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar
28.	2 Desember 2020	• Keputusan Komite Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. • Definisi Aset Perseroan dalam <i>Threshold</i> Batasan Kewenangan Organ Perseroan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. • <i>Monitoring</i> Dewan Komisaris atas Realisasi Restrukturisasi Kredit Dampak COVID-19 • Pemberian Kredit <i>Large Exposure</i> kepada Debitur Korporasi BUMN dan Non BUMN	• Armand B. Arief • Eko D. Heripoerwanto • Heru Ratna Azimada • Yuki Noviani Kohar

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
29.	8 Desember 2020	- Monitoring Dewan Komisaris atas Realisasi Restrukturisasi Kredit Dampak COVID-19 - Pemberian Kredit <i>Large Exposure</i> kepada Debitur Korporasi BUMN dan Non BUMN	- Armand B. Arief - Eko D. Heripoerwanto - Heru Ratna Azimada - Yuki Noviani Kohar

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Armand B. Arief	Ketua	29	29	100%
Eko D. Heripoerwanto	Anggota	29	26	90%
Heru Ratna Azimada	Anggota	29	29	100%
Yuki Noviani Kohar	Anggota	29	28	97%

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Penghasilan Anggota Lain ditetapkan oleh Dewan Komisari/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Anggota Komite berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Di samping itu Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite lain tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kebijakan penghasilan/remunerasi Komite lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ditetapkan Dewan Komisaris.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan Kegiatan Rutin Komite Pemantau Risiko: Setiap Triwulan membuat Laporan Hasil Kerja Komite Pemantau Risiko yang memuat mengenai:

- Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Perseroan, Laporan KPMM.
- Menyampaikan masukan mengenai:
 - Rencana Penerbitan Junior Global Bond.
 - Penerbitan Obligasi dan Sekuritisasi.
 - Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Konsumer yang Terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan realisasi Kebijakan tersebut.
 - Pengkinian *Recovery Plan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Evaluasi terhadap Implementasi *Business Process Improvement* sesuai Transformasi BTN 2017-2022.
 - Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero).
 - Definisi Aset Perseroan dalam *Threshold* Batasan Kewenangan Organ Perseroan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - Pemberian Kredit *Large Exposure* Kepada Debitur Korporasi BUMN dan Non BUMN.
 - Penghapusbukuan Kredit dan Revisi Draft SKB.
 - Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Perseroan.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

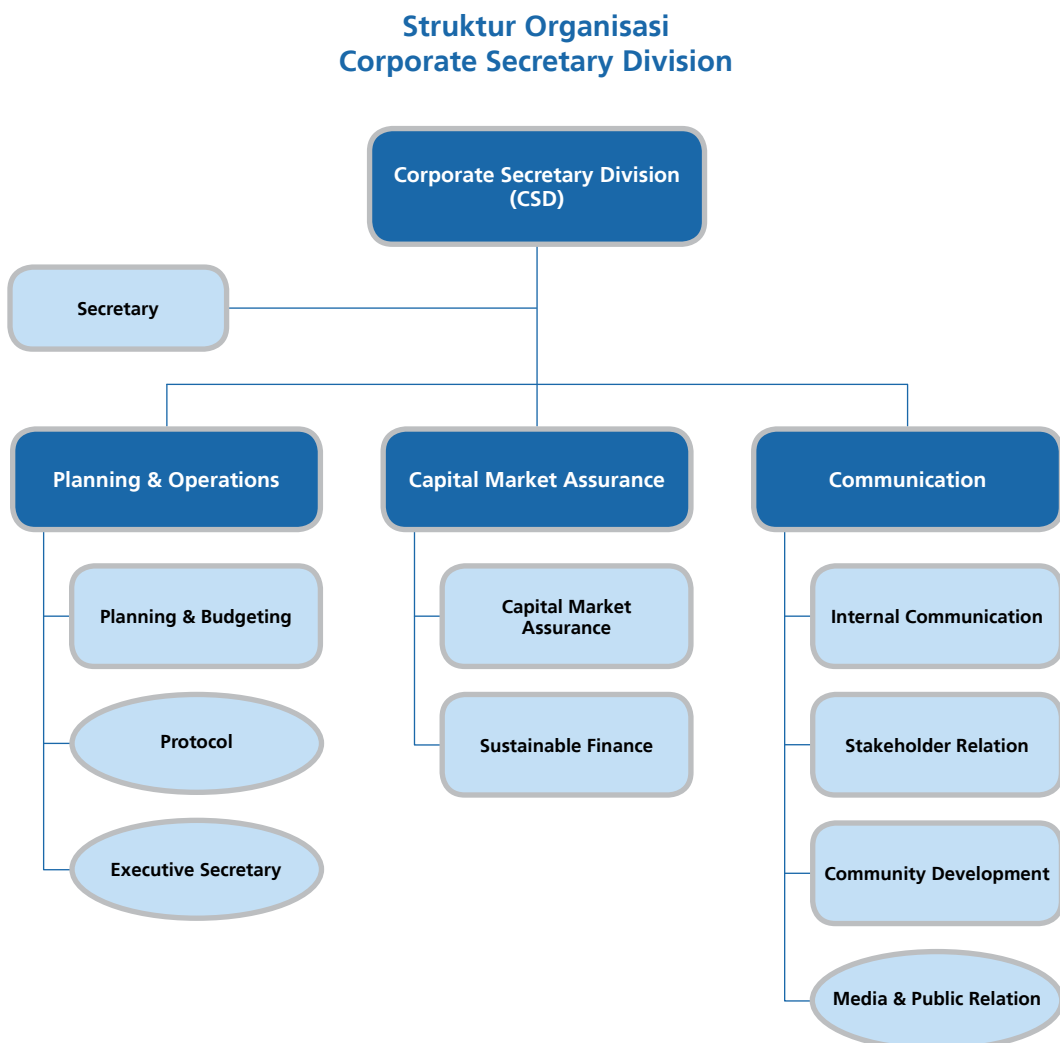
Sekretaris Perusahaan berperan dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Sekretaris Perusahaan berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang materil dan relevan kepada *stakeholders*. Sebagai pejabat penghubung, Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan *stakeholders*. Selain itu, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Achmad Chaerul adalah Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 812/DIR/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ari Kurniawan adalah Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 320/DIR/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Promosi/Mutasi Pegawai. Penunjukan Ari Kurniawan sebagai Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 124/CSD/CC/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Struktur Sekretaris Perusahaan



Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary dibantu oleh Manager/Senior Manager yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya Planning & Operations, Capital Market Assurance, dan Communication. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Perusahaan

Direksi Perseroan telah menetapkan Ari Kurniaman sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 261/DIR/2020 tanggal 12 Maret 2020.



Ari Kurniaman

Sekretaris Perusahaan



Domisili

Jawa Barat



Tempat, Tanggal Lahir

Tasikmalaya, 15 Januari 1972



Usia

48 tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Padjadjaran (1996)



Riwayat Jabatan

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sejak tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai:

- 2014 menjabat sebagai Legal Litigation & Claim Departement Head.
- 2017 menjabat Deputy Branch Manager Bandung.
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Cawang.



Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Level 3 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan



Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Nomor 261/DIR/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Program peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan atau di-update oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan *Investor Relations* dan *Marketing Communication*. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. *Direct*, antara lain meliputi Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*.
 - b. *Indirect*, antara lain meliputi Annual Report, Publikasi Laporan Keuangan dan *Press Release*.
3. Pemenuhan kewajiban keterbukaan Informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 - b. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/Bursa sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinir penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga)

Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2020, Perseroan menerima 5 (lima) kali permintaan penjelasan dari Bursa.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik
Komunikasi dengan *stakeholders* Perseroan menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*), yaitu dikoordinir melalui Sekretaris Perusahaan. Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi. Selain publikasi melalui media massa, publik juga mendapatkan informasi mengenai Perseroan melalui *website* Perseroan (www.btn.co.id), serta media sosial yang terdiri dari **facebook (BankBTNCoid)**, **twitter (@BankBTNCoid)**, **youtube (officialBankBTN)** dan **instagram (officialBankBTN)** yang dikelola bersama dengan Unit Marketing Communication. Perseroan konsisten untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik yaitu dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi
Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media *online*. Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, CSR dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) pemberitaan yang terdiri dari 102 (seratus dua) *press release* dan 80 (delapan puluh) berita foto.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sekretaris Perusahaan mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017. Selama tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2020.

Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.

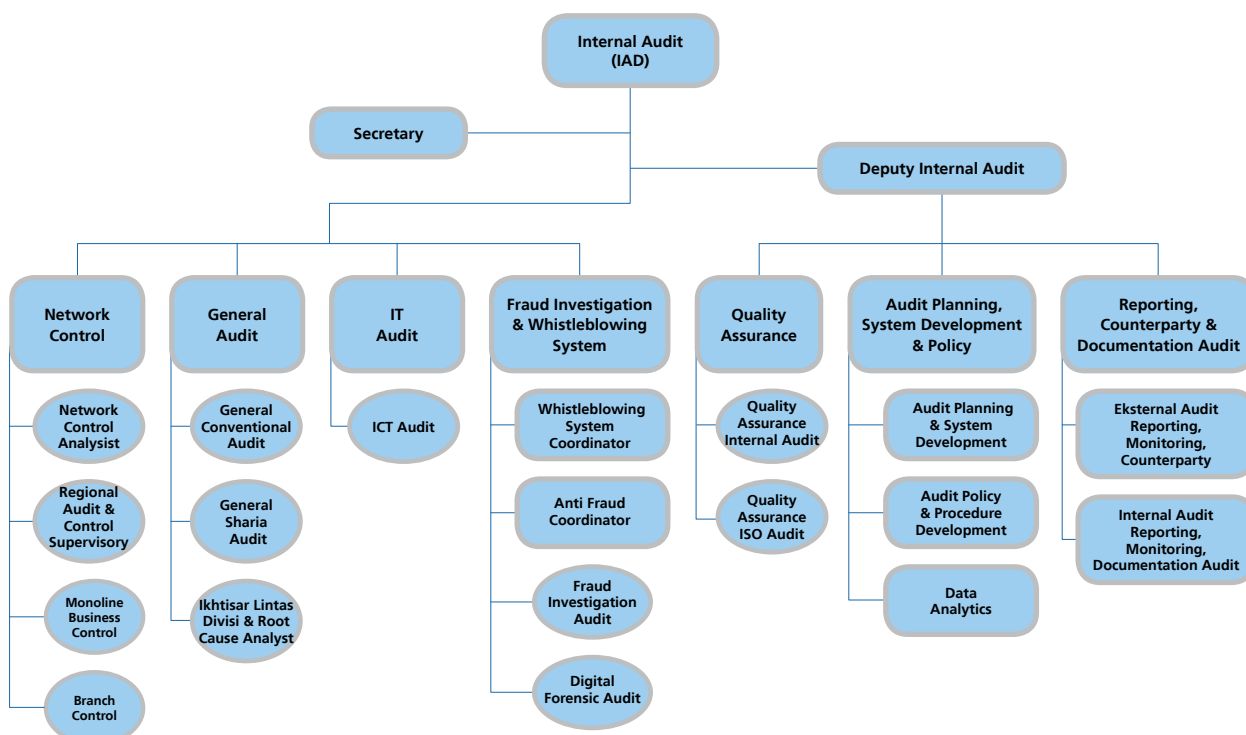
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya mengacu pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Tugas Sekretaris Perusahaan dalam penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
- Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan POJK tersebut di atas.
- Membuat risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir.
- Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti. Selama tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kali Rapat Direksi dan 18 (delapan belas) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta 3 (tiga) kali rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management*, *control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Struktur Organisasi Internal Audit Division



Kedudukan Fungsi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/DIR/PPBD/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan diperbarui melalui Surat Edaran No. 36/SE/DIR/TPMD/2020 tentang Keputusan Khusus *Pilot Project Branch Control, Monoline Business Control, Regional Audit & Control Supervisory* pada Internal Audit Division dan *Regional Compliance* pada Compliance & Governance Division. Selain itu, kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2019

tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., pada Bab II Pasal 3 Struktur dan Kedudukan IAD Pasal 3 yaitu:

1. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Pasal 3 Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat dari persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Kepala Internal Audit Division

Kepala Internal Audit Division saat ini adalah Sdr. Hertanta, yang menjabat efektif sejak tanggal 08 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 227/DIR/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.11/KOM/BTN/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division (IAD)/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).



Hertanta

Kepala Internal Audit Division



Domisili

Jakarta



Tempat, Tanggal Lahir

Yogyakarta, 19 Januari 1965



Usia

55 Tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Sosek/Agribisnis, IPB Bogor (1988)
- MBA Preparatory Program Kerjasama University of Arkansas, The Economics Institute dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1997)
- Magister Manajemen Keuangan, UNPAD Bandung (2005)



Riwayat Jabatan

Memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1991, dan pernah menjabat sebagai:

- Enterprise Risk Management Division Head (2015 - 2017).
- Commercial Risk Division Head (2017 - 2018).
- Human Capital Strategy Division Head 2018-2019).
- Internal Audit Division Head sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.



Pelatihan dan Sertifikasi

Beliau pernah mengikuti sejumlah pelatihan, sertifikasi maupun seminar diantaranya: Sertifikasi Risk Management GRC yang diselenggarakan Banker Association for Risk Management (BARa) di Bandung pada tahun 2015, Sekolah Staff dan Pimpinan Bank angkatan 65 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta pada tahun 2016, Sertifikasi Dasar Bidang Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun di Jakarta pada tahun 2018, Seminar Nasional Internal Audit yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) di Palembang dan Bali pada tahun 2019, Konferensi ECIAA 2019 di Luxembourg pada tahun 2019, Sertifikasi UKMR level 5 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan di Jakarta pada tahun 2019, Workshop Standar Audit dan Kode Etik Profesi yang diselenggarakan YPIA di Jakarta pada tahun 2020, ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System yang diselenggarakan PT Integra Solusi Optima di Jakarta (melalui media online) pada tahun 2020, Pelatihan PSAK 71 yang diselenggarakan LPPI di Jakarta (melalui media online) pada tahun 2020, Pendidikan Certification in Audit Committee Practices (CACP) yang diselenggarakan Ikatan Komite Audit Indonesia di Jakarta (melalui media online) pada tahun 2020, Workshop Internal Control Berbasis COSO 2013 yang diselenggarakan YPIA di Jakarta (melalui media online) pada tahun 2020, Workshop The Role of Internal Audit in Assessing Risk Management yang diselenggarakan YPIA di Jakarta (melalui media online) pada tahun 2020.

Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit Division

Program peningkatan kompetensi Internal Audit Division telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Division

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit Division adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Direksi melakukan *fit and proper test* kepada calon Kepala Internal Audit Division.
2. Direktur Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division.
4. Dewan komisaris dan Direksi menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepala Internal Audit Division kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

Internal Audit Charter

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Internal Audit *Charter* (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit *Charter*) PT BTN (Persero) Tbk. Internal Audit *Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, Internal Audit *Charter* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari Internal Audit *Charter* adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi.
2. Struktur dan Kedudukan.
3. Tugas & Tanggung Jawab serta Wewenang.
4. Independensi serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Internal.
5. Kode Etik dan Persyaratan Standar Profesional Auditor Internal.
6. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern Dalam Pelaksanaan Audit Intern.
7. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern Dengan Auditor Ekstern Ahli Hukum.
8. Lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Perseroan dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Perseroan dalam kerangka penerapan tata kelola Perseroan yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.

Kewenangan Internal Audit

Untuk mewujudkan visi dan supaya dapat melaksanakan misi, fungsi dan tugas audit, maka IAD mempunyai wewenang:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Cakupan Pelaksanaan Audit Internal

Dalam Peraturan Direksi No.09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Kebijakan Audit Intern PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Bab III Ruang Lingkup dan Metodologi Audit Poin 3.1 Lingkup Pekerjaan Audit diatur bahwa pada dasarnya lingkup pekerjaan audit harus dapat, memberikan kepastian bahwa:

1. Sistem manajemen risiko berfungsi secara efektif.
2. Sistem pengendalian intern berfungsi secara efisien dan efektif.

- Proses tata kelola berfungsi secara efektif melalui penetapan nilai dan tujuan/sasaran, pemantauan aktivitas dan kinerja, serta pendefinisian pengukuran akuntabilitasnya.

Aktivitas tersebut dilakukan melalui proses audit sebagai berikut:

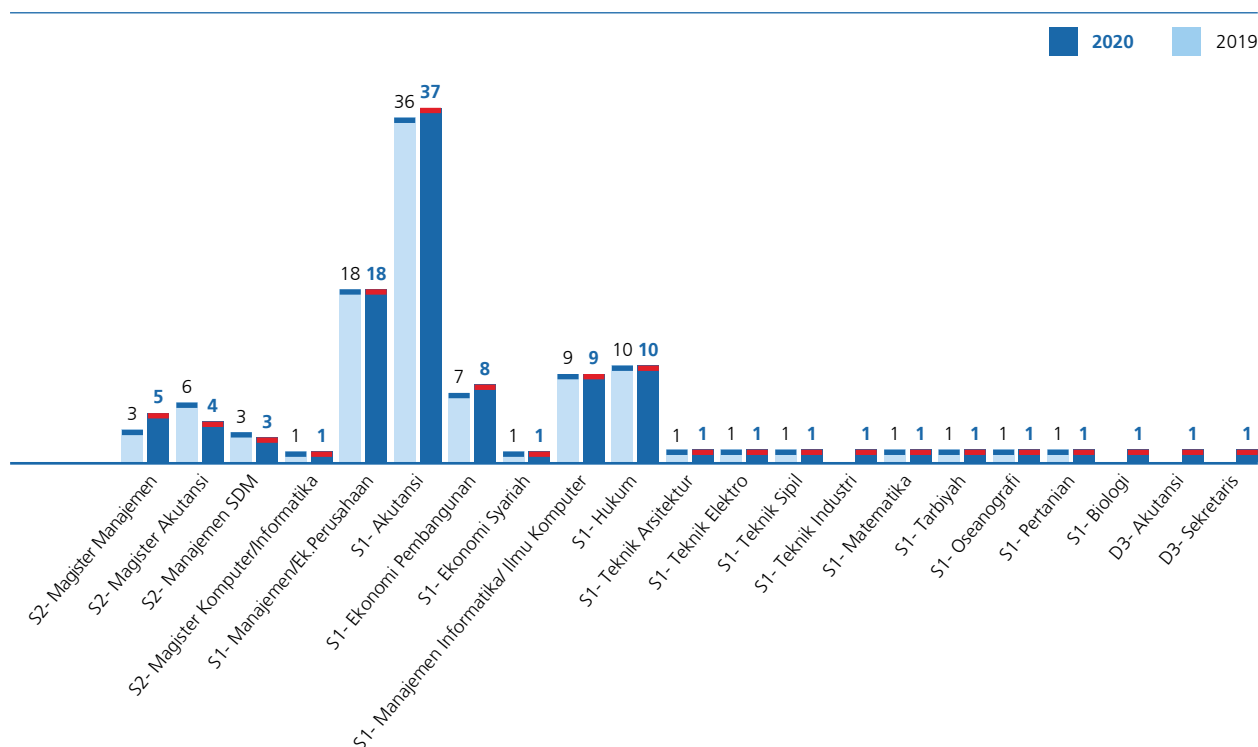
- Audit Umum yang berfokus pada Aspek Keuangan, Aspek Ketaatan dan Aspek Operasional.
- Audit Teknologi Sistem Informasi yang meliputi evaluasi risiko dan pengendalian pada lingkungan Teknologi dan Sistem Informasi (TSI).
- Audit Khusus yang difokuskan pada penyimpangan/pelanggaran pada ketaatan, indikasi kecurangan (*fraud*).

Komposisi Personil Internal Audit Division

Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division berjumlah 107 (seratus tujuh) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 15 (lima belas) orang pada Network Control Department, 51 (lima puluh satu) orang pada General Audit Department, 9 (sembilan) orang pada IT Audit Department, 13 (tiga belas) orang pada Fraud Investigation & Whistleblowing System Department, 6 (enam) orang pada Quality Assurance Department, 5 (lima) orang pada Audit Planning, System Development & Policy Department, dan 6 (enam) orang pada Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department.

Komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan formal dapat dilihat pada grafik berikut:

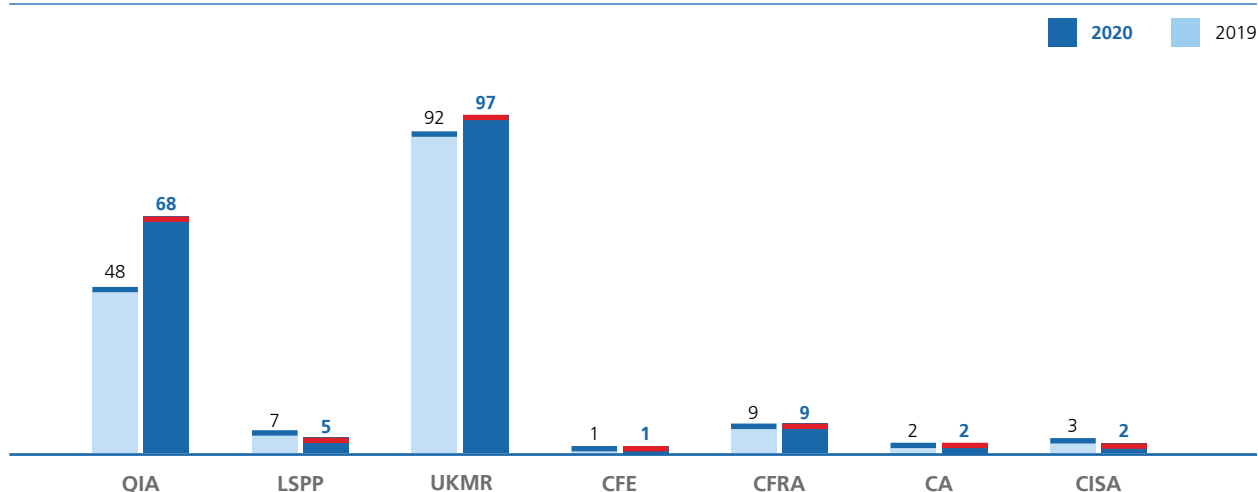
Komposisi Personil Internal Audit Division Berdasarkan Pendidikan



Sertifikasi Profesi Personil Internal Audit Division

Pada tahun 2020, Personil Internal Audit yang telah mendapatkan sertifikasi QIA (*Qualified Internal Audit*) sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, LSPP/Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (mensertifikasi kompetensi auditor untuk level auditor sampai dengan assessor) sebanyak 5 (lima) orang, UKMR (Ujian Kompetensi Manajemen Risiko) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang, CFE (*Certified Fraud Examiner*) sebanyak 1 (satu) orang, CFRA (*Certified Forensic Auditor*) sebanyak 9 (sembilan) orang, CA (*Certified Accountant*) sebanyak 2 (dua) orang, dan CISA (*Certified Information Systems Auditor*) sebanyak 2 (dua) orang.

Sertifikasi Personil Internal Audit Division



Keterangan: QIA (*Qualified Internal Audit*), LSPP/Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (mensertifikasi kompetensi auditor untuk level auditor sampai dengan assessor), UKMR (Ujian Kompetensi Manajemen Risiko), CFE (*Certified Fraud Examiner*), CFRA (*Certified Forensic Auditor*), CA (*Certified Accountant*) dan CISA (*Certified Information Systems Auditor*).

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Audit Intern

Dalam rangka memperluas wawasan dan pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Bank telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, diantaranya sebagai pengurus, anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut:

a. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) – BUMN/BUMD

Menyertakan anggota IAD sebagai pengurus maupun anggota dan berpartisipasi aktif baik sebagai peserta atau panitia penyelenggara dalam *event* yang di inisiasi oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern.

b. Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)

Internal Audit Perseroan juga menyertakan Auditornya sebagai anggota dan pengurus di dalam kegiatan Perhimpunan Profesi Auditor Intern Perbankan. Seluruh Auditor Intern Perseroan telah diikutsertakan (terdaftar) sebagai anggota Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB). Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi untuk level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor*

Executive (CAE) IAD maupun untuk level Auditor berupa teknik audit, metodologi audit dan audit sistem dan Audit ICT diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam perkumpulan *Benchmarking Internal Audit* yang diadakan melalui inisiatif IAIB ini.

c. Perhimpunan Audit Internal Indonesia (PAII) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebagian anggota Internal Auditor juga telah menjadi anggota Perhimpunan Audit Internal Indonesia (PAII) & Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

d. The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE) – Indonesia Chapter.

Selanjutnya anggota internal audit juga di dorong untuk menjadi *membership of The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE) - Indonesia Chapter.

Kode Etik Auditor

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh audit intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern yang ada di Indonesia atau kode etik yang lazim berlaku secara Internasional. Auditor intern IAD wajib mematuhi Kode Etik Auditor Intern.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2020

Pada tahun 2020, *Internal Audit Division* (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program Kerja tersebut meliputi sifat dan cakupan audit, penilaian risiko proses bisnis (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, kondisi kualifikasi personil IAD, penilaian risiko dan pengembangan personil IAD.

Rencana Kerja Audit Internal

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2020 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.36/M/IAD/ASD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2020 dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Di samping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 032/KOM/BTN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, perencanaan audit umum (konvensional dan syariah), audit ICT, audit khusus dan investigasi serta pelaksanaan audit ISO 9001:2015 yang terjadwal sebagai berikut:

Tabel Program Kerja Audit Internal

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2019	2020	+/-	%	
A. Audit Umum	141	124	-17	-12,06%	
B. Audit ICT	17	26	9	52,94%	
C. Audit Khusus & Investigasi	0	0	0	0,00%	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/ investigasi untuk periode 2020, akan mengikuti penugasan dari <i>stakeholders</i> dan <i>whistleblowing system</i> .
D. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO 9001:2015	22	21	-1	-4,55%	
Jumlah Objek Audit	180	171	-9	-5,00%	

Pelaksanaan Program Kerja Internal Audit Division

Internal Audit Division melaksanakan kegiatan audit dengan obyek audit mencakup Audit General (Konvensional dan Syariah), Audit ICT, Audit Khusus dan Investigasi, Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO dan Surprise Audit sepanjang tahun 2020 dengan rincian objek audit sebagai berikut:

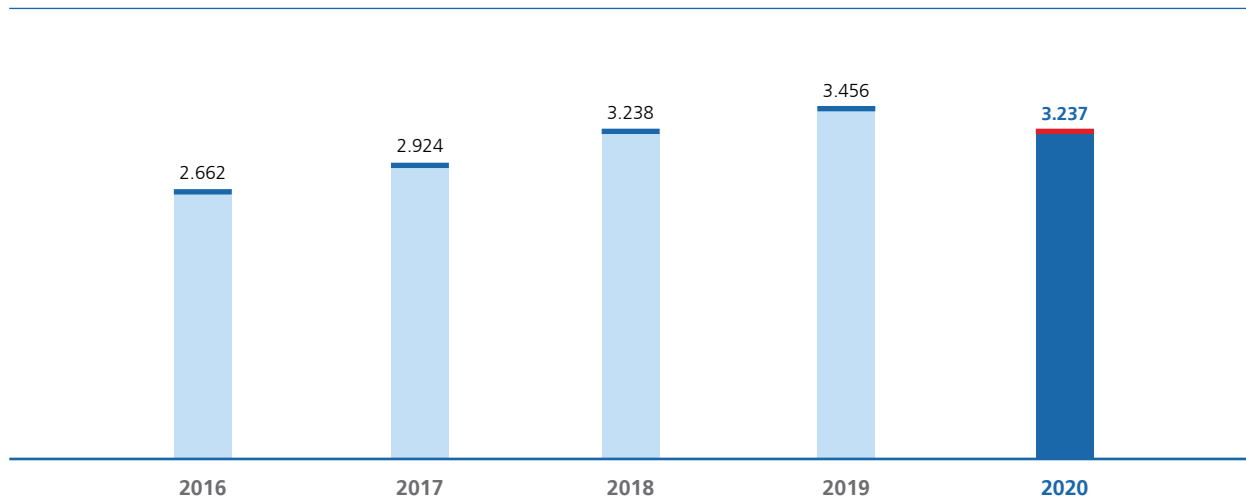
Tabel Realisasi Program Kerja Audit Internal

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Realisasi
A	Audit Umum (General Audit)	124	124	100,00%
B	Audit ICT (Information & Communication Technology Audit)	26	30	115,38%
C	Audit Khusus & Investigasi	0	11	100,00%
D	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO 9001:2008	21	25	119,05%
E	Surprise Audit	-	4	100,00%
TOTAL		171	194	113,45%

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Kegiatan audit sepanjang tahun 2020 menghasilkan temuan audit sebanyak 3.237 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut:

Temuan Audit Internal



Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh *auditee*. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "*pending item*" diminta untuk diselesaikan oleh *auditee* dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2019 maupun tahun 2020 dengan resume tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian

No	Hasil Audit	Jumlah Temuan	Selesai		Belum Selesai			
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	%	Telah Jatuh Tempo	%
A	Tahun 2020							
	General Audit KC	1.999	1.563	78,19%	409	20,46%	27	1,35%
	General Audit KC Syariah	553	432	78,12%	121	21,88%	0	0,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	253	184	72,73%	58	22,92%	11	4,35%
	Audit ICT	432	351	81,25%	47	10,88%	34	7,87%
	TOTAL	3.237	2.530	78,16%	635	19,62%	72	2,22%
B	Tahun 2019							
	General Audit KC	2.097	2.097	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	General Audit KC Syariah	565	565	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	General Audit Divisi	319	318	99,69%	0	0,00%	1	0,31%
	Audit ICT	475	475	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	3.456	3.455	99,97%	0	0,00%	1	0,03%

Assurance Review terhadap Audit Internal

Audit Internal Perseroan telah di-review secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar mutu ISO 9001: 2008 setiap tahun, dan pada bulan Desember 2017 Internal Audit Division Perseroan, berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015

Tabel Pelaksana *Surveillance Audit* untuk Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1.	Société Générale de Surveillance (PT SGS)	2015	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
2.	Société Générale de Surveillance (PT SGS)	2016	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
3.	Société Générale de Surveillance (PT SGS)	2017	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
4.	Société Générale de Surveillance (PT SGS)	2018	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
5.	Société Générale de Surveillance (PT SGS)	2019	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
6.	Société Générale de Surveillance (PT SGS)	2020	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun *review (assessment)* untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi *Charter Audit Internal*, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari fungsi Audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya berdasarkan *best practice* telah dilakukan oleh konsultan *assessor* independen minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Assessor Independen terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1.	PT PricewaterhouseCoopers (PWC)	2015	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2.	PT Deloitte Touche Tohmatsu (DELOITTE)	2018	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Auditor Eksternal
3.	PT KPMG Sidharta Advisory	2020	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Auditor Eksternal

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Perseroan telah menjalankan *risk-based audit* sejak tahun 2004 yang kemudian disahkan dan diatur dalam Peraturan Direksi No.09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Kebijakan Audit Intern Perseroan dengan perubahan terakhir pada PD No 08/PD/IAD/2013 tanggal 5 Desember 2013. Kebijakan tersebut mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Kegiatan audit dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dinilai telah memberikan nilai tambah dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan Perseroan untuk mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar, serta terpenuhinya kepentingan Perseroan dan masyarakat dalam hal pengelolaan dana secara baik.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics. Struktur Organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Quality Assurance.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sejak tahun 2015, Enterprise Risk Management Division (ERMD) dalam pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah di-*upgrade* menjadi ISO 9001:2015 pada tahun 2018. Enterprise Risk Management Division (ERMD) dalam berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Credit Portfolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit. Fungsi Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Integrated Risk Management Department berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan investor *confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Quality Assurance secara umum berfungsi untuk memastikan pengelolaan setiap risiko dikelola tetap sesuai dengan Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2015, selain itu unit ini juga berperan melakukan *backtesting* untuk memastikan kelayakan setiap pemodelan yang dipakai.

Profil Kepala Enterprise Risk Management Division

Kepala Enterprise Risk Management Division sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Erwin Dwi Kusuma sampai dengan September 2020 kemudian digantikan dengan Feriyanto berdasarkan SK Direksi No. 1021/DIR/2020 tanggal 09 September 2020 dan menjabat sampai dengan sekarang.



Feriyanto

Enterprise Risk Management
Division Head

 **Domisili**
Jakarta

 **Tempat, Tanggal Lahir**
Jakarta, 09 Februari 1968

 **Usia**
52 tahun



Kewarganegaraan
Indonesia



Riwayat Pendidikan

Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada (2001).



Riwayat Jabatan

- Jabatan terakhir adalah Kepala Cabang Kelapa Gading Square yang dijabat sejak tahun 2018.
- Sebelumnya sejak tahun 2014 menjadi Deputy Branch Manager (DBM) Business pada Kantor Cabang Bogor dan Kantor Cabang Bekasi.
- Pada tahun 2012-2014 pernah menjabat sebagai Superintendent Division Regional Risk Management pada Kantor Pusat BTN.
- Pernah menjadi Regional Mortgage & Consumer Lending Head pada tahun 2011 di Kantor Regional 1 Bank BTN.
- Sejak tahun 2006 menjabat sebagai Deputy Branch Manager (J) ABM Operation Bank BTN pada Kantor Cabang Kuningan.
- Memulai karir profesional di Bank BTN sejak tahun 1993 melalui jalur Officer Development Program (Angkatan 6)



Pelatihan dan Sertifikasi

- *Certified Senior Credit Officer* penyelenggara LSPP (2020)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh LSPP (2020)
- Surveillance ISO 9001:2015 oleh Robere & Associates (2020)
- *International Certified Wealth Manager* (2019)
- *Leader as Coach for Branch Manager* oleh PPM (2019)
- Pendidikan SESPIBANK Angkatan 71 oleh LPPI (2019)

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 dan bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa *level job title* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap mengacu Kajian *job title* pegawai yang berhak mengikuti sertifikasi UKMR oleh ERMD.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan).

Sepanjang tahun 2020, pengembangan kompetensi bidang manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif dan terencana melalui pembekalan dan Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR). Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan telah melaksanakan pemenuhan uji kompetensi dengan tingkat kesesuaian yang terpenuhi sebesar 94,64%. Pengembangan kompetensi ini bertujuan agar pegawai Perseroan dapat memahami *Risk Awareness*, *Risk Culture*, serta memahami aspek-aspek dalam pengelolaan risiko.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Jumlah pegawai Perseroan yang telah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko (UKMR) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Level	Pegawai Wajib UKMR	Sesuai		Belum Sesuai	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	854 orang	830 orang	97,19%	24 orang	2,81%
2	1.972 orang	1.841 orang	93,36%	131 orang	6,64%
3	303 orang	290 orang	95,71%	13 orang	4,29%
4	33 orang	31 orang	93,94%	2 orang	6,06%
5	8 orang	8 orang	100,00%	0 orang	0%
Total	3.170 orang	3.000 orang	94,64%	170 orang	5,36%

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dalam menerapkan manajemen risiko yang ditujukan untuk memperkuat pilar-pilar pengelolaan risiko operasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas operasional bisnis Perseroan. Adapun pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko selama tahun 2020 antara lain:

Manajemen Risiko Pengelolaan Dampak COVID-19

Memperhatikan upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial dan tahapan New Normal yang akan diberlakukan Pemerintah, di tahun 2020 Perseroan telah menyusun berbagai kebijakan manajemen risiko agar aktivitas bisnis dan operasional Bank dapat berjalan, diantaranya adalah:

1. Aktivasi *Business Continuity Management* (BCM), Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
2. Mengaktifkan *Business Continuity Plan* (BCP), dengan melakukan split operation Divisi Kritis ke lokasi *Work Recovery Area* (WRA).
3. Pembentukan Tim *Taskforce* untuk *me-monitoring* dan kecukupan likuiditas, kualitas kredit, produktivitas outlet dan pengajuan restrukturisasi kredit.
4. Melakukan *split operation* untuk memastikan *physical distancing* pada beberapa *Working Remote Area* (WRA).
5. Pemberlakuan kebijakan *work from home* (WFH), bagi Kantor Pusat, Wilayah dan Cabang sebanyak 30% - 70% pada masing-masing unit kerja.

6. *Monitoring* produktivitas pegawai WFH secara digital melalui aplikasi B-Gate dan WFH for BTNers.
7. Penyesuaian dan pengurangan jam operasional dan layanan kantor, selama masa pembatasan sosial dan transisi pemberlakuan *New Normal* dan layanan kantor, menjadi pukul 08.00 – 16.00 WIB.
8. Penutupan sementara beberapa outlet (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas) di daerah yang terkena pandemi COVID-19.
9. Penerapan protokol kesehatan untuk memitigasi penyebaran COVID-19 pada lingkungan kerja, melalui:
 - Pengecekan suhu tubuh pegawai, nasabah dan tamu.
 - Penggunaan masker, sarung tangan, *face shield*, menyediakan *hand sanitizer*, dan penerapan *physical distancing*, penyemprotan desinfektan.
 - Pemasangan sekat pembatas.
2. Melakukan *enhancement* aplikasi *monitoring* Risiko Likuiditas (modul pelaporan *Liquidity Coverage Ratio/ LCR*, *stress testing*, laporan tekanan dan profil risiko likuiditas).
3. Pemanfaatan Terminal Bloomberg untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas dan risiko kredit.
4. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*.
5. Melakukan *Enhancement system Credit Scoring Model* (CSM).
6. *Maintenance* implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance* ISO 9001:2015 di Enterprise Risk Management Division untuk meningkatkan standar layanan mutu ERMD kepada seluruh *stakeholders*.

Manajemen Risiko untuk Mempersiapkan Implementasi *New Normal*

Untuk menyiapkan implementasi *new normal*, di awal Juni tahun 2020 Perseroan telah menyusun beberapa protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan WFH dan WFO.
2. Menyediakan dan memonitor kelengkapan fasilitas *safety work* (thermogun, masker, sarung tangan, *face shield*).
3. Pelaksanaan *cloud meeting* baik pada agenda Rapat Direksi, Rapat Internal maupun Rapat bersama pihak eksternal.
4. Fasilitas Insidental (antar jemput pegawai).
5. Melanjutkan *Split Operation*, penutupan/pembukaan *outlet* di daerah terkena pandemi COVID-19.
6. Protokol *physical distancing* (antar pegawai, antar pegawai dengan nasabah, antar nasabah/pihak ketiga).

Review Kebijakan Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko dan sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan review dan/atau pengkinian beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan.

Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat Utilisasi *Risk Management Tools*

Untuk memperkuat utilisasi *Risk Management Tools* maka telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya:

1. Implementasi sistem pemantauan *monitoring* risiko pasar/*interest rate risk in the banking book* (IRRBB).

Pelaksanaan *Stress Testing*

Bank secara berkala melakukan *Stress Testing* guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario *stress/krisis*:

1. *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan secara triwulanan (pada Profil Risiko Bank).
2. *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dan BUS telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pelaporan *Bottom Up Stress Testing* (BUST) yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Mei 2020.
3. *Reverse Stress Testing Recovery Plan* untuk Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas telah di-update untuk kebutuhan pelaporan *Dokumen Recovery Plan*.

Pemantauan Manajemen Risiko Bank Wide secara Berkala

Perseroan senantiasa melakukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan secara *bankwide* yang dibuktikan dengan beberapa *output* laporan wajib kepada Regulator diantaranya:

1. *Recovery Plan*.
2. Profil Risiko.
3. Tingkat Kesehatan Bank.
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko.
5. *Liquidity Coverage Ratio*.
6. *Net Stable Funding Ratio*.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
8. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
9. Laporan *Adhock* lainnya.

Komite Di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Personalia
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10/SK/DIR/RMD/2019 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Enterprise Risk Management Division Head
Anggota Tetap	Direksi 1. Direktur Distribution & Retail Funding 2. Direktur Finance, Planning & Treasury 3. Direktur Operation, IT & Digital Banking 4. Direktur Consumer & Commercial Banking 5. Direktur Remedial & Wholesale Risk 6. Direktur Human Capital, Legal & Compliance Division Head 1. Internal Audit Division Head 2. Compliance & Governance Division Head
Anggota Tidak Tetap	Division Head Seluruh Kepala Divisi selain ERMD Head, CMGD Head dan IAD Head.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Division/Desk Head unit kerja operasional dan *Enterprise Risk Management Division Head*.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Profil Komite Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Profil
Setiyo Wibowo	Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Feriyanto	Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Enterprise Risk Management Division Head	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Laporan Tahunan ini.
Jasmin	Anggota Tetap	Direktur Distribution & Retail Funding	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Nixon L. P Napitupulu	Anggota Tetap	Direktur Finance, Planning & Treasury	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Andi Nirwoto	Anggota Tetap	Direktur Operation, IT & Digital Banking	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Hirwandi Gafar	Anggota Tetap	Direktur Consumer & Commercial Lending	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Elisabeth Novie Riswanti	Anggota Tetap	Direktur Remedial & Wholesale Risk	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Yossi Istanto	Anggota Tetap	Direktur Human Capital, Legal & Compliance	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Hertanta	Anggota Tetap	Internal Audit Division Head	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi Internal Audit Laporan Tahunan ini.
R. Wahyu B. Witjaksono	Anggota Tetap	Compliance & Governance Division Head	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Compliance & Governance Division Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	2 Januari 2020	Rapat Komite Manajemen Risiko Triwulan IV 2019.
2.	8 Mei 2020	Rapat Komite Manajemen Risiko Triwulan I 2020.
3.	13 Juli 2020	Pembahasan Keputusan <i>Self Assessment</i> Tingkat Risiko yang dihadapi Bank Posisi Triwulan II 2020.
4.	22 Oktober 2020	Pembahasan Hasil <i>Self Assessment</i> Laporan Profil Risiko Triwulan III/2020.
5.	14 Desember 2020	- Penyesuaian Pedoman Kebijakan Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur. - Penyesuaian Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun BTN. - Penyesuaian Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.

Asset and Liability Committee (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Asset and Liability Committee (ALCO) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 2/PD/TRSD/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* Perseroan dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics
Sekretaris	Enterprise Risk Management Division Head
Anggota Tetap	- Seluruh Direktur (khusus Direktur Kepatuhan menjadi anggota tetap namun hanya memberikan opini kepatuhan) - Kepala Divisi yang mengelola Funding - Kepala Divisi yang mengelola Lending - Kepala Divisi Sharia Business - Kepala Divisi Institutional Banking - Kepala Divisi Corporate Syndication & Transaction Banking - Kepala Divisi Finance and Accounting - Kepala Divisi Corporate Strategy & Planning - Kepala Divisi Consumer Collection, Recovery & Asset Sales - Kepala Divisi Commercial Asset Management - Kepala Divisi Enterprise Risk Management - Kepala Divisi Compliance and Governance - Kepala Divisi Corporate Secretary
Anggota Tidak Tetap	Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Tugas dan Tanggung Jawab *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Tugas dan tanggung jawab *Asset and Liability Committee (ALCO)* adalah menyusun strategi pengelolaan *asset* dan *liability* dalam rangka memaksimalkan profitabilitas Bank dan menjaga struktur neraca Perseroan melalui manajemen aktiva produktif, pengurangan biaya dana dan pengelolaan risiko suku bunga serta risiko likuiditas.

Profil *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Nama	Jabatan	Keterangan	Profil
Setiyo Wibowo	Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Feriyanto	Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Enterprise Risk Management Division Head	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Laporan Tahunan ini.

Seluruh Direksi merupakan anggota tetap. Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini sedangkan untuk anggota tetap yang merupakan kepala-kepala Divisi, profil masing-masing anggota Divisi dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Selama tahun 2020, ALCO telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	17 Januari 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>cashflow</i> bulan Januari. - Profitabilitas : <i>Special rate</i> Deposito. - Pengesahan Perubahan Redaksional. - Penetapan Suku Bunga KPR Subsidi BP2BT. - Perbandingan Penerapan PSAK 50/55 dengan PSAK 71 terhadap <i>Risk Premium</i>. - Penerapan OHC per produk dana dan kredit. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SSB SUM bulan Februari 2020. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit Januari 2020.

No.	Tanggal	Agenda
2.	24 Februari 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>cashflow</i> bulan Februari. - Profitabilitas : <i>Special rate</i> Deposito berjangka (Rp). - Review Tabungan BTN Prima. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SSB SUM bulan Maret 2020. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR dan KBR bulan Maret 2020. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit Februari 2020.
3.	18 Maret 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>cashflow</i> bulan Maret. - Profitabilitas : <i>Special rate</i> Deposito berjangka (Rp). - Review suku bunga realisasi baru <i>counter</i> dan promo KPR/KPA (rutin triwulanan). - Review suku bunga realisasi baru kredit komersial Group BUMN (rutin triwulanan). - Review suku bunga counter KAR. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SSB SUM bulan April 2020. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR dan KBR bulan April 2020. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit Maret 2020.
4.	9 April 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>cashflow</i> bulan April. - Profitabilitas : <i>Special rate</i> Deposito berjangka (Rp). - Informasi : Program Kredit TAPERA.
5.	12 Mei 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>Cashflow</i> bulan Mei. - Profitabilitas : <i>Special Rate</i> Deposito berjangka (Rp). - Evaluasi suku bunga counter Tabungan BTN Batara. - Penetapan suku bunga <i>counter</i> Tabungan BTN Bisnis. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SSB SUM bulan Juni 2020. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR dan KBR bulan Juni 2020. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit Mei 2020.
6.	12 Juni 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>cashflow</i> bulan Juni. - Profitabilitas : <i>Special Rate</i> Deposito berjangka (Rp). - Pengukuhan <i>Counter Rate</i> Deposito Berjangka Rupiah. - Perpanjangan kebijakan suku bunga realisasi baru <i>counter</i> dan promo KPR/KPA (rutin triwulan). - Perpanjangan kebijakan suku bunga realisasi baru kredit komersial Group BUMN (rutin triwulanan). - Perpanjangan kebijakan suku bunga realisasi baru KUMK KMK Kemitraan. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SSB SUM bulan Juli 2020. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR dan KBR bulan Juli 2020. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit Juni 2020.
7.	3 Juli 2020	- Likuiditas : Prognosa <i>cashflow</i> Posisi 31 Juli 2020. - Untuk Deposito <i>special rate case by case</i> (kewenangan Divisi bersama Direksi) dan <i>Special Rate</i> umum direkomendasikan tetap sesuai Keputusan ALCO Juni 2020. - TRSD diberikan kewenangan memberikan Deposito <i>special rate</i> di atas ketentuan yang berlaku dengan kuota untuk menjaga rasio likuiditas. - Usulan kebijakan suku bunga KPR BP2BT untuk realisasi baru. - Usulan kebijakan suku bunga kredit sebagai hasil dari penempatan dana PEN. - Usulan suku bunga KPR/KPA BTN SOLUSI (menggunakan BTN Batara <i>Payroll</i>) untuk instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, ASN, TNI, POLRI dan untuk instansi Swasta Besar (Nasional/ Multinasional). - Usulan suku bunga KPR/KPA Promo Realisasi Baru. - Usulan suku bunga KUMK KMK Kemitraan Realisasi Baru. - Penyesuaian rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, SSB IOBP, SSB SUM yang habis masa subsidinya di bulan Juli 2020. - Penyesuaian rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAP (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun dan <i>fixed</i> 3 tahun. - Penetapan suku bunga dasar kredit 31 Juli 2020.
8.	5 Agustus 2020	- Prognosa Komitmen <i>cashflow</i> posisi 31 Agustus 2020. - Untuk Deposito <i>special rate case by case</i> (Kewenangan Divisi bersama Direksi) dan <i>special rate</i> umum (sampai dengan 2 miliar turun sesuai LPS <i>rate</i>) direkomendasikan turun 15bps dari suku bunga sebelumnya. - TRSD diberikan kewenangan memberikan Deposito <i>special rate</i> di atas ketentuan yang berlaku dengan kuota untuk menjaga rasio likuiditas. - Usulan <i>special rate</i> Deposito USD khusus kewenangan TRSD. - Usulan penyesuaian suku bunga konter Deposito Rupiah. - Usulan suku bunga konter Tabungan BTN investa. - Usulan suku bunga program baru yaitu KUMK Penjamin Pinjaman Program PEN.

No.	Tanggal	Agenda
9.	31 Agustus 2020	- Perubahan Prognosa komitmen <i>cashflow</i> posisi 31 Agustus 2020. - Untuk Deposito <i>special rate case by case</i> (Kewenangan Divisi bersama Direksi) direkomendasikan turun 25bps dari suku bunga sebelumnya. - Untuk Deposito <i>special rate</i> umum direkomendasikan tetap/tidak berubah dari putusan Rapat ALCO 05 Agustus 2020. - TRSD diberikan kewenangan memberikan Deposito <i>special rate</i> di atas ketentuan yang berlaku dengan kuota untuk menjaga rasio likuiditas. - Usulan <i>special rate</i> Deposito USD khusus kewenangan TRSD turun 25bps dari suku bunga sebelumnya. - Usulan penerbitan transaksi Sekuritisasi KPR BTN Tahun 2020 dilakukan pada bulan Oktober 2020. - Usulan kebijakan suku bunga KMK Renovasi. - Penyesuaian Rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, IOBP, dan SUM yang habis masa subsidinya di Agustus 2020. - Penyesuaian Rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun, dan <i>fixed</i> 3 tahun. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit 31 Agustus 2020.
10.	29 September 2020	- Prognosa komitmen <i>cashflow</i> posisi 30 September 2020. - Untuk Deposito <i>special rate case by case</i> (Kewenangan Divisi bersama Direksi) direkomendasikan turun 25bps dari suku bunga sebelumnya dan dibuka Deposito 4 bulan. - Untuk Deposito <i>special rate</i> umum (> Rp 2 Miliar) direkomendasikan turun 25bps dari suku bunga sebelumnya dan dibuka Deposito 4 bulan. - Divisi <i>Funding</i> diberikan kewenangan memberikan Deposito <i>special rate</i> di atas ketentuan yang berlaku dengan kuota tertentu. - Usulan <i>special rate</i> Deposito USD khusus kewenangan TRSD turun 25bps dari suku bunga sebelumnya. - Usulan penyesuaian suku bunga konter Deposito Rupiah. - Usulan penyesuaian ketentuan fasilitas <i>breakable</i> Deposito Rupiah. - Usulan kebijakan suku bunga KPR/KPA Promo dan <i>Counter</i> Realisasi Baru. - Usulan kebijakan suku bunga Kredit Komersial Grup BUMN Realisasi Baru. - Usulan kebijakan suku bunga KUMK KMK Kemitraan Realisasi Baru. - Usulan kebijakan suku bunga KRING BTN Solusi Realisasi Baru. - Usulan kebijakan suku bunga KPA Realisasi Baru untuk pengembang debitur Kredit Konstruksi BTN. - Penyesuaian Rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, IOBP, dan SUM yang habis masa subsidinya di September 2020. - Penyesuaian Rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun, dan <i>fixed</i> 3 tahun. - Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit 30 September 2020.
11.	20 Oktober 2020	- Prognosa komitmen <i>cashflow</i> posisi 31 Oktober 2020. - Evaluasi suku bunga <i>special rate</i> Deposito. - Evaluasi <i>special rate</i> Deposito USD (kewenangan TRSD). - Evaluasi <i>counter rate</i> Deposito Rupiah. - Perpanjangan jangka waktu kebijakan suku bunga KPR/KPA BTN Solusi. - Penyesuaian Rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, IOBP, dan SUM yang habis masa subsidinya di Oktober 2020. - Penyesuaian Rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun, dan <i>fixed</i> 3 tahun. - Evaluasi Suku Bunga Dasar Kredit 31 Oktober 2020.
12.	3 November 2020	- Evaluasi <i>counter rate</i> Giro BTN Rupiah. - Evaluasi ketentuan bonus bunga Giro Rupiah di atas <i>counter rate</i>. - Evaluasi tambahan benefit Giro Program Pengelolaan Operasional (PPO).
13.	24 November 2020	- Prognosa komitmen <i>cashflow</i> posisi 30 November 2020. - Evaluasi suku bunga <i>special rate</i> Deposito. - Evaluasi <i>special rate</i> Deposito USD (kewenangan TRSD). - Evaluasi <i>counter rate</i> Deposito Rupiah. - Evaluasi kebijakan suku bunga KPR/KPA Promo Realisasi Baru. - Penguatan suku bunga KPR/KPA non subsidi untuk konsumen Developer Skala Nasional & KPA Non Subsidi untuk konsumen Developer KYG rating minimal Gold. - Penyesuaian Rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, IOBP, dan SUM yang habis masa subsidinya di November 2020. - Penyesuaian Rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun, dan <i>fixed</i> 3 tahun. - Evaluasi Suku Bunga Dasar Kredit 30 November 2020.

No.	Tanggal	Agenda
14.	30 November 2020	• Prognosa komitmen <i>cashflow</i> posisi 31 Desember 2020. • Evaluasi suku bunga <i>special rate</i> Deposito . • Evaluasi <i>special rate</i> Deposito USD (kewenangan TRSD). • Evaluasi <i>counter rate</i> Deposito Rupiah. • Evaluasi <i>counter rate</i> Tabungan BTN Prima. • Penetapan suku bunga KPR Harapan. • Evaluasi kebijakan suku bunga KPR/KPA non subsidi untuk konsumen Developer Skala Nasional. • Evaluasi kebijakan suku bunga KPA Realisasi Baru untuk pengembang debitur Kredit Konstruksi Bank BTN. • Evaluasi kebijakan suku bunga Kredit Komersial Grup BUMN Realisasi Baru. • Evaluasi kebijakan suku bunga KUMK KMK Kemitraan Realisasi Baru. • Penyesuaian Rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, IOBP, dan SUM yang habis masa subsidinya di Desember 2020. • Penyesuaian Rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun, dan <i>fixed</i> 3 tahun. • Evaluasi Suku Bunga Dasar Kredit 31 Desember 2020. • Evaluasi kebijakan suku bunga KUMK KMK Kemitraan Realisasi Baru. • Penyesuaian Rutin suku bunga <i>outstanding</i> KPR SSB, IOBP, dan SUM yang habis masa subsidinya di Desember 2020. • Penyesuaian Rutin suku bunga berjenjang dan suku bunga <i>outstanding</i> KPR/KPA Non Subsidi, Kredit Ruko, KAR (KGM/Top Up) dan KBR (KGS/KSG) <i>fixed</i> 1 tahun, <i>fixed</i> 2 tahun, dan <i>fixed</i> 3 tahun. • Evaluasi Suku Bunga Dasar Kredit 31 Desember 2020.

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan berperan dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 1/PD/PPD/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut.

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Supervisi Policy and Procedure
Anggota (<i>voting member</i>)	Seluruh Direktur Kecuali Direktur Supervisi Compliance
Anggota (<i>non voting member</i>)	Direktur Supervisi Compliance
Peserta Rapat Tambahan	1. Kepala Divisi Supervisi Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 2. Kepala Divisi Supervisi Legal 3. Kepala Divisi Supervisi Compliance and Governance 4. Kepala Divisi Supervisi Credit Risk 5. Kepala Divisi Supervisi Kredit/Pembiayaan sesuai segmennya 6. Kepala Divisi Supervisi Internal Audit 7. Kepala Divisi/unit lainnya sesuai kebutuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.

3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyaliran penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Profil Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Nama	Jabatan	Keterangan	Profil
Nixon L. P Napitupulu	Ketua	Plt. Direktur Utama	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
L. Esti Dwi Retnosari	Sekretaris	Policy, Procedure & BPR Division	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Seluruh Direksi merupakan anggota tetap. Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	17 Februari 2020	• Keputusan KPR Non Subsidi: a. Peningkatan <i>rejection rate</i> aplikasi b. Pencapaian SLA OTS c. Penurunan Plafond d. Kondisi dan Status Sertifikat e. <i>Rejection</i> karena kolektibilitas debitur f. Penyelesaian Sertifikat oleh Developer • KPR Subsidi: a. Kondisi Sertifikat b. Pemilikan Rekening tabungan di BTN 3 Bulan sebelum Permohonan Kredit c. Perbedaan ketentuan IMB BTN dengan PERDA setempat persyaratan kolektif/<i>payroll</i> untuk karyawan d. hororer, kontrak dan tenaga alih daya (<i>outsourcing</i>)
2.	24 Maret 2020	Usulan Kebijakan bagi Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19
3.	4 Mei 2020	Usulan Proses Bisnis <i>Credit Line</i> untuk Pembelian Surat Berharga oleh TRSD untuk BUMN dan Korporasi (Swasta) Non Lembaga Keuangan Proses <i>Underwriting</i> Kredit Komersial
4.	18 Mei 2020	Usulan Kebijakan Restrukturisasi Debitur Terdampak COVID-19 : Penerbitan Persetujuan Prinsip Restrukturisasi dan Kewenangan Memutus <i>Deferred</i> Bunga
5.	20 Mei 2020	Usulan Penyempurnaan Proses Restrukturisasi Debitur Terdampak COVID-19

No.	Tanggal	Agenda
6.	29 Juni 2020	Usulan Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Penyaluran Kredit Triwulan III Tahun 2020
7.	6 Juli 2020	Peraturan Kredit Modal Kerja Renovasi
8.	18 Agustus 2020	Kebijakan KPR BTN (ex Agunan BTN) Kebijakan Penyesuaian Wewenang Memutus Penyelesaian Konsumer
9.	17 September 2020	Kebijakan Internal <i>Rating & Credit Line</i>
10.	21 September 2020	- Kebijakan Bagi Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19 - Perlakuan Khusus Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak COVID-19 - Perlakuan Khusus Mitra Binaan Program Kemitraan Terdampak COVID-19
11.	9 Oktober 2020	- Usulan Kebijakan KPR Bersubsidi BTN - Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer
12.	23 Oktober 2020	- Usulan Ketentuan Pemberian Subsidi Bunga-Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional - Usulan Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19
13.	28 Oktober 2020	- Usulan terkait Solusi BPI KPR Subsidi dan Non Subsidi – <i>Bester Project</i> - Usulan Keputusan Khusus <i>Pilot Project</i> Regionalisasi <i>Commercial Banking</i> di Wilayah
14.	7 Desember 2020	- Usulan Kebijakan Penyelesaian Kredit Komersial - Usulan Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Penagihan <i>Early Bucket</i> - Usulan Penerapan Layanan Hak Tanggungan - Elektronik dan Perubahan Ketentuan terkait Penerapan - Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT el)

Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk dalam rangka memutuskan kredit sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit telah ditetapkan dalam struktur organisasi Perseroan melalui Ketetapan Direksi No. 03/KD/DIR/SIPD/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat. Pada tingkat operasional, fungsi Komite Kredit tetap berjalan melalui pelaksanaan Rapat Direksi yang membawahi bidang kredit. Adapun struktur dan keanggotaan Komite Kredit sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Supervisi Credit Risk
Anggota (<i>voting member</i>)	Seluruh Direktur kecuali Direktur Supervisi Compliance
Anggota (<i>non voting member</i>)	Direktur Supervisi Compliance
Peserta Rapat Tambahan	Kepala Divisi supervisi Collection and Asset Management Kepala Divisi supervisi Legal Kepala Divisi supervisi Compliance and Governance Kepala Divisi supervisi Policy, Procedures and Business Process Reengineering Kepala Divisi supervisi Kredit/Pembiayaan sesuai segmennya Kepala Divisi supervisi Internal Audit Kepala Divisi/unit lainnya sesuai kebutuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Profil Komite Kredit

Seluruh Direksi merupakan anggota tetap. Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini sedangkan untuk anggota tetap yang merupakan kepala-kepala Divisi, profil masing-masing anggota Divisi dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit

Selama tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	13 Januari 2020	Permohonan keputusan atas permohonan fasilitas credit line PT Pertamina (Persero)
2.	23 Januari 2020	- Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank HSBC Indonesia - Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Citibank NA Indonesia Branch - Permohonan fasilitas <i>credit line</i> dan penambahan <i>limit counterparty</i> Standard Chartered Indonesia Branch - Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank ANZ Indonesia - Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Deutsche Bank
3.	26 Februari 2020	- Keputusan restrukturisasi ke 2 modal kerja konstruksi BTN PRK an PT ISPI dengan pola perpanjangan jangka waktu dan pembayaran kewajiban pokok sesuai <i>cashflow</i> PT ISPI Pratamalestari Perkasa - Keputusan restrukturisasi ke 2 KMK Konstruksi an PT RKP dengan pola pembayaran kewajiban pokok sesuai <i>cashflow</i> PT Reka Cipta Propertindo - Keputusan atas permohonan restrukturisasi ke 4 KI an PT Park View - Permohonan pencairan pertama - Penambahan plafon KYG an PT Pilar Artha Mandiri

No.	Tanggal	Agenda
4.	27 Februari 2020	– Restrukturisasi KYG dan KPL dengan pola pembayaran bunga sesuai <i>cashflow</i> PT Prima Jaya Gemilang – Keputusan atas restrukturisasi ke 4 PT Brightsource Pecatu Indonesia – Permohonan restrukturisasi ke 3 KYG PT Primeland Realty – Permohonan restrukturisasi ke 1 PT Sinar Griya Utama – Permohonan perpanjangan jangka waktu KYG PT Imanan Sejahtera Propertindo – Permohonan restrukturisasi KYG PT Puri Mutiara Cemerlang
5.	28 Februari 2020	Permohonan restrukturisasi KYG dan KPL PT Ghezz Patombong Perkasa
6.	18 Maret 2020	Keputusan atas banding restrukturisasi ke 2 KYG PRK PT Spekta Properti Indonesia
7.	19 Maret 2020	Keputusan atas restrukturisasi PT Citra Utama Niaga Nusantara
8.	20 Maret 2020	Keputusan atas banding restrukturisasi ke 2 KYG PRK PT Spekta Properti Indonesia
9.	27 Maret 2020	Keputusan atas KMK PT PNM (Persero)
10.	30 Maret 2020	– Keputusan atas restrukturisasi ke 3 KYG PT Binakarya Agung Propertindo – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke 4 KI dengan pola pembayaran bunga sesuai <i>cashflow</i> PT Haji Padang – Permohonan keputusan atas restrukturisasi KI PT Altama Brother – Keputusan atas restrukturisasi PT Kharisma Penanggungan Raya
11.	31 Maret 2020	– Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank Mega – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank HSBC Indonesia – Permohonan fasilitas <i>fixed income line</i> PT Danareksa Investment Management – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank DKI – Permohonan fasilitas <i>fixed income line</i> PT Trimegah Asset Management – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Bank Sulselbar – Keputusan restrukturisasi ke 3 KYG dengan pola pembayaran kewajiban pokok sesuai <i>cashflow</i> PT Alam Raya Cemerlang – Permohonan restrukturisasi ke 4 KYG pada proyek apartemen green park view tower G PT Inten Cipta Sejati – Permohonan restrukturisasi ke 5 KYG pada proyek apartemen menteng square PT Bahama Development – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke 4 KYG PT Megah Maninasata
12.	3 April 2020	Keputusan perpanjangan limit fasilitas kontra bank garansi dengan penjaminan asuransi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
13.	30 April 2020	– Keputusan perpanjangan jangka waktu KMK PT PPA (Persero) – Permohonan keputusan atas banding restrukturisasi ke 4 PT Brightsource Pecatu Indonesia – Permohonan keputusan restrukturisasi ke 4 KYG PT Bumi Daya Makmur – Permohonan keputusan atas penyelesaian kredit SIPOA Grup (PT Sipoa, PT Mega Surya Indah Jaya, PT Sipoa Propertindo Abadi) SIPOA Group – Permohonan restrukturisasi KYG PT Tiga Pilar Utama Sejahtera – Permohonan keputusan restrukturisasi ke 5 KYG PT Wahana Ekonomi Semesta – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke 3 KYG dan KPL PT Balikpapan Skylink Property – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke 1 KYG dan KPL PT Purimega Saranaland – Permohonan restrukturisasi KYG PT Cahaya Raga – Permohonan keputusan restrukturisasi KYG PT Makmur Bangun Karya
14.	13 Mei 2020	– Permohonan restrukturisasi ke 3 KI PT Teras Nirwana Bali – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Sinergi Colomadu – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Chalidana Inti Permata
15.	14 Mei 2020	– Restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 PT Central Virginia Development – Restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 PT Alexandra Citra Pertiwi
16.	19 Mei 2020	– Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke 1 KYG dan KPL PT Mega Mutiara Galunggung – Restrukturisasi ke 1 - perpanjangan waktu 12 bulan - Konstruksi iB CV KEMBANG RUBAH
17.	28 Mei 2020	– Restrukturisasi ke-1 - penundaan pokok dan bunga, <i>reschedule</i> pokok dan perpanjangan waktu 3 tahun PT REKA CIPTA PROPERTINDO – Restrukturisasi ke 5 - <i>deferred</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 5 - penundaan bunga dan pokok PT MENARA PERKASA MARGAHAYULAND – Perubahan klausul persetujuan restrukturisasi - perubahan syarat kontraktor non BUMN, pencairan tagihan kontraktor 100%, penghapusan tunggakan denda PT ISTIAJAYA GUNAPERKASA – Restrukturisasi ke 1 - perpanjangan waktu, pembayaran bunga 1 tahun, kewajiban pokok dimulai April 2022 PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO

No.	Tanggal	Agenda
		– Restrukturisasi ke-1 - penundaan pokok dan bunga, <i>reschedule</i> pokok dan perpanjangan waktu 3 tahun PT REKA CIPTA PROPERTINDO – Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 5 - penundaan bunga dan pokok PT MENARA PERKASA MARGAHAYULAND – Perubahan klausul persetujuan restrukturisasi - perubahan syarat kontraktor non BUMN, pencairan tagihan kontraktor 100%, penghapusan tunggakan denda PT ISTIAJAYA GUNAPERKASA – Restrukturisasi ke 1 - perpanjangan waktu, pembayaran bunga 1 tahun, kewajiban pokok dimulai April 2022 PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO – Restrukturisasi ke-1 - penundaan pokok dan bunga, <i>reschedule</i> pokok dan perpanjangan waktu 3 tahun PT REKA CIPTA PROPERTINDO – Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 5 - penundaan bunga dan pokok PT MENARA PERKASA MARGAHAYULAND – Perubahan klausul persetujuan restrukturisasi - perubahan syarat kontraktor non BUMN, pencairan tagihan kontraktor 100%, penghapusan tunggakan denda PT ISTIAJAYA GUNAPERKASA – Restrukturisasi ke 1 - perpanjangan waktu, pembayaran bunga 1 tahun, kewajiban pokok dimulai April 2022 PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO – Restrukturisasi ke-1 - penundaan pokok dan bunga, <i>reschedule</i> pokok dan perpanjangan waktu 3 tahun PT REKA CIPTA PROPERTINDO – Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 5 - penundaan bunga dan pokok PT MENARA PERKASA MARGAHAYULAND – Perubahan klausul persetujuan restrukturisasi - perubahan syarat kontraktor non BUMN, pencairan tagihan kontraktor 100%, penghapusan tunggakan denda PT ISTIAJAYA GUNAPERKASA – Restrukturisasi ke 1 - perpanjangan waktu, pembayaran bunga 1 tahun, kewajiban pokok dimulai April 2022. PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO
18.	29 Mei 2020	– Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 4 - perpanjangan waktu, <i>grace period</i>, perubahan jadwal pokok, <i>deffered</i> bunga, penurunan suku bunga PT GRAHA MULTI INSANI – Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 4 - perpanjangan waktu, <i>grace period</i>, perubahan jadwal pokok, <i>deffered</i> bunga, penurunan suku bunga PT GRAHA MULTI INSANI – Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 4 - perpanjangan waktu, <i>grace period</i> perubahan jadwal pokok, <i>deffered</i> bunga, penurunan suku bunga PT GRAHA MULTI INSANI – Restrukturisasi ke 5 - <i>deffered</i> bunga 90%, perpanjangan waktu, dan penundaan pokok PT KUALAJAYA REALTY – Restrukturisasi ke 4 - perpanjangan waktu, <i>grace period</i>, perubahan jadwal pokok, <i>deffered</i> bunga, penurunan suku bunga PT GRAHA MULTI INSANI
19.	3 Juni 2020	– Perpanjangan jangka waktu 24 bulan fasilitas <i>non cash loan existing plafon</i> PT Wijaya Karya Realty – Restrukturisasi COVID-19 fasilitas KI dengan plafond 250 M dan baki debet Rp202,5 M PT DUTA MITRA PROPERTINDO – KYG Proyek Panorama Sepatan 3 plafond 100 M PT ARYA LINGGA MANIK
20.	10 Juni 2020	– Restrukturisasi COVID-19 KYG plafon Rp47,9 M baki debet Rp35,6 M PT CIFEST FANTASTIK PROPERTI – Permohonan kebijakan KI korporasi plafond Rp2,5 T PT ANGKASA PURA II
21.	16 Juni 2020	– Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT BANK ANZ INDONESIA – Permohonan fasilitas <i>fixed income line</i> PT MANDIRI MANAJEMEN INDONESIA – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT BANK MAYBANK INDONESIA – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT BANK KEB HANA INDONESIA – Restrukturisasi COVID-19, <i>deffered</i> bunga 100% selama 12 bulan PT LANGGENG PERTIWI DEVELOPMENT – Restrukturisasi COVID-19 KYG PT AMEGA INDAH JAYA – Restrukturisasi COVID-19 KYG PT BUMI ARTA SEDAYU – Restrukturisasi COVID-19 KI penundaan pembayaran bunga dan pokok PT GRAHA MUTIARA RAYA – Restrukturisasi COVID-19, penundaan bunga, perpanjangan, penundaan pokok - KI Rp24 M dan KMK PRK Rp2 M PT MEGATAMA WISATA NUSANTARA – Restrukturisasi COVID-19, <i>deffered</i> bunga 100% selama 12 bulan PT MEGA MUTIARA GALUNGGUNG

No.	Tanggal	Agenda
22.	19 Juni 2020	– Restrukturisasi ke 2 - Konstruksi iB PT REXVIN PUTRA MANDIRI – Restrukturisasi COVID-19 KYG - penghapusan pembayaran angsuran bunga PT SAHID PUTRA HARAPAN – Restrukturisasi COVID-19 - KYG dan KPL - <i>deferred</i> bunga 50% selama 12 bulan PT CITRA UTAMA NIAGA NUSANTARA
23.	23 Juni 2020	– Perpanjangan jangka waktu KYG Rp4,63 M PT MUTIARA CITRA KHATULISTIWA – Restrukturisasi KYG - perpanjangan waktu dan biaya provisi dan admin sebesar 0,25% PT PAMULANG GRAHA CENTRAL MAS – Perubahan pengurus dan pemegang saham PT RANDU ALAS – Restrukturisasi ke 2 - skema sesuai <i>cashflow</i> dan perpanjangan waktu PT CIPTA PILAR PERSADA – Restrukturisasi COVID-19, <i>deferred</i> bunga 100% selama 24 bulan PT GRAHA ARTA KENCANA – Restrukturisasi COVID-19, penundaan pokok dan bunga KYG Rp25 M PT GRAHA MUTIARA RAYA – Restrukturisasi COVID-19, penundaan pokok dan bunga, penurunan suku bunga - plafond KI Rp160 M PT KAROSERI ANAK BANGSA – Restrukturisasi COVID-19, penundaan pokok dan bunga 1 tahun dan penurunan bunga PT ACR GLOBAL INVESTMENT
24.	26 Juni 2020	– Restrukturisasi COVID-19, penundaan pokok dan bunga 100% selama 12 bulan PT BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO
25.	29 Juni 2020	– Restrukturisasi ke 2 PT NUSA RAYA DEVELOPMENT – Restrukturisasi ke 5 PT GRAHA MAPAN LESTARI
26.	30 Juni 2020	– Restrukturisasi - perpanjangan, penangguhan pokok dan <i>grace period</i> serta penghapusan bunga dan denda tertunggak PT TRIDAYA MANDIRI – Restrukturisasi ke 2 PT DIPARANU RUCITA – Restrukturisasi - perpanjangan dan penurunan suku bunga PT BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT
27.	7 Juli 2020	– Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Standard Chartered Bank, Indonesia Branch – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Citibank NA, Indonesia Branch – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Permata Bank, Tbk – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Arrayan Nusantara Development - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Alexandra Citra Pertiwi - KOMITE A1 1. Permohonan <i>deferred</i> bunga, 2. Penarikan kelonggaran tarik, dan 3. <i>Line facility</i> PT Perusahaan Pengelola Aset - KOMITE A1 – Permohonan Keputusan atas penarikan sebagian agunan serta penambahan agunan kredit atas PT Perum Perumnas - KOMITE A1
28.	8 Juli 2020	– Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Bank Danamon – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Bank UOB – Restrukturisasi kredit Debitur terdampak COVID-19 PT Fanindo Cipta Propertindo - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit Debitur terdampak COVID-19 dan Perubahan Pengurus PT Akses Prima Indonesia - KOMITE A1 – Usulan perpanjangan dan penambahan <i>limit line facility</i> PT Adhi Commuter Properti - KOMITE A1
29.	9 Juli 2020	– Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> PT Pegadaian – Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> Bank BTPN – Permohonan Restrukturisasi ke-1 kredit kontruksi BTN PT Agung Karya Sejahtera - KOMITE A4 – Permohonan restrukturisasi ke-4 Kontruksi PT Jaya Rahma Abadi - KOMITE A4 – Permohonan persetujuan kredit kontruksi dan KPL BTN PT Mitra Berkas Propertindo - KOMITE A4
30.	10 Juli 2020	– Restrukturisasi Kredit Debitur terdampak COVID-19 PT Supradinakarya Multijaya - KOMITE A3 – Restrukturisasi Kredit Debitur terdampak COVID-19 PT Bumi Pesona Citraagung - KOMITE A3 – Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak COVID-19 PT Eka Hasta Saranagraha - KOMITE A2 – usulan perpanjangan Kredit modal kerja (KMK) BTN PT Permodalan Nasional Madani - KOMITE A2
31.	14 Juli 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Citra Tama Adigraha - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Satriyo Mega Sarana - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Istia Jaya Land - KOMITE A4
32.	21 Juli 2020	– Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> Bank DBS Indonesia – Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> JP Morgan Chase Bank, NA – Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> Bank ICBC Indonesia
33.	22 Juli 2020	– Permohonan Keputusan atas Restrukturisasi Ke-2 PT Fadesa Indonesia - KOMITE A4 – Permohonan Keputusan atas Restrukturisasi Pembiayaan Kontruksi BTN iB PT Adabaruland Anugerah Pratama - KOMITE A4 – Permohonan Keputusan atas Restrukturisasi Pembiayaan Kontruksi PPL BTN iB PT Eka Nusa Kreasindo - KOMITE A4

No.	Tanggal	Agenda
		– Permohonan Keputusan Restrukturisasi Produk PT Pancaran Pondok Tering - KOMITE A4 – Permohonan Keputusan atas restrukturisasi Pembiayaan Kontruksi dan Pembiayaan Pembelian Lahan BTN iB PT Rumahkita Prima Persada - KOMITE A4 – Pemohonan Rstrukturisasi Ke-2 Kredit Kontruksi PT Musi Belida Lestari - KOMITE A4 – Permohonan Keputusan atas Restrukturisasi Ke-2 PT Fadesa Indonesia - KOMITE A4
34.	27 Juli 2020	– Permohonan keputusan atas permohonan Fasilitas kredit korporasi (Kredit Investasi dan Kredit modal kerja) PT Patra Jasa - KOMITE A1
35.	28 Juli 2020	– Permohonan Keputusan atas restrukturisasi ke-3 kredit kontruksi BTN iB PT Baruga Asrinusa Development - KOMITE A1 – Restrukturisasi Kredit Debitur terdampak COVID-19 PT Pollux Aditama Kencana - KOMITE A1 – Restrukturisasi Kredit Debitur terdampak COVID-19 PT ISPI Pratama Iestari Perkasa - KOMITE A1 – Restrukturisasi Kredit Debitur terdampak COVID-19 PT Graha Cemerlang - KOMITE A2 – Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak COVID-19 PT Sanggraha Arghatama Mas - KOMITE A3 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Sanggraha Arghatama Mas - KOMITE A3
36.	29 Juli 2020	– Permohonan Keputusan atas permohonan perpanjangan Jangka waktu Kredit ke-3 PT Perusahaan Pengelola Aset - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Totalindo Eka Persada - KOMITE A1 – Permohonan restrukturisasi ke-2 Pembiayaan Kontruksi BTN PT Cipta Pilar Persada - KOMITE A3 – Permohonan Keputusan atas Restrukturisasi ke-7 KMK kontruksi PT Akasah Sigar Tengah - KOMITE A3 – Permohonan Keputusan atas Restrukturisasi ke-3 PT Putera Jasmine Roulindo - KOMITE A4 – Permohonan Restrukturisasi ke-1 pembiayaan PT Grand House Mulia - KOMITE A4
37.	30 Juli 2020	– Permohonan Keputusan atas usulan rekomendasi restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok, bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit KMK Perum Percetakan Negara Republik Indonesia - KOMITE A4 – Permohonan banding restrukturisasi ke-2 PT Putra Udhiana Sejahtera - KOMITE A4 – Permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi ke-8 kredit investasi BTN PT Blauran Cahaya Mulia - KOMITE A1 – Permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi ke-3 kredit kontruksi BTN PT Dipta Wimala Bahagia - KOMITE A1 – Permohonan keputusan restrukturisasi ke- 7 KMK Konstruksi PT Akasah Sigar Tengah - KOMITE A3 – Permohonan banding keputusan atas restrukturisasi Kredit Kontruksi PT Tiga Pilar Utama Sejahtera - KOMITE A2 – Permohonan banding restrukturisasi kredit PT Tridaya Mandiri - KOMITE A4
38.	5 Agustus 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT PRASETYA AGUNG CIPTA ABADI - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT CAHAYA BANDUNG JAYA - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT SATWIKA PERMAI INDAH - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Griya Karunia Sejahtera - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT GUNAWANGSA PUTRA PERKAS - KOMITE A1
39.	11 Agustus 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT WARNA WARNI INVESTAMA - KOMITE A1
40.	12 Agustus 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT PIKKO LAND DEVELOPMENT - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT GRAHA INDAH KIRANA - KOMITE A4
41.	13 Agustus 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT GLOBAL MITRATAMA SOLUSINDO - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT ADHI PERSADA PROPERTI - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT PP PROPERTI - KOMITE A4
42.	18 Agustus 2020	– Permohonan perubahan <i>siteplan</i> dan struktur fasilitas kredit PT PRAKARSA RAHAYU PUTRA - KOMITE A3 – Permohonan baru KYG dan KPL PT MEKAR AGUNG SEJAHTERA - KOMITE A3 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT CHALIDANA INTI PERMATA - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT CHALIDANA INTI CAHAYA - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Kinarya Rekayasa - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT PARK VIEW - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT MENARA PELANGI - KOMITE A2
43.	24 Agustus 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT DUTA PARAMINDO SEJAHTERA - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT BUKIT SARUA DEVELOPMENT - KOMITE A1
44.	25 Agustus 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT GRAHA LOKA PANGESTU - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT CIAWI MEGAH INDAH - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT TIRTA PERSADA DEVELOPMENTS - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT MEGA PASANGGRAHAN INDAH - KOMITE A1

No.	Tanggal	Agenda
		– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT STARINDO KAPITAL INDONESIA - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT PANGHEGAR BALI - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT MEGAKARYA MAKMUR SENTOSA - KOMITE A2 – Permohonan baru KYG dan KPL PT DELTA PINANGMAS - KOMITE A2
45.	29 Agustus 2020	– Restrukturisasi ke-1 PT PURI MUTIARA CEMERLANG - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1, keringanan bunga dan perpanjangan waktu PT REJEKI AGUNG SEDAYA GROUP - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1, penundaan bunga 90% selama 18 bulan, perpanjangan waktu PT WIRA PERDANAJAYA TIGA - KOMITE A4 – Restrukturisasi, penundaan bunga 1 tahun dan perpanjangan waktu PT GRHACIPTA ARSITAMA MANDIRI - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-3, perpanjangan waktu, penundaan bunga, penjadwalan ulang pokok PT PILAR ARTHA MANDIRI - KOMITE A2 – Perpanjangan jangka waktu kredit 48 bulan PT BERSATU SUKSES SEJAHTERA - KOMITE A2 – Restrukturisasi ke-4 dan ke-2 PT LOMBOK – ROYAL PROPERTY - KOMITE A2 Perpanjangan SP2K KYG dan KPL PT ELFA JAYA PRATAMA - KOMITE A3 – Restrukturisasi ke-1, penundaan bunga 90% selama 18 bulan, perpanjangan waktu 48 bulan PT RAJA PRIMA SUMATERA - KOMITE A3 – Restrukturisasi ke-2, penurunan suku bunga, penangguhan bunga, perpanjangan jangka waktu PT MASMUR DUA SATU - KOMITE A3 – Restrukturisasi, <i>deferred</i> bunga, perpanjangan waktu, pembayaran bunga 20% selama 12 bulan PT KARYAPAMA MEGA ABADI - KOMITE A3 – Restrukturisasi ke-2, perpanjangan waktu 2 tahun, <i>deferred</i> bunga PT SARI PURNAKARYA JATILUHUR - KOMITE A4
46.	31 Agustus 2020	– Restrukturisasi ke-1, perpanjangan waktu, penundaan bunga 100% selama 6 bulan, penghapusan sebagian kelonggaran tarik PT HAWARI JAYA PROPERTINDO - KOMITE A4 – Permohonan <i>top up</i> kredit PT BANGUN ESTUSAE PROPERTINDO - KOMITE A4
47.	8 September 2020	– Permohonan keputusan atas fasilitas <i>corporate loan</i> - Kredit Investasi PT PLN (Persero) - KOMITE A1
48.	10 September 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Sinarmuda Setia Pertiwi - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Sinar Bodhi Cipta - KOMITE A4 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Bukit Mas Selaras - KOMITE A4
49.	15 September 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Mutiara Citra Khatulistiwa - KOMITE A4
50.	17 September 2020	– Permohonan perubahan klausula <i>line facility</i> PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) - KOMITE A1 – Permohonan tingkat suku bunga kredit korporasi investasi untuk penyampaian penawaran indikatif dalam rangka pelaksanaan <i>bidding</i> dan negosiasi pada pemberian <i>term loan facility</i> PT PLN (Persero) - KOMITE A1
51.	18 September 2020	– Permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - KOMITE A1
52.	21 September 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT PP Properti (Tbk) - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Adhi Persada Properti - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 Perum Perumnas: a. Apartemen Grand Sentraland b. Apartemen Sentraland Cengkareng c. Apartemen Sentraland Jakabaring d. Apartemen Sentraland Medan e. Apartemen Mahata Tj. Barat f. Apartemen Mahata Margonda g. Apartemen Sentraland Dramaga - KOMITE A1 – Permohonan keputusan atas penambahan peruntukan dan perubahan agunan <i>non cash loan</i> PT Wijaya Karya Realty - KOMITE A1
53.	22 September 2020	– Permohonan perpanjangan jangka waktu dan perubahan peruntukan <i>non cash loan</i> PT PP Properti (Tbk) - KOMITE A1 – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> Bank Panin – Permohonan perubahan pengurus PT Graha Mapan Lestari - KOMITE A1 – Restrukturisasi ke-6 KYG PT Menara Perkasa Margahayuland - KOMITE A1 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Trinita Dinamik - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Trimitra Propertindo - KOMITE A2 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Putri Guna Nusa - KOMITE A3 – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 PT Turen Indah Property - KOMITE A4

No.	Tanggal	Agenda
54.	29 September 2020	– Restrukturisasi ke-6 KYG PT Tri Tirta Permata - KOMITE A1 – Permohonan perpanjangan jangka waktu PT Cikal Buana Persada - KOMITE A3 – Restrukturisasi ke-3 KYG PT Duta Perumahan – Intisakti - KOMITE A3 – Perpanjangan jangka waktu PT Cikal Buana Persada - KOMITE A3 – Perpanjangan jangka waktu PT Pirantec Rekabina - KOMITE A3 – Restrukturisasi ke-2 KYG PT HER Utama Mandiri - KOMITE A3 – Restrukturisasi ke-4 KYG PT Alam Raya Cemerlang - KOMITE A2 – Restrukturisasi ke-2 KYG PT Riscon Victory - KOMITE A4
55.	30 September 2020	– Restrukturisasi ke-5 KYG SIPOA Group (PT Mega Surya Indah Jaya, PT Sipoa, PT Sipoa Propertindo Abadi) - KOMITE A1 – Permohonan tingkat suku bunga kredit korporasi investasi untuk penyampaian penawaran indikatif dalam rangka pelaksanaan <i>bidding</i> dan negosiasi pada pemberian <i>term loan facility</i> PT PLN (Persero) - KOMITE A1 – Perpanjangan dan penundaan bunga (restrukturisasi) PT Purimega Saranaland No. 00035.01.11.000579.1 - KOMITE A4 – Perpanjangan dan penundaan bunga (restrukturisasi) PT Purimega Saranaland No. 35.01.11.000580.6 - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1 KYG PT Indo Mandiri Properti - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1 KYG PT Bumi Mitra Witra - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1 KYG PT Ranau Karisma Property - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1 KI Yunan Pediatrik Ario Harahap No. 110.01.13.000094.3 - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1 KI Yunan Pediatrik Ario Harahap No. 110.01.13.000091.9 - KOMITE A4 – Restrukturisasi ke-1 KYG PT Pratama Indo Bumi Celebes - KOMITE A4
56.	6 Oktober 2020	– Permohonan perubahan klausula <i>line facility</i> an. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) – Permohonan usulan KMK PRK an. Perum Perumnas – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Pegadaian
57.	7 Oktober 2020	Usulan fasilitas <i>credit line</i> PT Jasa Marga (Persero)
58.	8 Oktober 2020	– Permohonan keputusan atas persetujuan relaksasi dan rencana fasilitas kredit korporasi atas nama PT Angkasa Pura I (Persero) ('PT AP-I') – Permohonan persetujuan kredit modal kerja dan <i>credit line</i> PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT PNM) – Permohonan fasilitas <i>Fixed Income Line</i> kepada PT PNM Investment Management – Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> kepada PT BCA Tbk – Permohonan Restrukturisasi kredit konstruksi an. PT Azatata Citra – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Griya Intan Mandiri
59.	20 Oktober 2020	– Permohonan banding persetujuan bersama atas restrukturisasi kredit konstruksi BTN an. PT Dipta Wimala Bahagia – Permohonan banding persetujuan bersama atas restrukturisasi kredit konstruksi BTN dan kredit modal kerja kontraktor an. PT Baruga Asrinusa Development – Penebusan sebagian agunan PT Baruga Asrinusa Development – Permohonan banding atas persetujuan kredit konstruksi dan KPL BTN Proper Puri Delta Tigaraksa Tahap 1 an. PT Delta Pinangmas (PT DP) – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Mutiara Sentosa Realtindo – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Bumi Cempaka Asri (PT BCA) – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Duta Pratama Propertindo (PT DPP) – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Elok Sejahtera Indah (PT ESI) – Permohonan fasilitas <i>Credit Line</i> PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) – Permohonan keputusan persetujuan atas pengajuan KMK Konstruksi an. PT Aditama Jaya – Permohonan keputusan pembiayaan kredit konstruksi dan KPL an. PT Dwiwahana Delta Megah Proper Puri Delta Asri 7 (Ext)
60.	26 Oktober 2020	– Usulan permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi ke 1 kredit konstruksi an. PT Morse Indonesia – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi iB an. PT Putera Papan Utama – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi iB an. PT Cahaya Cemerlang Propertindo – Permohonan keputusan permohonan persetujuan kredit konstruksi BTN Perumahan SEION Serang an. PT Acradiagraha Nurjaya (PT AN) – Permohonan restrukturisasi kredit ke-3 an. PT Indah Karya
61.	27 Oktober 2020	– Permohonan banding syarat restrukturisasi pembiayaan konstruksi BTN an. PT Cipta Pilar Persada Proyek Apartemen Cordova Edupartment - KCS Semarang Loan 71410043

No.	Tanggal	Agenda
62.	28 Oktober 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Haji padang (PT HP) – Tindak lanjut hasil RKK Restrukturisasi kredit ke-3 an. PT Indah karya
63.	17 November 2020	– Permohonan keputusan atas usulan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) atas nama PT Sinergi Investasi Properti – Permohonan keputusan atas usulan rekomendasi pemberian fasilitas <i>credit line</i> kepada PT Pupuk Indonesia – Permohonan persetujuan perubahan suku bunga dan skema pembayaran fasilitas <i>corporate loan</i> an. PT PLN (Persero) – Permohonan keputusan restrukturisasi kredit konstruksi BTN dan KPL BTN an. PT Tunas Anrisco Jaya (PT TAJ)
64.	18 November 2020	– Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Waskita Karya Realty (PT WKR) – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Wisma Seratus Sejahtera
65.	19 November 2020	– Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank BTPN Tbk – Restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 an. PT Waskita Karya Realty (PT WKR) – Permohonan keputusan atas persetujuan relaksasi dan rencana fasilitas kredit korporasi atas nama PT Angkasa Pura I (Persero) (PT AP-I)
66.	26 November 2020	– Permohonan banding atas syarat restrukturisasi Ke-6 kredit konstruksi BTN PT Menara Perkasa Margahayuland – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke-2 KMK Konstruksi BTN an. PT Bhakti Agung propertindo – Permohonan banding atas syarat restrukturisasi ke-5 kredit konstruksi BTN PT Kualajaya Realty- "Apartemen Pejaten Park Residence" – Permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi ke-3 kredit konstruksi an. PT Reka Cipta Propertindo – Permohonan persetujuan pemberian fasilitas <i>corporate line facility</i> a.n PT Pegadaian (Persero) – Permohonan keputusan atas usulan Kredit Modal kerja (KMK) a.n PT Waskita Bumi Wira
67.	27 November 2020	– Permohonan keputusan permohonan banding syarat kredit konstruksi perumahan SEION Serang an. PT Acradiagraha Nurjaya (PT AN) – Permohonan persetujuan kredit konstruksi BTN Perumahan Logam Bangun Setia-2 Tahap 3 an. PT Saipul Putra Sakti (PT SPS) – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Standard Chartered Bank Indonesia – Permohonan fasilitas <i>credit line</i> PT Bank BNP Paribas Indonesia
68.	30 November 2020	– Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke-3 an. PT Kaltim Mandiri Development – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke-2 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Marwah Cipta Pratama
69.	8 Desember 2020	– Usulan banding permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi Ke-2 kredit konstruksi an. PT Sari Purnakarya Jatiluhur, Proper Casa Villages – Permohonan keputusan atas restrukturisasi Ke-2 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Mayanti Jaya Mustika
70.	15 Desember 2020	– Permohonan bersama restrukturisasi ke-2 kredit konstruksi atas nama PT Spekta Properti Indonesia – Permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi ke-1 kredit konstruksi BTN an. PT Mandiri Sukses Sejahtera – Permohonan restrukturisasi ke-2 kredit investasi BTN an. PT Bangun Papan Selaras Proyek Bumi Papan Selaras. – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi dan PPL BTN iB an. PT Sinar Berlin Jaya Utama – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke-1 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Erlangga Karya Abadi – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Pilar Manggala – Permohonan keputusan atas permohonan restrukturisasi COVID-19 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Tamangapa Raya Permai Perumahan Tamangapa Royale Palace III – Permohonan keputusan atas permohonan restrukturisasi COVID-19 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Turen Indah Property perumahan Bululawang Residence – Permohonan keputusan atas permohonan restrukturisasi COVID-19 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Turen Indah Property perumahan Bululawang Residence – Permohonan keputusan atas permohonan restrukturisasi COVID-19 pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Turen Indah Property Perumahan City View
71.	17 Desember 2020	– Permohonan keputusan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit konstruksi BTN an. PT Dwigunatama Rintisprima (PT DR) Proper Harvest City – Permohonan persetujuan kredit konstruksi BTN PT Griyo Mapan Santosa (PT GMS) perumahan Central Park Juanda

No.	Tanggal	Agenda
72.	18 Desember 2020	– Usulan permohonan persetujuan atas restrukturisasi ke-1 kredit investasi an. Telly Pinasang
73.	21 Desember 2020	– Permohonan Keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi BTN iB an. PT Kaya Sejahtera Berlipat KCS Malang
74.	24 Desember 2020	– Usulan bersama atas restrukturisasi kredit investasi an. PT Blauran Cahayamulia
75.	29 Desember 2020	– Permohonan fasilitas <i>credit line</i> kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Permohonan Keputusan atas pengajuan waiver klausul pembayaran pokok kredit Perum Perumnas – Permohonan keputusan atas usulan rekomendasi pemberian fasilitas <i>credit line</i> kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk – Permohonan keputusan atas restrukturisasi ke-1 kredit investasi BTN an. Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara (YP UNINUS) – Permohonan keputusan permohonan banding atas syarat dan ketentuan persetujuan kredit konstruksi BTN dan PRK Siaga an. PT Cikal Buana Persada Proper Buana Tamansari Tahap 1 dan Tahap 2 – Permohonan perpanjangan kredit konstruksi BTN an. PT Pesona Gerbang Karawang Proper Grand Taruma
76.	30 Desember 2020	– Usulan permohonan persetujuan bersama atas restrukturisasi kredit konstruksi an. PT Tulus Asih – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan konstruksi dan PPL BTN iB an. PT Cahaya Sanubari Sakti – Permohonan keputusan atas restrukturisasi pembiayaan BTN iB atas nama: a. PT Burero Sakti Perdana b. PT Gamalama Jaya c. PT Liga Bhakti Jaya d. PT Mittariski Sejahtera e. PT Nadhif Jaya f. CV Nur Satria Jaya g. PT Primacon Selaras h. PT Puri Harapan i. PT Tanggo Papa j. PT Trimono Priyanbara Gani k. PT Wanodya Purnabhakti Nusa – Permohonan restrukturisasi kredit konstruksi BTN an. PT Patramal Anugerah Soraya

Komite Personalia

Komite Personalia berperan dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Struktur dan Keanggotaan Komite Personalia

Komite Personalia Pusat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2014 tentang Komite Personalia dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Koordinator	Direktur Utama
Sekretaris	Human Capital Management Division Head
Anggota Tetap	Direktur yang melakukan supervisi <i>Human Capital</i> dan Direksi lain terkait <i>human capital</i> pada unit yang supervisinya sedang dibahas
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi lain yang diundang berdasarkan keperluan
Supporting Group	Department Head Human Capital bersama dengan Unit Human Capital Career & Development pada Human Capital Management Division

Keanggotaan Kepala Divisi dalam Komite Personalia Pusat tidak dapat diwakilkan sehingga dalam hal yang bersangkutan berhalangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Personalia, maka perannya tidak dapat didelegasikan kepada pemangku jabatan lain di unit kerjanya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalia

Tugas dan tanggung jawab Komite Personalia Pusat adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program *human capital* agar sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital*.
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masukan yang disampaikan oleh Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim yang berkaitan dengan Nomor 1.
4. Sebagai wadah yang independen bagi Pegawai yang melakukan klarifikasi mengenai keputusan Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim berkenaan dengan penempatan/penggunaan Pegawai tersebut.
5. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
6. Komite dapat memiliki kewenangan memutus terkait *human capital* di luar Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 tersebut di atas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
7. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/kebijakan *Human Capital Management*.

Profil Komite Personalia

Nama	Jabatan	Keterangan	Profil
Nixon L. P. Napitupulu	Ketua	Plt. Direktur Utama	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Eko Waluyo	Sekretaris	Human Capital Management Division Head (HCMD)	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Yossi Istanto	Anggota Tetap	Direktur Human Capital, Legal & Compliance	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Personalia

Selama tahun 2020, Komite Personalia telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	21 Januari 2020	Pemilihan Kandidat dan penetapan Pejabat layer 1 (Kepala Divisi dan Kepala Kantor Wilayah).
2.	31 Januari 2020	Penetapan Pejabat layer 1 (Kepala Divisi dan Kepala Kantor Wilayah).
3.	08 April 2020	Pemenuhan Tim <i>Task Force</i> Restrukturisasi.
4.	13 April 2020	Pembahasan Memo HCMD terkait usulan usulan Promosi/Rotasi Kepala Cabang.
5.	20 April 2020	Evaluasi dan Pengisian Jabatan Kepala Divisi, Kepala Wilayah dan Kepala Cabang.
6.	29 April 2020	Pembahasan Rekomendasi Usulan Top Talent BOD-1.
7.	18 Juni 2020	Evaluasi dan Pengisian Jabatan Kepala Divisi, Kepala Wilayah dan Kepala Cabang.
8.	22 Juni 2020	Pembahasan Memo HCMD terkait Usulan Pemenuhan L1 dan L2 pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
9.	14 Agustus 2020	Evaluasi dan Pengisian Jabatan Kepala Divisi, Kepala Wilayah dan Kepala Cabang.
10.	28 Agustus 2020	Evaluasi dan Pengisian Jabatan Kepala Divisi, Kepala Wilayah dan Kepala Cabang.
11.	18 September 2020	Evaluasi dan Pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
12.	2 Oktober 2020	Evaluasi dan Pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
13.	9 Oktober 2020	Evaluasi dan Pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
14.	4 November 2020	Evaluasi dan Pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
15.	18 November 2020	Evaluasi dan Pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
16.	23 November 2020	Evaluasi dan Pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Komite Pengarah Teknologi Infomasi

Komite Pengarah Teknologi Infomasi berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Infomasi

Komite Pengarah Teknologi Infomasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 05/PD/ICTD/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 18/PD/CMO/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	Direktur IT & Operation (<i>ex-officio</i>) Dalam hal Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi maka Direktur Utama bertindak sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi
Sekretaris	Information Technology Operation Division Head (<i>ex-officio</i>)
Anggota Tetap Sesuai 05/PD/ICTD/2014	1. Direktur Strategy, Compliance & Risk (<i>ex-officio</i>) 2. Direktur Distribution & Network (<i>ex-officio</i>) 3. Direktur Consumer Banking (<i>ex-officio</i>) 4. Enterprise Risk Management Division Head (<i>ex-officio</i>) 5. Operation and Business Support Division Head (<i>ex-officio</i>) 6. Sharia Division Head (<i>ex-officio</i>) 7. Regional Office I Head (<i>ex-officio</i>)
Anggota Tetap	1. Direktur Strategy, Compliance & Risk (<i>ex-officio</i>) 2. Direktur Commercial Banking (<i>ex-officio</i>) 3. Direktur Consumer Banking (<i>ex-officio</i>) 4. Direktur Distribution & Network (<i>ex-officio</i>) 5. Information Technology Operation Division Head (<i>ex-officio</i>) 6. Enterprise Risk Management Division Head (<i>ex-officio</i>) 7. Operation & Business Support Division Head (<i>ex-officio</i>) 8. Sharia Division Head (<i>ex-officio</i>) 9. Corporate Strategy & Performance Management Division Head (<i>ex-officio</i>) 10. Compliance & Governance Division Head (<i>ex-officio</i>) 11. Internal Audit Division Head (<i>ex-officio</i>) 12. Service Quality & Distribution Division Head (<i>ex-officio</i>)
Anggota Tidak Tetap	Direktur lainnya dan Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Infomasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Infomasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Roadmap* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - b. Sumber data yang dibutuhkan.
 - c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Perseroan.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.

8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Perseroan akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur.
10. Komite bertanggung jawab atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme rapat Direksi.

Profil Komite Pengarah Teknologi Informasi

Seluruh Direksi merupakan anggota tetap. Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini sedangkan untuk anggota tetap yang merupakan kepala-kepala Divisi, profil masing-masing anggota Divisi dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	8 Maret 2020	- Prioritas Inisiatif IT 2020 - <i>IT Infrastructure Sourcing Strategy</i> - Strategi IT Core Banking Syariah
2.	23 Maret 2020	- Prioritisasi Inisiatif IT 2020 - <i>Budget Alignment</i> - Kajian Infrastruktur IT (Sewa & Beli) - Kajian Infrastruktur IT (<i>Refreshment</i>)
3.	24 Agustus 2020	- Update Progress Project dan Tindak Lanjut KPTI Maret 2020 - Inisiatif Strategis IT 2020 - Realisasi dan Prognosa CAPEX & OPEX IT 2020
4.	30 Desember 2020	- <i>Update Progress Project</i> dan Tindak Lanjut KPTI Agustus 2020 - Realisasi CAPEX dan OPEX IT - Inisiatif IT 2021 & <i>Corporate Plan</i> 2021 - Usulan KPTI bulan Desember 2020

Transformation Steering Committee

Struktur dan Keanggotaan Transformation Steering Committee

Anggota dalam Transformation Steering Committee adalah semua Direksi tetapi dalam mengusulkan usulan di dalam Komite harus dihadiri oleh Direktur pengusul dan dihadiri oleh 2 (dua) Direktur lainnya yang terdampak, sehingga kuorum dalam Transformation Steering Committee berjumlah 3 (tiga) Direktur.

Tugas dan Tanggung Jawab Transformation Steering Committee

1. Menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
 - a. Human Capital, Organization dan Governance, Risk Management and Compliance (GRC).
 - b. Information Technology (IT), Digital dan Network.
 - c. Commercial Banking dan Business Process, Consumer Banking dan Sharia.
 - d. Partnership dan Project Management.
2. Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan *Pilot Project* Inisiatif Transformasi.
3. Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada Rapat Direksi apabila diperlukan.
4. Melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.

Profil Transformation Steering Committee

Seluruh Direksi merupakan anggota tetap. Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Transformation Steering Committee

No.	Tanggal	Agenda
1.	8 April 2020	Dukungan proses restrukturisasi dan <i>collection document</i> akibat peningkatan restrukturisasi akibat COVID-19
2.	26 April 2020	Sentralisasi Pengelolaan BUMN dan Debitur > 100 M
3.	27 Mei 2020	Pengadaan Jasa Konsultasi BPI <i>Consumer Lending, SME & Commercial Lending</i> dan <i>Corporate Plan 2020-2025</i>
4.	15 Juni 2020	<i>Steering Committee Review Job Evaluation</i>
5.	18 Juni 2020	<i>Steering Committee Proses KPR Online</i>
6.	25 Juni 2020	<i>Steering Committee Closing Report Project Strategic Human Capital</i>
7.	16 September 2020	Terkait <i>Backtrack</i> dengan Direktur Consumer & Commercial Lending dan Direktur Operational & IT Digital Banking
8.	30 September 2020	Lokasi dan Kewenangan CBC
9.	12 Oktober 2020	Penyampaian <i>Progress Report Enhancement BPI (Business Process Improvement)</i> Kredit Konsumer
10.	14 Oktober 2020	<i>Steering Committee</i> Koordinasi Perubahan Struktur Organisasi SHAD dan ITPD
11.	11 November 2020	<i>Townhall</i> Implementasi <i>Business Process Improvement</i> Kredit Konsumer <i>Enhancement</i>
12.	20 November 2020	Rencana Perubahan Struktur Organisasi DCD –CSTD <i>Pulse Check Pilot Implementasi Business Process Improvement</i> Kredit Konsumer <i>Enhancement</i>
13.	23 November 2020	Pembahasan <i>review</i> Pilot CBC Bintaro Jaya dan persiapan CBC Phase 2

Komite Bisnis

Komite Bisnis membantu Direksi dalam merumuskan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan produk Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Bisnis

Ketua 1	Direktur Distribution and Retail Funding
Ketua 2	Direktur Consumer and Commercial Lending
Sekretaris	Kepala Divisi Service Quality and Distribution
Anggota Tetap	1. Direktur yang membidangi Operation and IT 2. Kepala Divisi Corporate Strategy and Planning 3. Kepala Divisi Treasury

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Bisnis

1. Menentukan inisiatif strategis produk dan aktivitas bisnis Perseroan di pasaran.
2. Memutuskan Produk/Aktivitas Baru (PAB) yang akan diluncurkan oleh Perseroan.
3. Menentukan inisiatif terkait *marketing* dan *branding* produk dan aktivitas bisnis Perseroan.
4. Menentukan arah pengembangan produk dan aktivitas bisnis jangka panjang Perseroan.
5. Sarana koordinasi aktivitas lintas unit untuk meluncurkan dan evaluasi produk dan aktivitas bisnis Perseroan.
6. Memastikan kesesuaian antara pengembangan produk dan aktivitas dengan kebutuhan serta tujuan bisnis Perseroan.
7. Melakukan pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan produk dan aktivitas bisnis baru dan penerapannya dalam jangka panjang.
8. Menentukan kebijakan-kebijakan Perseroan yang terkait dengan pengembangan produk dan aktivitas bisnis Perseroan.
9. Melakukan evaluasi terhadap produk Perseroan yang telah diluncurkan di pasaran (*product life cycle*) dan strategi yang harus ditindaklanjuti terhadap hal tersebut.

10. Memantau dan membahas sebagai berikut:

- Kemajuan dalam pelaksanaan produk dan aktivitas bisnis baru yang sudah dibuat.
- Rencana-rencana pengembangan, penerapan produk dan aktivitas bisnis.
- Masalah-masalah strategis yang ditemui dalam pengembangan, penerapan produk dan aktivitas.
- Teknologi dan standar yang perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan penerapannya di lingkungan Perseroan.

Profil Komite Bisnis

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini sedangkan untuk anggota tetap yang merupakan kepala-kepala Divisi, profil masing-masing anggota Divisi dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Bisnis

No.	Tanggal	Agenda
1.	10 Februari 2020	Usulan perubahan nama KPR BTN Skema Khusus
2.	8 Mei 2020	Pengembangan Produk Tabungan Bisnis Perseroan
3.	4 Agustus 2020	• Perluasan <i>Fee Based Income</i> KPR Bersubsidi • Kredit Modal Kerja Penjamin PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) • Pengembangan Tabungan BTN Investa
4.	18 Agustus 2020	Pengembangan Produk Tabungan Bisnis Perseroan

Tata Kelola Remunerasi dan Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan memiliki kebijakan tata kelola remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai baik yang bersifat wajib maupun tambahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola remunerasi tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dalam menarik, memotivasi, dan mempertahankan *human capital* yang berkualitas. Tata kelola remunerasi Perseroan tidak terlepas dari kemampuan Perseroan untuk senantiasa menjalankan kebijakan berlandaskan pada asas kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Dalam menyusun kebijakan remunerasi, Perseroan menggunakan jasa konsultan eksternal untuk menjaga remunerasi tetap kompetitif.

Dasar Kebijakan Serta Prosedur dan Mekanisme Penetapan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Tata kelola remunerasi Perseroan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan risiko serta pemberlakukan remunerasi yang bersifat *variable* sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan

dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2020 kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif, dalam tabel berikut.

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Remunerasi yang Diterima dalam 1 Tahun (Rp)
I Nengah Rentaya	725.642.514

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No. 16/SE/DIR/HCS/2019 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun *material risk takers*. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2019, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi Di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis kantor cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.
Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi Budaya Perusahaan dan kompetensi *leadership* bagi pegawai yang memiliki bawahan.

3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan Perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*.

Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai presentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok pegawai tetap terhadap *midpoint* pada *range* Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang pegawai tetap yang bersangkutan.

Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang tercermin dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

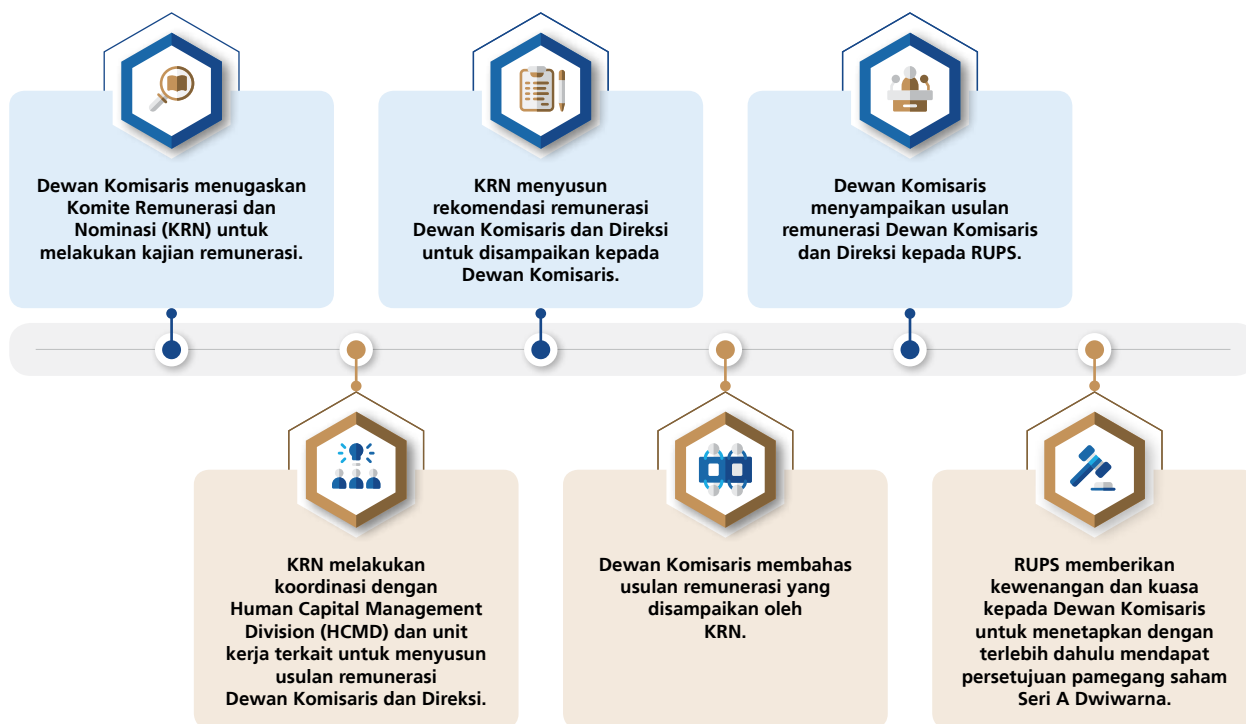
1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, meliputi:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. MRT dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
 - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan pegawai non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.
3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum. Pembentukan strategi remunerasi meliputi kajian terhadap kebijakan remunerasi berbasis kinerja dan risiko, pemberdayaan melalui implementasi sistem remunerasi serta peningkatan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program manfaat. Pengkajian sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, dengan memperhatikan hal-hal antara lain kinerja keuangan Perseroan, Kompetensi dan kinerja pegawai, dan praktik remunerasi yang berlaku di pasar.

Pembentukan strategi remunerasi meliputi kajian terhadap kebijakan remunerasi berbasis kinerja dan risiko, pemberdayaan melalui implementasi sistem remunerasi serta peningkatan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program manfaat. Pengkajian sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, dengan memperhatikan hal-hal antara lain kinerja keuangan Perseroan, Kompetensi dan kinerja pegawai, dan praktik remunerasi yang berlaku di pasar.

Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi

Agar penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan eksternal.

Nama Konsultan	Lingkup Pekerjaan
Korn Ferry Indonesia	• Kajian gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dibandingkan dengan Pasar. • Kajian tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019. • Kajian <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dan sesuai POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. • Kajian Perhitungan remunerasi DPS tahun 2020.

Indikator Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

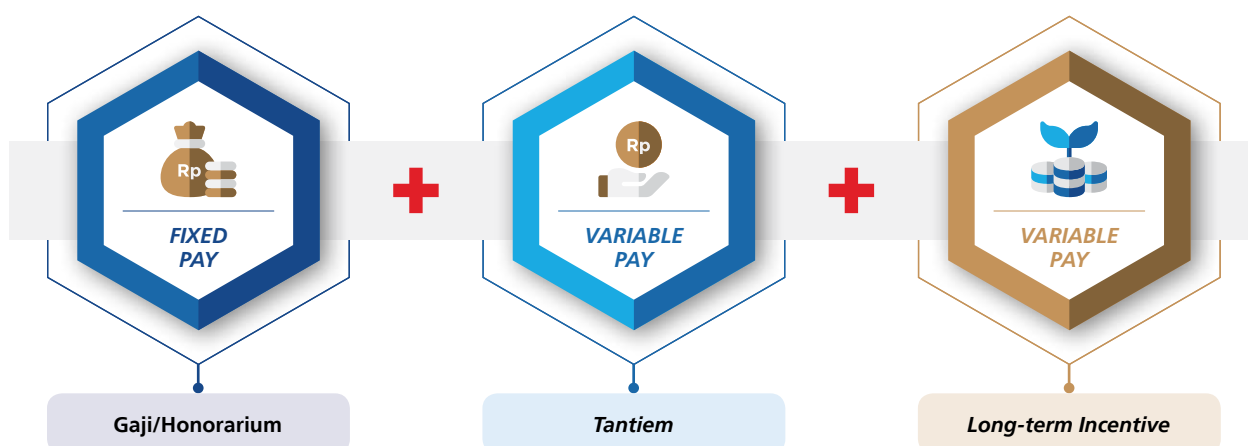
1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
 - e. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 40,5% dari gaji Direktur Utama.

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term insentif/LTI*).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat tetap dan variabel, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Paket Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Dewan Komisaris (orang)	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun (Rp-juta)	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun (Rp-juta)
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	6	8.910	6	25.200
Tunjangan Rutin (Tunjangan Sandang dan Tunjangan Pajak Penghasilan)	6	3.413	6	9.934
Tunjangan Hari Raya	6	-	6	-
Tantiem	17 *)	3.175	13 **)	6.202
Fasilitas lain dalam bentuk natura:				
Yang dapat dimiliki				
Asuransi Purna Jabatan	6	2.956	6	6.750
Tidak dapat dimiliki				
Tunjangan Perumahan	-	-	-	-
Tunjangan Kesehatan	-	-	-	-
Tunjangan Transportasi	6	1.838	6	781
Tunjangan Komunikasi	-	-	6	147
Jumlah		20.292		49.014

Keterangan:

*) 11 (sebelas) orang anggota Dewan Komisaris yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

**) 5 (lima) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris		Jumlah Direksi	
	2020	2019	2020	2019
Di atas Rp2 Miliar	6	9	8	9
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	-	2	-	1
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar	-	-	4 **)	1
Rp500 juta ke bawah	11 *)	6	1 **)	4

Keterangan:

*) 11 (sebelas) orang anggota Dewan Komisaris yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

**) 5 (lima) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah Diterima											
Direksi				Dewan Komisaris				Pegawai ***)			
Orang		Rp-juta		Orang		Rp-juta		Orang		Rp-juta	
2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
13 *)	10	6.202	27.158	17 **)	9	3.175	12.842	11.627	11.803	193.588	214.144

Keterangan :

*) 5 (lima) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

**) 11 (sebelas) orang anggota Dewan Komisaris yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

***) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

- Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan Tahun 3.
- Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan seterusnya
- Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
Direktur Utama	1
Direktur	7
Komisaris Utama	1
Anggota Dewan Komisaris	5

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjabatan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Peserta program MESA dan MESOP adalah pegawai yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit. Jumlah *Shares Option* yang Diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

MESOP Tahap I

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1.	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2.	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3.	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4.	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5.	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6.	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1.	Maryono	-	-	-	-	-
2.	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	1.354.000	1.354.000	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
3.	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4.	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5.	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6.	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7.	Sulis Usdoko	-	138.500	138.500	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
8.	Oni Febriarto R.	-	65.000	65.000	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
Pejabat Eksekutif		7.430.600	6.925.500	6.925.500	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014
Pegawai		-	136.751.500	136.751.500	855,00	Februari 2011 - Agustus 2014

MESOP Tahap II

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1.	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2.	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3.	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4.	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5.	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6.	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1.	Maryono	-	-	-	-	-
2.	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	855.500	855.500	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
3.	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
4.	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5.	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6.	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7.	Sulis Usdoko	-	109.000	109.000	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
8.	Oni Febriarto R.	-	51.000	51.000	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015
Pegawai		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Februari 2011 - Agustus 2015

MESOP Tahap III

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1.	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2.	Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3.	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4.	Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5.	Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6.	Sumiyati	-	-	-	-	-
Direksi						
1.	Maryono	-	-	-	-	-
2.	Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	828.500	828.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
3.	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4.	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5.	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6.	Adi Setianto	-	-	-	-	-
7.	Sulis Usdoko	-	108.500	108.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
8.	Oni Febriarto R.	-	54.500	54.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016
Pegawai		-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Februari 2011 - Agustus 2016

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada periode 2016. Sejak saat itu Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio	
	2020	2019
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	20,80 : 1	21,82 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,04 : 1	3,09 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat Akan Diberikan oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja

Perseroan tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	3
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	8
Rp500 juta ke bawah	13

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan, yang Terdiri dari Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah (Rp juta)
Tunai	8.384
Saham	994

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah
Tunai	599.277.230
Saham	872.700

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	Rp 59.929	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	8.384	176
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	818

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	1.021	-	-	-
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	1.593.400 lembar/3.817 juta	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Akuntan Publik

Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, Perseroan menunjuk Auditor Eksternal dan menjalankan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2020. Auditor eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akurat, independen dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perusahaan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik

Melalui RUPS, Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender terbatas pengadaan jasa audit umum,

dengan peserta tender sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi).
2. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP Internasional.
3. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun.
4. Memiliki pengalaman mengaudit Bank Umum dan PKBL.
5. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di OJK.
6. Penunjukan *Signing Partner* (partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) Tahun Buku pelaporan berturut-turut, dan dalam 2 tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan AP yang bersangkutan.
7. Dalam perjanjian kerja wajib dicantumkan ruang lingkup audit sesuai dengan SE OJK No.36 tahun 2017.
8. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2020 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 26/KOM/BTN/II/2020 tanggal 12 Februari 2020. Legalitas penugasan general audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk untuk Tahun Buku 2019 telah tertuang dalam Surat Penunjukan No. 221/PGSD/PROC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Surat Penunjukan Sebagai Pemenang dan Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 05/SPP/PFAD/VI/2020 tanggal 13 Juli 2020.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Periode 5 Tahun Terakhir

Informasi mengenai Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Keuangan dan jasa audit lainnya serta Fee Audit dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit	Ruang Lingkup Audit
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Periode ke 6	Yovita	Periode ke 1	Rp3.249.000.000	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) 3. Laporan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal - PSA 62 4. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Tahun 2020
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Periode ke 5	Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240	Periode ke 1	Rp2.650.000.000	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) 3. Laporan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal - PSA 62 4. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Tahun 2019
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Periode ke 4	Yasir Izin No. AP.0703	Periode ke 2	Rp2.367.000.000	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Periode ke 3	Yasir Izin No. AP.0703	Periode ke 1	Rp2.290.000.000	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	Periode ke 2	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP.1008	Periode ke 1	Rp2.175.000.000	1. Audit Laporan Keuangan 2. Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Pada periode 2020, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan tidak memberikan jasa lain selain ruang lingkup Jasa Audit (Laporan Keuangan, PKBL, Laporan Kepatuhan dan Pengendalian Internal serta Laporan hasil evaluasi kinerja) pada tahun 2020 sehingga tidak terdapat informasi fee jasa audit lainnya.

Opini Audit

Tahun	Opini Audit
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian

Auditor Eksternal Lainnya dan Jasa yang Diberikan

Selain Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdapat auditor eksternal lain yang melakukan audit di Perseroan pada tahun buku 2020 yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT SGS terkait pelaksanaan *surveillance audit* untuk resertifikasi ISO 9001:2015 dan KPMG Siddharta Advisory terkait untuk audit Kaji Ulang Eksternal atas Fungsi Audit Internal Bank BTN dan Review Praktik Intern Audit Bank dengan *Best Practice*.

Temuan dan Tidak Lanjut Rekomendasi Auditor Eksternal

Perseroan senantiasa menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil audit eksternal dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir temuan-temuan yang mungkin muncul. Jumlah temuan audit eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Temuan / Komitmen	Selesai/ Usulan Selesai	Belum Selesai		% Penyelesaian Jatuh Tempo
				Belum Jatuh Tempo	Jatuh Tempo sampai dengan Desember 2020	
1	2	3	4	5	6	7=4(4+6)
I Otoritas Jasa Keuangan (OJK)						
a	KHP Umum Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2019	74	66	0	8	89,19%
b	KHP Joint Audit OJK & PPATK APU-PPT Posisi 31 Juli 2020	32	10	22	0	100,00%
	Sub Total	106	76	22	8	90,48%
II KAP PSS-EY						
a	Management Letter Audit KAP PSS-EY 2018	43	40	0	3	93,02%
	Management Letter Audit KAP PSS-EY 2019	47	38	0	9	80,67%
	Sub Total	90	78	0	12	86,67%
III BPK RI						
a	Pengelolaan KUR Tahun 2014	38	29	0	9	76,32%
b	Pengelolaan KPR Sejahtera SSA/SSB Tahun 2017	22	19	0	3	86,36%
c	Pengelolaan Kredit Komersial 2019	99	54	0	45	54,55%
d	Pengelolaan SBK dan SBUM 2020	12	2	10	0	100,00%
	Sub Total	171	104	10	57	64,60%
	TOTAL	367	258	32	77	77,01%

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Perseroan terhadap Ketentuan Hubungan antara Perseroan, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam rangka menjaga pelaksanaan audit berjalan efektif, Perseroan senantiasa menjalin hubungan komunikasi yang baik antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan agar berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Perseroan. Komite Audit secara rutin melakukan koordinasi dengan Internal Audit Division (IAD) untuk melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti.

Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2020 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
4. SE OJK No, 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Adapun Strategi audit Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan audit
 - a. Komunikasi atas fokus, jadwal penyelesaian, dan tim yang ditugaskan untuk melakukan audit.
 - b. Menggunakan *"no surprises" approach* dan secara *real time* menginformasikan dan mendiskusikan isu signifikan.
2. Perkembangan audit
 - a. Pertemuan berkala membahas status audit dan mendapat *feedback* yang berkelanjutan.
 - b. Komunikasi *early warning* atas hal yang perlu diantisipasi/diselesaikan lebih awal.
 - c. Dialog berkelanjutan atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, peraturan, dan hal lain yang mungkin mempengaruhi Perseroan.
3. Hasil audit
 - a. Pertemuan membahas hasil audit dan rekomendasi untuk perbaikan Perseroan.
 - b. Evaluasi audit tahun berjalan, menyampaikan proses mana yang sudah berjalan dengan baik dan yang perlu diperbaiki.
4. *Ad hoc*
 - a. Membahas hal-hal khusus lainnya, seperti aspek akuntansi dan perpajakan dari suatu transaksi isu yang tidak biasa.

Hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Audit atas Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) Tahun 2020.
4. Audit atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Tahun 2020.

Manajemen Risiko

Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan *review* secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan menciptakan Perseroan yang sehat. Fungsi Manajemen Risiko juga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam sistem pengendalian internal Perseroan khususnya terkait komponen *risk assessment* dalam *internal control framework* COSO. Selain itu, penerapan Fungsi Manajemen Risiko didasarkan pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang juga menjadi acuan manajemen risiko Perseroan.

Kebijakan Manajemen Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. *Review* terhadap PKMR telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyempurnakan panduan kebijakan manajemen risiko.

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tahun 2020, sebagai berikut:

1. SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dimana telah diubah melalui SE No. 22/DIR/ERMD/2020 perihal Perubahan Lampiran 2 (Pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan *Triger Level* untuk setiap level).
2. SE No. 16/SE/DIR/ERMD/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
3. SE No. 24/SE/DIR/ERMD/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*).
4. SK No. 10/SK/DIR/ERMD/2020 perihal Metode dan Parameter yang Digunakan dalam Pelaksanaan *Stress Test*.
5. SK No. 30/SK/DIR/ERMD/2020 perihal Petunjuk Operasional PSAK Engine.

Kerangka Manajemen Risiko

Penerapan sistem manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan *shareholder value*. Perseroan menerapkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko-risiko secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu kepada kerangka kerja yang mencakup 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem Manajemen Risiko

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
2. Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan evaluasi secara berkala atas laporan profil risiko (triwulanan) dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank disampaikan kepada Komisaris dan Komite Pemantau Risiko secara semesteran sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko.
3. Dewan Komisaris melakukan persetujuan atas Dokumen *Recovery Plan* untuk kemudian dilakukan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (jika diperlukan) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dewan Komisaris juga menyetujui *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Perseroan secara efektif.
6. Profil risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko.

Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Perseroan. Pelaksanaan pengawasan aktif Direksi mencakup namun tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan.
2. Direksi memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan.
3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, diantaranya meliputi:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan, implementasi sistem informasi manajemen risiko serta ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Perseroan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Perseroan. Untuk membantu fungsi tersebut di atas, Direksi dilengkapi dengan Komite Manajemen Risiko.

Selain wewenang dan tanggung jawab di atas, Pengawasan Direksi juga diantaranya melalui:

1. Menetapkan mengenai organisasi manajemen risiko yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko dan Divisi-Divisi yang mendukung penerapan manajemen risiko yaitu ERMD sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko, fungsi pengendalian *intern* oleh IAD, *Credit Risk Division* sebagai upaya perbaikan proses bisnis kredit komersial melalui penerapan *four eyes principle*, terbentuknya Retail Risk Division, fungsi kepatuhan dilakukan oleh CMGD sebagai Satuan Kerja Kepatuhan termasuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing satuan unit kerja, Komite Manajemen Risiko

- (KMR) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Penerapan Manajemen Risiko.
2. Memberikan arahan antara lain pada laporan-laporan yang disampaikan oleh ERMD, yaitu:
 - a. Profil Risiko Bank yang disampaikan secara triwulanan.
 - b. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas disampaikan secara harian.
 - c. Laporan Pemantauan evaluasi surat berharga (MTM) disampaikan secara harian.
 - d. *Stress Testing* Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar setiap triwulanan.
 - e. Laporan *Recovery Plan* dilakukan 1 (satu) bulan sekali disampaikan pada saat rapat ALCO.
 - f. Laporan data kerugian akibat risiko operasional (LED) disampaikan triwulanan.
 - g. Laporan Pemantauan *Market Risk* disampaikan secara harian.
 - h. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas disampaikan secara pekanan.
 - i. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas disampaikan secara bulanan.
 - j. Laporan data dan melakukan pengukuran potensi risiko operasional melalui aplikasi (BTN-RCSA) disampaikan semesteran.
 - k. Laporan Pemantauan Bulanan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance & Recovery Plan* secara bulanan.
 - l. Laporan Pemantauan sektor ekonomi penyaluran kredit disampaikan triwulanan.
 - m. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar disampaikan secara bulanan.
 3. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
 - a. Berdasarkan profil risiko Perseroan, jenis risiko yang bersifat signifikan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Melalui laporan profil risiko Perseroan, laporan pemantauan posisi dan risiko likuiditas serta laporan hasil pemantauan eksposur risiko kredit, Direksi memastikan bahwa unit-unit kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan-laporan tersebut sehingga dengan demikian risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas dapat dikelola dengan lebih baik.
 - b. Perkembangan profil risiko yang signifikan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme Penyampaian Laporan Profil Risiko Perseroan secara triwulanan.
 4. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perseroan yang ditemukan oleh SKAI.
 - a. Direksi memastikan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perseroan melalui:
 - Pemberian arahan pada Laporan *monitoring* tindak lanjut temuan pemeriksaan ekstern/intern yang disampaikan IAD secara periodik kepada Direksi.
 - Mengevaluasi hasil tindak lanjut audit tahun sebelumnya pada *exit meeting* Audit.
 - Rapat Komite Audit.
 - b. Sebagai bagian dari mengembangkan budaya manajemen risiko, Direksi memastikan antara lain adanya:
 - Sertifikasi manajemen risiko dan program *refreshment* sertifikasi kepada pegawai dan pejabat Perseroan.
 - Pemberian pelatihan manajemen risiko pada pegawai baru.
 5. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - a. Melakukan upaya internalisasi budaya manajemen risiko kepada seluruh pegawai.
 - b. Sosialisasi Budaya Risiko melalui pelatihan mengenai *overview* dan penerapan manajemen risiko dalam pelatihan *Operation Academy*, *Loan Academy*, pelatihan *General Banking Staff*, Pelatihan ODP, pelatihan *supporting Staff*, pelatihan *asset management*, *Coaching Branch Manager*, dan *Consultative Selling*.
 - c. Sosialisasi *risk awareness* melalui program sosialisasi *corporate culture* dan *quiz* sosialisasi kebijakan internal Perseroan secara berkala.
 - d. Dukungan Manajemen terhadap Peran *Change Agent* dimana seluruh jajaran Manajemen Divisi/Desk, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang wajib untuk mendukung peran *Change Agent* dan turut aktif menumbuhkan budaya sadar risiko serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencapai kinerja unggul.
 6. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Direksi telah memastikan kecukupan keuangan/anggaran melalui persetujuan pada RKAP 2020.

- a. Bank telah memiliki rumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan tingkat toleransi (*risk tolerance*) yang telah diselaraskan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank (sebagaimana dikemukakan pada Rencana Bisnis Bank 2020-2022 serta RKAP 2020). *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* risiko strategik telah dirumuskan dalam ketentuan internal Bank tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Memberikan arahan atas Revisi RKAP Tahun 2020 dan Revisi RBB Tahun 2020-2022 dalam penyusunan dokumen Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020-2022 dan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.
 - c. Target-target kinerja yang tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020-2022 dan Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 didukung dengan kertas kerja yang komprehensif dan terukur ketercapaiannya.
 - d. Pertumbuhan bisnis harus dalam koridor prinsip kehati-hatian Bank, penerapan *risk management* yang baik, dan *Good Corporate Governance*.
 - e. Dalam memberikan arahan RKAP dan RBB, Direksi telah mempertimbangkan rencana-rencana strategis untuk tahun 2020.
 - f. Dalam rangka pencapaian target RKAP 2020, Direksi memberikan arahan fokus kinerja 2020 terhadap 4 (empat) hal yaitu Peningkatan DPK murah yang lebih sustain, Perbaikan kualitas kredit yang lebih masif, Penurunan LAT/DAT secara lebih cepat dan Penghematan biaya operasional (efisiensi). Atas fokus kinerja tersebut khususnya penghematan biaya operasional (efisiensi), Direksi menghimbau adanya peningkatan koordinasi dalam program-program yang melibatkan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
 - g. Menyusun rencana strategik Perseroan, memberikan arahan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023 serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Perseroan. Dalam menetapkan kerangka

manajemen risiko termasuk kebijakan, prosedur dan limit perlu memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko yang ditetapkan disesuaikan dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur risiko Perseroan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Perseroan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*)

Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perseroan dalam rangka mencapai sasaran Perseroan. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perseroan. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perseroan (per jenis risiko). Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, Direksi memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil serta toleransi risiko Perseroan. *Risk appetite* dan *risk tolerance* diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit.

3. Limit

Perseroan memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko dan strategi Perseroan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perseroan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- b. Dokumentasi prosedur dan peneapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
- c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling kurang satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Perseroan.
- d. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko dan limit per aktivitas bisnis Perseroan yang memiliki eksposur risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko.

Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *Risk Development* yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan agar meminimalisir risiko yang akan dihadapi Perseroan.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan.

Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan.

Stress test dilakukan secara berkala dan me-review hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Saat ini Perseroan sedang memperkuat utilisasi *Risk Management Tools* maka sebagai kucukupan sistem informasi manajemen risiko telah dilakukan beberapa pengembangan sistem diantaranya:

1. Implementasi sistem pemantauan *monitoring* risiko pasar/*interest rate risk in the banking book* (IRRBB).
2. Melakukan *Enhancement* aplikasi *monitoring* Risiko Likuiditas (modul pelaporan *Liquidity Coverage Ratio*/LCR, *stress testing*, laporan pekanan dan profil risiko likuiditas).
3. Pemanfaatan Terminal Bloomberg untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
4. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*.
5. Melakukan *Enhancement System Credit Scoring Model* (CSM).
6. *Maintenance* implementasi ISO di ERMD melalui Surveillance ISO 9001:2015 di *Enterprise Risk Management Division* untuk meningkatkan standar layanan mutu ERMD kepada seluruh *stakeholders*.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi, terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta IAD.

Sistem pengendalian internal dalam penetapan manajemen risiko mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Perseroan.

5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan perundang-undangan.
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Perseroan.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus Perseroan terhadap hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Perseroan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perseroan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pelaksanaan *Integrated Governance, Risk & Compliance* (GRC) yang Komprehensif

Dalam rangka membangun pilar strategis Bank untuk pertumbuhan bisnis, Bank BTN mengimplementasikan fungsi GRC secara terintegrasi dan komprehensif. *Integrated* GRC dapat meningkatkan potensi pencapaian kinerja unggul didukung penerapan prinsip GCG dan manajemen risiko yang baik.

Program kerja *Integrated Governance, Risk & Compliance* yang Komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan Penyusunan *Scoring* GRC Index
2. Satuan Kerja Kepatuhan
 - a. Melakukan asesmen kepatuhan unit kerja (*compliance mapping*) secara periodik.
 - b. Pelaksanaan *Joint Audit*.
 - c. Memperkuat program APU PPT yang sejalan dengan APU PPT *Compliance Mandatory Regulatory*.
 - d. Memperkuat Program Pengendalian Anti Korupsi dan Gratifikasi.
 - e. Implementasi Program Profit Cek Kerjasama KPK;
 - f. Meningkatkan kapabilitas *corporate governance* berdasarkan:
 - *Standard Corporate Governance* menurut Regulator.
 - *Standard Corporate Governance* menurut ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*).
 - *Standard Corporate Governance* menurut CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).
3. Satuan Kerja Audit Internal
 - a. Pelaksanaan Audit (General, ICT dan Investigasi).
 - b. Mengkoordinasikan penerapan Strategi Anti *Fraud*/SAF (Sosialisasi SAF, *Email Blast* dan SMS Blast).
 - c. Meningkatkan efektivitas *Whistleblowing System*.

4. Satuan Kerja Transformasi
 - a. Mengkoordinasikan penerapan dan penyusunan GRC tetap berjalan
 - b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan GRC di setiap unit kerja
5. Satuan Kerja Budaya
 - a. Pelaksanaan Program Budaya Perusahaan
 - b. *Monitoring* dan Pemantauan Unit Kerja terkait Penerapan Index Budaya Perusahaan

Pelaksanaan Implementasi Basel

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan mengantisipasi penerapan Basel II khususnya Pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan:

1. Untuk menghitung ATMR dari Risiko Kredit, Perseroan menerapkan pendekatan standar (*standardized approach*) sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03.2016 tanggal 28 September 2016 sebagaimana diubah dengan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
2. Untuk menghitung ATMR dari Risiko Pasar, Perseroan menerapkan penggunaan metode standar (*Standard Method*) sesuai dengan SE OJK No 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Untuk menghitung ATMR dari Risiko Operasional, Perseroan menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Untuk implementasi Basel II khususnya Pilar 2, Perseroan telah menyampaikan hasil laporan penerapan manajemen risiko untuk *Interest Rate in the Banking Book* (IRRBB) dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum.

Untuk implementasi Basel III Perseroan yaitu:

1. Menyampaikan hasil laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara daring setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Bank setiap triwulan sesuai POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. Menyampaikan hasil laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) kepada regulator secara daring setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Bank sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
3. Menghitung dan melaporkan uji coba perhitungan *Leverage Ratio* (LR) kepada regulator secara triwulan sesuai *Consultative Paper* LR. Mulai Maret 2020 Bank telah menyampaikan hasil Laporan LR kepada regulator secara triwulan melalui surat kepada Regulator dan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum.
4. Memperhitungkan *buffer* dalam perhitungan kecukupan modal minimum yaitu:
 - a. *Conservation Buffer* sesuai dengan pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - b. *Countercyclical Buffer* sesuai PBI No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*
 - c. *Capital Surcharge* bagi Bank Sistemik sesuai POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* serta adanya surat penetapan *bucket* Bank Sistemik yang disampaikan regulator.

Pada semester I tahun 2020 dalam perhitungan KPMM Bank telah menerapkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sesuai ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaimana telah dirubah melalui POJK No. 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Profil Risiko dan Upaya Pengelolaannya

Profil Risiko

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pada sebagian besar Perseroan, pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Perseroan menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Perseroan, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas yang dapat merugikan Perseroan. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Perseroan, dan pinjaman yang diterima.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan sebagai berikut:

- Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik Perseroan dan perusahaan terkait, kompleksitas Produk dan kerjasama bisnis Perseroan, pemberitaan negatif mengenai Perseroan, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau
- Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Perseroan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Bank BTN sebagai Perseroan yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat *BI 7 Day Reverse Repo Rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Perseroan yang sehat dan berkesinambungan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu Bank Sistemik. Sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, khususnya terhadap permasalahan Bank Sistemik maka Perseroan harus dapat menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 dan peraturan intern Perseroan SE No. 15/DIR/RMD/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*) dan SE No. 22/SE/DIR/ERMD/2020 perihal Perubahan Lampiran 2 SE Direksi No. 15/DIR/RMD/2018. Perseroan telah menyusun Dokumen *Recovery Plan* yang didalamnya memuat *Trigger Level* (untuk tujuan pencegahan, pemulihan dan perbaikan). Untuk setiap indikator Opsi Pemulihan yang dicantumkan dalam *Recovery Plan* telah mencakup antara lain: Indikator Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas dan Kualitas Aset.

Pengelolaan Risiko Kredit

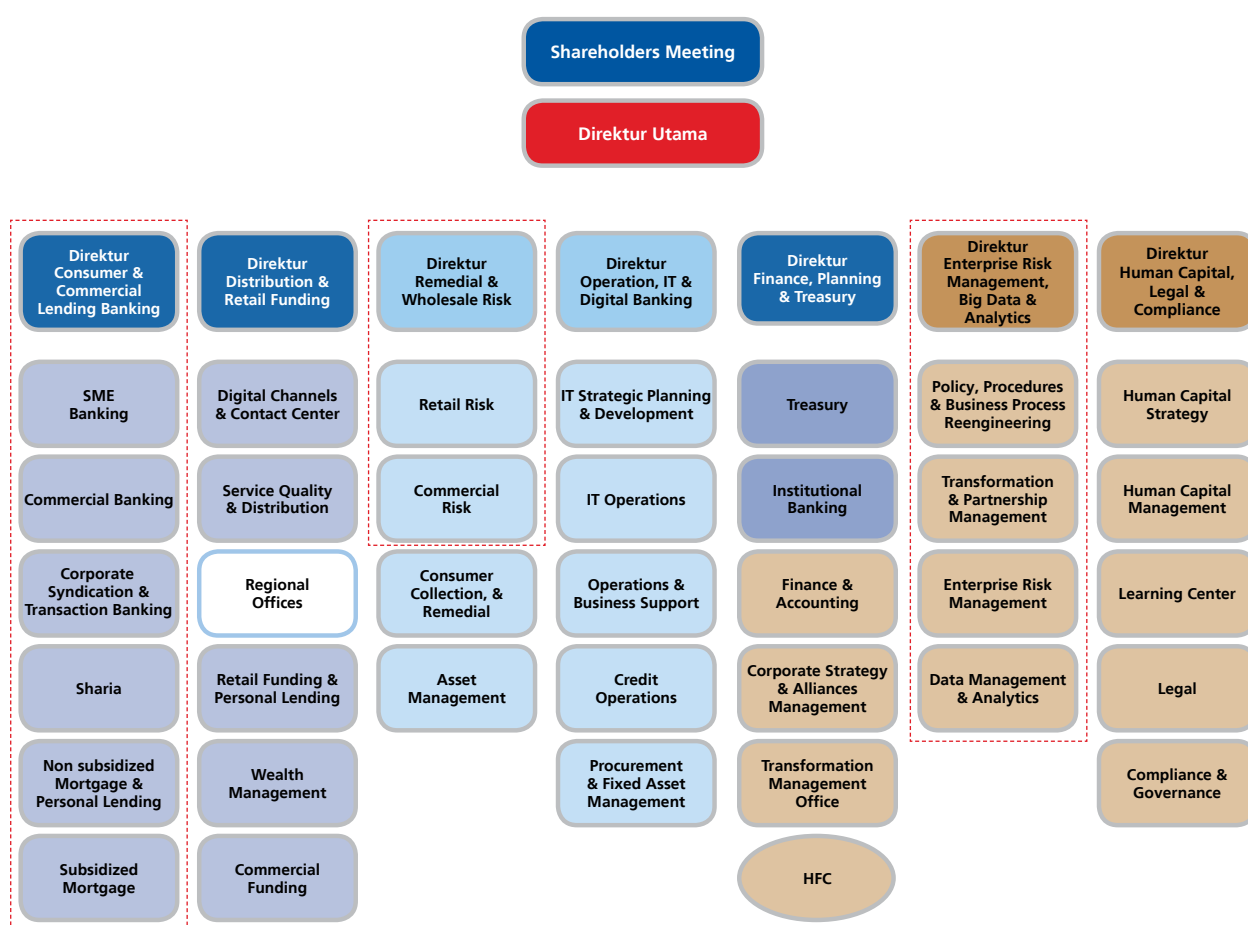
Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Perseroan dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Perseroan sedang melakukan *backtesting Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dalam rangka melakukan review terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat. Perseroan saat ini juga sedang melakukan *pilot project Commercial Banking Center* (CBC). CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian kredit komersial, Perseroan juga melakukan pembentukan Komite Kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring* (iCremo) yakni aplikasi untuk kredit komersial yang berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Sedangkan pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM). Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection and Remedial* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis.

Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari Retail Risk Division (*Regional Loan Processing Center*) dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Hal ini juga dapat digambarkan dengan struktur organisasi Perseroan yang telah memisahkan fungsi *credit risk* dan *risk taking unit* serta *enterprise risk management*:



Pengelolaan Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau *Enterprise Risk Management Division*. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commite* atau ALCO) yang secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Perseroan, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas Perseroan. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Perseroan. Khusus untuk posisi *banking book*, Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* dengan metode *repricing gap* sebagaimana tertuang SE Direksi No.26/SE/DIR/RMD/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam Banking Book. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum, Perseroan telah menyampaikan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan IRRBB dan telah mengembangkan sistem/aplikasi pengukuran IRRBB.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Perseroan melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan *regulator* dan skenario internal Perseroan. Untuk skenario internal Perseroan, setiap awal tahun *Enterprise Risk Management Division* berkoordinasi dengan *Working Group Stress Test* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Test Risiko* Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan di-review secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Perseroan

telah menetapkan Dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, limit *dealer*, *budget loss limit*, *stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam PBI 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Sebagai tindak lanjut penerapan Basel II Pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Perseroan. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commite* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Perseroan.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan *trend* kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh *Treasury Division* (TRSD) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD). Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Perseroan dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun *trend* kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan *stress testing*

menggunakan skenario *Bank Specific Crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress test*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. *Enterprise Risk Management Division* berkoordinasi dengan *Stress Test Working Group* (Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, pekanan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh ERMD yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Bank. Selain itu, Bank melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Perseroan telah melakukan *monitoring* indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka mengimplementasikan proses manajemen risiko khususnya risiko operasional, bank memiliki aplikasi *BTN Loss Event Database* (BTN-LED) yang berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang dengan menggunakan kriteria kejadian risiko berdasarkan Basel II (*seven risk event types*). Aplikasi BTN LED ini berbasis *web* sehingga dalam pelaporannya Kantor Cabang dapat mengirimkan data *lossevent* secara *online* setiap bulan. *Output* dari BTN LED ini adalah data akumulasi kerugian bank dalam satu bulan baik berupa *actualloss*, *nearmiss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

Perseroan juga telah memiliki aplikasi *Risk and Control/Self-Assessment* (RCSA *System*) yang digunakan untuk melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja Perseroan. Pendekatan yang digunakan pada aplikasi RCSA adalah ISO 31000:2009. Risiko dapat didefinisikan sebagai dampak ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

Untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Perseroan melakukan proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dalam bentuk video dan melakukan uji coba atau simulasi secara periodik. Laporan hasil uji coba atau simulasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan perbaikan berkesinambungan.

Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) bersama-sama *Legal Division* (LGD) dan *Credit Operation Division* (COD). Dari pengukuran yang dilakukan LGD diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi, sedangkan dari COD diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (LAT).

Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian dokumen perkreditan. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum,

antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Perseroan menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh ERMD dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi Legal Application System (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Cabang sebagai *Branch Legal Representative* (BLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Perseroan dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Perseroan dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya.

Pengelolaan Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Corporate Strategy & Planning Division* (CSPD) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh *Corporate Strategy & Planning Division* (CSPD) secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank dan *monitoring Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan SDM serta melakukan *review risk appetite* dan *risk tolerance* secara berkala dan minimal setahun sekali.

Selanjutnya, *Enterprise Risk Management Division* memantau Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, *Corporate Strategy & Planning Division* (CSPD) berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank telah memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai Perseroan dalam mengakses seluruh ketentuan internal Bank. Selain itu, untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Perseroan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bernama *Compliance and Governance Division* (CMGD) yang melakukan pemantauan risiko kepatuhan dengan membuat daftar kewajiban-kewajiban Perseroan terhadap pihak eksternal dan melakukan *review* ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku.

Perseroan telah menempatkan *Regional Compliance Supervisory Officer* (RCSO) di Kantor Wilayah dan *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO) di Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan atas alur transaksi dan non-transaksi operasional Perseroan apakah sesuai dengan peraturan, ketentuan, maupun SOP yang berlaku. CMGD memantau dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Perseroan baik sewaktu-waktu maupun secara berkala pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan

eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Perseroan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Perseroan memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Perseroan baik secara langsung (*straightnews*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. Operational & Business Support Division (OBSD) sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi Perseroan dikelola oleh unit kerja *Corporate Secretary Division* (CSD) yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan *Operational & Business Support Division* (OBSD) yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) Perseroan berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait

dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari CSD dan OBSD berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Dalam pengendalian Risiko Reputasi, *Corporate Secretary Division* bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, OBSD menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko

Sebagai Perseroan yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio aset Perseroan didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditambah lagi Perseroan secara dominan membantu pemerintah dalam Program Sejuta Rumah, dalam rangka Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko, salah satu cara yang dilakukan adalah peningkatan budaya manajemen Risiko, Satuan kerja manajemen risiko menginisiasi strategi untuk meningkatkan *risk awareness* seluruh pegawai Perseroan antara lain dengan menggunakan metode:

1. Risk Management in Training

Pelatihan terkait *overview* dan penerapan manajemen risiko yang di dalamnya terdapat materi wajib tentang budaya risiko, antara lain pelatihan GBS dan ODP. Pelatihan dalam GBS dan ODP dapat berupa penerapan Gamification, yaitu dengan menggunakan perangkat *Fun Risk Quiz Kahoot* dan *Board Game Risk*. *Enterprise Risk Management Division* juga turut aktif dalam mendukung *Learning Center* untuk Pelatihan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) pegawai Perseroan secara bertahap. Pegawai ERMD yang memiliki kompetensi UKMR memberikan pelatihan ke pegawai yang akan menjalani Uji Sertifikasi UKMR yang difasilitasi oleh LSPP.

Untuk kalangan *Millennial*, ERMD juga berpartisipasi aktif dalam *Kulgram* (*Kuliah Telegram*) guna memaparkan tentang manajemen risiko khususnya Tingkat Kesehatan Perseroan.

2. Risk Awareness Blasting

Bertujuan untuk Memberikan pesan kepada seluruh pegawai untuk selalu *aware* terhadap risiko (*email blast* dan *sms blast*), bekerja sama dengan CMPD, HMCD dan IAD. Selama tahun 2020 ERMD telah menyebarkan *Risk Awareness*.

Pengelolaan Risiko Akibat Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang tengah terjadi sejak awal tahun 2020 di Indonesia sangat berdampak pada sektor bisnis dan kegiatan operasional Perseroan serta dapat membahayakan kesehatan pegawai apabila terjangkit virus tersebut. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dalam perubahan pola hidup dan pola bekerja di setiap lapisan masyarakat terutama Perseroan. Perseroan melalui Tim BCM (*Business Continuity Management*) telah membuat kebijakan selama pandemi ini agar kebiasaan baru ini dijalankan secara konsisten bahkan menjadi suatu budaya kerja. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagai pengelolaan risiko, penanggulangan dampak COVID-19, serta upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Berbagai *action* yang dilakukan Perseroan di antaranya:

1. Penerapan Protokol Kesehatan dalam bekerja

Sebagai upaya mengurangi persebaran virus COVID-19 serta memberikan jaminan keamanan bagi pegawai dalam bekerja, seluruh Unit Kerja Perseroan wajib menerapkan protokol Kesehatan di wilayah kerja. Aktivitas 3M menjadi aktivitas minimal yang patut dijadikan kebiasaan pola hidup baru oleh seluruh pegawai. Pada setiap Unit Kerja juga telah dilakukan pemasangan fasilitas pendukung protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan, akrilik pembatas, thermogun, dan lain-lain. Penggunaan kapasitas ruangan juga dikurangi serta pertemuan secara langsung dibatasi dan digantikan dengan pertemuan melalui media daring sebagai penerapan *social distancing*.

2. Pembentukan Tim Covid Ranger

Covid Ranger merupakan tim penggerak yang beranggotakan perwakilan dari setiap Unit Kerja dan bertanggung jawab untuk memantau, memastikan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebiasaan baru di Unit Kerjanya. Beberapa tanggung jawab Covid Ranger dalam hal penanganan COVID-19 antara lain:

- a. Memastikan penerapan Protokol Kesehatan di Unit Kerja
Kementerian BUMN telah menetapkan Protokol Kesehatan standar yang wajib dilaksanakan di seluruh Unit Kerja Perusahaan BUMN termasuk Perseroan. Oleh karena itu Covid Ranger bertanggung jawab dalam memastikan unit kerjanya telah melaksanakan Protokol Kesehatan dalam bekerja, sehingga diharapkan mampu mengurangi persebaran virus COVID-19 di wilayah kerja. Covid Ranger melaporkan penerapan Protokol Kesehatan ini ke COSMIC yang merupakan *website* resmi milik BUMN yang memonitor pelaksanaan Protokol Kesehatan di seluruh perusahaan BUMN secara terpusat.
- b. Sosialisasi Protokol Kesehatan serta *Social Media Campaign*
Covid Ranger aktif memberikan sosialisai mengenai pentingnya penerapan Protokol Kesehatan kepada

pegawai dalam Unit Kerjanya agar kebiasaan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya kerja.

c. *Monitoring* pegawai terdampak

Apabila terdapat pegawai dalam Unit Kerja yang terdampak, Covid Ranger dapat berkoordinasi dengan HMCD untuk menangani kasus positif pegawai tersebut. Hal ini agar kasus positif di Perseroan dapat terdata dengan baik dan pegawai yang terdampak mendapatkan penanganan Kesehatan dengan segera.

3. Kebijakan Penerapan WFH

Perseroan memaksimalkan penerapan WFH untuk mengurangi risiko pegawai terpapar COVID-19 dengan memfasilitasi pegawai agar dapat bekerja di rumah dan tetap mempertahankan produktivitasnya. Penerapan WFH ini disesuaikan dengan himbauan Pemerintah serta tingkat kritikalitas Unit Kerja, sehingga tidak mengganggu operasional Unit Kerja terkait.

4. Penyediaan Fasilitas Kesehatan terkait COVID-19

a. Rapid Test Antigen dan Swab Test PCR

Dalam rangka *tracing* kasus positif yang terjadi di lingkungan kerja serta sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran COVID-19, pegawai Unit Kerja yang kontak erat dengan pegawai terdampak diberi fasilitas Rapid Test Antigen dan Swab Test PCR. Selain itu pegawai-pegawai yang masuk dalam kategori rawan paparan, seperti *front liner* dan pegawai pengguna transportasi umum, difasilitasi tes secara rutin.

b. Penyediaan *Safe House* dan kerjasama dengan Rumah Sakit

Perseroan telah bekerja sama dengan Rumah Sakit dalam hal penanganan pegawai terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Selain itu Perseroan juga memiliki fasilitas *Safe House* yang dapat dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pegawai terdampak apabila tidak mendapatkan kamar isolasi di Rumah Sakit. Hal ini agar penanganan pegawai terdampak dapat diberikan secara cepat sehingga kasus positif pegawai dapat tertangani dengan baik.

Penilaian Risiko

Enterprise Risk Management Division sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko secara rutin per triwulan melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan menggunakan *tools* profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan.

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan dan melakukan penilaian secara berkala dan evaluasi atas efektivitas pengendalian manajemen risiko serta memberikan rekomendasi jika dianggap perlu. Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif, memungkinkan Perseroan secara efektif mengelola risiko sehingga dapat memperhitungkan portofolio risiko, meminimalisir dan melakukan tindakan-tindakan preventif serta untuk memaksimalkan pencapaian laba.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko melalui Komite Pemantau Risiko dengan *me-review* hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Perseroan selama tahun 2020 telah memadai.

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dasar Penetapan

Bagi Perseroan, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*). Perseroan menjalankan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.
4. SEBI No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kegiatan pengendalian mencakup beberapa aspek yang di dalamnya tidak terbatas pada penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan Pengendalian khususnya terkait dengan operasional dan keuangan diterapkan pada semua tingkatan fungsional yang tanggung jawabnya disesuaikan berdasarkan struktur organisasi Perseroan diantaranya:

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
Direksi Perseroan secara berkala melakukan rapat koordinasi guna memperoleh informasi atas kinerja Perusahaan dari pejabat dan pegawai. Sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian terhadap realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, seperti laporan keuangan atau laporan manajemen yang dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang diantaranya:
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
 - b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko,

- c. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - 1) Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - 2) Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).
3. Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi
 Pengendalian sistem informasi dan teknologi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - b. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)
 Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan tersebut meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.
5. Dokumentasi (*Documentation*)
 Perseroan sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor interen, akuntan publik dan otoritas pengawasan Perseroan. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.
6. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)
 Pemisahan fungsi merupakan bagian dalam aktifitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada

seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut:

- a. Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Dual Control*".
- b. Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
- c. Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen.
- d. Penerapan *Four-Eyes Principle* dan Tiga Pilar Proses yaitu Bisnis, Operations dan *Risk* sebagai berikut.
 - 1) *Four-Eyes Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang masing-masing berasal dari unit Bisnis dan unit Risiko Kredit yang saling independen satu sama lain.
 - 2) Pengambilan keputusan untuk jenis kredit yang menggunakan *scoring system* atau kriteria khusus yang ditetapkan dalam parameter program/skim pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan prinsip *four-eyes* yaitu antara unit bisnis dengan *scoring system*/kriteria dimana desain model dan parameter *scoring system*/kriteria disusun dan dipelihara oleh unit manajemen risiko.
 - 3) Pemisahan fungsi *sales/business*, fungsi *risk* dan fungsi *operation* (credit admin dan legal) dalam proses pemberian kredit.

Kesesuaian dengan COSO Framework

Sistem pengendalian internal Perseroan telah sesuai dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Pemantauan (*Monitoring*).

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Perseroan yang mengacu pada COSO telah disesuaikan dengan surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. SKB-04 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan KD Nomor 01/DIR/KD/PPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP) Bab 7 Kebijakan Pengendalian Internal. Berdasarkan surat keputusan tersebut komponen pengendalian intern Perseroan sejalan dengan *internal control framework* COSO yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Sedangkan elemen Sistem Pengendalian Intern Bank sebagaimana disebutkan dalam SKB No.SKB-04 No. SKB-04 tanggal 29 Juli 2011 dan dan KD Nomor 01/DIR/KD/PPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP) Bab 7 Kebijakan Pengendalian Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur

pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Operasional dimana kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi termasuk Komisaris Perseroan dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Perseroan bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaksanakan secara efektif. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
4. Sistem Akuntansi/Keuangan, Informasi dan Komunikasi dimana sistem Akuntansi/Keuangan harus mencakup metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Perseroan. Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem Komunikasi harus mampu memberikan informasi pada seluruh pihak baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Perseroan, auditor ekstern, pemegang saham dan nasabah Perseroan.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan. Perseroan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun oleh satuan kerja audit intern.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2020, Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Perseroan melalui *Internal Audit Division* (IAD) melakukan *Internal Control Assessment* (ICA) dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO Framework menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan.
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/ pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Untuk menilai kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Kecukupan dan Efektivitas Pengendalian Internal menggunakan kuisisioner *Internal Control Assessment* (ICA) untuk menyusun *Risk Control Assesment* serta *Audit Rating* yang diuji ulang pada saat pelaksanaan audit lapangan (*walkthrough*).
2. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja riil dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP).

Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian *internal* (*risk control*) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (*divisi/desk/Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Pernyataan Kecukupan Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*).

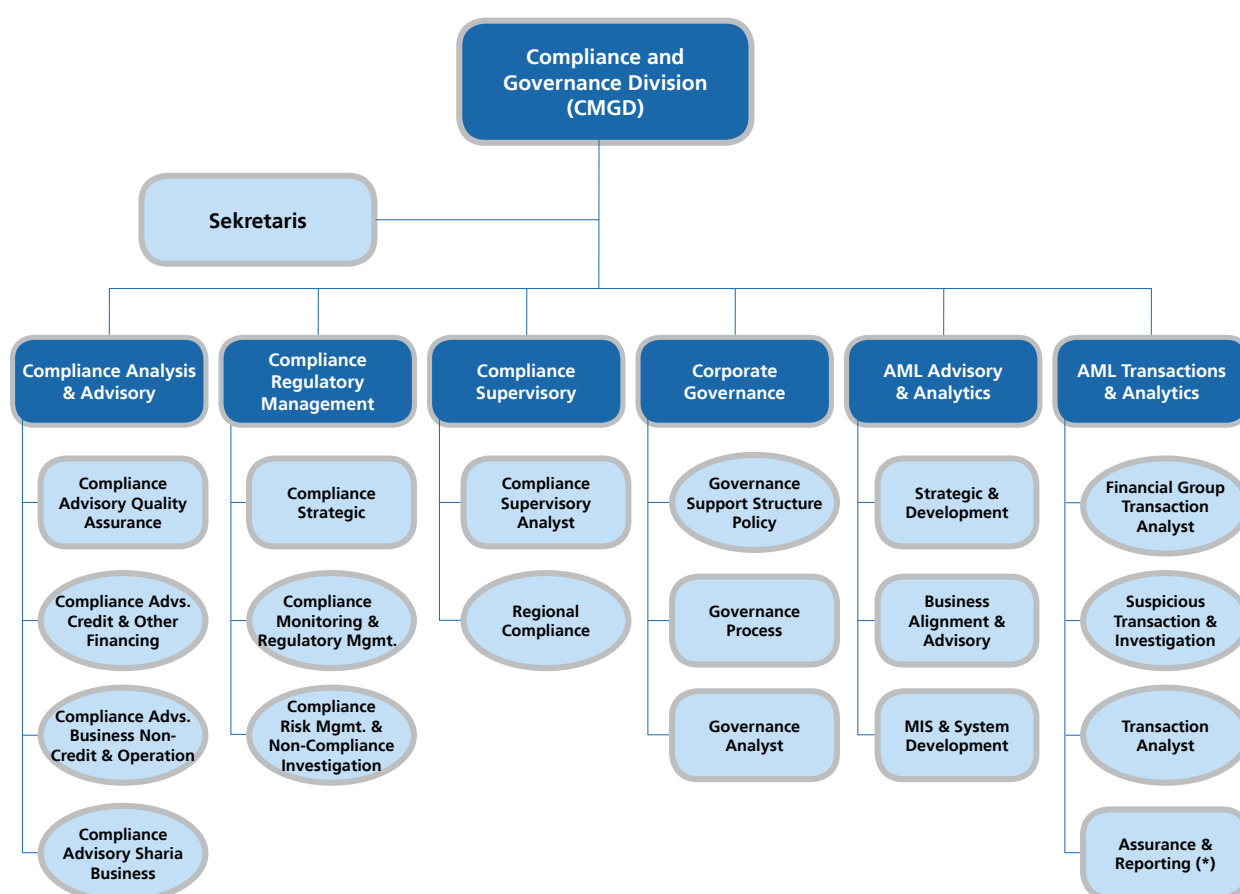
Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

Fungsi Kepatuhan

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola Risiko Kepatuhan, serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi Kepatuhan



Struktur organisasi pelaksana Fungsi Kepatuhan ditetapkan dalam Ketetapan Direksi No. 04/DIR/KD/TMO/2018 tanggal 30 April 2018 dan terakhir diubah melalui Ketetapan Direksi No. 06/DIR/KD/TMO/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Bank.

4. Compliance and Governance Division adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Managing Director Human Capital, Legal and Compliance. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Yossi Istanto sebagai Direktur Human Capital, Legal and Compliance. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan

OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Yossi Istanto telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK formal dari OJK pada tanggal 3 Juli 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan.
9. Berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh Compliance and Governance Division, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Direksi No. 03/KD/DIR/ SIPD/2017 tanggal 20 April 2017 dan terakhir diubah melalui Ketetapan Direksi No. 04/KD/DIR/SIPD/2017

tanggal 29 Mei 2017 perihal Struktur Organisasi Kantor Pusat, Compliance and Governance Division berada di bawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Pengangkatan dan/atau pemberhentian Compliance and Governance Division Head selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



R. Wahyu B. Witjaksono
Head of Compliance and Governance Division (CMGD)

Domisili
Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir
Kendal, 22 Oktober 1970

Usia
50 tahun



Kewarganegaraan

Indonesia



Pendidikan Terakhir

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung (1993)
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004).



Riwayat Jabatan

- Menjabat sebagai Kepala Compliance and Governance Division (CMGD) sejak 1 Desember 2018.
- Senior App Development-Business Analyst (2011-2014),
- System Development Audit Dept Head (2004-2007),
- Wakil Kepala Divisi Internal Audit (2018).



Pelatihan dan Sertifikasi

Telah mengikuti pelatihan dan workshop di luar negeri maupun dalam negeri, antara lain:

- *Job training* pada Central Bank Lexington, USA (2003)
- Training Housing Finance Management-HDFC di Mumbai, India (2008)
- Ikatan Auditor Intern Bank Konferensi Nasional VI (2014)
- Sertifikasi Certified Internal Auditor/CIA (2016)
- Certified Information System Auditor (2017)
- The Institute of Internal Auditors Indonesia (2017)
- Pelatihan Proses Bisnis Internal Audit (2018)
- Pembekalan dan Sertifikasi Kepatuhan (2020)
- Strategi Bisnis menghadapi Dampak COVID (2020)
- 4DX: Champion Summit (2020)
- Workshop APU PPT & AML (2020), Pelatihan PSAK71 (2020).

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Compliance and Governance Division dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku.
 - Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2020, pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan fungsi kepatuhan Perseroan di antaranya:

1. 4DX : *Champion Summit*
2. 4DX : *Internal Coach*
3. 4DX : *Managers Implementation*
4. *Branch & Monoline Business Control*
5. *Compliance Excellence* - Sosialisasi Aplikasi LAPS BTN
6. *Compliance Excellence* - APU & PPT
7. *Compliance Excellence Cash Management System (Managerial)*
8. *Compliance Excellence Cash Management System (Non Managerial)*

9. *Emotional & Spiritual Quotient Class*
10. ESQ SDP 2020 (VC)
11. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
12. *Live Online Course* PSAK 71 (VC)
13. *Managing People and Processes for Boosting*
14. Pelatihan BPI *Refreshment Backtrack*
15. Pelatihan Penerapan APU PPT (VC)
16. Pelatihan PSAK71
17. Pembekalan dan Sertifikasi Kepatuhan Lv. 1
18. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi UKMR Lv 3
19. Pembekalan Sertifikasi UKMR Level 1
20. Pembekalan Sertifikasi UKMR Level 2 (VC)
21. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah VC
22. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah PDPS
23. *Refreshment* Proses Bisnis BCSO (VC)
24. *Refreshment* UKMR Level 1,2,3 dan 4
25. SDP 2020 *Online* 1 (VC)
26. *Seizing Opportunities in The New Normal*
27. Semangat Bekerja Optimal dengan AKHLAK
28. *Senior Management Development Program*
29. Sertifikasi QIA Tingkat Dasar
30. Sertifikasi *Training Delivery*
31. Sosialisasi Aplikasi CRMS
32. Sosialisasi dan *Test WBS "BTN SIIPS"*
33. Sosialisasi Program Batara Spekta
34. Strategi Bisnis Menghadapi Dampak Cvd VC
35. *Training Supply Chain Financing*
36. *Webinar: Be More Productive at Work*
37. *Webinar: Secretary in Digital Era*
38. *Workshop* APU PPT & AML
39. *Workshop* Hak Tanggungan

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2020, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pengawasan aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan *review* dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.

3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuanketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.
4. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yaitu Otoritas

Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kolaborasi bersama *Human Capital Strategy Division* (HCSD) untuk merumuskan Strategi Budaya Kepatuhan yang merupakan salah satu pilar budaya yang menjadi pondasi utama Program Budaya Perusahaan Bank Tahun 2020 yakni Pilar *Risk & Governance Culture* agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada dan meningkatkan *compliance awareness* di antara pegawai. Adapun Program yang mendukung pilar *Risk & Governance Culture* adalah sebagai berikut:

Program	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan
Compliance Excellence	Internalization	<i>Compliance Refreshment</i> Kegiatan penyampaian materi <i>refreshment</i> dengan materi tematik Produk, Jasa dan/atau Layanan kepada Seluruh Pegawai untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan atas ketentuan, regulasi yang berlaku di Bank.
	Literacy	Kegiatan memperdalam pemahaman pegawai atas ketentuan yang berlaku. Terdapat dua aktivitas pada kegiatan ini, yaitu: 1. <i>Compliance Feedback</i> Aktivitas setiap unit kerja wajib memberikan masukan dan umpan balik terkait pelaksanaan <i>Compliance Refreshment</i> . 2. <i>Compliance FAQ</i> Aktivitas kurasi pertanyaan dan jawaban terkait bidang kredit, dana, dan operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
	Competition	Kegiatan yang menunjukkan bahwa para Pegawai di unit kerja telah mengerti dan memahami ketentuan yang berlaku, yaitu: 1. <i>Compliance Photoshoot</i> Aktivitas Pegawai dalam koordinasi unit kerja untuk membuat karya-karya foto yang bertemakan kepatuhan dan ketidakpatuhan atas ketentuan yang berlaku di Bank BTN 2. <i>Compliance Poster</i> Aktivitas pegawai dalam koordinasi unit kerja untuk membuat karya-karya poster yang bertemakan kepatuhan dan ketidakpatuhan atas ketentuan yang berlaku di Bank BTN 3. <i>Compliance Quiz</i> Kegiatan evaluasi dan/atau <i>quiz</i> terhadap materi yang telah disampaikan pada <i>Compliance Refreshment</i> , guna mengukur tingkat pengetahuan Pegawai. pegawai mengikuti kuis tentang kepatuhan.

Sepanjang periode Tahun 2020, telah dilaksanakan *Compliance Excellence* sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Compliance Refreshment*, *Compliance Feedback* dan *Compliance Quiz*
 - a. Periode pelaksanaan dan Materi *Compliance Refreshment* dan *Quiz* adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Materi & Quiz
1.	Maret	<i>Compliance Regulatory Management System</i> (CRMS)
2.	April	<i>Legal Application System</i> (LAPS)
3.	Mei	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
4.	Juni	<i>Cash Management System</i> (CMS)
5.	Juli	Petunjuk Pengelolaan Dana Jaminan
6.	Agustus	- Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB - Pembukaan Rekening Giro
7.	September	Layanan BTN Prioritas
8.	Oktober	Kebijakan dan Pedoman ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Bank BTN
9.	November	Kebijakan Tabungan Batara & Batara iB

b. Peserta *Compliance Excellence* dibagi menjadi 2 (dua) kelas yakni:

- Managerial

Unit Kerja	Peserta	Aktivitas
Kantor Pusat	• <i>Division Head</i> • <i>Department Head</i>	• <i>Compliance Refreshment</i> • <i>Compliance Quiz</i> • <i>Compliance Feedback</i>
Kantor Wilayah	• <i>Regional Office Head</i> • <i>DRM Business</i> • <i>DRM Support</i>	
Kantor Cabang	• <i>Branch Manager</i> • <i>Deputy Branch Manager</i> • <i>Deputy Service Manager</i>	

- Non Managerial

Unit Kerja	Peserta	Aktivitas
Seluruh Unit Kerja	Seluruh Pegawai di luar kriteria peserta Managerial	• <i>Compliance Refreshment</i> • <i>Compliance Quiz</i>

c. Umpan balik/*Feedback* yang telah dikerjakan oleh peserta kelas manajerial disampaikan kepada Unit Kerja terkait pemilik kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan, antara lain sebagai berikut:

- *Feedback* terhadap materi *Compliance Regulatory Management System (CRMS)* diterima oleh *Compliance and Governance Division (CMGD)*
- *Feedback* terhadap materi Petunjuk *Legal Application System (LAPS)* kepada *Legal Division (LGD)*.
- *Feedback* terhadap materi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) diterima oleh *Compliance and Governance Division (CMGD)*
- *Feedback* terhadap materi *Cash Management System (CMS)* dan PPT diterima oleh *Corporate Syndication & Transaction Banking Division*
- *Feedback* terhadap materi Petunjuk Pengelolaan Dana Jaminan kepada *Credit Operation Division (COD)*.
- *Feedback* terhadap materi Petunjuk Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB Kepada *Syaria Business Division (SHAD)* dan Pembukaan Rekening Giro Kepada *Commercial Funding and Services Division (CMFD)*
- *Feedback* terhadap materi Petunjuk Layanan BTN Prioritas Kepada *Welath Management Division (WMD)*
- *Feedback* terhadap materi Kebijakan dan pedoman ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Bank BTN kepada *Corporate Governance Departement – Compliance & Governance Division (CMGD)*
- *Feedback* terhadap materi Kebijakan Tabungan Batara & Batara iB telah disampaikan kepada *Sharia Division (SHAD)*; dan *Corporate & Commercial Funding Division (CMFD)*

2. *Compliance Photoshot*

Telah dilaksanakan aktivitas *Compliance Photoshot* dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Budaya Perusahaan. Seluruh Unit kerja wajib untuk membuat karya-karya foto yang bertemakan ketidakpatuhan atau kepatuhan atas ketentuan yang berlaku di Perseroan.

3. *Compliance Poster*

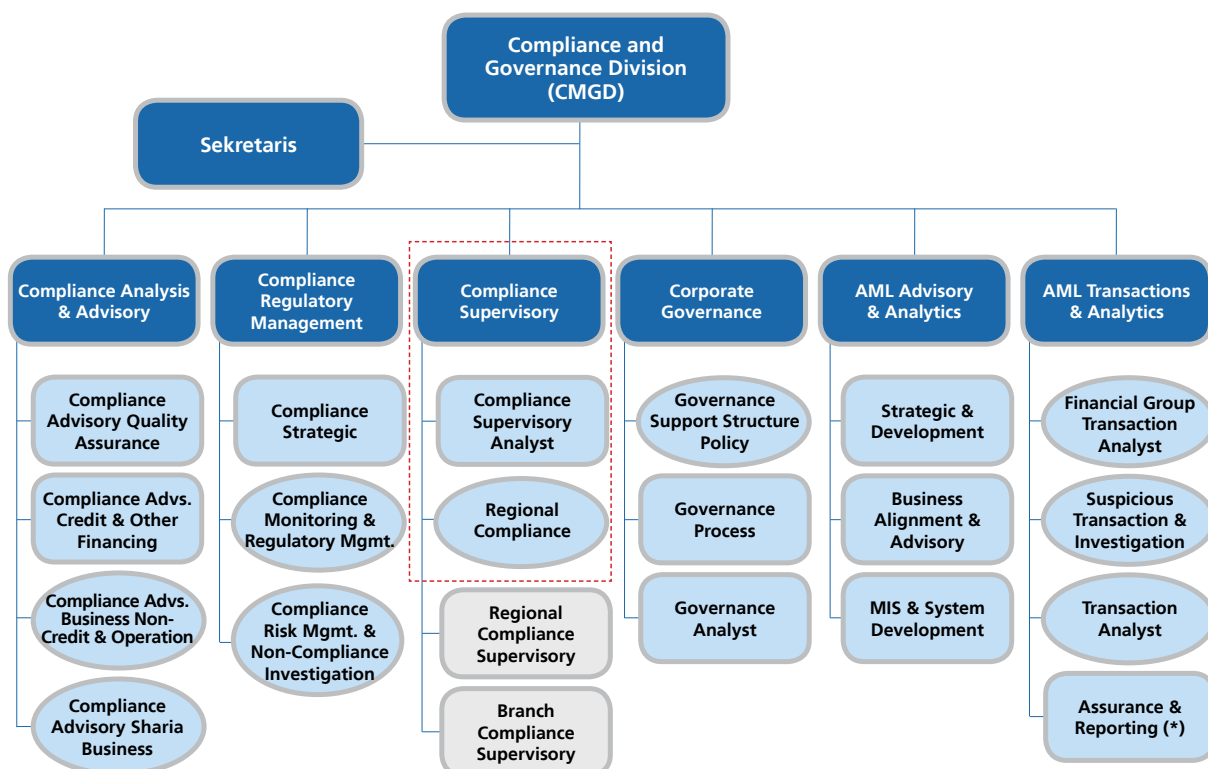
Telah dilaksanakan aktivitas *Compliance poster* dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Budaya Perusahaan. Seluruh Unit kerja wajib untuk membuat karya-karya poster yang bertemakan kepatuhan atau ketidakpatuhan atas ketentuan yang berlaku di Perseroan.

4. Peningkatan efektivitas kepatuhan Kantor Cabang. Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan *Compliance and Governance Division* pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Kantor Cabang dalam rangka optimalisasi penerapan *Internal Control System* terhadap *Compliance Awareness*, yaitu melalui Branch Compliance Supervisory Officer (BCSO) yang merupakan organ *Compliance and Governance Division* yang ditempatkan di setiap Kantor Cabang. Tugas dan fungsi utama BCSO adalah melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dan kesesuaian operasional pada Kantor Cabang dan Kantor di bawahnya (Konvensional maupun Syariah), baik operasional yang bersifat transaksi maupun non transaksi terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya BCSO memonitor dan mengevaluasi secara *sampling* atas pelaksanaan kebijakan Kantor Pusat di Kantor Cabang. Hasil pelaksanaan evaluasi disampaikan kepada *Compliance and Governance Division* dan ditembuskan kepada *Branch Manager* dan organ Satuan Kerja Audit Internal di Kantor Wilayah disertai dengan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh BCSO antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan operasional Kantor Cabang dengan menggunakan sistem *Compliance Control Application (CCA)* dan *Compliance Monitoring Application (CMA)*.
 - b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pada proses bisnis dengan mengacu kepada parameter yang telah ditetapkan sebagai *root cause* permasalahan kepatuhan yang terjadi di Perseroan yaitu pada bidang Kredit, Dana, dan Operasional.
 - c. Melakukan pendampingan pada saat *legal meeting* dan/atau akad kredit (selama masa pandemik *COVID-19*) dengan menggunakan *video Conference*.
- Dalam rangka memonitor nilai kepatuhan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, Compliance and Governance Division mengembangkan *Compliance Dashboard* yang difokuskan pada parameter nilai kepatuhan yang telah ditetapkan dan *critical point* yang disampaikan oleh Divisi terkait proses bisnis perkreditan, pendanaan, dan operasional. Pengembangan *Compliance Dashboard* diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan informasi serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kantor Cabang dalam mencapai target jangka pendek dan jangka panjang khususnya meningkatkan Nilai Kepatuhan sesuai target yang ditetapkan.
5. Sesuai dengan Risalah Rapat Direksi No. 495 Tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Evaluasi Struktur organisasi CMGD-IAD dan RLPC, bahwa telah diputuskan akan

dilakukan evaluasi struktur organisasi CMGD. Hasil Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 18 Agustus 2020 perihal Struktur Organisasi CMGD-IAD disampaikan sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Branch Compliance Supervisory Officer (BCSO) dan Regional Compliance Supervisory Officer (RCSO) digabung menjadi Regional Compliance yang ditempatkan di Kantor Wilayah.
- b. *Internal Control* yang semula organ Kantor Cabang berubah nama menjadi *Branch Control* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - *Solid line* ke Regional Audit & Control Supervisory (IAD) dan *dotted line* ke Kantor Cabang dan CMGD.
 - Branch Control melakukan fungsi *ex-post* dan laporannya merupakan *daily report* bukan *audit report*.
 - IAD fokus sebagai pembina dan memonitor pekerjaan *branch control* guna berjalannya *check and balance*.
 - Branch melakukan aktivitas sampling terhadap transaksi yang bersifat *low risk* dan melakukan pemeriksaan detail terhadap transaksi yang berisiko tinggi.
 - Untuk Kantor Cabang kelas I dan kelas II dapat ditunjuk 1 (satu) orang koordinator *branch control* dengan person *grade* yang lebih tinggi.
- c. Perubahan Struktur Organisasi CMGD - IAD disampaikan sebagai berikut:



- d. Direksi menyetujui pemenuhan pegawai Regional Audit & Control Supervisory dan Regional Compliance sebagai berikut:
 - Regional Audit & Control Supervisory ditempatkan di Kantor Wilayah sejumlah 12 (dua belas) pegawaisetiap Kantor Wilayah terdapat 1 (satu) koordinator dan 1 (satu) Staff.
 - Regional Compliance Supervisory Officer (RCSO) berubah nama menjadi Regional Compliance yang ditempatkan di Kantor Wilayah sejumlah 6 (enam) pegawai, dimana seliap Kantor Wilayah terdapat 1 (satu) pegawai.
 - e. Saat ini pelaksanaan piloting dilaksanakan di 2 (dua) Kantor Wilayah yaitu Kantor Wilayah I di Kantor Cabang Bekasi dan Kantor Wilayah II di Kantor Cabang Jakarta Harmoni dan Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni.
6. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan, maka diperlukan langkah harmonisasi antara kepentingan perseroan dengan kepatuhan dalam ketaatan terhadap seluruh ketentuan regulator yang mengatur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Sosialisasi Ketentuan Eksternal kepada Unit Kerja Terkait
Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan eksternal yang baru terbit kepada unit-unit kerja bisnis dan operasional maupun Divisi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau pengendalian terhadap ketentuan tersebut, antara lain Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan.
 - b. Kajian Kepatuhan atas Draft peraturan Internal, produk/Aktivitas Bisnis dan Operasional.
Dalam rangka memastikan kesesuaian peraturan internal, produk dan/atau aktivitas Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan regulator diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan regulator lainnya yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian aspek kepatuhan atas rancangan ketentuan internal serta rencana aktifitas dan rencana kegiatan operasional bisnis yang akan disahkan dan ditetapkan Direksi untuk memastikan bahwa rancangan ketentuan internal dan rencana kegiatan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan regulator yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan *Compliance Check List*
Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dari regulator, maka Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses *Compliance Checklist* atas beberapa aktifitas yang diwajibkan oleh regulasi perbankan diantaranya adalah:
 - a. *Compliance Checklist Fit & Proper test* Pengurus.
 - b. *Compliance Checklist Fit* untuk Pengajuan Produk dan/atau Aktivitas baru ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. *Compliance Checklist* untuk relokasi dan peningkatan *starts outlet* kepada Bank Indonesia.
7. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT ini Bank melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU dan PPT.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis, dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan Perseroan.

1. Risiko Kepatuhan yang Dihadapi
Salah satu dampak yang timbul akibat ter-eksposnya risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2. Potensi Risiko Kepatuhan
Terdapat penurunan jumlah denda pelanggaran oleh Perseroan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Berikut potensi-potensi risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan yaitu antara lain:
 - a. Kesalahan Teknologi/Sistem
Terdapat ketidaksesuaian sistem aplikasi internal Bank yang belum dapat diimplementasikan pada sistem pelaporan Regulator.
 - b. Keterlambatan Pelaporan
Penyebab atas terjadinya keterlambatan pelaporan adalah kurangnya internal kontrol dan *monitoring* penyampaian laporan tepat waktu sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.
 - c. Kesalahan Input
Terdapat kesalahan proses pelaporan yakni kesalahan pada saat melakukan input ke sistem.

3. Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan

Sebagai langkah *preventive*, Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi kepada seluruh Divisi di Kantor Pusat sebagai unit yang terekspos risiko kepatuhan terbesar atas penyampaian laporan Perseroan kepada regulator untuk melakukan:

- a. Inventarisir seluruh kewajiban pelaporan yang melekat di masing-masing unit kerja Divisi Kantor Pusat baik berdasarkan ketentuan yang lama maupun berdasarkan ketentuan regulator yang baru.
- b. Melakukan konfirmasi kepada masing-masing unit kerja untuk menegaskan tanggungjawab pelaporan dimaksud, khususnya terhadap laporan dengan klasifikasi *high risk* yaitu laporan yang mempunyai *track record* pernah mengalami keterlambatan dan jenis kewajiban laporan yang baru.
- c. Melakukan pengkinian kewajiban pelaporan pada *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) yang merupakan alat monitoring terhadap kewajiban laporan unit kerja terkait kepada Regulator guna memitigasi risiko kepatuhan atas keterlambatan pelaporan serta pengkinian database regulasi pada CRMS.
- d. Melakukan internalisasi terkait *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) kepada seluruh pegawai yakni merupakan alat *monitoring* terhadap kewajiban laporan unit kerja terkait kepada Regulator guna memitigasi risiko kepatuhan atas keterlambatan pelaporan.
- e. Melakukan *enhancement Compliance Regulatory Management System* (CRMS) guna optimalisasi dalam *monitoring* kewajiban pelaporan kepada Regulator.
- f. Dalam hal terdapat kesalahan input pegawai ke dalam sistem yang menyebabkan tereksposnya sanksi denda regulator, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengingatkan kembali kepada HCSD dan HCMD untuk dapat melakukan internalisasi terhadap Ketentuan Sanksi Pegawai.
- g. Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja yang dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian laporan untuk mengidentifikasi *Root Cause* lalu meminta komitmen penyelesaian masalah berdasarkan analisa penyebab.

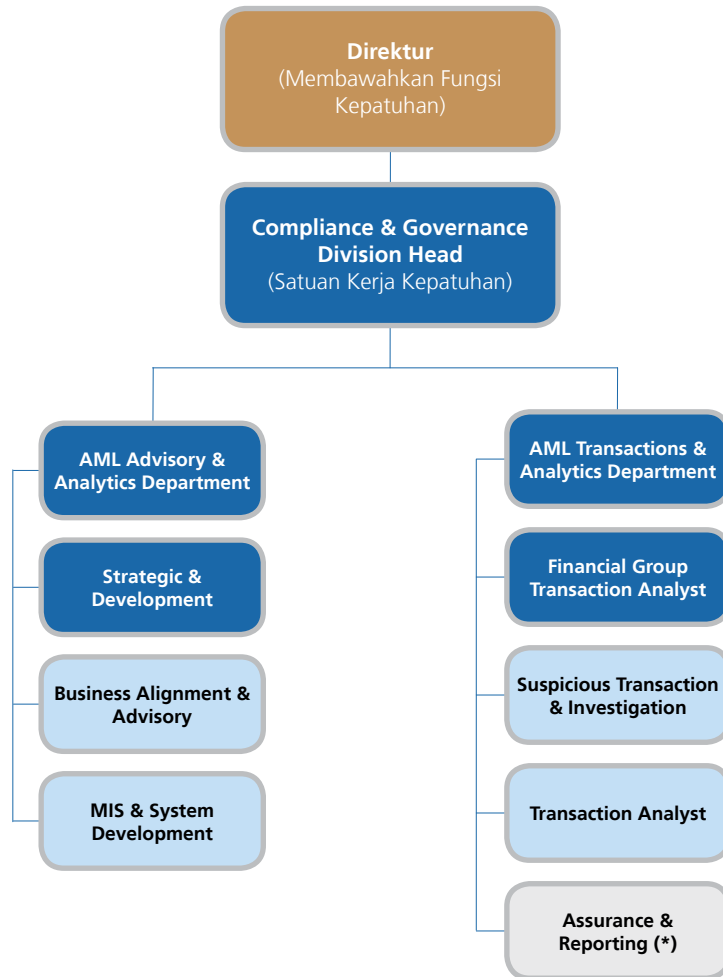
Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

1. Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman Pegawai atas SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*.
2. Dalam rangka melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan (*continuous improvement*), unit kerja Perseroan yang terkait kontrol diantaranya Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah melakukan standarisasi proses bisnis mengacu pada standar ISO 9001:2008 yang bertujuan untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi internal audit yang lebih efektif mengacu pada standart mutu internasional. Pada tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah mengikuti Resertifikasi ISO dalam rangka pembaharuan Sertifikasi ISO 9001:2008 menjadi Sertifikasi ISO 9001:2015. Pada tahun 2020 masing-masing satuan kerja tersebut telah mengikuti *surveillance* ISO 9001:2015 dengan hasil bahwa masing-masing satuan kerja telah konsisten memenuhi persyaratan maupun ketentuan dalam standard ISO 9001:2015.
3. Penerapan *Integrated GRC (Governance Risk and Compliance)* di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai *integrated GRC* dengan pelaksanaan praktek-praktek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam Penilaian GRC Index, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator*, *Key Risk Indicator*, dan *Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Index yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU dan PPT

Pelaksanaan program APU PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk mencapai penerapan program APU PPT dijalankan secara efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU PPT di Kantor Pusat, pelaksanaan program APU PPT di Regional Office dan Kantor Cabang menjadi tanggungjawab masing-masing *Regional Office Head* dan *Branch Manager*.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Perseroan senantiasa melaksanakan penerapan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, Perseroan menerapkan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Program APU dan PPT yang telah dilaksanakan oleh Perseroan di antaranya:

1. Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan APU dan PPT terhadap ketentuan regulator POJK Nomor 23/POJK.01/2019, yang tertuang dalam ketentuan internal Perseroan pada Peraturan Direksi Nomor 04/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pedoman Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku di Perseroan sejak tanggal 18 Maret 2020.
2. Dewan Komisaris turut aktif berperan memberikan pengawasan antara lain memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi serta memberikan arahan untuk menyelenggarakan *briefing* dan *feedback* kepada seluruh unit pelaksana terkait dengan issue dan tantangan dalam melaksanakan Peraturan Program APU dan PPT sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan implementasi.
3. Untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif dalam rangka Penerapan Program APU dan PPT telah dilakukan koordinasi dengan Unit pengelola IT Bank dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi AML - CFT.
 - b. Penyempurnaan parameter *Risk Based Approach* (RBA) Tahun 2020 dengan mengacu pada hasil penilaian NRA dan SRA oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas serta mengacu pada penilaian risiko APU dan PPT Perseroan.
 - c. Penyempurnaan pada sistem internal Perseroan serta Sistem APU dan PPT bernama Aplikasi AML – CFT, dalam rangka mendukung implementasi pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi goAML.
 - d. Telah dilakukan penambahan *database*, pemantauan transaksi dan profil Nasabah secara berkesinambungan meliputi:
 - Daftar Terduga Teroris dan organisasi Teroris (DTTOT)
 - Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Proliferasi WMD)
 - Nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
4. Perseroan melakukan pelatihan yang berkesinambungan terkait program APU dan PPT dengan metode:
 - a. Tatap muka dan *online* kepada Pegawai Internal Audit Division dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian intern sebagai salah satu prinsip utama penerapan program APU dan PPT.
 - b. Tatap muka dan *online* kepada *Deputy Regional Manager Supporting, Branch Manager, Service Quality Unit Head/DBM Business, Sub Branch Head, Cash Office Head, Priority Banking, Customer Service* dan *Teller Service* di beberapa Kantor Cabang.
 - c. Tatap muka/klasikal dan *online* terhadap Calon Pegawai Baru.
 - d. Pelaksanaan *Compliance Excellence* yang merupakan salah satu pilar Budaya Perusahaan Perseroan melalui *Digital Room for e-Learning Modules* (DREAM) dengan materi Perubahan Pedoman Kebijakan APU dan PPT Bank BTN yang diikuti oleh seluruh Pegawai Perseroan.
 - e. Pelatihan melalui *Digital Room for e-Learning Modules* (DREAM) menggunakan modul *e-Learning* APU dan PPT serta Videografis CDD dan EDD kepada Seluruh *Frontliner* dan Penanggung Jawab APU dan PPT di Kantor Cabang serta melakukan evaluasi.
 - f. Penayangan video animasi *awareness* APU dan PPT Tahun 2020 melalui platform digital milik Perseroan serta Media Televisi yang ada pada Lobby serta Lift Menara Bank BTN.
 - g. Pelaksanaan Anti Money Laundering Competition Tahun 2020 berupa desain komik dan mascot APU – PPT yang penilaiannya melibatkan Direksi.
5. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Perseroan telah menyampaikan laporan antara lain:
 - a. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/ *Cash Transaction Report* (CTR).
 - b. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ *Suspicious Transaction Report* (STR).
 - c. Pelaporan Transaksi Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL)/International Fund Transfer Instruction Report (IFTI).
 - d. Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT).
6. Perseroan turut berperan mendukung PPATK, KPK, OJK dan Aparat Penegak Hukum pada pelaksanaan analisis dan pemeriksaan yang disampaikan melalui Surat, *Email* maupun Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL).

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2020 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Perkara Penting

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara Penting	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	289	58*	0
2.	Dalam proses penyelesaian	172	234	2
Total		461	292	2

*) Pada tahun 2020 dari 58 permasalahan hukum pidana, Perseroan bertindak sebagai saksi sebanyak 44 kasus.

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Pada tahun 2020, Perseroan menghadapi permasalahan hukum berupa perkara/gugatan penting dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No .	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Nominal dan Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1.	Perlawanan atas Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri	Kehilangan Agunan Kredit senilai Rp. 60.000.000.000,-	Manajemen mengikuti tahapan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak terdapat sanksi yang dikenakan
2.	Gugatan yang diajukan oleh Pemegang Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban turut tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang kemudian dalam pelaksanaannya turut tergugat melakukan wanprestasi sehingga Penggugat mengajukan claim atas Bank garansi tersebut, namun pihak Penjamin kontra bank Garansi belum melakukan pembayaran klaim dimaksud	Menunggu putusan Banding dari Pengadilan Tinggi	Perseroan Mencairkan Bank Garansi senilai Rp. 14.138.723.096,-	Manajemen mengikuti tahapan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak terdapat sanksi yang dikenakan
3.	Penggugat dulunya merupakan debitur pada Perseroan dimana atas kredit tersebut sudah jatuh tempo. dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas kredit novasi yang telah diberikan kepada Penggugat. dimana wanprestasi tersebut terkait dengan pemenuhan klausul dalam perjanjian kredit tentang proses balik nama sertifikat serta sisa kelonggaran tarik kredit.	Menunggu putusan Banding dari Pengadilan Tinggi	Kehilangan Agunan Kredit senilai Rp. 14.115.461.113,-	Manajemen mengikuti tahapan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak terdapat sanksi yang dikenakan

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Nominal dan Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehubungan dengan keberatan atas pengangkatan salah satu Komisaris Perseroan	Menunggu putusan Banding dari Pengadilan Tinggi	Tidak terdapat pengaruh terhadap kondisi perusahaan	Manajemen mengikuti tahapan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak terdapat sanksi yang dikenakan

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perseroan belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat sanksi administratif yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, publikasi (*press release*), produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Website **www.btn.co.id** yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
 - a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.
 - a. Analisis kinerja keuangan.
 - b. Laporan keuangan tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - c. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi **Call Center 1500 286** atau email **csd@btn.co.id**.
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi Corporate Secretary/Investor Relations Perusahaan dengan mengirim email ke **investor_relations@btn.co.id** atau telepon ke **(62-21) 633 6789 ext: 2003**.

4. Perusahaan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik **spe.ojk.go.id** dan **idxnet.co.id** dan situs web **www.btn.co.id**.
5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
6. Penyampaian laporan kepada regulator, *Analyst Meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Ari Kurniaman

Menara BTN

Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130

Telp : (021) 6336789 ext. 2003

Faks : (021) 6336719

Email : ari.kurniaman@btn.co.id

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menjalankan salah satu aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam bentuk siaran pers. Siaran Pers yang telah dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
1.	2 Januari 2020	Jakarta Banjir, BTN Komitmen Layani Nasabah
2.	4 Januari 2020	Karyawan Jadi Korban Banjir, BTN Ikut Berikan Bantuan
3.	9 Januari 2020	2020, BTN Berfokus Menjadi Rumah Bagi Milenial
4.	10 Januari 2020	Tahun 2020, BTN Bersiap Terapkan Model Bisnis Baru Menjawab Pasar
5.	15 Januari 2020	Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik, Cara BTN Mengapresiasi Para Jurnalis Jelang HUT Ke-70
6.	16 Januari 2020	Investor Global Minati <i>Junior (Tier 2 Capital) Global Bond</i> BTN
7.	20 Januari 2020	Dukung Qanun Aceh, BTN Konversi 4 Kantor Syariah
8.	30 Januari 2020	BBTN Masuk Dalam Daftar LQ 4
9.	1 Februari 2020	KPR BTN Tingkatkan Kualitas Hidup dan Aset Masyarakat Yang Berlipat
10.	3 Februari 2020	2020, BTN Fokus Pada Pembiayaan Perumahan
11.	4 Februari 2020	Gaet Penggemar Olahraga, Bank Tabungan Rilis Kartu Debit BTN Visa Bertemakan <i>Olympic Tokyo 2020</i>
12.	4 Februari 2020	BTN Klaim Tidak Ada <i>Window Dressing</i>
13.	7 Februari 2020	Poles <i>Mobile Banking</i> , BTN Bidik 2,7 Juta Pengguna
14.	9 Februari 2020	70 Tahun Peran BTN Tak Tergantikan Kredit Mengucur Untuk Rakyat Mencapai Hampir Rp600 Triliun
15.	10 Februari 2020	Ini Dia Produk Baru BTN Hasil <i>Bundling</i> Tabungan dan Kredit
16.	14 Februari 2020	Sasar Milenial, BTN Targetkan Rp3 Triliun Pada IPEX 2020
17.	16 Februari 2020	2020, BTN Fokus Tingkatkan Kualitas Bisnis
18.	17 Februari 2020	2020, BTN Optimistis Laba Rp3 Triliun
19.	23 Februari 2020	Lampaui Target, BTN Raih Potensi Kredit Baru Rp4,56 Triliun Dalam Gelaran IPEX Ke 20
20.	26 Februari 2020	Incar Potensi Jaksel, BTN Relokasi Cabang Jakarta Kuningan
21.	6 Maret 2020	Potensi Bisnis Besar, BTN Tingkatkan Layanan di Jabar
22.	10 Maret 2020	COVID-19, BTN Siapkan <i>Business Continuity Plan</i>
23.	11 Maret 2020	Bank BTN Ajak <i>Developer</i> Bersinergi Perkuat Sektor Properti Hadapi Perlambatan Ekonomi Dengan Kolaborasi Yang Positif, Bank BTN dan Pengembang Targetkan KPR Tumbuh 8-10 Persen
24.	12 Maret 2020	BTN Optimistis Bisnis Perseroan <i>On Track</i> Dengan Capaian Laba Hingga Rp3 Triliun
25.	15 Maret 2020	Antisipasi COVID-19, BTN Lakukan Layanan Terbatas
26.	16 Maret 2020	Ari Kurniawan Jabat Sekretaris Perusahaan BTN
27.	24 Maret 2020	BTN Maksimalkan WFH dan Sesuaikan Jam Layanan
28.	30 Maret 2020	BTN Beli Saham BBTN Melalui Pasar Sekunder
29.	31 Maret 2020	Tak Perlu Ke <i>Outlet</i> , Bank BTN Siap Transfer Duit Pensiunan Langsung Ke Rekening
30.	12 April 2020	Relaksasi Kredit, BTN Siapkan Layanan Restrukturisasi Secara <i>Online</i>
31.	16 April 2020	Bantu Pemerintah Lawan COVID-19, BTN Gelar Berbagai Aksi
32.	8 Mei 2020	Di Tengah Pandemi COVID-19, Kinerja BTN <i>On Track</i>
33.	11 Mei 2020	Bank BTN Gelar BTN Santri Developer
34.	14 Mei 2020	Bank BTN Siap Salurkan SSB Mulai Bulan Ini
35.	15 Mei 2020	Di Tengah Pandemi COVID-19, Laba dan Kredit BTN Masih Tumbuh
36.	18 Mei 2020	Sambut Idul Fitri 1441 H, BTN Siapkan Dana Rp12,15 Triliun
37.	20 Mei 2020	Dukung <i>The New Normal</i> , BTN Ajak Pengembang Bangun Rumah Rakyat
38.	27 Mei 2020	BTN Kembali Masuk Indeks Sri-Kehati

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
39.	2 Juni 2020	Sambut <i>The New Normal</i> , Ini Skenario Versi Bank BTN
40.	10 Juni 2020	BTN Masuk Top 3 ASEAN CGS
41.	25 Juni 2020	Wow, BTN Dapat Tambahan Kuota FLPP
42.	25 Juni 2020	BTN Siap Ekspansi Kredit Dukung Pemulihan Sektor Riil
43.	10 Juli 2020	Penempatan Dana Pemerintah Rp5 Triliun, BTN Optimistis Bisa Salurkan Kredit Hingga Rp30 Triliun
44.	15 Juli 2020	BTN Maksimalkan <i>Refinancing</i> SMF Rp850 Miliar Untuk PEN
45.	22 Juli 2020	Obligasi BTN Untuk Dukung Sektor Riil Dibidang Perumahan
46.	23 Juli 2020	Kawasan Industri Jadi Target Pengembangan Bisnis BTN
47.	23 Juli 2020	BTN Salurkan Kredit Rp3 Triliun Untuk PEN
48.	29 Juli 2020	Sektor Perumahan Diyakini Bakal Dongkrak Pemulihan Ekonomi Nasional
49.	30 Juli 2020	BTN Tawarkan Aset Properti Murah
50.	2 Agustus 2020	Semester I/2020, BTN Kantongi Laba Bersih Rp768 Miliar
51.	5 Agustus 2020	BTN Terus Dorong Kemudahan Pembangunan Rumah Subsidi
52.	10 Agustus 2020	Dorong Ekonomi Nasional Melalui PEN
53.	11 Agustus 2020	Mandiri Syariah dan BTN Syariah Sinergi Perluas Layanan Pembiayaan KPR
54.	11 Agustus 2020	Digitalisasi UMKM, BTN Targetkan Sasar 1.000 Debitur
55.	12 Agustus 2020	Obligasi BTN <i>Oversubscribed</i> 1,8 Kali
56.	14 Agustus 2020	Semangat Baru Layanan BTN Di Era Pandemi
57.	14 Agustus 2020	BTN Pimpin 40% Pasar KPR di Indonesia
58.	15 Agustus 2020	BTN Cetak 24 Ribu Lebih Calon Developer Muda
59.	18 Agustus 2020	BTN-REI Bagikan Sembako Untuk Warga Terdampak COVID-19
60.	19 Agustus 2020	BTN Raih Sertipikat SNI ISO 37001:2016
61.	22 Agustus 2020	BTN Targetkan 2 Juta <i>Visitor</i> Pada IPEX Virtual Perdana Di Indonesia
62.	24 Agustus 2020	BTN Syariah Siap Kolaborasi Dengan BPKH Genjot Pembiayaan Rumah
63.	25 Agustus 2020	2020, BBTN Optimistis Capai Target
64.	6 September 2020	Kejar Penyaluran KPR Subsidi, Bank BTN Rilis Fitur Anyar Untuk KPR BP2BT
65.	9 September 2020	BTN Akan Luncurkan Program Batara Spekta
66.	10 September 2020	<i>Host To Host e Loan</i> BTN dan SiKasep PPDPP Mempercepat Proses Aplikasi KPR Subsidi
67.	17 September 2020	BTN Optimistis Penyaluran Kredit Dari Dana Pemerintah Akan Lampau Target
68.	21 September 2020	BTN Bakal Akuisisi 25.000 EDC
69.	23 September 2020	BTN dan Iluni UI Teken MOU: Beri Pelatihan Usaha Pengembang Properti Bagi Alumni
70.	25 September 2020	Pendidikan Jadi Salah Satu Fokus CSR BTN
71.	27 September 2020	BTN Resmi Luncurkan Batara Spekta
72.	30 September 2020	PT Adhouse Clarion Events Bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Telah Sukses Melaksanakan Indonesia Properti Virtual Expo
73.	5 Oktober 2020	KPR Patriot Khusus untuk TNI
74.	6 Oktober 2020	BTN Hormati Proses Hukum
75.	7 Oktober 2020	Kuartal III/2020 Di Tengah Pandemi Kinerja BBTN Terus Bergerak Naik
76.	8 Oktober 2020	Dukung UMKM, BTN Gandeng Koinworks
77.	12 Oktober 2020	BTN Sebut Posisi Likuiditas Sangat Kuat Dengan LDR Di Bawah 95%
78.	15 Oktober 2020	Stimulus Sektor Properti Dukung Peningkatan PDB Indonesia
79.	19 Oktober 2020	Gaet Mitra10, Bank BTN Genjot Transaksi Kartu Debit BTN
80.	21 Oktober 2020	<i>The New Normal</i> Transaksi Properti IPEX Virtual BTN Sedot Lebih Dari 2 Juta Pengunjung
81.	22 Oktober 2020	Kuartal III/2020, Laba BTN Melesat 39,72%
82.	28 Oktober 2020	BTN Gelar <i>Spectacular World Savings Day</i>

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
83.	5 November 2020	Semakin Kuat, Ini Komitmen Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah
84.	6 November 2020	BTN Jajaki Kerjasama Dengan Perusahaan Jepang
85.	6 November 2020	Transaksi Mobile Banking BTN Meningkatkan Hampir 75 Persen
86.	12 November 2020	Bantu Wifi Gratis Siswa Belajar Daring
87.	13 November 2020	Gelar <i>Asset Sales Festival</i> , BTN Optimistis Mampu <i>Recovery Asset</i> Rp430 Miliar
88.	17 November 2020	Bank BTN Luncurkan Budaya Akhlak Untuk Perkuat <i>Core Values</i>
89.	20 November 2020	<i>Asset Sales Festival</i> , Upaya BTN Turunkan NPL
90.	23 November 2020	BTN Ajak Himpunan Pengembang Nusantara Menyukkseskan Program Sejuta Rumah
91.	26 November 2020	Dukung Akselerasi Industri, BTN Gandeng HKI
92.	30 November 2020	HFC Bank BTN: Pertumbuhan Harga Rumah Masih Tinggi
93.	2 Desember 2020	Dirut BTN Raih Penghargaan <i>Bankers Of The Year 2020</i>
94.	2 Desember 2020	BTN Raih <i>Best Bank Capital Bond</i>
95.	6 Desember 2020	Pandemi COVID-19 Menjadi Momentum BTN Melakukan Perbaikan <i>Business Process</i>
96.	10 Desember 2020	44 Tahun Fokus Salurkan KPR, Bank BTN Kucurkan Kredit Sebesar Rp 317 Triliun
97.	13 Desember 2020	Cuan 2021, Pemerintah Bakal Nambah Stimulus Sektor Perumahan
98.	14 Desember 2020	BTN <i>Virtual Property Expo</i> Menjawab Kebutuhan Rumah Di Masa Pandemi
99.	15 Desember 2020	BTN Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2021
100.	17 Desember 2020	Batara Spekta Berhasil Gaet 400 Ribu Nasabah
101.	20 Desember 2020	Kolaborasi Bank BTN Dengan AFD Prancis Dalam Pembiayaan Rumah Rendah Emisi
102.	21 Desember 2020	BTN Siapkan Uang Tunai Rp19,9 Triliun
103.	23 Desember 2020	Dirut BTN Jadi Wamen BUMN, BTN Tunjuk Nixon Lp Napitupulu Sebagai Plt Dirut

Buletin

Selama tahun 2020, Perseroan telah menerbitkan Majalah Internal PARAS. Adapun majalah internal yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut.

Edisi	Tema
Februari 2020	Ayo Punya Rumah dengan Bank Tabungan
Agustus 2020	Tetap Tumbuh Sehat di Masa Pandemi
Desember 2020	New BTN dan Budaya Akhlak

Transparansi Penyampaian Laporan

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada masyarakat antara lain melalui media massa, situs web Perseroan dan BEI dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

Nomor Surat	Perihal	Regulator
02/CSD/IR/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
15/CSD/IR/2020	Informasi Kupon	
19/CSD/IR/2020	Informasi Kupon	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
16/DIR/CSD/2020	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan Pemegang Saham Badan Hukum dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan	LPS
21/CSD/IR/I/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi atau Fakta Material lainnya	OJK Pasar Modal
30/CSD/IR/I/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Terlampir	
40/DIR/CSD/2020	Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020	
32/CSD/IR/I/2020	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
39/CSD/IR/I/2020	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	Kementerian BUMN
55/DIR/CSD/2020	Laporan Perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri	
44/CSD/IR/II/2020	Pengumuman RUPS	OJK Pasar Modal
45/CSD/IR/II/2020	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	OJK Pengawas Bank
83/DIR/CSD/2020	Pemberitahuan Struktur Organisasi dan Supervisi Direksi	
49/CSD/IR/II/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
51/CSD/IR/II/2020	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
58/CSD/IR/II/2020	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
62/CSD/IR/II/2020	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	
64/CSD/IR/II/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Efektif Sdr. Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	LPS
92/DIR/CSD/2020	Penyampaian Hasil Keputusan Pengangkatan dan Surat Pernyataan Penjaminan Direktur Utama	
65/CSD/IR/II/2020	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	
67/CSD/IR/2020	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	
76/CSD/IR/II/2020	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK Pasar Modal
77/CSD/IR/II/2020	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
78/CSD/IR/II/2020	Penyampaian Laporan Tahunan	
80/CSD/IR/II/2020	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	
117/DIR/CSD/2020	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2019	
145/DIR/CSD/2020	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2019	
102/CSD/IR/III/2020	Informasi Kupon	
107/CSD/IR/III/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71, 72 dan 73	
115/CSD/IR/III/2020	Informasi Kupon	
117/CSD/IR/III/2020	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	
118/CSD/IR/III/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
121/CSD/IR/III/2020	Laporan Hasil Pemingkatan Pemingkatan Tahunan	
122/CSD/IR/III/2020	Informasi Kupon	
126/CSD/CC/III/2020	Perubahan Corporate Secretary	
128/CSD/CC/III/2020	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	
130/CSD/CC/III/2020	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi	
131/CSD/CC/III/2020	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
189/DIR/CSD/2020	Laporan Pengangkatan Efektif Bp Heru Budi Hartono (Komisaris) dan Bapak Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	OJK Pengawas Bank
190/CSD/IR/III/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Efektif Bp Heru Budi Hartono (Komisaris) dan Bp Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	OJK Pasar Modal
134/CSD/CC/III/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material null	
138/CSD/CC/III/2020	Informasi Kupon	
141/CSD/CC/III/2020	Informasi Kupon	
142/CSD/CC/III/2020	Informasi Kupon	OJK Pasar Modal
143/CSD/CC/III/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
145/CSD/CC/III/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian saham BBTN melalui pasar sekunder	
146/CSD/CC/III/2020	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
155/CSD/CC/IV/2020	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	
156/CSD/CC/IV/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
159/CSD/CC/IV/2020	Informasi Kupon	
160/CSD/CC/IV/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK (CORRECTION)	
163/CSD/CC/IV/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
166/CSD/CC/IV/2020	Informasi Kupon	
234/DIR/CSD/2020	Penyampaian Annual Report	OJK Pasar Modal
176/S/CSD/CMA/V/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
178/CSD/CMA/V/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
186/CSD/CMA/V/2020	Laporan Keuangan Triwulanan XBRL	
301/DIR/CSD/2020	Laporan Pengangkatan Efektif Pengurus	OJK Pengawas Bank
193/CSD/CMA/V/2020	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK Pasar Modal
194/CSD/CMA/V/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Efektif Bp Chandra Martha Hamzah (Komisaris Utama) dan Bp Jasmin (Direktur Distribution & Retail Funding)	
195/CSD/CMA/V/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Efektif Bapak Armand Bachtiar Arief sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
208/CSD/CMA/V/2020	Laporan hasil Pemeringkatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan efek Bersifat Utang 2020	
209/CSD/CMA/VI/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
210/S/CSD/CMA/VI/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
212/CSD/CMA/VI/2020	Informasi Kupon	
217/CSD/CMA/VI/2020	Informasi Kupon	
219/CSD/CMA/VI/2020	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
227/CSD/CMA/VI/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi atau Fakta Material "Dampak Pandemi COVID-19"	
228/CSD/CMA/VI/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	Bappebti
374/DIR/CSD/2020	Jawaban atas Surat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 302/BAPPEBTI/SP/05/2020 tanggal 28 Mei 2020	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
232/CSD/CMA/VI/2020	Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Ulang	OJK Pasar Modal
242/CSD/CMA/VII/2020	Informasi Kupon	
243/CSD/CMA/VII/2020	Informasi Kupon	
244/CSD/CMA/VII/2020	Informasi Kupon	
468/DIR/CSD/2020	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Pengurus dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	LPS
247/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
251/CSD/CMA/VII/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
489/DIR/CSD/2020	Laporan Pengangkatan Efektif Direktur Remedial and Wholesale Risk	OJK Pengawas Bank
252/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Efektif Ibu Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur Remedial and Wholesale Risk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pasar Modal
255/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Ke-4 (Empat) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II tahun 2019 Seri A	
257/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelunasan Pokok Seri B dan Pembayaran Bunga Ke-20 (Dua Puluh) Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B-D	
494/DIR/CSD/2020	Laporan Pengangkatan Efektif Pengurus	OJK Pengawas Bank
258/CSD/CMA/VII/2020	Penyampaian Bukti Iklan Penyampaian Pengumuman/Iklan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020	OJK Pasar Modal
260/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Penggantian Wali Amanat	
262/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	
264/CSD/CMA/VII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelunasan Pokok Seri A dan Pembayaran Bunga Ke-12 (Dua Belas) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A-D	
517/DIR/CSD/2020	Laporan Pengangkatan Efektif Dewan Komisaris (Andin Hadiyanto)	OJK Pengawas Bank
522/DIR/CSD/2020	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Pengurus	LPS
282/CSD/CMA/VII/2020	Penyampaian Laporan Keuangan 30 Juni 2020	OJK Pasar Modal
283/CSD/CMA/VII/2020	Penyampaian Laporan Keuangan 30 Juni 2020 XBRL	
289/CSD/CMA/VIII/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
294/CSD/CMA/VIII/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
564/DIR/CSD/2020	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Anggota Dewan Komisaris	LPS
303/CSD/CMA/VIII/2020	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020	OJK Pasar Modal
305/CSD/CMA/VIII/2020	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan	
309/CSD/CMA/VIII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	
313/CSD/CMA/VIII/2020	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan	
319/CSD/CMA/VIII/2020	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan	
322/CSD/CMA/IX/2020	Informasi Kupon	
324/CSD/CMA/IX/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
329/CSD/CMA/IX/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
334/CSD/CMA/IX/2020	Informasi Kupon	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
658/DIR/CSD/2020	Pengangkatan Efektif Direktur Consumer and Commercial Lending	OJK Pengawas Bank
358/CSD/CMA/IX/2020	Informasi Kupon	OJK Pasar Modal
359/CSD/CMA/IX/2020	Informasi Kupon	
360/CSD/CMA/IX/2020	Informasi Kupon	
374/CSD/CMA/X/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
375/CSD/CMA/X/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
380/CSD/CMA/X/2020	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
382/CSD/CMA/X/2020	Informasi Kupon	
385/CSD/CMA/X/2020	Informasi Kupon	
390/CSD/CMA/X/2020	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	
396/CSD/CMA/X/2020	Laporan Keuangan Triwulanan XBRL	
398/CSD/CMA/X/2020	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	
798/DIR/CSD/2020	Penyampaian Surat Pernyataan Penjaminan Pengurus	LPS
407/CSD/CMA/XI/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
408/CSD/CMA/XI/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	OJK Pasar Modal
410/CSD/CMA/XI/2020	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	
428/CSD/CMA/XI/2020	Informasi Kupon	
432/CSD/CMA/XII/2020	Informasi Kupon	
435/CSD/CMA/XII/2020	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
436/CSD/CMA/XII/2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
438/CSD/CMA/XII/2020	Informasi Kupon	
456/CSD/CMA/XII/2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	
464/CSD/CMA/XII/2020	Informasi Kupon	
462/CSD/CMA/XII/2020	Informasi Kupon	
463/CSD/CMA/XII/2020	Informasi Kupon	

Investor Relations

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya, Perseroan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk Investor Relations Perseroan adalah sebagai berikut:

Email Investor_Relations@btn.co.id

Telp. +62 21 63870107/4

Tugas dan Tanggung Jawab Investor Relations

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan baik secara berkala maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pengkinian informasi kepada pemegang saham dan komunitas pasar modal mengenai perkembangan bisnis, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, serta target-target yang akan dicapai baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
2. Mengoptimalkan kinerja saham Perseroan, baik likuiditas/volume perdagangan dan valuasi yang wajar (*fair valuation*).
3. Meningkatkan reputasi dan menjaga hubungan baik dengan *long-term investors*.
4. Memperluas *investor base* dan *coverage* terhadap saham Perseroan dengan mengembangkan *marketing program* kepada investor-investor potensial.
5. Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang telah secara rutin menulis *report* tentang Perseroan dan memberikan rekomendasi yang baik atas saham Perseroan.

Prinsip dasar yang digunakan oleh *Investor Relations* dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.
2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Road Show*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.
2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, *Press Release*, *Website*, *Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, Media Online), *Social Media*, dan *E-mails*.

Kegiatan Investor Relations Selama Tahun 2020

Berikut adalah program komunikasi kepada komunitas pasar modal yang telah dijalankan oleh Perseroan selama tahun 2020:

Tanggal	Kegiatan
8 Januari 2020	JP Morgan ASEAN 1x1 <i>Financials Forum</i>
7 Februari 2020	<i>Mandiri Investment Forum</i>
17 Februari 2020	<i>Analyst Meeting FY 2019</i>
21 Februari 2020	UBS Indonesia <i>Banks Day</i>
27 Februari 2020	<i>Non Deal Roadshow</i> Jakarta
4 Maret 2020	<i>Credit Suisse ASEAN Virtual Banks Corporate Days</i>
12 Maret 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
15 Mei 2020	<i>Analyst Meeting 1Q 2020</i>
7 Juli 2020	Verdhana <i>Virtual Indonesian Conference</i>
3 Agustus 2020	<i>Analyst Meeting 2Q 2020</i>
25 Agustus 2020	<i>Public Expose</i>
10 September 2020	<i>CIMB Banking Call</i>
10-11 September 2020	CITIC CLSA <i>Investors' Forum</i>
7-9 September 2020	<i>Virtual Non Deal Roadshow Global</i>
22 Oktober 2020	<i>Analyst Meeting 3Q 2020</i>
23 Oktober 2020	Presentasi kepada Investor Ritel
11 November 2020	Presentasi kepada Investor Ritel

Selama tahun 2020 Perseroan juga memenuhi permintaan *meeting*, *conference call* dan *site visit* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh unit Investor Relations.

Partisipan	Jumlah Kegiatan
Analisis	55
Investor Lokal	23
Investor Asing	24
Rating Agency	5
Total	107

Selain menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tersebut di atas, unit Investor Relations secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan. Laporan yang disampaikan kepada Manajemen Perseroan selama tahun 2020 antara lain:

No	Uraian	Penyampaian kepada Direksi	
		Dokumen	Tanggal
1.	Pergerakan Saham Bank BTN Sebelum dan Setelah Pelaksanaan <i>Analyst Meeting</i> dan Paparan Kinerja FY 2019	Memo No. 2/M/IRRD/IR/II/2020	28 Februari 2020
2.	<i>Research Report Review</i> atas Kinerja Bank BTN per 31 Maret 2020	Memo No. 69/M/IRRD/IR/VI/2020	05 Juni 2020
3.	<i>Research Report Review</i> atas Kinerja Bank BTN per 30 Juni 2020	Memo No. 111/M/IRRD/IR/VIII/2020	07 Agustus 2020
4.	Penyampaian <i>Shares Information</i> Bank BTN Posisi 31 Agustus 2020	Memo No. 156/M/IRRD/IR/IX/2020	14 September 2020
5.	Penyampaian <i>Shares Information</i> Bank BTN Posisi 30 September 2020	Memo No. 185/M/IRRD/IR/X/2020	05 Oktober 2020
6.	<i>Research Report Review</i> atas Kinerja Bank BTN per 30 September 2020	Memo No. 209/M/IRRD/IR/X/2020	27 Oktober 2020
7.	Penyampaian <i>Shares Information</i> Bank BTN Posisi Oktober 2020	Memo No. 219/M/IRRD/IR/XI/2020	05 November 2020
8.	Penyampaian <i>Shares Information</i> Bank BTN Posisi 30 November 2020	Memo No. 244/M/IRRD/IR/XII/2020	07 Desember 2020

Program Anti Korupsi

Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001

Berdasarkan Surat Edaran BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 menyatakan bahwa seluruh BUMN diwajibkan melakukan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan memperoleh sertifikasi tersebut sebelum tanggal 17 Agustus 2020.

ISO 37001:2016 merupakan standar internasional yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (*Anti Bribery Management System*). Pada tanggal 11 Agustus 2020 Perseroan telah berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 dalam bidang Kredit Komersial (*Commercial Lending*) & bidang Pengadaan (*Procurement*), artinya Perseroan telah mendapatkan pengakuan bahwa dalam proses bisnis bidang perkreditan komersial dan pengadaan telah mengikuti standar SNI ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System*. Diharapkan dengan diraihnya ISO 37001: 2016 akan semakin memperkuat implementasi budaya integritas, pelaksanaan prinsip GCG di Perseroan dan sekaligus menegaskan komitmen kepatuhan Perseroan terhadap implementasi Undang-Undang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Raihan SNI ISO 37001:2016 pada peringatan HUT RI ke-75 sangat berarti untuk Bank BTN dalam transformasi menuju **Mortgage Bank Terbaik di Asia Tenggara Tahun 2025**.

Dalam upaya mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 tersebut, Perseroan telah menjalankan serangkaian proses, antara lain: *Training Awareness* ISO 37001:2016; *Gap Analysis & Bribery Risk Assessment* atas kondisi existing di BTN dengan standar ISO yang dipersyaratkan; *Development Kebijakan dan Prosedur SMAP* (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) sesuai standar ISO; *Implementation SMAP* pada 3 Divisi yaitu *Commercial Banking Division (CMBD)*, *Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD)* dan *Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD)*; *Internal Assessment SMAP* oleh Auditor Internal (Internal Audit Division) dan Audit sertifikasi oleh Auditor Eksternal (Badan Sertifikasi ISO 37001:2016).

Dalam menjalankan bisnis, Perseroan akan tetap berdasarkan prinsip GCG dan akan terus melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) guna mewujudkan Perseroan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 di Perseroan dengan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga akan mendorong rekan bisnis/

mitra kerja untuk menerapkan ISO 37001:2016 di masing-masing perusahaannya sehingga terdapat kesamaan dengan nilai-nilai dan kebijakan dalam penerapan sistem anti penyuapan.

Perseroan pada dasarnya telah memiliki beberapa aturan diantaranya Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pengendalian Anti Gratifikasi, Strategi Anti Fraud serta menyediakan saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WBS BTN SIIPS). Dengan telah ditetapkan kebijakan dan prosedur anti penyuapan di Perseroan sesuai standar ISO 37001:2016 sejak 11 Agustus 2020, maka semakin memperkuat sistem manajemen anti penyuapan yang sudah dimiliki Perseroan selama ini.

Dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama akan lebih meningkat dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis Perseroan. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016. Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Bank dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable*.

Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada *Internal Audit Division*, proses KPR pada *Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division*, proses bisnis pada *Enterprise Risk Management Division*, *Compliance & Governance Division* dan *Learning Center Division*.

Pelaksanaan Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)

Sebagai perwujudan dari salah satu strategi inisiatif tahun 2020 perihal *Tone of the Top Compliance Culture Awareness* (pimpinan dan jajaran *senior manager* menjadi *role model*) dan menindaklanjuti komitmen dan kerja sama Bank dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT) dan Cegah Korupsi (CEK) khususnya terkait keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API). Seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 dan kesiapan dari LSP P-II KPK terkait Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), saat ini peserta API hanya difokuskan kepada Organ Kantor Pusat sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Divisi IAD, ERMD dan CMGD dan 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah I dan II serta Kepala Cabang dibawah Kantor Wilayah I dan II akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun yang telah dilakukan dalam persiapan program sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dalam kurun waktu Oktober s.d Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rapat persiapan pelaksanaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dengan LCD dan PFAD terkait Persiapan Pembekalan peserta, penunjukan peserta, verifikasi peserta, pengumpulan persyaratan dan pengumpulan berkas kompetensi serta pelaksanaan Sertifikasi API.
2. Pelaksanaan tahapan program Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah sebagai berikut:

No	Jenis kegiatan	Pelaksanaan
1.	Penunjukan Peserta	19 Oktober 2020
2.	Pelaksanaan <i>e-learning</i> dan pengumpulan berkas pendaftaran	20-27 Oktober 2020
3.	Bimbingan teknis	4 November 2020
4.	Pelaksanaan pengumpulan 8 (delapan) unit kompetensi	26 Oktober s.d 6 November 2020
5.	Pelaksanaan <i>assessment</i>	1-2 Desember 2020
6.	Pengumuman hasil	Desember 2020

3. Berdasarkan Surat Undangan KPK No. UND/1295/DKM.00.05/17/22/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Undangan Mengikuti Uji Kompetensi Skema Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas, bahwa terdapat 13 (tiga belas) peserta yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).
4. Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2020 telah dilaksanakan *assessment* sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) oleh seluruh peserta dan berdasarkan hasil rapat pleno LSP-II KPK dengan Tim Asesor pada tanggal 5 Desember 2020 seluruh peserta telah dinyatakan kompeten serta pengumuman disampaikan kepada masing-masing peserta.

Kode Etik

Bagi Perseroan, Kode Etik merupakan perwujudan komitmen perusahaan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan menjalankan aktivitas usaha selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Pokok-Pokok Kode Etik

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

01. Pendahuluan

Code of Conduct ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis.

Implementasi *Code of Conduct*, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, *Code of Conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik-praktik manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan *Code of Conduct* yang konsisten akan menunjukkan bahwa Perseroan adalah Perseroan yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

02. Standar Etika Bisnis	1. Etika Bank dengan Pegawai Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank. 2. Etika Bank dengan Nasabah Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah. 3. Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok. 4. Etika Bank dengan Pesaing Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan. 5. Etika Bank dengan Mitra Kerja Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. 6. Etika Bank dengan Pemerintah Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Etika Bank dengan Masyarakat Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 8. Etika Bank dengan Media Massa Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik. 9. Etika Bank dengan Organisasi Profesi Bank membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
03. Kebijakan Standar Prilaku	1. Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. 2. Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan. 3. Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank.
04. Penerapan dan Penegakan	Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division dan identitas pelapor dilindungi. Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi seluruh Pengurus (dalam hal ini Dewan Komisaris, Direksi) serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakuan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh insan Perseroan melalui media *Digital Room for E learning Modules (DREAM)* serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Disamping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui *website* Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

Sepanjang tahun 2020, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*.
2. Sosialisasi *Code of Conduct* dan Pengendalian Gratifikasi melalui *Digital Room for e-learning Modules (DREAM)*.
3. Bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan *Code of Conduct*.
4. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan.
5. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct*.
6. Melaksanakan program *Whistleblowing System (WBS)*.
7. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif
 - a. Kategori Ringan, yaitu: teguran lisan; teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah 3 (tiga) bulan.
 - b. Kategori Sedang, yaitu: tidak mendapatkan uang cuti; tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala dan penurunan *Person Grade* sebanyak 1 (satu) grade (gaji dasar menyesuaikan). Masa berlakunya sanksi pembinaan pegawai adalah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Kategori Berat, yaitu: penurunan person grade sebanyak minimal 2 (dua) grade (gaji dasar menyesuaikan); pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah selama 2 (dua) tahun.
2. Sanksi Finansial
Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran *Code of Conduct* sebanyak 216 (dua ratus enam belas) pelanggaran. Sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi sanksi ringan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang, sanksi sedang sebanyak 102 (seratus dua) orang, sanksi berat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Tren kualitas penerapan Kode Etik dapat dilihat melalui perkembangan jumlah pelanggaran *Code of Conduct* seperti terlihat pada tabel dan bagan di bawah ini.

Tren Kualitas Penerapan Kode Etik

Kategori Sanksi	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
Ringan	79	46	77
Sedang	102	154	37
Berat	35	44	27
Total	216	240	141

Kebijakan Gratifikasi

Bagi Perseroan, pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan menjalankan kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Di sisi lain, Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi

Bukti keseriusan Bank BTN dalam mendukung pemberantasan korupsi dimulai sejak tanggal 25 Juni 2014, bekerja sama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Bank BTN. Berdasarkan komitmen tersebut, tahun 2015 Bank BTN telah mempunyai pedoman *intern* serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Untuk mendukung pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi, Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui suatu Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/CMPD/2017 perihal Petunjuk Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Gratifikasi.
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi.
3. Kategori Gratifikasi.
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi.
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

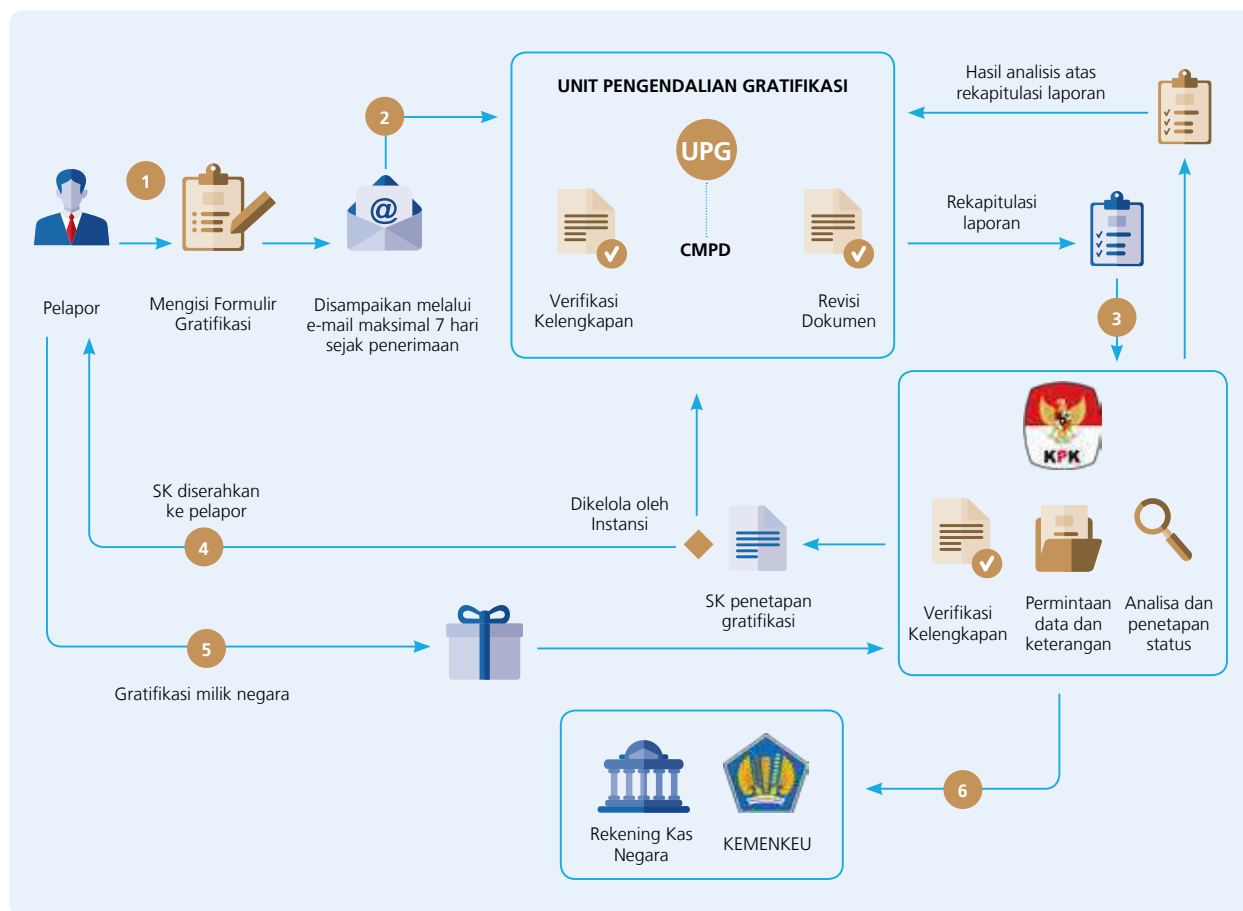
Bertepatan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang diselenggarakan oleh KPK, Bank BTN memperoleh penghargaan sebagai BUMN/BUMD dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018. Adapun yang menjadi kriteria penilaian antara lain adanya kelengkapan perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi termasuk komitmen, aturan dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Inovasi sosialisasi internal, eksternal dan proses pelaporan serta mutu pengelolaan; kuantitas dan kualitas laporan gratifikasi.

Sejak tahun 2019 Bank BTN melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi.
Sampai dengan saat ini terdapat 21 (dua puluh satu) peserta yang telah mengikuti ujian sertifikasi API dan telah dinyatakan kompeten oleh KPK.
- b. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi. Bank telah melakukan penayangan film KPK melalui beberapa videotron Bank yang terletak di Menara BTN- Kantor Pusat Bank BTN, Bank BTN Kantor Cabang Solo, SCBD Jakarta, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional Kualanamu dan Polrestabes Bandung Jawa Barat.
- c. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).
Bank telah melengkapi dan menyampaikan Panduan Pencegahan Korupsi (CEK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana yang terlihat dalam alur berikut:



Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: upg.btn@btn.co.id
Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;
 - b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
 - c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir '1'.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.

3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/ pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan.

Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Bank.

5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG,
6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

Implementasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Pakta Integritas

Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen Bank BTN atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi.

Program Pengendalian Gratifikasi

1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penayangan video Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang anti gratifikasi pada beberapa Videotron BTN seperti di Menara BTN, Bandara Soekarno Hatta dan Polrestabes Bandung serta penayangan video anti gratifikasi pada TV/LED di *Banking Hall* seluruh Outlet BTN.
2. Pelaksanaan internalisasi kepada seluruh pegawai mengenai anti suap dan pengendalian gratifikasi melalui media *Digital Room for E learning Modules* (DREAM).
3. Sosialisasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui penayangan video Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemahaman gratifikasi dan penolakan gratifikasi ilegal pada videotron lift kantor Menara BTN dan aplikasi BGATE.
4. Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2020 (Hakordia 2020) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penyampaian *message* tentang tema Hakordia 2020 sebagaimana Surat Edaran KPK No.30 tahun 2020 yaitu: "Membangun Kesadaran

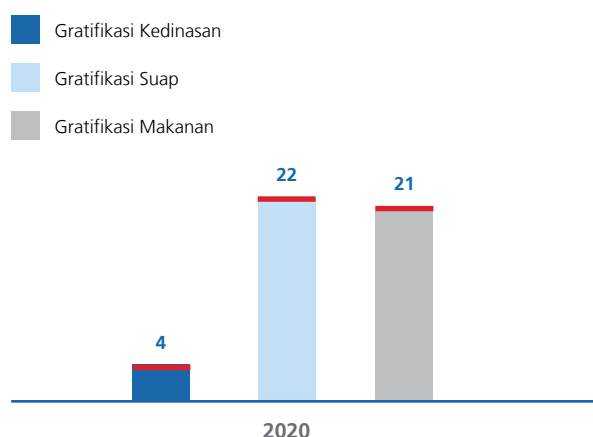
Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi", BTN melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menayangkan video tema Hakordia serta video anti gratifikasi KPK melalui beberapa Videotron/LED BTN yang terletak di Menara BTN, Bandara Soekarno Hatta, Jl. Pemuda Surabaya, Jl. Transyogi Cibubur.
- b. Menyampaikan pesan tema Hakordia 2020 melalui sosial media BTN (Instagram).
- c. Menayangkan video anti gratifikasi KPK melalui Videotron lift Kantor Pusat serta videotron Banking Hall Kantor Cabang.
- d. Menyampaikan pesan tema Hakordia 2020 melalui email Blast dan SMS Blast kepada seluruh pegawai BTN.
5. Mengedarkan himbuan kepada seluruh unit kerja Kantor Pusat maupun Kantor Cabang serta memasang pemberitahuan pada Surat Kabar dalam rangka pengendalian gratifikasi sehubungan dengan Hari Raya dan Tahun Baru untuk wajib menolak/tidak menerima/meminta/memberi gratifikasi dari/ke siapapun (rekanan/debitur/notaris/mitra kerja) dalam bentuk uang, bingkisan, parcel maupun fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan belawan dengan kewajiban/tugasnya serta dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik (*code of conduct*) Bank, menimbulkan konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

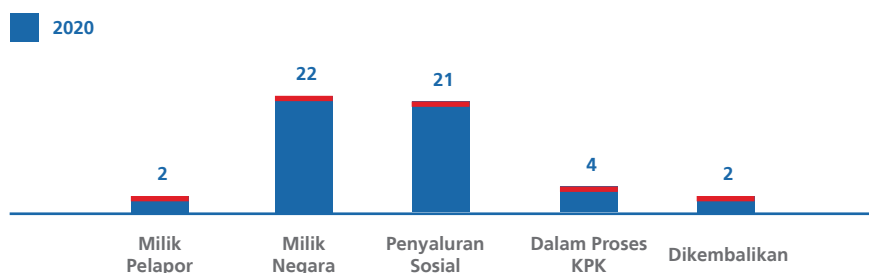
Laporan Gratifikasi Tahun 2020

Selama periode tahun 2020, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 47 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan maupun gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan.

Laporan Gratifikasi a.d Jenis Gratifikasi



Laporan Gratifikasi a.d Status Kepemilikan



Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila pihak terkait adalah karyawan BTN sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS BTN, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS BTN.
2. Apabila pihak terkait adalah anggota Tim WBS BTN dan atau karyawan BTN 1 (satu) level di bawah Direksi maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
3. Apabila pihak terkait adalah Direksi, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
4. Apabila pihak terkait adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Komisaris yang tidak terkait yang juga bukan anggota dari Komite yang bersangkutan.
5. Apabila pihak terkait adalah Komisaris secara bersama-sama, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Perseroan juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

1. PO Box 2828 JKP 10028
2. Website: <https://btinsiips.tipoffs.info>
3. Email: btinsiips@tipoffs.info
4. SMS: +62 813 8870 1117
5. Whatsapp: +62 813 8870 1117
6. Telepon: +62 21-50928882
7. Faximili: +62 21-50928883

Perlindungan Bagi Whistleblower

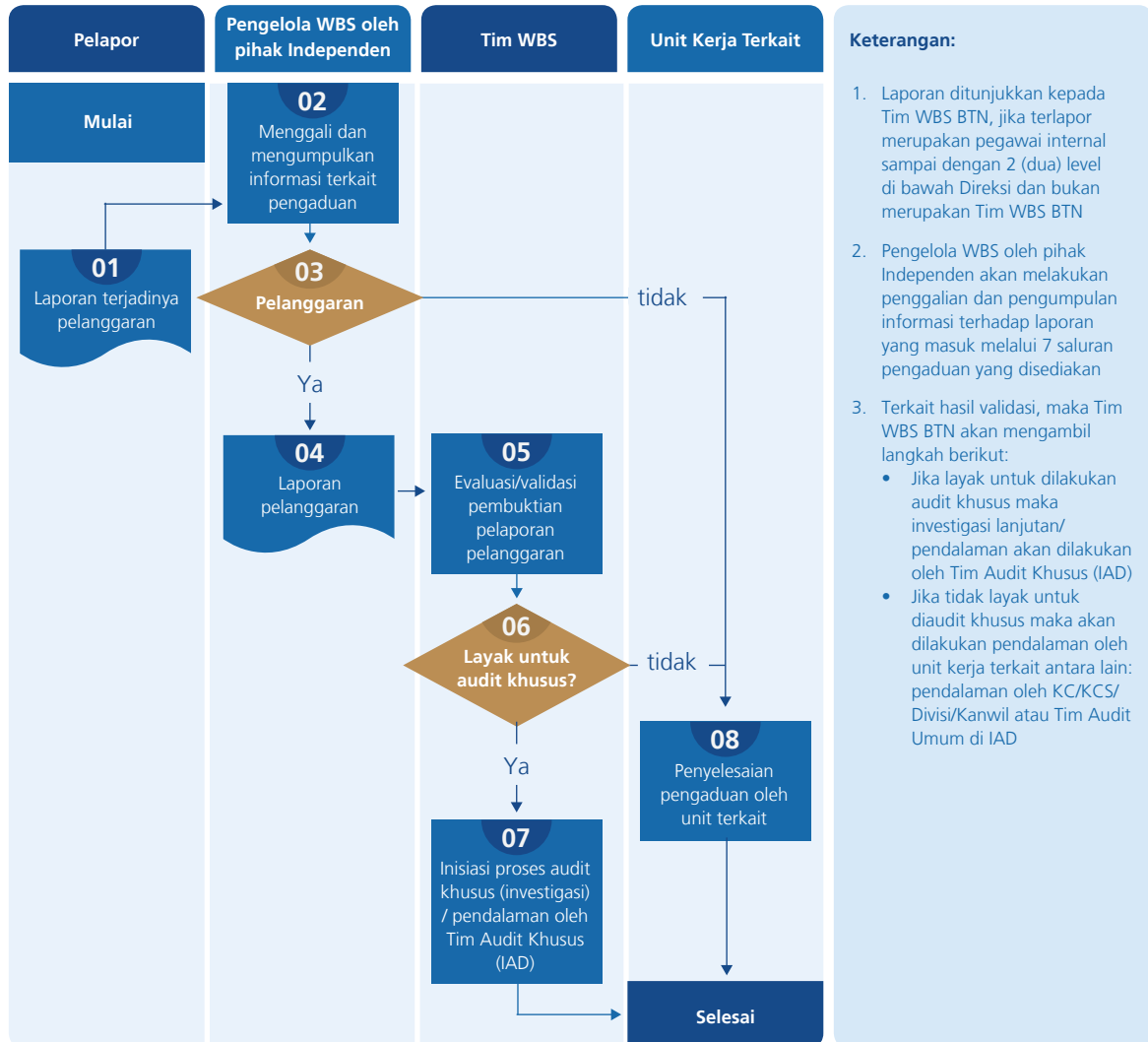
Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, *email*) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim.
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
 - a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya.
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dan lainnya.
 - d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

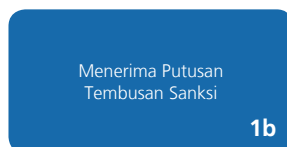
Penanganan Pengaduan

Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

Bagan Alur (1) Jika Terlapor Pegawai BTN [2 Level di bawah Direksi] dan Bukan Tim WBS.



Komite Anti Fraud



Human Capital Management & Culture Specialist Division



Koordinasi Legal Div. untuk Persiapan Proses Hukum

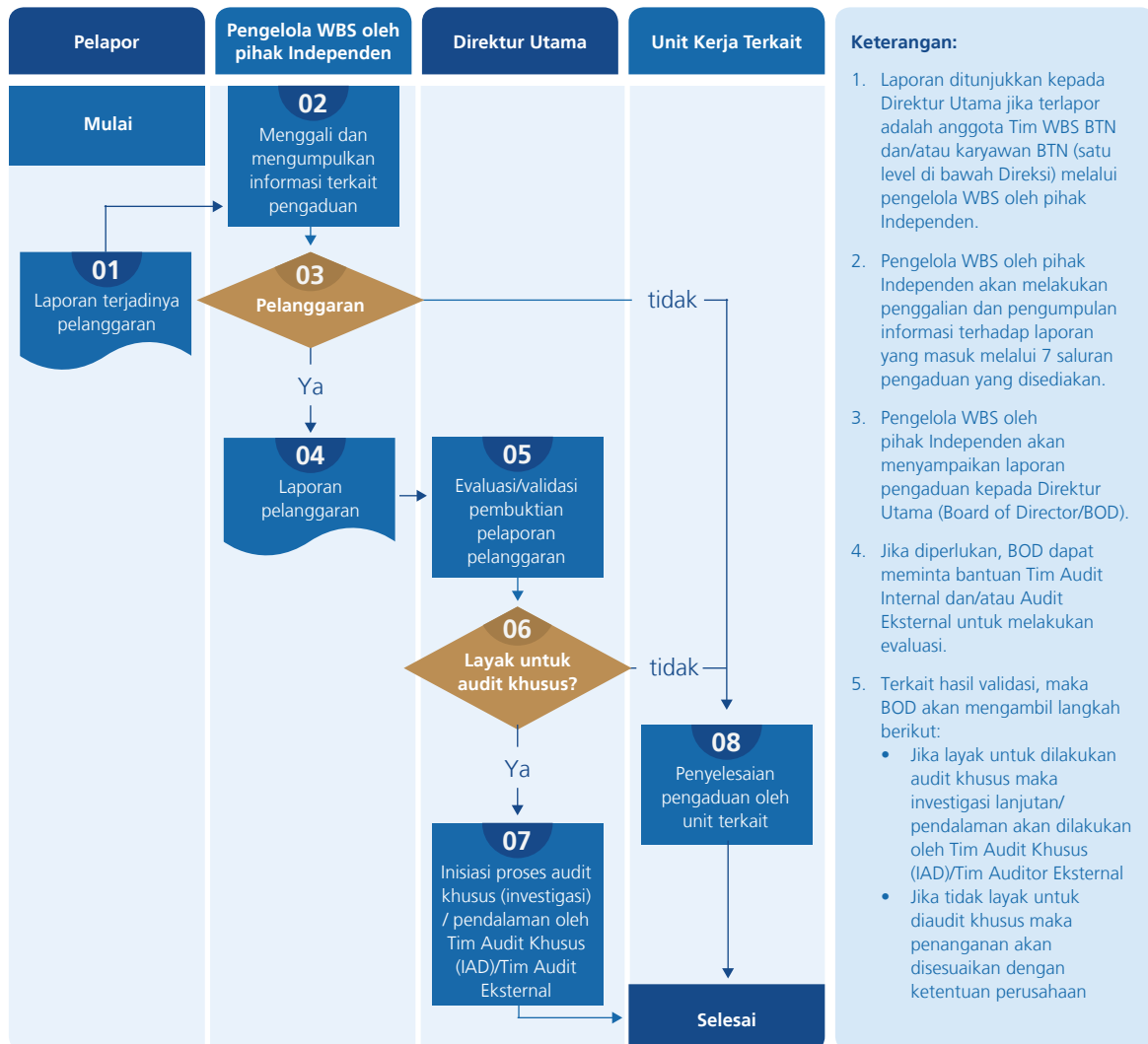
2

Legal Division

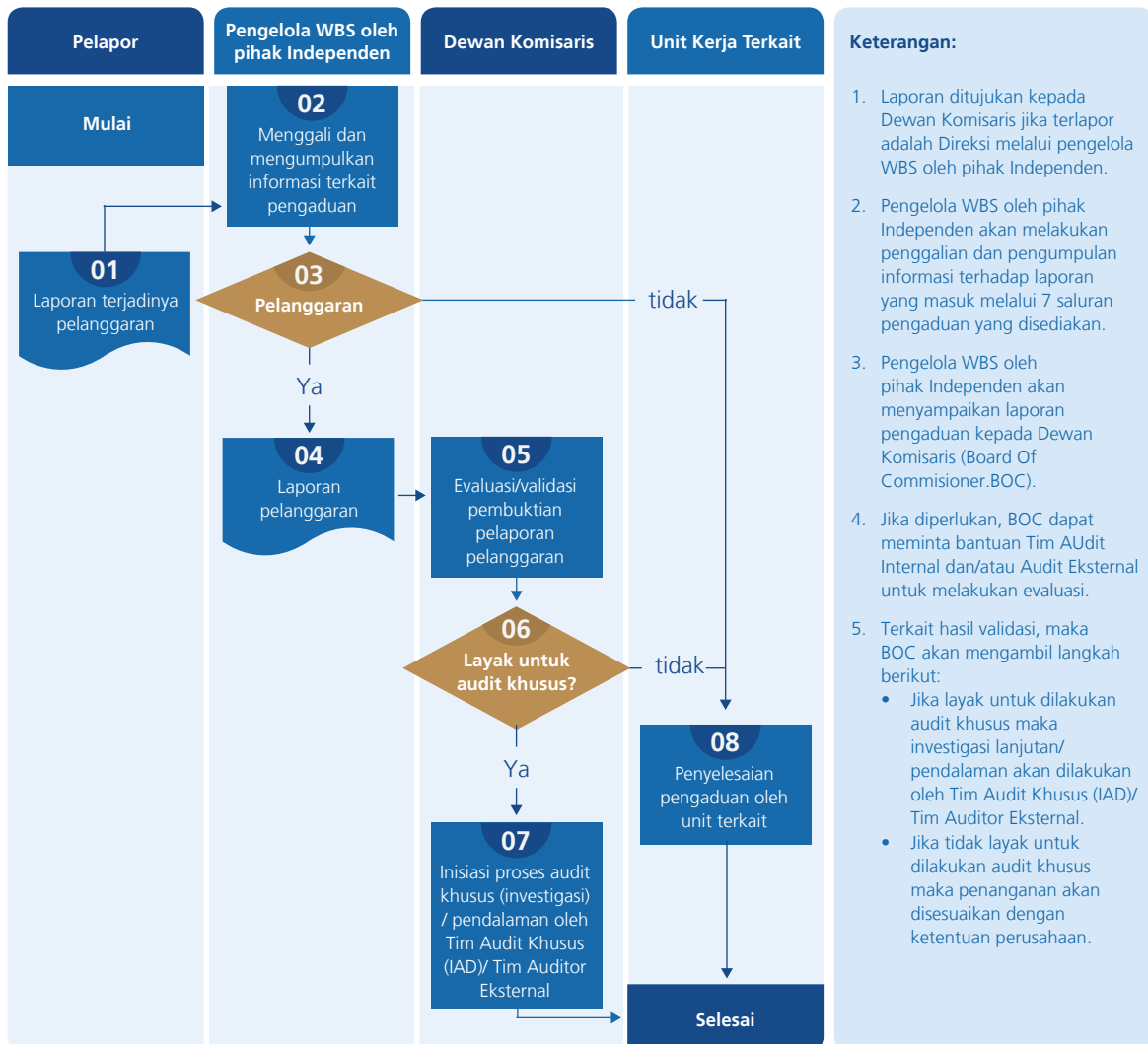
Menyiapkan Tim & Langkah Hukum serta Mengawal Jalannya Proses Hukum

3

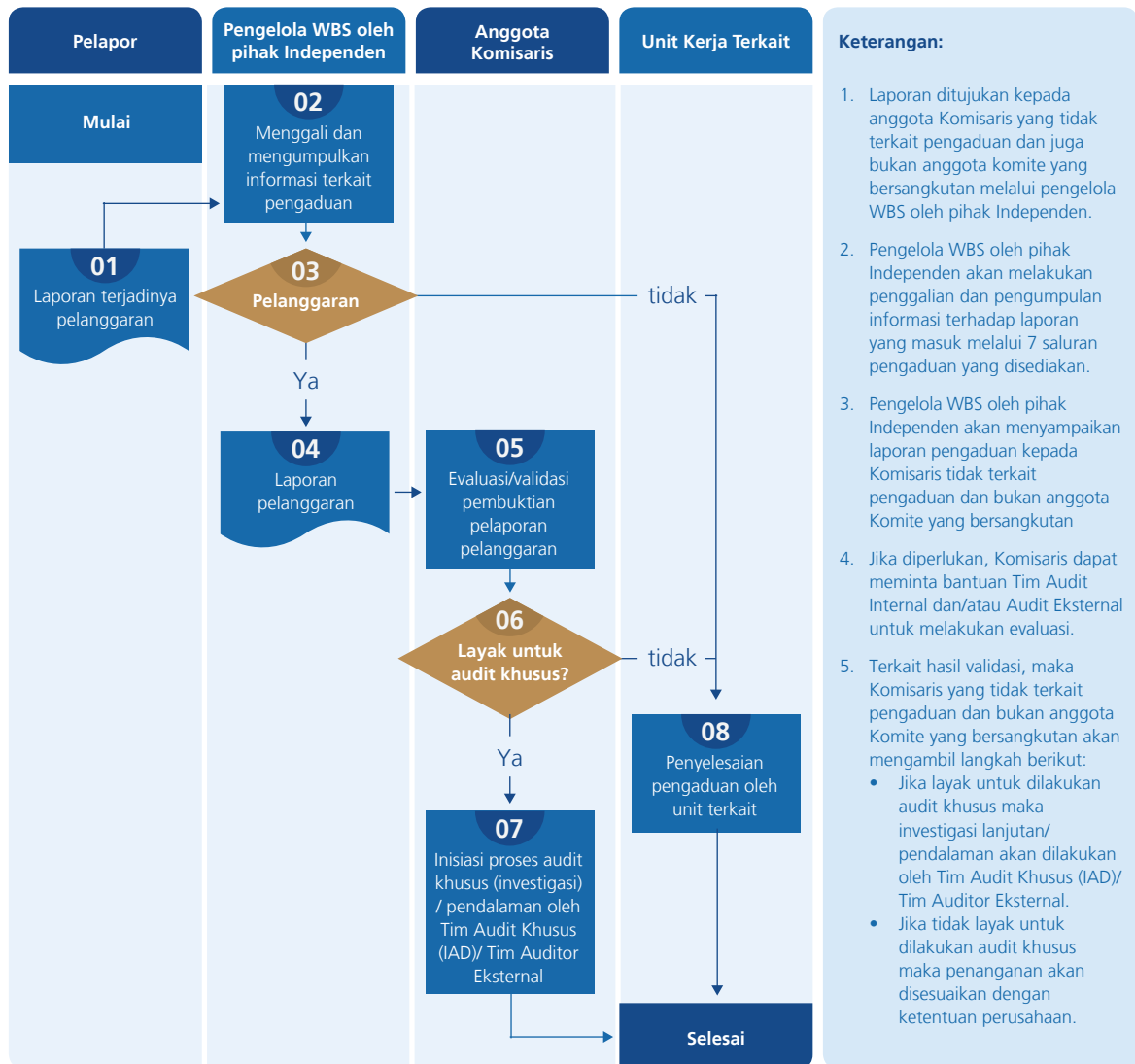
Bagan Alur (2) Jika Terlapor adalah Tim WBS dan/atau karyawan BTN (1 level di bawah Direksi):



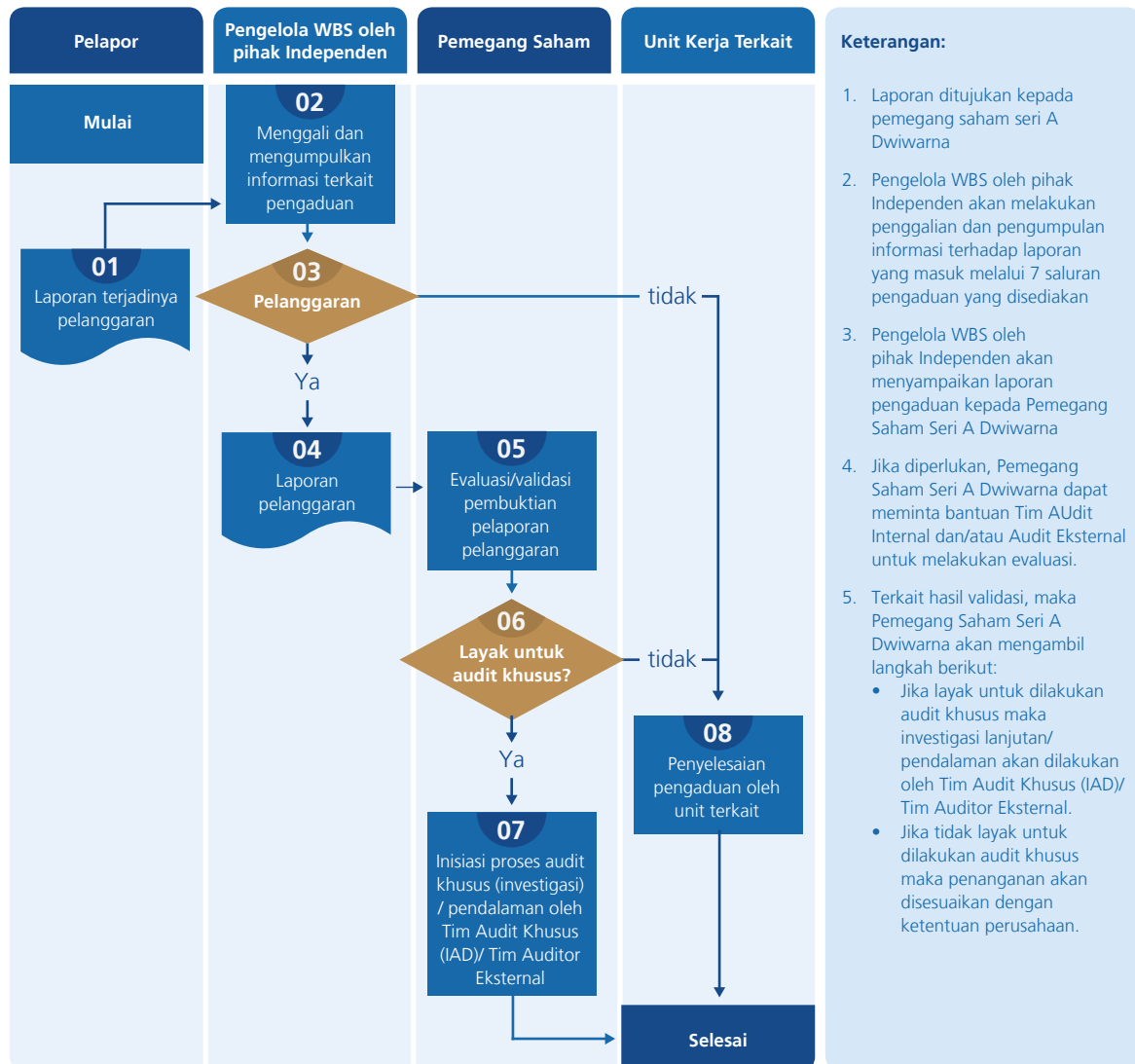
Bagan Alur (3) Jika Terlapor adalah Direksi



Bagan Alur (4) Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris



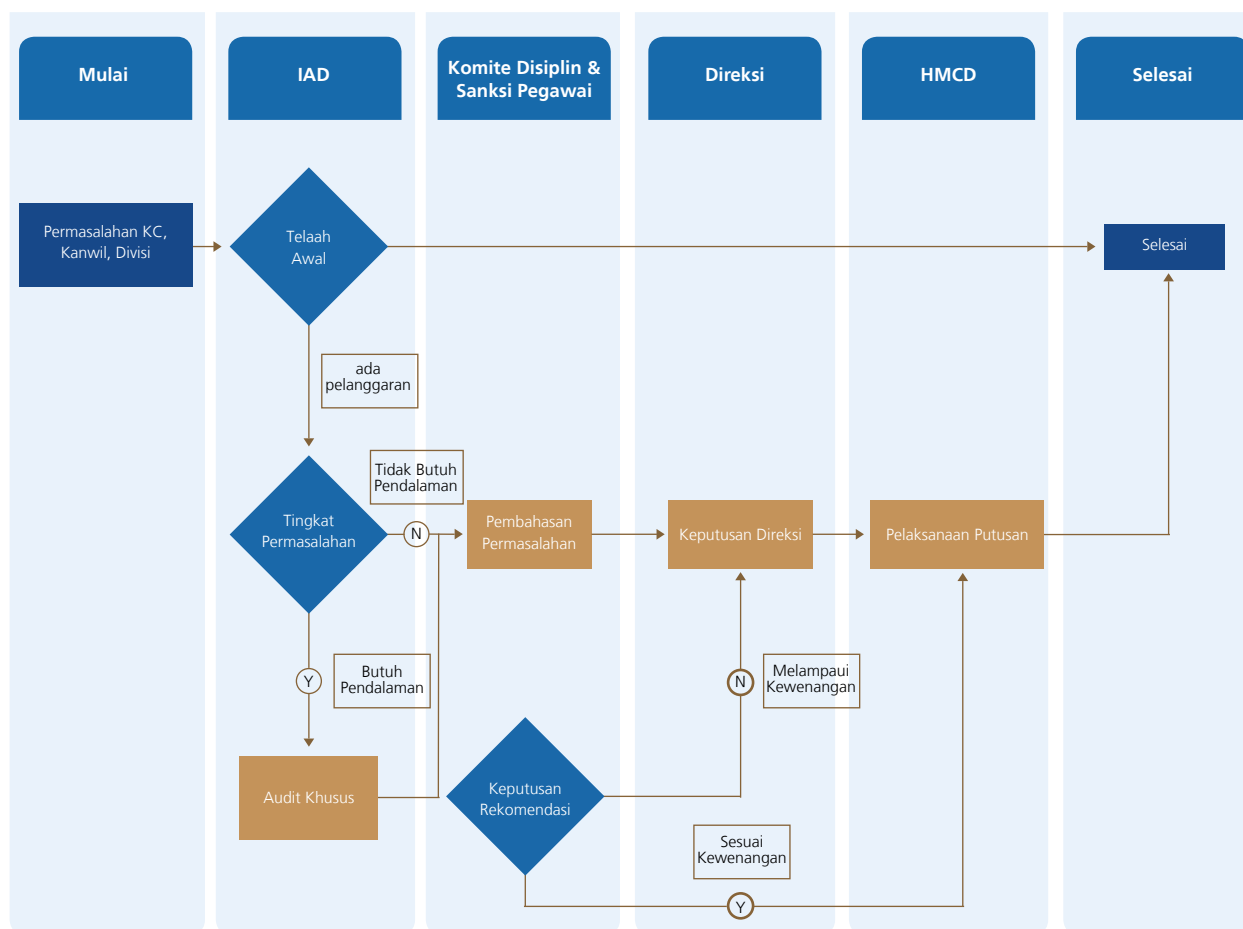
Bagan Alur (5) Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama



Bagan Alur Proses Sanksi – Jalur Hukum



Bagan Alur Proses Sanksi pada Bank



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran atau penyimpangan yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang secara signifikan berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis atau mengancam keselamatan individu Perseroan. Adapun beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain adalah:

1. Perbuatan *fraud*/kecurangan.
2. Pencurian/Pengambilan/Penggelapan/Penipuan.
3. Benturan Kepentingan.
4. Penyuapan/Gratifikasi.
5. Penyalahgunaan Wewenang.
6. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku Tidak Etis.
7. Pembocoran Informasi.
8. Pelanggaran Terhadap Ketentuan/Hukum yang Berlaku;

Pengelola Laporan Pelanggaran

Perseroan membentuk Tim WBS yang mengelola seluruh pengaduan laporan WBS yang terdiri dari:

1. Kepala Internal Audit Division.
2. Wakil Kepala Internal Audit Division.
3. Unit WBS pada Departemen Fraud Investigation & Whistleblowing System (IWBS) di Internal Audit Division.

Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* – WBS) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistle Blowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan yang masuk selama periode 2020 berjumlah 115 pengaduan yang terdiri dari 8 (delapan) pengaduan melalui Surat/PO BOX, 53 (lima puluh tiga) pengaduan melalui SMS/*Handphone*/Datang Langsung/Whatsapp dan 54 (lima puluh empat) pengaduan melalui *Email/Website*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk 101 (seratus satu) pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 14 (empat belas) pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus). Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/HP/ Datang Langsung/ WA	Email/ Website	Laporan ditutup (tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administratif)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2015	7	3	9	7	0	12	1
2016	5	2	1	0	0	8	0
2017	1	0	4	0	0	5	1
2018	1	0	5	0	0	6	0
2019	5	2	3	0	1	9	0
2020	3	2	9	0	12	2	0

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2020

Laporan yg telah selesai diproses selama tahun 2020 sebanyak 2 (dua) laporan dan telah diberikan sanksi mengikuti ketentuan sanksi dan disiplin pegawai.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman. Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi belum mengatur secara khusus tentang keberagaman jenis kelamin (*gender*). Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan lebih menekankan pada profesionalisme tanpa memandang gender.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum	Hukum
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	68 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Business Administration - Master Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<i>Business Administration</i>
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	66 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi - Master of Science bidang Policy Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Ekonomi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	59 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Planologi, - Master in City Planning, - Doktor bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Teknik, Perencanaan Tata Kota
Heru Budi Hartono	Komisaris	55 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen - Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Manajemen, Keuangan
Andin Hadiyanto	Komisaris	56 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi jurusan Pembangunan - Master of Art - Doctor (S3) of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Ekonomi

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman komposisi Direksi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Pahala Nugraha Mansury*	Direktur Utama	50 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Fakultas Ekonomi - Master MBA Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang pertambangan dan penerbangan	Ekonomi, Keuangan
Nixon L. P. Napitupulu**	Plt. Direktur Utama	51 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
	Direktur Finance, Planning, and Treasury					
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Sipil
Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	47 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Hukum - Magister Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	53 Tahun	Perempuan	Sarjana Hukum bidang Perdata	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	51 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik - Master of Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik, Keuangan
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	55 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi/ Akuntansi - Gelar International Bussiness	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Bisnis
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	44 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Elektro - Gelar MBA in Finance & Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik, Keuangan

*Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

**Mulai menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dasar pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bank BTN adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Direksi No.29/DIR/HCD/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sebagaimana dalam Surat Edaran Direksi No.29/DIR/HCD/2017 Pejabat di lingkungan Bank yang wajib melaporkan LHKPN yaitu sebagai berikut:

- Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris
- Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah
- Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah

Di tahun 2020 terdapat 158 wajib lapor LHKPN di lingkungan Bank BTN dan yang telah melaporkan per 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 157 wajib lapor.

Tata Kelola Unit Usaha Syariah

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan Prinsip Syariah, serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan kinerja terutama pada UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah dan berlandaskan kepada lima prinsip dasar GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

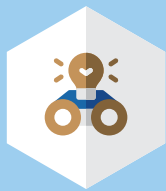
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Ketetapan Direksi No. 01/KD/DIR/PPBD/2020 Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan Tata Kelola UUS di Perseroan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi: yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas: yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. Pertanggungjawaban: yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. Profesionalisme: yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. Kewajaran: yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundangundangan yang berlaku.

Visi dan Misi UUS



Visi

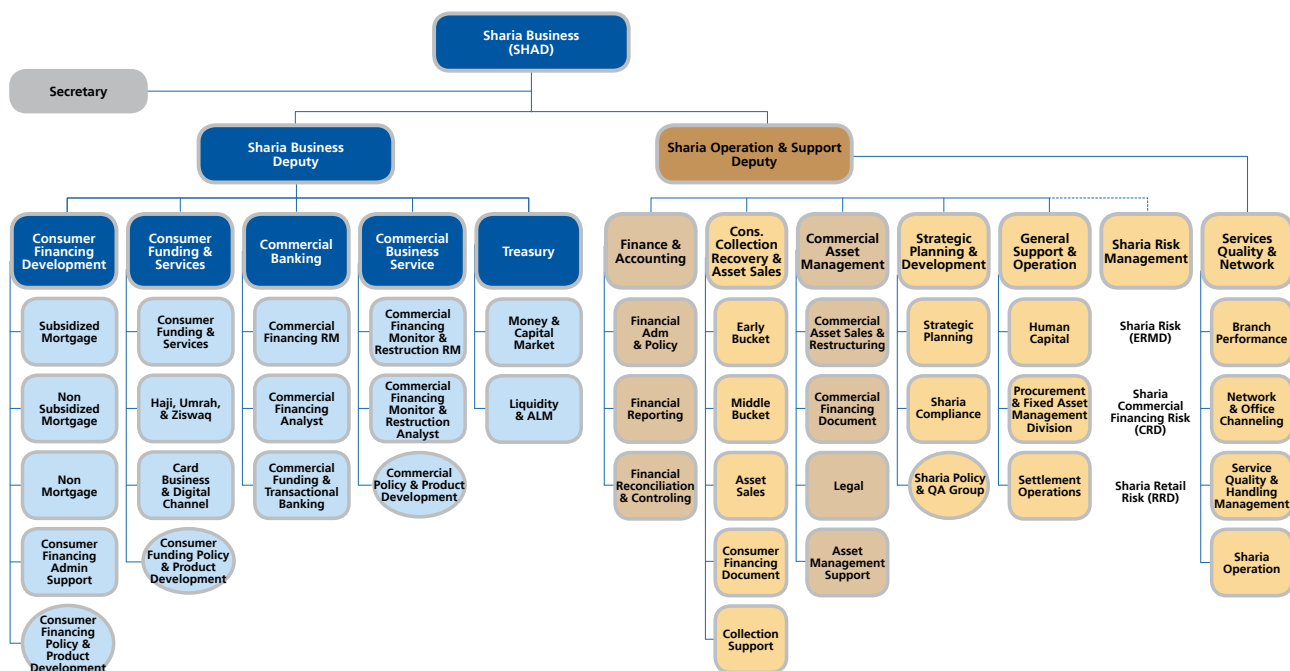
“
Menjadi Bank Syariah
yang terdepan
dalam pembiayaan
perumahan dan
industri kaitannya.
”



Misi

- 01 Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah.
- 02 Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*.
- 03 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi terkini.
- 04 Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Struktur Unit Usaha Syariah



Dalam menjalankan UUS, Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan dikelola oleh Direktur UUS dan dibentuk 1 (satu) Divisi di Kantor Pusat dengan penyediaan jaringan layanan berupa Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), Kantor Kas Syariah (KKS) dan Syariah Office Channeling.

Dewan Pengawas Syariah

Informasi terkait Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip

Sepanjang tahun 2020 DPS telah mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah. Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS yang juga turut dihadiri oleh manajemen UUS Bank BTN.

Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Pada periode tahun 2020 DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Semesteran kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2019 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 129/DIR/SHAD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020
2. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2020 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 582/DIR/SHAD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas Syariah

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank terdiri dari gaji dan bonus/tantiem.
2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota DPS, jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

No.	Jenis	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2020)	
		Orang	Jutaan Rp
1.	Remunerasi	2	893
2.	Fasilitas Lainnya	-	-
	a. Yang dapat dimiliki		
	b. Yang tidak dapat dimiliki		

Jumlah anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran penghasilan adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
1.	Di atas Rp 2 miliar	-
2.	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	-
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	2 orang
4.	Rp 500 juta ke bawah	-

Direktur Unit Usaha Syariah

Peranan Direktur UUS

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur UUS yang bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha UUS Perseroan pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip GCG antara lain dilakukan melalui perencanaan manajemen risiko syariah, menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, temuan audit internal dan auditor eksternal.

Kriteria Direktur UUS

Direktur UUS Perseroan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 44 menyebutkan bahwa Direktur UUS wajib memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS. Sedangkan Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa Calon Direktur UUS wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Bank BTN.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Bank BTN.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal

UUS Bank BTN telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Bank BTN di tahun 2020 melalui *homepage* (www.btn.co.id) dan beberapa surat kabar. Adapun Laporan dan Hasil *Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* UUS BTN Tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 536/S/SHAD/SPDD/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

Daftar Konsultan dan Penasihat UUS

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS Bank BTN dengan konsultan jasa terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS Bank BTN, sepanjang tahun 2020 pada UUS Bank BTN tidak melakukan kerjasama dengan konsultan.

Laporan Penyimpangan Internal UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS Bank BTN yang mempengaruhi kondisi kinerja UUS bank BTN secara signifikan, UUS Bank BTN melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2020, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	4	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	2	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Monitoring Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2020, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Bank BTN dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	15	-
Dalam proses penyelesaian	4	21
Total	19	21

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada Bank BTN (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah maupun total pendapatan yang diperoleh selama tahun 2020 (dalam satuan angka penuh Rupiah), adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2020
1	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	2.110.881
2.	Penerimaan Dana Kebajikan	
a.	Infaq dan sedekah	-
b.	Pengembalian dana kebajikan produktif	
c.	Denda; dan	250.000
d.	Penerimaan non halal	7.417.064.833
	Total Penerimaan	7.417.314.833
3.	Penggunaan Dana Kebajikan	
a.	Dana Kebajikan Produktif	
b.	Sumbangan	
c.	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	6.756.695.711
	Total Penggunaan	6.756.695.711
	Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan atas Penggunaan	660.619.122
	Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode	662.730.003

Melakukan Self Assessment GCG UUS Tahun Buku 2020

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, prudent dan tangguh, Unit Usaha Syariah BTN sebagai salah satu entitas yang mengelola kegiatan usaha secara syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS Bank BTN telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.

Hasil penilaian *self assessment* GCG UUS Tahun Buku 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	0,35	2,00	0,70
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0,20	1,00	0,20
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0,10	2,00	0,20

No.	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembayaran inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	0,10	2,00	0,20
5.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	0,25	1,00	0,25
Total Nilai Komposit		1,00		1,55
Kriteria Angka			2	
Predikat			Baik	

Sampai pada Laporan Tahunan ini diterbitkan hasil penilaian *self assessment* GCG UUS masih dalam proses pengesahan.

Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan melalui Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Direktur UUS dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 Desember 2020 guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) BTN baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Bank telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Pelaporan Risk Management Unit Usaha Syariah

Pada periode tahun 2020 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2019 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 68/SHAD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020
- 2) Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2020 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 452/SHAD/IV/2020 tanggal 21 April 2020
- 3) Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2020 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 803/SHAD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020
- 4) Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2020 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 1036/RMU/SHAD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk *risk management* tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun di tambahkan 2 jenis risiko yaitu:

a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Pegawai Divisi Syariah (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Bank menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS).

Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil dimana Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan hasil assessment dengan parameter/indikator yang digunakan adalah komposisi dana pihak ketiga, Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan dan perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator yang digunakan Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) mengelola atas Risiko Imbal Hasil.

Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka Syariah Division (SHAD) dalam hal ini Treasury Department melakukan pengelolaan kebijakan terkait special margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini Commercial Business Department dan Kantor Cabang Syariah.

b. Pengelolaan Risiko Investasi

Pengelolaan Risiko Investasi adalah risiko pembiayaan yang diberikan dengan nisbah Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank serta sebagai Pedoman bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Mengidentifikasi Risiko Investasi dimana Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Pengukuran Risiko Imbal Hasil menilai Risiko inheren atas Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Dari ketiga indikator ini yang digunakan Commercial Business Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi me-review kebijakan Internal Credit Rating antara Commercial Business Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan Credit Risk Division (CRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh Commercial Business Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi —

Tujuan utama *buyback* saham dan *buyback* obligasi adalah untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi subordinasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi subordinasi tersebut. Tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2020, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank —

Rencana Strategis disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Rencana Korporasi dikemas dalam bentuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang berisi perencanaan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun, sementara Rencana Bisnis diwujudkan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berjangka waktu 3 tahun.

Penyusunan RJP dan RBB dilakukan oleh Direksi dan melibatkan unit kerja dengan mekanisme *top down* yaitu Direksi memberikan arahan mengenai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dan *bottom up* yaitu penyampaian usulan, saran, dan/atau pandangan yang berasal dari unit kerja, baik Divisi, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Usulan RJP dan RBB diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, RJP dan RBB disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Dewan Komisaris, dan RBB disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan RJP dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pencapaian sasaran kerja tahunan pada RKAP dimonitor setiap bulan oleh Direksi melalui rapat *Performance Review*, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan sekali setiap bulan. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas perbankan setiap triwulan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dengan melakukan pembahasan dengan Direksi dan membuat Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran.

Dari proses *monitoring* bulanan, hasil kinerja di-review dan dievaluasi, apabila dirasa perlu untuk perubahan strategi manajemen dan rencana kerja, Direksi mengajukan usulan revisi RBB pada pertengahan tahun buku kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Lebih rinci terkait dengan Rencana Bisnis Bank dapat dilihat pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar —

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Informasi terkait penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).

Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2020. Direktur Kepatuhan melalui satuan kerja kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.

Lebih rinci terkait dengan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar dapat dilihat pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan —

Dalam hal transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta ketentuan di bidang pasar modal dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. IX.E.1 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dari sisi internal, Perseroan memiliki Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan Direksi tersendiri yang mengatur bahwa Perseroan dilarang memberikan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Perseroan juga mendokumentasikan dengan baik setiap mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat sekurang-kurangnya mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya setiap insan Perseroan menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dilakukan berdasarkan batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).

Informasi terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Agus	Branch Manager Mojokerto	Cantika Anggraini	Kredit Ringan Batara (Payroll)	100.000.000,00	Sesuai prosedur
Amtsyal Yuspin	Branch Manager Sharia Jakarta Harmoni	Sawitri Cahyaningrum	Kredit Ringan Batara (Payroll)	100.000.000,00	Sesuai prosedur
Munawar Solihin	Branch Manager Sharia Banda Aceh	Ani Komariah	Kredit Ringan Batara (Payroll)	200.000.000,00	Sesuai prosedur
Satrijo Katri Wilargo	Branch Manager Tegal	Roessilowati	Kredit Swadana	33.750.000,00	Sesuai prosedur
Ricky Rs. Pattinggi	Deputy Internal Audit Division Head	Fajar Krisna Setiawan	Kredit Swadana	25.000.000,00	Sesuai prosedur
Tb. Erik Kristiawan	Branch Manager Cibubur	Fajar Krisna Setiawan	KPA BTN Platinum Indent - FR 2 Tahun	495.647.500,00	Sesuai prosedur
		Dwi Umi Cendanawati	Kredit Ringan Batara (Payroll)	200.000.000,00	Sesuai prosedur

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian —

Selama tahun 2020, terdapat penyimpangan internal sebanyak 11 (sebelas) kasus dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) Selama Tahun 2020

Internal Fraud 1	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	0	0	38	11	1	0
Telah diselesaikan	0	0	35	6	1	0
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	0	0	3	5	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	6	4	0	0

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) —

Perseroan memiliki kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam ketentuan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan:

1. Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan
3. Memberikan informasi kepada pihak lain.

Setelah transaksi saham dilakukan maka Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Dengan adanya Kebijakan tersebut diharapkan kegiatan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) dapat dihindari.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan —

Perseroan memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, sebagaimana berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada Regulator serta dipublikasikan melalui website Perseroan.
2. Laporan Keuangan Triwulanan kepada Regulator OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL) serta dipublikasikan melalui surat kabar dan *website* Perseroan.
3. Laporan Tahunan yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada Regulator dan Pemegang Saham serta dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan yang di antaranya adalah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Visi Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan internal terkait tata kelola seperti Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite yang juga dipublikasikan melalui *website* Perseroan.
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantor dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan *website* Perseroan agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan dipublikasikan melalui *website* Perseroan untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS			
1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply	1. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs web Perseroan. 2. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 12 Maret 2020. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 2. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. 3. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. 4. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 5. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.
2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 12 Maret 2020, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.
3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (Investor Relations), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK E-reporting, yakni pada tanggal 16 Maret 2020 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.			
4.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Comply	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting</i> , <i>public expose</i> , investor meeting, Laporan Tahunan dan sebagainya.
5.	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.

No.	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
-----	-------------	--------	--------------------

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

6.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
7.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

8.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 November 2017 Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan.
9.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
10.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

12.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13.	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.

No.	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
14.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	Pada periode 2020, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut: 1. Pendidikan • S1 Teknik Mesin ITB • S2 Accounting and Finance Universitas of Birmingham UK 2. Pengalaman Kerja • Treasury Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (tahun 1992 – 1995) • Deputy General Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1995 – 1996) • General Manager (CE) Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1996 – 1997) • Wakil kepala urusan keuangan dan jasa Bank PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1998 – 1999) • General Manager (CEO) Cabang Singapore PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 1999 – 2001) • Department Head UP3 Financial Institution & Overseas Network (FION) group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2001 – 2002) • Department Head Correspondent Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2002 – 2003) • Department Head FI Credit Risk and Product Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2003 – 2006) • Departement Head Credit Recovery II group dan Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2006) • Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) setingkat Group Head untuk International Banking and Capital Market Services Group (IBCMS) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) • Group Head IBCMS Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) • Bank Mandiri Europe Ltd. (BMEL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2010 – 2013) Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.

Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

15.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 November 2017 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relations-GCG- Crossreference ASEAN CG Scorecard-SKB.
16.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.
17.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.

18.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations sebagaimana yang dapat dilihat di situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.
-----	--	--------	---

No.	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
19.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply	Pelaksanaan penerapan anti <i>fraud</i> di Perseroan diatur dengan Surat Edaran Direksi No.22/DIR/ IAD/2014 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> Strategi Anti <i>Fraud</i> Perseroan. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/ CMPD/2017.
20.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/PD/PGSD/2015 dan Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja <i>vendor</i>, rekam jejak <i>vendor</i>. Peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada <i>vendor</i> melalui rapat koordinasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja <i>vendor</i>. Pelaksanaan kebijakan seleksi <i>vendor</i> dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai <i>database vendor</i> dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/pemilihan langsung/ seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/ penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan <i>vendor</i>. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.
21.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Comply	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah: 1. Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. 2. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. 3. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Untuk tahun 2020, terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.
22.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> .	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Surat Edaran No. 21/DIR/IAD/2014 Perihal <i>Standard Operating Procedure Whistle Blowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>Whistle Blowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistleblowing System</i> dimaksud pada periode 2020 diuraikan pada bagian <i>Whistleblowing System</i> Laporan Tahunan ini.
23.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply	Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Perseroan pada Laporan Tahunan ini. Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis variabel yang ditanggguhkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dan Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Sejak tahun 2009, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2020, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko.

No.	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi			
24.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply</i>	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain situs web Perseroan seperti melalui media sosial yaitu: Youtube : Bank BTN Facebook : BankBTNCoid Twitter : @BankBTNCoid Instagram : @bankbtn LinkedIn : PT Bank Tabungan Negara Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui e-mail, conference call dan TV Pasar Modal IBCM Channel Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting Public Expose</i>.
25.	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply</i>	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris, disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi .
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Not Applicable (N/A)
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Perseroan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM). Perseroan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko Perseroan mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank BTN.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Kebijakan remunerasi Perseroan saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Perseroan melakukan pengungkapan melalui <i>website</i> Bank BTN www.btn.co.id dan memastikan tersedianya informasi paling <i>update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank BTN dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

Good Corporate Governance Assessment

Self Assessment

Perseroan melaksanakan *Self Assessment* secara berkala dalam setiap tahunnya pada akhir bulan Juni dan Desember. Standar penerapan tata kelola selain mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga telah mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.

7. Penerapan fungsi *audit ekstern*.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Informasi perkembangan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perseroan dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Hasil <i>Self Assessment</i> Tata kelola Perusahaan	2	2	2	2

Pada penilaian Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2020, hasil penilaian sendiri *self assessment* penerapan tata kelola Perusahaan sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kemudian, pada bulan Desember 2020, Perseroan kembali melaksanakan *self assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan perolehan hasil penilaian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

ANALISIS

Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/review/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, GWM, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BWMK. Komitmen bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati. Tujuan:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik, menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk Infrastruktur Tata Kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
 - a. Kecukupan transparansi laporan.
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. Perlindungan konsumen.
 - d. Obyektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit.
 - e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan dan/atau
 - f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BWMK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan analisis **Penilaian Sendiri (Self Assessment)** pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Struktur Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- a. Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
- b. Direksi telah menetapkan 5 Fokus Utama & 8 Inisiatif strategis.
- c. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Penguatan peran Direksi dengan melakukan *re-alignment* fungsi dan proses pada 8 (delapan) komite-komite dibawah Direksi yaitu: *Asset & Liability Committee*, *Credit Committee*, *Credit Policy Committee*, *Risk Management Committee*, *Business Committee*, *Transformation Steering Committee*, *Human Capital Committee*, dan *IT Steering Committee*.
- e. Dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris dibantu oleh 3 Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi) yang secara efektif melaksanakan tugasnya dan menyampaikan Laporan Pengawasan Bank secara tepat waktu.
- f. Bank BTN telah memiliki *database* Pihak Terkait yang sudah menjadi modul tambahan yang sudah diinput pada pemrosesan kredit (*iLoan*) tujuan dalam rangka untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila berhubungan dengan Pihak Terkait Bank.
- g. Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat *monitoring*. Adapun kebijakan tersebut diantaranya:
 - 1) Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap
 - (a) Surat Edaran Direksi No. 53/DE/DIR/TMO/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Pilot Project Business Improvement (BPI) Kredit Konstruksi* > Rp 10 Milyar.
 - (b) Surat Edaran Direksi No. 70/SE/DIR/TMO/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Ketentuan pelaksanaan *Roll Out* Kredit Konstruksi < Rp. 10 Milyar.
 - (c) Surat Edaran Direksi No. 35/SE/DIR/TMO/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 70/DIR/TMO/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Ketentuan Pelaksanaan *Roll Out Business Process Improvement (BPI) Kredit Konstruksi* ≤ 10 Milyar.
 - (d) Surat Edaran Direksi No. 63/SE/DIR/TMO/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Direksi No. 70/SE/DIR/TMO/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Ketentuan Pelaksanaan *Roll Out Business Process Improvement (BPI) Kredit Konstruksi* ≤ 10 Milyar.

- (e) Surat Edaran Direksi No. 33/SE/DIR/TPMD/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Keputusan Khusus *Pilot Project Regionalisasi Commercial Banking* di Wilayah.
- (f) Telah dilakukan sentralisasi pengelolaan kredit BUMN dan kredit korporasi > Rp. 500 M oleh CSTD, serta sentralisasi pengelolaan group debitur non BUMN > Rp. 100 M oleh CMBD.
- (g) Melakukan upaya peningkatan kinerja di bidang perkreditan dengan melakukan ekspansi secara *prudent* sesuai dengan prinsip kehati-hatian disertai dengan strategi bisnis yang efektif dengan cara : Mengaktifkan peran Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Pembagian fungsi Bisnis dan *Risk* pada Komite Kredit, memperkuat fungsi dan peran Komite Kredit dalam pemberian kredit dan restrukturisasi antara lain melibatkan *Legal Division* (LGD) dan *Compliance and Governance Division* (CMGD) yang didahului dengan pra RKK dan perbaikan bisnis proses dan penguatan kontrol berjenjang melalui implementasi *Business Process Improvement* (BPI).
- (h) Bank telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*. Dalam pelaksanaannya Komite Kebijakan Kredit melakukan Pra RKK dan RKK yang diantaranya mengenai:
- (1) Pengambilan Keputusan
 - Rapat Komite Kredit/Pembiayaan Komersial harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara.
 - Tidak terdapat eskalasi keputusan Kredit atau Pembiayaan Komersial ke tingkat pemutus yang lebih tinggi apabila musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan
 - (2) Kewajiban untuk melakukan rapat dan tidak boleh sirkuler
Pengambilan keputusan oleh Komite Kredit/Pembiayaan Komersial dilakukan dalam bentuk rapat bersama yang disebut Rapat Komite Kredit (RKK) baik untuk Kredit/Pembiayaan Komersial tingkat Direksi, Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
 - (3) Keterlibatan LGD dan CMGD.
Materi kredit yang akan dibahas dalam Pra Rapat Komite Kredit/Pembiayaan Komersial, wajib disampaikan oleh Unit Bisnis dan/atau Unit Risiko kepada Unit *Legal* dan Unit Kepatuhan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Pra Rapat Komite Kredit/Pembiayaan Komersial.
 - (4) Peserta yang ikut dalam pelaksanaan Pra RKK dan RKK:
 - Pra rapat Komite Kredit (RKK)

	Unit Bisnis	Unit Risk	Unit Legal	Unit Kepatuhan
Komite A	✓	✓	✓	✓
Komite B	✓	✓	✓	✓
Komite C	✓	✓	Hadir/Checklist	Hadir/Checklist
Komite D	✓	✓	Hadir/Checklist	Hadir/Checklist

- Rapat Komite Kredit (RKK)

Voting Member	Non Voting Member
Komite Kredit A1 (Rapat Direksi) - 3 anggota Direktur Fungsi <i>Business</i> - 4 anggota Direktur Fungsi <i>Risk</i>	Direktur yang membawahi Kepatuhan
Komite Kredit A2 (5 Direktur) - 2 anggota Direktur Fungsi <i>Business</i> (salah satunya adalah Direktur Pengusul Kredit) - 3 anggota Direktur Fungsi <i>Risk</i>	
Komite Kredit A3 (4 Direktur) - 2 anggota Direktur Fungsi <i>Business</i> (salah satunya adalah Direktur Pengusul Kredit) - 2 anggota Direktur Fungsi <i>Risk</i>	
Komite Kredit A4 (2 Direktur) - 1 anggota Direktur Fungsi <i>Business</i> - 1 anggota Direktur Fungsi <i>Risk</i>	Direktur yang membawahi Kepatuhan atau dapat diwakilkan oleh Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan
Komite Kredit B (Divisi) - Kepala Divisi Fungsi <i>Business</i> sesuai segmen - Kepala Divisi Fungsi <i>Risk</i> Kredit Komersial	
Komite Kredit C (Kantor Wilayah) - Kepala Kantor Wilayah/Area Head sebagai Fungsi <i>Business</i> - Kepala Unit Risiko Kredit Komersial di Kantor Wilayah sebagai Fungsi <i>Risk</i>	
Komite Kredit D1 (Kantor Cabang Kelas 1) - Kepala Cabang sebagai Fungsi <i>Business</i> - Kepala Unit Risiko Kredit Komersial di Kantor Cabang sebagai Fungsi <i>Risk</i>	

- Pra RKK

Voting Member	Non Voting Member
Komite Kredit D2 (Kantor Cabang Kelas 2) - Kepala Cabang sebagai Fungsi <i>Business</i> - Kepala Unit Risiko Kredit Komersial di Kantor Cabang sebagai Fungsi <i>Risk</i>	
Komite Kredit D3 (Kantor Cabang Kelas 3) - Kepala Cabang sebagai Fungsi <i>Business</i> - Kepala Unit Risiko Kredit Komersial di Kantor Cabang sebagai Fungsi <i>Risk</i>	

- (i) Perbedaan dari mekanisme sebelumnya
- (1) Terdapat mekanisme Pra RKK, dalam rangka koordinasi dan pembahasan permohonan kredit atau pembiayaan dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan unit terkait sebelum dilakukan pembahasan pada Rapat Komite Kredit atau Pembiayaan Komersial.
 - (2) Sebelumnya terdapat eskalasi keputusan pada Kantor Cabang dan Kantor Wilayah apabila tidak tercapai kesepakatan antara unit *risk* dan unit bisnis.
 - (3) BCRH dan RCRH telah bertindak sebagai pemutus kredit bersama-sama dengan *pairing four eyes* pada Kantor Cabang (BM) dan Kantor Wilayah (RO Head), sebelumnya hanya bertindak sebagai pengusul.
 - (4) Terdapat pembagian fungsi bisnis dan *risk* pada anggota *voting member* (terlampir), yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan *four eyes principles* serta proses *check and balance* antara unit bisnis selaku inisiator dengan *credit risk management* selaku unit mitigasi risiko.
- 2) Perbaikan *Business Process Improvement* (BPI) konsumen dan komersial.
- a) Kredit Komersial
- (1) Untuk sistem kredit langsung/*cash loan* telah menggunakan *system i-loan commercial* sebagai salah satu langkah dalam memiliki database yang lengkap sesuai dengan peraturan OJK sedangkan untuk *non cash loan* garansi bank masih dalam tahap pengembangan sistem.
 - (2) Dalam melakukan penilaian kualitas kredit melalui kertas kerja analisa 3 Pilar, saat ini prosesnya dapat dilakukan dengan aplikasi *iCremo* dan hasil penilaian 3 Pilar langsung terhubung dengan sistem *core banking*.
 - (3) Sesuai Memo CMBD No. 43/M/CMBD/SSD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal penyampaian perubahan ketentuan pencairan pertama kredit konstruksi BTN. Dalam hal ini kebijakan baru terkait pencairan pertama, yaitu pencairan pertama dilakukan dengan metode *reimbursement* untuk debitur baru (*New to Bank*), sedangkan untuk debitur baru yang memiliki grup usaha dengan reputasi baik:
 - (a) Pencairan pertama dilakukan langsung ke rekening kontraktor bersamaan dengan *share* debitur,
 - (b) Dapat dilakukan ke rekening debitur dengan adanya *advance payment bond* yang diterbitkan Bank BUMN.
 - (4) Melalui Memo TPMD No. 147/M/TPMD/CBBT/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Penyampaian *Workflow* Pencairan Kredit BUMN kelolaan CSTD dengan Peran *Credit Operation Support*, sehubungan dengan peran *Credit Operation Division* (COD) dalam 3 pilar *kredit* (sebagai unit operation) maka pencairan kredit dilakukan oleh *Unit Credit Operation Support* (COS).
 - (5) Implementasi pelaksanaan regionalisasi pengelolaan kredit komersial melalui *Commercial Banking Center* (CBC) yang memiliki fungsi 3 (tiga) pilar dengan supervisi sebagai berikut:
 - (a) Fungsi *business* yang disupervisi oleh CBC Head dan merupakan organ *monoline* CMBD.
 - (b) Fungsi *commercial risk* yang disupervisi oleh *Commercial Risk Head* dan merupakan organ *monoline Commercial Credit Risk Division* (CRD)
 - (c) Fungsi *credit operation* yang disupervisi oleh *Regional Credit Operation* di *Regional Office* dan merupakan organ *monoline Credit Operations Division* (COD).
- b) Kredit Konsumer
- Perbaikan kebijakan pencairan kredit konsumen diantaranya sesuai Memo TPMD No. 73/M/TPMD/CBST/VIII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis *Pilot Project* Pencairan Otomatis Kredit Konsumer, pencairan otomatis merupakan bagian dari inisiatif *Business Process Improvement* kredit konsumen. Berdasarkan Memo TPMD No. 48/M/TPMD/CBST/IV/2020 dan COD No. 87/M/COD/SLPC/IV/2020 tanggal 27 April 2020, sudah disetujui untuk dilakukan *pilot project* otomasi pencairan kredit konsumen di Kantor Cabang Jakarta Harmoni dan Kantor Cabang Bekasi. Pencairan otomatis akan dilakukan untuk produk KPR/KPA *Ready Stock*, pencairan pertama KPR/KPA *Indent* dan *Equity Loan*.
- 3) *Monitoring* Penyelesaian
- (1) Bank telah melakukan perubahan ketentuan terkait pelaksanaan penyelesaian kredit komersial yang tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 37/SE/DIR/CAMD/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penyelamatan Kredit Komersial yang bertujuan mempermudah kontrol dan monitoring serta pemetaan tanggung jawab dan wewenang masing-masing unit terkait dengan proses penyelesaian kredit komersial yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian Bank dan *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun kebijakan penyelesaian kredit mencakup pelunasan kredit dengan pemberian keringanan tunggakan bunga dan/atau denda, pelunasan bertahap, alih debitur, penebusan agunan, subrogasi, *cessie*, penjualan bersama terhadap objek agunan, penjualan agunan benda bergerak, penjualan agunan kredit dengan eksekusi lelang Hak Tanggungan atau Fidusia, pengadilan negeri, upaya hukum terhadap jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan dan yang mengatur kepailitan.
 - (2) Bank telah menetapkan kebijakan terkait pedoman restrukturisasi kredit pola PUST sesuai memo No. 206/M/CCD/MB/III/2018. Untuk meningkatkan kualitas kredit pasca restrukturisasi kredit dengan skema PUST+Diskon (Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan+diskon bunga/denda) yang mengakibatkan jumlah angsuran debitur, maka debitur wajib memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - (a) Penetapan jumlah angsuran dari angsuran awal maksimal 20%
 - (b) RPC dapat mengcover angsuran setelah restrukturisasi

- (3) Bank sedang melakukan perubahan Surat Edaran Direksi nomor 54/DIR/CCRD/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Restrukturisasi Kredit Konsumer sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran Direksi nomor 48/DIR/CCD/2017 tanggal 31 Agustus 2017, diantaranya:
 - (a) Kebijakan *grace period* hanya diberikan kepada debitur yang mengalami atau terdampak bencana alam setelah ada program stimulus dari regulator.
 - (b) Penambahan kebijakan perihal syarat umum restrukturisasi kredit konsumer berupa permohonan yang disampaikan dalam bentuk tertulis dari debitur atau ahli waris debitur (dalam hal debitur ditolak klaim asuransi jiwa).
 - (c) Penambahan kebijakan dalam hal *Retail Risk* ikut menjadi pemroses/pemutus kredit yang akan direstrukturisasi, maka *risk review* terhadap kredit tersebut dilakukan oleh unit *Commercial Risk*.
- (4) Implementasi pelaksanaan *Pilot Project* penyelesaian kredit konsumer pada Kantor Cabang Konvensional yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah I dan Kantor Wilayah II, dimana ditetapkan *Recovery Asset Sales* merupakan organ monoline Kantor Wilayah dibawah *Regional Consumer Collection & Asset Sales Head*.
- (5) Bank telah memiliki kebijakan Surat Edaran Direksi No. 12/SE/DIR/PPBD/2020 tanggal 2 April 2020 perihal Kebijakan Bagi Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 19* dan SK Direksi No. 6/SK/DIR/CRSD/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Kredit Konsumer Yang Terdampak *Corona Virus Disease 19*.
- h. Berdasarkan Program Pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bank BTN memenuhi kriteria untuk menjadi Bank Peserta yang akan mendapatkan penempatan Dana Pemerintah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 dengan Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut Bank BTN telah menyusun kebijakan internal terkait pelaksanaannya, diantaranya:
 - 1) Surat Keputusan No. 22/SK/DIR/PPBD/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Alur Kerja Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
 - 2) Surat Edaran Direksi No. 34/E/DIR/PPBD/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Pemberian Subsidi bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
 - 3) Surat keputusan No. 17/SK/DIR/SMBD/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Penjaminan Kredit Modal Kerja Program Pemulihan Nasional (PEN)
 - 4) Surat Edaran Direksi No. 31/SE/DIR/SMBD/2020 tanggal Perihal Penjaminan Kredit Modal Kerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- i. Kebijakan tata kelola SDM yang selaras dengan rencana ekspansi bisnis.
 - 1) Untuk mendukung ekspansi bisnis sebagaimana ditetapkan dalam RBB, pemenuhan SDM pada unit kerja kredit komersial disesuaikan dengan perhitungan WLA (*workload analysis*) posisi 31 Desember 2020 telah mencapai 96%.
 - 2) Bank telah memiliki ketentuan *job grade*, promosi, mutasi, dan golongan jabatan/pangkat. Penyesuaian *gap level* pegawai ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program promosi dan mutasi pegawai yang sampai dengan periode Januari - Desember 2020 telah diberikan promosi kepada 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) pegawai.
 - 3) Direktur Supervisi UUS telah ditetapkan melalui Memo CSD No.166/M/CSD/IR/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Perubahan Struktur Organisasi dan Supervisi Divisi.

2. Faktor-faktor Negatif

Pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia menunjuk dan menetapkan Bapak Pahala Nugraha Mansury (Direktur Utama Bank BTN) sebagai Wakil Menteri I BUMN, maka mulai tanggal 23 Desember 2020 jabatan Bapak Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama Bank BTN telah berakhir dan Jabatan Direktur Utama lowong.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia terkait penunjukan Bapak Pahala N. Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN pada tanggal 23 Desember 2020, maka terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 jabatan Direktur Utama lowong dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 128/KOM/BTN/XII/2020, Dewan Komisaris menunjuk Bapak Nixon L. P. Napitupulu untuk menjalankan pekerjaan sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengisian jabatan Direktur Utama.

4. Kekuatan

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.
- b. Penerapan Tata Kelola yang baik di Bank BTN didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Kepatuhan yang independen.

B. Proses Tata Kelola (Governance Process)

Proses Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Positif

- a. Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari *Internal Audit Division*, Audit Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Bank BTN.
- b. Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada tahun 2020 Direksi sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kali rapat.
- c. Komite-komite dibawah Direksi sudah melaksanakan rapat sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) kali. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - 1) *Asset & Liability Committee* sebanyak 14 kali.
 - 2) *Credit Committee* sebanyak 136 kali.
 - 3) *Credit Policy Committee* sebanyak 14 kali.
 - 4) *Risk Management Committee* sebanyak 5 kali.
 - 5) *Business Committee* sebanyak 4 kali.
 - 6) *Transformation Steering Committee* sebanyak 13 kali.
 - 7) *Human Capital Committee* sebanyak 3 kali.
 - 8) *IT Steering Committee* sebanyak 4 kali

- d. Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi dan antara Direksi dan Dewan Komisaris secara bulanan.
- e. Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada tahun 2020 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali rapat.
- f. Dewan Komisaris telah menetapkan susunan keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 119/KOM/BTN/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Posisi 31 Desember 2020 Komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat masing-masing komite sebagai berikut:
 - 1) Komite Audit sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.
 - 2) Komite Pemantau Risiko sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali.
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
- g. Melakukan upaya peningkatan kinerja di bidang perkreditan dengan melakukan ekspansi secara prudent sesuai dengan prinsip kehati-hatian disertai dengan strategi bisnis yang efektif dengan cara : Mengaktifkan peran Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Pembagian fungsi Bisnis dan *Risk* pada komite kredit, memperkuat fungsi dan peran Komite Kredit dalam pemberian kredit dan restrukturisasi antara lain melibatkan *Legal Division* dan *Compliance and Governance Division* yang didahului dengan pra RKK dan perbaikan bisnis proses dan penguatan kontrol berjenjang melalui implementasi *Business Process Improvement* (BPI).
- h. Peningkatan terlaksananya Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture*, *Performance Culture*, *Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture*.
- i. Sejak bulan Agustus 2020, Bank BTN melakukan proses sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana yang diwajibkan oleh Kementerian BUMN dengan tujuan sebagai panduan Bank untuk memberikan kerangka yang sistematis dalam menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, dan meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- j. Sejak bulan Mei 2020, telah dilakukan *redployment* pada struktur organisasi IAD dengan menambah fungsi *root cause analysis* dan ikhtisar lintas divisi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan audit yang bersifat strategis, berulang dan/atau memerlukan tindak lanjut lintas Divisi. Disamping itu pada pertengahan Desember 2020 telah dilakukan *kick off pilot project* organisasi *monoline* IAD yang merupakan perpanjangan tangan IAD dengan tanggung jawab melakukan pengawasan atas pengendalian internal secara *day to day* di setiap Kantor Wilayah (*Regional Audit & Control Supervisory*), Kantor Cabang (*Branch Control*) dan Organisasi *Monoline* Bank BTN seperti CBC (*Monoline Business Control*). Sesuai rencana organisasi *monoline* IAD tersebut akan *roll out* secara nasional pada triwulan 1 tahun 2021.
- k. Melakukan *launching* WBS terbaru yang disebut dengan WBS SIIPS pada tanggal 2 Juni 2020 dengan menggunakan jasa pihak ketiga independen yaitu *Deloitte Consultant* dan sudah disosialisasikan ke internal maupun eksternal termasuk mitra kerja dan nasabah.
- l. Bank telah memiliki monitoring *tools* RA RT bulanan berupa *dashboard* termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi atas hasil analisis yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi. Bank juga telah merumuskan RA RT Tahun 2021 melalui *workshop Best Practice for Determining Risk Appetite, Operasional Risk Framework, IT and Cyber Risk* yang diikuti oleh Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020.
- m. Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit belum dilakukan secara komprehensif berdasarkan hasil *SWOT Analysis* dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
- n. Meningkatkan monitoring dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen kredit sesuai SLA yang telah ditetapkan Bank, diantaranya:
 - 1) Luar Ambang Toleransi (LAT) termasuk dalam KPI KC dan Kanwil (bobot 5% pada 2020).
 - 2) Kerjasama Pokja dengan BPN.
 - 3) Kerjasama dengan INI dan IPPAT.
 - 4) Pembinaan Notaris (termasuk *Freeze*).
 - 5) Pembinaan kepada Developer.
 - 6) Monitor kinerja penyelesaian Dokpok (*Balance Score Card*) secara harian.
 - 7) *Profiling* LAT Sertifikat .
 - 8) Denda atas keterlambatan penyerahan Dokumen Pokok.
 - 9) Alokasi Anggaran untuk penyelesaian dokumen LAT.
 - 10) Pengembangan aplikasi iDocs untuk Reporting Dokumen Pokok Kredit yang akan jatuh tempo.
 - 11) Implementasi aplikasi berbasis WEB untuk kerja sama dan standarisasi ketentuan serta evaluasi penilaian kerja rekanan pihak ketiga penunjang operasional kredit.
 - 12) Perubahan struktur organisasi CAMD 1 ditambah departemen penyelesaian dokumen penyelesaian kredit komersial sebagai percepatan *recovery*.
 - 13) Perbaikan struktur organisasi yaitu CAMD 1 dan CAMD 2 dengan kriteria dan ketentuan tertentu.
- o. Meningkatkan jumlah dan kapasitas kemampuan SDM untuk merealisasikan ekspansi bisnis guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RBB diantaranya:
 - 1) Penyelenggaraan *Workshop Managing People & Processes for Boosting Performance* oleh Dewan Komisaris Bank BTN yang disampaikan kepada seluruh Kepala Divisi dan Kepala Cabang.
 - 2) Telah dilakukan penyusunan silabus kredit (portofolio kredit korporasi, investasi dan perumahan, *cash flow*).
 - 3) Pendidikan Kredit Korporasi dilakukan secara rutin.
 - 4) Pelatihan *loan academy* bagi *assisten* RM dan *Commercial* RM mengenai silabus struktur kredit baik KMK dan KI.
 - 5) Bank telah menggunakan media digital terhadap seluruh ketentuan kepada pegawai.
 - 6) Bank telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *gap analysis* dengan divisi yang menjadi *subject matter expert* mengenai pengayaan silabus dan modul beserta proses *delivery* dan penggunaan *eChannel* menjadi lebih masif.

- p. Penempatan pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan minimum *requirements* dilakukan dengan penyempurnaan *human capital information system* melalui aplikasi i-HCIS dan i-BES. Dengan aplikasi tersebut, human capital dapat me-review riwayat penempatan pegawai, riwayat penilaian pegawai (KPI pegawai), pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti, sertifikasi yang telah dimiliki oleh pegawai, termasuk sanksi yang pernah diberikan, sehingga human capital memiliki informasi yang memadai dalam melakukan penempatan, rotasi dan promosi pegawai.
- q. Dalam rangka mendukung visi untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara, Bank BTN melakukan penguatan kapasitas dan sistem organisasi dengan penguatan peran pemimpin. Bank BTN membekali para pimpinan untuk membantu mengeksekusi 5 (lima) fokus BTN tahun 2020/2021 dengan membentuk *performance culture*, melakukan monitoring yang meningkatkan *engagement team*, konsisten melakukan perilaku utama serta terus menerus melakukan perbaikan yaitu dengan mengimplementasikan konsep disiplin eksekusi 4DX.

2. Faktor-faktor Negatif

Secara umum pengendalian internal sudah memadai namun perlu penyempurnaan mengingat masih adanya temuan-temuan audit pada operasional Bank.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) yang perlu ditingkatkan dan supervisi yang belum optimal.

4. Kekuatan

- Peningkatan Implementasi Budaya Perusahaan untuk mendukung Bank BTN dengan berlandaskan 5 Nilai dan 10 Perilaku Utama SIIPS yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance Culture* dan *Learning Culture*.
- Penetapan dan Penguatan Fondasi pengembangan *Human Capital* yaitu yaitu *Employee Value Proposition* (EVP) dan *Culture* yang didasarkan *core value* AKHLAK untuk mewujudkan Bank BTN sebagai *Home of Indonesia's Best Talent*.
- Bank BTN berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki pengelolaan operasional bank, baik melalui pemenuhan kebutuhan jumlah, kompetensi, kemampuan supervisi sumber daya manusia (SDM) serta perbaikan proses bisnis Bank (*Business Process Improvement*).
- Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal, tersebut melalui: *training*/sosialisasi, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.

C. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- Bank melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RBB 2020-2022 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
- Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2020 (*Unaudit*) lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam milliar)

No	Kinerja	Posisi Desember 2019	Posisi Desember 2020	Pencapaian terhadap RKAP
1	Aset	311.777	362.230	111,51%
2	Kredit	255.825	260.121	97,32%
3	DPK	225.401	279.135	114,26%
4	Laba	209	1.615	148,77%
5	Kualitas Kredit	4,78%	4,24 (<i>gross</i>)	112,73%

- c. Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2020

- Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2020 adalah 19,32%, sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2020 sebesar 19,32%, sesuai ketentuan regulator adalah minimal 9,18%. Dengan demikian maka rasio kecukupan modal Bank BTN masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.
 - Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
 - Non Performing Loan* (NPL) adalah 4,24 % (*gross*) dan 2,05% (*nett*).
 - Giro Wajib minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional adalah 3,16% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 3%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing adalah 4,63% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.
- d. Penyelesaian Dokumen Luar Ambang Toleransi (LAT) sudah mengalami penurunan (perbaikan) namun masih belum memenuhi target penyelesaian.

Tahun	Jumlah LAT	Δ penurunan (perbaikan)
2019	188.395	24.095
2020	135.300	

2. Faktor-faktor Negatif

- a. Permasalahan hukum pada Tahun 2020 sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) kasus yang terdiri dari 461 (empat ratus enam puluh satu) kasus perdata, 292 (dua ratus sembilan puluh tiga) kasus pidana dan 2 (dua) kasus hubungan industrial, meningkat dari tahun 2019 yang terdiri dari 568 (lima ratus enam puluh delapan) kasus yang terdiri dari 358 (tiga ratus lima puluh delapan) kasus pidana dan 206 (dua ratus enam) kasus perdata dan 4 (empat) kasus hubungan industrial.
- b. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan pengenaan sanksi berupa teguran maupun denda oleh regulator sebesar Rp. 320.217.000 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 291.830.600, sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan *risk awareness* pada segenap lini bisnis dan operasional.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)

Pertumbuhan Bank terkendala dengan adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan efektivitas dalam pencapaian target dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

4. Kekuatan

- a. Bank BTN telah menetapkan arah jangka panjang yaitu menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara yang akan dicapai melalui implementasi lima fokus strategi jangka Panjang.
- b. Bank BTN menetapkan lima fokus strategi Bank BTN diantaranya:
 - 1) Memperkuat budaya kerja
 - 2) Pertumbuhan yang berkualitas
 - 3) Membangun bisnis model baru
 - 4) Automasi dan digitalisasi proses bisnis
 - 5) *Partnership* dengan berbagai *stakeholder*
- c. Bank memiliki *core business* yang spesifik dan fokus pada perumahan dengan inisiatif:
 - 1) Strategi Pengembangan Bisnis Kredit Konsumer dan Komersial
 - a. Fokus pada kredit perumahan serta mengembangkan personal loan dan kredit segmen korporasi
 - b. Kerjasama *stakeholder* untuk mengembangkan *affordable housing*
 - c. Digitalisasi dan otomatisasi proses
 - d. Strategi pengembangan CASA
 - e. Mengembangkan pengelolaan dana pemerintah dan lembaga
 - f. Rekomposisi dana mahal (Deposito dan *Wholesale*)
 - 2) Penguatan SDM dan Organisasi
 - a) Memperkuat penerapan budaya kerja SIIPS (Sinergi, Integritas, Inovasi, Profesionalisme dan Spirit Mencapai Keunggulan) dan memperkuat penerapan budaya yang didasarkan *core value* AKHLAK untuk mewujudkan Bank BTN sebagai *Home of Indonesia's Best Talent*.
 - b) Memperkuat *building block* bidang SDM
 - c) Rencana Penguatan Struktur Organisasi
 - 3) Penguatan Infrastruktur
 - a) Penguatan infrastruktur IT dan Kapabilitas data *Analytic*
 - b) Penguatan pilar-pilar tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dengan menerapkan *Governance, Risk & Compliance* secara terintegrasi.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2020, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD)

Rating GCG - Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
 - a. *Self Assessment*; dan
 - b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Kriteria Penilaian

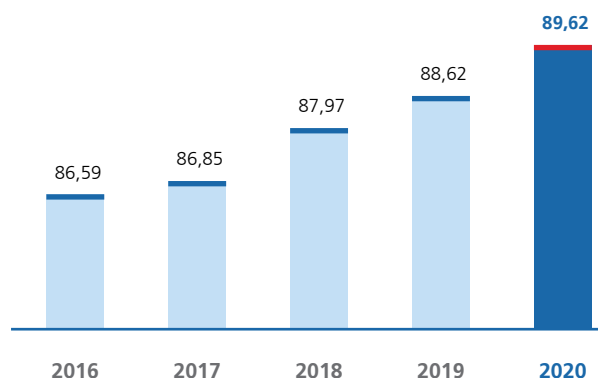
Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2020 sebesar 89.62 dengan predikat "Sangat Terpercaya". Adapun hasil penilaian CGPI selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

Rekomendasi	Tindak lanjut
Struktur Tata Kelola	
Bank BTN perlu memperkuat struktur permodalan perusahaan sesuai dengan aturan serta untuk perluasan kinerja dan mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.	Sebagai upaya peningkatan permodalan, Perseroan telah mengakomodasi akses permodalan melalui <i>right issue</i> yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2022. Direncanakan akan pada awal tahun 2021 akan dilakukan pembahasan usulan Rencana Permodalan BTN 2021-2025 kepada Kementerian BUMN.
Bank BTN perlu mengakui dan menetapkan secara detil mengenai hak-hak dan kewajiban Pemegang Saham, baik Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Minoritas diantaranya dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG Perseroan.	Dalam RUPS, seluruh pemegang saham yang hadir berhak memberikan suara untuk agenda pemilihan.
Bank BTN perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman <i>gender</i> di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris.	Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan ketentuan Pemegang Saham dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan keberagaman dari sisi independensi, keahlian/Pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin serta mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.
Bank BTN perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.	Perseroan telah mencanangkan transformasi yang didukung oleh pengembangan model operasi baru yang mencakup: 1. <i>Business Process Improvement</i> . 2. <i>Network & Distribution Design</i> . 3. Menyempurnakan organisasi design seperti meningkatkan peran <i>risk management</i> dan peningkatan kapasitas human capital.
Bank BTN perlu menetapkan pembagian tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris berdasarkan pada latar belakang pengalaman dan kompetensi anggota Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan pembagian tugas Direksi, serta dilakukan evaluasi secara berkala.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi termasuk di dalamnya mengatur terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait pada pembagian tugas Direksi.
Proses Tata Kelola	
Bank BTN perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait mekanisme pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Perseroan senantiasa telah menyempurnakan pengembangan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Bank BTN perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengendalian internal serta melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya secara berkala	Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (<i>risk control</i>) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Bank BTN perlu memutakhirkan kebijakan dan sistem manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi sarana pendukung utama aktivitas bisnis Perusahaan.	Perseroan telah berupaya melakukan pemutakhiran kebijakan dan sistem manajemen risiko.
Bank BTN perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku.	Perseroan telah melakukan pengembangan dan pemutakhiran kebijakan dan pedoman pengungkapan keterbukaan informasi perusahaan.
Bank BTN perlu mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mendukung pencapaian strategi Perusahaan dan menjadi keunggulan bersaing di Perusahaan.	Perseroan telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
Bank BTN perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan berbasis bakat (<i>talent</i>) dengan meningkatkan kualitas kompetensi personal SDM serta meningkatkan jabatan fungsional yang sudah dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi untuk mendukung strategi bisnis perusahaan.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi sumber daya manusia secara integrasi melalui IBES dan TANIA.
Bank BTN perlu mengembangkan sistem dan mekanisme operasional yang unggul (<i>operational excellence</i>) yang dapat mendukung keunggulan bersaing Perusahaan agar dapat tumbuh berkelanjutan.	Perseroan telah mengembangkan sistem dan mekanisme operasional yang unggul melalui penerapan program budaya kerja.

Rekomendasi	Tindak lanjut
Bank BTN perlu mengembangkan standarisasi terhadap produk/jasa dan sistem manajemen/kerja berdasarkan standarisasi nasional (seperti SNI) dan global (seperti ISO) maupun sektoral (Basel).	Perseroan sudah mengembangkan standarisasi seperti ISO 90001 : 2015
Bank BTN perlu meningkatkan penciptaan budaya inovasi yang bernilai tambah, baik secara individual dan pada tingkat perusahaan seperti halnya inovasi yang bersifat quantum leap/breakthrough untuk Perusahaan.	Perseroan senantiasa memperkuat penerapan budaya kerja SIIPS (Sinergi, Integritas, Inovasi, Profesionalisme dan Spirit Mencapai Keunggulan) dan memperkuat penerapan budaya yang didasarkan <i>core value</i> AKHLAK untuk mewujudkan Bank BTN sebagai <i>Home of Indonesia's Best Talent</i> .

Hasil Tata Kelola

Dari tren kinerja keuangan Bank BTN selama 5 (lima) tahun terakhir didapati mengalami tren yang dinamis sehingga Bank BTN harus selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan <i>review</i> secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku guna mendukung strategi pertumbuhan kinerja.
Bank BTN perlu meningkatkan capaian kinerja yang melebihi sasaran dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi perusahaan guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.	Perseroan senantiasa telah meningkatkan capaian kinerja yang melebihi sasaran.
Bank BTN perlu mengembangkan tindak lanjut terhadap pengenaan denda atau sanksi administratif yang diterima dari pihak regulator diantaranya dengan meningkatkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi.	Perseroan telah berupaya mengembangkan tindak lanjut terhadap pengenaan denda atau sanksi administratif melalui peningkatan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi.
Bank BTN perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan agar tidak mempengaruhi bisnis perusahaan.	Perseroan senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses bisnis guna menghindari permasalahan hukum. Bank BTN juga memiliki unit khusus penanganan masalah hukum baik ditingkat Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
Bank BTN perlu mengoptimalkan internalisasi dan sosialisasi anti <i>fraud</i> untuk seluruh anggota perusahaan guna peningkatan kesadaran dan mencegah kasus <i>fraud</i> di perusahaan	Perseroan telah mengoptimalkan internalisasi dan sosialisasi anti <i>fraud</i> untuk seluruh karyawan melalui berbagai media.

Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Kriteria Penilaian

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard meliputi:

1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

Pihak yang Melakukan Assessment

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan Domestic Ranking Body (DRB) dan Corporate Governance (CG) Expert untuk melakukan penilaian/assessment berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

Skor Penilaian

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT.RSM Indonesia) tahun 2019 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 9 Juni 2020, Bank BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu "*Top 3 Indonesian PLCs*" dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori "*ASEAN Asset Class Thresholds*."

Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2019 yaitu untuk tahun buku 2018, terdapat 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class dengan nilai 97,5 ke atas.

Terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (Top 3 Indonesia PLCs) yang salah satunya adalah Bank BTN. Di samping itu Perseroan juga memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class.

Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2019 adalah sebesar 110,29. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2017 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor sebesar 4,66 poin.

Penilaian tersebut di-review berdasarkan pengungkapan praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam

laporan tahunan, *website*, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 30 Juni 2019.

Penilaian ACGS memiliki 5 aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

1. Level 1, terdiri dari 5 *part* yaitu:
 - *Part A : Rights of Shareholders*
 - *Part B : Equitable Treatment of Shareholders*
 - *Part C : Role of Stakeholders*
 - *Part D : Disclosure and Transparency*
 - *Part E : Responsibility of the Board*
2. Level 2, terdiri dari Bonus dan Penalti

Uraian Pernyataan Kepatuhan Perseroan Terhadap Pedoman Tata kelola berdasarkan ASEAN CG Scorecard sebagai berikut:

Level/ No. Item	Corporate Governance Standart Criteria	Status	Penjelasan
Level 1			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	Comply	-
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental.	Comply	-
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	Comply	-
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan.	Comply	-
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	Comply	-
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	Comply	-
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	1. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS; 2. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS; 3. Form Surat kuasa untuk pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS tidak dilampirkan dalam Pemanggilan RUPS.
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	Comply	-
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	Comply	-
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran.	Comply	-

Level/ No. Item	Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	Comply	-
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	Comply	-
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	Comply	-
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	Comply	-
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	Comply	-
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	Comply	-
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	Comply	-
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	Comply	-
D.6	Media Komunikasi	Comply	-
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	Comply	-
D.8	Situs Perseroan	Comply	-
D.9	Hubungan Investor	Comply	-
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Comply	-
E.2	Struktur Dewan	Comply	-
E.3	Proses Dewan	-	Kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum seluruhnya mencapai 75% dalam setahun
E.4	Posisi Dewan	Comply	-
E.5	Kinerja Dewan	Comply	-

Pada penilaian Bonus, beberapa item yang dapat dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

Level/ No Item	Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
Level 2			
(B) C.1.1	Perseroan mengadopsi kerangka Laporan Berkelanjutan yang berbasis internasional (seperti GRI, <i>Integrated Reporting</i> , SASB).	Comply	-
(B) E.1.2	Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan implementasi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai Tujuan Perseroan.	Comply	-
(B) E.2.2	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan <i>strategy map</i> yang ada.	Comply	-

Level/ No Item	Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
(B) E.4.1	Jumlah Komisaris Independen lebih dari jumlah seluruh Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama adalah Komisaris Independen	Comply	-
(B) E.5.1	Pengungkapan peran Dewan Komisaris dan Direksi terkait tata kelola IT	Comply	-
(B) E.6.1	Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko yang terpisah dari Dewan Komisaris.	Comply	-

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perseroan agar memastikan Pemanggilan RUPS memuat penjelasan atas masing-masing agenda yang akan dibahas pada saat RUPS	Perseroan akan mencantumkan penjelasan masing-masing agenda RUPS pada Pemanggilan RUPS Tahunan 2021.
2.	Perseroan agar memastikan pengungkapan kehadiran rapat anggota Komite Remunerasi maupun Komite Nominasi pada Laporan Tahunan.	Perseroan mengungkapkan kehadiran rapat anggota Komite Remunerasi maupun Komite Nominasi pada Laporan Tahunan 2020.
3.	Perseroan agar menggunakan Pihak Eksternal untuk pencarian kandidat dan melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Perseroan berkerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai untuk melakukan proses pencarian dan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Praktik Bad Corporate Governance —

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *Bad Corporate Governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang telah dibangun. Dalam rangka mendukung hal tersebut, sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik *bad corporate governance* yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i>	Nihil

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

loan





Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial —

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainability Development* yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, *profit* dan *planet*. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan. *Sustainability Development* menekankan pada 3 (tiga) fondasi penting, yaitu *economic growth*, *environmental protection* dan *social equity*.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perkembangan isu keberlanjutan, *International Organization for Standardization* (ISO) merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*) pada tahun 2009. Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang pelaksanaan dan pengembangan CSR dalam sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

Subyek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan ISO 26000



Sekilas penjelasan ke-7 subyek inti tersebut adalah sebagai berikut.

Tata Kelola Organisasi	:	Proses, sistem, struktur, atau mekanisme lain yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik tanggung jawab sosial.
Hak Asasi Manusia	:	Prinsip spesifik HAM adalah hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu <i>Due diligence</i> (analisis dampak keputusan dan kegiatan); situasi berisiko; menghindari persekongkolan; penanganan keluhan; hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; prinsip dan hak dasar di tempat kerja.
Praktik Ketenagakerjaan	:	Prinsip spesifik Pekerja bukanlah komoditas/tidak diperlakukan sebagai faktor produksi; berhak mendapat nafkah dari pekerjaan yang dipilihnya; berhak atas kondisi kerja yang adil dan baik. Isu Pekerjaan dan hubungan kerja; kondisi kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan SDM dan pelatihan di tempat kerja.
Lingkungan	:	Prinsip spesifik Prinsip tanggung jawab lingkungan; prinsip kehati-hatian; manajemen risiko lingkungan; pencemar membayar. Isu Pencegahan pencemaran; penggunaan sumber daya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alami.
Prosedur Operasi yang Wajar	:	Prinsip spesifik Perilaku etis. Isu Anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab; persaingan yang adil (<i>fair</i>); mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai; menghargai hak kepemilikan.
Isu Konsumen	:	Prinsip spesifik Terpenuhinya kebutuhan dasar, standar hidup layak, produk dan jasa esensial, keselamatan, informasi; menentukan pilihan; mendengarkan; kompensasi kerugian; edukasi; lingkungan yang sehat; privasi; prinsip kehati-hatian. Isu Perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen; konsumsi berkelanjutan; layanan, dukungan serta penyelesaian keluhan dan perselisihan konsumen; perlindungan data dan privasi konsumen; akses ke pelayanan dasar; pendidikan dan kesadaran.
Pelibatan dan Pengembangan Komunitas/Masyarakat	:	Prinsip spesifik Perusahaan adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas; komunitas berhak mengambil keputusan sendiri terkait komunitasnya; menghargai karakteristik komunitas; kerja sama. Isu Pelibatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ketrampilan; pengembangan dan akses ke teknologi; kemakmuran dan penciptaan pendapatan; kesehatan; investasi sosial.

Sumber: Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, 2015.

Penyusunan Laporan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan ini, selain mengacu pada ISO 26000 juga mengadopsi 2 (dua) Peraturan dari OJK serta turunannya, yaitu Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Kedua Peraturan OJK tersebut digunakan Perseroan untuk menyusun Laporan Tanggung Jawab Sosial Perseroan secara terstruktur dan sistematis. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 menjadi skema penyusunan keseluruhan Laporan Tahunan ini; sedangkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 diadopsi untuk dapat memberikan gambaran tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan Bank.

Di samping itu, Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai laporan terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan memberikan gambaran secara rinci tentang pencapaian yang telah dilakukan Perseroan dalam mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan.

Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial

Perseroan memaknai substansi CSR selain mengarah kepada upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan, baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan memiliki tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa melayani seluruh pemangku kepentingan dengan integritas yang tinggi, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Penyelenggaraan kegiatan CSR Perseroan memiliki tujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan guna mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Implementasi prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Terdapat delapan prinsip yang terimplementasi ke dalam aktivitas kegiatan usaha Perseroan, yaitu: (1) Prinsip Investasi Bertanggung Jawab, (2) Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan, (3) Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup, (4) Prinsip Tata Kelola, (5) Prinsip Komunikasi yang Informatif, (6) Prinsip Inklusif, (7) Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas dan (8) Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi. Penerapan prinsip tersebut juga terlihat dalam berbagai aktivitas CSR dan PKBL yang secara konsisten telah dijalankan Perseroan melalui pendekatan *triple bottom lines* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah:

1. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.
2. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, emiten dan perusahaan publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam.
4. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.



* Berdasarkan Peraturan OJK No. 51/POJK/03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasal 2.

Penjelasan ke-8 prinsip dasar di atas adalah sebagai berikut.

Prinsip Investasi Bertanggung Jawab	: Pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.
	Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan	: Pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing-masing lini bisnis.
Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup	: Pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.
Prinsip Tata Kelola	: Penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.
Prinsip Komunikasi yang Informatif	: Penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.
Prinsip Inklusif	: Pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.
Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas	: Memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi	: Peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.

Visi dan Misi CSR



Penerapan Sustainable Finance

Manajemen Perseroan telah mempersiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mengikuti regulasi nasional dan internasional yang berhubungan dengan *Sustainable Finance* seperti POJK No. 51/POJK No.03/2017, Surat Menteri BUMN No. S-348/MBU/DSI/11/2020 mengenai Penyusunan Program TJSI BUMN 2021, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, serta standard pelaporan berbasis *Taskforce on Climate-related and Financial Disclosure* (TCFD), *Carbon Disclosure Project* (CDP), *Global Reporting Initiative* (GRI), ISO26000 terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan Penjejak Gas Rumah Kaca mengikuti ISO14064 dan *Science Base Target initiative* (SBTi). Program-program yang dipersiapkan oleh Perseroan dalam periode 2021 ini tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing perusahaan (*sustainable competitive advantage*), tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas serta adanya penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena perusahaan telah mengelola semua

risiko (ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan lebih tepat. Dimana konsep ini sesuai dengan konsep 3P *Sustainable Finance* yang akan mendorong Perseroan lebih berperan dalam memberdayakan masyarakat (*People*), Perseroan sebagai ‘*Driver*’ dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan (*Planet*), dan Perseroan sebagai ‘*Creator*’ dalam mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan (*Profit*).

Perseroan telah merumuskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ke dalam *roadmap* penerapan Keuangan Berkelanjutan termasuk target waktu yang ingin dicapai dalam jangka 1 hingga 5 tahun (tahun 2021-2025) program-program yang dirumuskan dalam *roadmap* penerapan Keuangan Berkelanjutan Perseroan meliputi:

1. Perancangan dan penyusunan *sustainability policy and strategy* (kebijakan dan penyesuaian struktur serta peran organisasi).
2. Pembiayaan konstruksi ramah lingkungan.
3. Pelaksanaan berbagai *sustainability program and initiatives*.

Dasar Pelaksanaan CSR

Dasar pelaksanaan program CSR di Indonesia yang berfokus pada Keuangan Berkelanjutan dilandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
10. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
11. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

Selain itu, Perseroan memiliki landasan internal dalam pelaksanaan CSR, yaitu:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 34 tanggal 11 Agustus 2008.
2. Peraturan Direksi No. 6/PD/CSD/2018 tentang Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program *Corporate Social Responsibility* tanggal 18 Mei 2018.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, telah ditunjuk penanggung jawab pelaksanaan CSR yang diwujudkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah satuan kerja Corporate Secretary dengan pelaksana program-program Keuangan Berkelanjutan dipegang oleh satuan kerja terkait sebagai pemilik program.

Metoda dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Perseroan telah melakukan kajian atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas usahanya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki metoda *due diligent* untuk masing-masing penerapan tanggung jawab sosialnya.

Hak Asasi Manusia

Terkait tanggung jawab sosial bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Perseroan telah memiliki berbagai kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam hubungan Perseroan dengan para *stakeholder*. Kebijakan tersebut digunakan untuk mengembangkan pedoman-pedoman antara lain *Code of Conduct*, Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC), Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pedoman Keamanan Informasi. Kebijakan dijadikan pedoman bagi Perseroan untuk menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pemenuhan prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Perseroan telah melakukan pemantauan agar pelaksanaan kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Pemantauan tersebut dilakukan dengan melaksanakan audit internal secara berkala. Dari hasil pelaksanaan audit tersebut, Perseroan dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang belum dijalankan dengan baik di Perseroan. Dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait HAM kepada pegawai, Perseroan melaksanakan survei *engagement* pegawai setiap tahunnya. Terkait dengan nasabah, Perseroan telah melakukan survei kepuasan nasabah setiap tahunnya.

Perseroan senantiasa menerima seluruh keluhan dari para *stakeholder*. Masyarakat yang memiliki keluhan dapat mengirimkan surat pengaduan secara langsung ke Kantor Pusat Perseroan. Bagi Pegawai, Perseroan menyediakan saluran pengaduan yang dapat ditujukan langsung kepada tim *Whistleblowing System*. Sedangkan, untuk nasabah yang memiliki keluhan dapat menyalurkannya melalui Sistem Pengaduan Nasabah (SPN).

Operasi yang Adil

Dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil, Perseroan memiliki kebijakan untuk mengelola kegiatan operasionalnya agar sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Termasuk dalam lingkup tanggung jawab sosial perusahaan bidang operasi yang adil diantaranya yaitu, anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil (*fair*), mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai, menghargai hak kepemilikan, menghindari benturan kepentingan, penegakan kode etik, pengendalian gratifikasi serta pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, Perseroan telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut antara lain, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, serta Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil telah berjalan dengan baik. Pemantauan yang dilakukan antara lain, melaksanakan *Self Assessment* secara berkala dalam setiap tahunnya pada akhir bulan Juni dan Desember, mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) serta *assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Selain itu, Perseroan juga telah menyediakan saluran untuk menerima keluhan terkait adanya indikasi kecurangan dalam praktik bisnis yang merugikan Perseroan maupun *stakeholder* yaitu melalui email di btansiips@tipoffs.info.

Lingkungan Hidup

Terhadap tanggung jawab sosial terkait lingkungan, Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Perseroan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup. Perseroan berfokus kepada penyaluran kredit yang ramah lingkungan melalui Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan. Dalam pedoman tersebut terdapat persyaratan kredit yang mewajibkan adanya dokumen Upaya Kelayakan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Perseroan juga melaksanakan komitmen pelestarian lingkungan di kawasan Kantor Pusat Perseroan dengan menjalankan kegiatan penghematan energi listrik dan pengurangan emisi. Perseroan telah melakukan penyesuaian dan studi terhadap Kantor Pusat Perseroan terutama dalam mendorong terwujudnya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman serta ramah lingkungan dengan melakukan studi keamanan gedung dari bahaya kebakaran, mengembangkan sarana pengelolaan air limbah di kantor pusat, dan membuat kawasan biopori sebanyak 20 titik yang berlokasi di sekitar area Kantor Pusat (taman samping utara, taman samping selatan dan area air mancur).

Perseroan melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diharapkan akan memberikan penciptaan nilai jangka panjang (*long-term value creation*). Pemantauan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup juga dilakukan dengan melakukan penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk mengukur pencapaian kinerja lingkungan Perseroan. Perseroan senantiasa membuka diri atas laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Perseroan. Mekanisme atas pengaduan masalah terkait dengan lingkungan dapat disampaikan kepada Perseroan dengan mengirimkan laporan pengaduan terkait lingkungan sekitar Menara BTN melalui surat resmi.

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tanggung jawab sosial perusahaan juga dikaitkan dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan telah memiliki kebijakan terkait ketenagakerjaan yang dituangkan ke dalam Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman tersebut dijadikan acuan Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada pegawai dengan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pegawai serta sistem remunerasi yang sesuai. Hal ini, ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga pegawai merasa nyaman bekerja. Perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal.

Perseroan melaksanakan survei *engagement* pegawai secara berkala dalam memantau pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan juga telah menyediakan sarana untuk menerima pengaduan/keluhan yang dialami pegawainya. Para pegawai dapat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada tim *Whistleblowing System* Perseroan.

Konsumen

Sebagai Bank pelopor penyedia rumah bagi lapisan masyarakat, Perseroan terus membangun dan mempertahankan reputasi dengan memperkuat komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah, termasuk layanan perlindungan data dan privasi nasabah serta pendidikan nasabah. Kebijakan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak-hak nasabah dalam berinteraksi dengan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan tanggung jawab sosial kepada nasabah dengan menyelaraskan strategi bisnis dalam upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Kebijakan perlindungan nasabah mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait nasabah dilakukan dengan melaksanakan survei kepuasan nasabah secara berkala. Melalui pusat pengaduan nasabah yaitu Sistem Pengaduan Nasabah (SPN), Perseroan dapat memantau penyelesaian pengaduan nasabah secara menyeluruh. SPN merupakan sistem berbasis *web* yang dapat memudahkan pemantauan terhadap status penyelesaian pengaduan sekaligus memberikan kepastian bagi para nasabah tentang jangka waktu yang dibutuhkan Perseroan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut.

Kemasyarakatan

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak luput dari tanggung jawab sosial terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang No. 1 tahun 2013, Perseroan telah mengatur kebijakan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan. Kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi Perseroan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan antara lain, Program Pengembangan Masyarakat, Program Edukasi dan Literasi Keuangan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Perseroan telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja PKBL. Perseroan juga telah menyediakan sarana penyampaian keluhan terkait program tanggung jawab sosial kemasyarakatan yaitu dengan mengirimkan laporan pengaduan ke Menara BTN melalui surat resmi.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

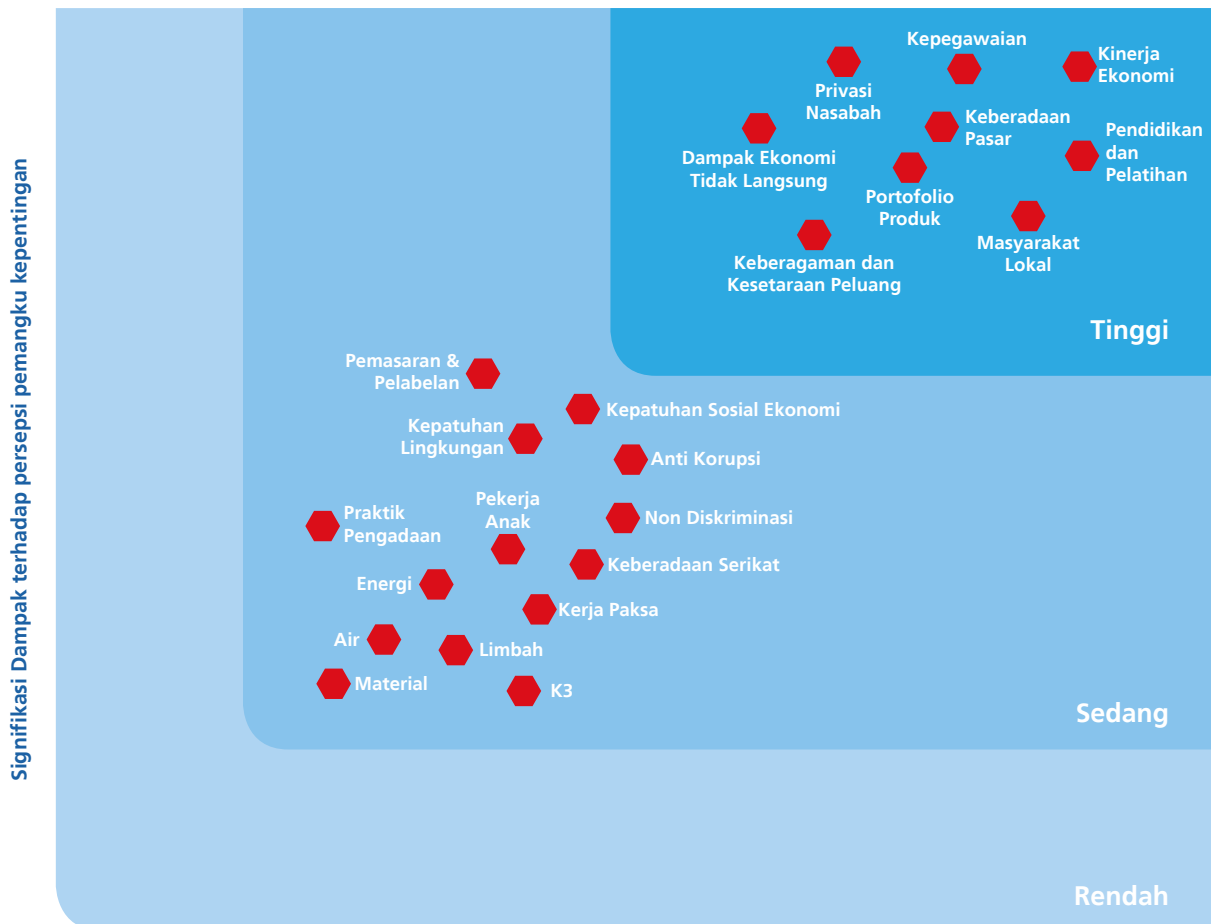
Perseroan telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan Perseroan yang bertujuan agar Perseroan mengetahui dengan jelas siapa yang paling berkepentingan dengan Perseroan secara timbal balik, hubungan apa yang dijalin, hal apa yang perlu dikomunikasikan, dan bagaimana memaksimalkan karakteristik media komunikasi sehingga dapat berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif, yang pada akhirnya mampu mencapai target yang diharapkan dalam penyaluran CSR. Sehingga secara langsung memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keberlanjutan Perseroan. Beberapa pemangku kepentingan yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan Perseroan sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Topik Prioritas
Pemegang Saham	Pencapaian target Perseroan
Nasabah	Layanan dan mutu layanan kepada nasabah
Mitra Pengembang	Peluang penjualan rumah
	Kesuksesan Program Sejuta Rumah
	Transparansi
Pegawai	Tingkat kepuasan pegawai
	Kebijakan dan strategi terkait kepegawaian
	Forum diskusi, sharing tentang pekerjaan, kuis, pertukaran informasi
	Mempercepat proses bisnis
Mitra Kerja/Pemasok	Proses pengadaan
	Kerja sama bisnis
	Pengembangan merchant perseroan
Serikat Pekerja	Hubungan kerja yang harmonis
	Hak dan Kewajiban Pegawai
Pemerintah dan Otoritas Keuangan	Pemenuhan penyampaian informasi dan laporan terkait pelaksanaan GCG UUS Perseroan
	Pemenuhan penyampaian dan penilaian pelaksanaan GCG di Perseroan
	Pemenuhan penyampaian pelaksanaan GCG di Perseroan
	Sarana dalam Penyampaian Informasi laporan terkait pelaksanaan kegiatan PKBL di Perseroan
	Pemenuhan penyampaian informasi dan laporan terkait pelaksanaan kegiatan PKBL Sinergi di lingkup BUMN
	Penyampaian informasi terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional Bank Perseroan Syariah
Organisasi Bisnis	Peningkatan tata kelola Perseroan
Organisasi Masyarakat/Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Pengoptimalan Program CSR Perseroan
Media	Pemberian informasi terkait bisnis perbankan yang perlu diketahui publik

Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Dalam menentukan isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang relevan dengan dampak kegiatan bisnis Perseroan serta signifikan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, Perseroan telah memetakan isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan Perseroan.

Matriks Topik Material Terkait Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Penting Terkait Dampak Kegiatan Perseroan



Berdasarkan prioritas, topik-topik keberlanjutan yang relevan dipetakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *High*, *Medium*, dan *Low*. Topik material yang disajikan dalam laporan ini adalah topik-topik yang berada dalam kategori *High-Medium* dan batasannya dalam rantai pasokan Perseroan adalah sebagaimana disajikan dalam daftar berikut ini:

Topik Material	Kenapa Topik Ini Material
Topik Ekonomi	
Kinerja Ekonomi	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perseroan selama tahun pelaporan.
Keberadaan Pasar	Menggambarkan komitmen Perseroan terhadap upah minimum karyawan sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
Dampak Ekonomi tidak Langsung	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perseroan bagi masyarakat.
Praktik pengadaan	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap keberadaan pemasok lokal.

Topik Material	Kenapa Topik Ini Material
Topik Lingkungan	
Material	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan material (kertas) yang dalam proses pembuatannya memerlukan batang pohon sebagai bahan baku.
Energi	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan energi yang ketersediannya kian terbatas.
Air	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan sumber daya air yang ketersediannya kian terbatas.
Efluen dan Limbah	Menggambarkan kepedulian Perseroan dalam mengelola air limbah sehingga tidak mencemari lingkungan.
Kepatuhan Lingkungan	Menggambarkan komitmen terhadap berbagai peraturan lingkungan sehingga operasional Perseroan tidak berdampak negatif bagi lingkungan.
Topik Sosial	
Kepegawaian	Menggambarkan komitmen Perseroan tentang pentingnya pengelolaan pegawai.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman.
Pelatihan dan Pendidikan	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai.
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam kesetaraan karyawan untuk berkembang tanpa membedakan jenis kelamin.
Non Diskriminasi	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menghargai kesamaan antar-sesama.
Kebebasan Berserikat	
dan Perundingan Kolektif	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam memberikan kebebasan karyawan untuk berkumpul dan berorganisasi, termasuk pendirian serikat pekerja atau lembaga serupa.
Pekerja anak	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap kualifikasi dan batasan usia pekerja.
Kerja Paksa atau Wajib Kerja	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap jam kerja, remunerasi, dan sebagainya sehingga tidak terjadi paksaan dalam bekerja.
Masyarakat lokal	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap keterlibatan masyarakat di sekitarnya dalam berbagai program/kegiatan.
Pemasaran dan pelabelan	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam mentaati kaidah pemasaran yang baik, serta penyediaan informasi produk bagi pelanggan/konsumen.
Privasi pelanggan	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan.
Kepatuhan sosial ekonomi	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam mentaati peraturan tentang sosial-ekonomi, seperti ketenagakerjaan, bersaing sehat, dan non-diskriminasi.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya, Perseroan telah menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain:

Kegiatan	Dasar Regulasi
Hak Azasi Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Operasi Yang Adil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lingkungan Hidup	- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. - Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Kegiatan	Dasar Regulasi
Ketenagakerjaan	- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. - Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). - Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Nasabah	- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 - Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Terkait kebijakan kerahasiaan Nasabah. - Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. - Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	- Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di samping mematuhi berbagai peraturan tersebut, Perseroan turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya berpartisipasi dalam pencapaian SDG 11.1 yaitu membangun kota dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi semua orang melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Perseroan telah memulai dengan program ABCG yaitu program membangun hunian yang melibatkan *Academic, Business, Community and Government* serta program-program CSR lainnya.

Strategi dan Program Kerja dalam Upaya *Stakeholders Engagement* dan Meningkatkan Nilai *Stakeholders*

Pemangku kepentingan secara langsung memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keberlanjutan Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah melakukan program *stakeholders engagement* yang bertujuan untuk meningkatkan nilai *stakeholders*.

Tabel Pelibatan Pemangku Kepentingan Perseroan

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi
Pemegang Saham	RUPS Tahunan	Satu kali dalam setahun
	Paparan Kinerja	Triwulan
	RUPS Luar Biasa	Satu kali dalam setahun
Nasabah	Survei Kepuasan Nasabah	2 kali dalam setahun
	Media Komunikasi untuk Nasabah	Sebulan sekali
	Layanan <i>Call Center</i> Nasabah	
	Website Perseroan dan Frontline Information	Setiap saat apabila diperlukan
	Kunjungan langsung	
Mitra Pengembang	Penghargaan <i>Property Awards</i>	Setiap tahun
	<i>Gathering</i>	Setiap saat apabila diperlukan
	Pengembangan Kapasitas	Setiap saat apabila diperlukan
Pegawai	<i>Employee Engagement Survey</i>	Sekali dalam setahun
	<i>Buletin Internal</i>	Sekali dalam sebulan
	<i>Smart Share</i>	Dapat diakses setiap waktu
	<i>Innovation Award</i>	Sekali dalam setahun

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi
Mitra Kerja/Pemasok	Kontrak Kerja	Saat Diperlukan
	Mitra Investasi	
	Seminar <i>Workshop</i>	
Serikat Pekerja	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama	Sekali Setahun
Pemerintah dan Otoritas Keuangan	Pelaporan Pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah Bank Perseroan	Sekali setahun
	<i>Self-Assessment GCG</i>	Dua kali dalam setahun
	Laporan Kepatuhan GCG	Sekali dalam setahun
	Pelaporan Kegiatan PKBL kepada Kementerian BUMN	Empat kali dalam setahun
	Pelaporan Program PKBL Sinergi BUMN	Sekali setahun
	Pelaporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Perseroan	Dua kali dalam setahun
Organisasi Bisnis	Pertemuan dan kegiatan, baik skala nasional, regional maupun internasional	Saat diperlukan
Organisasi Masyarakat/Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat	Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan	Saat diperlukan
Media	<i>Press Release and Press Conference</i>	Saat diperlukan

Di samping itu, Perseroan telah menetapkan strategi dan program kerja tanggung jawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

- Hak Asasi Manusia**
Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yaitu menekankan pada pemenuhan prinsip hak asasi manusia terhadap *stakeholder*. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, penanganan keluhan *stakeholder*, menghindari tindakan diskriminatif, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, pemenuhan hak pegawai dan program-program relevan lainnya.
- Operasi Yang Adil**
Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menekankan pada kegiatan operasional yang sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil antara lain, pengadaan barang dan jasa serta program-program relevan lainnya.
- Lingkungan Hidup**
Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup menekankan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta penghematan energi listrik dan pengurangan emisi. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup antara lain, *digital banking* untuk penghematan kertas, Penghematan energi listrik dan pengurangan emisi, penghematan penggunaan air, pengelolaan limbah, penyaluran kredit ramah lingkungan dan program-program relevan lainnya.
- Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja**
Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu menekankan pada hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perseroan dengan pegawai. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain, program-program kesejahteraan pegawai, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta program-program relevan lainnya.
- Nasabah**
Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait nasabah yaitu menekankan pada upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait nasabah antara lain, program edukasi nasabah, program kesehatan dan keselamatan nasabah, serta program-program relevan lainnya.
- Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan**
Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain, program edukasi dan literasi keuangan, program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program-program relevan lainnya.

Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan dengan Bisnis yang Dijalankan

Berdasarkan program-program kerja yang telah dijelaskan pada strategi dan program kerja tanggung jawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial, beberapa program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah:

1. Penghijauan di Perumahan Subsidi.
2. Program Plaza KPR dan *Hotline* KPR.
3. Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para *driver online*.
4. Program-program lainnya.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial

Pada tahun 2020, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk program PKBL sebesar Rp18.225.680.752 yang telah disalurkan kepada berbagai bidang kegiatan meliputi; ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, seni budaya serta kegiatan keagamaan.

Tabel Anggaran Dana CSR Perseroan

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)		
	2020	2019	2018
Ekonomi	2.642	662	1.456
Seni Budaya	-	63	100
Olahraga	-	-	149
Pendidikan	3.813	2.304	1.047
Kesehatan	5.241	-	204
Sarana dan Prasarana	5.803	2.952	-
Keagamaan	557	946	-
Pelestarian Alam	167	15	6
Jumlah	18.225	6.942	5.180

Selain itu, Perseroan juga telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai. yang tercatat mengalami penyusutan sebesar 56,1% dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan Perseroan menetapkan metode *Virtual Classroom* karena adanya pandemi COVID-19.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

(dalam jutaan Rp)

Biaya Pengembangan Kompetensi		Pertumbuhan	
2020	2019	Dalam mata uang (Rp)	Dalam persen
41.993	95.714	(53.721)	(56,1)

Sedangkan biaya-biaya CSR selain PKBL dan pengembangan kompetensi pegawai, melekat pada aktivitas CSR terkait, seperti biaya penanganan keluhan nasabah, biaya terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dan biaya kegiatan CSR lainnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah disampaikan pada bagian tata kelola tanggung jawab sosial Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung. Perseroan memiliki pedoman atau kebijakan terkait penerapan prinsip HAM yang diatur dalam *Code of Conduct*, Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC), Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pedoman Keamanan Informasi. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya.

Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perseroan di antaranya mencakup menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, menghindari diskriminasi dan menghormati kelompok marginal, menghargai hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pemenuhan prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, Perseroan menekankan pentingnya hak-hak kepada *stakeholder*. Perseroan telah memiliki sejumlah prosedur tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan prosedur tetap sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, Perseroan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Menghindari Persekongkolan

Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya persekongkolan yang secara langsung dapat merugikan Perseroan kedepannya. Adanya persekongkolan di lingkungan bisnis Perseroan juga merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.

Hak Sipil dan Politik

Perseroan menjamin dan menghargai hak pegawai untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak akan memaksakan kehendak atau membatasi hak pegawai untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Penanganan Keluhan

Dalam Penerapan tanggung jawab sosial terkait HAM, Perseroan juga menerapkan prinsip-prinsip HAM kepada nasabah. Perseroan memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara *fair* tanpa diskriminasi. Perseroan juga melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku umum di masyarakat.

Menghindari Diskriminasi dan Menghormati Kelompok Marginal

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia, Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan yaitu tidak adanya diskriminasi kepada seluruh *stakeholders* Perseroan. Hal ini dikarenakan diskriminasi merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam hubungan dengan *stakeholder*, Perseroan memberikan perlakuan yang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras dan keberagaman lainnya.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam hubungan dengan masyarakat. Penerapan hak asasi di masyarakat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Perseroan memiliki program pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang berdampak pada peningkatan peluang kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, Perseroan juga memiliki program-program dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan budaya. Program-program tersebut antara lain, program pendidikan, kesehatan, pelestarian seni dan budaya, olahraga serta program keagamaan.

Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja

Perseroan menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai sesuai dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip ini diterapkan pada peraturan atau kebijakan tentang hak asasi manusia yang dimuat dalam Peraturan Direksi, Surat Edaran Direksi dan Perjanjian Kerja Bersama. Di dalam peraturan tersebut, Perseroan memberikan pemenuhan hak dasar di tempat kerja diantaranya, kesempatan untuk menjalankan ibadah, memberikan hak cuti, dan kenyamanan di lingkungan kerja.

Dalam hal kebebasan berserikat, Perseroan sejak tanggal 24 Juni 1999 memfasilitasi pembentukan serikat pekerja yang diberi nama Serikat Pekerja BTN dan telah memperoleh nomor pencatatan pada Departemen Tenaga Kerja DKI dengan No. Kep-2241/W.26/K.2/1000. Pembentukan Serikat Pekerja Perseroan ini sebagai wadah komunikasi yang efektif antara manajemen Perseroan dengan seluruh pegawai.

Perseroan telah membuat dan mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sejak 2 Oktober 2012 kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan No. Kep.157/PHIJSKPKKAD/PKB/X/2012. PKB diperbarui secara periodik bersama Serikat Pekerja untuk didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Seluruh pegawai Perseroan (100%) telah terlindungi hak-haknya oleh PKB.

Sedangkan terkait dengan remunerasi dan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menerbitkan kebijakan yang mengatur hal tersebut dalam Surat Edaran Direksi Nomor 36/DIR/HCD/2017 tentang *Human Capital Reward*. *Human Capital Reward* menerapkan pola penghargaan yang adil dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan keberagaman lainnya, melainkan berdasarkan pencapaian kinerja dan tanggung jawab jabatan yang diemban.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Azasi Manusia

Komitmen Perseroan dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait HAM telah memberikan dampak yang positif dalam kegiatan operasional Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada pegawai telah memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja. Hal ini dibuktikan dengan tingginya keterikatan pegawai yang diukur dengan melakukan *Employee Engagement System* (EES). Hasil EES pada tahun 2020 menunjukkan angka 89% mengindikasikan bahwa tingkat keterikatan pegawai cukup tinggi. Selain itu, Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan Best PKBL For Indonesia CSRXPBBL Award With Outstanding Program in Housing Development Partnership For Community dalam acara CSR and PKBL Award 2020 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi atas komitmen Perseroan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat khususnya dalam penyediaan perumahan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil —

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perseroan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku, termasuk diantaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai dan menghargai hak kepemilikan. Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Perseroan yang dilandasi pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait tanggung jawab sosialnya di bidang operasi yang adil antara lain, Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pengendalian Anti Gratifikasi, Strategi *Anti Fraud* serta Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan kebijakan tersebut, Perseroan melaksanakan tanggung jawab terkait Operasi yang adil dengan menekankan pada pentingnya pengelolaan Perseroan yang transparan, wajar dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai *stakeholders*, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel.
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap prosedur tetap yang wajar, adil dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
4. Nasabah dengan kepentingan atas pengelolaan Dana Pihak Ketiga yang akuntabel.
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri perbankan yang stabil.

Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan bidang operasi yang adil yaitu diantaranya anti korupsi, pencegahan benturan kepentingan, penegakan kode etik, pengendalian gratifikasi serta pengadaan barang dan jasa.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan serta pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada ke-2 aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan Perseroan lainnya disusun untuk menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis Perseroan. Perseroan berharap, penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja Perseroan dan melindungi seluruh pegawai dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat. Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Laporan Tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perseroan yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Perseroan.

Perseroan telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi dalam rangka penegakan penyelenggaraan perbankan yang adil, bersih dan transparan, antara lain tertuang dalam kode etik Perseroan, termasuk di dalamnya penerapan *Anti Fraud*. Pelaksanaan penerapan *anti fraud* di Perseroan diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 22/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang *Standard Operating Procedure Strategi Anti Fraud* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Strategi *Anti Fraud* memiliki 4 (empat) pilar yaitu (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) investigasi, pelaporan dan sanksi; serta (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Dalam menjalankan program pengelolaan *anti fraud*, Perseroan menyadari pentingnya membangun budaya *anti fraud*. Oleh karena itu, Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan Program Sosialisasi Peningkatan *Awareness* kejadian *Fraud* di lingkungan kerja yaitu antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* perihal kebijakan Strategi *Anti Fraud*, korupsi dan pencucian uang, serta Penerapan Pengendalian Gratifikasi. Program Sosialisasi Peningkatan *Awareness* tersebut disosialisasikan Perseroan kepada nasabah maupun masyarakat melalui pemasangan *banner* tentang anti korupsi/gratifikasi baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Cabang Perseroan.

Pada tahun 2020, Perseroan telah melakukan berbagai program *awareness* terkait Pengendalian *Fraud* di lingkungan Perseroan di antaranya melalui implementasi *Integrated Governance Risk and Compliance* (iGRC), selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan *Fraud* sebagai komitmen dalam pengendalian praktik *fraud*/gratifikasi. Meningkatkan *awareness* melalui pemasangan poster dan *banner* terkait *fraud* dan pemberian pemahaman terhadap seluruh pegawai melalui program-program pendidikan seperti APU & PPT, Gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan bentuk implementasi. Adanya sosialisasi dan pelatihan program pengendalian gratifikasi ini dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik *fraud* maupun praktik korupsi khususnya di lingkungan Perseroan.

Dalam menjalankan aktifitas bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG, Perseroan telah melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, nasabah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.

Bagi Perseroan, kredibilitas serta kepercayaan *stakeholders* merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan etika. Karena itu, Perseroan telah memiliki Kode Etik yang berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun standar etika bisnis yang menjadi pedoman seluruh pegawai adalah sebagai berikut:

1. Etika Bank dengan Pegawai
Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Perseroan.
2. Etika Bank dengan Nasabah
Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Perseroan dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah.
3. Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa
Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok.
4. Etika Bank dengan Pesaing
Perseroan menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
5. Etika Bank dengan Mitra Kerja
Perseroan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku.
6. Etika Bank dengan Pemerintah
Perseroan berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Etika Bank dengan Masyarakat
Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Etika Bank dengan Media Massa
Perseroan menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik.
9. Etika Bank dengan Organisasi Profesi
Perseroan membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka *sharing* informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.

Bagi Perseroan, pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, *vendor*, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/*vendor*/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa perbankan dan mempunyai berbagai unit bisnis dan unit pendukung yang tersebar luas, Perseroan membutuhkan pengadaan barang dan/atau jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa adalah proses kritikal pendukung strategi dan Bisnis Perseroan sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, memperbaiki kinerja proses bisnis, penyelarasan dan pengkinian kebijakan-kebijakan yang berlaku serta agar dapat beradaptasi dalam menghadapi persaingan industri perbankan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka Perseroan telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen proses bisnis Pengadaan barang dan/atau jasa agar terjadi proses yang efektif dan efisien untuk optimalisasi pendapatan Perseroan.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dalam kegiatan operasionalnya. Komitmen tersebut telah memberikan dampak positif bagi Perseroan. Hal ini, terlihat dari meningkatnya kepercayaan para *stakeholder* kepada Perseroan. Atas penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil, pada tahun 2020 Perseroan berhasil memperoleh berbagai macam penghargaan, antara lain:



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup —

Selaras dengan implementasi prinsip *sustainability*/keberlanjutan, dalam konteks yang lebih luas Perseroan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan. Pada konteks internal, Perseroan fokus untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat melalui kebijakan dan inisiatif yang berwawasan lingkungan.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan peraturan Perseroan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan terkait lingkungan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

Perseroan menyadari perannya sebagai Bank yang memberikan pinjaman kredit/modal kepada nasabah dan juga sebagai agen pembangunan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Perseroan juga berfokus kepada penyaluran kredit yang ramah lingkungan melalui Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan. Dalam pedoman tersebut terdapat persyaratan kredit yang mewajibkan adanya dokumen Upaya Kelayakan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan Bank terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut merupakan pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

Dampak dan Risiko Lingkungan

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan berupaya untuk menjadi bank yang ramah lingkungan dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu terkait lingkungan, termasuk ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebelum mengucurkan kredit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang bisa timbul dalam penyaluran kredit. Salah satu risikonya yaitu Perseroan menyalurkan dana kepada kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Dengan kata lain, Perseroan akan bersungguh-sungguh dalam mengelola risiko lingkungan, sosial dan tata kelola pada saat menyalurkan kredit.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Program tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan dilakukan sebagai bentuk partisipasi Perseroan menuju *sustainable finance*. Perseroan menetapkan target pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Selain itu, target Perseroan lainnya yang ditetapkan yaitu melakukan pengelolaan dan pengkoordinasian aktivitas operasional lingkungan Perseroan dengan menerapkan program *green banking* melalui penerapan strategi operasional dan penyaluran kredit yang ramah lingkungan. Dalam program *green banking*, Perseroan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dimana nasabah wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat disetujuinya pemberian kredit oleh Perseroan. Hal ini bertujuan untuk membangun sinergi strategis yang pada gilirannya meningkatkan sisi efisiensi dan efektivitas Perseroan.

Dalam hal lainnya, Perseroan juga menargetkan untuk melaksanakan komitmen pelestarian lingkungan di kawasan Kantor Pusat Perseroan dengan menjalankan kegiatan penghematan energi listrik dan pengurangan emisi.

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait dengan Kegiatan Operasional Perseroan

Digital Banking untuk Penghematan Kertas (Paperless)

Melalui penggunaan *digital banking*, Perseroan telah melakukan penghematan kertas dalam bertransaksi dengan nasabah menyarankan dan memaksimalkan penggunaan layanan *Electronic Channel*. Pada tahun 2020, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas, seperti disampaikan oleh manajemen untuk penghematan salah satunya dengan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Perseroan turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Pengurangan kertas dilakukan Perseroan melalui digitalisasi dokumen. Dengan digitalisasi, pemakaian kertas dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut:

- Tidak lagi menggunakan faksimili, surat menyurat dilakukan dengan menggunakan *email*.
- Paperless*: disposisi dan distribusi surat menggunakan sistem *IFlow*.
- Smart Branch*: tidak menggunakan slip setoran dan memaksimalkan digitalisasi.
- BTN Property.co.id: memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian rumah, menemukan rumah serta menikmati fasilitas fitur 3 (tiga) dimensi melalui dukungan teknologi *digital* terkini serta dalam penerapannya Perseroan tidak membutuhkan banyak kertas.
- Rumah Murah BTN: memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menemukan aset melalui dukungan teknologi digital terkini serta dalam penerapannya Perseroan tidak membutuhkan banyak kertas.

Selain hal tersebut di atas, Perseroan juga mendukung efisiensi kertas dengan tetap menggunakan kertas bekas untuk Memo Internal.

Dari sisi operasional bisnis, Perseroan melakukan efisiensi penggunaan kertas melalui aplikasi *IFlow* yaitu aplikasi surat menyurat lintas divisi dan atau lintas cabang yang pendistribusiannya terstruktur. Selain memiliki keunggulan dalam pendistribusian surat menyurat secara terstruktur, aplikasi ini juga memiliki manfaat lain di antaranya yaitu adanya kecepatan waktu dalam alur distribusi surat menyurat, adanya monitoring dokumen atau surat yang telah terkirim, dan dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) untuk pencetakan.

Selain itu, komitmen Perseroan untuk menghemat penggunaan kertas juga diterapkan secara konsisten dengan memanfaatkan kembali kertas bekas, mengefektifkan

penagihan melalui telepon atau secara langsung yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi yang mendukung aplikasi *mobile*, *paperless*, *historical record* dan *parameterized*, menggunakan metode cetak *2-sided*, memanfaatkan *email*, serta inisiatif *Smart Branch* dengan tidak menggunakan Slip Setoran dan memaksimalkan digitalisasi.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung yang Ramah Lingkungan

Perseroan telah melakukan penyesuaian dan studi terhadap Kantor Pusat Bank BTN terutama dalam mendorong terwujudnya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman serta ramah lingkungan dengan melakukan studi keamanan gedung dari bahaya kebakaran, mengembangkan sarana pengelolaan air limbah di kantor pusat, dan membuat kawasan biopori sebanyak 20 titik yang berlokasi di sekitar area Kantor Pusat (taman samping utara, taman samping selatan dan area air mancur).

Penghematan Energi Listrik dan Pengurangan Emisi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melakukan berbagai inisiatif efisiensi penggunaan energi listrik untuk mengurangi sumbangan Perseroan terhadap emisi gas rumah kaca. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan antara lain:

- Mempunyai tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan kapasitas 5 m³ dan dilakukan pengangkutan ke TPA setiap hari.
- Mempunyai 4 (empat) sumur resapan dengan kapasitas masing-masing sebesar 48 m³.
- Melakukan penghematan energi:
 - Menggunakan tenaga surya untuk pemanas air.
 - Pengaturan debit air untuk konsumsi air (toilet, tempat wudhu, dan lainnya).
 - Pengaturan operasional utilitas dan listrik secara otomatis dengan menggunakan BAS (*Buidilng Automation System*) untuk pemadaman lampu, lift dan unit AC *chiller*.
- Mencegah pencemaran lingkungan melalui kegiatan perbaikan secara berkelanjutan:
 - Menggunakan freon pendingin ruangan (*Air Conditioning*) jenis R32, R134A dan R410.
 - Mempunyai tempat penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dengan kapasitas 104,5 Kg.
 - Mempunyai tempat pengolahan air limbah gedung dengan kapasitas 260m³/hari. Kondisi saat ini *output* 220 m³/hari sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang terbit tanggal 19 Juli 2018.
- Gerakan bebas sampah plastik dengan mengurangi penggunaan air mineral kemasan dan alat makan sekali pakai pada saat event ataupun rapat baik dengan pihak internal ataupun eksternal dan mendorong kesadaran penggunaan *tumbler* atau botol minum bebas plastik.

6. Anjuran untuk pegawai agar menggunakan kendaraan umum menuju kantor. Mewajibkan kendaraan operasional untuk menggunakan bahan bakar beroktan tinggi yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan kendaraan operasional BUMN menggunakan BBM non-subsidi. Melalui Memo No.1836/M/PGSD/GS/XI/2013 tanggal 6 November 2013, Procurement and General Services Division menyampaikan Memo ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah mengenai larangan penggunaan bahan bakar minyak tertentu berupa bensin (*gasoline*) RON 88 untuk kendaraan operasional Perseroan.
7. Partisipasi dalam Program *Earth Hour*.

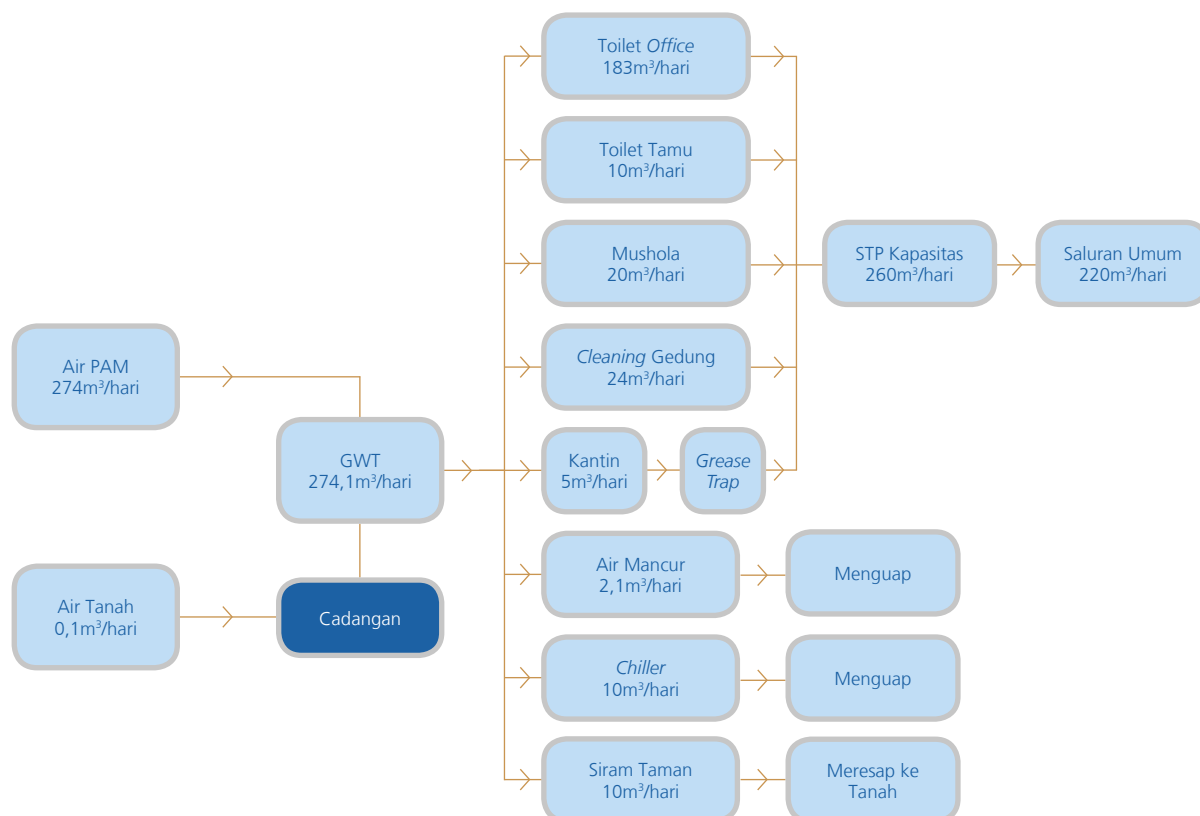
Partisipasi Menghemat Energi Listrik selama 1 Jam Pada Program *Earth Hour*

No.	Tanggal	Tahun	Jam	Keterangan
1	30 Maret	2019	20:30 - 21:30	Dilakukan pemadaman selama 1 jam untuk penghematan energi listrik dalam program <i>Earth Hour</i> .
2	28 Maret	2020	20:30 - 21:30	Dilakukan pemadaman selama 1 jam untuk penghematan energi listrik dalam program <i>Earth Hour</i> .

Penggunaan Air

Perseroan melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghimbau seluruh pegawai agar menutup kran air apabila tidak diperlukan. Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan kembali air daur ulang untuk berbagai keperluan, seperti penyiraman tanaman serta secara rutin melakukan pengontrolan saluran air dan kran sebagai upaya antisipasi pemborosan dan kebocoran air.

Perseroan memaksimalkan penggunaan air PDAM sebagai sumber air utama sesuai dengan Peraturan Daerah terkait penggunaan air tanah. Perseroan menyediakan tempat pengolahan air limbah gedung dengan kapasitas 260 m³/hari dengan output saat ini mencapai 220 m³/hari sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang terbit tanggal 19 Juli 2018. Air limbah yang dihasilkan diproses melalui STP (Sewage Treatment Plan) agar tidak berbahaya bagi lingkungan dan sudah mendapat Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dari Dinas terkait. Keseluruhan hal tersebut merupakan upaya Perseroan untuk melakukan penghematan penggunaan konsumsi air bersih, biaya perawatan dan biaya pembuangan air. Selain itu, Perseroan juga Pengaturan debit air untuk efisiensi penggunaan air di Gedung Menara BTN, dengan neraca pemakaian air bersih sebagai berikut:



Pengelolaan Limbah

Perseroan yang bergerak dalam industri perbankan menghasilkan limbah berupa sampah plastik, kertas dan air kotor. Limbah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Meski demikian, Perseroan senantiasa melakukan pengelolaan limbah dari pemakaian air dengan STP (*Sewage Treatment Plan*) yang dikelola bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan standar manajemen lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Perseroan juga menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 dengan kapasitas 104,5 kg.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan secara rutin melaksanakan pengukuran air limbah di Kantor Pusat setiap tiga bulan sekali. Dengan adanya pengukuran tersebut, Perseroan dapat memberikan dampak berupa informasi bahwa air yang dibuang dipastikan sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga tidak mencemari lingkungan.

Uraian mengenai pengelolaan limbah yang dihasilkan Perseroan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Jenis Limbah	Perlakuan	2020	2019	2018
Sampah Gedung (Limbah Sisa Makanan, Minuman, Kertas, Kardus)	Dihasilkan	113.340 kg	30.706 kg	28.800 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	3825 kg	Ya	Ya
Oli Bekas	Dihasilkan	300 kg	15 kg	20 kg
	Disimpan TPS	300 kg	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Accu Bekas	Dihasilkan	8 Pcs	20 kg	4.4 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Lampu-Lampu (Lampu TL, PLC, Ballast, Kabel)	Dihasilkan	681 Pcs	7,5 kg	60 kg
	Disimpan TPS	166 Pcs	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya
Limbah Tabung Freon	Dihasilkan	15 Kg	10 kg	20 kg
	Disimpan TPS	0	0	0
	Diserahkan Kepihak Ketiga Berizin	Ya	Ya	Ya

Biaya pengelolaan STP (*Sewage Treatment Plan*) dan untuk biaya pengelolaan sampah tahun 2020:

Tabel Data Sampah B3 Menara BTN Tahun 2020

No.	Bulan	Pengeluaran Dalam Rupiah
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	15.500.000
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
Total		15.500.000

Tabel Data Sampah Menara BTN Tahun 2020

No.	Bulan	Pengeluaran Dalam Rupiah
1	Januari	5.300.000
2	Februari	5.300.000
3	Maret	5.300.000
4	April	5.300.000
5	Mei	5.300.000
6	Juni	5.300.000
7	Juli	5.300.000
8	Agustus	5.300.000
9	September	5.300.000
10	Oktober	5.300.000
11	November	5.300.000
12	Desember	5.300.000
Total		63.600.000

Data Perawatan STP Menara BTN Tahun 2020

No.	Perawatan STP	Pengeluaran Aggaran/ Bulan
1	Januari	7.000.000
2	Februari	7.000.000
3	Maret	7.000.000
4	April	7.000.000
5	Mei	7.000.000
6	Juni	7.000.000
7	Juli	7.000.000
8	Agustus	7.000.000
9	September	7.000.000
10	Oktober	7.000.000
11	November	7.000.000
12	Desember	7.000.000
Total		84.000.000

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Penerapan *Green Banking*: Penyaluran Kredit Ramah Lingkungan

Sejalan dengan kebijakan *green banking* dan partisipasi Perseroan menuju *sustainable finance*, Perseroan secara konsisten menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif. Hal ini diwujudkan melalui program training untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam analisis lingkungan, baik secara *in-house training* maupun *external training*. Hasil pelatihan kemudian disosialisasikan ke tim kredit untuk diterapkan dalam proses persetujuan kredit.

Perseroan juga memiliki inisiatif untuk menerapkan *green finance product* (produk-produk Perseroan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola). Salah satu upaya yang konsisten dilakukan yaitu diaplikasikan dalam bentuk pemberian kredit. Perseroan telah menerapkan kebijakan terkait penyaluran kredit ramah lingkungan dengan tidak mengucurkan kredit kepada nasabah yang tidak menyertakan hasil AMDAL. Setelah itu terhadap nasabah yang sudah menyertakan hasil AMDAL pun, Perseroan akan tetap melakukan pengecekan ke lapangan sebagai upaya validasi.

Penghijauan di Perumahan Subsidi

Pada awal tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan penghijauan di seluruh Kantor Wilayah Bank BTN. Pelaksanaan kegiatan dilakukan disela-sela kegiatan Rapat Kinerja Kantor Wilayah. Total terdapat 6 (enam) kantor wilayah yang melaksanakan kegiatan penghijauan mulai dari Wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar dan Batam.

Program penghijauan dilaksanakan di lokasi perumahan subsidi binaan Perseroan dengan harapan selain memberikan kemudahan dalam pemberian rumah kepada masyarakat MBR, Perseroan juga berharap dengan kegiatan penghijauan menjadikan lokasi perumahan menjadi lebih asri dan nyaman. Total bantuan penghijauan yang telah dilaksanakan senilai Rp300 juta.

Capaian Dampak Kuantitatif Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Dampak atas pelaksanaan kegiatan penghematan energi listrik, pada tahun 2020 Perseroan mencatatkan penggunaan energi listrik di Kantor Pusat sebesar 2.601.940 kWh. Penggunaan energi listrik naik/turun dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 7.608.000 kWh.

Pemakaian Listrik Tahun 2020

No	Bulan	Pemakaian Kwh		Biaya Pemakaian Kwh		Jumlah	Biaya Lain-Lain	Jumlah yang Dibayarkan
		LWBP	WBP	LWBP	WBP		PPJ	
1	Januari	563.460	83.640	583.620.599	129.948.959	713.569.558	17.125.669	730.695.227
2	Februari	549.600	81.840	569.264.688	127.152.353	696.417.041	16.714.009	713.131.050
3	Maret	496.800	68.940	514.575.504	107.110.010	621.685.514	14.920.452	636.605.966
4	April	515.160	68.460	533.592.425	106.364.248	639.956.673	15.358.960	655.315.633
5	Mei	475.080	54.660	492.078.362	84.923.602	577.001.965	13.848.047	590.850.011
6	Juni	443.580	58.800	459.451.292	91.355.796	550.807.088	13.219.370	564.026.458
7	Juli	539.940	74.040	559.259.053	115.033.727	674.292.780	16.183.027	690.475.807
8	Agustus	564.840	78.060	585.049.975	121.279.480	706.329.455	16.951.907	723.281.362
9	September	514.200	69.060	532.598.076	107.296.450	639.894.526	15.357.469	655.251.995
10	Oktober	546.300	67.380	565.846.614	104.686.285	670.532.899	16.092.790	686.625.689
11	November	499.200	66.540	517.061.376	103.381.202	620.442.578	14.890.622	635.333.200
12	Desember	537.480	68.700	556.711.034	106.737.129	663.448.163	15.922.756	679.370.919
Biaya Kwh per jam		53,5	8,4	332.485	78.305	410.790		
Total		1.761.820	840.120	6.469.441.485	1.305.347.545	7.774.378.240	186.585.078	7.960.963.316
RATA-RATA								663.413.610

Kemudian dampak dari kegiatan penggunaan air, pada tahun 2020 volume penggunaan air di Kantor Pusat Perseroan tercatat sebesar 71.153 m³ yang mengalami penurunan/kenaikan dari tahun 2019 sebesar 93.537 m³, yang disebabkan Perseroan telah melaksanakan pengaturan debit air di Gedung Menara BTN. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan penghematan air khususnya di Kantor Pusat.

Pemakaian PDAM 2020

Bulan	Pemakaian/m ³	Jumlah (Rp)	Tanggal Pencatatan
Januari	7.983	100.339.220	20 Januari 2020
Februari	8.102	101.832.670	17 Februari 2020
Maret	9.080	114.106.570	18 Maret 2020
April	6.849	86.107.520	17 April 2020
Mei	5.407	68.010.420	18 Mei 2020
Juni	6.740	84.739.570	16 Juni 2020
Juli	5.841	73.457.120	17 Juli 2020
Agustus	4.613	58.045.720	18 Agustus 2020
September	4.628	58.233.970	17 September 2020
Oktober	4.210	52.988.070	19 Oktober 2020
November	3.654	46.010.270	18 November 2020
Desember	4.046	50.929.870	18 Desember 2020
Total	71.153	894.800.990	
RATA-RATA	5.929,4	74.566.749	

Tabel Penggunaan Air Tanah

Uraian	Satuan	2020	2019
SAP 02 (556)	Volume (m3)	10	72
	Biaya (Rp)	101.496	1.217.966
SAP 03 (628)	Volume (m3)	108	127
	Biaya (Rp)	1.505.539	2.249.855

Tabel Penggunaan Air PDAM

Satuan	2020	2019
Volume (m3)	71.153	93.537
Biaya (Rp)	849.800.990	1.175.720.190

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Sampai dengan Desember 2020, Perseroan belum memiliki sertifikasi di bidang Lingkungan.

Biaya Pelaksanaan

Pada tahun 2020 Perseroan telah mengeluarkan biaya dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan sebesar Rp114.000.000, sedangkan untuk biaya pengelolaan STP (*Sewage Treatment Plan*) dan untuk biaya pengelolaan sampah tahun 2020 sebesar Rp147.600.000.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Perseroan senantiasa membuka diri atas laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Perseroan. Mekanisme atas pengaduan masalah terkait dengan lingkungan dapat disampaikan kepada Perseroan dengan mengirimkan laporan pengaduan terkait lingkungan sekitar Menara BTN melalui surat resmi. Selama tahun 2020, Perseroan tidak menerima pengaduan/keluhan terkait isu lingkungan dan juga tidak mendapatkan denda dan atau sanksi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan Peraturan terkait lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan berkomitmen dalam melaksanakan hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perseroan dengan pegawai, serta memastikan seluruh pegawai mendapatkan hak dalam bidang ketenagakerjaan yang sama. Komitmen ini tertuang dalam kebijakan Perseroan pada Peraturan Direksi No. 29/DIR/CMO/2011 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain itu, Perseroan juga mematuhi kebijakan ketenagakerjaan yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja. Perseroan juga memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pegawai serta sistem remunerasi yang sesuai.

Perseroan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja aman dan nyaman bagi seluruh pegawai dengan senantiasa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal. Pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan Perseroan mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 86 ayat 2 terkait perlindungan pegawai, implementasi program kesehatan dan keselamatan pegawai juga tertuang dalam kebijakan internal Perseroan yaitu:

1. Peraturan Direksi No. 5/PD/PGSD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Surat Edaran Direksi No. 60/DIR/PGSD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan menempatkan praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi pegawai maupun seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Perseroan memberikan kondisi lingkungan kerja yang aman serta hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan seluruh pegawai sebagai landasan dan prasyarat utama dalam mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berkelanjutan.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan menyusun target perencanaan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan arah dan strategi Perseroan dalam pengelolaan SDM. Target tersebut antara lain melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM (*People Transformation*) dalam rangka transformasi *digital banking*, pemenuhan terhadap kesejahteraan pegawai, perlakuan kesetaraan, serta menjalankan hubungan industrial yang harmonis. Keseluruhan target tersebut, sejalan dengan rencana transformasi bisnis, penguatan bidang sumber daya manusia dilakukan dengan memperkuat dan meningkatkan kapabilitas SDM sebagai agen implementasi transformasi.

Pada tahun 2020, Perseroan menetapkan target kegiatan bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berfokus pada peningkatan kompetensi, pelatihan dan kesadaran pegawai dalam bekerja sehingga penerapan K3 dapat berjalan optimal dengan target *zero accident*. Perseroan juga senantiasa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi para pegawai. Sedangkan pengelolaan keselamatan kerja ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penetapan target tersebut diharapkan produktivitas pegawai akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, Perseroan menjalankan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

Program Kesejahteraan Pegawai

Perseroan menjalankan program kesejahteraan pegawai melalui beberapa cara antara lain: kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, promosi kenaikan peringkat dan jabatan serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Adapun komponen remunerasi dan fasilitas yang diperoleh pegawai tetap yaitu gaji pokok, THR, uang cuti, uang sandang, tunjangan (posisi, perumahan, kendaraan, keahlian, BBM, lokasi, pajak), bonus kinerja, pinjaman perumahan, pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, fasilitas pemeliharaan kesehatan berkala, bantuan pengobatan dan bantuan uang duka.

Remunerasi

Pemenuhan Hak Pegawai Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Remunerasi diberikan kepada pegawai berdasarkan *merit system* dengan mengedepankan kinerja, kompetensi, dan integritas pegawai berupa gaji pokok, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem remunerasi Perseroan telah mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mematuhi konvensi *International Labour Organization* (ILO) tentang Kesetaraan Remunerasi, dimana besaran gaji pegawai baru berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	2020	2019
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	20,80 : 1	21,82 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,04 : 1	3,09 : 1

Yang dimaksud pegawai tertinggi adalah Pegawai Tetap dengan gaji tertinggi sedangkan pegawai terendah adalah Pegawai Tetap dengan gaji terendah.

Kesempatan yang Sama dalam Pendidikan dan Pelatihan

Secara berkesinambungan, Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan bisnis serta operasional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan potensi dirinya melalui program pendidikan dan pelatihan sebagaimana tertuang yang dalam Surat Edaran No. 43/DIR/CMO/2011. Penerapan keikutsertaan memberikan kontribusi secara signifikan pada pencapaian kinerja bisnis Perseroan. Bentuk program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan terbagi dalam lima kelompok program, yaitu: *School of Leadership*, *School of Operational Banking*, *School of Credit & Risk*, *School of Sales & Service* dan *School of Business & Sharia Banking* yang menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai, yaitu:

1. *School of Leadership*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk sikap kepemimpinan di level Leader Perseroan. Program ini terdiri dari:

- *Branch Leaders Academy*
- *Emerging Leader Development*
- *Executive Training*
- *Leadership Series Level Basic, Advance & Intermediate*
- *Leadership Talent Development Program*
- Pembekalan 4DX (*Discipline of Focus, Discipline of Leverage, Discipline of Engagement dan Discipline of Accountability*)
- *Scholarship*

2. *School of Operational Banking*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keahlian atau kompetensi bagian pendukung dari Perseroan sebagai penunjang bisnis Perseroan serta pemahaman terhadap peraturan mengenai GCG dan pemahaman SOP masing-masing bidang. Program-program pelatihan yang dilaksanakan pada *School of Operational Banking* mencakup unit bidang:

- *Compliance*
- *Corporate Secretary*
- *Credit Operation*
- *Finance & Accounting*
- *General Affair*
- *Human Resource*
- *Information Technology*
- *Internal Audit*
- *Legal*
- *Risk*
- *Unit supporting* lainnya

3. *School of Credit & Risk*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keahlian atau kompetensi yang berfokus pada pengembangan bisnis dan manajemen dalam bidang kredit dan risiko kredit. Program-program pelatihan yang dilaksanakan pada *School of Credit & Risk* terdiri dari :

- *Asset Management*
- *Collection Loan Series*
- *Commercial Loan Series*
- *Consumer Loan Series*
- Pelatihan bidang *credit & risk* lainnya

4. *School of Sales & Service*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keahlian atau kompetensi yang berfokus pada pengembangan bisnis dan manajemen dalam bidang *sales & service*. Program-program pelatihan yang dilaksanakan pada *School of Sales & Service* terdiri dari:

- *Sales Series*
- *Wealth Management Series*
- *Treasury*
- Sertifikasi *Mandatory* dari Regulator
- Sertifikasi Internal Bidang *Funding*
- Pelatihan bidang *sales & service* lainnya

5. *School of Business & Sharia Banking*

Menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keahlian atau kompetensi pegawai unit usaha syariah (UUS) yang berfokus pada pengembangan bisnis dan manajemen, serta unit *supporting* untuk mendukung bisnis Perseroan. Program-program pelatihan yang dilaksanakan pada *School of Credit & Risk* terdiri dari:

- Program pembelajaran *Business Unit*
- *General Banking* bidang *Islamic Banking*
- Program pembelajaran *Supporting/Operational Unit*
- Pembelajaran bidang *Islamic Banking* lainnya

Tabel Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Perseroan

Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	
	2020	2019
<i>School of Leadership</i>	4.294	458
<i>School of Operational Banking</i>	74.153	37.690
<i>School of Credit & Risk</i>	5.585	2.436
<i>School of Sales & Service</i>	24.035	4.579
<i>School of Business & Sharia Banking</i>	16.605	8.782
TOTAL	124.672	50.780

Perlakuan Setara Bagi Seluruh Pegawai

Perseroan telah menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai sesuai dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai Perseroan sebanyak 11.224 pegawai, terdiri dari sebanyak 54,53% atau 6.121 pegawai merupakan pegawai pria dan sebanyak 45,47% atau 5.103 pegawai merupakan pegawai wanita. Komposisi tersebut mencerminkan bahwa sistem rekrutmen Perseroan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita dalam memperkerjakan pegawai.

Dalam hal kesempatan kerja, pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja. Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat, baik pria dan wanita, tanpa melakukan praktik diskriminasi yang memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, *gender* ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja.

Pada praktiknya Perseroan juga membuka kesempatan bagi kandidat terbaik penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya di Perseroan. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan memiliki sebanyak 4 (empat) orang pegawai merupakan penyandang disabilitas di beberapa kantor cabang seperti Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Malang, Kantor Cabang Medan dan Human Capital Management Division (HCMD).

Perlindungan Terhadap Pegawai (Hubungan Industrial)

Perseroan menempatkan pegawai sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menghormati hak dan melaksanakan kewajiban kepada pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menciptakan hubungan yang harmonis. Perseroan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Perseroan yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank BTN (SPBTN).

Selain itu, Perseroan juga telah menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak dan kewajiban Perseroan dan pegawai guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Perseroan secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja yang membahas berbagai hal terkait pemenuhan hak dan kewajiban pegawai ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai. Pada tahun 2020, seluruh pegawai tetap Perseroan (100%) telah terlindungi hak-haknya oleh PKB.

Tingkat Turnover Pegawai

Pada tahun 2020, tingkat pergantian (*turnover*) pegawai tercatat sebesar 1,68% atau sebanyak 189 pegawai mengambil keputusan meninggalkan perusahaan secara sukarela (*voluntary resign*). Namun demikian, tingkat *turnover* pegawai tersebut masih berada pada level rata-rata industri perbankan. Tingkat *turnover* ini disebabkan oleh karyawan yang mengajukan pensiun dini dan pegawai juga mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri.

Tabel Perkembangan Tingkat Turnover Pegawai

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pegawai*	11.224	11.647	11.810	10.360	9.424
Voluntary Resign**	189	176	267	235	248
Rasio Turn Over	1,68%	1,51%	2,26%	2,27%	2,63%

Keterangan:

* Jumlah Pegawai yaitu jumlah pegawai tetap ditambah dengan pegawai kontrak/calon pegawai/PKWT

** Keputusan Pegawai untuk meninggalkan organisasi secara sukarela (mengundurkan diri dan pensiun dini)

Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan

Perusahaan secara rutin melakukan *Employee Engagement System* (EES) dengan tujuan untuk mengukur keterikatan pegawai, sekaligus menjadi tolak ukur tentang suasana kerja yang kondusif yang dapat memberikan gambaran keselarasan tujuan pegawai dengan tujuan Perseroan. Skor EES Perseroan tahun 2020 menunjukkan angka 89%. Hasil EES tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keterikatan pegawai cukup tinggi. Skor EES Perseroan dalam dua tahun terakhir berada di atas acuan tingkat keterikatan pegawai lainnya seperti *Financial Institution* APAC, *Financial Institution* Indonesia serta *BE Indonesian Benchmark*.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Kesehatan

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Perseroan juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai dan mendaftarkan pegawai dalam program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan bantuan persalinan, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan karyawan dan menjalin kerja sama dengan berbagai Rumah Sakit yang tersebar di wilayah operasi Perseroan.

Perseroan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap seluruh fasilitas K3, untuk memastikan seluruh fasilitas tersebut dapat bekerja maksimal pada saat dibutuhkan. Dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan senantiasa menjaga keselamatan kerja pegawai, diharapkan produktivitas pegawai akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Kesehatan

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan dan menjamin aspek kesehatan dalam rangka menjaga produktivitas pegawai. Untuk mewujudkan hal ini, Perseroan telah melakukan upaya-upaya antara lain melalui kebijakan tunjangan pengobatan yang meliputi fasilitas rawat inap, rawat jalan serta pengobatan medis lainnya maupun pemeriksaan kesehatan berkala. Keseluruhan upaya ini berdampak pada meningkatnya produktivitas pegawai dimana tahun 2020 tingkat produktivitas pegawai mencapai Rp145,52 Juta per pegawai meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp18,20 Juta per pegawai.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Kegiatan Peningkatan Pemahaman K3

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perseroan bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku. Untuk mewujudkan kesehatan kerja, Perseroan melakukan upaya program kesehatan pada proses bisnis, fasilitas *Medical Check Up* secara berkala, melakukan pelatihan, melakukan simulasi tanggap darurat medis dan melakukan *workshop* tentang Kesehatan Kerja.

Sarana Keselamatan Kerja dan Pelatihan K3

Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan berbagai jenis bencana di lingkungan kerja, Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai sarana keselamatan kerja standar. Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti seperti: Alat Pemadam Api Ringan (Apar), *smoke detector*, *diesel pump*, tangga darurat dan rambu-rambu keselamatan kerja yang telah sesuai dengan standar alat keselamatan kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Perseroan juga melakukan inspeksi atau pengecekan rutin alat keselamatan kerja untuk mengetahui tingkat kelayakannya, memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk operator perangkat keselamatan kerja, seperti pesawat angkat dan angkut serta memiliki rencana situasi kebakaran dan peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh pegawai teredukasi dengan baik.

Perseroan terus mengirimkan pegawai pada pelatihan K3 agar memahami dan sadar pentingnya K3 serta bertindak benar sesuai dengan kaidah K3. Perseroan rutin mengikutsertakan pegawai dalam sertifikasi pelatihan "Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)" yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Seluruh pegawai juga telah diikutsertakan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi pegawai terhadap risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Perseroan telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai komitmen Perseroan dalam pengelolaan K3 yang mengatur terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) SMK3 dan Kebijakan Khusus K3 Perseroan. Tujuan dari penerapan SMK3 adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi serta untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Perseroan juga melakukan Sertifikasi AK3U kepada beberapa pegawai Perseroan. Program sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penerapan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Adapun materi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja mencakup:

- a. Sarana dan prasarana pendukung operasional gedung misal *lift*, genset, AC, penerangan;
- b. Pelaksanaan *medical check up* secara rutin kepada pegawai;
- c. Peralatan pendukung kerja seharusnya tidak mempunyai efek kepada kesehatan; dan
- d. Rotasi pegawai secara periodik sehingga tidak terganggu psikologisnya.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Selama tahun 2020, Perseroan telah menjalankan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja pegawai secara baik dan optimal. Tercatat, selama periode pelaporan tidak ada pegawai Perseroan yang dalam kegiatannya kerja sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit akibat kerja tertentu (*zero accident*).

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perseroan menyediakan saluran pengaduan bagi pegawai dalam berhubungan dengan Perseroan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan di bidang perlindungan pegawai dan menjamin hak-hak dalam berhubungan dengan Perseroan. Beberapa mekanisme penyampaian keluhan pegawai dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila pihak terkait adalah karyawan Perseroan sampai dengan 2 (dua) level dibawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS Perseroan, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS Perseroan.
2. Apabila pihak terkait adalah anggota Tim WBS Perseroan dan/atau karyawan Perseroan 1 (satu) level di bawah Direksi, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
3. Apabila pihak terkait adalah anggota Tim WBS Perseroan dan/atau karyawan Perseroan 1 (satu) level di bawah Direksi, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
4. Apabila pihak terkait adalah Komisaris dan/atau Komite dibawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada anggota Komisaris yang tidak terkait yang juga bukan anggota dari Komite yang bersangkutan.
5. Apabila pihak terkait adalah Komisaris secara bersama-sama, maka Pengelola WBS oleh pihak Independen akan menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
6. Laporan dugaan terjadinya pelanggaran dapat disampaikan melalui:
 - a. PO Box 2828 JKP 10028
 - b. Website : <https://btansiips.tipoffs.info>
 - c. Email : btansiips@tipoffs.info
 - d. SMS : +62 81388701117
 - e. Whatsapp : +62 21-50928882
 - f. Telepon : +62 21-50928882
 - g. Faximili : +62 21-50928883

Dengan adanya pengelolaan dan penerapan yang efektif terkait praktik ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, selama tahun 2020 tidak terdapat pengaduan terkait praktik ketenagakerjaan maupun pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi yang dialami oleh pegawai Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen —

Sebagai Bank pelopor penyedia rumah bagi lapisan masyarakat, Perseroan terus membangun dan mempertahankan reputasi dengan memperkuat komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah. Perseroan menyadari bahwa layanan perbankan yang berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas nasabah serta keberlangsungan bisnis.

Memahami kebutuhan nasabah, mengedepankan layanan prima, serta optimalisasi *digital banking*, merupakan cara Perseroan guna memastikan pertumbuhan usaha jangka panjang. Pada akhir tahun 2020, Perseroan telah menghadirkan sejumlah layanan berbasis teknologi digital untuk seluruh produk dan transaksi secara bertahap agar transaksi perbankan menjadi lebih efisien, mudah dan praktis.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah secara menyeluruh dengan menerapkan sistem pelayanan yang terbaik. Kebijakan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak-hak nasabah dalam berinteraksi dengan Perseroan. Di sisi lain, Perseroan juga berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Langkah tersebut tidak hanya selaras dengan pengembangan bisnis tetapi juga penting dalam penerapan budaya dan nilai-nilai Perseroan yang senantiasa menjaga kepentingan nasabah.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Perseroan telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan melakukan berbagai program antara lain dengan adanya perlindungan bagi nasabah, pengembangan pelayanan, edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan penyaluran CSR kepada nasabah dan/atau lingkungannya.

Kegiatan dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Konsumen

Akses Informasi Produk

Perseroan menyediakan akses informasi produk dan jasa perbankan yang salah satunya melalui *website* www.btn.co.id. Selain itu, Perseroan juga membuat dan melaksanakan sistem serta prosedur untuk memastikan bahwa informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia secara terbuka.

Bentuk transparansi informasi produk Perseroan dan penggunaan data pribadi nasabah yang dilakukan antara lain:

1. Menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Perseroan;
2. Menyampaikan informasi tersebut kepada Nasabah secara tertulis dan/atau lisan;
3. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*);
4. Informasi mengenai karakteristik produk Perseroan dimaksud meliputi: nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk Perseroan, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk serta penerbit (*issuer/originator*) produk Perseroan;
5. Memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap produk yang terkait dengan produk Perseroan dan penghimpunan dana;
6. Memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik produk Perseroan;
7. Mencantumkan informasi mengenai karakteristik produk Perseroan yang letak dan atau bentuknya terlihat dan atau terbaca secara jelas dan atau mudah dimengerti;
8. Menyediakan layanan informasi karakteristik produk Perseroan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas dan mempublikasikannya melalui *website* Perseroan yaitu www.btn.co.id yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat luas.

Program Edukasi Nasabah

Pada program edukasi nasabah, Perseroan telah menjalankan program *financial literacy* maupun edukasi keuangan lainnya setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai program cetak biru strategi nasional literasi keuangan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Kerahasiaan Data Nasabah

Perseroan senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992; (3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Terkait Kebijakan Kerahasiaan Nasabah.

Perseroan juga telah memiliki kebijakan khusus berupa Surat Edaran Direksi No. 40/DIR/ICTD/2016 perihal Pedoman Keamanan Informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada kebijakan tersebut, Perseroan menetapkan prasyarat untuk memastikan bahwa semua informasi rahasia dan sensitif dilindungi dari virus computer sehingga dapat meminimalkan dan kerusakan akibat infiltrasi virus komputer. Berbagai upaya yang dilakukan Perseroan untuk menjaga data nasabah di antaranya yaitu menginstalasi semua software yang telah disetujui dan memperbaruinya secara berkala, memberikan pelatihan keamanan TI kepada user yang menggunakan sumber daya TI, menerapkan manajemen/standarisasi *password* untuk menjamin akses terhadap informasi yang dilindungi.

Pada tahun 2020, Perseroan tidak mencatatkan adanya keluhan dari nasabah terkait dengan kebocoran data maupun kerahasiaan data nasabah. Perseroan juga tidak mendapati adanya data nasabah yang hilang serta pengaduan lain dari pihak luar maupun pihak regulator.

Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Salah satu kunci keberlangsungan usaha dalam industri perbankan adalah terpeliharanya kepercayaan nasabah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dari sisi internal Perseroan berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Kepercayaan juga lahir atas adanya kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan Bank dan penjaminan simpanan nasabah. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perseroan memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Mekanisme Pengaduan Nasabah

Perseroan telah melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan nasabah sesuai dengan melalui pusat pengaduan nasabah melalui Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) yang dapat memantau penyelesaian pengaduan secara menyeluruh. Implementasi SPN didasarkan pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

SPN merupakan sistem berbasis *web* yang dapat memudahkan pemantauan terhadap status penyelesaian pengaduan sekaligus memberikan kepastian bagi para nasabah tentang jangka waktu yang dibutuhkan Perseroan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Dengan menggunakan sistem yang online dan terpadu, para nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan dan mengecek status pengaduan di Kantor Cabang seluruh Indonesia. Selain itu, melalui SPN, mekanisme penanganan keluhan menjadi lebih terstruktur dan dapat dimonitor dengan baik.

Survei Kepuasan Nasabah

Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga melaksanakan survei kepuasan nasabah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode tersebut dilakukan melalui *in depth interview*, sedangkan metode pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode *face to face interview*.

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Konsumen

Perseroan memberikan rasa nyaman dan aman kepada nasabah dalam bertransaksi. Hal ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan jumlah nasabah Perseroan dari tahun ke tahun. Efektivitas penanganan pengaduan nasabah telah memberikan dampak pada indeks kepuasan nasabah. Selain itu, konsistensi pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait konsumen juga memberikan dampak pada meningkatnya operasional perusahaan antara lain, peningkatan penyaluran kredit konsumen sebesar 3,16%, simpanan komersial sebesar 37,40%, penyaluran pembiayaan syariah sebesar 372,65% dan simpanan syariah sebesar 9,01%.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan —

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Perseroan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Program ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang No.1 tahun 2013. Makna pelaksanaan CSR bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

- CSR merupakan komitmen Perseroan dalam bentuk pernyataan tertulis dan pengalokasian sumber daya Perseroan.
- CSR berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya.
- CSR bertujuan meningkatkan kualitas hidup yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak.
- Kegiatan CSR ditujukan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat sekitar Kantor Perseroan dan masyarakat luas.

Isu-Isu Sosial yang Relevan dengan Perusahaan

Keberadaan Perseroan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi CSR berarti Perseroan memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati masyarakat dan lingkungan. Perseroan sebagai perusahaan yang memperoleh keuntungan dari masyarakat harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan *corporate social responsibility* (CSR) mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perseroan yang tidak hanya memperhatikan kinerja ekonomi, namun harus tetap memperhatikan kinerja sosial. Dengan adanya CSR Perseroan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada Perseroan untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan.

Risiko Sosial yang Dikelola Perusahaan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait kemasyarakatan, Perseroan menyadari kemungkinan adanya berbagai risiko yang dihadapi. Salah satunya terkait dampak negatif disebabkan oleh keputusan pemberian kredit/pembiayaan. Risiko tersebut dapat menyebabkan dampak keuangan langsung seperti, peningkatan *non-performing loan* (NPL) yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mematuhi kesepakatan-kesepakatan pinjaman. Selain itu, Perseroan juga harus mempertimbangkan risiko-risiko LST yang timbul sebagai konsekuensi pembiayaan.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang kemasyarakatan adalah dalam hal memberikan kontribusi kepada masyarakat. Perseroan melaksanakan berbagai program kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak. Kegiatan CSR ini ditujukan kepada seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja Bank baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat sekitar Kantor Perseroan dan masyarakat luas.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Perseroan telah menetapkan rencana kerja dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait kemasyarakatan. Program-program yang dilaksanakan antara lain yaitu, Program Pengembangan Masyarakat, Program Edukasi dan Literasi Keuangan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Kegiatan dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan Utama CSR

Peran aktif Perseroan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dilakukan melalui Program CSR. Pada tahun 2018, Perseroan kembali melanjutkan Program Lingkungan Harmoni BTN yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara terpadu melalui beberapa pelatihan dan/atau pendidikan serta pendampingan kepada masyarakat sebagai dasar pengembangan program yang terintegrasi. Terdapat Sembilan kegiatan utama yang menjadi fokus program pengembangan masyarakat yaitu; Program Sejahtera BTN, Religi BTN, Hijau BTN, Bugar BTN, Sehat BTN, Cerdas BTN, Bersih BTN, Peduli BTN serta Kemitraan BTN.

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebagai wujud komitmen atas Prinsip Keuangan Berkelanjutan yaitu Investasi yang bertanggung jawab serta Inklusi Keuangan maka Perseroan berupaya mendorong pemberian kredit untuk kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi, kemandirian, dan kualitas lingkungan hidup. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup tetap menjadi dasar utama Perseroan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan dimana Bank BTN secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terkait permasalahan lingkungan oleh kegiatan yang mendapatkan akses pembiayaan dari Perseroan.

Peningkatan Akses Layanan Keuangan Perbankan di Daerah Tertinggal

Sebagai wujud pengembangan inklusi keuangan dan mendorong akses perbankan bagi masyarakat di daerah tertinggal, Perseroan telah membuka akses layanan keuangan perbankan di 19 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. 19 akses layanan keuangan tersebut telah dibuka di berbagai Kabupaten dan Kota, yakni Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, Pandeglang, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Kupang, Ketapang, Sintang, Gorontalo Utara, Mamuju Tengah, Sorong, Gunung Sitoli, Solok, Morowali dan Bima.

Pembiayaan Pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD)

Perkembangan kota akan mendorong pertumbuhan cluster-cluster rumah tinggal yang diharapkan terintegrasi dengan layanan transportasi massal sebagaimana yang diharapkan oleh program pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas secara lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) di Stasiun KAI Cisauk dan Stasiun LRT Bekasi Timur, dimana hal ini berkontribusi menurunkan emisi yang berasal dari pemakaian kendaraan pribadi yang berdampak menurunkan tingkat polusi dan kemacetan di Jakarta.

Nama TOD	Pengembang	Lokasi	Jumlah Unit	Nilai Kredit
KAI Cisauk	PT Adhi Commuter Properti	Stasiun KAI Cisauk	532	+/- 107.000.000.000
Stasiun LRT Bekasi Timur	PT Adhi Commuter Properti	Stasiun LRT Bekasi Timur	734	+/- 180.000.000.000

TJSL untuk Pembangunan/Renovasi Rumah yang Berkelanjutan

Perseroan turut berperan serta dalam peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Renovasi 5 unit *homestay* yang berlokasi di pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, renovasi 15 unit Rumah Sehat yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Bandung dan program Elektrifikasi 400 unit rumah bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Anggaran TJSL untuk mendukung Keuangan Berkelanjutan adalah sebesar Rp699.000.000.

Penggunaan Tenaga Kerja dan Pemasok Lokal

Perseroan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan CSR yang memberikan efek pengembangan dan pemberdayaan secara langsung bagi masyarakat. Karena itu, Perseroan merekrut tenaga kerja lokal dalam mendukung kegiatan operasional serta melakukan kerja sama dengan pemasok lokal terkait kebutuhan barang dan jasa sebagai mitra kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang terutama dengan perusahaan bidang konstruksi sebagai pendukung dalam terwujudnya Program Sejuta Rumah. Dalam pemilihan pemasok lokal sesuai dengan konteks keberlanjutan, Perseroan memaksimalkan pemilihan pemasok lokal yaitu pemasok yang berasal dari Indonesia. Hal ini selain untuk menekan biaya operasional, juga bertujuan untuk mendukung kemajuan perusahaan-perusahaan dalam negeri.

Program Edukasi dan Literasi Keuangan

Program Edukasi dan Literasi Keuangan Perbankan merupakan implementasi dari arahan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan pemahaman yang baik tentang perbankan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung program tersebut, Perseroan telah menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan (literasi keuangan) bagi masyarakat dalam mencapai atau meningkatkan kesejahteraan, antara lain:

1. Taman Bacaan Sekolah;
2. Program Internet Gratis untuk Pelajar di Desa – Desa;
3. Program Pelatihan Peningkatan kualitas Guru Sekolah Dasar;

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan

Komitmen Perseroan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha kecil guna menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang telah dianggarkan oleh Perseroan. Target atas program ini adalah memilih mitra binaan yang memiliki prospek baik pada masa mendatang, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta memiliki motivasi menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Perseroan berharap agar dana yang dialokasikan dan dipinjamkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga menghasilkan daya guna yang optimal.

Pada tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan Program Kemitraan sebanyak Rp23,51 miliar kepada 319 mitra binaan yang terbagi menjadi 8 (delapan) sektor meliputi sektor perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, industri, usaha jasa, perdagangan, dan sektor hibah (berupa Dana Pembinaan dan hibah kepada BUMN Khusus (PT PNM)). Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2020

Sektor Usaha	Jumlah Debitur	Realisasi (Rp Juta)
Sektor Perdagangan	231	9.419
Sektor Jasa	56	2.711
Sektor Peternakan	22	818
Sektor Industri	4	270
Sektor Pertanian	3	125
Sektor Perikanan	2	80
Sektor Perkebunan	1	50
Hibah (Dana Pembinaan dan BUMN Khusus)	-	10.031
Jumlah	319	23.505

Tabel Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Sebaran Kantor Wilayah Perseroan Tahun 2020

Sektor Usaha	Jumlah Debitur	Realisasi (Rp Juta)
Bali	2	60
Bangka Belitung	6	160
Banten	28	1.030
Bengkulu	5	180
DI Yogyakarta	4	260
DKI Jakarta	32	12.229
Gorontalo	1	17
Jambi	5	260
Jawa Barat	47	2.129
Jawa Tengah	28	1.268
Jawa Timur	62	2.664
Kalimantan Barat	4	70
Kalimantan Selatan	13	545
Kalimantan Tengah	6	165
Kalimantan Timur	8	233
Kepulauan Riau	4	195
Lampung	2	140
Maluku	5	85
Maluku Utara	8	200
Nanggroe Aceh Darussalam	0	-
Nusa Tenggara Barat	12	290
Nusa Tenggara Timur	8	235
Papua	4	138
Riau	2	34
Sulawesi Selatan	4	145
Sulawesi Tengah	4	130
Sulawesi Tenggara	1	150
Sulawesi Utara	1	15
Sumatera Barat	3	99
Sumatera Selatan	4	180
Sumatera Utara	6	199
Jumlah	319	23.505

Program Bina Lingkungan

Perseroan melaksanakan program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah Perseroan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Pada tahun 2020, realisasi penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan sebesar Rp8.357.159.575 yang disalurkan kepada masyarakat di 34 Provinsi melalui 6 (enam) wilayah kerja Perseroan.

Dana bantuan program Bina Lingkungan disalurkan melalui berbagai kegiatan bantuan meliputi pendidikan dan pelatihan, prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, peningkatan kesehatan dan sosial masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Berikut realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2020.

Tabel Realisasi Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Tahun 2020

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)
Bencana Alam	2.221
Pendidikan dan/atau Pelatihan	715
Peningkatan Kesehatan	2.291
Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	601
Sarana Ibadah	1.436
Pelestarian Alam	151
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, termasuk untuk: 1. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; 2. Penyediaan sarana air bersih; 3. Penyediaan sarana mandi cuci kakus; 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; dan 7. Bantuan peralatan usaha.	939
Jumlah Penyaluran	8.357

Biaya yang Dikeluarkan Terkait Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Anggaran dana CSR Perseroan ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Perseroan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Pada tahun 2020, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk program CSR sebesar Rp18.225.680.752,- yang telah disalurkan kepada berbagai bidang kegiatan meliputi; ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, seni budaya serta kegiatan keagamaan.

Tabel Anggaran Dana CSR Perseroan Tahun 2020

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp Juta)		
	2020	2019	2018
Ekonomi	2.642	662	1.456
Seni Budaya	-	63	100
Olahraga	-	-	149
Pendidikan	3.813	2.304	1.047
Kesehatan	5.241	-	204
Sarana dan Prasarana	5.803	2.952	
Keagamaan	557	946	
Pelestarian Alam	167	15	6
Jumlah	18.225	6.942	5.180

Indeks Referensi OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Umum		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Sampul; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	✓
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir	✓
Ikhtisar Keuangan Utama		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	19-20
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	16-19
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. Rasio keuangan, paling sedikit mencakup: 1. Rasio KPMM; 2. Rasio Return on Asset (ROA); 3. Rasio Return on Equity (ROE); 4. Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif; 5. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif; 6. CKPN aset keuangan terhadap aset produktif; 7. Rasio Non-performing Loans (NPL); 8. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); 9. Cost to Income Ratio (CIR); 10. Rasio Net Interest Margin (NIM); 11. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 12. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM); dan 13. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN);	22-23

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	- Jumlah saham yang beredar; - Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; - Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. - Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: - Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	23-26
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: - Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); - Tingkat bunga/imbalan; - Tanggal jatuh tempo; dan - Peringkat obligasi/sukuk tahun 2019 dan 2020. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan.	27-28
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: - Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; - Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; - Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan - Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	40-45
Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: - Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: - Kebijakan strategis; - Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan - Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; - Analisis tentang prospek usaha; - Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; - Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya; - Struktur organisasi; - Aktivitas utama; - Teknologi informasi; - Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; - Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana; - Perkembangan perekonomian dan target pasar; - Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri; - Jumlah, jenis, dan lokasi kantor; - Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank; - Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; - Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan - Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	46-57

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	58-59
Profil Perusahaan		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	62-63
Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	65-66
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	67-77
Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi	80-81
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	82-84
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	85-90
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	94-101
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	117-126

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	127-129
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	130
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	130
Kronologis penerbitan efek (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	132-138
Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	131
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	139-141
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	142-145
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	146-154
Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	155

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti) 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	156-159
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan Profitabilitas	186-211
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; 5. Arus kas; 6. Suku bunga dasar kredit; dan 7. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.	218-234 dan 302
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	232-235
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen	236
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	280
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	280

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	282-287
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.	290
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	212-217
Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	180-186
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	290-291
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga <i>exercise</i> . Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	291
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	291-292
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	292-299
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	305-306
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	306-308

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: - Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan - Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	309-310
Good Corporate Governance		
Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: - Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; - Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan - Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	371-372, 394, 373
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: - Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan - Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	377-378
Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: - Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; - Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan - Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	407, 461, 405
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: - Kriteria yang digunakan dalam penilaian; - Pihak yang melakukan penilaian; - Skor penilaian masing-masing kriteria; - Rekomendasi hasil penilaian; dan - Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020 agar diungkapkan.	612-625
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: - Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; - Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; - Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; - Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; - Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan - Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	528-531
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan) Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: - Tanggal Rapat; - Peserta Rapat; dan - Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	379-391, 411-457

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	356
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	375, 408
Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	464-473
Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	473-484
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	484-490
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	491-494
Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	494-501

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	535-537
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil <i>reviu</i> yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	538-553
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil <i>reviu</i> yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	553-556
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial; 2. Informasi mengenai <i>method</i> dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan; 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan; 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban; 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> ; 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan; dan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial.	628-642
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia; dan 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia.	643-644
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil; dan 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil.	645-647

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan; 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan; 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup; dan 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	648-654
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	655-660
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2020 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	661-662
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan; 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan; 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	663-667
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dalainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	568-569

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), <i>media massa</i> , <i>mailing list</i> , <i>buletin</i> , pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	569-578
Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	580-582
Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	586-593
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	593-594
Informasi Keuangan		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi
Opini auditor independen atas laporan keuangan		Laporan Keuangan Halaman Laporan Auditor Independen
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	Laporan Keuangan Halaman Laporan Auditor Independen
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan (jika relevan).	Laporan Keuangan Halaman 1-304
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	Laporan Keuangan Halaman 8-9
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 12-14

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 30-99
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	Laporan Keuangan Halaman 239-253
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Laporan Keuangan Halaman 94-95, 220-230
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	Laporan Keuangan Halaman 76-78, 103, 165-168
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	Laporan Keuangan Halaman 96, 237
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Laporan Keuangan Halaman 100, 290-294, 257-290
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi

Laporan Keuangan





Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

beserta laporan auditor independen/

Financial statements

As of December 31, 2020

and for the year then ended

with independent auditors' report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama **Nixon L.P Napitupulu**
Alamat Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Alamat Domisili Jl. Kp Bend Melayu RT 001, RW 002
Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Kojas
Jakarta Utara
Nomor Telepon 021-6346762
Jabatan Plt. Direktur Utama, Direktur Finance, Planning & Treasury
Plt. President Director, Director of Finance, Planning & Treasury

Name
Office Address
Residential Address
Telephone Title

Nama **Andi Nirwoto**
Alamat Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Alamat Domisili Jl. Wijaya I No. 10 RT 004, RW 004
Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Nomor Telepon 021-27090770
Jabatan Direktur / Director

Name
Office Address
Residential Address
Telephone Title

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;
- We are responsible for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 10 Februari 2021 / February 10, 2021

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of Board of Directors

Nixon L.P Napitupulu

Plt. Direktur Utama, Direktur Finance, Planning & Treasury
Plt. President Director, Director of Finance, Planning & Treasury

Andi Nirwoto

Direktur/Director

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kantor Pusat

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 Indonesia

T +62 21 633 6789, 633 2666

E csd@btn.co.id

www.btn.co.id

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 7	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	8 - 9	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	10 - 11	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	12 - 14	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	15 - 304	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00062/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/II/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00062/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/II/2021

*The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00062/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/II/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00062/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/II/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Yovita

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242/Public Accountant Registration No. AP.0242

10 Februari 2021/February 10, 2021

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET				ASSETS
KAS	1.429.426	2a,2e,4	1.369.167	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	11.107.672	2a,2e, 2g,5	15.512.329	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2d		CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	2.995.233	2e,2f,2g	391.877	Third parties
Pihak berelasi	221.896	6,45	357.624	Related parties
	3.217.129		749.501	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.808)		(1.632)	Allowance for impairment losses
	3.215.321		747.869	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2d 2e,2h,7,45		PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga	19.830.096		10.996.115	Third parties
Pihak berelasi	337		101.078	Related parties
	19.830.433		11.097.193	
EFEK-EFEK		2a,2d,		SECURITIES
Pihak ketiga	1.123.406	2e,2f,2i,	5.985.588	Third parties
Pihak berelasi	2.082.560	8,45	2.126.461	Related parties
	3.205.966		8.112.049	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.000)		(27.378)	Allowance for impairment losses
	3.203.966		8.084.671	
OBLIGASI PEMERINTAH		2a,2d,		GOVERNMENT BONDS
Pihak berelasi	56.287.751	2e,2i,9,45	11.053.601	Related parties
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		2d, 2e 2f, 2u, 10,45		SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
Pihak ketiga	954.955		1.675.221	Third parties
Pihak berelasi	-		200.000	Related parties
	954.955		1.875.221	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2d,2e,2f, 2j,2k,11,45		LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan				Loans
Pihak ketiga	217.711.277		214.807.263	Third parties
Pihak berelasi	17.340.839		17.405.276	Related parties
	235.052.116		232.212.539	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.151.936)		(5.425.908)	Allowance for impairment losses
	222.900.180		226.786.631	
Pembiayaan/piutang syariah				Sharia financing/receivables
Pihak ketiga	25.059.007		23.609.204	Third parties
Pihak berelasi	3.040		3.416	Related parties
	25.062.047		23.612.620	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(909.007)		(690.258)	Allowance for impairment losses
	24.153.040		22.922.362	
	247.053.220		249.708.993	
TAGIHAN DERIVATIF		2e		DERIVATIVE RECEIVABLES
Pihak ketiga	70.386	2an, 12	-	Third parties
TAGIHAN AKSEPTASI		2d,2e		ACCEPTANCES RECEIVABLES
Pihak berelasi	196.071	2l,13	487.052	Related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.393)		-	Allowance for impairment losses
	194.678		487.052	
PENYERTAAN SAHAM		2e		INVESTMENT IN SHARES
Pihak ketiga	-	2m,14	270	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	-		(270)	Allowance for impairment losses
	-		-	
ASET TETAP		2n,2o,15,36		PREMISES AND EQUIPMENT
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	9.053.182		8.108.086	Cost/Revaluation value
Akumulasi penyusutan	(3.234.737)		(2.707.428)	Accumulated depreciation
	5.818.445		5.400.658	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	6.285.574	2e,16	3.210.772	INTEREST RECEIVABLES
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	1.972.393	2ag,40	629.105	DEFERRED TAX ASSETS - Net
ASET LAIN-LAIN	3.784.186	2e,2p, 2q,2am,17	2.600.197	OTHER ASSETS
TOTAL ASET	361.208.406		311.776.828	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	4.765.276	2e,2r,18	1.999.183	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
SIMPANAN DARI NASABAH		2d,2e,2s,45 19		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro				Demand deposits
Pihak ketiga	16.546.465		9.583.560	Third parties
Pihak berelasi	52.054.300		38.524.556	Related parties
	68.600.765		48.108.116	
Giro <i>Wadiah</i>		19		<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga	946.930		917.455	Third parties
Pihak berelasi	2.138.165		1.675.555	Related parties
	3.085.095		2.593.010	
	71.685.860		50.701.126	
Tabungan		20		<i>Saving deposits</i>
Pihak ketiga	38.279.792		41.212.905	Third parties
Pihak berelasi	420.345		272.004	Related parties
	38.700.137		41.484.909	
Tabungan <i>Wadiah</i>		20		<i>Wadiah saving deposits</i>
Pihak ketiga	903.998		789.042	Third parties
Pihak berelasi	1.211		847	Related parties
	905.209		789.889	
	39.605.346		42.274.798	
Deposito berjangka		21		<i>Time deposits</i>
Pihak ketiga	60.918.288		61.281.176	Third parties
Pihak berelasi	86.940.320		52.648.592	Related parties
	147.858.608		113.929.768	
Total simpanan dari nasabah	259.149.814		206.905.692	<i>Total deposits from customers</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2t, 23		DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Pihak ketiga	29.880		4.509.238	Third parties
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI		2e,2u, 22		SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS
Pihak ketiga	-		935.000	Third parties
LIABILITAS AKSEPTASI		2d,2e,2l 24,45		ACCEPTANCES PAYABLE
Pihak berelasi	196.071		487.052	Related parties
LIABILITAS DERIVATIF		2e,2an 12		DERIVATIVE PAYABLE
Pihak ketiga	22.787		-	Third parties
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN		1c,2d, 2e,2v,25,45		SECURITIES ISSUED
Pihak ketiga	10.835.733		14.405.980	Third parties
Pihak berelasi	4.974.733		5.377.572	Related parties
	15.810.466		19.783.552	
PINJAMAN YANG DITERIMA		2d,2e,2w, 26,45		FUND BORROWINGS
Pihak ketiga	6.798.082		8.681.368	Third parties
Pihak berelasi	17.009.056		13.784.289	Related parties
	23.807.138		22.465.657	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	726.914	2e,28	630.002	INTEREST PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	6.489	2d,2e,2af 29,41	-	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND AND CONTINGENCIES
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	6.666.875	2d,2e,2ae 30,42	5.736.637	EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI				SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES
Pihak ketiga	4.194.554	2d,2e,2x 27,45	-	Third parties
Pihak berelasi	5.999.878		5.999.669	Related parties
	10.194.432		5.999.669	
TOTAL LIABILITAS	321.376.142		269.451.682	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH				LIABILITIES, TEMPORARY
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				SYIRKAH FUNDS AND
				EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
SIMPANAN NASABAH		2d,2e,2aa		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro <i>Mudharabah</i>		45,19		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	341.683		826.682	Third parties
Pihak berelasi	17.003		588.030	Related parties
	358.686		1.414.712	
 Tabungan <i>Mudharabah</i>		20		 <i>Mudharabah saving deposits</i>
Pihak ketiga	2.683.283		3.226.349	Third parties
Pihak berelasi	430.860		136.577	Related parties
	3.114.143		3.362.926	
 Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>				 <i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	11.022.780	21	11.661.400	Third parties
Pihak berelasi	5.345.495		2.038.501	Related parties
	16.368.275		13.699.901	
Total simpanan nasabah	19.841.104		18.477.539	Total deposits from customers
 SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2aa		 DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Giro <i>Mudharabah</i>		23		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	176		243	Third parties
 Tabungan <i>Mudharabah</i>		23		 <i>Mudharabah saving deposits</i>
Pihak ketiga	2.139		3.299	Third parties
 Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		23		 <i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	1.000		7.870	Third parties
Total simpanan dari bank lain	3.315		11.412	Total deposits from other banks
TOTAL DANA SYIRKAH				TOTAL TEMPORARY
TEMPORER	19.844.419		18.488.951	SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH				LIABILITIES, TEMPORARY
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				SYIRKAH FUNDS AND
				EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nominal				Capital stock - Rp500
Rp500 (Rupiah penuh)				par value per share (full amount)
per saham masing-masing				as of December 31, 2020 and
pada tanggal 31 Desember 2020				2019, respectively
dan 2019				Authorized capital 20,478,432,000
Modal dasar 20.478.432.000				shares (full amount)
saham (nilai penuh)				(consisting of 1 share of Series A
(terdiri dari 1 lembar saham seri A				Dwiwarna and 20,478,431,999
Dwiwarna dan 20.478.431.999				shares of series B)
lembar saham seri B)				as of December 31, 2020
masing-masing pada tanggal				and 2019, respectively
31 Desember 2020 dan 2019				Issued and fully paid capital
Modal ditempatkan dan disetor penuh				10,590,000,000 shares (full amount)
10.590.000.000 saham (nilai penuh)				(consisting of 1 share of series A
(terdiri dari 1 lembar saham seri A				Dwiwarna and 10,589,999,999 shares
Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar				of series B as of
Saham seri B)				December 31, 2020 and
masing-masing pada tanggal				2019, respectively
31 Desember 2020 dan 2019	5.295.000	2y,31a	5.295.000	Additional paid-in capital
Tambahan modal disetor	2.054.454	31b	2.054.454	Net unrealized gain (loss)
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum				securities and Government
direalisasi atas efek-efek dan obligasi				bonds, net of deferred tax
Pemerintah setelah pajak tangguhan				Fair value through other
Nilai wajar melalui				comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain	1.100.019	2i,8,9	-	available for sale
Tersedia untuk dijual	-	2i,8,9	11.460	Remeasurement
Pengukuran kembali				of defined benefit plan
Program Imbalan Pasti -				- net of deferred tax
setelah pajak tangguhan	(531.674)	2ae	(194.707)	Effective portion of
Bagian efektif Lindung Nilai				Cash Flow Hedge
Arus Kas	(1.239)	2an,12	-	Revaluation Surplus of Fixed Assets
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	2n,15	3.307.991	Retained Earnings*)
Saldo laba*)				Appropriated
Telah ditentukan penggunaannya	7.004.198		12.995.995	Unappropriated
Belum ditentukan penggunaannya	1.759.096	2b,2y	366.002	
TOTAL EKUITAS	19.987.845		23.836.195	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA				TOTAL LIABILITIES,
SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH
DAN EKUITAS	361.208.406		311.776.828	FUNDS AND EQUITY

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 was eliminated as a result of quasi-reorganization on May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bunga	22.947.252	2ab,2ac 32a	23.271.432	Interest Income and Income from Profit Sharing Interest
Bagi hasil dan margin unit syariah	2.158.528	2ad,32b	2.448.442	Profit Sharing and Margin from Sharia Unit
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.105.780		25.719.874	Total Interest Income and Income from Profit Sharing
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus Bunga	(14.687.492)	2ab,33a	(15.167.294)	Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses
Beban pendanaan lainnya	(147.146)		(157.708)	Interest
Bonus Simpanan Wadiah	(21.782)	2ad,33b	(15.641)	Other financing expenses
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah	(1.335.517)	2ad,33b	(1.417.430)	Wadiah Bonus
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(16.191.937)		(16.758.073)	Third Parties' Share on Return of Mudharabah
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.913.843		8.961.801	Total Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses
Pendapatan Operasional Lainnya				Interest Income and Income from Profit Sharing - Net
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	760.751		832.556	Other Operating Income
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	275.538		113.399	Administration fees and penalties on deposits and loans
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	356.168	2i,8	478.339	Income from recovery of loans written-off
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	308.351	2i,9	144.553	Gain on sale of securities - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	18.493	2i,8	20.894	Gain on sale of government bonds - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	87.011	2i,9	1.745	Unrealized gain on changes in fair value of securities - net
Lain-lain	708.295	34	518.366	Unrealized gain on changes in fair value of Government Bonds - net
Total Pendapatan Operasional Lainnya	2.514.607		2.109.852	Others
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.258.479)	2e,2p,35	(3.486.665)	Total Other Operating Income
Penyisihan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontijensi	(3.784)	29	-	Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets
				Provision for Estimated losses on Comitement and Contingies

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS (continued)
Beban Operasional Lainnya				Other Operating Expenses
Umum dan administrasi	(3.103.552)	36	(3.425.022)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(2.977.208)	2ae,37,45	(2.863.955)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan Pemerintah	(469.360)	44	(467.791)	Premium on Government's guarantee program
Lain-lain	(285.782)	38	(306.447)	Others
Total Beban Operasional Lainnya	(6.835.902)		(7.063.215)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL	2.330.285		521.773	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(59.428)	39	(110.711)	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.270.857		411.062	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(668.499)	2ag,40	(201.799)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.602.358		209.263	INCOME FOR THE YEAR
Pendapatan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Revaluasi Aset Tetap	-	2n,15	341.000	Revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(397.512)	2ae,42	(132.869)	Remeasurement of defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	60.545		21.048	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified to profit or loss
Bagian efektif Lindung Nilai - Arus Kas	(1.239)		-	Effective part of Hedging Cash Flow
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada : Nilai Wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.342.481	2i,8,9	-	Unrealized net gain (loss) on changes in value of Fair value through other comprehensive income securities
Tersedia untuk dijual	-		148.613	Available for sale
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(253.922)		(29.723)	Income tax related to items that may be reclassified to profit or loss
Total laba komprehensif tahun berjalan	2.352.711		557.332	Total Comprehensive Income for the year
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
Dasar (nilai penuh)	151	2ai,50	20	Basic (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk dijual -Neto/ Unrealized Gain (Loss) on Available- for-Sale Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program mbalan Pasti - Neto/ Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Fixed Assets	Saldo Laba/ Retained Earnings*)		Ekuitas/ Equity	
							Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2018		5.295.000	2.054.454	(107.430)	(82.886)	2.966.991	10.749.657	2.964.662	23.840.448	Balance as of December 31, 2018
Total Laba Komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,15,42	-	-	118.890	(111.821)	341.000	-	209.263	557.332	Total comprehensive income for the year
Pembagian laba										Distribution of income
Dividen	31c	-	-	-	-	-	-	(561.585)	(561.585)	Dividends
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	31c	-	-	-	-	-	2.246.338	(2.246.338)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2019		5.295.000	2.054.454	11.460	(194.707)	3.307.991	12.995.995	366.002	23.836.195	Balance as of December 31, 2019

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempat kan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain -Neto/ Unrealized Gain (Loss) on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ Remeasur ment of Defined Benefit Plan -Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Fixed Assets	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ Effective portion of cash flow hedges	Saldo Laba/ Retained Earnings*)		Ekuitas/ Equity	
								Telah Ditentukan Penggunaann yal Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaann yal Unappropri ated		
Saldo per 31 Desember 2019		5.295.000	2.054.454	11.460	(194.707)	3.307.991	-	12.995.995	366.002	23.836.195	Balance as of December 31, 2019
Dampak penyesuaian transisi atas Penerapan PSAK 71 dan PSAK 73		-	-	-	-	-	-	(6.180.134)	-	(6.180.134)	Impact of transitional adjustment from implementation of SFAS 71 and SFAS 73
Saldo per 1 Januari 2020		5.295.000	2.054.454	11.460	(194.707)	3.307.991	-	6.815.861	366.002	17.656.061	Balance as of January 1, 2020
Total Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,15,42	-	-	1.088.559	(336.967)	-	(1.239)	-	1.602.358	2.352.711	Total comprehensive income (loss) for the year
Pembagian laba											Distribution of income
Dividen	31c	-	-	-	-	-	-	-	(20.927)	(20.927)	Dividen
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	31c	-	-	-	-	-	-	188.337	(188.337)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2020		<u>5.295.000</u>	<u>2.054.454</u>	<u>1.100.019</u>	<u>(531.674)</u>	<u>3.307.991</u>	<u>(1.239)</u>	<u>7.004.198</u>	<u>1.759.096</u>	<u>19.987.845</u>	Balance as of December 31, 2020

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin	22.025.695		25.453.902	Interest, profit sharing, and margin
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	331.915		153.997	Recoveries from loan debts written-off
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(16.095.612)		(16.646.046)	Interest and bonus, fees and commissions paid
Pembayaran pajak penghasilan badan	(341.466)		(590.027)	Corporate income tax paid
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-		6.710	Recoveries from tax assessment letter
Beban operasional lainnya - neto	(3.986.344)		(4.845.107)	Other operating expenses - net
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	(59.428)		(110.711)	Other non-operating Income (expense) - net
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.874.760		3.422.718	Cash receipts before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada bank lain	(595.305)		(351.800)	Placement from other banks
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	172.622		2.452.777	Fair value through profit or loss securities
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(18.122.548)		1.547.115	Fair value through profit or loss government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(7.255.860)		(18.229.537)	Loans and sharia financing/ receivables
Aset lain-lain	(1.285.447)		300.335	Other assets
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	2.446.942		(301.002)	Current liabilities
Simpanan dari nasabah				Deposits from customer
Giro	20.492.649		(5.565.072)	Demand deposits
Giro Wadiah	492.085		(188.844)	Wadiah demand deposits
Tabungan	(2.784.772)		3.134.070	Savings deposits
Tabungan Wadiah	115.320		23.565	Savings deposits Wadiah
Deposito berjangka	33.928.841		(1.532.515)	Time deposits
Simpanan dari bank lain	(4.479.357)		1.516.659	Deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	177.416		(734.052)	Other liabilities
Dana syirkah temporer	1.355.469		(322.778)	Temporary syirkah funds
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	26.532.815		(14.828.361)	Net Cash provided by (used in) Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	1.061.584		-	Proceeds from matured amortized cost securities
Pembelian aset tetap (Kenaikan) Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Kenaikan) Penurunan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(798.086)	15	(366.561)	Acquisitions of premises and equipment (Increase) Decrease Fair value through other comprehensive income
Pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	1.082.203		(718.350)	(Increase) Decrease Fair value through other comprehensive income
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(25.844.225)		(2.085.930)	Purchase of amortized cost government bonds
Penerimaan efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	(148.619)		(947.963)	Purchased of amortized cost securities
Pembelian efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	-		(1.083.081)	Proceed from Securities purchased under agreement to resell
	920.267		-	Purchased Securities purchased under agreement to resell
	-		(1.875.221)	
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi	(23.726.876)		(7.077.106)	Net Cash used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.493.811		4.144.000	Proceeds from issuance of securities
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(5.322.500)		(5.122.930)	Payment of matured securities issued
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(935.000)		-	Payments of matured securities sold under repurchase agreements
Pembayaran dividen	(20.927)	31c	(561.585)	Payments of dividends
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	9.141.448		11.001.654	Proceeds from fund borrowings
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(7.823.008)		(4.020.720)	Payment from fund borrowings
Penerimaan dari efek-efek subordinasi	4.047.884		2.999.950	Proceeds from subordinated securities
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	581.708		8.440.369	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	3.387.647		(13.465.098)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	31.249.908		44.715.006	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	34.637.555		31.249.908	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				The details of cash and cash equivalents at end of period are as follows:
Kas	1.429.426	2a,4	1.369.167	Cash
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	2g,5	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.217.129	2g,6	749.501	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	18.883.328	2h,7	10.745.393	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	2i,8	2.873.518	Certificates of Bank Indonesia - maturing within three months or less since the acquisition date
Total	34.637.555		31.249.908	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank has obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H., The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Maret 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 21 April 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 103 kantor cabang (termasuk 25 kantor cabang syariah), 373 kantor cabang pembantu (termasuk 59 kantor cabang pembantu syariah), 254 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.990 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memiliki 103 kantor cabang (termasuk 25 kantor cabang syariah), 379 kantor cabang pembantu (termasuk 53 kantor cabang pembantu syariah), 366 kantor kas (termasuk 8 Kantor Kas Syariah), dan 3.014 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 66 dated March 23, 2018 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 23, 2018 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.02-50609 dated April 21, 2018.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2020, the Bank has 103 branch offices (including 25 sharia branch offices), 373 sub-branch offices (including 59 sharia sub-branch offices), 254 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,990 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

As of December 31, 2019, the Bank has 103 branch offices (including 25 sharia branch offices), 379 sub-branch offices (including 53 sharia sub-branch offices), 366 cash offices (including 8 sharia cash offices), and 3,014 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 which should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value (full Rupiah) of Rp1,000,000 per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond* sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN I/ BTN Bonds I	50.000	5 tahun/years	25 Juli/ July 25, 1994*)	18,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN II/ BTN Bonds II	50.000	5 tahun/years	1 Juni/ June 1, 1995*)	16,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN III/ BTN Bonds III	50.000	5 tahun/years	11 November/ November 11, 1996*)	20,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN IV/ BTN Bonds IV	100.000	5 tahun/years	23 Januari/ January 23, 1996*)	17,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN V/ BTN Bonds V	150.000	5 tahun/years	31 Juli/ July 31, 1998*)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ BTN Bonds VI	350.000	5 tahun/years	21 Desember/ December 21, 2000*)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ BTN Bonds VII	200.000	5 tahun/years	22 Juli/ July 22, 2001*)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VIII	400.000	5 tahun/years	18 Juli/ July 18, 2002*)	14,15% tetap/ fixed
Obligasi BTN IX/ BTN Bonds IX	750.000	5 tahun/years	2 Oktober/ October 2, 2008*)	12,50% tetap/ fixed
Obligasi BTN X/ BTN Bonds X	750.000	5 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2009*)	12,20% tetap/ fixed
Obligasi BTN XI/ BTN Bonds XI	750.000	5 tahun/years	6 Juli/ July 6, 2010*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XII/ BTN Bonds XII	1.000.000	10 tahun/years	19 September/ September 19, 2016*)	12,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII A/ BTN Bonds XIII A	300.000	3 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2012*)	11,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2013*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2014*)	12,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIV/ BTN Bonds XIV	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni/ June 11, 2020*)	10,25% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds

The Bank issued 24 (twenty-four) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2020, with the details as follows:

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond* sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN XV/ BTN Bonds XV	1.300.000	10 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2021	9,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ Continuing Bonds I Phase I BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2022	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ Continuing Bonds I Phase II BTN	2.000.000	10 tahun/years	27 Maret/ March 27, 2023	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ Continuing Bonds II Phase I BTN				
Seri A/A Series	900.000	3 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2018*)	9,63% tetap/ fixed
Seri B/B Series	500.000	5 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2020*)	9,88% tetap/ fixed
Seri C/C Series	800.000	7 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2022	10,00% tetap/ fixed
Seri D/D Series	800.000	10 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2025	10,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ Continuing Bonds II Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.347.000	3 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2019*)	8,20% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.653.000	5 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2021	8,75% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BTN/ Continuing Bonds III Phase I BTN				
Seri A/A Series	1.466.000	3 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2020*)	8,30% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.295.000	5 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2022	8,50% tetap/ fixed
Seri C/C Series	853.000	7 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2024	8,70% tetap/ fixed
Seri D/D Series	1.386.000	10 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2027	8,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II BTN/ Continuing Bonds III Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.756.500	1 tahun/year	8 Juli/ July 8, 2020*)	7,75% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.168.000	3 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2022	8,75% tetap/ fixed
Seri C/C Series	1.219.500	5 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2024	9,00% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 24 (twenty-four) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2020, with the details as follows (continued):

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond* sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi Subordinasi BTN II/ Subordinated Bonds BTN II	250.000	10 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2014**)	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12,60% fixed for first year until fifth year, 22,60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I BTN/ Continuing Bonds IV Phase I BTN				
Seri A/A Series	577.000	1 tahun/year	29 Agustus/ August 29, 2021	6,75% tetap/ fixed
Seri B/B Series	727.000	3 tahun/years	19 Agustus/ August 19, 2023	7,80% tetap/ fixed
Seri C/C Series	196.000	5 tahun/years	19 Agustus/ August 19, 2025	8,40% tetap/ fixed
Dolar Amerika Serikat BBTN September or Global Bond 2020/ BBTN September or Global Bond 2020	300.000.000	5 tahun/years	23 Januari/ January 23, 2025	United States Dollar 4,20% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW.01/3104/DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 24 (twenty-four) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2020, with the details as follows (continued):

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman Letter No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
(lanjutan)

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lock up* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of December 31, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

Untuk memperoleh awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2c). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

1. GENERAL (continued)

e. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2c). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 12 Maret 2020, dengan berita acara No. 14 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

Komisaris Utama/Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Chandra Hamzah*
Eko Djoeli Heripoerwanto
Heru Budi Hartono**
Andin Hadiyanto***
Armand Bachtiar Arief****
Ahdi Jumhari Luddin*****

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 9/KDK.03/2020 tertanggal 4 Mei 2020.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 5/KDK.03/2020 tertanggal 16 Maret 2020.

*** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 53/KDK.03/2020 tertanggal 10 Juli 2020.

**** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 12/KDK.03/2020 tertanggal 14 Mei 2020.

***** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 6/KDK.03/2020 tertanggal 16 Maret 2020.

1. GENERAL (continued)

**f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee and
Employees**

Based on the Bank's The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 12, 2020, as stated under the notarial No. 14 by Notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2020

President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

* Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of President Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 9/KDK.03/2020 dated May 4, 2020.

** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 5/KDK.03/2020 dated March 16, 2020.

*** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 53/KDK.03/2020 dated July 10, 2020.

**** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 12/KDK.03/2020 dated May 14, 2020.

***** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 6/KDK.03/2020 dated March 16, 2020.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 27 November 2019, dengan berita acara No. 97 yang dibuat oleh Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Komisaris Utama/Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Chandra Hamzah*
Eko Djoeli Heripoerwanto**
Heru Budi Hartono*
Andin Hadiyanto*
Armand Bachtiar Arief*
Ahdi Jumhari Luddin*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 17 Mei 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor SR-344/PB.12/2019 tertanggal 20 Desember 2019.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 27, 2019, as stated under the notarial No. 97 by Notary Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., the composition of the Bank's Board of Commissioners is as follows:

December 31, 2019

President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

* Appointed as a Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.

** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on May 17, 2019 and effective as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number SR-344/PB.12/2019 dated December 20, 2019.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan (lanjutan)**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 12 Maret 2020, dengan berita acara No. 14 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

PLT Direktur Utama, Direktur *Finance, Planning & Treasury*
Direktur *Consumer and Commercial Lending*
Direktur *Human Capital, Legal, and Compliance*
Direktur *Remedial and Wholesale Risk*
Direktur *Operation, IT, and Digital Banking*
Direktur *Distribution and Retail Funding*
Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics*

Nixon L.P. Napitupulu*
Hirwandi Gafar**

Yossi Istanto***
Elisabeth Novie Riswanti****
Andi Nirwoto
Jasmin*****

Setiyo Wibowo*****

* Ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Surat Dewan Komisaris No. 128/KOM/MTN/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 65/KDK.03/2020 tertanggal 28 Agustus 2020.

*** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 52/KDK.03/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

**** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 44/KDK.03/2020 tertanggal 26 Juni 2020.

***** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 8/KDK.03/2020 tertanggal 4 Mei 2020.

***** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 48/KDK.03/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

1. GENERAL (continued)

**f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee and
Employees (continued)**

Based on the Bank's The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 12, 2020, as stated under the notarial No. 14 by Notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2020

PLT President Director, Director
Finance, Planning & Treasury
Director *Consumer and Commercial Lending*
Director *Human Capital, Legal, and Compliance*
Director *Remedial and Wholesale Risk*
Director *Operation, IT, and Digital Banking*
Director *Distribution and Retail Funding*
Director *Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics*

* Appointed as a Plt President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on Letter of Commissioner No. 128/KOM/MTN/XII/2020 dated December 23, 2020.

** Appointed as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 65/KDK.03/2020 dated August 28, 2020.

*** Appointed as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 52/KDK.03/2020 dated July 3, 2020.

**** Appointed as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 44/KDK.03/2020 dated June 26, 2020.

***** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 8/KDK.03/2020 dated May 4, 2020.

***** Appointed as a member of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on November 27, 2019 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 48/KDK.03/2020 dated July 3, 2020.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan (lanjutan)**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 27 November 2019, dengan berita acara No. 97 yang dibuat oleh Notaris Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Direktur Utama	Pahala Nugraha Mansury*
Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	Hirwandi Gafar**
Direktur <i>Finance, Planning & Treasury</i>	Nixon L.P. Napitupulu***
Direktur <i>Human Capital, Legal, and Compliance</i>	Yossi Istanto****
Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>	Elisabeth Novie Riswanti*****
Direktur <i>Operation, IT, and Digital Banking</i>	Andi Nirwoto***
Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	Jasmin**
Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics</i>	Setiyo Wibowo**

* Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan efektif sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor SR-53/PB.12/2020 tanggal 10 Februari 2020.

** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*** Dialihkan penugasannya sebagai anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019.

**** Dialihkan penugasannya sebagai anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019. Pengalihan penugasan khusus sebagai Direktur Compliance berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

***** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Agustus 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dialihkan penugasannya sebagai anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2019.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp18.455 dan Rp32.033 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 45b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp48.087 dan Rp72.567 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 45b).

1. GENERAL (continued)

**f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee and
Employees (continued)**

Based on the Bank's an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 27, 2019, as stated under the notarial No. 97 by Notary Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn., the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

December 31, 2019

<i>President Director</i>
<i>Director Consumer and Commercial Lending</i>
<i>Director Finance, Planning & Treasury</i>
<i>Director Human Capital, Legal, and Compliance</i>
<i>Director Remedial and Wholesale Risk</i>
<i>Director Operation, IT, and Digital Banking</i>
<i>Director Distribution and Retail Funding</i>
<i>Director Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics</i>

* Appointed as a President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019 and effective as a President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number SR-53/PB.12/2020 dated February 10, 2020.

** Appointed as a Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.

*** His assignment as Director was changed due to the change in nomenclature of the position of the members of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019.

**** His assignment as Director was changed due to the change in nomenclature of the position of the members of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019. The appointment of Yossi Istanto specifically as Compliance Director is effective after receiving approval from the Financial Services Authority (OJK).

***** Appointed as a Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 29, 2019 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations. Her assignment as Director was changed due to the change in nomenclature of the position of the members of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 27, 2019.

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp18,455 and Rp32,033 for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 45b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp48,087 and Rp72,567 for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 45b).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2020 dan 17 Mei 2019, Bank membagikan tantiem masing-masing sebesar Rp9.378 dan Rp40.000 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dialokasikan dari laba tahun berjalan yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 10 Juni 2019.

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Ari Kurniaman*
Hertanta

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 261/DIR/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 12 Maret 2020.

31 Desember 2019

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Achmad Chaerul
Hertanta*

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 226/DIR/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 8 Maret 2019.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 12 Maret 2020, dengan berita acara No. 14 tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

Ketua
Anggota

M. Quraish Shihab
Mohamad Hidayat

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

During the Bank's Stockholders' General Meetings held on March 12, 2020 and May 17, 2019, the Bank distributed tantiem to the Boards of Directors and Commissioners amounting to Rp9,378 and Rp40,000, respectively, which were allocated from current year income and paid on October 13, 2020 and June 10, 2019, respectively.

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2020

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.261/DIR/2020 dated March 12, 2020 and Head of Corporate Secretary Division since March 12, 2020.

December 31, 2019

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.226/DIR/2019 dated March 1, 2019 and Head of Internal Audit Division since March 8, 2019.

Based on the Bank's Annual General Meeting of Stockholders held on March 12, 2020, as stated under the notarial No. 14 dated March 12, 2020 by notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Sharia Supervisory is as follows:

December 31, 2020

Chairman
Member

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan (lanjutan)**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 23 Maret 2018, dengan berita acara No. 63 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Ketua
Anggota
Anggota

M. Quraish Shihab*
Mohamad Hidayat
Muhammad Gunawan Yasni**

* Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No 61/DIR/SHAD/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan efektif sejak tanggal 22 Januari 2019.

** Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor SR-4/PB.13/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No 61/DIR/SHAD/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan efektif sejak tanggal 22 Januari 2019.

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 119/KOM/BTN/XI/2020 tanggal 25 November 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Ahdi Jumhari Luddin*
Andin Hadiyanto**
Adi Prakoso
Peter Eko Budi Darwito

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 119/KOM/BTN/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 6/KDK.03/2020 tertanggal 16 Maret 2020.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 119/KOM/BTN/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 53/KDK.03/2020 tertanggal 10 Juli 2020.

1. GENERAL (continued)

**f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee and
Employees (continued)**

Based on the Bank's Annual General Meeting of Stockholders held on March 23, 2018, as stated under the notarial No. 63 dated March 23, 2018 by notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Sharia Supervisory is as follows:

December, 31 2019

Chairman
Member
Member

* Has been approved by Financial Services Authority (OJK) through the OJK's Board of Commissioner's decision letter No. SR-4/PB.13/2019 dated January 10, 2019 and appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 61/DIR/SHAD/II/2019 dated January 25, 2019 and effective since January 22, 2019.

** Has been approved by Financial Services Authority (OJK) through the OJK's Board of Commissioner's decision letter No. SR-4/PB.13/2019 dated January 10, 2019 and appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 61/DIR/SHAD/II/2019 dated January 25, 2019 and effective since January 22, 2019.

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 119/KOM/BTN/XI/2020 dated November 25, 2020 are as follows:

December 31, 2020

Chairman
Member
Member
Member

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Director's Decision Letter No. 119/KOM/BTN/XI/2020 dated November 25, 2020 and effective based on OJK Letter Number 6/KDK.03/2020 dated March 16, 2020.

** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Director's Decision Letter No. 119/KOM/BTN/XI/2020 dated November 25, 2020 and effective based on OJK Letter Number 53/KDK.03/2020 dated July 10, 2020.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 1207/DIR/2019 tanggal 15 November 2019 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No.162/KOM/BTN/XI/2019 tanggal 13 November 2019) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Anggota
Anggota

Adi Prakoso*
Peter Eko Budi Darwito**

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 1207/DIR/ 2019 tanggal 15 November 2019 dan efektif sebagai anggota Komite Audit Bank tanggal 13 Maret 2018.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 1207/DIR/ 2019 tanggal 15 November 2019 dan efektif sebagai anggota Komite Audit Bank tanggal 19 November 2019.

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 11.164 dan 11.241 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Board of Directors' Decision Letter No.1207/DIR/2019 dated November 15, 2019 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No.162/KOM/BTN/XI/2019 dated November 13, 2019) is as follows:

December 31, 2019

Member
Member

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Director's Decision Letter No.1207/DIR/2019 dated November 15, 2019 and effective since March 13, 2018.

** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Director's Decision Letter No.1207/DIR/2019 dated November 15, 2019 and effective since November 19, 2019

Based on the Bank's internal policy, key management consists of Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Regional Office Head, Division Head, and Branch Manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2020 and 2019 of 11,164 and 11,241 employees, respectively (unaudited).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Amandemen 2019), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan Bank unit syariah yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2020 and 2019 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

The Financial Statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Amandment 2019), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements of the Bank's sharia unit have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 (Revised 2016) on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 (Revised 2016) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 (Revised 2016) on "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" and other SFAS, as long as not contradict with sharia principles and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) (revised 2013).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The Financial Statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from *istishna* and the profit sharing from the *mudharabah* and *musyarakah* financing and the statement of cash flow.

The statement of cash flows have been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are neither pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

b. Changes in Accounting Policy

Pada tanggal 1 Januari 2020, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

On 1 January, 2020 there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

- a. PSAK No. 1 (Penyesuaian dan Amendemen 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan"
- b. PSAK No. 15 (Amendemen 2017) tentang "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama: kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- c. PSAK No. 25 (Amendemen 2019) tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material"
- d. PSAK No. 62 (Amendemen 2017) tentang "Kontrak Asuransi"
- e. PSAK No. 71 tentang "Instrumen Keuangan"
- f. PSAK No. 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- g. PSAK No. 73 tentang "Sewa"
- h. Amendemen PSAK No. 71 tentang "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- i. Amendemen PSAK No. 102 tentang "Akuntansi Murabahah"
- j. ISAK No. 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba"
- k. ISAK No. 101 tentang "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan"
- l. ISAK No. 102 tentang "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- m. PPSAK No. 13 Pencabutan PSAK No. 45 tentang "Laporan Keuangan Entitas Nirlaba"

- a. SFAS No. 1 (Adjustments and Amendments 2019) regarding "Presentation of Financial Statements"
- b. SFAS No. 15 (Amendments 2017) regarding "Investments in associates and joint ventures: long-term interests in associates and joint ventures"
- c. SFAS No. 25 (Amendment 2019) concerning "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors regarding Material Definition"
- d. SFAS No. 62 (Amendment 2017) regarding "Insurance Contracts"
- e. PSAK No. 71 concerning "Financial Instruments"
- f. PSAK No. 72 regarding "Revenue from Contracts with Customers"
- g. PSAK No. 73 regarding "Leases"
- h. Amendments of SFAS No. 71 regarding "Financial Instruments concerning Early Repayment Features with Negative Compensation"
- i. Amendments of SFAS No. 102 regarding "Accounting for Murabahah"
- j. ISFAS No. 35 regarding "Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities"
- k. ISFAS No. 101 regarding "Recognition of Tangguh Murabahah Income without Significant Risk Related to Inventory Ownership"
- l. ISFAS No. 102 regarding "Impairment of Murabahah Receivables"
- m. PPSAK No. 13 Revocation SFAS No. 45 regarding "Non-Profit Entity Financial Statements"

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

b. Changes in Accounting Policy (Continued)

Bank telah menerapkan standar Akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut diatas yang relevan sejak 1 Januari 2020. Bank tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" telah dibebankan ke saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 54, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan.

The Bank has implemented new accounting standards and the relevant adjustments or amendments since January 1, 2020. The Bank did not restate comparative information for 2019 on the application of SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Leases", therefore comparative information for the year 2019 cannot be compared with the financial information presented for the year ended December 31, 2020. Differences arising from the application of SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Leases" have been charged to retained earnings as of January 1, 2020. The impact of the application on SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Leases" as of January 1, 2020 are disclosed in Note 54, the impact of the adoption of other new standards and other adjustments or amendments are not material to the financial statements.

c. Kuasi-Reorganisasi

c. Quasi-Reorganization

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

The Bank considers the following as its related parties:

- a) suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c) suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;
- g) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

- a) *a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;*
- b) *an entity which is a member of the same group as the Bank;*
- c) *an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;*
- d) *a member of key management personnel of the Bank;*
- e) *a close family member of the person described in clause (a) or (d);*
- f) *an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank;*
- g) *an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e).*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

e. Financial assets and liabilities

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 45.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transactions done by Bank have complied with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 regarding "The affiliate transactions and conflict of interest of certain transactions", at the time the transactions were made. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the Financial Statements and the details have been presented in Note 45 of the Financial Statements. Furthermore, material transactions and balances between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 45.

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, reverse repo, derivatives receivable, acceptance receivable, investment in shares, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, derivatives payable, acceptance payable, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

Bank menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yang menggantikan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

The Bank adopted SFAS No. 71, "Financial Instruments" with effect beginning January 1, 2020 which replaced SFAS No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Dampak penyesuaian transisi atas penerapan awal PSAK No. 71 dijelaskan pada Catatan 54.

The effect of the transitional adjustment on the initial adoption of SFAS No. 71 is discussed in Note 54.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

e. Financial assets and liabilities

(i) Klasifikasi

(i) Classification

Sejak 1 Januari 2020

Starting January 1, 2020

Bank mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Diukur pada biaya perolehan amortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

- Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);
- Amortized cost;
- Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics.

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Bank melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau *Pass SPPI*) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

The Bank assess the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine the characteristics of contractual cash flows only from the payment of principal and interest from the outstanding principal (*Solely Payment of Principal and Interest* or *Pass SPPI*) that is consistent with basic lending agreement. In making the assessment, the Bank considers:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- Leverage;
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*

- The time value of money element of interest;
- Leverage;
- Variability in timing or amount of cash flows;
- Contractually linked instruments;
- Prepayment;
- Non-genuine features and *de minimis*.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan amortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

- Financial assets are managed where the business model objectives in order to collect the contractual cash flows; and
- The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

e. Financial assets and liabilities

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Sejak 1 Januari 2020

Starting January 1, 2020

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan;
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

- *Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if do not meet the conditions required to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

Tidak ada perubahan klasifikasi untuk liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

There was no change in classification for financial liabilities as of January 1, 2020.

Sebelum 1 Januari 2020

Prior to January 1, 2020

Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Bank classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi tersedia untuk dijual.

- *Financial assets at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;*
- *Loans and receivables;*
- *Held-to-maturity investments;*
- *Available-for-sale investments.*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Prior to January 1, 2020 (continued)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;*
- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consist of financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

- *those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held-for-trading, and those that the Bank upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition are designated as available-for-sale investments; or*
- *those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivable deterioration, which are classified as available-for-sale.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Prior to January 1, 2020 (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif yang dapat dikuotasi dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Bank has the positive intention and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period of time are not included in this classification.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange restatement for available-for-sale investments are reported in the statement of profit or loss and comprehensive income.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for trading nor designated at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

(ii) Pengakuan awal

(ii) Initial recognition

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Initial recognition (continued)

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

- b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss. The fair value includes directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Initial recognition (continued)

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

- the determination of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindung nilai menggunakan *credit derivatives* atau *spot* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate spot, but does not meet the criteria for hedge accounting. Otherwise, the loans would be recorded at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, the fair value option is applied to structured investments that include embedded derivatives.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(iii) Subsequent measurement

Sejak 1 Januari 2020

Starting January 1, 2020

Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Fair value through other comprehensive income financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(iii) Subsequent measurement (continued)

Sebelum 1 Januari 2020

Prior January 1, 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables and held-to-maturity investments and other financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) Penghentian pengakuan

(iv) Derecognition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

a. Financial assets are derecognized when:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- The Bank has transferred its rights to receive cash flows arising from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without significant delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not substantially is carried out by a business unit authorized to modify or restructure financial assets when the business unit carries out modification or restructuring of a financial asset.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Bank akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

Modifications to financial assets are considered substantial and the Bank will stop recognizing the original financial assets when:

- a. aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi equity conversion); atau
- b. terdapat konversi mata uang.

- a. the financial asset (or part thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or part thereof), either through legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or
- b. currency conversion.

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner:

a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial:

a. Substantial Modification of Financial Assets:

1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/negosiasi.
2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.
3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

1. When the contractual cash flows on a financial asset are renegotiated or modified (for example, when a credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Bank will record the financial asset as a new / modified financial asset at the modification/negotiation date.
2. The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.
3. income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut (lanjutan):

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner (continue):

4. Selanjutnya, Bank melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasi merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.
5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

4. Subsequently, the Bank assesses whether the new / modified financial assets are those that arise from deteriorating financial assets.

5. Recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.

b. Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial:

b. Non Substantial Modification of Financial Assets:

1. Saat Bank melakukan renegotiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegotiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Bank kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasi tersebut.

1. When the Bank renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others when credit is restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.

2. The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.

3. The Bank then recognizes the gain or loss from the modification (ie the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.

4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

(vi) Income and expense recognition

Sejak 1 Januari 2020

Starting January 1, 2020

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Starting January 1, 2020 (continued)

b. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan (yaitu: instrumen utang yang dimiliki oleh Bank) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

b. Gain and losses on financial assets (which is debt instrument held by Bank) measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are recognized at other comprehensive income, except losses on impairment, until those financial instrument derecognized, unrealized gain and losses record on other comprehensive income reclassified from equity to profit and loss as reclassification adjustment.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diakui dalam laporan laba rugi, kecuali:

Gain and losses on fair value through profit or loss (FVTPL) assets are recognized at statement of profit or loss, except:

- bagian dari hubungan lindung nilai;
- investasi dalam instrumen ekuitas dan Bank telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain;
- liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan Bank disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain;
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Bank disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

- part of a hedging relationship;
- investments in equity instruments and the Bank has chosen to present gains and losses on investment in other comprehensive income;
- financial liabilities determined to be measured at fair value through profit or loss and the Bank is required to present the impact of changes in credit risk liabilities in other comprehensive income;
- financial assets measured at fair value through other comprehensive income and the Bank is required to recognize some changes in fair value in the other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Starting January 1, 2020 (continued)

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Gain or losses on financial assets measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when the financial assets are derecognized, reclassified, through the amortization process or in order to recognize impairment gains or losses.

Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Gain or losses on liabilities instrument measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when liabilities instrument are derecognized and through amortization processed

Sebelum 1 Januari 2020

Prior January 1, 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual, serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

b. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement profit or loss and other comprehensive income.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, kecuali keuntungan dan kerugian nilai tukar, diakui secara langsung dalam laba setelah pajak dalam ekuitas, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Unrealized gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale, except financial assets other than foreign exchange gains and losses are recognized, net of tax, in equity, until the financial assets are derecognized or impaired.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Prior to January 1, 2020 (continued)

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

(vii) Reclassification of financial assets

Sejak 1 Januari 2020

Starting January 1, 2020

Reklasifikasi aset keuangan diperbolehkan jika dan hanya jika terjadi perubahan dalam model bisnis untuk mengelola aset keuangan.

Reclassification of financial assets is permissible when and only when there is change in business model for managing financial assets

Jika Bank mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan ketentuan di atas, Bank menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Bank tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Bank reclassifies financial assets in accordance with the above conditions, the Bank applies prospective reclassification from the date of reclassification. The Bank does not restate gains, losses (including impairment gains or losses), or previously recognized interest.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

(vii) Reclassification of financial assets (continued)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

Sebelum 1 Januari 2020

Prior January 1, 2020

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss, if the initial recognition of financial instruments is determined by Bank as measured at fair value through profit or loss.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

The Bank not allowed to classify financial assets as held-to-maturity investments, if the Bank during the current year or in the two preceeding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant amount in relation to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassifications:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

- a. *are so close to maturity or repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial assets' fair value;*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

(vii) Reclassification of financial assets (continued)

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut (lanjutan):

The Bank not allowed to classify financial assets as held-to-maturity investments, if the Bank during the current year or in the two preceeding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant amount in relation to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassifications (continued):

- b. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- c. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- d. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

- b. are so close to maturity or repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial assets' fair value;

- c. occur after the Bank has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

- d. are attributable to an isolated event, that is beyond the Bank's control, is non-recurring, and could not be reasonably anticipated by the Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Saling hapus

(viii) Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(ix) Pengukuran nilai wajar

(ix) Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be used by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(ix) Fair value measurement (continued)

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(ix) Fair value measurement (continued)

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 49).

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 49).

(x) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

(x) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(xi) Aset keuangan sukuk

(xi) Sukuk Financial Asset

Berdasarkan PSAK No.110 (Revisi 2015), Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

In accordance with SFAS No.110 (Revised 2015), the Bank determines the classification of investments in sukuk *ijarah* and *mudharabah* either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

Sukuk classifications are as follows:

a. Diukur pada biaya perolehan

a. Measured at cost

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(xi) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

(xi) Sukuk Financial Asset (continued)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sukuk classifications are as follows: (continued)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.

- Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.

- Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

c. Measured at fair value through profit or loss

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi 12 bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

Bank menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sebagai berikut:

- sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK 71, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari; atau
- ketika terjadi restrukturisasi aset keuangan yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit.

Bank menerapkan definisi gagal bayar (stage 3) yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan, yaitu:

- ketika instrumen keuangan telah menunggak 90 hari; atau
- telah berada pada kolektibilitas BI 3, 4, atau 5.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets

Starting January 1, 2020

At reporting date, the Bank calculates expected credit loss based on estimated 12 months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Bank.

The Bank has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition as follows:

- *in accordance with presumption (rebuttable presumption) SFAS 71, ie when contractual payments are overdue for more than 30 days; or*
- *when there is a restructuring of financial assets caused by increased credit risk.*

The Bank applies a definition of default (stage 3) that is consistent with the definition used for internal credit risk management for relevant financial instruments, namely:

- *when financial instruments are in 90 days in arrears; or*
- *is in BI collectibility 3, 4, or 5.*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Starting January 1, 2020 (continued)

Bank mengelompokkan aset keuangan dibeli dari aset keuangan memburuk apabila :

The bank classifies purchased or originated credit-impaired financial asset if:

- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan; dan
- pembelian dengan diskon sangat besar.

- *loss of an active market from financial assets; and*
- *purchases with very large discounts*

Bank mengelompokkan aset keuangan berasal dari aset keuangan memburuk apabila :

Banks classify financial assets derived from financial assets deteriorate if:

- pihak peminjam dinyatakan pailit;
- terdapat perubahan dari bentuk penyediaan dana, atau
- debitur telah berada pada stage 3 dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - telah dilakukan restrukturisasi secara berulang-ulang dan terjadi pelanggaran kontrak secara signifikan; atau
 - atas restrukturisasi yang terjadi, terdapat selisih negatif lebih dari 20% atas nilai kini arus kas masa depan (yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal) antara persyaratan awal dan persyaratan restrukturisasi.

- *the borrower is declared bankrupt;*
- *there is a change in the form of provision of funds, or*
- *the debtor is at stage 3 and meets one of the following conditions:*
 - *repeated restructuring and significant breach of contract; or*

- *for the restructuring that occurs, there is a negative difference of more than 20% of the present value of future cash flows (discounted using the initial effective interest rate) between the initial terms and the terms of the restructuring*

Bank melakukan penurunan nilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

The bank is impaired individually or collectively by considering all reasonable and supported information, including forward looking information.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model

Bank menggunakan metode statistik, kredit rating dan perkiraan makroekonomi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan.

The Bank uses statistical method, credit rating and macroeconomy forecast to assess allowance for impairment losses on loans.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Starting January 1, 2020 (continued)

Bank dapat menetapkan debitur untuk dievaluasi secara individual apabila memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut:

Banks may assign debtors to be evaluated individually if they meet at least one of the following criteria:

Kredit Konsumer:

Consumer Credit:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Akun yang *default* (bucket 5) atau restrukturisasi; dan
 - b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp4 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait permasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
 - a. Sengketa agunan; atau
 - b. Sengketa lahan.Dimana salah satu dari 2 (dua) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi bank.
6. Debitur minimal masuk bucket 4 dan terdapat minimal 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:
 - a. Tempat bekerja debitur atau usaha debitur mengalami kebangkrutan
 - b. Debitur terkena PHK
 - c. Sertifikat belum terbit selama minimal 36 bulan sejak akad kredit
 - d. Rumah yang menjadi agunan tidak selesai atau terbengkalai
 - e. Pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh debitur
 - f. Debitur sudah mengalami restrukturisasi minimal 2 (dua) kali.
 - g. Debitur mengalami permasalahan hukum
 - h. Klaim asuransi terkait kredit ditolak/ tidak dibayar oleh Asuradur.

1. Accounts that meet the following criteria:
 - a. Account that defaults (bucket 5) or restructured; and
 - b. Has a principal of more than or equal to Rp4 billion
2. Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.
3. Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)
4. The auction proceeds under the principal obligation
5. In relation to legal issues with indications, among others:
 - a. Collateral dispute ; or
 - b. Land dispute.Where one of the 2 (two) disputes a binding legal provision has been issued and causes losses to the bank.
6. Debtors are at least in bucket 4 and there are at least 2 (two) problems as follows:
 - a. The debtor's place of work or the debtor's business is bankrupt
 - b. The debtor is laid off
 - c. The certificate has not been issued for at least 36 months since the credit agreement
 - d. The house that became the collateral was not finished or was abandoned
 - e. Installment payments are made by a third party that is not affiliated with the debtor
 - f. The debtor has undergone restructuring at least 2 (two) times.
 - g. The debtor is experiencing legal problems
 - h. Insurance claims related to credit rejected / not paid by the insurer.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Starting January 1, 2020 (continued)

Kredit Komersial

Commercial Credit:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Akun yang *default* (bucket 5) atau restrukturisasi; dan
 - b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp30 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait permasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
 - a. Sengketa pengurus,
 - b. Sengketa agunan,
 - c. Sengketa lahan,
 - d. Sengketa proyek,Dimana salah satu dari 4 (empat) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi bank.
6. Dalam hal penetapan kolektibilitas menggunakan konsep 3 (tiga) pilar maka kriteria *Individual Assessment* dapat ditetapkan dengan kriteria: minimal masuk bucket 4 (hari tunggakan 61 hari) dan terdapat minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan prospek usaha menurun dengan indikasi antara lain:
 - i. Tidak terdapat pembayaran pokok sesuai dengan ketentuan dan atau kesepakatan yang telah dibuat, atau
 - ii. Pembangunan berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau
 - iii. Tidak terdapat penjualan lebih dari 1 (satu) tahun.

1. Accounts that meet the following criteria:
 - a. Account that defaults (bucket 5) or restructured; and
 - b. Has a principal of more than or equal to Rp30 billion
2. Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.
3. Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)
4. The auction proceeds under the principal obligation
5. In relation to legal issues with indications, among others:
 - a. Collateral dispute ; or
 - b. Collateral dispute,
 - c. Land dispute,
 - d. Project disputeWhere one of the 4 (four) disputes has issued a binding legal provision and/or causes losses to the bank.
6. In the case of collectability using the 3 (three) pillar concept, the Individual Assessment criteria can be determined with the following criteria: at least entering bucket 4 (days arrears 61 days) and there are at least 2 (two) out of 3 (three) problems as follows:
 - a. Problems with decreased business prospects with indications include:
 - i. There is no principal payment in accordance with the provisions and / or agreements that have been made, or
 - ii. Construction has stopped for more than 1 (one) year, and / or
 - iii. There are no sales for more than 1 (one) year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kredit Komersial (lanjutan)

6. Dalam hal penetapan kolektibilitas menggunakan konsep 3 (tiga) pilar maka kriteria *Individual Assessment* dapat ditetapkan dengan kriteria: minimal masuk bucket 4 (hari tunggakan 61 hari) dan terdapat minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut: (lanjutan)
- b. Permasalahan agunan dengan memenuhi salah satu indikasi/ kriteria sebagai berikut:
 - i. Sertifikat agunan belum atas nama debitur atau pengurus yang tidak dapat diikat Hak Tanggungan;
 - ii. Sertifikat agunan belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan 12 bulan sejak akad kredit dan status *default*;
 - iii. Sertifikat tidak memiliki alas hukum untuk dilakukan pengalihan kepada pembeli;
 - iv. Agunan belum terbit sertifikat;
 - v. Agunan tidak terbangun 100% khusus Kredit Investasi;
 - c. Permasalahan kemampuan membayar mengalami penurunan

Perhitungan komponen PD, LGD, dan EAD yang dilakukan secara kolektif pada setiap segmentasi kredit mempertimbangkan data historis, saat ini dan masa yang akan datang.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

Commercial Credit: (continued)

6. In the case of collectability using the 3 (three) pillar concept, the *Individual Assessment* criteria can be determined with the following criteria: at least entering bucket 4 (days arrears 61 days) and there are at least 2 (two) out of 3 (three) problems as follows: (continued)
- b. Collateral problems by meeting one of the following indications/criteria:
 - i. The collateral certificate is not yet in the name of the debtor or management that cannot be bound by the Mortgage;
 - ii. Collateral certificate has not been bound by the Mortgage Rights 12 months since the credit agreement and default status;
 - iii. The certificate has no legal basis for transfer to the buyer;
 - iv. The collateral has not been issued a certificate;
 - v. Collateral is not built 100% specifically for investment credit;
 - c. The problem of ability to pay has decreased

The computation of PD, LGD, and EAD components carried out collectively in each credit segmentation takes into account historical, current and future data.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (*probability of default*). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kredit Komersial (lanjutan)

Bank perlu mempertimbangkan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam menghitung kemungkinan kejadian gagal bayar. Oleh karena itu, perhitungan PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Perhitungan PD secara historis (PD TTC)
- Perhitungan PD *forward-looking*; dan
- Perhitungan PD *Point in time* (PiT) melalui proses *scaling*

LGD merupakan estimasi kerugian atas debitur dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. LGD diperhitungkan sebesar 100% dikurangi tingkat pengembalian (*recovery rate*), perhitungan LGD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Perhitungan LGD secara historis (LGD TTC);
- Perhitungan LGD *Point in Time* (LGD PiT) dengan mempertimbangkan informasi *forward looking*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* (estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali), Bank dapat menggunakan metode berikut ini:

- Discounted Cash Flow**
Bank melakukan perhitungan berdasarkan jumlah yang telah didiskonto (*discounted value*) dari estimasi arus kas masa datang (pokok dan bunga) yang didiskonto berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
- Expected Collateral**
Bank melakukan perhitungan berdasarkan estimasi penjualan agunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu estimasi penjualan agunan di masa depan. Hasil perhitungan akan didiskontokan berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
- Metode lainnya yang berdasarkan analisis Bank lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Regulator.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

Commercial Credit: (continued)

Banks need to consider past, present and future information in calculating the probability of default. Therefore, the calculation of PD is carried out in the following stages:

- Historical PD calculation (PD TTC)
- forward-looking* PD calculation; and
- Calculation of PD *Point in time* (PiT) through a *scaling* process

LGD is an estimated loss for a debtor by calculating the *recovery* obtained after the debtor defaults. LGD is calculated as 100% minus the rate of return (*recovery rate*), LGD calculation is carried out in the following stages:

- Historical LGD calculation (LGD TTC);
- Calculation of LGD *Point in Time* (LGD PiT) by considering *forward looking* information.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

- Discounted Cash Flow**
The Bank performs calculations based on the discounted amount (*discounted value*) of future cash flows (*principal and interest*) discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
- Expected Collateral**
The Bank calculates earthquakes which are calculated based on the analysis carried out by considering the fair value and the estimated future sales period. The calculation results will be discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
- Other methods based on the Bank's analysis are more appropriate and do not conflict with the Regulators' provisions.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Prior to January 1, 2020

On each statement of financial position reporting date, Bank assesses whether there is an objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrate that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;
- b. breach of contract, like defaults or deferred principal or interest payments;
- c. the creditor, for economic or legal reasons relating to the financial difficulties of the debtor, provides relief (concession) to the debtor that the creditor would not otherwise consider;
- d. it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- e. the loss of an active market for that financial asset due to financial difficulties; or
- f. observable data has indicated that there is measurable decrease in the estimated future cash flows of the financial assets since the initial measurement, although the decrease can not be identified to the individual financial assets in the portfolio, including:
 1. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 2. national or local economic condition related to defaults on the assets in the portfolio.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria diatas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafon sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafon sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

The estimated period between the occurrence of events and identification of loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months and for specific cases, it may need longer period.

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the collective assessment of impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with objective evidence of impairment;
2. Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective assessment if one of the following criteria is met:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond dibawah Rp5.000.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode *roll rate* analisis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. Dengan metode ini, Bank menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

1. Loans which individually have significant value with no objective evidence of impairment;
2. Loans which individually have insignificant value;
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of current and special mention, and have never been restructured; or (b) Loans with credit limit below Rp5,000.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (*probability of default*). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank uses the *roll rate* analysis method, which is a statistical model analysis method to collectively assess allowance for impairment losses on loans. Under this method, the Bank uses 3 (three) years of historical data to compute for the *Probability of Default* (PD) and *Loss Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralized financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun "Cadangan kerugian penurunan nilai" sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

As a practical guidance, the Bank may measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of the present value of estimated future cash flows on collateralized financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate. If loans and receivables or held-to-maturity securities and Government bonds have variable interest rate, the discount rate used to measure impairment loss is the current effective interest rate specified in the contract.

Impairment losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an "Allowance for impairment losses" account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized and the recovery is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For financial assets classified as available-for-sale, Bank assesses on each statement of financial position reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan obligasi Pemerintah yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah yang dipulihkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

In the case of equity instruments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available - for - sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale securities and Government bonds increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss previously recognized must be recovered and the recovery is recognized in the year it occurred.

If the terms of the loans and receivables or held-to-maturity securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment loss (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectibility), the impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account. The amount of reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Murabahah (lanjutan)

f.1. Loans and Murabahah Financing Receivables (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Prior to January 1, 2020 (continued)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income.

f.2. Pembiayaan/Piutang Syariah selain Murabahah

f.2. Sharia Financing/Receivables Other Than Murabahah

Untuk Aset keuangan berupa piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan perubahannya pada POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

For financial assets of *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, and *musyarakah* financing, the Bank implements Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and POJK No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 and its amendment POJK No. 19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective on January 1, 2015.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

- a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

- a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
- b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
- c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
- d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
- e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.2. Pembiayaan/Piutang Syariah selain Murabahah

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Sejak tanggal 1 Januari 2020 giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020 giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility*, *term deposit* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa *deposito berjangka*, *interbank call money* dan tabungan.

Sejak 1 Januari 2020, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2020, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.2. Sharia Financing/Receivables Other Than Murabahah

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Starting January 1, 2020, current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified amortized cost.

Prior to January 1, 2020, current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified under loans and receivables.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of *deposit facility*, *term deposit* and *sharia deposit facility*, whereas placement with other banks is in the form of *time deposit*, *interbank call money* and *savings*.

Starting January 1, 2020, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

Prior to January 1, 2020, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN) dan penyertaan reksadana.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sejak 1 Januari 2020

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.
3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities and Government Bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN) and mutual funds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government.

Starting January 1, 2020

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. Securities and Government bonds classified as amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method. Interest income is recognized in the income statement and other comprehensive income using the effective interest method.
2. Securities and Government bonds classified as fair value through profit or loss (FVTPL) are measured using fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Changes in fair value are recognized in profit or loss. Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and Government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and Government bonds are sold.
3. Securities and Government bonds classified as fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are measured using fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Efek-efek syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank tidak mengklasifikasikan efek-efek dan obligasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities and Government Bonds (continued)

Prior to January 1, 2020

Sharia securities are classified as held-to-maturity investments and securities available-for-sale.

Securities and Government bonds are initially measured at fair value. Subsequently, securities and Government bonds are accounted for depending on their classification as held-to-maturity, available-for-sale or fair value through profit or loss.

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. Held-to-maturity securities and Government bonds are carried at amortized cost using the effective interest method.

The Bank does not classify securities and Government bonds as held-to-maturity financial assets if the bank has, during the current financial year or during the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity securities or Government bonds prior to maturity other than sales or reclassifications defined in SFAS No. 55 (Revised 2014) applicable in the relevant period.

2. Securities and Government bonds which are classified under available-for-sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale securities and Government bonds are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek dan obligasi Pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities and Government Bonds (continued)

Prior to January 1, 2020

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows: (continued)

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value.

Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from securities and Government bonds is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and Government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and Government bonds are sold.

Securities and Government bonds that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchange at the date close to the statement of financial position date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For securities and Government bonds where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities and Government bonds.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Kredit yang diberikan

j. Loans

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Sejak 1 Januari 2020, Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Starting January 1, 2020, Loans are classified as amortized costs. Prior to January 1, 2020, loans are classified as loans and receivables.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Restrukturisasi kredit

Loan restructuring

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

j. Loans (continued)

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Sales of Housing Loans (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

The Bank sold its KPR to third parties.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

In relation with the above mention sale, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

The sale has fulfill the criteria of true sale according to Bank Indonesia regulation No. 7/4/PBI/2005 dated January 20, 2005.

k. Pembiayaan/piutang syariah

k. Sharia financing/receivables

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from *murabahah* transactions, *istishna* transactions and *qardh* transactions, for financing consist of *mudharabah* and *musyarakah* financing.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidi oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). On the statement of financial position date, *mudharabah financing* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (*mitra musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidi oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah is a partnership contract among fund's owners (*musarakah partners*) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, *musarakah financing* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. *Istishna receivables* are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

Qardh is the provision of funds or equivalent claims based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. *Qardh* are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Sejak 1 Januari 2020, Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas yaitu penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent letters of Credit by Local Document (SKBDN) transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable are classified as loans and receivables. Acceptances payable are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Starting January 1, 2020, Acceptances receivable are classified as amortized costs. Prior to January 1, 2020, Acceptances receivable are classified as loans and receivables.

Acceptances payable are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

m. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans or certain of transactions which resulted The Bank have shares in debtor's company.

Investments in shares represent ownership interests of 20.00% to 50.00% are recorded using the equity method. Under this method, investments are recorded at cost and adjusted for the Bank's proportionate share in the net equity of the investees and reduced by dividends earned starting the acquisition date net of by allowance for impairment losses

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Penyertaan Saham (lanjutan)

m. Investment in shares (continue)

Penyertaan modal sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 (five) years in accordance with Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks".

Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investment in shares with no significant influence or share ownership under 20% are recorded in accordance with SFAS No. 55 (Revised 2014) and deducted by allowance for impairment losses.

n. Aset tetap

n. Premises and equipment

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

- (i) *the exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) *the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.*

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan	10 - 20	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	Office furniture and fixtures, and motor vehicles

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 15).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Premises and equipment (continued)

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Land are initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification, and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period (Note 15).

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Fixed Asset Revaluation Surplus" of and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognised in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognised in profit or loss.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Premises and equipment (continued)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan bahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Construction in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revalue on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revalue at a minimum every 3 (three) years.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa

o. Right-of use assets and lease liabilities

Bank telah menerapkan PSAK 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

The Bank has applied SFAS 73 "Leases" since January 1, 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dalam hal ini, Bank terkepos risiko Bank sebagai lessee.

SFAS 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. In this case, Bank is exposed the risk of the Bank as lessee.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif aset hak guna seolah-olah pernyataan ini diterapkan sejak tanggal permulaan, namun didiskontokan dengan menggunakan suku bunga inkremental pada tanggal awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana penyajian sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

The initial implementation date of SFAS 73 for the Bank is January 1, 2020. The Bank has adopted SFAS 73 using the modified retrospective approach with recognising the cumulative impact of right of use asset at the date of the initial application, and discounted using the incremental borrowing rate at the date of the initial application SFAS 73. Therefore, the comparative information presented for 2019 has not been restated which is presented, as previously reported, under SFAS 30 and the related interpretations.

a) Dampak definisi baru dari sewa

a) Impact of the new definition of a lease

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

The change in the definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS 73 determines whether a contract is, or contains, a lease if the lessee has the right to control the use of an identified asset for a certain period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS 30.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

a) Dampak definisi baru dari sewa (lanjutan)

a) Impact of the new definition of a lease (continue)

Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Dalam persiapan untuk pertama kali penerapan PSAK 73, Bank telah melakukan proyek implementasi. Proyek tersebut telah menunjukkan bahwa definisi baru dari PSAK 73 tidak akan secara signifikan mengubah lingkup kontrak Bank untuk memenuhi definisi dari sewa.

The Bank applies the definition of a lease and related guidance set out in SFAS 73 to all contracts entered into or changed on or after January 1, 2020. In preparation for the first-time application of SFAS 73, the Bank has carried out an implementation project. The project has shown that the new definition in SFAS 73 will not significantly change the scope of contracts that meet the definition of a lease for the Bank.

b) Panduan praktis, pengecualian pengakuan dan pilihan kebijakan pada saat masa transisi, Bank memilih untuk menerapkan panduan praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

b) Practical expedient, recognition exemption and accounting policy option at the transition date, Bank decided to use the practical expedient that is permitted in SFAS 73, as:

1. Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama;
2. Tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 73 untuk kontrak dengan masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 dan dicatat sebagai sewa jangka pendek; dan
3. Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.

1. Using a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
2. Not to apply the recognition and measurement according to SFAS 73 of the contracts which lease term ends within 12 months of January 1, 2020 and recorded as short term lease; and
3. Exclude initial direct cost from the measurement of the right of use assets at the date of initial application.

Bank memilih pengecualian pengakuan untuk tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 73 untuk kontrak:

Bank may choose the recognition exemption not to recognize and measure according to SFAS 73 of the contract:

1. Sewa jangka pendek dengan masa sewa 12 bulan atau kurang; dan
2. Sewa dengan aset pendasar bernilai rendah.

1. Short term leases for which lease term is or below 12 months; and
2. Lease for which the underlying asset is low value.

Bank mengakui pembayaran sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah sebagai beban baik dengan dasar garis lurus maupun dasar sistematis lainnya yang merepresentasikan pola manfaat.

Bank recognise the lease payment of short term and low value leases as an expense on either a straight line basis over the lease term or another systematic basis which represent the pattern of the benefit.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

Selain itu, Bank juga memilih pilihan kebijakan untuk:

Besides, Bank may choose the policy option:

1. Tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.
2. Tidak mencatat sewa atas aset tak berwujud berdasarkan PSAK 73.

1. Not to separate the non-leased component from lease component, and choose to record the lease component and non-leased component as a single lease component.
2. Not to record the lease of intangible assets according to SFAS 73.

c) Dampak pada akuntansi lessee

c) Impact on Lessee Accounting

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank applies a single recognition and measurement approach for the entire lease, except for the short terms and low-value lease. Bank recognises lease liabilities for the lease payments and right of use asset that represent right of use of the underlying asset

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa.

Bank recognises right of use asset and lease liabilities at the commencement date.

Pada tanggal permulaan sewa, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, estimasi biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

On the commencement date, right of use assets measured at cost, which shall comprise the amount initial measurement of lease liabilities, initial direct cost incurred, an estimate of restoration cost, and lease payments made at or before the commencement date less the rental incentives received. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

Aset hak guna disusutkan dengan metode sesuai dengan persyaratan depresiasi yang ada pada aset tetap.

Right of use assets depreciated by methods in accordance with the fixed assets depreciation requirements.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

If the ownership of lease assets transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflects the purchase option, then the depreciation period measured by using the estimation of asset economic benefit. The right of use asset tested for impairment in accordance with SFAS 48 Impairment of Asset.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

Pada tanggal permulaan sewa, bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

At the commencement date, bank recognized the lease liabilities measured at the present value of the future lease payment during the lease term. Lease payment including the fixed payment (including substantial fixed-payments) less lease incentive receivable, variable lease payment that depend on the index or exchange rate, and the expected amount will be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the execution price of a reasonable purchase option if it ensured to exercise by the Bank and the penalty payment to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank to execute the lease termination option. Variable lease payments that do not rely on the index or exchange rates recognised as expense in periods in which events or conditions that trigger payments occur.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

In calculating the present value of lease payments, Bank uses the incremental borrowing rate of the lessee at the commencement date of the lease, as the implicit interest rate of the lease cannot be determined. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

PSAK 73 mengubah cara Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

SFAS 73 changes the way of Bank presents lease that previously classified as an operating lease in SFAS 30, which not disclosed in financial statements, with the details of below:

1. Menyajikan aset hak-guna secara terpisah;
2. Menyajikan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain;
3. Menyajikan beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga liabilitas sewa sebagai bagian dari beban umum dan administrasi; dan
4. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dalam laporan arus kas

1. Present the right of use asset separately
2. Present the lease liabilities as part of other liabilities
3. Present the depreciation expense of right of use asset and interest expense of lease liabilities as part of general and administrative expenses, and
4. Separate the total amount of payment to the principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational or financing activities) in the statement of cash flow.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

Kebijakan terkait Sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020

Lease Policy before Januari 1, 2020

Dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa, Bank melakukan evaluasi terhadap substansi pengaturan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi berdasarkan substansi, bukan dalam bentuk kontrak. Sewa pembiayaan diakui jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan.

In determining whether a contract is, or contains a lease, Bank evaluates the substance of the arrangement. Lease is classified as lease financing or operation based on the substance, not in contract form. Finance lease recognised if lease diverts substantially all the risks and benefits associated with the lease asset ownership.

Aset dan liabilitas dalam sewa pembiayaan diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang sama dengan nilai wajar aset sewaan atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setiap biaya langsung awal Bank ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset.

Asset and liabilities in the finance lease are recognised in the financial statements position at the same amount as the fair value of lease asset or, if lower, the present value of the minimum lease payment. The initial direct cost are added to amount recognised as asset.

Pembayaran sewa minimum dialokasikan antara biaya keuangan dan pengurangan liabilitas yang belum dibayar. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa untuk menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Sewa kontinjensi dibebankan sebagai beban pada tahun terjadinya.

Minimum lease payments are allocated between the finance cost and reduction of unpaid lease liabilities. The financial expenses are allocated to each period during lease term to generate a constant periodic interest rate on the remaining liabilities balance. Contingency lease is charged as an expense in the year of occurrence.

Aset sewaan disusutkan dengan menggunakan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat seperti yang diestimasikan untuk aset tetap yang diakuisisi secara langsung. Namun, jika tidak ada kepastian yang wajar bahwa Bank akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan penuh selama yang lebih pendek antara masa sewa dengan masa manfaat ekonomisnya.

Lease asset are depreciated using the same method and based on the benefit period as estimated for a fixed asset acquired directly. However, if there is no reasonable certainty that Bank will have the ownership at the end of lease period, the lease asset is fully depreciated for the shorter period between the lease term and its economic benefits.

Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas dicatat sebagai sewa operasi yang pembayarannya dibebankan sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Lease contract that do not meet the criteria above are recorded as operating lease which payment is charged as expense on a straight-line basis during the lease period

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS 68, "Fair Value Measurements" (Note 2e).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

**Kebijakan terkait Sewa sebelum tanggal 1
Januari 2020 (lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Right-of use assets and lease liabilities
(continued)**

**Lease Policy before Januari 1, 2020
(continued)**

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

p. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS 68, "Fair Value Measurements" (Note 2e).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

s. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

r. Liabilities due immediately

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

s. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Simpanan dari bank lain

t. Deposits from other banks

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Securities purchased under agreement to resell

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Securities purchased under agreement to resell are presented as financial assets in the statement of financial position, at the net resale price of unamortized interest and net of allowance for impairment losses.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income (unamortized) and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are resold using effective interest rate.

Sejak 1 Januari 2020, Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Starting January 1, 2020, Securities purchased under agreement are classified as amortized costs. Prior to January 1, 2020, Securities purchased under agreement are classified as loans and receivables.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi.

Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atas surat berharga syariah

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Sejak 1 Januari 2018, Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK No 111 tentang "Akuntansi Wa'd" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase (continued)

Securities purchased under agreement to resell are classified as loans and receivables measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest.

The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities purchased under agreement to resell of sharia-compliant securities

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Effective January 1, 2018, the Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS No 111 on "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

v. Securities issued

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah Obligasi dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Securities issued by Bank consist of Bonds and Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR).

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

w. Pinjaman yang diterima

w. Fund borrowings

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, Pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Pinjaman subordinasi

x. Subordinated Loans

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Modal saham

y. Capital stock

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

aa. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BTN Unit Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BTN Unit Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

aa. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BTN Sharia Unit) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's demand and savings deposit balance in Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the BTN Sharia Unit does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BTN Sharia Unit's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Dana syirkah temporer (lanjutan)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (gross profit margin).

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

ab. Pendapatan dan beban bunga

ab. Interest income and expense

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

ac. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Interest income and expense (continued)

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

ac. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, marjin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Sharia profit sharing income represents income from *istishna*, margin from *murabahah* and profit-sharing on *mudharabah* and *musyarakah* financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Income from *istishna* is recognized at the date of transfer of assets.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Income from *murabahah* receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Mudharabah and *musyarakah* income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

ae. Imbalan kerja

ae. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Imbalan kerja (lanjutan)

ae. Employee benefits (continued)

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution plan

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

For other long-term employee benefits which are current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Imbalan kerja (lanjutan)

ae. Employee benefits (continued)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

af. Foreign currency transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs spot Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

As of December 31, 2020 and 2019, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
1 Dolar Amerika Serikat	14.050,00	13.882,50	1 United States Dollar
1 Dolar Australia	10.752,47	9.725,39	1 Australia Dollar
1 Pound Sterling Inggris	19.012,46	18.238,14	1 British Pound Sterling
1 Euro Eropa	17.234,43	15.570,61	1 European Euro
1 Yen Jepang	135,97	127,81	1 Japanese Yen
1 Ringgit Malaysia	3.481,17	3.391,77	1 Malaysian Ringgit
1 Dolar Hongkong	1.812,30	1.782,75	1 Hongkong Dollar
1 Riyal Arab Saudi	3.744,50	3.701,00	1 Saudi Arabian Riyal
1 Renminbi	2.150,26	1.994,18	1 Renminbi
1 Dolar Singapura	10.606,18	10.315,05	1 Singapore Dollar

ag. Pajak penghasilan

ag. Income tax

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ag. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti. Hal ini termasuk juga melakukan evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Income tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties. This includes evaluation on tax assessment letters received from tax authorities.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Pelaporan segmen

ah. Segment reporting

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*

- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*

- c) for which discrete financial information is available.*

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ai. Laba per saham dasar

ai. Basic earnings per share

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aj. Biaya emisi penerbitan saham

aj. Shares issuance costs

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ak. Opsi Saham

ak. Stock Options

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (Binomial-tree option pricing model).

The Bank has granted stock options to the Board of Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the *Binomial-tree* option pricing model.

al. Provisi

al. Provisions

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

am. Agunan yang diambil alih

am. Foreclosed collaterals

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Foreclosed collaterals acquired in settlement of loans (included as part of "Other Assets") are recognized at net realizable values or loan carrying amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal.

Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

The excess in loan balances which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collaterals is charged to allowance for possible loan write-off on loans in the current year. The difference between the value of the collateral and the proceeds from sale thereof is recognized as a gain or loss at the time of sale of the collateral.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Management evaluates the value of foreclosed collaterals periodically. Allowance for losses foreclosed collaterals is provided based on the impairment of foreclosed collaterals.

Beban perbaikan (*Reconditioning costs*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

Reconditioning costs arising after foreclosure capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

an. Instrumen derivatif

an. Derivative Instruments

Instrumen keuangan derivatif diukur dan diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Derivatives financial instruments are valued and recognized in the statement of financial position at fair value net of allowance for possible losses.

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Each derivatives contract is recorded as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

The fair value of derivatives instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics, which refers to SFAS No. 68: "Fair Value Measurement" (Note 2e).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

an. Instrumen derivatif (lanjutan)

an. Derivatives Instrument (continued)

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (a) lindung nilai atas nilai wajar, (b) lindung nilai atas arus kas, (c) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (d) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

Gains or losses from derivative contracts are presented in the financial statements based on its purpose designated upon acquisition, as (a) fair value hedge, (b) cash flow hedge, (c) net investment in a foreign operation hedge, and (d) trading instruments as follows:

- a. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.
- b. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi tahun berjalan.
- c. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai.
- d. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

- a. Gain or loss on a derivative contract designated and qualified as a fair value hedging instrument and the gain or loss arising from the changes in fair value of hedged assets and liabilities is recognised as gain or loss that can be set off one another during the same accounting period/year. Any difference representing hedge ineffectiveness is directly recognised as gain or loss in current year.

- b. The effective portion arising from gain or loss of derivative contracts, designated as a cash flow hedge instruments is reported as other comprehensive income. The hedge ineffective portion is recognised as a gain or loss in the current year.

- c. Gain or loss arising from derivative contract that is designated as a net investment hedge in a foreign operation is reported as other comprehensive income, as long as the transactions are effectively recognised as hedge transactions.

- d. Gain or loss arising from derivative contract that is not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognised as gain or loss in current year.

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Bank's Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the Financial Statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71 "Financial Instrument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2e.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit
dan pembiayaan/piutang syariah

Sejak 1 Januari 2020

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

- i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
- ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
 - a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
 - b. Nilai waktu dari uang.

Sebelum 1 Januari 2020

Bank menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Allowance for impairment losses on loans and
sharia financing/receivables

Starting January 1, 2020

The Bank review their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortised cost under SFAS 71 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS 71 incorporates forwardlooking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

- i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
- ii. Determination of expected credit life that reflect:
 - a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
 - b. The time value of money.

Prior to January 1, 2020

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating allowance for impairment losses made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance for losses required.

Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available-for-use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Jangka waktu Sewa

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

The lease term

The Bank determines the lease term as a non cancellable lease term, along with the period covered by the option to extend the lease if it reasonably exercised, or any period covered by the option to terminated the lease, if it reasonable not to exercised.

The Bank has several lease that include extention option and termination of lease term. Bank implements the assessment in evaluating whether it ensured to exercise the extention or termination option of lease. This done by taking into consideration of all relevant facts and circumstances that provide economic incentives for the extention or termination of the lease. After the commencement date, the Bank assesses the lease term, if there is an event or significant change in circumstances that are in control and affects whether the lessee is reasonable to exercise the extention or termination option of the lease.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris.

Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continue)

The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations.

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS

	31 Desember/December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		1.422.880
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	284.123	3.992
Dolar Singapura	153.257	1.625
Euro Eropa	21.385	369
Ringgit Malaysia	62.081	216
Pound Sterling Inggris	5.125	97
Dolar Australia	8.965	96
Yen Jepang	559.000	76
Renminbi	15.726	34
Riyal Arab Saudi	6.568	25
Dolar Hong Kong	9.050	16
		6.546
Total		1.429.426

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp285.159 dan Rp256.677, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

4. CASH

	31 Desember/December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		1.363.762	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	202.309	2.809	United States Dollar
Dolar Singapura	196.815	2.030	Singapore Dollar
Euro Eropa	18.205	283	European Euro
Ringgit Malaysia	7.458	25	Malaysia Ringgit
Pound Sterling Inggris	4.160	76	Great Britain Pound Sterling
Dolar Australia	6.265	61	Australian Dollar
Yen Jepang	299.000	38	Japanese Yen
Renminbi	15.626	31	Renminbi
Riyal Arab Saudi	10.009	37	Saudi Arabian Riyal
Dolar Hong Kong	8.590	15	Hong Kong Dollar
		5.405	
Total		1.369.167	Total

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp285,159 and Rp256,677, as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		10.123.034
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	70.081.000	984.638
Total		11.107.672

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp1.001.868 dan Rp1.369.632 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		15.036.853	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currency
Dolar Amerika Serikat	34.250.000	475.476	United States Dollar
Total		15.512.329	Total

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp1,001,868 and Rp1,369,632 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember December 31, 2020	31 Desember December 31, 2019
<u>Konvensional</u> Rupiah		
Utama	3,16%	6,19%
Harian	0,16%	3,00%
Rata-rata	3,00%	3,19%
PLM	17,43%	5,24%
Dolar Amerika Serikat	4,63%	8,28%
<u>Syariah</u> Rupiah	3,15%	4,64%

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 25 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, PBI No. 20/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, dan perubahan terakhir pada PADG 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve requirement ratios of the Bank as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember December 31, 2020	31 Desember December 31, 2019
<u>Conventional</u> Rupiah		
Primary	3,16%	6,19%
Daily	0,16%	3,00%
Average	3,00%	3,19%
PLM	17,43%	5,24%
United States Dollar	4,63%	8,28%
<u>Sharia</u> Rupiah	3,15%	4,64%

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2020 and 2019 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 which has been amended several times with PBI No. 17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015, PBI No. 17/21/PBI/2015 dated November 25, 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017, PBI No. 20/3/2018 dated March 29, 2018 and Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 dated March 13, 2020 PADG 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020 and the latest amendment by PADG 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020 "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/19/PBI/2020 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona yang dijelaskan melalui PADG No.22/4/PADG/2020 tanggal 15 April 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PADG No. 22/35/PADG/2020 tanggal 23 Desember 2020, Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Insentif ini diberikan kepada Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, kegiatan impor, kegiatan UMKM, dan/atau kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku mulai 16 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,00% dan 6,00%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4,00% dan 8,00%. Untuk PLM adalah sebesar 6,00% dan 4,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,00% dan 4,50%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank juga harus memenuhi PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan perubahan terakhir PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Based on Bank Indonesia Regulation Number 22/19/PBI/2020 of 2020 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 22/4/PBI / 2020 concerning Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support Handling the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak explained through PADG No.22/4/PADG/2020 dated April 15, 2020 as amended to PADG No. 22/35/PADG/2020 dated 23 December 2020, Bank Indonesia provided incentives in the form of leniency on the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah which must be fulfilled on a daily basis of 0.5% (zero point five percent). This incentive is given to Banks that provide funds for export activities, import activities, UMKM activities, and / or economic activities in other priority sectors as stipulated by Bank Indonesia and are valid from April 16, 2020 to June 30, 2021.

As of December 31, 2020 and 2019, based on the above Bank Indonesia regulations, The Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 3.00% and 6.00%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 4.00% and 8.00%, respectively. PLM amounting to 6.00% and 4.00% in Rupiah as of December 31, 2020 and 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, The Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 3.00% and 4.50%. For foreign currencies of 1.00%, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, The Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 regarding "Changes to Bank Indonesia Regulation No.20/4/PBI/2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020 and the latest amendment by PADG 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 48).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(continued)**

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2020 and 2019.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 48).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		2.800.444		160.984	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	24.762.811	347.917	24.365.550	338.255	United States Dollar
Yen Jepang	218.309.518	29.684	1.565.602.333	200.100	Japanese Yen
Singapura Dollar	2.179.474	23.116	1.567.830	16.172	Singapore Dollar
Australia Dollar	1.297.365	13.950	3.307.204	32.164	Australian Dollar
Euro Eropa	104.380	1.799	104.380	1.625	European Euro
Renminbi	101.713	219	100.692	201	Renminbi
		416.685		588.517	
Total		3.217.129		749.501	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.808)		(1.632)	Less allowance for impairment losses
Neto		3.215.321		747.869	Net

b. Berdasarkan bank

b. By bank

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.567.448	12.496	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	72.361	5.026	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	5.919	7.296	Standard Chartered Bank, Jakarta
Citibank N.A., Jakarta	925	925	Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3.639	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Lainnya	1.495	429	Others
	2.648.148	29.811	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>			<u>Related Parties (Note 45)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	152.008	131.028	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	288	145	PT Bank Syariah Mandiri
	152.296	131.173	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

b. By bank (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Standard Chartered Bank, Jakarta	253.511	274.913	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	47.781	30.363	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	23.116	16.172	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	13.950	32.164	PT Bank ANZ Indonesia
Citibank N.A., Jakarta	6.708	6.628	Citibank N.A., Jakarta
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.799	1.625	Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam
PT Bank ICBC Indonesia	220	201	PT Bank ICBC Indonesia
	347.085	362.066	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>			<u>Related Parties (Note 45)</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.077	205.329	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34.523	21.122	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	69.600	226.451	
Total	3.217.129	749.501	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.808)	(1.632)	Less allowance for impairment losses
Neto	3.215.321	747.869	Net

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp288 dan Rp145, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp288 and Rp145, as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020:

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the year ended December 31, 2020

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Account with Other Banks
Saldo 1 Januari	747.731	-	1.625	145	749.501	Balance at January 1
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	2.467.311	-	174	143	2.467.628	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	2.467.311	-	174	143	2.467.628	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	3.215.042	-	1.799	288	3.217.129	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2020
Rupiah	0,14%
Mata uang asing	0,02%

- d. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Lancar	3.215.321	747.869
Macet	1.808	1.632
Total	3.217.129	749.501
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.808)	(1.632)
Neto	3.215.321	747.869

- e. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.
- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Saldo awal tahun	1.632	1.718
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No.71 (Catatan 54)	37	-
Pemulihan kerugian penurunan selama tahun berjalan (Catatan 35)	(35)	(86)
Lain-lain ^{*)}	174	-
Saldo akhir tahun	1.808	1.632

^{*)} Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

- c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	Rupiah
	Foreign currencies

- d. Collectibility

As of December 31, 2020 and 2019, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Lancar	3.215.321	747.869
Macet	1.808	1.632
Total	3.217.129	749.501
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.808)	(1.632)
Neto	3.215.321	747.869

- e. As of December 31, 2020 and 2019, there are no current accounts with other banks which are pledged as collateral.

- f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

Balance at beginning of year
Adjustment in relation with the implementation of PSAK 71 (Notes 54)
Reversal for impairment losses during the year (Note 35)
Others ^{*)}
Balance at end of year

^{*)} Including exchange difference on translation of foreign currency

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Account with Other Banks
Saldo 1 Januari	-	-	1.625	7	1.632	Balance at January 1
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 54)	37	-	-	-	37	Impact of initial adoption of SFAS 71 (note 54)
Saldo awal PSAK 71	37	-	1.625	7	1.669	Beginning Balance SFAS 71
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(30)	-	174	(5)	139	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(30)	-	174	(5)	139	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	7	-	1.799	2	1.808	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

- g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 48.

- g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 48.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Deposit Facility Bank Indonesia	8.997.774	4.299.861
Term Deposit Bank Indonesia	3.998.481	-
Deposit Facility Syariah		
Bank Indonesia	2.585.000	1.834.000
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	947.105	350.000
	16.528.360	6.483.861
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>		
<u>Inter-bank call Money</u>		
PT Bank Rakyat	-	100.000
Indonesia (Persero) Tbk		
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	337	1.078
	337	101.078
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Term Deposit Bank Indonesia	3.301.736	4.512.254
Total	19.830.433	11.097.193

<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
Deposit Facility Bank Indonesia	
Term Deposit Bank Indonesia	
Deposit Facility Sharia	
Bank Indonesia	
Bank Indonesia Sharia Certificate	
<u>Related Party (Note 45)</u>	
<u>Inter-bank call Money</u>	
PT Bank Rakyat	
Indonesia (Persero) Tbk	
Savings Deposits	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.532.105 dan Rp2.184.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp3,532,105 and Rp2,184,000, respectively.

b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

b. Based on Remaining Period Until Maturity

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
≤ 1 bulan	18.913.328	10.745.393
> 1 bulan ≤ 6 bulan	526.391	236.800
> 6 bulan ≤ 1 tahun	390.714	-
> 1 tahun	-	115.000
Total	19.830.433	11.097.193

≤ 1 month	
> 1 month ≤ 6 months	
> 6 months ≤ 1 year	
> 1 year	

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31	
	2020	2019
Rupiah	3,85%	5,98%
Mata Uang Asing	0,33%	0,47%

Rupiah	
Foreign Currencies	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan sebagai lancar.
- e. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.
- f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 48.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019, are classified as current.
- e. Management believes no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2020 and 2019, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.
- f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 48.

8. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

8. SECURITIES

- a. Based on purpose, related party and third party

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Diukur pada nilai wajar			
Melalui laba rugi	836.662	4.189.398	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	187.136	-	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	99.608	-	Amortized cost
Tersedia untuk dijual	-	1.422.811	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	373.379	Held-to-maturity
	1.123.406	5.985.588	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>			<u>Related Party (Note 45)</u>
Diukur pada nilai wajar			
Melalui laba rugi	701.925	-	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.247.848	-	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	132.787	-	Amortized cost
Tersedia untuk dijual	-	1.206.536	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	919.925	Held-to-maturity
	2.082.560	2.126.461	
Total	3.205.966	8.112.049	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.000)	(27.378)	Allowance for impairment losses
Neto	3.203.966	8.084.671	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

b. Based on currency, type and issuer

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			<u>Fair value through profit or loss</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Sertifikat Bank Indonesia	-	4.189.398	Certificates of Bank Indonesia
	-	4.189.398	
Reksadana			Mutual Funds
PT Trimegah Asset Management			PT Trimegah Asset Management
RDPU PUNDIK 8	100.237	-	RDPU PUNDIK 8
Efek Beragun Aset			Asset Backed Securities
KIK - SP - BTN 05			KIK EBA - SP - BTN 05
Kelas B	233.567	-	Class B
EBA - SP - BTN04			EBA - SP - BTN04
Kelas B	156.837	-	Class B
EBA - SP - BTN06			EBA - SP - BTN06
Kelas B	99.387	-	Class B
KIK EBA BTN 05			KIK EBA BTN 05
Kelas B	89.675	-	Class B
EBA - SP - BTN03			EBA - SP - BTN03
Kelas B	75.221	-	Class B
EBA - SP - BTN02			EBA - SP - BTN02
Kelas B	69.598	-	Class B
KIK EBA BTN 02			KIK EBA BTN 02
Kelas B	6.997	-	Class B
KIK EBA BTN 03			KIK EBA BTN 03
Kelas B	3.608	-	Class B
KIK EBA BTN 04			KIK EBA BTN 04
Kelas B	1.231	-	Class B
EBA - SP - BTN01			EBA - SP - BTN01
Kelas B	304	-	Class B
	836.662	-	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>			<u>Related Parties (Note 45)</u>
Reksadana			Mutual Funds
PT Danareksa Investment Management			PT Danareksa Investment Management
RD Danareksa Spu 9	349.658	-	RD Danareksa Spu 9
PT Mandiri Manajemen Investasi			PT Mandiri Manajemen Investasi
RD Mandiri Dana Opt	201.619	-	RD Mandiri Dana Opt
RD Mandiri Dana Opt II	150.648	-	RD Mandiri Dana Opt II
	701.925	-	
	1.538.587	-	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u> <u>Rupiah</u> <u>Pihak Ketiga</u> <u>Obligasi</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income</u> <u>Rupiah</u> <u>Third Parties</u> <u>Bonds</u>
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk <i>Mudharabah</i> II 2016	16.369	-	PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk <i>Mudharabah</i> II 2016
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk <i>Mudharabah</i> II 2015	10.004	-	PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk <i>Mudharabah</i> II 2015
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap III Seri A 2019 Tahap I Seri B 2017	23.382 5.047	- -	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Phase III Series A 2019 Phase I Series B 2017
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap III 2017 Seri C Tahap IV 2018 Seri B Tahap I 2019 Seri B Tahap I 2019 Seri C	15.406 20.391 8.240 20.426	- - - -	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase III Series C 2017 Phase IV Series B 2018 Phase I Series B 2019 Phase I Series C 2019
PT Panin Bank Tbk Tahap II 2016	28.816	-	PT Panin Bank Tbk Phases II 2016
PT Bank Danamon Tbk Tahap I Seri B 2019	13.386	-	PT Bank Danamon Tbk Phase I Series B 2019
PT BPD DKI Tahap I 2016	15.284	-	PT BPD DKI Phases I 2016
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tahap I Seri A 2019	10.233	-	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Phase I Series A 2019
Efek Beragun Aset EBA - SP - BTN03 Kelas A	152	-	Asset Backed Securities EBA - SP - BTN03 Class B
	187.136	-	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u> <u>Obligasi</u>			<u>Related Parties (Note 45)</u> <u>Bonds</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri B 2019 Tahap I Seri C 2016	65.531 10.315	- -	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series B 2019 Phase I Series C 2016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I 2016 Seri A Tahap III 2018	35.734 7.297	- -	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I Series A 2016 Phase III 2018
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II 2017 Seri B Sukuk Tahap II 2017 Seri A	51.812 25.622	- -	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II Series B 2017 Sukuk Phase II Series A 2017
PT Bank Mandiri Taspen Pos Tahap I Seri A 2019	23.239	-	PT Bank Mandiri Taspen Pos Phase I Series A 2019
PT Timah (Persero) Tbk Tahap II Seri A 2019	49.460	-	PT Timah (Persero) Tbk Phase II Series A 2019
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2020 Seri A 2020 Seri B	26.484 15.338	- -	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Series A 2020 Series B 2020
PT Jasa Marga (Persero) Tbk SBK I 2020	200.000	-	PT Jasa Marga (Persero) Tbk SBK I 2020

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2020
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan) Rupiah (lanjutan) Pihak Berelasi (lanjutan) (Catatan 45)</u>	
Efek Beragunan Aset	
PT Indonesia Power	
KIK EBA IP PLN	
Seri A Tahun 2017	58.933
 Medium Term Notes	
Perum Perumnas	
Tahap III 2018 Seri A	102.714
	672.479

<u>Mata Uang Asing</u>	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>	
Obligasi	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Senior Unsecured	
Notes Due 2024	45.235
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Euro Medium	
Term Notes (EMTN)-2024	81.569
Term Notes (EMTN)-2025	168.830
PT Pertamina (Persero) Tbk	
Senior Notes	
Tranche - I 2030	30.064
Tranche - II 2050	45.320
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	
Unsecured Fixed	113.725
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk	
Senior Notes - 2025	15.336
 Medium Term Notes	
Lembaga Pembiayaan	
Ekspor Indonesia	
EMTN Programme	
Indonesia Eximbank - 2017	75.290
	575.369

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

31 Desember/ December 31, 2019

<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued) Rupiah (continued)</u>
<u>Related Parties (continued) (Note 45)</u>
Asset Backed Securities
PT Indonesia Power
KIK EBA IP PLN
Series A Year 2017
 Medium Term Notes
Perum Perumnas
Phase III 2018 Series A

<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Related Parties (Note 45)</u>
Obligasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Senior Unsecured
Notes Due 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Euro Medium
Term Notes (EMTN)-2024
Term Notes (EMTN)-2025
PT Pertamina (Persero) Tbk
Senior Notes
Tranche - I 2030
Tranche - II 2050
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Unsecured Fixed
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk
Senior Notes - 2025
 Medium Term Notes
Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia
EMTN Programme
Indonesia Eximbank - 2017

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Tersedia untuk dijual</u>			<u>Available-for-sale</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Sertifikat Bank Indonesia	-	676.423	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi			Bonds
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar)			PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar)
Sukuk Mudharabah II 2016	-	16.462	Sukuk Mudharabah II 2016
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk			PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Tahap III Seri A 2019	-	13.004	Phase III Series A 2019
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)			PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
Sukuk Mudharabah II 2015	-	10.266	Sukuk Mudharabah II 2015
Negotiable Certificate of Deposits			Negotiable Certificate of Deposits
PT BPD DKI			PT BPD DKI
Tahap I Seri A 2019	-	49.495	Phases I Series A 2019
PT Bank KEB Hana Indonesia			PT Bank KEB Hana Indonesia
Tahap V 2019	-	47.850	Phases V 2019
Medium Term Notes			Medium Term Notes
PT BPD Jawa Tengah			PT BPD Jawa Tengah
MTN Syariah Mudharabah			MTN Syariah Mudharabah
Tahap I 2017	-	25.136	Phase I 2017
Efek Beragun Aset			Asset Backed Securities
EBA - SP - BTN05			EBA - SP - BTN05
Kelas B	-	226.151	Class B
EBA - SP - BTN04			EBA - SP - BTN04
Kelas B	-	171.251	Class B
EBA - SP - BTN02			EBA - SP - BTN02
Kelas B	-	69.503	Class B
EBA - SP - BTN03			EBA - SP - BTN03
Kelas B	-	73.507	Class B
KIK EBA BTN 04			KIK EBA BTN 04
Kelas B	-	23.040	Class B
EBA - SP - BTN01			EBA - SP - BTN01
Kelas B	-	9.554	Class B
EBA - SP - BTN04			EBA - SP - BTN04
Kelas A	-	7.553	Class A
EBA - SP - BTN03			EBA - SP - BTN03
Kelas A	-	3.616	Class A
	-	1.422.811	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>		
Obligasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Tahap III Seri A 2017	-	201.570
Tahap I Seri C 2016	-	10.200
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Tahap II 2017 Seri D	-	145.430
Tahap I 2016 Seri A	-	25.254
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
Tahap IV Seri B 2017	-	80.157
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Sukuk Tahap II 2017 Seri B	-	50.321
Sukuk Tahap II 2017 Seri A	-	25.086
PT Bank Mandiri Taspen		
Tahap I Seri A 2017	-	35.248
Tahap I Seri A 2019	-	18.067
PT Kereta Api Indonesia (Persero)		
Tahun 2017 Seri A	-	30.485
PT Timah (Persero) Tbk		
Tahap II Seri A 2019	-	49.634
Tahap I Seri A 2017	-	5.042
<u>Negotiable Certificate of Deposits</u>		
PT Bank Mandiri Taspen		
Seri B 2019	-	19.846
<u>Efek Beragunan Aset</u>		
PT Indonesia Power		
KIK EBA IP PLN		
Seri A Tahun 2017	-	88.365
<u>Medium Term Notes</u>		
Perum Perumnas		
Tahap III 2018 Seri A	-	102.270
	-	886.975

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Related Parties (Note 45)</u>
Bonds
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Phase III Series A 2017
Phase I Series C 2016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Phase II Series D 2017
Phase I Series A 2016
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Phase IV Series B 2017
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Sukuk Phase II Series B 2017
Sukuk Phase II Series A 2017
PT Bank Mandiri Taspen
Phase I Series A 2017
Phase I Series A 2019
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Year 2017 Series A
PT Timah (Persero) Tbk
Phase II Series A 2019
Phase I Series A 2017
<u>Negotiable Certificate of Deposits</u>
PT Bank Mandiri Taspen
Series B 2019
<u>Asset Backed Securities</u>
PT Indonesia Power
KIK EBA IP PLN
Series A Year 2017
<u>Medium Term Notes</u>
Perum Perumnas
Phase III 2018 Series A

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata Uang Asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>		
Obligasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Senior Unsecured Notes Due 2024	-	116.008
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		
Unsecured Fixed Rate Notes	-	110.298
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	-	20.712
Medium Term Notes		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
EMTN Programme		
Indonesia Eximbank - 2017	-	72.543
	-	319.561
	1.434.984	2.629.347

Diukur pada biaya amortisasi

<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Obligasi		
PT Berlian Laju Tanker Tbk		
Sukuk Ijarah 2007	2.000	-
PT Bank CIMB NIAGA Tbk		
Tahap III Seri B 2017	-	-
Tahap II Seri B 2017	-	-
Tahap I Seri B 2019	20.218	-
Tahap II 2017 Seri C	17.184	-
PT Panin Bank Tbk		
Tahap II 2016	10.117	-
Tahap IV 2018	50.089	-
	99.608	-

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Available-for-sale (continued)</u>	
<u>Rupiah (continued)</u>	
<u>Third Parties (continued)</u>	
<u>Foreign Currencies</u>	
<u>United States Dollar</u>	
<u>Related Parties (Note 45)</u>	
Bonds	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Senior Unsecured Notes Due 2024	
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	
Unsecured Fixed Rate Notes	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	
Medium Term Notes	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
EMTN Programme	
Indonesia Eximbank - 2017	

Amortized cost

<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
Bonds	
PT Berlian Laju Tanker Tbk	
Sukuk Ijarah 2007	
PT Bank CIMB NIAGA Tbk	
Phases III Series B 2017	
Phases III Series B 2017	
Phases I Series B 2019	
Phases II Series C 2017	
PT Panin Bank Tbk	
Phases II 2016	
Phases IV 2018	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>		
<u>amortisasi (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (continued)</u>		
<u>Pihak Berelasi (catatan 45)</u>		
Obligasi (lanjutan)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Tahap II Seri B 2017	25.285	-
Tahap I Seri B 2019	60.101	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Tahap III 2018	5.057	-
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	42.344	-
	132.787	-
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Obligasi		
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Tahap III Seri B 2017	-	39.145
Tahap II Seri B 2017	-	10.039
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		
Tahap I Seri A 2019	-	10.028
PT Berlian Laju Tanker Tbk		
Sukuk Ijarah 2007	-	2.000
Efek Beragunan Aset		
KIK EBA BTN 05 Kelas B	-	120.000
KIK EBA BTN 03 Kelas B	-	31.041
KIK EBA BTN 02 Kelas B	-	9.623
EBA-SP-BTN 02 Kelas A1	-	-
Negotiable Certificate of Deposits		
PT Bank Commonwealth		
Tahap II Seri A 2019	-	29.577
MUFG Bank Ltd., Jakarta		
Tahap IV Seri C 2019	-	96.373
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	-	25.553
	-	373.379

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Amortized cost (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Related Parties (note 45)</u>
<u>Bonds (continued)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Phase II Series B 2017
Phase I Series B 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Phases III 2018
Domestic Documentary Letters of Credit
<u>Held-to-maturity</u>
<u>Rupiah</u>
<u>Third Parties</u>
<u>Bonds</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Phases III Series B 2017
Phases II Series B 2017
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Phases I Series A 2019
PT Berlian Laju Tanker Tbk
Sukuk Ijarah 2007
Asset Backed Securities
KIK EBA BTN 05 Class B
KIK EBA BTN 03 Class B
KIK EBA BTN 02 Class B
EBA - SP-BTN02 Class A1
Negotiable Certificate of Deposits
PT Bank Commonwealth
Phases II Series A 2019
MUFG Bank Ltd., Jakarta
Phases IV Series C 2019
Domestic Documentary Letters of Credit

123

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				Rupiah
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016	Obligasi/Bonds	15 Juli/ July 15, 2021	9,35% tetap/ fixed	PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sukuk Mudharabah II 2016
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015	Obligasi/Bonds	8 Januari/ January 8, 2021	10,99% tetap/ fixed	PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sukuk Mudharabah II 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri C 2016	Obligasi/Bonds	1 Desember/ December 1, 2021	8,20% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series C 2016
Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	07 November/ November 07, 2022	7,60% tetap/ fixed	Phase I Series B 2019
Tahap III Seri B 2017	Obligasi/Bonds	24 Agustus/ August 24, 2022	8,00% tetap/ fixed	Phase III Series B 2017
Tahap III Seri A 2017	Obligasi/Bonds	24 Agustus/ August 24, 2020	7,60% tetap/ fixed	Phase III Series A 2017
Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	17 November/ November 17, 2020	6,50% tetap/ fixed	Phase I Series A 2019
Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2020	8,10% tetap/ fixed	Phase II Series B 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	Obligasi/Bonds	21 September/ September 21, 2023	8,50% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/Bonds	30 September/ September 30, 2021	7,95% tetap/ fixed	Phase I Series A 2016
Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	15 Juni/ June 15, 2020	7,80% tetap/ fixed	Phase II Series D 2017
PT Mandiri Taspen Pos Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	26 November/ November 26, 2022	7,90% tetap/ fixed	PT Mandiri Taspen Pos Phase I Series A 2019
Tahap I Seri A 2017	Obligasi/Bonds	11 Juli/ July 11, 2020	8,50% tetap/ fixed	Phase I Series A 2017
Seri B 2019	Negotiable Certificate of Deposits	20 Februari/ February 20, 2020	8,40% tetap/ fixed	Series B 2019
PT Bank Danamon Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	24 Mei/ May 24, 2022	8,55% tetap/ fixed	PT Bank Danamon Phase I Series B 2019
PT Timah (Persero) Tbk Tahap II Seri A 2019	Obligasi/Bonds	15 Agustus/ August 15, 2022	8,50% tetap/ fixed	PT Timah (Persero) Tbk Phase II Series A 2019
Tahap I Seri A 2017	Obligasi/Bonds	28 September/ September 28, 2020	8,50% tetap/ fixed	Phase I Series A 2017
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	19 Desember / December 19, 2022	7,55% tetap/ fixed	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase I Series B 2019
Tahap III Seri C 2017	Obligasi/Bonds	2 November / November 2, 2022	7,75% tetap/ fixed	Phase I Series C 2017
Tahap IV Seri B 2018	Obligasi/Bonds	20 September / 20 September, 2021	8,50% tetap/ fixed	Phase IV Series B 2018
Tahap II Seri C 2017	Obligasi/Bonds	23 Agustus / August 23, 2022	8,15% tetap/ fixed	Phase II Series C 2017
Tahap I Seri C 2019	Obligasi/Bonds	19 Desember / December 19, 2024	7,80% tetap/ fixed	Phase I Series C 2019
Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	23 Agustus / August 23, 2020	7,70% tetap/ fixed	Phase II Series B 2017
Tahap III Seri B 2017	Obligasi/Bonds	2 November / November 2, 2020	7,50% tetap/ fixed	Phase III Series B 2017
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli/ July 5, 2012	10,35% tetap/ fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				Rupiah
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	26 November/ November 26, 2022	7,55% tetap/ fixed	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (Persero) Tbk Phase I Series A 2019
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tbk Seri A 2020	Obligasi/Bonds	01 September/ September 01, 2023	9,95% tetap/ fixed	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tbk Series A Year 2020
Seri B 2020	Obligasi/Bonds	01 September/ September 01, 2025	10,55% tetap/ fixed	Series B Year 2020
PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Power PLN	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	19 September/ September 19, 2022	8,02% tetap/ fixed	PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Power PLN
PT Bank Panin Tbk Tahap II 2016	Obligasi/Bonds	27 Oktober/ October 27, 2021	8,75% tetap/ fixed	PT Bank Panin Tbk Phase II 2016
Tahap IV 2018	Obligasi/Bonds	18 April/ April 18, 2021	7,40% tetap/ fixed	Phase IV 2018
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap IV Seri B 2017	Obligasi/Bonds	23 Februari/ February 23, 2020	8,40% tetap/ fixed	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Phase IV Seri B 2017
EBA - SP - BTN03 Kelas A	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	28 April/ April 28, 2021	8,00%	EBA - SP - BTN03 Class A
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	10 Desember/ December 10, 2021	10,75% tetap/ fixed	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
PT BPD Jawa Barat Tahap III 2019 Seri A	Obligasi/Bonds	18 Oktober/ October 18, 2022	8,25% tetap/ fixed	PT BPD Jawa Barat Phase III Year 2019 Series A
Tahap I 2017 Seri B	Obligasi/Bonds	6 Desember/ December 6, 2022	8,15% tetap/ fixed	Phase I Year 2017 Series B
PT BPD DKI Jakarta Tahap I 2016	Obligasi/Bonds	30 Juni/ June 30, 2021	9,25% tetap/ fixed	PT BPD DKI Jakarta Phase I Year 2016
Tahap I Seri A 2019	Negotiable Certificate of Deposits	10 Maret/ March 10, 2020	6,20% tetap/ fixed	Phase I Series A 2019
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahap I 2020	Obligasi/Bonds	13 Oktober/ October 13, 2021	6,80% tetap/ fixed	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Phase I Year 2020
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	12 Januari/ January 12, 2020	12,55% tetap/ fixed	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IV 2010
Sukuk Tahap II 2017 Seri A	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2022	7,20% tetap/ fixed	Sukuk Phase II Series A 2017
Sukuk Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2027	8,20% tetap/ fixed	Sukuk Phase II Series B 2017
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	13 Juli/ July 13, 2020	7,55% tetap/ fixed	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Phase I Series A 2019
PT Bank KEB Hana Indonesia Tahap V 2019	Obligasi/Bonds	17 September/ September 17, 2020	6,89% tetap/ fixed	PT Bank KEB Hana Indonesia Phase V 2019
PT BPD Jawa Tengah MTN Syariah Mudharabah Tahap I 2017	Medium Term Notes	12 Desember/ December 12, 2020	8,05% tetap/ fixed	PT BPD Jawa Tengah MTN Syariah Mudharabah Phase I 2017

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri A 2019	Negotiable Certificate of Deposits	3 Januari/ January 3, 2020	6,31% tetap/ fixed	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series A 2019
Tahap III Seri D 2019	Negotiable Certificate of Deposits	1 Oktober/ October 1, 2020	6,70% tetap/ fixed	Phase III Series D 2019
Tahap III Seri C 2019	Negotiable Certificate of Deposits	20 Maret/ March 20, 2020	7,59% tetap/ fixed	Phase III Series C 2019
Mata Uang Asing Dolar Amerika Serikat				Foreign Currencies United States Dollar
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2024	Medium Term Notes	6 April/ April 6, 2024	3,88% tetap/ fixed	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2024
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024	Obligasi/Bonds	28 Maret/ March 28, 2024	3,95% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes	Obligasi/Bonds	16 Mei/ May 16, 2024	5,13% tetap/ fixed	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2024	2,85% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/Bonds	13 Mei/ May 13, 2025	4,75% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Term Notes (EMTN) - 2025
PT Pertamina (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2030	Obligasi/Bonds	21 Januari/ January 21, 2030	3,10% tetap/ fixed	PT Pertamina (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2030
PT Pertamina (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2050	Obligasi/Bonds	21 Januari/ March 21, 2050 May 13, 2025	4,18% tetap/ fixed fixed	PT Pertamina (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2050
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tbk Senior Notes 2025	Obligasi/Bonds	5 Mei/ May 5, 2025	4,25% tetap/ fixed	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tbk Senior Notes 2025

d. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo
(efek-efek yang diukur pada biaya perolehan
amortisasi)

d. Remaining period to maturity (amortized cost
securities)

	31 Desember / Desember 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
≤ 1 tahun	102.550	1.130.640
> 1 tahun ≤ 5 tahun	127.845	40.664
> 5 tahun ≤ 10 tahun	-	120.000
> 10 tahun	2.000	2.000
	232.395	1.293.304

≤ 1 year
> 1 year ≤ 5 years
> 5 years ≤ 10 years
> 10 years

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

8. SECURITIES (continued)

e. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	Issuer
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2016 Tahap III 2018 Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024 Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAAA idAAA Baa2 ^{*)} Baa2 ^{*)}	idAAA - - -	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I Series A 2016 Phase II 2018 Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024 Term Notes (EMTN) - 2025
PT Panin Tahap II 2016 Tahap IV 2018	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAA idAA	- -	Phase II 2016 Phase IV 2018
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	idAAA	-	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Phase I Series A 2019
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II 2017 Seri A Sukuk Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAAA(sy) idAAA(sy)	idAAA(sy) idAAA(sy)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II 2017 Series A Sukuk Phase II 2017 Series B
PT Mandiri Taspen Pos Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	AA(idn)	-	PT Mandiri Taspen Pos Phase I Series A 2019
PT Bank Danamon Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	idAAA	-	PT Bank Danamon Phase I Series B 2019
PT Timah (Persero) Tbk Tahap II Seri A 2019	Obligasi/Bonds	idA+	idA+	PT Timah (Persero) Tbk Phase II Series A 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap I Seri C 2019 Tahap I Seri B 2019 Tahap III Seri C 2017 Tahap IV Seri B 2018 Tahap II Seri C 2017	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAAA idAAA idAAA idAAA idAAA	idAAA idAAA idAAA idAAA idAAA	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase I Series C 2019 Phase I Series B 2019 Phase III Series C 2017 Phase IV Series B 2018 Phase II Series C 2017
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	-	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2024
PT Pertamina (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2030 Term Notes (EMTN) - 2050	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)} Baa2 ^{*)}	- -	PT Pertamina (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2030 Term Notes (EMTN) - 2050
PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Seri A Tahun 2017	Efek Beragungan Aset/ Asset Backed Securities	idAAA(sf)	idAAA(sf)	PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Series A Year 2017
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	idBBB-	idBBB+	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2020 Seri A Tahun 2020 Seri B	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idA idA	- -	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Year 2020 Series A Year 2020 Series B

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat (lanjutan)

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember / Desember 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	Issuer
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	idD (sy)	idD (sy)	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007
EBA - SP -BTN 03 KPR BTN Kelas A	Efek Beragunan Aset/ Asset Backed Securities	idAAA	idAAA	EBA - SP - BTN 03 KPR BTN Class A
PT BPD Jawa Barat (Bank Jabar) Tahap III Seri A 2019 Tahap I Seri B 2017	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAA- idAA-	idAA- -	PT BPD Jawa Barat (Bank Jabar) Phase III Series A 2019 Phase I Series B 2017
PT BPD DKI Jakarta Tahap I 2016	Obligasi/Bonds	idAA-	-	PT BPD DKI Jakarta Phase I Year 2016
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahap I 2020	Obligasi/Bonds	idA+	-	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Phase I Year 2020
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2025	Obligasi/Bonds	Baa2*)	-	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

*) Based on ratings published by Moody's

f. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

f. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

	31 Desember / Desember 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Lancar	2.735.540	7.974.134	Current
Dalam Perhatian Khusus	27.901	60.632	Special Mention
Kurang Lancar	7.645	6.070	Substandard
Diragukan	69.846	6.432	Doubtful
Macet	365.034	64.781	Loss
Total	3.205.966	8.112.049	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.000)	(27.378)	Allowance for impairment losses
Neto	3.203.966	8.084.671	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Rupiah		
Saldo awal tahun	27.378	20.173
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No.71 (Catatan 54)	(25.377)	-
Penyisihan/(Pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 35)	(1)	7.205
Saldo akhir tahun	2.000	27.378

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Efek-efek					
Saldo 1 Januari	25.378	-	-	2.000	27.378
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 54)	(25.377)	-	-	-	(25.377)
Saldo awal PSAK 71	1	-	-	2.000	2.001
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1)	-	-	-	(1)
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(1)	-	-	-	(1)
Saldo akhir tahun	-	-	-	2.000	2.000

^{*)} Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

- i. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp356.168 dan Rp478.339, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

8. SECURITIES (continued)

- g. The movements in the allowance for impairment losses on securities are as follows:

Rupiah
 Balance at beginning of year
 Adjustment in relation with
 the implementation of
 PSAK 71 (Notes 54)
 Provision/ (reversal) for
 impairment losses during
 the year (Note 35)
 Balance at end of year

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Securities
 Balance at January 1
 Impact of initial adoption of
 SFAS 71 (note 54)
 Beginning Balance SFAS 71
 Net remeasurement of
 impairment losses
 New financial assets
 originated or purchased
 Derecognized financial
 assets
 Total Additional/(reversal)
 during the year
 Balance at end of year

^{*)} Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

- i. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp356,168 and Rp478,339, for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of securities - net".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- k. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain" pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, masing-masing berkisar dari 99,62% sampai dengan 103,76% dan 95,70% sampai dengan 100,84%
- l. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih (setelah pajak tangguhan) sebesar Rp77.079 dan Rp15.661 dari perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan yang tersedia untuk dijual masing-masing pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019 dalam akun keuntungan (kerugian) dan kerugian neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan net dalam laporan posisi keuangan.
- m. Mutasi keuntungan/(kerugian) efek-efek yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020 ^{*)}	31 Desember/ December 31, 2019 ^{*)}	
Saldo awal tahun	15.661	2.472	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 71 (Catatan 54)	112	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK 71 (Notes 54)
Keuntungan yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	49.785	17.156	Unrealized gain recognized in equity
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	(3.237)	(876)	Allowance for
Penyisihan/ (Pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 35)	27.746	-	Provision/ (reversal) for impairment losses during the year (Note 35)
Efek pajak	(12.988)	(3.091)	Tax effect
Saldo akhir tahun	77.079	15.661	Balance at end of year

^{*)} Klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain

^{**)} Klasifikasi tersedia dijual

^{*)} Fair Value through other comprehensive income classification

^{**)} Available for sale

- n. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak - pihak berelasi sebesar Rp 2.082.560 dan Rp2.126.461, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 45).
- o. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 48.

- n. As of December 31, 2020 and 2019, investments in securities with related parties amounted to Rp 2,082,560 and Rp2,126,461, respectively (Note 45).
- o. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 48.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH

- a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>		
Diukur pada nilai wajar		
Melalui laba rugi	19.441.763	1.232.204
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	33.019.094	-
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	3.826.894	-
Tersedia untuk dijual	-	6.147.729
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	3.673.668
Total	56.287.751	11.053.601

Related Party (Note 45)

Fair value through profit or loss
Fair value through other comprehensive income
Amortized cost
Available-for-sale
Held-to-maturity

Total

- b. Berdasarkan mata uang dan jenis

- b. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Pihak berelasi</u>		
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0086	270.343	-
SR 0013	161.773	-
FR 0087	124.293	-
FR 0053	123.558	-
FR 0081	105.142	-
FR 0070	76.101	-
FR 0056	68.783	-
FR 0061	57.306	-
FR 0084	54.250	-
PBS 0026	52.621	-
FR 0065	51.817	39.885
FR 0075	43.549	11.272
FR 0080	42.854	29.592
FR 0076	37.238	194
FR 0078	23.320	32.414
FR 0074	22.308	-
FR 0077	21.857	-
FR 0062	20.240	3.605
FR 0079	15.260	10.731
FR 0082	14.116	39.813
FR 0068	13.334	42.839
FR 0064	12.127	-
FR 0059	10.697	50.117
ORI 15	10.342	3.423
ORI 18	10.203	-
ORI 17	5.059	-
SR 0010	3.717	1.510
SR 0012	2.796	-
FR0083	2.332	73.793
SR 0011	2.263	5.710
FR 0071	1.665	11.234
FR 0072	1.051	-
ORI 016	63	40.683
SR 0009	-	1.295
ORI 14	-	10
Total	1.462.378	398.120

Related parties
Fair value through profit or loss

Rupiah
Fixed interest rate

FR 0086
SR 0013
FR 0087
FR 0053
FR 0081
FR 0070
FR 0056
FR 0061
FR 0084
PBS 0026
FR 0065
FR 0075
FR 0080
FR 0076
FR 0078
FR 0074
FR 0077
FR 0062
FR 0079
FR 0082
FR 0068
FR 0064
FR 0059
ORI 15
ORI 18
ORI 17
SR 0010
SR 0012
FR 0083
SR 0011
FR 0071
FR 0072
ORI 016
SR 0009
ORI 14

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Pihak berelasi (lanjutan)</u>		
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Tingkat bunga tetap (lanjutan)</u>		
<u>Zero Coupon Bonds</u>		
SPN12210205	2.178.812	-
SPN12210304	2.017.111	-
SPN12210108	1.916.690	-
SPNS14042021	1.888.823	-
SPNS02032021	1.432.464	-
SPNS08012021	1.245.713	-
SPN12211007	983.445	-
SPN12210701	929.749	-
SPN03210121	889.765	-
SPNS11052021	738.020	-
SPN03210218	591.709	-
SPN12210812	589.019	-
SPN12210909	536.703	-
SPN12210603	415.855	-
SPN12210401	337.583	-
SPN12210429	305.481	-
SPN12211104	294.282	-
SPN12200106	-	373.000
SPN12200619	-	195.578
SPNS02042020	-	52.852
	17.291.224	621.430
	18.753.602	1.019.550
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<u>Tingkat bunga tetap</u>		
INDOIS 2024	173.445	-
INDON 2026	141.976	-
INDOIS 2025	87.687	-
INDON 2022N	86.947	-
INDOIS 2022N	72.701	-
INDON 2050	45.721	-
INDON 2024	33.086	-
INDOIS 2029	28.852	-
INDON 2049N	15.363	-
INDON 2030N	2.383	-
INDON 2029	-	111.293
INDON 2029N	-	101.361
	688.161	212.654
	19.441.763	1.232.204

<u>Related parties (continued)</u>
<u>Fair value through profit or loss (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Fixed interest rate (continued)</u>
<u>Zero Coupon Bonds</u>
SPN12210205
SPN12210304
SPN12210108
SPNS14042021
SPNS02032021
SPNS08012021
SPN12211007
SPN12210701
SPN03210121
SPNS11052021
SPN03210218
SPN12210812
SPN12210909
SPN12210603
SPN12210401
SPN12210429
SPN12211104
SPN12200106
SPN12200619
SPNS02042020
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Fixed interest rate</u>
INDOIS 2024
INDON 2026
INDOIS 2025
INDON 2022N
INDOIS 2022N
INDON 2050
INDON 2024
INDOIS 2029
INDON 2049N
INDON 2030N
INDON 2029
INDON 2029N

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2020
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u>	
<u>nilai wajar melalui penghasilan</u>	
<u>komprehensif lain</u>	
<u>Rupiah</u>	
Tingkat bunga tetap	
FR 0084	2.245.929
FR 0085	2.214.343
FR 0050	1.372.384
FR 0082	821.070
FR 0052	814.046
FR 0075	811.364
FR 0058	767.706
FR 0056	762.154
FR 0064	697.610
FR 0081	663.455
FR 0072	629.911
FR 0071	597.284
FR 0083	565.362
FR 0040	547.827
FR 0078	506.603
FR 0068	496.162
FR 0079	492.118
FR 0070	479.066
FR 0074	456.007
FR 0073	440.674
FR 0059	369.040
FR 0065	334.563
FR 0086	294.145
FR 0076	288.973
FR 0061	286.528
FR 0080	280.714
FR 0077	249.325
PBS 012	241.027
FR 0037	238.154
FR 0046	196.279
FR 0053	189.544
FR 0087	189.032
PBS 028	182.531
FR 0047	160.853
FR 0054	142.833
PBS 025	135.237
FR 0067	116.922
FR 0045	105.756
PBS 002	99.952
FR 0043	96.318
PBS 026	87.221
PBS 022	70.455
PBS 014	65.785
FR 0062	60.448
PBS 017	54.121
ORI 016	41.907
FR 0034	41.660
FR 0044	40.593
PBS 003	24.883
ORI 017	20.755
FR 0057	19.173
PBS 004	18.797
FR 0063	13.693
FR 0039	5.857
FR 0042	1.237
	21.145.386

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Financial asset held at fair</u>	
<u>value through other</u>	
<u>comprehensive income</u>	
<u>Rupiah</u>	
Fixed interest rate	
FR 0084	-
FR 0085	-
FR 0050	-
FR 0082	-
FR 0052	-
FR 0075	-
FR 0058	-
FR 0056	-
FR 0064	-
FR 0081	-
FR 0072	-
FR 0071	-
FR 0083	-
FR 0040	-
FR 0078	-
FR 0068	-
FR 0079	-
FR 0070	-
FR 0074	-
FR 0073	-
FR 0059	-
FR 0065	-
FR 0086	-
FR 0076	-
FR 0061	-
FR 0080	-
FR 0077	-
PBS 012	-
FR 0037	-
FR 0046	-
FR 0053	-
FR 0087	-
PBS 028	-
FR 0047	-
FR 0054	-
PBS 025	-
FR 0067	-
FR 0045	-
PBS 002	-
FR 0043	-
PBS 026	-
PBS 022	-
PBS 014	-
FR 0062	-
PBS 017	-
ORI 016	-
FR 0034	-
FR 0044	-
PBS 003	-
ORI 017	-
FR 0057	-
PBS 004	-
FR 0063	-
FR 0039	-
FR 0042	-
	-

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u> <u>nilai wajar melalui penghasilan</u> <u>komprehensif lain (Lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Syariah Negara		
PBS 027	492.813	-
PBS 026	266.326	-
PBS 019	111.042	-
PBS 025	108.863	-
PBS 022	80.850	-
PBS 003	75.750	-
PBS 028	74.817	-
PBS 021	74.287	-
PBS 017	12.899	-
PBS 011	8.802	-
PBS 014	4.242	-
	1.310.691	-
 Zero Coupon Bonds		
SPN12210108	116.439	-
	116.439	-

<u>Financial asset held at fair</u> <u>value through other</u> <u>comprehensive income (Continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
Government Sharia Bond
PBS 027
PBS 026
PBS 019
PBS 025
PBS 022
PBS 003
PBS 028
PBS 021
PBS 017
PBS 011
PBS 014
 Zero Coupon Bonds
SPN12210108

<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDON 2038	1.446.340	-
INDOIS 2029	856.948	-
INDON 2047	673.656	-
INDON 2046	645.252	-
INDOIS 2030N	594.914	-
INDON 2044	530.104	-
INDON 2043	432.175	-
INDON 2030N	413.420	-
INDON 2042	391.350	-
INDON 2037	334.485	-
INDON 2026	328.590	-
INDOIS 2027	327.005	-
INDOIS 2028	306.104	-
INDOIS 2050	289.008	-
INDON 2025	245.116	-
INDON 2035	228.295	-
INDOIS 2026	209.323	-
INDON 2048	205.285	-
INDON 2030	189.635	-
INDON 2029	172.006	-
INDON 2050N	169.927	-
INDON 2049N	168.533	-
INDON 2045	163.537	-
INDON 2027	163.503	-
INDOIS 2024	153.420	-
INDON 2049	124.254	-
INDOIS 2025	94.702	-
INDON 2047N	81.241	-
INDON 2050	76.202	-
INDON 2028N	73.507	-
INDON 2028	70.838	-
USDFR0002	63.988	-
INDON 2023	59.582	-
INDOIS 2025N	44.091	-
INDOIS 2021	33.397	-

<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Fixed interest rate</u>
INDON 2038
INDOIS 2029
INDON 2047
INDON 2046
INDOIS 2030N
INDON 2044
INDON 2043
INDON 2030N
INDON 2042
INDON 2037
INDON 2026
INDOIS 2027
INDOIS 2028
INDOIS 2050
INDON 2025
INDON 2035
INDOIS 2026
INDON 2048
INDON 2030
INDON 2029
INDON 2050N
INDON 2049N
INDON 2045
INDON 2027
INDOIS 2024
INDON 2049
INDOIS 2025
INDON 2047N
INDON 2050
INDON 2028N
INDON 2028
USDFR0002
INDON 2023
INDOIS 2025N
INDOIS 2021

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u> <u>nilai wajar melalui penghasilan</u> <u>komprehensif lain (Lanjutan)</u> <u>Mata uang asing (lanjutan)</u> <u>Dolar Amerika Serikat (continued)</u>		
INDON 2029N	32.246	-
INDOIS 2024N	18.982	-
INDON 2027N	16.040	-
INDOIS 2023	14.982	-
INDOIS 2022N	4.595	-
	10.446.578	-
	33.019.094	-
<u>Tersedia untuk dijual</u> <u>Rupiah</u> Tingkat bunga tetap		
FR 0064	-	477.799
SR 0010	-	235.047
FR 0065	-	157.685
FR 0063	-	135.847
FR 0075	-	108.035
FR 0061	-	61.113
FR 0062	-	54.284
FR 0070	-	53.503
FR 0072	-	52.728
FR 0059	-	40.094
FR 0074	-	39.903
FR 0056	-	32.351
FR 0076	-	19.378
	-	1.467.767
<u>Zero Coupon Bonds</u>		
SPN12200106	-	676.358
SPN12200619	-	254.252
SPNS02042020	-	245.384
SPN12200130	-	199.316
SPNS10012020	-	173.142
SPN03200123	-	156.909
SPN12201009	-	144.341
SPN12200508	-	98.349
SPNS15052020	-	98.060
SPNS04032020	-	97.331
SPN12200313	-	81.101
SPNS07022020	-	49.736
	-	2.274.279
<u>Tingkat bunga mengambang</u> VR 0031		
	-	1.121.749
<u>Obligasi Syariah Negara</u>		
PBS 019	-	107.453
PBS 022	-	74.727
PBS 021	-	70.829
PBS 016	-	60.154
PBS 011	-	8.578
PBS 014	-	4.228
	-	1.447.718

Financial asset held at fair
value through other
comprehensive income (Continued)
Foreign Currencies(continued)
United States Dollar (continued)

INDON 2029N
INDOIS 2024N
INDON 2027N
INDOIS 2023
INDOIS 2022N

Available-for-sale
Rupiah
Fixed interest rate

FR 0064
SR 0010
FR 0065
FR 0063
FR 0075
FR 0061
FR 0062
FR 0070
FR 0072
FR 0059
FR 0074
FR 0056
FR 0076

Zero Coupon Bonds
SPN12200106
SPN12200619
SPNS02042020
SPN12200130
SPNS10012020
SPN03200123
SPN12201009
SPN12200508
SPNS15052020
SPNS04032020
SPN12200313
SPNS07022020

Floating interest rate
VR 0031

Government Sharia Bond
PBS 019
PBS 022
PBS 021
PBS 016
PBS 011
PBS 014

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDON 2029N	-	205.618
INDOIS 2028	-	142.484
INDON 2029	-	127.191
INDON 2025	-	104.252
INDON 2028	-	97.941
INDON 2047N	-	64.177
INDON 2048	-	45.952
INDON 2049	-	44.789
INDON 2049N	-	43.000
INDON 2022	-	42.964
INDON 2042	-	25.087
INDON 2028N	-	14.510
	-	957.965
	-	6.147.729
<u>Diukur pada biaya</u>		
<u>perolehan amortisasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0063	310.241	-
FR 0053	249.564	-
FR 0056	216.185	-
FR 0070	127.116	-
FR 0034	60.982	-
FR 0043	31.739	-
FR 0042	17.549	-
	1.013.376	-
<u>Obligasi Syariah Negara</u>		
<u>Sukuk BI</u>		
	2.259.901	-
	2.259.901	-
	3.273.277	-
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDOIS 2022N	147.812	-
INDOIS 2021	109.786	-
INDOIS 2024	93.911	-
INDON 2021	70.499	-
INDON 2022	42.037	-
INDON 2022N	31.335	-
INDON 2023 N	30.136	-
INDOIS 2024N	28.101	-
	553.617	-
	3.826.894	-

<u>Available-for-sale (continued)</u>
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Fixed interest rate</u>
INDON 2029N
INDOIS 2028
INDON 2029
INDON 2025
INDON 2028
INDON 2047N
INDON 2048
INDON 2049
INDON 2049N
INDON 2022
INDON 2042
INDON 2028N

<u>Amortized cost</u>
<u>Rupiah</u>
<u>Fixed interest rate</u>
FR 0063
FR 0053
FR 0056
FR 0070
FR 0034
FR 0043
FR 0042

Government Sharia Bond
Sukuk BI

<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Fixed interest rate</u>
INDOIS 2022N
INDOIS 2021
INDOIS 2024
INDON 2021
INDON 2022
INDON 2022N
INDON 2023 N
INDOIS 2024N

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			<u>Held-to-maturity</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0063	-	302.941	FR 0063
FR 0053	-	248.798	FR 0053
FR 0056	-	215.695	FR 0056
FR 0070	-	126.377	FR 0070
FR 0031	-	115.218	FR 0031
PBS 016	-	100.207	PBS 016
FR 0034	-	63.020	FR 0034
FR 0043	-	21.757	FR 0043
	-	1.194.013	
Tingkat bunga mengambang			Floating interest rate
VR 0031	-	1.124.754	VR 0031
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	-	679.701	Sukuk BI
	-	1.804.455	
	-	2.998.468	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign Currencies</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDON 2020	-	267.897	INDON 2020
INDOIS 2022N	-	146.271	INDOIS 2022N
INDOIS 2024	-	93.430	INDOIS 2024
INDON 2021	-	70.361	INDON 2021
INDON 2022	-	41.454	INDON 2022
INDOIS 2021	-	28.023	INDOIS 2021
INDOIS 2024N	-	27.764	INDOIS 2024N
	-	675.200	
	-	3.673.668	
Total	56.287.751	11.053.601	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

c. Based on maturity and interest rate

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u> <u>Rupiah</u>			<u>Fair value through profit or loss</u> <u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed	FR 0059
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed	FR 0062
FR 0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50% tetap/ fixed	FR 0074
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed	FR 0065
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034	8,38% tetap/ fixed	FR 0068
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed	FR 0071
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed	FR 0075
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38% tetap/ fixed	FR 0076
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed	FR 0077
FR 0053	15 Juli/ July 15, 2021	8,25% tetap/ fixed	FR 0053
FR 0079	15 April/ April 15, 2039	8,38% tetap/ fixed	FR 0079
FR 0080	15 September / September 15, 2035	7,50% tetap/ fixed	FR 0080
FR 0081	15 Juni / June 15, 2025	6,50% tetap/ fixed	FR 0081
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed	FR 0082
FR 0083	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/ fixed	FR 0083
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed	FR 0084
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
ORI 015	15 Oktober/ October 15, 2021	8,25% tetap/ fixed	ORI 015
ORI 016	15 Oktober/ October 15, 2022	6,80% tetap/ fixed	ORI 016
SR 0010	10 Maret/ March 10, 2021	5,90% tetap/ fixed	SR 0010
SR 0011	10 Maret/ March 10, 2022	8,05% tetap/ fixed	SR 0011
SR 0012	10 Maret/ March 10, 2023	6,30% tetap/ fixed	SR 0012
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed	FR 0064
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25% tetap/ fixed	FR 0072
FR 0086	15 April/ April 15, 2026	5,50% tetap/ fixed	FR 0086
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed	FR 0087
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed	PBS 026
FR 0061	15 Mei/ May 15, 2022	7,00% tetap/ fixed	FR 0061
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed	FR 0078
ORI 017	15 Juli/ July 15, 2023	6,40% tetap/ fixed	ORI 017
ORI 018	15 Oktober/ October 15, 2023	5,70% tetap/ fixed	ORI 018
SR 0013	10 September/ September 10, 2023	6,05% tetap/ fixed	SR 0013
Zero Coupon Bonds SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various	Zero Coupon Bonds SPN

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDOIS 2022N	29 Maret/ March 29, 2022	3,40% tetap/ fixed
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024	4,35% tetap/ fixed
INDOIS 2025	28 Mei/ May 28, 2025	4,33% tetap/ fixed
INDOIS 2026	29 Maret/ March 29, 2026	4,55% tetap/ fixed
INDOIS 2029	20 Februari/ February 20, 2029	4,45% tetap/ fixed
INDOIS 2030N	23 Juni/ June 23, 2030	2,80% tetap/ fixed
INDON 2022N	8 Januari/ January 8, 2022	3,70% tetap/ fixed
INDON 2024	15 Januari/ January 15, 2024	5,88% tetap/ fixed
INDON 2049N	30 Oktober/ October 30, 2049	3,70% tetap/ fixed
INDON 2050	14 Februari/ February 14, 2050	3,50% tetap/ fixed
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u>		
<u>nilai wajar melalui penghasilan</u>		
<u>komprehensif lain</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed
FR 0034	15 Juni/ June 15, 2021	12,80% tetap/ fixed
FR 0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50% tetap/ fixed
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed
FR 0037	15 September/ September 15, 2026	12,00% tetap/ fixed
FR 0083	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/ fixed
FR 0039	15 Agustus/ August 15, 2023	11,75% tetap/ fixed
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	10,25% tetap/ fixed
FR 0043	15 Juli/ July 15, 2022	10,25% tetap/ fixed
FR 0044	15 September/ September 15, 2024	10,00% tetap/ fixed
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed
FR 0047	15 Februari/ February 15, 2028	10,00% tetap/ fixed
FR 0052	15 Agustus/ August 15, 2030	10,50% tetap/ fixed
FR 0053	15 Juli/ July 15, 2021	8,25% tetap/ fixed
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate

Description
<u>Fair value through profit or loss (continued)</u>
<u>United States Dollar</u>
Fixed interest rate
INDOIS 2022N
INDOIS 2024
INDOIS 2025
INDOIS 2026
INDOIS 2029
INDOIS 2030N
INDON 2022N
INDON 2024
INDON 2049N
INDON 2050
<u>Financial asset held at fair</u>
<u>value through other</u>
<u>comprehensive income</u>
<u>Rupiah</u>
Fixed interest rate
FR 0063
FR 0064
FR 0065
FR 0070
FR 0034
FR 0074
FR 0075
FR 0037
FR 0083
FR 0039
FR 0040
FR 0042
FR 0043
FR 0044
FR 0046
FR 0047
FR 0052
FR 0053
FR 0056

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0058	15 Juni/ June 15, 2032	8,25% tetap/ fixed
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed
FR 0061	15 Mei/ May 15, 2022	7,00% tetap/ fixed
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031	8,75% tetap/ fixed
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed
FR 0081	15 Juni/ June 15, 2025	6,50% tetap/ fixed
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed
FR 0085	15 April/ April 15, 2031	7,75% tetap/ fixed
FR 0086	15 April/ April 15, 2026	5,50% tetap/ fixed
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed
ORI 016	15 Oktober/ October 15, 2022	6,80% tetap/ fixed
PBS 002	15 Januari/ January 15, 2022	5,45% tetap/ fixed
PBS 014	15 Mei/ May 15, 2021	6,50% tetap/ fixed
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed
FR 0045	15 Mei/ May 15, 2037	9,75% tetap/ fixed
FR 0050	15 Juli/ July 15, 2038	10,50% tetap/ fixed
FR 0054	15 Juli/ July 15, 2031	9,50% tetap/ fixed
FR 0057	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed
FR 0067	15 Februari/ February 15, 2044	8,75% tetap/ fixed
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034	8,38% tetap/ fixed
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25% tetap/ fixed
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38% tetap/ fixed
FR 0079	15 April/ April 15, 2039	8,38% tetap/ fixed
FR 0080	15 Juni/ June 15, 2035	7,50% tetap/ fixed
ORI 017	15 Juli/ July 15, 2023	6,40% tetap/ fixed
PBS 003	15 Januari/ January 15, 2027	6,00% tetap/ fixed
PBS 004	15 Januari/ January 15, 2037	6,10% tetap/ fixed
PBS 012	15 November/ November 15, 2031	8,88% tetap/ fixed
PBS 022	15 April/ April 15, 2034	8,63% tetap/ fixed

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

Description
<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
Fixed interest rate
FR 0058
FR 0059
FR 0061
FR 0062
FR 0071
FR 0073
FR 0077
FR 0078
FR 0081
FR 0082
FR 0084
FR 0085
FR 0086
FR 0087
ORI 016
PBS 002
PBS 014
PBS 017
PBS 026
FR 0045
FR 0050
FR 0054
FR 0057
FR 0067
FR 0068
FR 0072
FR 0076
FR 0079
FR 0080
ORI 017
PBS 003
PBS 004
PBS 012
PBS 022

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Tingkat bunga tetap PBS 025	15 Mei/ May 15, 2033	8,38% tetap/ fixed	Fixed interest rate PBS 025
PBS 028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75% tetap/ fixed	PBS 028
Zero Coupon Bonds SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various	Zero Coupon Bonds SPN
Obligasi Syariah Negara PBS 011	15 Agustus/ August 15, 2023	8,75% tetap/ fixed	Government Sharia Bonds PBS 011
PBS 027	15 Mei/ May 15, 2023	6,55% tetap/ fixed	PBS 027
PBS 014	15 Mei/ May 15, 2021	6,50% tetap/ fixed	PBS 014
PBS 003	15 Januari/ January 15, 2027	7,79% tetap/ fixed	PBS 003
PBS 019	15 September/ September 15, 2023	8,25% tetap/ fixed	PBS 019
PBS 021	15 November/ November 15, 2026	8,50% tetap/ fixed	PBS 021
PBS 022	15 April/ April 15, 2034	8,63% tetap/ fixed	PBS 022
PBS 025	15 Mei/ May 15, 2033	8,38% tetap/ fixed	PBS 025
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed	PBS 026
PBS 028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75% tetap/ fixed	PBS 028
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed	PBS 017
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap INDOIS 2028	01 Maret/ March 01, 2028	4,40% tetap/ fixed	Fixed interest rate INDOIS 2028
INDOIS 2021	29 Maret/ March 29, 2021	3,40% tetap/ fixed	INDOIS 2021
INDOIS 2022N	29 Maret/ March 29, 2022	3,40% tetap/ fixed	INDOIS 2022N
INDOIS 2023	01 Maret/ March 01, 2023	3,75% tetap/ fixed	INDOIS 2023
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024	4,35% tetap/ fixed	INDOIS 2024
INDOIS 2024N	20 Agustus/ August 20, 2024	3,90% tetap/ fixed	INDOIS 2024N
INDOIS 2025	28 Mei/ May 28, 2025	4,33% tetap/ fixed	INDOIS 2025
INDOIS 2025N	23 Juni/ June 23, 2025	2,30% tetap/ fixed	INDOIS 2025N
INDOIS 2026	29 Maret/ March 29, 2026	4,55% tetap/ fixed	INDOIS 2026
INDOIS 2027	29 Maret/ March 29, 2027	4,15% tetap/ fixed	INDOIS 2027
INDOIS 2029	20 Februari/ February 20, 2029	4,45% tetap/ fixed	INDOIS 2029
INDOIS 2030N	23 Juni/ June 23, 2030	2,80% tetap/ fixed	INDOIS 2030N
INDOIS 2050	23 Juni/ June 23, 2050	3,80% tetap/ fixed	INDOIS 2050

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Dolar Amerika Serikat (lanjutan)</u>			<u>United States Dollar (continued)</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDON 2023	15 April/ April 15, 2023	3,38% tetap/ fixed	INDON 2023
INDON 2025	15 Januari/ January 15, 2025	4,13% tetap/ fixed	INDON 2025
INDON 2028	11 Januari/ January 11, 2028	3,5% tetap/ fixed	INDON 2028
INDON 2029	11 Februari/ February 11, 2029	4,75% tetap/ fixed	INDON 2029
INDON 2030	14 Februari/ February 14, 2030	2,85% tetap/ fixed	INDON 2030
INDON 2042	17 Januari / January 17, 2042	5,25% tetap/ fixed	INDON 2042
INDON 2043	15 April / April 15, 2043	4,63% tetap/ fixed	INDON 2043
INDON 2048	11 Januari/ January 11, 2048	4,35% tetap/ fixed	INDON 2048
INDON 2026	8 Januari/ January 8, 2026	4,75% tetap/ fixed	INDON 2026
INDON 2027	8 Januari/ January 8, 2027	4,35% tetap/ fixed	INDON 2027
INDON 2027N	18 Juli/ July 18, 2027	3,85% tetap/ fixed	INDON 2027N
INDON 2028N	24 April/ April 24, 2028	4,10% tetap/ fixed	INDON 2028N
INDON 2029N	18 September/ September 18, 2029	3,40% tetap/ fixed	INDON 2029N
INDON 2030N	15 Oktober/ October 15, 2030	3,85% tetap/ fixed	INDON 2030N
INDON 2035	12 Oktober/ October 12, 2035	8,50% tetap/ fixed	INDON 2035
INDON 2037	17 Februari/ February 17, 2037	6,63% tetap/ fixed	INDON 2037
INDON 2038	17 Januari/ January 17, 2038	7,75% tetap/ fixed	INDON 2038
INDON 2044	15 Januari/ January 15, 2044	6,75% tetap/ fixed	INDON 2044
INDON 2045	15 Januari/ January 15, 2045	5,13% tetap/ fixed	INDON 2045
INDON 2046	8 Januari/ January 8, 2046	5,95% tetap/ fixed	INDON 2046
INDON 2047	8 Januari/ January 8, 2047	5,25% tetap/ fixed	INDON 2047
INDON 2047N	18 Juli/ July 18, 2047	4,75% tetap/ fixed	INDON 2047N
INDON 2049	11 Februari/ February 11, 2049	5,35% tetap/ fixed	INDON 2049
INDON 2049N	30 Oktober/ October 30, 2049	3,70% tetap/ fixed	INDON 2049N
INDON 2050	14 Februari/ February 14, 2050	3,50% tetap/ fixed	INDON 2050
INDON 2050N	15 Oktober / October 15, 2050	4,20% tetap/ fixed	INDON 2050N
USD FR 0002	24 Juni / June 24, 2026	4,05% tetap/ fixed	USD FR 0002

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Diukur pada biaya</u> <u>perolehan amortisasi</u> <u>Rupiah</u>			<u>Amortized cost</u> <u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0031	15 November/ November 15, 2020	11,00% tetap/ fixed	FR 0031
FR 0034	15 Juni / June 15, 2021	12,80% tetap/ fixed	FR 0034
FR 0043	15 Juli/ July 15, 2022	10,25% tetap/ fixed	FR 0043
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	10,25% tetap/ fixed	FR 0042
FR 0053	15 Juli/ July 15, 2021	8,25% tetap/ fixed	FR 0053
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed	FR 0063
PBS 016	15 Maret/ March 15, 2020	6,25% tetap/ fixed	PBS 016
Tingkat Bunga Mengambang			Floating Interest Rate
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020	SPN 3 bulan/ months	VR 0031
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2021	3,85% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2021	3,84% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Januari/ January 13, 2021	3,85% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	20 Januari/ January 20, 2021	3,84% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	26 Januari/ January 26, 2021	3,83% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Februari/ February 3, 2021	3,82% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 Februari/ February 10, 2021	3,82% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	17 Februari/ February 17, 2021	3,82% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Maret/ March 3, 2021	3,57% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2021	3,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	9 Maret/ March 9, 2021	3,57% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Januari/ January 5, 2021	3,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	17 Maret/ March 17, 2021	3,57% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Januari/ January 13, 2021	3,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2021	3,52% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	20 Januari/ January 20, 2021	3,54% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	24 Maret/ March 24, 2021	3,56% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2021	3,75% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Januari/ January 13, 2021	3,52% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	27 Januari/ January 27, 2021	3,54% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	31 Maret/ March 31, 2021	3,56% tetap/ fixed	Sukuk BI

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
<u>Diukur pada biaya</u> <u>perolehan amortisasi (lanjutan)</u> <u>Dolar Amerika Serikat (continued)</u>	
Tingkat bunga tetap INDOIS 2021	29 Maret/ March 29, 2021
INDOIS 2022N	29 Maret/ March 29, 2022
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024
INDOIS 2024N	20 Agustus/ August 20, 2024
INDON 2021	5 Mei/ May 5, 2021
INDON 2022	25 April/ April 25, 2022
INDON 2022N	8 Januari/ January 8, 2022
INDON 2023N	17 Oktober/ October 17, 2023

Suku Bunga/ Interest Rate	Description
	<u>Amortized cost (continued)</u> <u>United States Dollar (continued)</u>
3,40% tetap/ fixed	Fixed interest rate INDOIS 2021N
3,40% tetap/ fixed	INDOIS 2022N
4,35% tetap/ fixed	INDOIS 2024
3,90% tetap/ fixed	INDOIS 2024N
4,88% tetap/ fixed	INDON 2021
3,75% tetap/ fixed	INDON 2022
3,75% tetap/ fixed	INDON 2022N
5,38% tetap/ fixed	INDON 2023N

Obligasi pemerintah (tersedia untuk dijual) sejumlah Rp1.075.000 pada tanggal 31 Desember 2019, telah dijual dengan janji dibeli kembali.

As of December 31, 2019, government bonds (available for sale) with nominal amount of Rp1,075,000, respectively, were sold under repurchase agreements.

Pembayaran kupon obligasi pemerintah dengan tingkat bunga tetap dan mengambang masing-masing dibayarkan tiap semester dan triwulanan.

Coupon payments of government bonds with fixed and floating interest rates are payable semi-annually and quarterly, respectively.

Obligasi pemerintah syariah seri ORI, PBS dan seri SR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

SR series and ORI series sharia government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (2019: tersedia untuk dijual) berkisar dari 86,00% sampai dengan 164,00% dan 83,84% sampai dengan 129,05% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income ranging (2019: available for sale) from 86.00% to 164.00% and 83.84% to 129.05% of nominal amounts as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively.

Keuntungan dan Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (2019: tersedia untuk dijual) (setelah pajak tangguhan) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.022.940 dan Rp4.201, yang disajikan dalam akun "Kerugian neto yang belum direalisasi atas obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

As of December 31, 2020 and 2019, the unrealized gain or loss due to the decrease in the fair value of fair value through other comprehensive income (2019: available-for-sale) government bonds (after deferred tax) amounted to Rp1,022,940 and Rp4,201, respectively, which are presented as "Net-unrealized losses on available-for-sale government bonds net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

- c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Mutasi keuntungan/(kerugian) obligasi pemerintah yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (2019: tersedia untuk dijual) yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal tahun	(4.201)
Laba yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	1.288.472
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	(20.397)
Efek pajak	(240.934)
Saldo akhir tahun	1.022.940

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp308.351 dan Rp144.553, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar Rp87.011 dan Rp1.745 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko Bank, manajemen telah memitigasi risiko dari dampak fluktuasi harga pasar terhadap obligasi yang dimiliki dengan melakukan investasi dalam reksadana terproteksi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang mempunyai *underlying* obligasi pemerintah seri FR63. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank merupakan satu-satunya pihak yang memegang unit reksadana tersebut.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

- c. Based on maturity and interest rate (continued)

Movements in unrealized gain/(loss) on fair value through other comprehensive income ranging (2019: available for sale) government bonds are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal tahun	(109.902)	Balance at beginning of year
Laba yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	121.135	Unrealized gain recognized in equity
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	11.198	Amount realized to profit or loss
Efek pajak	(26.632)	Tax effect
Saldo akhir tahun	(4.201)	Balance at end of year

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp308,351 and Rp144,553 for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of government bonds - net".

The Bank recognized unrealized gain and loss-net from the change in fair value of government bonds classified as at fair value through profit or loss amounting to Rp87,011 and Rp1,745 for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively, which is presented in the statement of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain (loss) from change in fair value of government bonds - net".

As part of the Bank's risk management, the management has mitigated the risk of market price fluctuation in relation with the bonds owned by investing in protected mutual fund which is held to maturity and has underlying of government bonds series FR63. As of December 31, 2020 and 2019, the Bank is the only party who holds the mutual fund unit.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

10. SECURITIES PURCHASED UNDER
AGREEMENT TO RESELL

Securities purchased under agreement to resell consist of:

31 Desember/December 31, 2020

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Penjualan Kembali/ Resell Date	Harga Pen- jualan Kembali/ Resell Price	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak Ketiga/Third Party								
Bank Indonesia	VR0050	3,75%	172.959	28 Desember / December 28, 2020	4 Januari / January 4, 2021	165.575	86	165.489
Bank Indonesia	VR0054	3,75%	827.041	28 Desember / December 28, 2020	4 Januari / January 4, 2021	789.877	411	789.466
Total Pihak Ketiga/Third Party			1.000.000			955.452	497	954.955

31 Desember/December 31, 2019

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Penjualan Kembali/ Resell Date	Harga Pen- jualan Kembali/ Resell Price	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak Ketiga/Third Parties								
Bank Indonesia	SPN12200313	5,00%	98.761	26 Desember/ December 26, 2019	2 Januari/ January 2, 2020	92.932	14	92.918
Bank Indonesia	SPN12200410	5,00%	901.239	26 Desember/ December 26, 2019	2 Januari/ January 2, 2020	844.380	117	844.263
Bank Indonesia	SPN12200703	5,00%	400.000	27 Desember/ December 27, 2019	3 Januari/ January 3, 2020	370.348	103	370.245
Bank Indonesia	SPN12200703	5,00%	400.000	27 Desember/ December 27, 2019	3 Januari/ January 3, 2020	367.897	102	367.795
Total Pihak Ketiga/Total Third Parties			1.800.000			1.675.557	336	1.675.221
Pihak Berelasi/Related Parties								
Asuransi Jiwasraya	WSKT02ACN3	5,75%	200.000	6 September/ September 6, 2019	21 Februari/ February 21, 2020	89.888	-	89.888
Asuransi Jiwasraya	WSKT02ACN2	5,75%	195.000	6 September/ September 6, 2019	28 September/ September 28, 2021	87.640	-	87.640
Asuransi Jiwasraya	WSKT03ACN1	5,75%	25.000	6 September/ September 6, 2019	6 Oktober/ October 6, 2020	11.236	-	11.236
Asuransi Jiwasraya	SMII01BCN1	5,75%	20.000	6 September/ September 6, 2019	18 November/ November 18, 2021	8.989	-	8.989
Asuransi Jiwasraya	PTPP01CN2	5,75%	5.000	6 September/ September 6, 2019	24 Februari/ February 24, 2020	2.247	-	2.247
Total Pihak Berelasi/Related Parties			445.000			200.000	-	200.000
Total			2.245.000			1.875.557	336	1.875.221

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Berikut adalah perubahan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020:

10. SECURITIES PURCHASED UNDER
AGREEMENT TO RESELL (continued)

Presented below is the movements in securities purchased under agreement to resell for the year ended December 31, 2020:

31 Desember/December 31, 2020						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo 1 Januari	1.875.221	-	-	-	1.875.221	Balance at January 1
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(497)	-	-	-	(497)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	955.452	-	-	-	955.452	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.875.221)	-	-	-	(1.875.221)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(920.266)	-	-	-	(920.266)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	954.955	-	-	-	954.955	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

31 Desember/December 31, 2020						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo 1 Januari	-	-	-	-	-	Balance at January 1
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 54)	9.318	-	-	-	9.318	Impact of initial adoption of SFAS 71 (note 54)
Saldo awal PSAK 71	9.318	-	-	-	9.318	Beginning Balance SFAS 71
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	-	-	-	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.318)	-	-	-	(9.318)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(9.318)	-	-	-	(9.318)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	-	-	-	-	-	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Konvensional</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	178.954.141	172.701.455
Non-kepemilikan rumah	9.709.253	10.177.545
	188.663.394	182.879.000
Modal kerja	33.481.738	36.734.973
Investasi	10.628.354	10.378.286
Sindikasi	69.250	70.925
Direksi dan karyawan		
- Pihak ketiga	2.100.278	2.046.347
- Pihak yang berelasi	109.102	103.008
	235.052.116	232.212.539
<u>Syariah</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	22.023.460	19.490.225
Non-kepemilikan rumah	132.724	184.235
	22.156.184	19.674.460
Modal kerja	2.634.957	3.609.382
Investasi	267.865	325.362
Direksi dan karyawan		
- Pihak yang berelasi	3.041	3.416
	25.062.047	23.612.620
Total	260.114.163	255.825.159
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(13.060.943)	(6.116.166)
Neto	247.053.220	249.708.993

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

<u>Conventional</u>
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Syndicated
Directors and employees
Third parties -
Related parties -
<u>Sharia</u>
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees
Related parties -
Total
Less allowance
for impairment losses
Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	209.267.534	210.201.524	Property
Konstruksi	12.122.384	7.429.315	Construction
Jasa usaha	5.272.536	4.920.595	Business service
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4.373.070	4.421.513	Transportation, warehousing, and communication
Listrik, gas dan air	1.557.812	1.568.016	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial	1.083.095	1.997.275	Social service
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.050.582	1.196.227	Trading, restaurant and hotel
Manufaktur	89.150	107.752	Manufacturing
Pertambangan	29.332	51.066	Mining
Pertanian	14.805	28.237	Farming
Lain-lain ^{*)}	191.816	291.019	Other ^{*)}
	235.052.116	232.212.539	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	22.025.323	19.492.212	Property
Konstruksi	1.993.133	2.631.595	Construction
Jasa usaha	1.043.591	1.488.813	Business service
	25.062.047	23.612.620	
Total	260.114.163	255.825.159	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(13.060.943)	(6.116.166)	Less allowance for impairment losses
Neto	247.053.220	249.708.993	Net

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
<u>Konvensional</u>					<u>Conventional</u>
Individual					Individual
Lancar	4.959.310	1.808.044	4.513.426	528.435	Current
Dalam perhatian khusus	2.563.977	2.058.744	2.283.433	721.262	Special mention
Kurang lancar	300.290	188.299	2.154.485	476.092	Substandard
Diragukan	98.188	90.863	677.954	387.446	Doubtful
Macet	3.479.671	2.775.029	2.169.877	1.865.237	Loss
	11.401.436	6.920.979	11.799.175	3.978.472	
Kolektif					Collective
Lancar	203.832.728	2.092.455	192.882.717	8.910	Current
Dalam perhatian khusus	13.977.192	697.541	22.087.063	4.772	Special mention
Kurang lancar	227.027	80.617	413.344	2.639	Substandard
Diragukan	201.788	77.549	545.383	10.048	Doubtful
Macet	5.411.945	2.282.795	4.484.857	1.421.067	Loss
	223.650.680	5.230.957	220.413.364	1.447.436	
<u>Syariah</u>					<u>Sharia</u>
Lancar	21.664.010	392.167	19.948.272	182.314	Current
Dalam perhatian khusus	1.761.613	31.585	1.880.014	7.044	Special mention
Kurang lancar	210.625	37.079	519.838	31.293	Substandard
Diragukan	281.887	44.466	172.291	11.876	Doubtful
Macet	1.143.912	403.710	1.092.205	457.731	Loss
	25.062.047	909.007	23.612.620	690.258	
Total	260.114.163	13.060.943	255.825.159	6.116.166	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	7.582	7.747	Housing Loan
Non-kepemilikan rumah	115.112	108.308	Non-housing loan
	122.694	116.055	
Modal Kerja	10.627.971	11.186.598	Working capital
Investasi	6.520.924	6.031.698	Investment
Sindikasi	69.250	70.925	Syndicated
	17.340.839	17.405.276	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	1.860	1.987	Housing Loan
Non- kepemilikan rumah	1.180	1.429	Non-housing loan
	3.040	3.416	
Total	17.343.879	17.408.692	Total

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	2.212.608	3.480.210	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.005.553	2.311.365	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	11.683.642	14.380.583	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	219.150.313	212.040.381	> 5 years
	235.052.116	232.212.539	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	7.386	38.263	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	551.568	1.183.015	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.015.261	2.387.298	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	22.487.832	20.004.044	> 5 years
	25.062.047	23.612.620	
Total	260.114.163	255.825.159	Total
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.060.943)	(6.116.166)	Less allowance for impairment losses
Neto	247.053.220	249.708.993	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	11.916.218	13.975.881	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	8.483.347	8.437.350	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	24.904.706	25.420.228	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	189.747.845	184.379.080	> 5 years
	235.052.116	232.212.539	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	1.822.500	2.286.349	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	735.066	1.017.290	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.431.887	1.685.096	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	21.072.594	18.623.885	> 5 years
	25.062.047	23.612.620	
Total	260.114.163	255.825.159	Total
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.060.943)	(6.116.166)	Less Allowance for impairment losses
Neto	247.053.220	249.708.993	Net

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

- i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Piutang <i>Murabahah</i>	17.645.732	17.432.498	<i>Murabahah receivables</i>
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	4.874.861	3.702.276	<i>Musyarakah financing</i>
Piutang <i>Istishna</i>	2.292.711	2.028.282	<i>Istishna receivables</i>
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	233.654	418.625	<i>Mudharabah financing</i>
Pinjaman <i>Qardh</i>	15.089	30.939	<i>Funds of Qardh</i>
Total	25.062.047	23.612.620	Total
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(909.007)	(690.258)	Less Allowance for impairment losses
Neto	24.153.040	22.922.362	Net

- ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumen sebesar 10,84% dan 11,30% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 9,25% dan 9,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

- ii. Average annual interest rates for consumer loans are 10.84% and 11.30% for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 9.25% and 9.75% for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- iii. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 19, 20 dan 21).

- iii. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 19, 20 and 21).

- iv. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 31 tanggal 15 Oktober 2019 dan Akta Cessie No. 49 tanggal 27 November 2019.

- iv. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 31 dated October 15, 2019 and Deed of Cessie No. 49 dated November 27, 2019.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari 16.476 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (8 Oktober 2019). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp2,000,000 which consists of 16,476 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (October 8, 2019). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

- v. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 63 tanggal 30 November 2020 dan Akta Cessie No. 79 tanggal 30 Desember 2020.

- v. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 63 dated November 30, 2020 and Deed of Cessie No. 79 dated December 30, 2020.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp72.696 yang terdiri dari 7.721 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (17 November 2020). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp72,696 which consists of 7,721 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (November 17, 2020). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- vi. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 5,92% dan 3,17%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini akan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain - lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp497.968 dan Rp288.899 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 17).
- vii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.343.879 dan Rp17.408.692 (Catatan 45). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 6,67% dan 6,80%.
- viii. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

- vi. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 5.92% and 3.17%, for year ended December 31, 2020 and 2019, with term ranging from 1 to 15 years. This loan will be repaid through employee deduction salary. Difference between employee loan's interest rates and *Base Lending Rate* (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp497,968 and Rp288,899 as of December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 17).
- vii. As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp17,343,879 and Rp17,408,692, respectively (Note 45). As of December 31, 2020 and 2019, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 6.67% and 6.80%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.
- viii. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal tahun	6.116.166	3.298.132	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No.71 (Catatan 54)	7.612.677	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK 71 (Notes 54)
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 35)	2.240.040	3.479.546	Provision for impairment losses during the year (Note 35)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	46.580	40.598	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(2.954.520)	(702.110)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	13.060.943	6.116.166	Balance at the end of year

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- ix. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut (lanjutan):

- ix. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows (continued):

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp909.007 dan Rp690.258, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/ receivables amounting to Rp909,007 and Rp690,258, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

- x. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (credit limit) dan kebijakan penyaluran kredit yang beragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.
- xi. Dalam laporan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

- x. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.
- xi. Based on the report submitted by the Bank to Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2020 and 2019, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xii. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode gross dan net) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

xii. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

Kolektibilitas	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Kurang Lancar	527.317	210.625	2.567.829	519.838	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	299.976	281.887	1.223.337	172.291	
Macet	8.891.616	1.143.912	6.654.734	1.092.205	
	9.718.909	1.636.424	10.445.900	1.784.334	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(5.495.152)	(485.255)	(4.162.529)	(500.900)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	4.223.757	1.151.169	6.283.371	1.283.434	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	235.052.116	25.062.047	232.212.539	23.612.620	Loans and sharia financing/ receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Gross (Gross NPL/NPF)	4,13%	6,53%	4,50%	7,56%	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Neto (Neto NPL/NPF)	1,79%	4,59%	2,71%	5,44%	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

Rasio NPL/NPF Gross (total konvensional dan syariah) adalah 4,37% dan 4,78% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 4.37% and 4.78% as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 2,06% dan 2,96% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 2.06% and 2.96% as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xiii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/
 piutang syariah *non-performing*
 berdasarkan sektor ekonomi:

xiii. Non-performing loans and sharia
 financing/receivables by economic
 sectors:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	8.385.408	8.970.472	Property
Perdagangan, restoran dan hotel	513.556	496.253	Trading, restaurant and hotel
Konstruksi	507.554	503.378	Construction
Jasa Usaha	140.424	168.672	Business service
Manufaktur	31.123	59.378	Manufacturing
Jasa-jasa sosial	74.144	80.955	Social service
Pertanian	4.410	19.979	Farming
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	23.629	38.482	Transportation, warehousing, and communication
Pertambangan	22.324	33.114	Mining
Listrik, gas dan air	4.410	10.747	Electricity, gas and water
Lain-lain ^{*)}	11.927	64.470	Other ^{*)}
	9.718.909	10.445.900	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	217.510	208.256	Property
Jasa usaha	516.005	619.879	Business service
Konstruksi	902.909	956.199	Construction
	1.636.424	1.784.334	
Total	11.355.333	12.230.234	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.980.407)	(4.663.429)	Less allowance for impairment losses
Neto	5.374.926	7.566.805	Net

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

xiv. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap
 total kredit adalah sebesar 0,33% dan
 0,45% masing-masing pada tanggal
 31 Desember 2020 dan 2019.

xiv. The ratio of small-scale enterprise loans to
 total loans is 0.33% and 0.45% as of
 December 31, 2020 and 2019,
 respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xv. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 7,03% dan 7,03% (tidak diaudit) dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

xv. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2020 and 2019, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 7.03% and 7.03% (unaudited) for each, respectively, of the total syndicated loans.

xvi. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

xvi. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/December 31, 2020

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	51.649.651	6.320.953	446.526	100.596	4.562.849	63.080.575	Property
Konstruksi	5.115.032	400.738	98.212	200.058	416.051	6.230.091	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	161.559	141.540	-	79	429.421	732.599	Trading, restaurant and hotel
Jasa usaha	1.844.785	102.115	14.422	13.956	169.605	2.144.883	Business service
Listrik, gas dan air	1.848	2.900	-	-	-	4.748	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial	64.030	45.892	3.480	768	36.601	150.771	Social services
Manufaktur	5.362	214	-	46	25.224	30.846	Manufacturing
Pertambangan	2.000	-	-	-	18.097	20.097	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	211.604	-	-	-	17.672	229.276	Transportation, warehousing and communication
Pertanian	546	34	-	-	552	1.132	Farming
Lain-lain ^{*)}	13.284	22.016	136	3	3.872	39.311	Other ^{*)}
Total	59.069.701	7.036.402	562.776	315.506	5.679.944	72.664.329	Total

31 Desember/December 31, 2019

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	8.510.874	10.075.429	1.372.947	757.929	2.565.026	23.282.205	Property
Konstruksi	958.367	310.536	296.855	72.980	380.382	2.019.120	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	35.519	294.772	226.666	53.591	101.124	711.672	Trading, restaurant and hotel
Jasa usaha	329.073	71.600	34.170	9.662	225.054	669.559	Business service
Listrik, gas dan air	5.089	-	-	-	2.381	7.470	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial	46.518	19.897	-	2.255	32.687	101.357	Social services
Manufaktur	2.575	2.937	-	636	24.994	31.142	Manufacturing
Pertambangan	6.849	7.176	9.569	-	5.851	29.445	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	15.187	-	2.983	26.118	44.288	Transportation, warehousing and communication
Pertanian	-	-	-	-	543	543	Farming
Lain-lain ^{*)}	13.090	5.706	494	28	4.966	24.284	Other ^{*)}
Total	9.907.954	10.803.240	1.940.701	900.064	3.369.126	26.921.085	Total

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xvi. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

- xvi. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector: (continued)

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, novasi dan lain-lain.

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, overdue interest exemption, reduction of interest rates, additional loan facilities, novation and others.

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 tertanggal 13 Maret 2020. Per tanggal 31 Desember 2020 total saldo kredit restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp59.015.855.

Bank has restructured its credit for debtors affected by Covid-19 pandemic in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020 "National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019 dated March 13, 2020. As of December 31, 2020 the balance of Covid-19 restructured loans amounted to Rp59,015,855.

Dalam menerapkan kolektibilitas kredit dan pembiayaan/piutang syariah, Bank telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam terhadap debitur-debitur yang terkena dampak bencana alam.

In determining collectability for loans and sharia financing/receivables, the Bank has implemented the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Special Treatment of Bank Credit or Financing for Certain Areas in Indonesia Affected by Natural Disasters for debtors affected by disaster's natural.

- xvii. Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

- xvii. The loans written-off by the Bank are recorded as extra-comptable in the administrative account.

- xviii. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp8.214.653 dan Rp7.400.201, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

- xviii. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Financial Service Authority amounted to Rp8,214,653 and Rp7,400,201 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xix. Selama tahun 2020, Bank berpartisipasi dalam penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") sesuai dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 6 Agustus 2020 serta PMK No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020. Penyaluran kredit PEN ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia dan Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia.

- xix. During 2020, Bank participated in granting loan to support Government for National Economic Recovery Program "PEN" based on PMK No. 104/PMK.05/2020 dated August 6, 2020 and PMK No. 71/PMK.08/2020 dated June 23, 2020. The loan is guaranteed by Government through PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia and Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia.

Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dalam bentuk deposito sebesar Rp5.000.000. Penempatan dana Pemerintah tahap I tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp16.350.366 juta.

In order to accelerate National Economic Recovery Program, based on Ministry of Finance Regulation Number 70/PMK.05/2020, Government place their funds in Banks, which PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. is one of the banks, in time deposit amounted to Rp5,000,000. The Government Fund phase I has been distributed in form of loan amounted to Rp16,350,366 million.

Pemerintah kemudian melakukan penempatan dana Pemerintah Tahap II dalam bentuk deposito sebesar Rp10.000.000 yang telah disalurkan dalam bentuk kredit akumulatif sebesar Rp34.133.984 juta sampai dengan tanggal jatuh tempo deposito pada 13 Januari 2021. Penempatan Dana Pemerintah Tahap II tersebut telah berakhir dan telah dikembalikan kepada Pemerintah pada tanggal 13 Januari 2021.

The Government then renewed their placement phase II in form of time deposit amounted to Rp10,000,000 and the funds has been distributed in form of loan with accumulative amounted to Rp34,133,984 until maturity date of time deposit on January 13, 2021. Governments placement phase II has ended and the fund returned to Government on January 13, 2021.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga KPR sesuai dengan PMK No. 138/PMK.05/2020 tanggal 25 September 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Bank telah menerima subsidi Bunga dari pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp578 juta dan untuk debitur KPR sebesar Rp2.175.276 juta.

Bank also participated in channelling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise debtor and for mortgages debtors based on PMK No. 138/PMK.05/2020 dated September 25, 2020 and Permenko No. 16 dated August 24, 2020. Until December 31, 2020, Bank has received interest subsidies from government to be distributed for SME and mortgage's debtors amounted to Rp578million and Rp2.175.276 million, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo 1 Januari	201.153.803	12.501.648	18.557.088	23.612.620	255.825.159	Balance at January 1
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	2.188.705	(1.446.570)	(742.135)	-	-	Stage 1
Stage 2	(20.634.454)	21.018.210	(383.756)	-	-	Stage 2
Stage 3	(1.421.417)	(1.870.607)	3.292.024	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	181.286.637	30.202.681	20.723.221	23.612.620	255.825.159	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(10.204.646)	(715.418)	(272.409)	(1.734.404)	(12.926.877)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	28.633.381	200.095	9.338	4.226.846	33.069.660	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(11.432.936)	(313.461)	(377.405)	(775.457)	(12.899.259)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(61.239)	(95.698)	(2.530.025)	(267.558)	(2.954.520)	Written-off financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	6.934.560	(924.482)	(3.170.501)	1.449.427	4.289.004	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	188.221.197	29.278.199	17.552.720	25.062.047	260.114.163	Balance at end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

^{*)} Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo 1 Januari	178.276	119.694	5.127.938	690.258	6.116.166	Balance at January 1
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 54)	1.211.601	1.052.656	5.348.420	-	7.612.677	Impact of initial adoption of SFAS 71 (note 54)
Saldo awal PSAK 71	1.389.877	1.172.350	10.476.358	690.258	13.728.843	Beginning Balance SFAS 71
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	394.956	(115.226)	(279.730)	-	-	Stage 1
Stage 2	(221.265)	405.590	(184.325)	-	-	Stage 2
Stage 3	(30.294)	(269.854)	300.148	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	1.533.274	1.192.860	10.312.451	690.258	13.728.843	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(492.631)	493.392	1.943.550	356.957	2.301.268	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	143.106	6.981	3.713	175.250	329.050	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(74.280)	(31.508)	(192.010)	(45.900)	(343.698)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(61.239)	(95.698)	(2.530.025)	(267.558)	(2.954.520)	Written-off financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(485.044)	373.167	(774.772)	218.749	(667.900)	Total Additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	1.048.230	1.566.027	9.537.679	909.007	13.060.943	Balance at end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

^{*)} Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 48.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality of financial assets are disclosed in Note 48.

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

Bank BTN menerapkan akuntansi lindung nilai atas arus kas dengan tujuan untuk melindungi suatu instrumen atau kelompok instrumen dari eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan mata uang asing) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi laba rugi.

Bank BTN implemented hedge accounting of the cash flow with purposed to protect an instrument from exposure of cashflow variability that can be attributed at certain risk that related to acknowledge assets or liabilities (such as all or partial of future interest payment on foreign currency debt) or which can be attributed to certain risk that are most likely to occur and can affect profit or loss.

Pada tanggal 24 Januari 2020 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 Juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar USD 150 Juta (nilai penuh)

On January 24, 2020, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of Subordinated Bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 150 million (full amount)

Perubahan nilai wajar dari kontrak CCS sebagai instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus) diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Setiap sisa keuntungan/kerugian atas instrumen lindung nilai (yaitu ketidakefektifan) lindung nilai yang diakui dalam laba rugi.

The changes of fair value of CCS contract as a hedging instrument that is designated as an effective hedge (that is, a part of set off) are recognized in other comprehensive income. The remaining gains/losses on the hedging instrument (ie ineffectiveness) of the hedge, recognized in profit/loss.

Sejak diterapkannya akuntansi lindung nilai arus kas tersebut, manajemen telah memiliki dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai dan juga tujuan manajemen risikonya serta strategi dalam melakukan berbagai transaksi lindung nilai.

Since the implemention of the cashflow hedge accounting, management has documented the relationship between hedging instruments and hedged items as well as the objectives of risk management and strategies for engaging various hedging transaction.

Dokumentasi juga meliputi penilaian efektivitas lindung nilai dari derivatif yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Penilaian ini dilakukan baik pada permulaan lindung nilai tersebut diterapkan dan pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan.

The documentation also includes assessing the effectiveness of hedge from derivative that used as hedging instrument and hedged items. This assessment is carried out both at the beginning of the hedging applied and at later on an ongoing basis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

2020

Tanggal Transaksi/ Transaction Date	Pihak ketiga/ Third Parties	Nosional/ Notional	Suku bunga yang dibayarkan/ Interest Paid	Suku bunga yang diterima/ Interest Receivable	Jatuh tempo/ Maturity Date
27 Januari/ January 27, 2020	PT. Bank ANZ Indonesia	40.000.000	7,65%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2021
27 Januari/ January 27, 2020	PT Bank HSBC Indonesia	35.000.000	7,65%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2021
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	5.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	20.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan keuntungan (kerugian) selisih kurs atas obligasi subordinasi dalam mata uang asing dicatat pada pendapatan komprehensif lain sebesar (Rp1.239) per 31 Desember 2020. Saldo kerugian tersebut disajikan sebagai "Bagian efektif lindung nilai arus kas" pada ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and gain (loss) on foreign exchange of subordinated bonds denominated in foreign currency were reported as other comprehensive income amounting to (Rp1,239) as of December 31, 2020. The amount is presented as "Effective portion of cashflow hedge" in equity as of December 31, 2020.

13. TAGIHAN AKSEPTASI

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

The details of acceptances receivable from customers are as follows:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

a. By Type and Currency

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Surat Kredit Berdokumen			Domestic Document
Dalam Negeri (SKBDN)	196.071	487.052	Letter of Credit
Total	196.071	487.052	Total
Cadangan kerugian			Allowance for
Penurunan nilai (PSAK 71)	(1.393)	-	impairment losses (SFAS 71)
Total	194.678	487.052	Total

b. Berdasarkan Kolektibilitas

b. By Collectibility

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

All acceptances receivable were classified as current as of December 31, 2020 and 2019.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

c. Berdasarkan Jangka Waktu

c. By Period

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
≤ 1 bulan	433	142.780	≤ 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	31.778	65.159	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 1 tahun	163.860	279.113	> 3 months - 1 year
Total	196.071	487.052	Total

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

The Bank assessed acceptance receivables individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Tagihan akseptasi						Acceptances Receivable
Saldo 1 Januari	487.052	-	-	-	487.052	Balance at January 1
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-	-	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	196.071	-	-	-	196.071	New financial assets originated or purchased
Pembayaran kembali	(487.052)	-	-	-	(487.052)	Repayment
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(290.981)	-	-	-	(290.981)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	196.071	-	-	-	196.071	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo 1 Januari	-	-	-	-	-	Balance at January 1
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 54)	1.346	-	-	-	1.346	Impact of initial adoption of SFAS 71 (note 54)
Saldo awal PSAK 71	1.346	-	-	-	1.346	Beginning Balance SFAS 71
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	-	-	-	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.393	-	-	-	1.393	New financial assets originated or purchased
Pembayaran kembali	(1.346)	-	-	-	(1.346)	Repayment
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	47	-	-	-	47	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	1.393	-	-	-	1.393	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

14. INVESTMENT IN SHARES

The details of investment in shares are as follows:

31 Desember/December 31, 2019				
Nama Perusahaan	Jenis usaha/ Type of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat/ Carrying value	Company name
	Jasa pelayaran angkutan laut/ Marine transportation service			
PT Berlian Laju Tanker Tbk		0,01%	270	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Cadangan kerugian penurunan nilai			(270)	Allowances for impairment losses
Neto			-	Net

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
 penyertaan saham adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment
 losses on investment in shares are as follows:

31 Desember/ December 31, 2019		
Saldo awal	270	Beginning balance
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	-	Provision for impairment losses during the year
Total	270	Total

Bank melakukan hapus buku terhadap nilai
 penyertaan saham di PT Berlian Laju Tanker Tbk di
 tahun 2020.

The Bank written-off balance of investment in
 shares of PT Berlian Laju Tanker Tbk in 2020.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan
 kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham
 yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for
 impairment losses provided on investment in shares
 is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang
 mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami
 penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 48.

Information with respect to classification of impaired
 and not impaired of financial assets are disclosed in
 Note 48.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

15. PREMISES AND EQUIPMENT

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>				<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.970.392	12.254	(12.254)	3.970.392
Bangunan	1.507.887	85.500	(231)	1.593.156
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.545.081	652.651	(305.756)	2.891.976
	8.023.360	750.405	(318.241)	8.455.524
Aset dalam penyelesaian	84.726	54.648	(82.712)	56.662
Aset hak guna	8.108.086	805.053	(400.953)	8.512.186
	465.251	75.745	-	540.996
	8.573.337	880.798	(400.953)	9.053.182
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	637.124	76.120	(1.458)	711.786
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.070.304	272.217	-	2.342.521
	2.707.428	348.337	(1.458)	3.054.307
Aset hak guna	-	180.430	-	180.430
	2.707.428	528.767	(1.458)	3.234.737
Nilai Buku Neto	5.865.909			5.818.445
				Net Book Value

31 Desember/December 31, 2019				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi ^{*)} / Additions/ Reclassifications ^{*)}	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>				<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.628.606	341.786	-	3.970.392
Bangunan	1.498.583	9.307	(3)	1.507.887
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.265.131	284.679	(4.729)	2.545.081
	7.392.320	635.772	(4.732)	8.023.360
Aset dalam penyelesaian	19.206	65.824	(304)	84.726
	7.411.526	701.596	(5.036)	8.108.086
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	565.012	72.293	(181)	637.124
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.828.820	241.940	(456)	2.070.304
	2.393.832	314.233	(637)	2.707.428
Nilai Buku Neto	5.017.694			5.400.658
				Net Book Value

*) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi atas tanah sebesar Rp334.731 yang dibukukan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2019.

*) Included in additions of premises and equipment is gain on revaluation of land amounting to Rp334,731, recorded by Bank on December 31, 2019.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp348.337 dan Rp314.233 (Catatan 36).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp1.720.720 dan Rp1.551.685 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.224.774 dan Rp 4.451.320.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 8,98% dan 24,38%.

Penilaian atas tanah di tahun 2016 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan melalui laporannya pada tanggal 19 April 2016. Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki di tahun 2019 yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan dengan laporan tertanggal 22 Oktober 2019. Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation of premises and equipment and right of use asset charged to operations amounted to Rp348,337 and Rp314,233, for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 36).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp1,720,720 and Rp1,551,685 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Landrights consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

The Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 4,224,774 and Rp 4,451,320, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2020 and 2019, is 8.98% and 24.38%, respectively.

The valuations of land in 2016 were performed by an external independent appraiser KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan through its report dated April 19, 2016. The bank revalued its land in 2019 which was done by an external independent appraiser KJPP Agus, Ali, Firdaus and Partners with its report dated October 22, 2019. Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards, and regulation No. VIII.C.4 concerning the guidance on valuation and presentation for the appraisal report on the capital market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank tahun 2016 dan 2019 adalah sebagai berikut:

15. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Information on the revaluation of land performed by the Bank are as follows:

31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	3.635.660	3.970.391	334.731	Land
31 Desember/December 31, 2016				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	Land

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2019, menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp334.731 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp341.000 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp6.269. Sedangkan kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2016 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Pada tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penilaian kembali tanah pada tahun 2016 adalah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016. Jumlah pajak yang telah dibayar oleh Bank sehubungan penilaian kembali tersebut adalah sebesar Rp75.748.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp608.176 dan Rp595.922.

Nilai wajar atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 3.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki Bank yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The revaluation of land in 2019, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp334,731 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp341,000 and a decrease in carrying amount of land recognised in the current year expenses amounting to Rp6,269. However, Increase in the carrying amount arising from revaluation in 2016 is recorded in "Fixed Asset Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounting to Rp3,042,739.

In 2019, Bank has revalued the value of that land not for tax purpose rather for the accounting purpose according to the Financial Accounting Standard.

Revaluation of land in 2016, for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016. The amount of tax which has been paid by the Bank in relation with the revaluation was amounting to Rp75,748.

If land is recorded at historical cost basis, the amount as of December 31, 2020 and 2019, would be Rp608,176 and Rp595,922.

The fair value of land included in the fair value hierarchy as level 3.

As of December 31, 2020 and 2019, there are no fixed assets owned by the Bank which are pledged as collateral.

Management believes that there is no impairment in value of premises and equipments and the amount of insurance coverage is adequate to cover the risk of loss that may arise on the premises and equipments as of December 31, 2020 and 2019.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Bank menyewa beberapa aset termasuk bangunan, rumah dinas, lahan ATM, kendaraan mobil, jaringan, mesin ATM, dan media promosi. Rata-rata masa sewa adalah 4 tahun.

Bank mempunyai sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut:

15. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The Bank leases several assets including buildings, official residences, ATM space, car, network, ATM machine, and promotional media. The average lease term is 4 years.

The Bank also has certain leases with lease terms of 12 months or less and low value assets. The Bank applies the recognition exemptions of short-term leases and low-value assets for these leases.

The carrying amount of right of use assets are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai Tercatat</u>					<u>Carrying amount</u>
Bangunan	397.815	60.231	-	458.046	Buildings
Kendaraan	58.419	15.514	-	73.933	Vehicle
Mesin ATM	7.839	-	-	7.839	ATM Machine
Pusat Data	519	-	-	519	Data Center
Lainnya	659	-	-	659	Others
	465.251	75.745	-	540.996	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	-	135.412	-	135.412	Buildings
Kendaraan	-	41.143	-	41.143	Vehicle
Mesin ATM	-	3.188	-	3.188	ATM Machine
Pusat Data	-	352	-	352	Data Center
Lainnya	-	335	-	335	Others
	-	180.430	-	180.430	
Nilai Tercatat - bersih	465.251			360.566	Net Book Value - net

16. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

16. INTERESTS RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Kredit yang diberikan	5.644.802	3.077.639	Loans
Obligasi pemerintah	452.639	89.554	Government bonds
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	188.133	43.579	Securities and placement with other Banks
Total	6.285.574	3.210.772	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2020
<u>Pihak ketiga</u>	
Tagihan kepada pihak ketiga	1.005.941
Beban yang ditanggguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11g)	497.968
Uang muka pajak (Catatan 40)	402.428
Biaya dibayar di muka	386.848
Agunan yang diambil alih	77.591
Lainnya	1.413.410
Total	3.784.186

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Perumpera), tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, serta tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama, PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link, PT Alto Network atas transaksi ATM Alto, dan PT Rintis Sejahtera atas transaksi ATM Prima.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Berdasarkan surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. UM.01.03-Dp/374 tanggal 23 Desember 2016, tagihan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank atas KPR Sejahtera FLPP tahun 2015 dikonversi menjadi subsidi bunga. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tagihan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia terkait transaksi tersebut masing-masing sebesar RpNihil dan Rp126.368 yang termasuk dalam tagihan kepada pihak ketiga.

17. OTHER ASSETS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2019	
		<u>Third party</u>
	920.408	Third party receivables
	288.899	Deferred expense for employee loan (Note 11g)
	402.428	Prepaid taxes (Note 40)
	803.479	Prepaid expenses
	77.591	Foreclosed collateral
	107.392	Others
Total	2.600.197	Total

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, (Perumpera) receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama, receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions, receivables from PT Alto Network arising from transaction with ATM Alto, and receivables from PT Rintis Sejahtera arising from transaction with ATM Prima.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

Based on a letter from the Ministry of Public Works and Public Housing No. UM.01.03-Dp/374 dated December 23, 2016, the Bank's FLPP receivable from KPR Sejahtera FLPP 2015 was converted to interest subsidy. On December 31, 2020 and 2019, the Bank's receivable from the Government of the Republic of Indonesia on such transactions amounted to RpNil and Rp126,368, respectively, which are included in Third Party Receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Kewajiban kepada pihak ketiga	4.072.356	1.742.653
Hutang pajak		
Pajak penghasilan		
Pasal 29 (Catatan 40)	320.830	1.679
Pasal 4 ayat (2)	135.015	153.872
Pajak pertambahan nilai	16.498	4.467
Pasal 21	13.014	29.586
Deposito berjangka jatuh tempo	144.150	17.284
Bagi hasil yang belum dibagikan	44.275	35.472
Bunga atas deposito berjangka yang belum diambil nasabah	11.495	7.763
Lainnya	7.643	6.407
Total	4.765.276	1.999.183

18. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

This account consists of:

Third party payables
Taxes payable
Income tax
Article 29 (Note 40)
Article (4) paragraph 2
Value added tax
Article 21
Matured time deposits
Undistributed profit sharing
Interest on time deposits which is not yet collected by customers
Others
Total

19. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Pihak ketiga				
Rupiah		17.483.413		10.494.469
Dolar Amerika Serikat	710.482	9.982	471.512	6.546
		17.493.395		10.501.015
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Rupiah		46.370.579		40.199.584
Dolar Amerika Serikat	556.717.866	7.821.886	37.961	527
		54.192.465		40.200.111
Total		71.685.860		50.701.126

19. DEMAND DEPOSITS

This account consists of:

Third parties
Rupiah
United States Dollar
Related parties (Note 45)
Rupiah
United States Dollar
Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp3.085.095 dan Rp2.593.010.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Rupiah adalah sebesar 2,11% dan 1,89% masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 2,26% dan 0,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp3,085,095 and Rp2,593,010, respectively.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 2.11% and 1.89% for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 2.26% and 0.00% for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. GIRO (lanjutan)

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp740.520 dan Rp1.519.442 (Catatan 11).

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Giro BTN Prima iB	358.686	1.414.712
Total	358.686	1.414.712

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak Ketiga	341.653	826.682
Pihak Berelasi (Catatan 45)	17.033	588.030
Total	358.686	1.414.712

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Giro Mudharabah	14 : 86	1,33%
Mudharabah current accounts		
2019		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Giro Mudharabah	14 : 86	1,57%
Mudharabah current accounts		

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat giro mudharabah yang dijadikan jaminan.

19. DEMAND DEPOSITS (continued)

Demand deposits amounting to Rp740,520 and Rp1,519,442 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 11).

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts

a. By product

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Giro BTN Prima iB	358.686	1.414.712
Total	358.686	1.414.712

b. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Third Parties	341.653	826.682
Related Party (Note 45)	17.033	588.030
Total	358.686	1.414.712

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

As of December 31, 2020 and 2019, there are no mudharabah demand deposits which are pledged as collateral.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. TABUNGAN

20. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Tabungan Batara		38.678.315		41.426.261	Batara savings deposits
Tabungan Batara Wadiah		905.209		789.889	Batara Wadiah savings deposits
		39.583.524		42.216.150	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
Tabungan Batara	1.340.021	18.827	3.984.344	55.313	Batara savings deposits
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
Tabungan Batara	282.385	2.995	323.318	3.335	Batara savings deposits
		21.822		58.648	
Total		39.605.346		42.274.798	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp905.209 dan Rp789.889.

As of December 31, 2020 and 2019, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp905,209 and Rp789,889, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan rupiah sebesar 3,58% dan 4,17% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan valas sebesar 0,20% dan 0,30% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The average annual interest rates for rupiah savings deposits are 3.58% and 4.17%, for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively. The average annual interest rates for foreign currencies savings deposits are 0.20% and 0.30%, for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp435.080 dan Rp343.370 (Catatan 11).

Savings deposits amounting to Rp435,080 and Rp343,370 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

Tabungan Batara dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp421.556 dan Rp272.851 (Catatan 45).

As of December 31, 2020 and 2019, Batara and wadiah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp421,556 and Rp272,851, respectively (Note 45).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. TABUNGAN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Tabungan Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Rupiah</u>		
Tabungan BTN Prima iB	2.914.165	3.166.824
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	194.871	191.923
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	3.163	2.588
Tabungan BTN Emas iB	1.944	1.591
Total	3.114.143	3.362.926

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak Ketiga	2.683.283	3.226.349
Pihak Berelasi (Catatan 45)	430.860	136.577
Total	3.114.143	3.362.926

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020		
	<i>Nisbah (%)</i> Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%) Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	25 : 75	2,37%
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15.50 : 84.50	1,47%
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	15.50 : 84.50	1,47%
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,37%
2019		
	<i>Nisbah (%)</i> Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%) Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	25 : 75	2,80%
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,73%
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	15,50 : 84,50	1,73%
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,80%

20. SAVINGS DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits

a. By product

<u>Rupiah</u>
Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB
Tabungan BTN Emas iB
Total

b. By relationship

Third Parties
Related Party (Note 45)

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan *Qurban* BTN iB
Tabungan BTN Emas iB

Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan *Qurban* BTN iB
Tabungan BTN Emas iB

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. DEPOSITO BERJANGKA

- a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2020
<u>Rupiah</u>	
1 bulan	4,15%
3 bulan	4,62%
6 bulan	4,87%
12 bulan	5,09%
24 bulan	5,48%
Dolar Amerika Serikat	2,57%

- b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu kontrak:

	31 Desember/December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Rupiah</u>		
1 bulan		59.868.380
3 bulan		55.382.227
6 bulan		13.289.224
12 bulan		2.833.466
24 bulan		10.607.514
		141.980.811
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
1 bulan	41.531.323	583.515
3 bulan	116.912.376	1.642.619
6 bulan	231.158.096	3.247.771
12 bulan	28.742.688	403.835
		5.877.740
<u>Dolar Singapura</u>		
3 bulan	5.367	57
		57
Total		147.858.608

21. TIME DEPOSITS

- a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	2019
<u>Rupiah</u>	
1 month	5,39%
3 months	5,60%
6 months	5,52%
12 months	5,58%
24 months	5,88%
United States Dollar	3,47%

- b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Rupiah</u>		
1 month		44.872.614
3 months		39.590.353
6 months		5.460.901
12 months		3.451.974
24 months		15.216.547
		108.592.389
<u>United States Dollar</u>		
1 month	360.247.279	5.001.133
3 months	23.390.102	324.713
6 months	819.086	11.371
12 months	8.538	119
		5.337.336
<u>Singapore Dollar</u>		
3 months	4.211	43
		43
Total		113.929.768

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

21. TIME DEPOSITS (continued)

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
≤ 1 bulan	79.194.066	66.952.126	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	38.255.152	25.087.533	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	11.973.696	2.133.063	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	4.782.687	10.965.305	> 6 months ≤ 12 months
> 12 bulan ≤ 24 bulan	7.775.210	3.454.362	> 12 months ≤ 24 months
	141.980.811	108.592.389	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
≤ 1 bulan	1.160.131	5.001.984	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	3.313.414	323.862	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.235.199	11.371	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	168.996	119	> 6 months ≤ 12 months
	5.877.740	5.337.336	
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
> 1 bulan ≤ 3 bulan	57	43	> 1 month ≤ 3 months
	57	43	
Total	147.858.608	113.929.768	Total

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.873.491 dan Rp1.268.569 (Catatan 11g).

As of December 31, 2020 and 2019, time deposits amounting to Rp1,873,491 and Rp1,268,569, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11g).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp86.940.320 dan Rp52.648.592 (Catatan 45).

As of December 31, 2020 and 2019, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp86,940,320 and Rp52,648,592, respectively (Note 45).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah

a. Berdasarkan jangka waktu kontrak

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
1 bulan	7.063.928	7.563.271
3 bulan	3.940.039	3.260.248
6 bulan	5.335.104	795.326
12 bulan	29.072	2.081.034
24 bulan	132	22
Total	16.368.275	13.699.901

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
≤ 1 bulan	8.766.957	9.146.586
> 1 bulan ≤ 3 bulan	2.318.349	2.402.492
> 3 bulan ≤ 6 bulan	5.273.843	2.134.438
> 6 bulan ≤ 12 bulan	8.996	16.382
> 12 bulan ≤ 24 bulan	130	3
Total	16.368.275	13.699.901

c. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak Ketiga	11.022.780	11.661.400
Pihak Berelasi (Catatan 45)	5.345.495	2.038.501
Total	16.368.275	13.699.901

21. TIME DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits

a. By contractual period

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
1 bulan	7.063.928	7.563.271	1 month
3 bulan	3.940.039	3.260.248	3 months
6 bulan	5.335.104	795.326	6 months
12 months	29.072	2.081.034	12 months
24 months	132	22	24 months
Total	16.368.275	13.699.901	Total

b. By remaining period to maturity

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
≤ 1 month	8.766.957	9.146.586	≤ 1 month
> 1 month ≤ 3 months	2.318.349	2.402.492	> 1 month ≤ 3 months
> 3 months ≤ 6 months	5.273.843	2.134.438	> 3 months ≤ 6 months
> 6 months ≤ 12 months	8.996	16.382	> 6 months ≤ 12 months
> 12 months ≤ 24 months	130	3	> 12 months ≤ 24 months
Total	16.368.275	13.699.901	Total

c. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pihak Ketiga	11.022.780	11.661.400	Third Parties
Pihak Berelasi (Catatan 45)	5.345.495	2.038.501	Related Party (Note 45)
Total	16.368.275	13.699.901	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah (lanjutan)

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
1 bulan	40 : 60	3,80	40 : 60	4,48
3 bulan	43 : 57	4,08	43 : 57	4,81
6 bulan	44 : 56	4,18	44 : 56	4,92
12 bulan	44 : 56	4,18	44 : 56	4,92
24 bulan	39 : 61	3,70	39 : 61	4,36

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

21. TIME DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits (continued)

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended December 31, 2020 and 2019, are as follows:

1 month
3 months
6 months
12 months
24 months

As of December 31, 2020 and 2019, there are no mudharabah time deposits which are pledged as collateral.

22. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJİ DİBELİ KEMBALİ

Rincian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

22. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS

The details of securities sold under repurchase agreements with third parties are as follows:

31 Desember/December 31, 2019

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of Securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties								
Deutsche Bank	VR0031	SPN+1,25%	575.000	14 Januari/ January 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Standard Chartered Bank	VR0031	SPN+1,40%	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Total			1.075.000			935.000	-	935.000

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2020
Giro	0,94%
Deposito	4,47%
Inter-bank call money	4,76%

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2020					
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
<u>Rupiah</u>					
Deposito	10.370	-	-	-	10.370
Giro	19.510	-	-	-	19.510
Total	29.880	-	-	-	29.880

Demand Deposit
Time Deposits
Inter-bank call money

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

Rupiah
Time deposits
Demand deposits
Total

31 Desember/December 31, 2019					
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
<u>Rupiah</u>					
Deposito	4.493.870	5.300	-	-	4.499.170
Giro	10.068	-	-	-	10.068
Total	4.503.938	5.300	-	-	4.509.238

Rupiah
Time deposits
Demand deposits
Total

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil (Catatan 45).

As of December 31, 2020 and 2019, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to RpNil, respectively (Note 45).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2020 and 2019, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral.

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Pihak Ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Deposito berjangka Mudharabah	1.000	7.870
Tabungan Mudharabah	2.139	3.299
Giro Mudharabah	176	243
Total	3.315	11.412

Third Parties
Rupiah
Mudharabah Time deposits
Mudharabah Saving deposits
Mudharabah Current accounts
Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Simpanan bank lain berdasarkan dana syirkah temporer yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil.

Tabungan dan giro *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

	2020	2019
Giro <i>mudharabah</i>	1,33%	1,05%
Tabungan <i>mudharabah</i>	2,37%	2,44%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	3,80%	4,96%

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat simpanan dari bank lain *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks (continued)

Deposits from other banks based on temporary syirkah funds which are related parties of the Bank as of December 31, 2020 and 2019 amounted to RpNil, respectively.

Mudharabah savings deposits and current account represent deposits from third parties who receive a share in the revenue earned by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

By annual interest rates and profit sharing

As of December 31, 2020 and 2019, there are no *mudharabah* deposits from other banks which are pledged as collateral.

24. LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian liabilitas akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah Pihak Berelasi (Catatan 45) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	196.071	487.052
Total	196.071	487.052

b. Berdasarkan Jangka Waktu:

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
≤ 1 bulan	433	142.780
> 1 bulan - 3 bulan	31.778	65.159
> 3 bulan - 1 tahun	163.860	279.113
Total	196.071	487.052

24. ACCEPTANCES PAYABLE

The details of acceptances payable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

Rupiah Related Parties (Note 45) Domestic Document Letter of Credit
Total

b. By Period

≤ 1 month
> 1 month - 3 month
> 3 month - 1 year

Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SURAT-SURAT
DITERBITKAN**

BERHARGA

YANG

25. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp5.901 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp5,901 and RpNil as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.086.708	-	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	407.391	-	Related parties (Note 45)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.639 dan Rp4.307 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds III Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,639 and Rp4,307 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.699.619	3.430.430	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	685.242	709.263	Related parties (Note 45)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.745 dan Rp3.883 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds III Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,745 and Rp3,883 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.885.035	2.775.827	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	1.646.220	2.185.290	Related parties (Note 45)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp249 dan Rp623 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds II Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp249 and Rp623 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.113.824	727.726	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	463.927	924.651	Related parties (Note 45)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp781 dan Rp1.348 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds II Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp781 and Rp1,348 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	913.054	1.936.757	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	686.165	161.895	Related parties (Note 45)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)

25. SECURITIES ISSUED (continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp687 dan Rp998 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds I Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp687 and Rp998 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.355.345	1.600.201	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	568.968	398.801	Related parties (Note 45)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp769 dan Rp1.263 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			Continuing Bonds I Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp769 and Rp1,263 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.590.388	1.738.400	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	408.842	260.336	Related parties (Note 45)
Obligasi BTN XV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp262 dan Rp762 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			BTN Bonds XV net of unamortized issuance cost amounted to Rp262 and Rp762 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	1.191.760	1.191.301	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	107.978	107.937	Related parties (Note 45)
Obligasi BTN XIV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp263 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			BTN Bonds XIV net of unamortized issuance cost amounted to RpNil and Rp263 as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Pihak ketiga	-	1.005.338	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	-	629.399	Related parties (Note 45)
Total	15.810.466	19.783.552	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

i. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 6,75%, 7,80% dan 8,40% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2021, 19 Agustus 2023, dan 19 Agustus 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

25. SECURITIES ISSUED (continued)

i. Continuing Bonds IV Phase I

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase I of 2020 with a total nominal value of Rp1,500,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 6.75%, 7.80% and 8.40%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase I Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on August 29, 2021, August 19, 2023, and August 19, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I of 2020 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2020, Continuing Bonds IV Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Continuing Bonds IV Phase I is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

ii. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.144.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, 28 September 2022, 28 September 2024. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 September 2017.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2020, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

25. SECURITIES ISSUED (continued)

ii. Continuing Bonds III Phase II

The Bank issued Continuing Bonds III Phase II of 2019 with a total nominal value of Rp4,144,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 7.75%, 8.75% and 9.00%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on July 8, 2020, September 28, 2022, and September 28, 2024, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase II of 2019 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated September 22, 2017 of the Board of Commissioners the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2020, Continuing Bonds III Phase II are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Continuing Bonds III Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Until of December 31, 2020, Continuing Bonds III Phase II Series A has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

iii. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

iii. Continuing Bonds III Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,30%, 8,50%, 8,70% dan 8,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, 13 Juli 2022, 13 Juli 2024 dan 13 Juli 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 September 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase I of 2017 with a total nominal value of Rp5,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.30%, 8.50%, 8.70% and 8.90%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 13, 2020, July 13, 2022, July 13, 2024 and July 13, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase I of 2017 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated September 22, 2017 of the Board of Commissioners the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, Continuing Bonds III Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi III Tahap I dengan nilai nominal sebesar Rp35.000 dengan harga beli Rp35.257.

As of December 31, 2019, the Bank bought back BTN Continuing Bonds III Phase I Bonds with nominal value of Rp35,000 with repurchased price of Rp35,257.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase I is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2020, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until of December 31, 2020, Continuing Bonds III Phase I Series A has been redeemed by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

iv. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

iv. Continuing Bonds II Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,20% dan 8,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2021. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tahun 2016 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-297/D.04/2015 tanggal 30 September 2015.

The Bank issued Continuing Bonds II Phase II of 2016 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.20% and 8.75%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase II Series A and Series B, respectively, and will mature on August 30, 2019 and August 30, 2021, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase II of 2016 became effective based on Letter No. S-297/D.04/2015 dated September 30, 2015 of the Board of Commissioners the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, Continuing Bonds II Phase II are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 7 Oktober 2020, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dan dengan harga beli Rp75.845.

On October 7, 2020, the Bank bought back Continuing Bonds II Phase II with nominal value of Rp75,000 and with repurchased price of Rp75,845.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds II Phase II is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

v. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

v. Continuing Bonds II Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 September 2015.

The Bank issued Continuing Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated September 30, 2015 of the Commissioner Board of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, Continuing Bonds II Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2020, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2020, Continuing Bonds II Phase I Series A and Series B has been redeemed by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

vi Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

vi. Continuing Bonds I Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

The Bank issued Continuing Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Continuing Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, Continuing Bonds I Phase II were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga beli Rp76.620.

On October 12, 2020, the Bank bought back BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with repurchased price of Rp76,620.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

vii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I

vii. Continuing Bonds I Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I Tahap I tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

The Bank issued Continuing Bonds I Phase I 2012 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on September 5, 2022. The issuance of Continuing Bonds I Phase I of 2012 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, Continuing Bonds I BTN Phase I were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds I Phase I is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

viii. Obligasi BTN XV

viii. BTN Bonds XV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XV Tahun 2011 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021. Penerbitan Obligasi BTN XV tahun 2011 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6928/BL/2011 tanggal 21 September 2011.

The Bank issued BTN Bonds XV of 2011 with a total nominal value of Rp1,300,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 9.50%, payable every three months and are due on September 28, 2021. The issuance of BTN Bonds XV of 2011 became effective based on Letter No. S-6928/BL/2011 dated September 21, 2011 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, BTN Bonds XV were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XV adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for BTN Bonds XV is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

ix. Obligasi BTN XIV (lanjutan)

ix. BTN Bonds XIV (continued)

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 September 2010.

The Bank issued BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 10.25%, payable every three months and are due on September 11, 2020. The issuance of BTN Bonds XIV of 2010 became effective based on Letter No. S-4916/BL/2010 dated September 3, 2010 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2020 and 2019, BTN Bonds XIV are rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi XIV dengan nilai nominal sebesar Rp15.000 dengan harga beli Rp15.348.

As of December 31, 2019, the Bank bought back BTN XIV Bonds with nominal value of Rp15,000 with repurchased price of Rp15,348.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for BTN Bonds XIV is PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Obligasi BTN XIV telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

As of December 31, 2020, BTN Bonds XIV has been redeemed by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

25. SECURITIES ISSUED (continued)

ix. Obligasi BTN XIV (lanjutan)

ix. BTN Bonds XIV (continued)

Perjanjian perwaliamanatan atas seluruh obligasi memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval prior to perform the following:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.
- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang.

- *Transfer, the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.*
- *Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*
- *Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfill its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*
- *Reduce the authorized capital and paid-in capital except when required or directed by the Government and/or any governing authority*

Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000, has been redeemed by the Bank on the maturity date.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.001 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

For year ended December 31, 2020 and December 31, 2019, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to RpNils and Rp6,001, respectively, recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

As of December 31, 2020 and December 31, 2019, the Bank has complied with the existing terms and conditions of the above trusteeship agreements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

ix. Obligasi BTN XIV (lanjutan)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.

25. SECURITIES ISSUED (continued)

ix. BTN Bonds XIV (continued)

For year ended December 31, 2020 and December 31, 2019, coupon payments to all bond holders have been made by the Bank on the respective interest payment due dates.

26. PINJAMAN YANG DITERIMA

26. FUND BORROWINGS

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Pihak Ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	4.000.000	5.000.000
PT Bank Danamon Tbk	1.998.793	-
PT Bank ICBC Indonesia	799.289	798.644
PT Bank DKI	-	997.581
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	499.152
	6.798.082	7.295.377
<u>Mata Uang Asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank ANZ Indonesia	-	1.385.991
	6.798.082	8.681.368
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	15.012.510	12.785.356
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.996.546	998.933
	17.009.056	13.784.289
Total	23.807.138	22.465.657

<u>Third Parties</u>
<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Tbk
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DKI
PT Bank OCBC NISP Tbk

<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
PT Bank ANZ Indonesia

<u>Related Parties (Note 45)</u>
<u>Rupiah</u>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian No. 123/Add-KCK/2020 tanggal 29 April 2020 yang terdiri dari:

- *Term Loan I, II dan III yang dilakukan perpanjangan selama 12 bulan atas pinjaman tersebut sebesar masing-masing Rp1 triliun yang memiliki bunga tetap sebesar masing-masing 6,50% dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 28 Juni 2021, 21 Juni 2021, dan 14 Juni 2021.*
- *Term Loan IV sebesar Rp 2 triliun yang memiliki bunga tetap sebesar 6,5% dengan jangka waktu selama 12 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp1 triliun pada 25 April 2021 dan sebesar Rp1 triliun pada 8 Mei 2021.*

Bank telah melakukan pelunasan dipercepat atas *Term Loan I* tersebut pada tanggal 3 Desember 2020

b. Pinjaman dari PT Bank DKI

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bilateral PT Bank DKI ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Pada tanggal 16 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 7,40% dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2020.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2020

26. FUND BORROWINGS (continued)

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to Finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 123/Add-KCK/2020 dated April 29, 2020 consist of:

- *The Term Loan I, II, and III the loan were extended for 12 months, for each Rp1 trillion with fixed interest rate are 6.50% per annum and will mature on June 28, 2021, June 21, 2021 and June 14, 2021, respectively.*
- *The Term Loan IV amounting Rp2 trillion with fixed interest rate 6.50% with 12 months period which will mature amounting Rp1 trillion on April 25, 2021 and amounting Rp1 trillion on May 8, 2021, respectively.*

The Bank had early fully repaid the Term Loan I date on December 3, 2020.

b. Loan from PT Bank DKI

This account represents loan facility obtained from a bilateral loan from PT Bank DKI which is intended to support the business and operational development of the Bank.

On December 16, 2019, the Bank received bilateral loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate 7.40% and will mature on December 15, 2020.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 15, 2020.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

26. FUND BORROWINGS (continued)

c. Pinjaman dari PT ANZ Indonesia Bank

c. Loan from PT ANZ Indonesia Bank

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari PT Bank SBI Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, The Korea Development Bank Cabang Singapura, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT ANZ Indonesia Bank. Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

This account represents loan facility obtained from a offshore bank bilateral loan with consortium of banks consisting of PT Bank SBI Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, The Korea Development Bank Singapore Branch, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and PT ANZ Indonesia Bank. This loan is intended to support the business and operational development of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi dengan plafond sebesar ASD100 juta (nilai penuh) dengan bunga mengambang sebesar LIBOR ditambah margin 0,50% untuk *offshore* dan LIBOR ditambah margin 0,70% untuk *onshore* dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2020.

On December 2, 2019, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to USD100 million (full amount) with floating interest rate of LIBOR plus margin 0.50% for offshore and LIBOR plus margin 0.70% for onshore and will mature on November 25, 2020.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

The significant requirements (financial covenants) in the Bank's loan agreement include the following:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 5,00%
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 9,00%
- Nilai Rasio Modal Inti (Tier 1 Ratio) minimal 6,00%
- Nilai Rasio Modal Inti Utama (Core Tier 1 Ratio) minimal 5,00%
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 8,00%
- Rasio *Return on Average Assets* minimal 0,6%, dengan ketentuan bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sama dengan atau lebih besar dari 12,50%.

- *Non-Performing Loan* (NPL) ratio maximum of 5.00%.
- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9.00%
- *Tier 1 Ratio* minimum of 6.00%
- *Core Tier 1 Ratio* minimum of 5.00%
- *Minimum Statutory Reserve* minimum of 8.00%
- *Return on Average Assets* ratio minimum of 0.6%, provided that *Capital Adequacy Ratio* (CAR) is equal to or greater than 12.50%

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 25 November 2020.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on November 25, 2020.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan PT Bank ICBC Indonesia sebagai berikut:

Berdasarkan covernote No 100/N/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp800 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,30% dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 10/ICBC/PTD/XII/2019/P1 tanggal 22 Desember 2020, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp800 miliar dengan bunga tetap sebesar 5,75% dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2021.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Mempertahankan minimum CAR menjadi sesuai dengan ketentuan OJK
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Net sebesar 5,00%
- *Net income* tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020

26. FUND BORROWINGS (continued)

d. Loan from PT Bank ICBC Indonesia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank ICBC Indonesia which is intended to support the business and operational development of the Bank.

The Bank has several loan agreements with PT Bank ICBC Indonesia as follow:

Based on covernote No. 100/N/XII/2019 dated December 23, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp800 billion with fixed interest rate of 7.30% and mature on December 23, 2020.

Based on covernote No. 10/ICBC/PTD/XII/2019/P1 dated December 22, 2020, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp800 billion with fixed interest rate of 5.75% and mature on December 23, 2021.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum is in accordance with OJK regulations
- *Non-Performing Loan* (NPL) Netto ratio maximum of 5.00%.
- *Net income* for the current year with positive numbers
- *Liquidity coverage ratio* minimum 100%

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 23, 2020.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank OCBC NISP Tbk ditujukan untuk mendukung modal kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 22 Agustus 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga mengambang sebesar JIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1,00% dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2020.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 14,00%
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Gross maksimal 5,00%
- Wajib menjaga kepemilikan saham pemerintah RI (baik langsung maupun tidak langsung) dalam jumlah minimum 60%
- Tidak akan menurunkan modal disetor perusahaan, tanpa pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelahnya
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OCBC selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah RUPS yang terkait, dapat membayar dividen ataupun membagikan kekayaan debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 22 September 2020

f. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia (Tbk)

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No 30 tanggal 24 Juni 2020 dan Adendum Akta Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 24 Juli 2020, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafond sebesar masing-masing Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar masing-masing 6,75%, 7,00%, 7,25% dan 6,75% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 25 Januari 2021, 25 Maret 2021, 24 Juni 2021 dan 24 Juli 2021.

26. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT OCBC NISP Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank OCBC NISP Tbk which is intended to support working capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

On August 22, 2019, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with floating interest rate of 3 (three) months JIBOR plus margin 1.00% and will mature on September 22, 2020.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum of 14.00%
- *Non-Performing Loan* (NPL) Gross ratio maximum of 5.00%.
- Obligated to maintain share ownership of the Indonesian government (both directly and indirectly) in a minimum amount of 60%
- Will not reduce the company's paid-up capital, without written notice no later than 7 (seven) days after
- Communicate to OCBC about written information no later than 7 (seven) days after the relevant General Meeting of Shareholders, could settle dividends or distribute debtor wealth in a way to shareholders.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on September 22, 2020.

f. Loan from PT Bank Danamon Indonesia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Danamon Indonesia which is intended to support the business and operational development of the Bank.

Based on Loan Agreement No. 30 dated June 24, 2020, and Adendum of Loan Agreement No. 70 dated July 24, 2020 the Bank received a loan with plafond amounting for each Rp500 billion with fixed interest rate for each 6.75%, 7.00%, 7.25% and 6.75% and will mature on January 25, 2021, March 25, 2021, June 24, 2021 and July 24, 2021 respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

g. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (pihak berelasi)

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditujukan untuk mendukung pengembangan ekspansi kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berdasarkan perjanjian No. CRO.KP/344/BL/2019 No. 66 tanggal 30 Agustus 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 8,00% dan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2020.

Berdasarkan akta No.22 tanggal 29 Juli 2020, Bank mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit serta memberikan tambahan limit fasilitas pinjaman dengan plafond sebesar masing-masing Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 6,70% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Juli 2021 dan 28 September 2021.

Berdasarkan Surat *repricing* suku bunga fasilitas kredit dengan nomor surat TIB.IBF/DFI.4254/2020 tanggal 23 Desember 2020, Bank mendapatkan penyesuaian suku bunga menjadi 6% yang berlaku dari tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan jatuh tempo kredit.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal sesuai dengan ketentuan OJK untuk Buku triwulan III dan profil risiko bank
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Net maksimal 5,00%
- *Net income* tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%

26. FUND BORROWINGS (continued)

g. Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (related parties)

This account represents loan facility obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which is intended to support credit expansion development of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Based on loan agreement No. CRO.KP/344/BL/2019 No. 66 dated August 30, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 8.00% and mature on September 29, 2020.

Based on agreement No. 22 dated July, 29, 2020, the Bank get involve extending the payment arrangements and get an additional credit facility limit with plafond amounting for each Rp1 trillion with fixed interest rate of 6.70% and mature for each on July 29, 2021 and September 28, 2021.

Based on the credit facility interest rate repricing letter number TIB.IBF / DFI.4254 / 2020 dated December 23, 2020, the Bank will received an interest rate adjustment of 6% which is valid from December 28, 2020 until the maturity date.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum is in accordance with OJK regulations for third quarter books and bank risk profiles
- *Non-Performing Loan* (NPL) Net ratio maximum of 5.00%
- *Net income* for the current year with positive numbers
- *Liquidity coverage ratio* minimum of 100%

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

· Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,8 triliun dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022.

· Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri atas sebesar Rp1 triliun dan Rp500 miliar dengan bunga tetap 8,60% yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022.

· Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap 8,79% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022.

· Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp2,095 miliar yang terdiri atas sebesar Rp640 miliar dengan bunga tetap 8,87% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan sebesar Rp1,455 miliar dengan bunga tetap 9,09% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related parties)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

· SMF Loan Phase 1 Year 2019

Based on loan agreement No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 dated February 12, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.8 trillion with fixed interest rate of 9.20% and will mature on February 12, 2022.

· SMF Loan Phase 2 Year 2019

Based on loan agreement No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 dated April 11, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.5 trillion with details of amounting to Rp1 trillion and Rp500 billion with interest rate of 8.60% and will mature on April 11, 2022 and May 2, 2022.

· SMF Loan Phase 3 Year 2019

Based on loan agreement No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 dated May 29, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 8.79% and will mature on May 31, 2022.

· SMF Loan Phase 4 Year 2019

Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 dated July 9, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2,095 billion with details of amounting to Rp640 billion with interest rate of 8.87% and will mature on July 9, 2022, and amounting to Rp1,455 billion with interest rate of 9.09% and will mature on July 9, 2024.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

· Pinjaman SMF FLPP 2020

Berdasarkan perjanjian No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp938.012 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

· *Refinancing* 1 SMF 2020

Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp850 miliar dengan bunga tetap 7,35% yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021.

· Pinjaman SMF FLPP 2019

Berdasarkan perjanjian No. 099/PP/FLPP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

· SMF Loan FLPP 2020

Based on loan agreement 010/FLPP/PP/SMF-BTN/II/2020 dated January 20, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 is amounting to Rp938,012 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

· *Refinancing* 1 SMF 2020

Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2020 dated July 14, 2020, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp850 billion with interest rate of 7.35% and will mature on July 15, 2021.

· SMF Loan FLPP 2019

Based on loan agreement 099/PP/FLPP/SMF-BTN/II/2019 dated January 17, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

· Pinjaman SMF FLPP 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp893.142 dan Rp933.759 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

· Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah

Berdasarkan perjanjian No. 099/AKAD/SMF-BTNS/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp350 miliar dengan nisbah bagi hasil sebesar 71,66% dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2021. Pembayaran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan hingga jatuh tempo.

Berdasarkan perjanjian No. 052/AKAD/SMF-BTNS/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp3 triliun dengan nisbah bagi hasil sebesar 58,18% dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2021. Pembayaran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan hingga jatuh tempo.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

· SMF Loan FLPP 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 is amounting to Rp893,142 and Rp933.759 respectively, with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

· SMF Loan Mudharabah Muqayadah

Based on loan agreement No. 099/AKAD/SMF-BTNS/VII/2020 dated July 24, 2020, the Bank received loan with plafond amounting to Rp350 billion with nisbah ratio of 71.66% and will mature on July 24, 2021. Principal and interest payment are made monthly until maturity date.

Based on loan agreement No. 052/AKAD/SMF-BTNS/III/2020 dated March 19, 2020, the Bank received loan with plafond amounting to Rp3 Trillion with nisbah ratio 58.18% and will mature on March 20, 2021. Principal and interest payment are made monthly until maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2020

Berdasarkan perjanjian No.024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar Rp187.186 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagikan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2020

Based on loan agreement No.024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 dated January 29, 2020 the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 is amounting to Rp187,186 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10 of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* 2019

Berdasarkan perjanjian No.217/AKAD/SMF-BTNS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 65,33% dari Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2020.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp500 miliar.

- Pinjaman SMF FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No.81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp675.613 dan Rp707.124 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* 2019

Based on loan agreement No.217/AKAD/SMF-BTNS/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp500 billion with *nisbah* ratio of 65.33% from profit sharing of financing facilities and will mature on December 19, 2020.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 19, 2020 amounting to Rp500 billion.

- SMF Loan FLPP 2018

Based on loan agreement No.81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounting to Rp675,613 and Rp707,124, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp30.120 dan Rp31.745 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

Based on loan agreement No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 is amounting to Rp30,120 and Rp31,745 respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10 of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2019

Berdasarkan perjanjian No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107.896 dan Rp113.958 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2019

Based on loan agreement No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/II/2019 dated January 21, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 is Rp107,896 and Rp113.958, respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama availability period sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.704 dan Rp31.092 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama availability period atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 is Rp29,704 and Rp31,092 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

h. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

· Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Baki Debet pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp437.864 dan Rp455.108 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

· Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2017

Berdasarkan perjanjian No. 009/PP/SMF-BTN/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 8,55% dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2020.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp1 triliun.

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.009.056 dan Rp13.784.289 (Catatan 45).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

26. FUND BORROWINGS (continued)

h. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

· SMF Loan FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 dated November 28, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 is amounting to Rp437,864 and Rp455,108, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

· SMF Loan Phases 1 Year 2017

Based on loan agreement No. 009/PP/SMF-BTN/II/2017 dated February 3, 2017, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 8.55% and will mature on January 3, 2020.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on January 3, 2020 amounting to Rp1 trillion.

As of December 31, 2020 and 2019, fund borrowings received from related parties amounted to Rp17,009,056 and Rp13,784,289, respectively (Note 45).

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Mata Uang Asing</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Obligasi Subordinasi	4.194.554	-
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 45)</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	5.999.878	5.999.669
Total	10.194.432	5.999.669

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3 triliun dengan suku bunga 9,00% dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan pencairan. Pencairan tahap ke-1 pada 30 Mei 2016 sebesar Rp1,5 triliun dan tahap ke-2 pada 20 September 2016 sebesar Rp1,5 triliun. Jangka waktu Pinjaman Subordinasi adalah 5 tahun (60 bulan) yang akan jatuh tempo masing-masing pada 30 Mei 2021 dan 20 Juni 2021. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3 triliun dengan suku bunga 8,90% dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024.

Pinjaman subordinasi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-69/PB.31/2016 tanggal 30 September 2016 dan No. S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020.

Pada tanggal 23 Januari 2020, Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar USD300 juta atau ekuivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,20% per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Penerbitan Obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-35/PB.31/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp17.651 dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pada 23 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

27. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES

<u>Foreign Currency</u>	
<u>Third Parties</u>	
Subordinated bonds	
<u>Rupiah</u>	
<u>Related Party (Note 45)</u>	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
Total	

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan in the amount of Rp3 trillion with interest rate of 9.00% is done in 2 (two) steps credit disbursement. The first disbursement is done on May 30, 2016 in the amount of Rp1.5 trillion and the second disbursement is on September 20, 2016 in the amount of Rp1.5 trillion. The time period of the subordinated loan is 5 years (60 months) that will mature on May 30, 2021 and June 20, 2021. Subordinated loan in the amount of Rp3 trillion with interest rate of 8.90% was withdrew on December 31, 2019 and will mature on December 27, 2024.

Subordinated loan has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-69/PB.31/2016 dated September 30, 2016 and No. S-21/PB.31/2020 dated February 4, 2020.

On January 23, 2020, the Bank issued subordinated bonds with a total nominal value of USD300 million or the equivalent to Rp4,089,000, with tenor of 5 years and interest of 4.20% per annum and listed in the Singapore Stock Exchange. The issuance of Global Bond became effective based on letter No. S-35/PB.31/2020 dated February 26, 2020.

The issuance costs of the subordinated bonds amounting to Rp17,651 was recorded as deduction to the amount of the subordinated bonds and amortised until the maturity date, on January 23, 2025.

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

28. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Deposito berjangka	315.772	350.839	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	236.594	181.161	Securities issued
Pinjaman yang diterima	158.140	71.503	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi			Subordinated loan
dan efek-efek subordinasi	16.408	11.216	and securities
Simpanan dari bank lain	-	3.431	Deposits from other Banks
Efek yang dijual dengan janji			Securities sold under repurchase
dibeli kembali	-	11.852	agreement
Total	726.914	630.002	Total

29. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

29. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali transaksi berdasarkan prinsip syariah penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The Bank assessed commitment and contingency transaction which have credit risk individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists, except transaction based on sharia principles, assessment was performed using a collectability guidance of Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

The collectability classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Lancar</u>					<u>Current</u>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 41)		744.242		1.969.793	Guarantees issued (Note 41)
Fasilitas kredit					
yang belum ditarik (committed)		79.356		178.693	Unused loan facility (committed)
		823.598		2.148.486	
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 41)					Guarantees issued (Note 41)
Dolar Amerika Serikat	891.574	12.527	2.286.869	31.747	United States Dollar
Euro Eropa	96.565	1.664	184.351	2.870	European Euro
Jepang Yen	41.250.000	5.609	41.250.000	5.272	Japanese Yen
		19.800		39.889	
		843.398		2.188.375	
<u>Dalam Perhatian Khusus</u>					<u>Special mention</u>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit					
yang belum ditarik (committed)		-		10.876	Unused loan facility (committed)
Total		843.398		2.199.251	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik masing-masing sebesar RpNihil.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp14.601 dan Rp364.059 (Catatan 45).

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

29. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, there are transaction with related parties for unused loan facility amounting to RpNil, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, guarantees issued to related parties amounted to Rp14,601 and Rp364,059, respectively (Note 45).

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas Kredit yang belum ditarik (committed)						Unused loan facility (committed)
Saldo 1 Januari	181.715	7.854	-	-	189.569	Balance at January 1
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	2.280	(2.280)	-	-	-	Stage 1
Stage 2	(37.160)	37.160	-	-	-	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	146.835	42.734	-	-	189.569	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(78.173)	5.204	-	-	(72.969)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.663	-	-	-	7.663	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(39.734)	(170)	-	-	(39.904)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	(5.003)	-	-	(5.003)	Written-off financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(110.244)	31	-	-	(110.213)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	36.591	42.765	-	-	79.356^{*)}	Balance at end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

^{**)} Terdiri dari fasilitas kredit yang committed yang belum ditarik

^{*)} Not applying SFAS 71 "Financial Instruments"

^{**)} Consist of committed unused loan facility

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / For the Year Ended December 31		
	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Saldo awal tahun	-	-	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No.71 (Catatan 54)	2.705	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK 71 (Notes 54)
Penyisihan/(Pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	3.784	-	Provision/ (reversal) for impairment losses during the year
Saldo akhir	6.489	-	Balance at end

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Fasilitas Kredit yang belum ditarik (committed)					
Saldo 1 Januari	-	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 54)	1.727	978	-	-	2.705
Saldo awal PSAK 71	1.727	978	-	-	2.705
Pengalihan ke:					
Stage 1	214	(214)	-	-	-
Stage 2	(365)	365	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-	-
Total saldo awal setelah pengalihan	1.576	1.129	-	-	2.705
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	1.717	2.358	-	-	4.075
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3	-	-	-	3
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(220)	(31)	-	-	(251)
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	(43)	-	-	(43)
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.500	2.284	-	-	3.784
Saldo akhir tahun	3.076	3.413	-	-	6.489

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Unused loan facility (committed)
Balance at January 1
Impact of initial adoption of SFAS 71 (note 54)
Beginning Balance SFAS 71

Transfer to:
Stage 1
Stage 2
Stage 3

Total opening balance after transfer

Net remeasurement of impairment losses
New financial assets originated or purchased
Derecognized financial assets
Written-off financial assets

Total Additional/(reversal)/ during the year

Balance at end of year

29. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Based on management's assessment, the amount of provision for estimated losses on commitments and contingencies is adequate..

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Liabilitas imbalan kerja</u>		
Bonus dan tantiem	394.472	351.402
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 42b)	871.463	404.408
	1.265.935	755.810
<u>Liabilitas lain-lain</u>		
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	4.198.387	4.578.611
Liabilitas Sewa	213.451	-
Lainnya	989.102	402.216
	5.400.940	4.980.827
Total	6.666.875	5.736.637

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

30. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

Employee benefits liabilities
Bonuses and tantiem
Long term employee benefits (Note 42b)

Other liabilities
Developers' security deposits (liabilities to third party)
Lease Liability
Others

Total

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which has not yet been distributed at the end of the year.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN
(lanjutan)

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional masing-masing per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.590 juta dan Rp165.090 juta.

30. EMPLOYEE BENEFIT AND OTHER LIABILITIES
(continued)

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation to the Bank.

The Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation, therefore the definite amount of potential loss from this case is still cannot be determined yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp71,590 million and Rp165,090 million, respectively.

31. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

31. EQUITY

a. Capital Stock

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

31 Desember/December 31, 2020					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Direksi:					Board of Directors:
Nixon L.P Napitupulu	1.220.800	500	610	0,00%	Nixon L.P Napitupulu
Andi Nirwoto	70.200	500	35	0,00%	Andi Nirwoto
Yossi Istanto	70.200	500	35	0,00%	Yossi Istanto
Hirwandi Gafar	56.000	500	28	0,00%	Hirwandi Gafar
Elisabeth Novie Riswati	25.000	500	13	0,00%	Elisabeth Novie Riswati
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.234.557.800	500	2.117.279	40,00%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2019					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Direksi:					Board of Directors:
Pahala Nugraha Mansury	453.100	500	227	0,00%	Pahala Nugraha Mansury
Nixon L.P Napitupulu	236.600	500	118	0,00%	Nixon L.P Napitupulu
Yossi Istanto	70.200	500	35	0,00%	Yossi Istanto
Andi Nirwoto	70.200	500	35	0,00%	Andi Nirwoto
Hirwandi Gafar	56.000	500	28	0,00%	Hirwandi Gafar
Elisabeth Novie Riswati	25.000	500	13		Elisabeth Novie Riswati
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.235.088.900	500	2.117.544	40,00%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%	Total

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

a. Capital Stock (continued)

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows (continued):

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of the Bank.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam rangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Perseroan.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1.442.200 lembar saham dan 911.100 lembar saham atau 0,01% dan 0,01% dari jumlah modal dasar.

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2009	-
Tambahan Modal disetor akibat penawaran umum perdana tahun 2009	708.017
Biaya emisi penerbitan saham	(68.391)
	639.626
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 1 dan 2 Tahun 2011	94.733
	734.359
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 Tahun 2012	5.219
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 1 dan 2 Tahun 2012	1.130
	740.708

31. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The shares ownership by board of commissioners and director follows the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, where members of the Non-Independent Board of Directors and Board of Commissioners are given variable remuneration in the form of the Company's shares.

Shares held by the Board of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to 1,442,200 shares and 911,100 shares or 0.01% and 0.01% of the total authorized capital, respectively.

b. Additional Paid In Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

Balance as January 1, 2009
Additional Paid in capital due to Initial Public Offering in 2009
Shares Issuance Cost
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP I in 2011
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP I in 2012
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP II in 2012

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2012	1.111.949
Biaya emisi penerbitan saham	(59.154)
	1.793.503
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6 Tahun 2013	11.063
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 3 dan 4 Tahun 2013	117.623
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 1 dan 2 Tahun 2013	103.575
	2.025.764
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8 Tahun 2014	1.840
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 5 dan 6 Tahun 2014	243
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 3 dan 4 Tahun 2014	289
	2.028.136
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8 serta MESOP III tahap 5 dan 6 Tahun 2015	18.462
	2.046.598
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 Tahun 2016	7.856
	2.054.454

31. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital (continued)

The movements in additional paid in capital are as follows: (continued)

Additional paid in capital due to Right Issue I in 2012	
Shares Issuance Cost	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP I in 2013	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP II in 2013	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP III in 2013	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP I in 2014	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP II in 2014	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP III in 2014	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015	
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phase 7 of MESOP III in 2016	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2019

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp20.927
- b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp188.337

Penggunaan Laba Tahun 2018

Alokasi penggunaan laba untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp561.585
- b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.246.338

32. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

a. Pendapatan Bunga

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Kredit yang diberikan dan piutang		
Kredit yang diberikan	21.122.233	22.259.815
Giro pada Bank Indonesia	240.219	73.906
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	269.565	236.862
Giro pada bank lain	3.973	1.962
Tagihan Lainnya	2.570	-
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	1.751	3.952
Nilai wajar melalui Laba rugi		
Obligasi pemerintah	70.765	29.697
Efek-efek	39.935	7.522
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi pemerintah	631.122	-
Efek-efek	338.877	-
Diukur pada biaya perolehan amortisasi		
Obligasi pemerintah	107.959	-
Efek-efek	118.283	-
Tersedia untuk dijual		
Obligasi pemerintah	-	248.110
Efek-efek	-	181.557
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi pemerintah	-	134.669
Efek-efek	-	93.380
Total	22.947.252	23.271.432

31. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2019

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2019 are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp20,927
- b. Appropriated retained earnings amounted to Rp188,337

Profit Distribution for Year 2018

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2018 are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp561,585
- b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,246,338

32. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT SHARING

a. Interest Income

This account consists of:

Loans and receivables
Loans
Current accounts with Bank Indonesia
Placements with Bank Indonesia and other banks
Current accounts with other banks
Others receivable
Securities purchased under agreement to resell
Fair value through profit or loss
Government bonds
Securities
Fair value through other comprehensive income
Government bonds
Securities
Amortized cost
Government bonds
Securities
Available-for-sale
Government bonds
Securities
Held-to-maturity
Government bonds
Securities

Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL
(lanjutan)

b. Bagi hasil dan marjin unit syariah

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Pendapatan <i>murabahah</i>	1.470.905	1.775.424
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	239.827	265.349
Pendapatan <i>istishna</i>	193.899	184.071
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	5.451	12.504
Pendapatan usaha utama lainnya	248.446	211.094
Total	2.158.528	2.448.442

32. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT SHARING (continued)

b. Profit Sharing and Margin from Sharia Unit

This account consists of:

Income from murabahah
Musyarakah profit sharing income
Income from istishna
Mudharabah profit sharing income
Other main operating income

Total

33. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS

a. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Deposito berjangka	8.085.615	8.770.985
Pinjaman yang diterima	1.622.482	1.390.262
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.551.989	1.763.945
Tabungan	1.268.545	1.580.734
Giro	1.199.274	910.075
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	740.373	273.167
Simpanan dari bank lain	128.976	405.373
Kewajiban Derivatif	65.261	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.977	72.753
Total	14.687.492	15.167.294

33. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS EXPENSES

a. Interest Expense

This account consists of:

Time deposits
Fund borrowings
Securities issued
Savings deposits
Demand deposits
Subordinated Loan
and securities
Deposits from other banks
Derivative Liabilities
Securities sold under
repurchase agreements

Total

b. Bonus Simpanan Wadiah dan Hak Pihak Ketiga
 atas Bagi hasil *Mudharabah*

Bonus simpanan wadiah:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Beban bonus simpanan wadiah:		
Giro wadiah	18.133	13.055
Tabungan wadiah	3.649	2.586
Total	21.782	15.641

b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share
 on Return of *Mudharabah*

Wadiah deposit bonus:

Wadiah bonus expenses:
Wadiah demand deposit
Wadiah saving deposit

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS
(lanjutan)

- b. Bonus Simpanan Wadiah dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah (lanjutan)

Hak bagi hasil mudharabah:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah:		
Deposito mudharabah	1.035.845	1.225.139
Pinjaman mudharabah	155.022	25.217
Tabungan mudharabah	132.603	142.479
Giro mudharabah	12.047	24.595
Total	1.335.517	1.417.430

33. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS
EXPENSES (continued)

- b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share on Return of Mudharabah (continued)

Mudharabah share on return:

Third Parties' Share on Return
of Mudharabah:
Mudharabah time deposit
Mudharabah borrowing
Mudharabah saving deposit
Mudharabah demand deposit
Total

34. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA -
LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Jasa perbankan	136.732	151.997
Servicing Fee Sekuritisasi Aset	127.866	116.995
Jasa penagihan - payment points	13.035	16.265
Lainnya	430.662	233.109
Total	708.295	518.366

34. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

Bank services
Securitization Assets Servicing Fee
Collection services - payment points
Others

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa safe deposit box dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Lainnya terutama terdiri dari provisi atas garansi bank yang diterbitkan, komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual melalui Bank, pembalikan atas cadangan risiko pajak serta pembalikan cadangan operasional terkait dengan kasus pemalsuan bilyet deposito yang kasusnya telah dimenangkan oleh Bank di tingkat Mahkamah Agung.

Others consist mainly of provision from bank guarantee issued, commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers, reversal of tax risks reserves and reversal of operational reserves related to cases of fictitious deposit bills which has been won by the Bank in Supreme Court.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN
PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN
NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

35. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT
LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL
ASSETS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2020	2019	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	2.240.040	3.479.546	Loans and sharia financing/ receivables (Note 11)
Efek-efek (Catatan 8)	27.745	7.205	Securities (Note 8)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)	(9.318)	-	Securities purchased under agreement to resell (Note 10)
Giro pada bank lain (Catatan 6)	(35)	(86)	Current accounts with other banks (Note 6)
Tagihan Akseptasi (Catatan 13)	47	-	Acceptance Receivable (Note 13)
Total	2.258.479	3.486.665	Total

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

36. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2020	2019	
Perbaikan dan pemeliharaan	1.017.544	1.036.317	Repairs and maintenance
Sewa bukan PSAK 73	440.500	594.761	Lease expense non SFAS 73
Penyusutan (Catatan 15)	348.337	314.233	Depreciation (Note 15)
Listrik, air dan komunikasi	283.183	263.847	Electricity, water and telecommunications
Promosi	268.326	455.292	Promotion
Beban depresiasi aset hak guna (Catatan 15)	180.430	-	Depreciation expense of right of use asset (Notes 15)
Beban kantor	180.299	350.709	Office expenses
Jasa profesional	109.071	113.041	Professional fees
Transportasi	78.505	130.414	Transportation
Outsourcing	71.507	90.122	Outsourcing
Beban bunga liabilitas sewa	16.558	-	Interest expense on lease liabilities
Lainnya	109.292	76.286	Others
Total	3.103.552	3.425.022	Total

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi *branchless banking*, biaya operasional program pemerintah, premi asuransi untuk gedung, premi asuransi kas dalam perjalanan serta kas dalam khazanah.

Others consist mainly of *branchless banking* administration expense, government program operational expense insurance premium on the building, insurance premium on in transit and cash in vault.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Gaji dan upah		
Rutin	1.859.049	1.876.710
Tidak rutin	1.045.496	868.902
Pelatihan dan pengembangan	42.045	95.714
Lainnya	30.618	22.629
Total	2.977.208	2.863.955

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

37. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

Salaries and wages
Recurring
Non-recurring
Training and development
Others
Total

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

38. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Imbalan atas jasa penagihan	72.627	76.665
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	26.519	38.046
Lainnya	186.636	191.736
Total	285.782	306.447

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi dan jamuan makan dan minum rapat, beban terkait dengan restrukturisasi struktur organisasi Bank, serta beban cadangan atas potensi risiko operasional.

38. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of:

Fees for collection services
Loss on bad debt settlement
Others
Total

Others consist mainly of representation and entertainment expense, expense related to the restructuring of the Bank's organization structure and provision for potential operational risk.

39. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Pendapatan sewa gedung	105	127
Pendapatan (beban) lainnya - neto	(59.533)	(110.838)
Total	(59.428)	(110.711)

Lainnya terutama terdiri dari beban denda administrasi, keuntungan/(kerugian) jual beli mata uang asing dan beban bina lingkungan.

39. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

This account consists of:

Building rental income equipment
Other income (expense) - net
Total

Others consist mainly of administration penalty expense, gain/(loss) on trading of foreign currency and community development expense.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERPAJAKAN

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2020	2019
Laba sebelum beban pajak	2.270.857	411.062
Beda temporer:		
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	743.635	1.939.322
Penyisihan untuk imbalan kerja	69.542	(25.777)
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(62.524)	18.865
Penyusutan Aset Hak Guna	57.257	-
	807.910	1.932.410
Beda tetap:		
Kenikmatan karyawan	246.395	240.378
Beban kantor	2.331	37.891
Sewa	30.133	105.390
Sumbangan	44.374	26.703
Perbaikan dan pemeliharaan	6.738	11.771
Dana sosial dan representasi	40.378	53.334
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	3.308	1.972
Lain-lain	24.613	120.619
Pendapatan sewa tarif final	(104)	(127)
	398.166	597.931
Taksiran penghasilan kena pajak	3.476.933	2.941.403
Beban pajak penghasilan	660.617	588.281
Pajak penghasilan Pasal 25	(339.787)	(586.602)
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 18)	320.830	1.679

40. TAXATION

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Income before tax expense
Temporary differences:
Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Provision for employee benefits
Decrease (increase) in fair value of trading securities
Depreciation of Right of Use Asset
Permanent differences:
Employee welfare
Office expense
Rent
Donations
Repairs and maintenance
Social funds and representation
Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes
Others
Rent income subject to final tax
Estimated taxable income
Income tax expense
Income tax - Article 25
Corporate income tax payable (Note 18)

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

40. TAXATION (continued)

b. Beban/(manfaat) pajak

b. Tax Expense/(benefit)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Beban pajak - kini	660.617	588.281	Current Tax Expense
Beban/(manfaat) pajak - tangguhan	7.882	(386.482)	Deferred tax expense/(benefit)
Total	668.499	201.799	Total

c. Rincian pendapatan (beban) pajak tangguhan - neto dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

c. The details of deferred tax benefit (expense)-net computed by computing the effect of temporary differences on tax rate are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pembentukan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(7.107)	387.864	Provision for allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
Penyisihan untuk imbalan kerja	(505)	(5.155)	Provision for employee benefits
Penyusutan aset hak guna	9.259	-	Right of use depreciation
Kenaikan (penurunan) nilai wajar efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(9.529)	3.773	Increase (decrease) in fair value of trading securities
Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan - Neto	(7.882)	386.482	Deferred Tax benefit (expense) - Net

d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

d. Deferred tax assets (liabilities)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

	31 Desember/December 2020							
	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak penerapan awal PSAK 71/ Effect of initial implementation SFAS 71	Dampak Perubahan tarif pajak yang ditangguhkan ke laporan laba rugi/ Effect of changes in tax rate - deferred to statement of profit or loss and other income	Dampak Perubahan tarif pajak yang ditangguhkan ke ekuitas/ Effect of changes in tax rate - deferred to equity	Dikreditkan/(dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to statement of profit or loss and other income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	497.255	1.523.043	(90.439)	-	116.480	-	2.046.339	Allowance for impairment losses loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain kredit yang diberikan	6.964	1.609	-	-	(4.743)	-	3.830	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	1.067	-	-	-	(256)	-	811	Allowance for impairment losses on non earning assets
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	43.268	-	-	-	(28.149)	-	15.119	Allowance for legal, fraud and others
Cadangan imbalan kerja	90.223	-	(2.768)	(12.817)	2.263	73.362	150.263	Allowance for employee benefits
Penyusutan aset hak guna (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan	-	19.895	(1.620)	-	10.879	-	29.154	Depreciation of right of use asset
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada Nilai Wajar melalui penghasilan komprehensif	(6.807)	-	-	-	(9.529)	-	(16.336)	Unrealized (gain) loss on trading securities
	(2.865)	-	-	-	-	(253.922)	(256.787)	Unrealized (gain) loss on fair value through income securities
Aset pajak tangguhan - neto	629.105	1.544.547	(94.827)	(12.817)	86.945	(180.560)	1.972.393	Deferred tax assets - net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

40. TAXATION (continued)

d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows (continued):

31 Desember/December 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statement of profit or loss and other income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	110.815	386.440	-	497.255	Allowance for impairment losses loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain kredit yang diberikan	5.540	1.424	-	6.964	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	1.067	-	-	1.067	Allowance for impairment losses on non earning assets
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	43.268	-	-	43.268	Allowance for legal, fraud and others
Cadangan imbalan kerja (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan	74.330	(5.155)	21.048	90.223	Allowance for employee benefits
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(10.580)	3.773	-	(6.807)	Unrealized (gain) loss on trading securities
	35.810	-	(38.675)	(2.865)	Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income securities
Total Aset	260.251	386.482	(17.627)	629.105	Total Asset

e. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

e. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2020 and, 2019, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Laba sebelum beban pajak	2.270.857	411.062	Income before tax expense
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(431.462)	(82.212)	Tax expense at the applicable tax rate
Beda tetap	(75.652)	(119.587)	Permanent differences
Dampak penggunaan tarif pajak	(161.385)	-	Effect of tax rate adjustments
Beban pajak	(668.499)	(201.799)	Tax expense

f. Uang Muka Pajak

f. Prepaid Tax

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tahun Pajak 2012	48.683	48.683	Fiscal Year 2012
Tahun Pajak 2013	156.774	156.774	Fiscal Year 2013
Tahun Pajak 2014	196.971	196.971	Fiscal Year 2014
Saldo akhir tahun (Catatan 17)	402.428	402.428	Balance at end of year (Note 17)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

Namun demikian, berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tahun 2015 tertanggal 3 Agustus 2015 dan terakhir digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tertanggal 10 Juni 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tertanggal 18 Juni 2020 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

40. TAXATION (continued)

Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax

Under article paragraph 17 (2) of Law No. 7 year 1983 regarding "Income Tax" which was revised for the fourth time by Law No. 36 year 2008, the corporate tax rate is 25%.

In addition, based on the above Law No. 36 year 2008 dated September 23, 2008, the Government Regulation No. 81 year 2007 dated December 28, 2007, which subsequently has been revoked and replaced by Government Regulation (GR) No. 77 Year 2013 dated November 21, 2013 and replaced by Government Regulation (GR) No. 56 Year 2015 dated August 3, 2015 and latest amendment by Government Regulation (GR) No 29 Year 2020 dated June 10, 2020 "Income Tax Facilities in relation to handling Corona Virus Disease (Covid-19) and Government Regulation (GR) No 30 Year 2020 dated June 18, 2020 on "Reduction of the Income Tax Rate on Resident Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies" and the Ministry of Finance Regulation No. 238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 on "The Guidelines on the Implementation and Supervision on the Rate Reduction for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies" stipulates that resident public companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate at 5% lower than the highest existing income tax rate, provided they meet the prescribed criteria, public companies whose shares are owned by the public at a minimum of 40% or more of the total paid-up shares are traded in the Indonesia Stock Exchange and such shares are owned by at least 300 (three hundred) parties and each party owning only less than 5% of the total paid-up shares. These requirements should be fulfilled by the public companies for a minimum period of 183 (one hundred and eighty three) days in 1 (one) fiscal year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

**Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2021-0023 tanggal 4 Januari 2021 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 4 Januari 2021 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2020-0148 tanggal 6 Januari 2020 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19% dan 20%.

40. TAXATION (continued)

**Reduction of the Tax Rate of Corporate Income
Tax (continued)**

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

Based on Letter No. DE//2020-0023 dated January 4, 2021 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 4, 2021 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2020), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2020 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE//2020-0148 dated January 6, 2020 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3, 2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2019), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2019 were fulfilled by the Bank.

Bank's corporate income tax for the year ended 31 December 2020 and 2019 are calculated using the tax rate of 19% and 20%.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012 atas Kantor Cabang Pekanbaru. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2012		
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146
Total	2.624	1.260

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 17).

40. TAXATION (continued)

Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2012

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) on the Pekanbaru branch office for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

	Year 2012
SKPKB Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14	
SKPKB Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14	
Total	

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) amounting to Rp3,884. The payment is recorded as other assets (Note 17).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Pada tanggal 2 April 2016 Bank mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 19 Oktober 2017 Pengadilan Pajak telah menerbitkan surat keputusan yang memenangkan Wajib Pajak dan memerintahkan kantor pajak untuk membayar kembali uang muka pajak tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 tanggal 22 Mei 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2012, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2012 sebesar Rp59.307 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2012	
SKPKB PPh Badan No.00003/206/12/093/17	40.073

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp4.834 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 21 Agustus 2017.

Namun demikian Bank tidak setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp48.683 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima oleh DJP pada tanggal 12 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 17).

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 25 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Sampai dengan tanggal laporan ini proses Banding tersebut masih berjalan.

40. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2012 (continued)

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment TAL. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. On April 2, 2016, the Bank filed the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters. On October 19, 2017, Tax Court has issued an appeal decision in favour of the Bank's Tax Appeal and order tax office to refund the prepaid tax.

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-03/PJ.0401/2017 dated May 22, 2017, regarding tax audit result for the year of 2012, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2012 amounting to Rp59,307 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)	
		Year 2012
		SKPKB Article Corporate Income Tax No.00003/206/12/093/17
	19.234	

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp4,834 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on August 21, 2017.

However, the Bank does not agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 and has submitted the objection letter dated October 10, 2017 which has been received by the Tax Office on October 12, 2017. This payment is recorded as other assets (Note 17).

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected all of the Bank's objection request, on September 25, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. As the date of this report, the appeal process is still in progress.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Semarang untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2013		
SKPKB PPh Pasal 21 No.00001/243/13/511/16	64	30
SKPKB PPh Pasal 23 No.00060/203/13/511/16	0,2	0,1
Total	64,2	30,1
	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00012/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00013/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00014/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00015/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00016/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00017/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00018/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00019/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00020/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00021/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00022/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00023/240/13/511/16	381	183
Total	4.572	2.196

Pada tanggal 17 November 2016, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yaitu sebesar Rp94 telah dicatat sebagai biaya pajak di tahun 2016 karena bank setuju atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar Rp6.768 dicatat sebagai uang muka pajak (Catatan 17) karena Bank tidak setuju dengan SKPKB tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2017, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas.

40. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 dated September 21, 2016, regarding tax audit result on the Semarang Branch Office for the year of 2013, Bank has received Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) as follows:

	Year 2013
	SKPKB Article 21 No.00001/243/13/511/16
	SKPKB Article 23 No.00060/203/13/511/16
	Total
	SKPKB Article 4 (2) No.00012/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00013/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00014/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00015/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00016/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00017/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00018/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00019/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00020/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00021/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00022/240/13/511/16
	SKPKB Article 4 (2) No.00023/240/13/511/16
	Total

On November 17, 2016, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letters (TAL) of Tax Underpayment (SKPKB). The payment of the TAL of Article 21 and Article 23 amounted to Rp94 has been charged as tax expenses in 2016 since the Bank has agreed with the said SKPKB. However, in regard to the payment of the SKPKB of Article 4 paragraph (2) amounting to Rp6,768 has been recognized as prepaid tax (Note 17) since Bank did not agree with the SKPKB. On January 6, 2017, the Bank filed letters of tax objection on the aforementioned TAL of Article 4 paragraph (2).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menerima sebagian dari permohonan Bank. Berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp57 yang telah dicatat sebagai pengurang uang muka pajak (catatan 17). Atas pajak yang masih belum diterima, kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2018.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Pengadilan pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan sebagian dari Banding oleh Bank. Pengembalian pajak tersebut telah diterima pada tanggal 20 Juni 2019 dan 28 Oktober 2019.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2013 sebesar Rp183.958 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	Year 2013
Tahun 2013 SKPKB PPh Badan No.00006/206/13/093/17	124.296	59.662	SKPKB Article Corporate Income Tax No.00006/206/13/093/17

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp9.945 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 4 September 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp156.773 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat tanggal 26 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 17).

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 18 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Sampai dengan tanggal laporan ini proses Banding tersebut masih berjalan.

40. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

On October 16, 2017, the Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has partially granted the Bank's objection request. Based on the said Objection Decision Letter the Tax Office has paid the tax overpayment amounting to Rp57 which was booked as a deduction to the prepaid taxes (Note 17). Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 12, 2018 to the Tax Court for the remaining ungranted amounts.

On May 2, 2019 The Tax Court has issued a decision letter which has partially granted the Bank's appeal. The refund has been received on June 20, 2019 and October 28, 2019.

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 dated July 19, 2017, regarding tax audit result for the year of 2013, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2013 amounting to Rp183,958 as follows:

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp9,945 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on September 4, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp156,773 and has submitted the objection letter dated October 26, 2017. The payment is recorded as other assets (Note 17).

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on September 18, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. As the date of this report, the appeal process is still being processed by the Tax Court.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 5 Desember 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2014 sebesar Rp206.337 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2014		
SKPKB PPh Badan No.00008/206/14/093/17	139.417	66.920

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp 13.530 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 28 Desember 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp196.971 dan akan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 9 Maret 2018.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 2 November 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2019. Sampai dengan tanggal laporan ini proses Banding tersebut masih berjalan.

Pajak atas penilaian kembali aset tetap

Bank berdasarkan surat No.1195/S/DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar "Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2016 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan estimasi atas kenaikan nilai wajar tanah, Bank telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp40.035 pada tanggal 10 Desember 2015.

40. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2014

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 dated December 5, 2017, regarding tax audit result for the year of 2014, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax amounting to Rp206,337 for the year of 2014 as follows:

	Year 2014
SKPKB Article Corporate Income Tax No.00008/206/14/093/17	

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp13,530 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on December 28, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of Corporate Income Tax amounting to Rp196,971 and submitted the objection letter to the Tax Office dated March 9, 2018.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on November 2, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 31, 2019 to the Tax Court. As the date of this report, the appeal process is still in progress.

Tax for revaluation of fixed assets

The Bank based on the letter No. 1195/S/DIR/XII/2015 dated December 8, 2015 have submitted an application regarding "Revaluation of fixed assets for tax purposes on 2016 by tax payer that have not revalued fixed assets".

Based on the regulation No.191/PMK.010/2015 on October 15, 2015, from the Ministry of Finance, applications that are submitted up to December 31, 2015 will receive special treatment in the form of final tax rate of 3%. In connection with the estimated increase in fair value of land, the Bank has made tax payment amounting to Rp40,035 on December 10, 2015.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak atas penilaian kembali aset tetap (lanjutan)

Kemudian berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Bank telah menyampaikan surat No.473/S/DIR/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal tambahan dokumen terkait proses penilaian kembali aset tetap dimana pada tanggal 20 Mei 2016, Bank telah melunasi sisa pembayaran pajak sebesar Rp35.713. Kemudian Kantor Pajak telah menerbitkan surat Keputusan DJP No.KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016 mengenai persetujuan atas permohonan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh Bank.

40. TAXATION (continued)

Tax for revaluation of fixed assets (continued)

Based on the revaluation report issued by Public Appraisal Company, the Bank has reported a letter No.473/S/DIR/V/2016 dated May 23, 2016 regarding additional data for assets revaluation, in which on May 20, 2016, the Bank has paid the remaining tax of Rp35,713. Furthermore, the Tax Office has issued a Decision Letter No.KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016 that has granted the Bank's request for assets revaluation.

41. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

41. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
KOMITMEN			COMMITMENTS
Liabilitas Komitmen			Commitments payable
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	13.039.190	15.865.327	Unused loan facility commitments
KONTINJENSI			CONTINGENCIES
Tagihan Kontinjensi			Contingent receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3.148.038	2.793.877	Interest income on non-performing assets
Liabilitas Kontinjensi			Contingent payables
Garansi yang diterbitkan (Catatan 29)	(764.042)	(2.009.682)	Guarantees issued (Note 29)
Kontinjensi - neto	2.383.996	784.195	Contingencies - net

42. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

42. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the Pension Fund regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti (DPBTN), namun demikian, karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp23.919 dan Rp29.059 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 (satu) tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 0,00% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 3,50%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 31 Januari 2021 dari aktuaris Willis Towers Watson dan 3 Januari 2020 dari aktuaris independen Bestama Aktuarial dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

42. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined contribution plan

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan (DPBTN), instead, the Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp23,919 and Rp29,059 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within 1 (one) year before the normal pension age (56 years old).

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 0.00% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 3.50%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2020 and 2019, are based on the actuarial reports dated January 31, 2021 of Willis Towers Watson and January 3, 2020, of Bestama Aktuarial respectively, an independent actuary using the "Projected Unit Credit" method.

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Asumsi ekonomi:			Economics assumptions:
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6,00%	6,00%	Basic pensionable annual salary increase rate
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	6,50%	8,20%	Annual discount rate before normal retirement age
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat mortalita (kematian)	TMI-2019	TMI-2011	Mortality rate
Tingkat cacat	1,00% mortalita/ mortality	1,00% mortalita/ mortality	Disability rate

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

42. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Asumsi lainnya (lanjutan):			Other assumptions (continued):
Tingkat Diskonto per tahun untuk:			Annual Discount rate:
Imbalan Jangka Panjang Lainnya -			Other long-term benefits
Penghargaan Masa Kerja	6,00%	7,70%	Gratuity
Program Pesangon Pensiun -			Retirement severance program
Selisih DPLK	6,00%	8,20%	Difference from DPLK
Masa Persiapan Pensiun	6,00%	8,00%	Retirement Preparation Period
Program Pensiun Imbalan Pasti	6,50%	8,20%	Deferred Benefit Pension Plan
Program Kesejahteraan	6,25%	6,70%	Welfare Program
 Tingkat pengunduran diri			 Turnover rate
Umur 25	5,00%	5,00%	Age 25
Umur 30	5,00%	5,00%	Age 30
Umur 35	5,00%	5,00%	Age 35
Umur 40	5,00%	5,00%	Age 40
Umur 45	5,00%	5,00%	Age 45
Umur 50	3,00%	3,00%	Age 50
Umur 55	9,00%	9,00%	Age 55
 Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.			 Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Biaya imbalan kerja

a. Employee benefits expense

31 Desember/December 31, 2020			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Biaya jasa kini	35.679	117.060	152.739
Iuran peserta	(7.383)	(7.602)	(14.985)
Beban			
bunga neto	82	32.503	32.585
Kerugian aktuarial	-	9.038	9.038
Beban imbalan kerja - neto	28.378	150.999	179.377
31 Desember/December 31, 2019			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Biaya jasa kini	32.736	49.271	82.007
Iuran peserta	(7.603)	(7.548)	(15.151)
Beban (pendapatan)			
bunga neto	(639)	24.587	23.948
Kerugian aktuarial	-	(1.491)	(1.491)
Biaya jasa lalu	4.699	-	4.699
Beban imbalan kerja - neto	29.193	64.819	94.012

Current service cost
Contribution from participant

Net interest cost
Actuarial loss

Employee benefits
expense - net

Current service cost
Contribution from participant

Net interest (income) cost
Actuarial loss
Past service cost

Employee benefits
expense - net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

42. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja

b. Movements of liabilities for employee benefits

31 Desember/December 31, 2020				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	-	404.408	404.408	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	28.378	150.999	179.377	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	192.633	204.879	397.512	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran iuran tahun berjalan	(38.349)	(71.485)	(109.834)	Payment contribution from current year
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 30)	182.662	688.801	871.463	Balance liabilities at end of year (Note 30)

31 Desember/December 31, 2019				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	-	297.317	297.317	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	29.193	64.819	94.012	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	10.296	122.573	132.869	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran iuran tahun berjalan	(39.489)	(80.301)	(119.790)	Payment contribution from current year
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 30)	-	404.408	404.408	Balance liabilities at end of year (Note 30)

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

31 Desember/December 31, 2020				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.823.921	1.293.693	3.117.614	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	35.679	117.060	152.739	Current service cost
Beban bunga	145.962	90.133	236.095	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(120.335)	(118.630)	(238.965)	Benefits paid
	308.591	285.590	594.181	Actuarial loss/(gain)
Saldo pada akhir tahun	2.193.818	1.667.846	3.861.664	Balance at end of year

31 Desember/December 31, 2019				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.613.352	1.058.758	2.672.110	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	32.736	49.271	82.007	Current service cost
Beban bunga	140.355	84.736	225.091	Interest cost
Biaya jasa lalu	4.699	-	4.699	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(105.392)	(107.006)	(212.398)	Benefits paid
	138.171	207.934	346.105	Actuarial loss/(gain)
Saldo pada akhir tahun	1.823.921	1.293.693	3.117.614	Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

42. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2020			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	1.934.346	915.854	2.850.200
Hasil pengembangan aset program	151.415	102.731	254.146
Kontribusi Bank	38.349	29.373	67.722
Kontribusi pegawai	7.385	7.601	14.986
Manfaat yang dibayarkan	(120.335)	(76.518)	(196.853)
Saldo pada akhir tahun	2.011.160	979.041	2.990.201

Balance at beginning of year
Return on plan asset
Contributions by the Bank
Employees contribution
Benefits paid
Balance at end of year

31 Desember/December 31, 2019			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	1.807.331	890.313	2.697.644
Hasil pengembangan aset program	185.315	44.699	230.014
Kontribusi Bank	39.489	36.164	75.653
Kontribusi pegawai	7.603	7.548	15.151
Manfaat yang dibayarkan	(105.392)	(62.870)	(168.262)
Saldo pada akhir tahun	1.934.346	915.854	2.850.200

Balance at beginning of year
Return on plan asset
Contributions by the Bank
Employees contribution
Benefits paid
Balance at end of year

- e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

- e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

31 Desember/December 31, 2020			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	54.879	188.505	243.384
Kerugian aktuaris	308.591	276.552	585.143
Imbal hasil atas aset program	3.410	(34.837)	(31.427)
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(119.369)	(36.835)	(156.204)
Saldo pada akhir tahun	247.511	393.385	640.896

Balance at beginning of year
Actuary loss
Return on plan assets
Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2019			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	44.584	65.931	110.515
Kerugian aktuaris	138.171	209.425	347.596
Imbal hasil atas aset program	(27.056)	25.760	(1.296)
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(100.820)	(112.611)	(213.431)
Saldo pada akhir tahun	54.879	188.505	243.384

Balance at beginning of year
Actuary loss
Return on plan assets
Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Balance at the end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

42. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham.

- f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

Funding status of employee benefit as of December 31, 2020 and 2019 are as follow:

31 Desember/December 31, 2020				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Kesejahteraan/ Welfare Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.011.160	979.041	2.990.201	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.193.822)	(1.099.372)	(3.293.194)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(182.662)	(120.331)	(302.993)	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	-	-	Asset adjustment
Kewajiban - neto	(182.662)	(120.331)	(302.993)	Liabilities - net
31 Desember/December 31, 2019				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Kesejahteraan/ Welfare Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	1.934.346	915.853	2.850.199	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(1.823.924)	(889.281)	(2.713.205)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	110.422	26.572	136.994	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	(110.422)	(26.572)	(136.994)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	-	-	-	Liabilities - net

Per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada selisih lebih aset Program Pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no recognition of surplus of Pension Plan assets in the statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja*) (tidak diaudit) terhadap perubahan asumsi aktuarial sebagai berikut:

- g. The sensitivity of employee benefit liability*) (unaudited) to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tingkat diskonto			Discount rate:
Kenaikan 1%	(436.922)	(136.766)	Increase 1%
Penurunan 1%	389.431	185.820	Decrease 1%
Tingkat kenaikan gaji			Salary increase rate:
Kenaikan 1%	166.072	121.943	Increase 1%
Penurunan 1%	(220.340)	(85.268)	Decrease 1%

*) Tidak termasuk manfaat cuti besar

*) Exclude long leave benefit

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

42. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pension yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2020				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Kurang dari 1 tahun	227.585	194.364	421.949	Less than a year
2 sampai 5 tahun	424.162	485.975	910.137	Between 2 to 5 years
5 sampai 10 tahun	977.105	728.691	1.705.796	Between 5 to 10 years
Total	1.628.852	1.409.030	3.037.882	Total

31 Desember/December 31, 2019				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Kurang dari 1 tahun	72.267	159.895	232.162	Less than a year
2 sampai 5 tahun	89.900	287.389	377.289	Between 2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	58.340	8.655.471	8.713.811	Over 5 years
Total	220.507	9.102.755	9.323.262	Total

i. Risiko

i. Risk

Bank terespos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

- Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.
- Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

- The exposed risks in defined contribution plan is lower return on investment compared to assumption on discount rate. The accumulated actual contribution to be lower than its assumption resulted increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.
- The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in contribution paid to Pension Fund.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. PELAPORAN SEGMENT

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

43. SEGMENT REPORTING

Segment information based on business type are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	22.947.252	2.158.528	-	25.105.780	Segment income
Beban segmen	(14.834.638)	(1.357.299)	-	(16.191.937)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	8.112.614	801.229	-	8.913.843	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.433.218	81.389	-	2.514.607	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.818.757)	(439.722)	-	(2.258.479)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi-bersih	(3.784)	-	-	(3.784)	Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies
Beban operasional lainnya	(6.330.144)	(505.758)	-	(6.835.902)	Other operating expenses
Laba operasional	2.393.147	(62.862)	-	2.330.285	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(257.148)	197.720	-	(59.428)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak				(668.499)	Tax expense
Laba tahun berjalan				1.602.358	Income for the year
Total aset	334.200.414	33.032.487	(6.024.495)	361.208.406	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	320.010.199	27.234.857	(6.024.495)	341.220.561	Total liabilities and temporary syirkah fund
	31 Desember/December 31, 2019				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	23.271.432	2.448.442	-	25.719.874	Segment income
Beban segmen	(15.325.002)	(1.433.071)	-	(16.758.073)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	7.946.430	1.015.371	-	8.961.801	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.035.424	74.428	-	2.109.852	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.099.614)	(387.051)	-	(3.486.665)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban operasional lainnya	(6.599.177)	(464.038)	-	(7.063.215)	Other operating expenses
Laba operasional	283.063	238.710	-	521.773	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(110.461)	(250)	-	(110.711)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak				(201.799)	Tax expense
Laba tahun berjalan				209.263	Income for the year
Total aset	288.173.172	28.385.675	(4.782.019)	311.776.828	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	268.291.414	24.431.238	(4.782.019)	287.940.633	Total liabilities and temporary syirkah fund

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

**44. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS**

Based on Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion, from the previous Rp100 million, effective on the date stated above.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
(lanjutan)**

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,50% dan 6,00% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 1,00% dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp469.360 dan Rp467.791.

**44. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS
(continued)**

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2020 and 2019 were 4.50% and 6.00% for each deposits in Rupiah and 1.00% and 1.75% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp469,360 and Rp467,791 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019:

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have been entered into the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Obligasi Pemerintah / Government Bonds
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan / Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Fund Borrowing and Securities issued
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Efek-efek, Tagihan Derivatif, Surat Berharga yang Diterbitkan / Current accounts with other banks, Securities, Derivative Receivable, Securities issued and Fund borrowings

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, dan Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Deposits from Other Banks, and Securities issued</i>
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain / <i>Current accounts with other banks, and Placement with Bank Indonesia and Other Banks</i>
PT Bank Mandiri Taspen Pos	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain / <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, and Deposits from Other Banks</i>
PT BRI Agroniaga Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Deposits from Other Banks, Securities issued</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Simpanan dari Bank Lain / <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, and Deposits from Other Banks</i>
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Indonesia Power	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek / <i>Securities</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek / <i>Securities</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Garansi yang diterbitkan / <i>Guarantees issued</i>
PT Timah (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek / <i>Securities</i>
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Securities, and Loans and sharia financing/receivables</i>
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi / <i>Acceptances Receivable</i>
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan / <i>Acceptances Receivable and Guarantees issued</i>
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi / <i>Acceptances Receivable</i>
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan / <i>Acceptances Receivable and Guarantees issued</i>
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek / <i>Securities</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Securities issued</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities purchased under agreement to resell and Securities issued</i>
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan / <i>Guarantees issued</i>
PT Mandiri Manajemen Investas	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek / <i>Securities</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Permodalan Nasional Madani	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Securities and Loans and sharia financing/receivables</i>
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Acceptance <i>Receivables, Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Waskita FIM Perkasa Realti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Anugrah Bhumi Maya S	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT PP Properti Jababeka Residen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Wika Realty	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Sinergi Investasi Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Adhi Commuter Property	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Rekayasa Engineering	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ <i>Securities issued and Guarantees issued</i>
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Puspetindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / Loans and sharia financing/receivables
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan / Securities Issued and Guarantees issued
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities issued
PT Asuransi Jiwa Bringin dan Jiwa Sejahtera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan Efek-efek / Loans and sharia financing/receivables and Securities
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan / Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan / Guarantees issued

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT BNI Life Insurance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Jasaraharja Putera	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities Issued</i>
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ <i>Securities issued and Guarantees issued</i>
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi/ <i>Fund borrowings and Subordinated Loan and securities</i>
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek / <i>Securities</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2020 and 2019 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Pertamina (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek / <i>Securities</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek / <i>Securities</i>
PT Jasa Marga Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek / <i>Securities</i>
BPJS Kesehatan	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang/ <i>Key Management including Director, Commissioner, Audit Committee, Head Division and Branch Manager</i>	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ <i>Control on company's activities</i>	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana Syirkah Temporer / <i>Loans and sharia financing/receivables, Deposit from Customers and Temporary Syirkah Fund</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 6)	221.896	357.624
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	337	101.078
Efek-efek (Catatan 8)	2.082.560	2.126.461
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	56.287.751	11.053.601
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)	-	200.000
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	17.218.144	17.289.222
Tagihan Akseptasi (Catatan 13)	196.071	487.052
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	76.006.759	31.615.038
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(85.879)	(11.060)
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	75.920.880	31.603.978
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	21,02%	10,14%

Assets
Current accounts with other banks (Note 6)
Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)
Securities (Note 8)
Government bonds (Note 9)
Securities purchased under agreement to resell (Note 10)
Loans and sharia financing/receivables (Note 11)
Acceptance Receivable (Note 13)
Total assets to related parties
Allowance for impairment losses for related parties
Total assets from related parties - net
Percentage of total assets from related parties to total assets

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah (Catatan 19, 20 dan 21)	141.471.045	93.053.060
Liabilitas Akseptasi (Catatan 24)	196.071	487.052
Surat-surat Berharga yang Diterbitkan (Catatan 25)	4.974.733	5.377.572
Pinjaman yang diterima (Catatan 26)	17.009.056	13.784.289
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi (Catatan 27)	5.999.878	5.999.669
Total liabilitas untuk pihak- pihak berelasi	169.650.783	118.701.642
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	52,79%	44,05%
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah (Catatan 19)	17.003	588.030
Tabungan Mudharabah (Catatan 20)	428.891	134.558
Deposito Mudharabah (Catatan 21)	5.341.952	2.034.644
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	5.787.846	2.757.232
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	29,17%	14,91%
	2020	2019
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.410	18.351
Efek-efek	318.871	151.664
Obligasi pemerintah	898.785	475.846
Simpanan Bank Lain	1.300	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.347
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.187.376	1.004.323
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	2.407.742	1.653.531
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	9,59%	6,43%

Liabilities
Deposits from customers (Notes 19, 20 and 21)
Acceptance Payable (Note 24)
Securities Issued (Note 25)
Fund borrowings (Note 26)
Subordinated Loan and securities (Note 27)
Total liabilities to related parties
Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities
Temporary Syirkah Funds
Mudharabah current accounts (Note 19)
Mudharabah savings deposits (Note 20)
Mudharabah time deposits (Note 21)
Total temporary syirkah funds to related parties
Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds
Interest income and income from profit sharing
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities
Government bonds
Deposits From Other Banks
Securities Purchased Under agreement to resell
Loans and sharia financing/ receivables
Total interest income and income from profit sharing from related parties
Percentage to total interest income and income from profit sharing

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	2020	2019	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus			Interest, profit sharing and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	4.922.168	4.762.165	Deposits from customers
Simpanan dari Bank Lain	1.300	-	Deposits from other banks
Surat-surat Berharga yang Diterbitkan	1.102.256	1.207.510	Securities Issued
Pinjaman yang diterima	1.192.094	860.282	Fund borrowings
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	534.242	273.167	Subordinated Loan and securities
Giro Mudharabah	927	4.978	Mudharabah current accounts
Tabungan Mudharabah	6.064	3.792	Mudharabah savings deposits
Deposito Mudharabah	103.796	49.426	Mudharabah time deposits
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	7.862.847	7.161.320	Total interest and bonus expenses from related parties
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	48,56%	42,73%	Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense
	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 29)			Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 29)
Garansi yang diterbitkan	14.601	364.059	Guarantees issued
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	1,91%	18,12%	Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts

- b. Transaksi dengan manajemen kunci

- b. Transactions with key management personnel

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Aset			Assets
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 11)	125.735	119.470	Loan and sharia financing/receivables (Note 11)
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(251)	(18)	Allowance for impairment losses for related parties
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	125.484	119.452	Total assets from related parties - net
Persentase terhadap total aset	0,03%	0,04%	Percentage to total assets

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

b. Transactions with key management personnel
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah (Catatan 19, 20 dan 21)	83.296	68.494
Liabilitas imbalan kerja	253.160	210.427
Total liabilitas dari manajemen kunci	336.456	278.921
Persentase terhadap total liabilitas	0,13%	0,10%

Liabilities	
Deposits from customers (Notes 19, 20 and 21)	
Employee benefits liability	
Total liabilities from key management personnel	
Percentage to total liabilities	

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Dana Syirkah Temporer		
Tabungan Mudharabah (Catatan 20)	1.969	2.019
Deposito Mudharabah (Catatan 21)	3.543	3.857
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	5.512	5.876
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	0,03%	0,03%

Temporary Syirkah Funds	
Mudharabah savings deposits (Note 20)	
Mudharabah time deposits (Note 21)	
Total temporary syirkah funds to related parties	
Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds	

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	7.443	7.591
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,04%	0,03%

Interest income and income from profit sharing	
Loans and sharia financing/ receivables	
Percentage to total interest income and income from profit sharing	

Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	171	3.182
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	0,02%	0,02%

Interest, profit sharing and bonus expenses	
Deposits from customers	
Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

b. Transaksi dengan manajemen kunci

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Beban gaji dan tunjangan:		
Direksi (Catatan 1f)	48.087	72.567
Dewan Komisaris (Catatan 1f)	18.455	32.033
Karyawan Kunci Lain	157.859	362.575
Total	224.401	467.175
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	7,53%	16,31%

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transactions with key management personnel
(continued)

Salaries and employee benefits:
Board of Directors (Note 1f)
Board of Commissioners (Note 1f)
Other Key Employees
Total
Percentage to total salaries and employee benefits

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

46. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/ PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>				<u>Statement of financial position</u>
<u>Rekening administratif</u>				<u>and Administrative accounts</u>
Dolar Amerika Serikat	18.565.041	19.291.553	726.512	United States Dollar
Yen Jepang	29.747	10	29.737	Japanese Yen
Dolar Singapura	25.204	4.158	21.046	Singapore Dollar
Dolar Australia	13.943	25	13.918	Australian Dollar
Renminbi	253	-	253	Renminbi
Ringgit Malaysia	216	7	209	Malaysian Ringgit
Euro Eropa	369	217	152	European Euro
Pound Sterling Inggris	97	11	86	Great Britain Pound Sterling
Dolar Hongkong	16	-	16	Hongkong Dollar
Riyal Arab Saudi	25	-	25	Saudi Arabian Riyal
			791.954	
Modal (Catatan 47)			24.995.226	Capital (Note 47)
Rasio PDN			3,17%	NOP ratio

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

46. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (lanjutan):

The Bank's NOP as of December 31, 2020 and 2019 are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2019			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	7.559.184	6.845.122	714.062
Yen Jepang	200.140	-	200.140
Dolar Australia	37.087	10	37.077
Dolar Singapura	18.539	3.438	15.101
Euro Eropa	283	162	121
Renminbi	232	-	232
Pound Sterling Inggris	76	12	64
Riyal Arab Saudi	37	-	37
Dolar Hongkong	15	-	15
Ringgit Malaysia	25	9	16
			966.865
Modal (Catatan 47)			23.350.625
Rasio PDN			4,14%

Statement of financial position
and Administrative accounts
 United States Dollar
 Japanese Yen
 Australian Dollar
 Singapore Dollar
 European Euro
 Renminbi
 Great Britain Pound Sterling
 Saudi Arabian Riyal
 Hongkong Dollar
 Malaysian Ringgit

Capital (Note 47)

NOP ratio

47. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

47. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risks) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

CAR on December 31, 2020 and December 31, 2019 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 on date September 22, 2016 concerning of Change regulation No. 11/POJK.03/2016 on date January 29, 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM) (lanjutan)

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, Bank diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal *buffer* yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masing-masing sebesar 2,50%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan surat OJK No S-11/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020, untuk kebijakan relaksasi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan, bahwa kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal diadakan sampai dengan 31 Maret 2021.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu *low to moderate*, maka rasio kecukupan modal (KPM) minimum per 31 Desember 2020 dan 2019 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan 10%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPM.

Perhitungan KPM Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

		31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Modal Inti	a	17.625.854	21.037.417
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	b	7.369.372	2.313.208
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	c	-	-
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	24.995.226	23.350.625

47. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

Based on POJK No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, PBI No. 17/22/PBI/2015 concerning the Establishment of *Countercyclical Buffer Requirement*, and POJK No. 46/POJK.03/2015 concerning the Determination of *Systemically Important Bank* and *Capital Surcharge*, the Bank is required to form additional capital as a buffer that apply in stages starting on January 1, 2016. The establishment of buffer capital consists of *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, and *Capital Surcharge* for D-SIB which shall be established based on a percentage of Risk Weighted Assets (RWA) of 2.50%, 0.00% and 1.00%, respectively.

Based on OJK letter No. S-11/D.3/2020 as of May 27, 2020 for relaxation policy in order to support the national economic recovery program of the banking sector, that the obligation to fulfill the *Capital Conservation Buffer* in the capital component is removed until March 31, 2021.

Based on the risk profile as of December 31, 2020 and 2019, respectively, which are both low to moderate, the minimum CAR for December 31, 2020 and 2019, is set at 9% to less than 10%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2020 and 2019 follows:

Core Capital
 Supplementary Capital
 (Maximum of 100% of
 Core Capital)
 Additional Supplementary
 Capital Allocated
 for Anticipation
 of Market Risk

**Total Core Capital and
 Supplementary Capital**

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPM) (lanjutan)

Perhitungan KPM Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

47. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) (continued)

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2020 and 2019 follows (continued):

		31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	e=c+d	24.995.226	23.350.625	Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Penyertaan	f	-	-	Investment
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	g=d-f	24.995.226	23.350.625	Total Capital for Credit Risk
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	h=e-f	24.995.226	23.350.625	Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	i	105.435.208	113.079.144	Risk Weighted Assets
ATMR untuk Risiko Pasar	j	1.612.039	801.774	Credit Risk
ATMR untuk risiko operasional	k	22.202.534	20.963.355	RWA for Market Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional	l=i+k	127.637.742	134.042.499	RWA for Operational Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	m=i+j+k	129.249.781	134.844.273	Total RWA for Credit Risk and Operational Risk
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	n=g/l	19,58%	17,42%	RWA for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
CAR untuk Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar	o=h/m	19,34%	17,32%	CAR for Credit Risk and Operational Risk
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	CAR for Credit Risk Operational Risk and Market Risk
				Minimum CAR

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario*. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. *Stress Test* yang dilakukan oleh Bank fokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit, Bank melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam SE Direksi No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit dan risiko pasar serta per triwulan untuk risiko likuiditas.

48. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portfolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 in changed from SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been calculating the minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 dated in July 14, 2016 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Standardized Method for market risk are in accordance with SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 dated in September 8, 2016 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario in addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole. The Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk. To improve the measurement of market risk, liquidity risk and credit risk, the Bank conduct stress test on worst case scenario as regulated in Director Circular Letter No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 dated in May 15, 2019 regarding The Guidelines of Implementation for Stress Testing with a minimum frequency of 1 (one) year for credit risk and market risk and quarterly for liquidity risk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui laporan Profil Risiko Triwulan I/2020, Triwulan II/2020, Triwulan III/2020, Triwulan IV/2020. *Stress Testing* Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan telah dilakukan sebanyak 1 kali pada bulan Maret 2020 yang pelaporannya telah disampaikan kepada OJK.

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 melalui Ketentuan Internal baik berupa Surat Edaran maupun Surat Keputusan Direksi sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 yang diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2020. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak COVID-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi. Relaksasi dilakukan khusus untuk debitur dan sektor yang terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperbaharui POJK No. 48/POJK.03/2020, Peraturan Menko Perekonomian No. 6/ 2020 dan ketentuan internal Bank. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip *four eyes* yang melibatkan Satuan Kerja Bisnis dan Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Ritel maupun Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Komersial untuk menjaga prinsip kehati-hatian. Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan pola penundaan pembayaran kewajiban kredit. Dalam upaya mitigasi terjadi risiko kredit. Bank memperketat analisa bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dan meminimalisasi risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta untuk menghindari *moral hazard*. Pemberian stimulus hanya dapat diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank. Penetapan debitur yang memenuhi kriteria tersebut juga melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (unit risk management) sebagai pihak yang independen. Dalam pelaksanaan pemberian stimulus dan untuk menghindari adanya *free rider (moral hazard)*, Bank BTN selalu mengacu pada regulasi dan mengikuti tata kelola yang baik (GCG).

48. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. Stress Testing for liquidity risk has been carried out 4 times, which is submitted through the Risk Profile report for Quarter I / 2020, Quarter II / 2020, Quarter III / 2020 and Quarter IV / 2020. Market Risk and Credit Risk Stress Testing is conducted at least once a year and has been conducted once in Maret 2020 and the report has been submitted to the OJK.

Credit Risk Management during the COVID-19 Pandemic: In order to support the government's efforts to maintain economic stability, the Bank has prepared a credit restructuring policy for debtors affected by COVID-19 through Internal Regulations in the form of a Directors Circular and Directors Decree as a Countercyclical Policy in handling The Impact of the Spread of COVID-19 which was effective on March 24, 2020. The policy has stipulated criteria for debtors and business sectors affected by COVID-19 that can be restructured. Relaxation is allowed specifically for debtors and sectors affected by COVID-19 by referring to POJK Number 11 / POJK.03 / 2020 which was updated by POJK Number 48 / POJK.03 / 2020, Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 6/2020 and Bank BTN internal regulations . In addition, decision making is carried out using the four eyes principle which involves the Business Work Unit and Retail Credit Risk Management Work Unit and Commercial Credit Risk Management Work Unit to maintain the principle of prudence. The bank has created a restructuring scheme with a pattern of postponing payment of credit obligations. In efforts to mitigate credit risk occurs. The Bank will tighten the assessment for debtors who apply for restructuring and minimize the risk of restructuring that is not right on target and to avoid moral hazard. The stimulus can only be given to debtors who meet the criteria set by the Bank. Determination of debtors who meet these criteria also involves the Risk Management Unit as an independent party. In the implementation of providing stimulus and to avoid free riders (moral hazard), Bank BTN always refers to regulations and follows good corporate governance (GCG).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan debitur-debitur Bank yang terdampak pandemi COVID-19 dapat terbantu, sehingga kualitas portfolio Bank dapat tetap dijaga dengan baik. Dalam kaitan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara individual maupun portfolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi. Penyesuaian mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui analisa *watchlist* terhadap seluruh debitur terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan ketentuan internal Bank. Debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja wajib dipantau dengan rencana *action plan* yang dipantau pelaksanaannya secara berkelanjutan, selain itu pengendalian pencairan kredit terhadap debitur yang mengalami restrukturisasi kredit (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No. 11/POJK.03/2020) sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna. Manajemen Risiko Kredit melakukan review sebagai perlakuan debitur restrukturisasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat meminimalisasi terjadinya *default* bagi Bank, serta dilakukan analisa proyeksi terhadap kondisi debitur sebagai langkah antisipasi Bank, dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku. Terhadap skema restrukturisasi debitur, Bank melakukan sejumlah penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan kebijakan internal terkait dengan pemberian stimulus perekonomian bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Adapun penyesuaian ketentuan restrukturisasi melalui stimulus perekonomian mencakup: kriteria debitur restrukturisasi, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas kredit serta pelaporan kepada *regulator*. Penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 ini diharapkan dapat membantu debitur Bank serta kualitas portfolio kredit Bank senantiasa terjaga dengan baik.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

The implementation of this policy is expected to help Bank's debtors who are affected by COVID-19 pandemic, so that the quality of the Bank's portfolio can be well maintained. In the ongoing COVID-19 pandemic, the Bank made several adjustments to the credit monitoring process and mechanism, both for debtors as an individual and portfolios. This adjustment is made for the purposes that monitoring results can always provide early warning signals and determine risk mitigation to be effective in maintaining credit quality during the pandemic period. Adjustments to the credit monitoring mechanism are carried out through watchlist analysis of all debtors, especially debtor entities that are in the business sector affected by COVID-19 with reference to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and the Bank's internal regulations. Debtors that have the potential to experience a decline in performance must be monitored with an action plan that is monitored for its implementation on an ongoing basis, in addition to controlling credit disbursement of debtors who are experiencing credit restructuring (especially those through the National Economic Stimulus scheme POJK Number 11/ POJK.03/2020) therefore restructuring objectives can be achieved efficiently. Credit Risk Management conducts a review as a treatment for restructured debtors who are affected by covid19 in order to minimize the occurrence of defaults for the Bank, as well as a projection analysis of the condition of the Covid-19 restructured debtor as a precautionary measure for the Bank by still referring to applicable government and regulatory regulations. For the debtor restructuring scheme, the Bank made several adjustments to the provisions of the credit restructuring process by referring to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and internal policies related to providing economic stimulus for debtors affected by the spread of COVID-19. The adjustment of restructuring provisions through economic stimulus includes: criteria for restructuring debtors, business sectors affected by COVID-19, restructuring mechanisms and schemes, decision authority, determination of credit quality and reporting to regulators. Adjustments to the provisions of the credit restructuring process affected by COVID-19 are expected to be able to help Bank debtors and the quality of the Bank's credit portfolio is always well maintained.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bisnis *Commercial dan Corporate Loan* serta meningkatkan pendapatan Bank dapat melalui pemberian fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Dalam proses pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan sudah melibatkan unit manajemen risiko kredit mulai dari pengumpulan data hingga proses keputusan pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Hasil penetapan limit fasilitas *Credit Line* kepada *Counterparty* didasarkan atas analisa aspek legal, rating perusahaan, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek industri, aspek pemasaran, dan aspek agunan. Manajemen Risiko Pasar juga melakukan monitoring transaksi terhadap limit fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan secara harian.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu, KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

48. RISK MANAGEMENT (continued)

In order to improve and optimize services to the public, especially in the Commercial and Corporate Loan business, as well as to increase Bank revenue through the provision of Credit Line facilities to Non-Financial Institutions. In the process of granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions, the credit risk management unit has been involved, starting from data collection to the decision process for granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions. The results of the limit determination of Credit Line facilities to Counterparties are based on analysis of legal aspects, company ratings, management aspects, financial aspects, industrial aspects, marketing aspects, and collateral aspects. Market Risk Management also monitors transactions on Credit Line facility limits for Non-Financial Institutions on a daily basis.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the Risk Management Policy Guidelines, if necessary.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance & Strategic Director*. Struktur organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum. Setiap *Department Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*.

Risk Officer Coordination (ROC) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi terhadap *Risk Officer* dalam melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Bank. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko, ROC dibantu oleh *Risk Superintendent (RS)* pada tingkat Divisi, *Regional Risk Superintendent (RRS)* pada tingkat Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer (BRO)* di Kantor Cabang di bawah koordinasi *Risk Officer Coordination (ROC)* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division (RMD)*.

RS dan RRS merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung pada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Divisi dan Kantor Wilayah (Regional Office) dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Divisi dan Kantor Wilayah dimana RS dan RRS bertugas. BRO adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Cabang dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Cabang dimana BRO bertugas.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Division

Risk Management Division (RMD) is a *Risk Management Working Unit (RMWU)* at the Bank, led by a *Division Head* that is responsible directly to the *Risk, Compliance & Strategic Director*. The organizational structure of the *RMD* consists of the *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* and *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. *Credit Risk Management Department* is responsible for credit risk management, while *Operational Risk Management Department* is responsible for managing operational risk, compliance risk, strategic risk, reputational risk and legal risk. The *Department Head* is assisted by *Policy & Procedure Unit* and *Assessment & Measurement Unit*.

Risk Officer Coordination (ROC) has a responsibility in coordinating and supervising the *Risk Officer* during monitoring the implementation of risk management in the Bank. In performing risk monitoring functions, ROC is assisted by the *Risk Superintendent (RS)* at the Division level, and the *Regional Risk Superintendent (RRS)* at the level of the *Regional Office* and *Branch Risk Officer (BRO)* in the *Branch Office* under the coordination of *Risk Officer Coordination Officer (ROC)* which is directly responsible to the *Head of Risk Management Division (RMD)*.

RS and RRS is directly responsible to the *ROC* and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management in the *Division* and *Regional Office*, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the *Division* and *Regional office* where the *RS* and *RSS* is assigned. The *BRO* is also directly responsible to the *ROC* and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management at branch offices, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the branch office where the *BRO* is assigned.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

**Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan
Manajemen Risiko**

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum risiko komposit profil risiko Bank berada pada peringkat *low to moderate*, yang tercermin dari tingkat risiko *inherent moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Policies and Procedures

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding on Risk Management for Commercial Banks, ERMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

In general, the Bank's composite risk profile is low to moderate, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan.

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh RMD, RS, RRS dan BRO untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (non-housing related).

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by RMD, RS, RRS, and BRO to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

- (i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya: (lanjutan)

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation: (continued)

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

- a) *Physical collateral*, such as land and buildings.
- b) *Financial collateral*, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.
- c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be used in determining the coverage ratio.

In addition to collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2020 and 2019. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/December 31, 2020

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	-	-	-	-	11.107.672	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.215.345	-	209	754	821	3.217.129	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	19.830.433	-	-	-	-	19.830.433	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	3.205.966	-	-	-	-	3.205.966	Securities
Obligasi Pemerintah	56.287.751	-	-	-	-	56.287.751	Government bonds
Efek – efek yang dibeli Dengan janji dijual Kembali	954.955	-	-	-	-	954.955	Securities Purchased Under Agreement To Resell
Tagihan Akseptasi	-	196.071	-	-	-	196.071	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	70.386	-	-	-	-	70.386	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							Loans and sharia financing/receivables
Konsumer							Consumer
Pemilikan rumah	-	83.985.281	50.037.640	33.291.563	33.663.117	200.977.601	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	2.862.387	3.519.706	1.123.744	2.336.140	9.841.977	Non-housing loan
Modal kerja	-	21.823.364	8.390.441	2.842.427	3.060.463	36.116.695	Working capital
Investasi	-	8.313.251	1.666.933	654.102	261.933	10.896.219	Investment
Sindikasi	-	69.250	-	-	-	69.250	Syndicated
Direksi dan karyawan:							Director and Employees
- Pihak ketiga	-	930.669	561.534	280.315	327.760	2.100.278	Third party
- Pihak berelasi	-	65.401	23.538	9.794	13.410	112.143	Related party
Bunga yang masih akan diterima	640.772	2.752.865	1.519.667	586.341	785.929	6.285.574	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	856.449	139.163	4.486	1.894	3.949	1.005.941	Other assets ^{*)}
Total kotor	96.169.729	121.137.702	65.724.154	38.790.934	40.453.522	362.276.041	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(13.066.144)	Allowances for impairment losses
Neto						349.209.897	Net

31 Desember/December 31, 2019

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	-	-	-	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	745.287	-	3.845	342	27	749.501	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.097.193	-	-	-	-	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.112.049	-	-	-	-	8.112.049	Securities
Obligasi Pemerintah	11.053.601	-	-	-	-	11.053.601	Government bonds

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
^{**)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

^{*)} Consists of third parties receivables
^{**)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2019							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Tagihan Akseptasi	-	487.052	-	-	-	487.052	Acceptance Receivable
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	-	-	-	1.875.221	Securities purchased under agreement to resell
Penyertaan Saham	270	-	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer	-	-	-	-	-	-	Consumer
Pemilikan rumah	-	79.619.786	47.672.420	32.407.778	32.491.696	192.191.680	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	2.846.773	3.934.990	1.164.891	2.415.126	10.361.780	Non-housing loan
Modal kerja	-	23.280.969	9.362.966	3.593.708	4.106.712	40.344.355	Working capital
Investasi	-	8.000.376	1.748.939	600.624	353.709	10.703.648	Investment
Sindikasi	-	70.925	-	-	-	70.925	Syndicated
Direksi dan karyawan:	-	-	-	-	-	-	Director and Employees
- Pihak ketiga	-	940.480	541.263	264.125	300.479	2.046.347	Third parties -
- Pihak berelasi	-	61.487	20.653	11.260	13.024	106.424	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	133.129	1.370.170	829.395	360.471	517.607	3.210.772	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	889.042	21.397	4.623	1.800	3.546	920.408	Other assets ^{*)}
Total kotor	49.418.121	116.699.415	64.119.094	38.404.999	40.201.926	308.843.555	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	(6.145.446)	Allowances for impairment losses
Neto						302.698.109	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

^{**)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

^{*)} Consists of third parties receivables

^{**)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	21.762	25.907	26.318	5.369	79.356	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	600.011	110.486	40.411	13.134	764.042	Guarantees issued
Total	-	621.773	136.393	66.729	18.503	843.398	Total

31 Desember/December 31, 2019							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	48.604	82.083	39.998	18.884	189.569	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	1.837.018	138.133	11.844	22.687	2.009.682	Guarantees issued
Total	-	1.885.622	220.216	51.842	41.571	2.199.251	Total

^{*)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

^{**)} Hanya fasilitas kredit committed yang belum ditarik

^{*)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

^{**)} Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/December 31, 2020						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	-	-	-	-	11.107.672	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	3.217.129	-	-	-	3.217.129	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	19.830.096	337	-	-	-	19.830.433	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	1.657.291	1.087.658	461.017	-	3.205.966	Securities
Obligasi Pemerintah	56.287.751	-	-	-	-	56.287.751	Government bonds
Efek – efek yang dibeli Dengan janji dijual Kembali	954.955	-	-	-	-	954.955	Securities Purchased Under Agreement To Resell
Tagihan Akseptasi	-	-	-	196.071	-	196.071	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	70.386	-	-	-	-	70.386	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syaria	4.025.371	45.364	1.190.581	40.033.492	214.819.355	260.114.163	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	492.356	6.609	11.806	1.963.865	3.810.938	6.285.574	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	41.111	190.745	-	489.338	284.747	1.005.941	Other assets ^{*)}
Total kotor	92.809.698	5.117.475	2.290.045	43.143.783	218.915.040	362.276.041	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(13.066.144)	Allowances for impairment losses
Neto						349.209.897	Net

	31 Desember/December 31, 2019						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	-	-	-	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	749.501	-	-	-	749.501	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	10.996.115	101.078	-	-	-	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.865.821	1.882.188	897.539	466.501	-	8.112.049	Securities
Obligasi Pemerintah	11.053.601	-	-	-	-	11.053.601	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.675.221	-	200.000	-	-	1.875.221	Securities purchased under agreement to resell

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

^{**)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2019						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	487.052	-	487.052	Acceptance Receivable
Penyertaan Saham	-	-	-	270	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	4.035.376	16.959	2.320.937	42.191.720	207.260.167	255.825.159	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	122.298	7.415	14.883	1.008.913	2.057.263	3.210.772	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	58.429	247.592	32.508	254.957	326.922	920.408	Other assets ^{*)}
Total kotor	48.319.190	3.004.733	3.465.867	44.409.413	209.644.352	308.843.555	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(6.145.446)	Allowances for impairment losses
Neto						302.698.109	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

^{**)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	6.613	5.115	44.744	22.443	441	79.356	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	761.685	2.357	764.042	Guarantees issued
Total	6.613	5.115	44.744	784.128	2.798	843.398	Total

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019: (lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2020 and 2019, are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2019							
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total		
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	-	151.740	37.829	189.569	Unused loan facilities ^{**)}	
Garansi yang diterbitkan	-	-	2.008.357	1.325	2.009.682	Guarantees issued	
Total	-	-	2.160.097	39.154	2.199.251	Total	

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

1. Giro pada Bank Lain

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Current Accounts with Other Banks

31 Desember/December 31, 2020				
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total		
Rupiah	2.800.444	-	2.800.444	Rupiah
Mata Uang Asing	414.877	1.808	416.685	Foreign currencies
Total	3.215.321	1.808	3.217.129	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.808)	Allowance for impairment losses
Neto			3.215.321	Net

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

1. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2019		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total
Rupiah	160.984	-	160.984
Mata Uang Asing	586.885	1.632	588.517
Total	747.869	1.632	749.501
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.632)
Neto			747.869

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

3. Efek-efek

	31 Desember/December 31, 2020		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total
Reksadana	802.162	-	802.162
Obligasi	1.461.235	2.000	1.463.235
Medium Term Notes	102.715	-	102.715
Efek Beragunan Aset	795.510	-	795.510
SKBDN	42.344	-	42.344
Total	3.203.966	2.000	3.205.966
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.000)
Neto			3.203.966

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

1. Current Accounts with Other Bank (continued)

	31 Desember/December 31, 2019	
	Rupiah	Foreign currencies
Rupiah	160.984	
Foreign currencies	588.517	
Total	749.501	
Allowance for impairment losses	(1.632)	
Net	747.869	

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

2. Placements with Bank Indonesia and other banks

As of December 31, 2020 and 2019, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

3. Securities

	31 Desember/December 31, 2020	
	Mutual Funds	Bonds
Reksadana	802.162	
Obligasi	1.463.235	
Medium Term Notes	102.715	
Asset-Backed Securities	795.510	
SKBDN	42.344	
Total	3.205.966	
Allowance for impairment losses	(2.000)	
Net	3.203.966	

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

3. Efek-efek (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2019		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total
Sertifikat Bank Indonesia	4.865.821	-	4.865.821
Obligasi	1.280.569	2.000	1.282.569
Negotiable certificate of deposits	538.040	-	538.040
Medium Term Notes	199.949	-	199.949
Efek Beragunan Aset	833.204	-	833.204
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	392.466	-	392.466
Total	8.110.049	2.000	8.112.049
Cadangan kerugian penurunan nilai			(27.378)
Neto			8.084.671

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2020 dan 2019, rekening administratif mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp6.489 dan RpNihil.

5. Penyertaan saham

Per 31 Desember 2020 dan 2019, penyertaan saham mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil dan Rp270.

6. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per 31 Desember 2020 dan 2019, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai.

7. Tagihan Akseptasi

Per 31 Desember 2020 dan 2019, tagihan akseptasi mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.393 dan RpNihil.

8. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

Per 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No 71, PSAK No. 55 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Securities (continued)

	31 Desember/December 31, 2019		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total
Certificates of Bank Indonesia	4.865.821	-	4.865.821
Bonds	1.280.569	2.000	1.282.569
Negotiable certificate of deposits	538.040	-	538.040
Medium Term Notes	199.949	-	199.949
Asset-Backed Securities	833.204	-	833.204
Letter of Credit by Local Document	392.466	-	392.466
Total	8.110.049	2.000	8.112.049
Cadangan kerugian penurunan nilai			(27.378)
Net			8.084.671

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

4. Administrative account

As of December 31, 2020 and 2019, administrative account which are impaired amounting to Rp6,489 and RpNil, respectively.

5. Investment in Shares

As of December 31, 2020 and 2019, investment in shares which are impaired amounting to RpNil and Rp270, respectively.

6. Securities Purchased Under Agreement to Resell

As of December 31, 2020 and 2019, securities purchased under agreement to resell are not impaired.

7. Acceptance Receivable

As of December 31, 2020 and 2019, acceptance receivable which are impaired amounting to Rp1,393 and RpNil, respectively.

8. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2020 and 2019, these financial assets are impaired calculated by individual and collective impairment according to SFAS No.71, SFAS No. 55 and Financial Service Authority Regulations (POJK).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

31 Desember/December 31, 2020						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not Impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i> ^{***)}		
	Tingkat tinggi/ <i>High Grade</i> ^{*)}	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i> ^{**)}			Total	
Efek-efek						
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.538.587	-	-	-	1.538.587	Securities <i>Fair value through profit -or-loss</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.434.984	-	-	-	1.434.984	<i>Financial assets held at fair value through other comprehensive income</i>
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	230.395	-	-	2.000	232.395	<i>Amortized cost</i>
Obligasi Pemerintah						
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.441.763	-	-	-	19.441.763	Government Bonds <i>Fair value through profit -or-loss</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	33.019.094	-	-	-	33.019.094	<i>Financial assets held at fair value through other comprehensive income</i>
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	3.826.894	-	-	-	3.826.894	<i>Amortized cost</i>
Kredit dan piutang						
Giro pada bank Indonesia	11.107.672	-	-	-	11.107.672	Loans and receivables <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	3.215.321	-	-	1.808	3.217.129	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	19.830.433	-	-	-	19.830.433	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Tagihan Akseptasi	196.071	-	-	-	196.071	<i>Acceptance Receivable</i>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	954.955	-	-	-	954.955	<i>Securities Purchased Under Agreement to Resell</i>
Tagihan Derivatif	70.386	-	-	-	70.386	<i>Derivatif Receivable</i>
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						<i>Loans and sharia financing/ receivables</i>
Konsumer						<i>Consumer</i>
Pemilikan rumah	126.881.096	57.240.805	12.019.264	4.836.436	200.977.601	<i>Housing loan</i>
Non kepemilikan rumah	5.818.891	3.037.770	453.359	531.957	9.841.977	<i>Non-housing loan</i>
Modal kerja	15.484.246	7.144.959	2.168.788	11.318.702	36.116.695	<i>Working capital</i>
Investasi	6.646.457	2.112.917	217.256	1.919.589	10.896.219	<i>Investment</i>
Sindikasi	69.250	-	-	-	69.250	<i>Syndicated</i>
Direksi dan karyawan						<i>Directors and employees</i>
- Pihak ketiga	2.027.234	40.884	6.347	25.813	2.100.278	<i>Third parties -</i>
- Pihak yang berelasi	111.257	716	170	-	112.143	<i>Related parties -</i>
Bunga yang masih akan diterima	6.285.574	-	-	-	6.285.574	<i>Interests receivable</i>
Aset lain-lain ¹⁾	1.005.941	-	-	-	1.005.941	<i>Other assets¹⁾</i>
Total	259.196.501	69.578.051	14.865.184	18.636.305	362.276.041	Total
Cadangan kerugian nilai					(13.066.144)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto					349.209.897	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

***) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

31 Desember/December 31, 2019						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i> ^{***)}	Total		
	Tingkat tinggi/ <i>High Grade</i> ^{*)}	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i> ^{**)}				
Efek-efek						Securities
Nilai wajar melalui laba rugi	4.189.398	-	-	-	4.189.398	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	2.629.347	-	-	-	2.629.347	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.291.304	-	-	2.000	1.293.304	Held-to-maturity
Obligasi Pemerintah						Government Bonds
Nilai wajar melalui laba rugi	1.232.204	-	-	-	1.232.204	Fair value through profit -or-loss
Tersedia untuk dijual	6.147.729	-	-	-	6.147.729	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.673.668	-	-	-	3.673.668	Held-to-maturity
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	15.512.329	-	-	-	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	747.869	-	-	1.632	749.501	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.097.193	-	-	-	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan Akseptasi Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	487.052	-	-	-	487.052	Acceptance Receivable Securities Purchased Under Agreement to Resell
Penyertaan Saham Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah	1.875.221	-	-	-	1.875.221	Investment in Shares
Konsumer						Loans and sharia financing/ receivables
Pemilikan rumah	139.593.435	29.942.214	19.593.253	3.062.778	192.191.680	Consumer Housing loan
Non kepemilikan rumah	7.108.711	1.832.013	1.085.063	335.993	10.361.780	Non-housing loan
Modal kerja	24.595.608	1.937.119	3.007.369	10.804.259	40.344.355	Working capital
Investasi	7.607.002	847.105	431.348	1.818.193	10.703.648	Investment
Sindikasi	-	-	-	70.925	70.925	Syndicated
Direksi dan karyawan						Directors and employees
- Pihak ketiga	1.984.043	35.082	16.034	11.188	2.046.347	Third parties -
- Pihak yang berelasi	106.090	334	-	-	106.424	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	-	-	-	3.210.772	Interests receivable
Aset lain-lain ^{*)}	920.408	-	-	-	920.408	Other assets ^{*)}
Total	234.009.383	34.593.867	24.133.067	16.107.238	308.843.555	Total
Cadangan kerugian nilai					(6.145.446)	Allowance for impairment losses
Neto					302.698.109	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

***) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih.
- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality is defined as follows:

High grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution, transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.
- (b) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days.
- (c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2020				
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	10.692.317	244.285	683.832	398.830	12.019.264
Non kepemilikan rumah	445.019	2.340	3.155	2.845	453.359
Modal kerja	2.160.054	-	8.388	346	2.168.788
Investasi	216.651	-	-	605	217.256
Direktur dan karyawan	6.517	-	-	-	6.517
Total	13.520.558	246.625	695.375	402.626	14.865.184
Cadangan kerugian nilai					(713.161)
Neto					14.152.023

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

Total

Allowance for
impairment losses

Net

	31 Desember/December 31, 2019				
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	18.449.669	262.576	396.078	484.930	19.593.253
Non kepemilikan rumah	988.838	21.917	28.391	45.917	1.085.063
Modal kerja	1.724.687	543.367	243.707	495.608	3.007.369
Investasi	317.660	33.141	9.052	71.495	431.348
Direktur dan karyawan	9.813	-	2.937	3.284	16.034
Total	21.490.667	861.001	680.165	1.101.234	24.133.067
Cadangan kerugian nilai					(261.153)
Neto					23.871.914

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

Total

Allowance for
impairment losses

Net

- (vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

- (vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows:

	31 Desember/December 2020						
	Konsumsi/Konsumer						
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan Rumah/ Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employee	Total
Saldo Awal tahun	1.327.800	156.156	4.107.850	510.215	4.492	9.653	6.116.166
Penyesuaian sehubungan dengan Penerapan awal PSAK 71	2.921.342	252.211	3.879.607	561.439	(3.342)	1.420	7.612.677
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	787.362	180.040	1.114.862	145.503	(409)	12.682	2.240.040
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	9.608	2.026	30.893	4.053	-	-	46.580
Penghapusbukuan kredit	(1.079.608)	(170.529)	(1.582.501)	(117.192)	-	(4.690)	(2.954.520)
Saldo akhir tahun	3.966.504	419.904	7.550.711	1.104.018	741	19.065	13.060.943
Penurunan nilai individual	766.590	172.319	5.151.380	826.530	-	4.160	6.920.979
Penurunan nilai kolektif	3.199.914	247.585	2.399.331	277.488	741	14.905	6.139.964
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	1.050.381	202.586	8.538.325	1.606.355	-	3.789	11.401.436

Balance at beginning of year
Adjustment in relation with the implementation of PSAK 71
Provision for impairment losses during the year
Recovery of loans written-off
Loans written-off

Balance at the end of year

Individual impairment
Collective impairment

Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

(vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows: (continued)

31 Desember/December 2019							
	Konsumsi/Konsumer		Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employee	Total
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan Rumah/ Non-Housing Loan					
Saldo Awal tahun	838.558	136.572	1.999.292	314.966	4.492	4.252	3.298.132
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	533.115	34.543	2.573.116	332.782	-	5.990	3.479.546
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	7.525	3.831	26.345	2.897	-	-	40.598
Penghapusbukuan kredit	(51.398)	(18.790)	(490.903)	(140.430)	-	(589)	(702.110)
Saldo akhir tahun	1.327.800	156.156	4.107.850	510.215	4.492	9.653	6.116.166
Penurunan nilai individual	420.046	24.059	3.088.836	438.798	4.492	2.241	3.978.472
Penurunan nilai kolektif	907.754	132.097	1.019.014	71.417	-	7.412	2.137.694
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	455.299	25.463	9.595.195	1.650.044	70.925	2.249	11.799.175

Gross amount of loans
individually determined to
be impaired, before deducting
any individually assessed
impairment losses

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

- inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or
- inability to generate cash flows from funding, inter-bank transactions and fund borrowings.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* (IAD) dan *Risk Management Division* (RMD).

Pengendalian Risiko Likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, dan *Stress Testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Bank maupun skenario stress pada faktor pasar).

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the Bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board Of Commissioners and Board Of Directors who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Risk Management Division (RMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are Liquidity Ratio, Maturity Profile, Cash Flow Projection, and Stress Testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

31 Desember/December 31, 2020							
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	1.429.426	-	1.429.426	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	-	11.107.672	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.215.321	(1.808)	3.217.129	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	19.830.433	-	18.913.328	526.391	390.714	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	3.203.966	(2.000)	2.973.571	92.433	10.117	129.845	Securities
Obligasi Pemerintah	56.287.751	-	54.155.704	806.320	249.564	1.076.163	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	954.955	-	954.955	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	194.678	(1.393)	433	143.341	52.297	-	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	70.386	-	70.386	-	-	-	Derivative Receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	247.053.220	(13.060.943)	4.926.170	3.162.878	5.649.670	246.375.445	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	6.285.574	-	6.285.574	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	1.005.941	-	1.005.941	-	-	-	Other assets**)
Total	350.639.323	(13.066.144)	105.040.289	4.731.363	6.352.362	247.581.453	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	4.272.276	-	4.272.276	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	259.149.814	-	166.014.531	54.777.516	4.951.685	33.406.082	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	29.880	-	29.880	-	-	-	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan	15.810.466	-	-	1.299.738	4.076.795	10.433.933	Securities issued
Liabilitas Derivatif	22.787	-	22.787	-	-	-	Derivative Liabilities
Liabilitas akseptasi	196.071	-	433	143.341	52.297	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	23.807.138	-	499.440	6.998.318	6.614.858	9.694.522	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	726.914	-	726.914	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	4.209.719	-	4.209.719	-	-	-	Other liabilities****)
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	10.194.432	-	-	3.000.000	-	7.194.432	Subordinated Loan Securities
Total	318.419.497	-	175.775.980	66.218.913	15.695.635	60.728.969	Total
Perbedaan jatuh tempo	32.219.826	(13.066.144)	(70.735.691)	(61.487.550)	(9.343.273)	186.852.484	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

*** Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**** Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

*** Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

**** Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

31 Desember/December 31, 2019							
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	1.369.167	-	1.369.167	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	15.512.329	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	747.869	(1.632)	749.501	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.097.193	-	10.745.393	236.800	115.000	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.084.671	(27.378)	7.143.578	367.628	438.179	162.664	Securities
Obligasi Pemerintah	11.053.601	-	7.922.598	505.140	1.239.973	1.385.890	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	1.675.221	92.135	11.236	96.629	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	487.052	-	142.780	226.412	117.860	-	Acceptance Receivable
Penyertaan saham	-	(270)	-	-	-	270	Investment in Shares
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	249.708.993	(6.116.166)	4.895.096	5.279.059	6.088.075	239.562.929	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	-	3.210.772	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	920.408	-	920.408	-	-	-	Other assets**)
Total	304.067.276	(6.145.446)	54.286.843	6.707.174	8.010.323	241.208.382	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	1.803.172	-	1.803.172	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	206.905.692	-	158.169.456	40.216.607	3.405.058	5.114.571	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	4.509.238	-	4.503.938	5.300	-	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	-	935.000	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	19.783.552	-	-	2.134.415	3.184.556	14.464.581	Securities issued
Liabilitas akseptasi	487.052	-	142.780	226.412	117.860	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	22.465.657	-	999.990	5.000.000	5.180.301	11.285.366	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	-	630.002	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	4.592.582	-	4.592.582	-	-	-	Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	5.999.669	-	-	-	-	5.999.669	Subordinated Loans and securities
Total	268.111.616	-	170.841.920	47.582.734	12.822.775	36.864.187	Total
Perbedaan jatuh tempo	35.955.660	(6.145.446)	(116.555.077)	(40.875.560)	(4.812.452)	204.344.195	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

***)) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

****)) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

***)) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****)) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest):

31 Desember/December 31, 2020													
	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months							
LIABILITAS							LIABILITIES						
Liabilitas segera*)	4.272.276	-	4.272.276	-	-	-	Liabilities due immediately*)						
Simpanan nasabah							Deposits from customers						
Deposito berjangka	173.643.349	-	94.199.988	65.945.813	5.245.177	8.252.371	Time deposits						
Tabungan	40.875.688	40.875.688	-	-	-	-	Savings deposits						
Giro	72.903.267	46.867.135	-	-	-	26.036.132	Demand deposits						
Simpanan dari bank lain	158.857	103.726	55.131	-	-	-	Deposits from other banks						
Liabilitas derivatif	22.787	-	22.787	-	-	-	Derivative liabilities						
Liabilitas akseptasi	196.071	-	433	143.341	52.297	-	Acceptance payable						
Surat berharga yang diterbitkan	19.212.336	-	117.910	1.865.771	2.732.676	14.495.979	Securities issued						
Pinjaman yang diterima	25.211.477	-	128.316	6.090.932	7.190.727	11.801.502	Fund borrowings						
Bunga yang masih harus dibayar	726.914	-	726.914	-	-	-	Interest payables						
Liabilitas lain-lain**)	4.209.719	-	4.209.719	-	-	-	Other liabilities**)						
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	12.203.385	-	133.265	3.212.500	222.015	8.635.605	Subordinated Loan and securities						
Total	353.636.126	87.846.549	103.866.739	77.258.357	15.442.892	69.221.589	Total						

31 Desember/December 31, 2019													
	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months							
LIABILITAS							LIABILITIES						
Liabilitas segera*)	1.803.172	-	1.803.172	-	-	-	Liabilities due immediately*)						
Simpanan nasabah							Deposits from customers						
Deposito berjangka	137.072.728	-	78.050.996	47.692.879	6.025.031	5.303.822	Time deposits						
Tabungan	43.131.341	43.131.341	-	-	-	-	Savings deposits						
Giro	51.566.011	49.403.881	-	-	-	2.162.130	Demand deposits						
Simpanan dari bank lain	4.194.434	10.315	4.184.119	-	-	-	Deposits from other banks						
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	980.318	-	15.106	-	15.106	950.106	Securities sold under repurchase agreements						
Liabilitas akseptasi	487.052	-	142.780	226.412	117.860	-	Acceptance payable						
Surat berharga yang diterbitkan	24.534.117	-	160.362	2.311.234	4.417.850	17.644.671	Securities issued						
Pinjaman yang diterima	27.227.928	-	1.119.833	6.753.297	5.632.304	13.722.494	Fund borrowings						
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	-	630.002	-	-	-	Interest payables						
Liabilitas lain-lain**)	4.592.582	-	4.592.582	-	-	-	Other liabilities**)						
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.132.250	-	44.750	223.750	268.500	7.595.250	Subordinated Loan and securities						
Total	304.351.935	92.545.537	90.743.702	57.207.572	16.476.651	47.378.473	Total						

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
 **) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
 **) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar, Bank menggunakan perhitungan *Standardized Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Aset	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December, 2019		Assets
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
Giro pada bank lain	0,14%	0,02%	0,81%	0,01%	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3,85%	0,33%	5,98%	0,47%	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-efek	15,15%	-	9,05%	3,14%	Securities
Obligasi Pemerintah					Government bonds
Tingkat bunga tetap	1,51%	1,99%	9,22%	11,48%	Fixed interest rate
Tingkat bunga Mengambang	-	-	5,90%	-	Variable interest rate
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah	9,12%	-	9,88%	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas					
Liabilities					
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	2,11%	2,26%	1,89%	0,00%	Demand deposits
Tabungan	3,58%	0,20%	4,17%	0,30%	Savings deposits
Deposito Berjangka	4,84%	2,57%	5,59%	3,47%	Time deposits
Simpanan dari Bank lain					Deposits from other banks
Giro	0,94%	-	1,73%	-	Demand deposits
Deposito Berjangka	4,47%	-	7,17%	-	Time deposits
Inter-bank call money	4,76%	-	6,06%	-	Inter-bank call money
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5,32%	-	6,51%	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	8,79%	-	8,73%	-	Securities issued

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In accordance with the Financial Services Authority Circular No.12 /SEOJK.03/2018 dated in August 21, 2018 regarding the Implementation of Risk Management and Measurement of Risk in the Standard Approach In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating CAR for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2020 and 2019:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross):

31 Desember/December 31, 2020								
Suku bunga mengambang/Variable interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas	-	-	-	-	1.429.426	1.429.426	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	10.105.804	-	-	-	1.001.868	11.107.672	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	3.216.841	-	-	-	288	3.217.129	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	16.298.328	3.532.105	19.830.433	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	1.538.587	-	-	1.561.571	105.808	3.205.966	Securities	
Obligasi Pemerintah	-	-	-	52.717.160	3.570.591	56.287.751	Government bonds	
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	-	954.955	-	954.955	Securities Purchases Under Agreement to Resell	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	196.071	-	196.071	Acceptance Receivable	
Tagihan Derivat	-	-	-	-	70.386	70.386	Derivative receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	2.592.712	6.497.105	117.831.875	108.130.424	25.062.047	260.114.163	Loans and sharia financing/ receivable	
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	6.285.574	6.285.574	Interest receivable	
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	1.005.941	1.005.941	Other assets ^{*)}	
Total aset keuangan	17.453.944	6.497.105	117.831.875	179.858.509	42.064.034	363.705.467	Total financial assets	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera ^{**)}	-	-	-	-	4.272.276	4.272.276	Liabilities due immediately ^{**)}	
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers	
Giro	42.999.409	-	-	25.601.356	3.085.095	71.685.860	Demand deposits	
Tabungan	38.700.137	-	-	-	905.209	39.605.346	Savings deposits	
Deposito berjangka	-	-	-	147.858.608	-	147.858.608	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	-	-	-	29.880	-	29.880	Deposits from other banks	
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	196.071	196.071	Acceptance payable	
Liabilitas Derivat	-	-	-	-	22.787	22.787	Derivative liabilities	
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	15.810.466	-	15.810.466	Securities issued	
Pinjaman yang diterima	-	-	-	21.602.226	2.204.912	23.807.138	Fund Borrowings	
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	726.914	726.914	Interest payables	
Liabilitas lain-lain ^{**)*)}	-	-	-	-	4.209.719	4.209.719	Other liabilities ^{**)*)}	
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	10.194.432	-	10.194.432	Subordinated Loan and Securities	
Total liabilitas keuangan	81.699.546	-	-	221.096.968	15.622.983	318.419.497	Total financial liabilities	
Gap repricing suku bunga-kotor	(64.245.602)	6.497.105	117.831.875	(41.238.459)	26.441.051	45.285.970	Gross interest repricing gap	

31 Desember/December 31, 2019								
Suku bunga mengambang/Variable interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas	-	-	-	-	1.369.167	1.369.167	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	14.153.009	-	-	-	1.359.320	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	749.356	-	-	-	145	749.501	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	8.913.193	2.184.000	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	733.670	-	-	7.246.108	132.271	8.112.049	Securities	
Obligasi Pemerintah	2.246.503	-	-	7.801.428	1.005.670	11.053.601	Government bonds	
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	200.000	-	-	1.675.221	-	1.875.221	Reverse Repo	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	487.052	-	487.052	Acceptance Receivable	
Penyertaan Saham	-	-	-	-	270	270	Investment in Associated Entities	
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	4.398.474	8.656.844	176.191.398	42.965.823	23.612.620	255.825.159	Loans and sharia financing/ receivable	
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	3.210.772	3.210.772	Interest receivable	
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	920.408	920.408	Other assets ^{*)}	
Total aset keuangan	22.481.012	8.656.844	176.191.398	69.088.825	33.794.643	310.212.722	Total financial assets	

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

*) Consists of third party receivables.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

**)*) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

**)*) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (lanjutan):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (continued):

31 Desember/December 31, 2019								
Suku bunga mengambang/Variable interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/More than 1 year	Suku bunga tetap/Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Liabilitas Keuangan							Financial	Liabilities
Liabilitas segera ^{*)}	-	-	-	-	1.803.172	1.803.172	Liabilities due immediately ^{*)}	
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers	
Giro	-	-	-	48.108.116	2.593.010	50.701.126	Demand deposits	
Tabungan	-	-	-	41.484.909	789.889	42.274.798	Savings deposits	
Deposito berjangka	-	-	-	113.929.768	-	113.929.768	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	-	-	-	4.509.238	-	4.509.238	Deposits from other banks	
Liabilitas akseptasi	-	-	-	487.052	-	487.052	Acceptance payable	
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	19.783.552	-	19.783.552	Securities issued	
Efek-efek yang dijual	-	-	-	-	-	-	Securities sold under	
dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	-	-	935.000	repurchase agreements	
Pinjaman yang diterima	6.885.143	-	-	14.904.078	676.436	22.465.657	Fund Borrowings	
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	630.002	630.002	Interest payables	
Liabilitas lain-lain ^{**)}	-	-	-	-	4.592.582	4.592.582	Other liabilities ^{**)}	
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-	-	Subordinated loan and	
dan efek-efek subordinasi	-	-	-	5.999.669	-	5.999.669	securities	
Total liabilitas keuangan	7.820.143	-	-	249.206.382	11.085.091	268.111.616	Total financial liabilities	
Gap repricing suku bunga-kotor	14.660.869	8.656.844	176.191.398	(180.117.557)	22.709.552	42.101.106	Gross interest repricing gap	
							^{*)}	Consists of third party receivables.
							^{**)}	Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
							^{***)}	Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ yang tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2020 and 2019. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed interest rate fair value through other comprehensive income/ available-for-sale and fair value to profit or loss financial assets as of December 31, 2020 and 2019 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 atas dampak ke Laba Rugi dan Ekuitas dikarenakan peningkatan portofolio surat berharga dalam USD:

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of Desember 31, 2020 and Desember 31, 2019, there is significant changes compare to December 2019 from impact of profit or loss and equity because of the increasing from securities in USD:

31 Desember/December 31, 2020			
	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity
Rupiah	+125	(83.070)	(1.660.535)
	+50	(34.281)	(689.232)
	-50	35.791	725.228
	-125	92.528	1.886.026
Dolar Amerika Serikat	+125	(37.747)	(1.312.036)
	+50	(15.732)	(556.403)
	-50	16.686	603.851
	-125	43.750	1.610.178
31 Desember/December 31, 2019			
	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity
Rupiah	+125	(34.453)	(109.946)
	+50	(14.380)	(45.495)
	-50	15.248	47.679
	-125	39.898	123.626
Dolar Amerika Serikat	+125	(19.742)	(114.494)
	+50	(8.180)	(48.045)
	-50	8.581	51.403
	-125	22.256	135.598

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap kemungkinan perubahan suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga *variable* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

31 Desember/December 31, 2020		
Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Rupiah	±125 ±50	± 399.779 ± 159.912

31 Desember/December 31, 2019		
Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Rupiah	±125 ±50	± 4.308 ± 1.723

ii. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019:

ii. Exchange rate risk

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations.

31 Desember/December 31, 2020		
Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0,30% ±0,35%	±3.121 ±3.642

United States Dollar

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit). (lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk (continued)

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited). (continued)

31 Desember/December 31, 2019

	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0,30% ±0,35%	±2.888 ±3.370	United States Dollar

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2020 and 2019, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach), sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach, in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Basic Indicator Approach (PID).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Internal Audit melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN LED ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara online melalui media web (web based).

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Enterprise Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan atau regulasi yang mendukung dan kelemahan perjanjian atau perikatan. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan *Enterprise Risk Management Division* dan *Legal Division* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the ERMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus, regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Enterprise Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in policy or regulation and weak agreement or engagement. At the same time, each division together with Enterprise Risk Management Division and Legal Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

Legal risk measurement is conducted together by Enterprise Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparty.

Reputational Risk

Reputational risk is identified an inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by CSD and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (CCS) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh CSPD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang me-review strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMGD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMGD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD dan RMC untuk di-review.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Corporate Social Responsibility is not focused only on *charity*, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by CSPD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, Compliance Division (CMGD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMGD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by ERMD and RMC.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern. BRO memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Internal Access Management Standards (AIMS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMGD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to ERMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, ERMD and CMGD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits. BRO ensures that the branch offices have completed the findings/results of the related audit.

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2020 and 2019 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	1.429.426	1.429.426	1.369.167	1.369.167	Cash
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	1.538.587	1.538.587	4.189.398	4.189.398	Securities
Obligasi Pemerintah	19.441.763	19.441.763	1.232.204	1.232.204	Government bonds
Tagihan Spot suku bunga	70.386	70.386	-	-	Interest rate Spot receivable
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	1.434.984	1.434.984	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	33.019.094	33.019.094	-	-	Government bonds
Tersedia untuk dijual					Available for sale
Efek-efek	-	-	2.615.895	2.615.895	Securities
Obligasi Pemerintah	-	-	6.147.729	6.147.729	Government bonds
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	230.395	235.864	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	3.826.894	3.940.886	-	-	Government bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Efek-efek	-	-	1.279.378	1.238.051	Securities
Obligasi Pemerintah	-	-	3.673.668	3.752.552	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	954.955	954.955	1.875.221	1.875.221	Reverse Repo
Tagihan Akseptasi	194.678	194.678	487.052	487.052	Acceptance Receivable
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	11.107.672	15.512.329	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.251.321	3.251.321	747.869	747.869	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	19.830.433	19.830.433	11.097.193	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah Konsumsi					Loans and sharia financing/receivables
Pemilikan rumah	197.011.097	196.099.818	190.863.880	190.468.217	Consumer Housing loan
Non-kepemilikan Rumah	9.422.073	9.422.073	10.205.624	10.205.624	Non-housing loan
Modal kerja	28.565.984	28.565.984	36.236.505	36.236.505	Working capital
Investasi	9.792.201	9.792.201	10.193.433	10.193.433	Investment
Sindikasi	68.509	68.509	66.433	66.433	Syndicated
Direksi dan karyawan	2.193.356	2.193.356	2.143.118	2.143.117	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	6.285.574	6.285.574	3.210.772	3.210.772	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.005.941	1.005.941	920.408	920.408	Other assets ^{*)}
Total aset keuangan	350.675.323	349.883.505	304.067.276	303.709.169	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Liabilitas Spot suku bunga	22.787	22.787	-	-	Interest rate Spot liability
Liabilitas segera ^{**)}	4.272.276	4.272.276	1.803.172	1.803.172	Current liabilities ^{**)}
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	71.685.860	71.685.860	50.701.126	50.701.126	Demand deposits
Tabungan	39.605.265	39.605.265	42.274.798	42.274.798	Savings deposits
Deposito Berjangka	147.858.608	147.858.608	113.929.768	113.929.768	Time deposits
Simpanan dari Bank Lain					Deposits from other banks
Giro	19.510	19.510	10.068	10.068	Demand deposits
Deposito Berjangka	10.370	10.370	4.499.170	4.499.170	Time deposits
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	935.000	935.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang Diterbitkan	15.810.466	16.328.241	19.783.552	20.154.706	Securities issued
Liabilitas akseptasi	196.071	196.071	487.052	487.052	Acceptance Payable
Pinjaman yang diterima	23.807.138	23.263.313	22.465.657	22.130.449	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	726.914	726.914	630.002	630.002	Interest payables
Liabilitas lain-lain ^{***)}	4.209.719	4.209.719	4.592.582	4.592.582	Other liabilities ^{***)}
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	10.194.432	10.267.678	5.999.669	6.093.868	Subordinated Loan and securities
Total liabilitas keuangan	318.419.416	318.466.612	268.111.616	268.241.761	Total financial liabilities

^{*)} Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

^{**)} Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

^{***)} Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

^{***)} Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;
- (iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

	31 Desember/December 31, 2020				
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	1.538.587	802.163	736.424	-	Securities
Obligasi Pemerintah	19.441.763	19.441.763	-	-	Government bonds
Total nilai wajar laba rugi	20.980.350	20.243.926	736.424	-	Total fair value through profit or loss
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	1.434.984	1.375.899	59.085	-	Securities
Obligasi Pemerintah	33.019.094	33.019.094	-	-	Government bonds
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	34.454.078	34.394.993	59.085	-	Total financial asset held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	235.864	235.864	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	3.940.886	3.940.886	-	-	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	954.955	-	954.955	-	Securities purchased under agreement/Reverse Repo
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	5.131.705	4.176.750	954.955	-	Total Amortized cost
Tagihan Derivatif	70.386	-	70.386	-	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang					Loan and receivables
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Net	246.141.941	-	241.661.484	4.480.457	Loan and sharia financing receivables
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas Derivatif	22.787	-	22.787	-	Derivative payable
Surat berharga yang diterbitkan	16.328.241	-	16.328.241	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	23.263.313	-	23.263.313	-	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	10.267.678	-	10.267.678	-	Subordinated loan and securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

	31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	4.189.398	4.189.398	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	1.232.204	1.232.204	-	-	Government bonds
Total nilai wajar laba rugi	5.421.602	5.421.602	-	-	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	2.615.895	1.943.355	672.540	-	Securities
Obligasi Pemerintah	6.147.729	6.147.729	-	-	Government bonds
Total tersedia untuk dijual	8.763.624	8.091.084	672.540	-	Total available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held-to-maturities
Efek-efek	1.238.051	1.238.051	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	3.752.552	3.752.552	-	-	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.875.221	-	1.875.221	-	Securities purchased under agreement/Reverse Repo
Total dimiliki hingga jatuh tempo	6.865.824	4.990.603	1.875.221	-	Total held-to-maturities
Kredit yang diberikan dan piutang					Loan and receivables
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Net	249.313.328	-	241.492.625	7.820.703	Loan and sharia financing receivables
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Surat berharga yang Diterbitkan	20.154.706	-	20.154.706	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	22.130.449	-	22.130.449	-	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	6.093.868	-	6.093.868	-	Subordinated loan and securities

- a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

b. Kredit yang diberikan

b. Loans

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

c. Securities and Government Bonds

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

The fair values of amortized cost marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi

d. Securities issued, fund borrowings and subordinated loan and securities

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	
(i) Laba tahun berjalan	1.602.358	(a)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)
(iii) Laba per saham dasar	151	(a/b)

	31 Desember/ December 31, 2019	
(i) Laba tahun berjalan	209.263	(a)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)
(iii) Laba per saham dasar	20	(a/b)

50. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of the factors used in calculating the basic earnings per share, for the year ended December 31, 2020 and 2019, are as follows:

Income for the year (i)
Weighted average (ii)
number of shares outstanding
Basic earnings per share (iii)

Income for the year (i)
Weighted average (ii)
number of shares outstanding
Basic earnings per share (iii)

51. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 5 November 2020, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sigma Cipta Caraka sehubungan dengan Pengadaan *Upgrade Core Banking* Syariah dengan nilai kontrak sebesar Rp9.500.

Pada tanggal 24 Februari 2020, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Hanoman Cendikia Interaktif sehubungan dengan Pengadaan *Open Contract* Pengembangan *Middleware* Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.750.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Abhimata Persada sehubungan dengan Pengadaan *Fusion Capital Opics Treasury System Upgrade* dengan nilai kontrak sebesar Rp5.240.

Pada tanggal 23 Desember 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Taruna Bangun Perkasa sehubungan dengan Renovasi Mekanikal Elektrikal Gedung KC Depok dengan nilai kontrak sebesar Rp5.350.

Pada tanggal 11 Desember 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Aleksa Putra Sejati sehubungan dengan Renovasi dan *Relayout* KC Ciputat dengan nilai kontrak sebesar Rp5.340.

Pada tanggal 7 Oktober 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Aleksa Putra Sejati sehubungan dengan Renovasi dan *Relayout* Gedung KC Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp5.250.

51. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On November 5, 2020, Bank signed an agreement with PT Sigma Cipta Caraka in relation to procurement of Syariah Core Banking Upgrade with contract value of Rp9,500.

On February 24, 2020, Bank signed an agreement with PT Hanoman Cendikia Interaktif in relation to procurement of Open Contract Middleware Development in 2020 with contract value of Rp7,750.

On January 24, 2020, Bank signed an agreement with PT Abhimata Persada in relation to procurement of fusion capital opics treasury system upgrade with contract value of Rp5,240.

On September 23, 2019, the Bank signed an agreement with PT Taruna Bangun Perkasa in relation to electrical mechanical renovation of Bank BTN KC Depok with contract value of Rp5,350.

On December 11, 2019, the Bank signed an agreement with PT Aleksa Putra Sejati in relation to renovation and relayout of Bank BTN KC Ciputat with contract value of Rp5,340.

On October 7, 2019, the Bank signed an agreement with PT Aleksa Putra Sejati in relation to renovation and relayout of Bank BTN KC Malang with contract value of Rp5,250.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**51. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 23 September 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Renovasi Gedung Bank BTN KC Jakarta Kuningan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.285.

Pada tanggal 9 Januari 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Renovasi dan *Relayout* Gedung Bank BTN KC Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp5.930.

Pada tanggal 7 Januari 2019, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Emerio Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Implementasi Sistem PSAK 71 selama 175 (seratus tujuh puluh lima hari) dengan masa garansi 10 (sepuluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp8.000.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Jumlah klaim terhadap Bank atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.633 dan Rp7.984. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp7.633 dan Rp7.984. Selain pembentukan cadangan tersebut, Bank juga telah membentuk cadangan atas dugaan pemalsuan bilyet deposito yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan (Catatan 30).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

**51. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Significant Agreements (continued)

On September 23, 2019, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to renovation of Bank BTN KC Jakarta Kuningan with contract value of Rp5,285.

On January 9, 2019, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to renovation and relayout of Bank BTN KC Pekanbaru with contract value of Rp5,930.

On January 7, 2019, the Bank signed an agreement with PT Emerio Indonesia in relation to procurement of system Implementation for SFAS 71 for 175 (one hundred seventy five) days with guaranteed time of 10 (ten) month land with contract value of Rp8,000.

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, the Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank.

The Bank's total potential financial exposure arising from outstanding lawsuits as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp7,633 and Rp7,984, respectively. As of December 31, 2020 and 2019, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp7,633 and Rp7,984. In addition to these allowance provided, the Bank has also provided allowance for an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits which have been reported to the authority and currently it is in the process of investigation (Notes 30).

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**52. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI**

Amandemen dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Bank bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2021:

- a. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 *Business Combinations: Definition of Business* merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *US Financial Accounting Standards Board* (FASB). Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.
- b. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2". Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.
- c. PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. PSAK ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi wakaf dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi.

**52. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

The amendments and new Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below.

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective. Effective after January 1, 2021:

- a. SFAS No. 22 (Amendment 2019), "Business Combinations on the Definition of Business", These Amendments are adopted from the IFRS 3 Amendments *Business Combinations: The definition of business* is the result of a *joint project* between the *International Accounting Standards Board* (IASB) and the *US Financial Accounting Standards Board* (FASB). This amendment clarifies the definition of a business with the aim of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition.
- b. Amendments of SFAS No. 71, "Financial Instruments, Amendments of PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendments of PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, Amendments of PSAK No. 62: Insurance Contracts and Amendments to PSAK No. 73: Leases on Interest Rate Reference Reform - Stage 2 ". This amendment describes *Interest Rate Reference Reform - Phase 2* adopted from IFRS concerning *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.
- c. SFAS No. 112, "Accounting for Waqf", effective January 1, 2021, and earlier application is permitted. This SFAS describes the accounting treatment of waqf from corporate donors to individual and corporate recipients.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**52. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI (lanjutan)**

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2022:

- a. Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- b. Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 per sen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2023:

- a. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

- a. PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

**52. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
(continued)**

Effective after January 1, 2022:

- a. Amendments to PSAK No. 22, "Business Combinations on Reference to Conceptual Frameworks". This amendment clarifies the interaction between PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting
- b. Amendments to PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract-fulfillment Costs". This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is an burdensome contract.
- c. 2020 Annual Adjustment - PSAK No. 71, "Financial Instruments - Fee under test" 10 per cent "for derecognition of a financial liability". The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

Effective after January 1, 2023:

- a. Amendments to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements regarding the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term", effective January 1, 2021, and earlier application is permitted. The amendments specify the requirements for classifying a liability as current or non-current.

Effective after January 1, 2025:

- a. PSAK No. 74, "Insurance Contract", adopted from IFRS 17, effective January 1, 2025, with earlier application permitted for entities that have also applied PSAK 71 and PSAK 72.

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Arus Kas/Cash Flow				31 Desember / December 31, 2020	
	31 Desember/ December 31, 2019	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes		
Surat Berharga yang Diterbitkan	19.783.552	1.493.811	(5.322.500)	(144.397)	15.810.466	Securities Issued
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	935.000	-	(935.000)	-	-	Securities Sold Under Repurchase Agreements
Pinjaman yang Diterima	22.465.657	9.141.448	(7.823.008)	23.041	23.807.138	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	5.999.669	4.047.884	-	146.879	10.194.432	Subordinated Loans And Securities
Total	49.183.878	14.683.143	(14.080.508)	25.523	49.812.036	Total

53. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	Arus Kas/Cash Flow				31 Desember / December 31, 2019	
	31 Desember/ December 31, 2018	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes		
Surat Berharga yang Diterbitkan	20.644.760	4.144.000	(5.122.930)	117.722	19.783.552	Securities Issued
Pinjaman yang Diterima	15.499.493	11.001.654	(4.020.720)	(14.770)	22.465.657	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi	2.999.519	2.999.950	-	200	5.999.669	Subordinated Loan
Total	39.143.772	18.145.604	(9.143.650)	103.152	48.248.878	Total

54. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 "INSTRUMEN KEUANGAN" ("PSAK 71") DAN PSAK 73 "SEWA" ("PSAK 73")

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

54. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 "FINANCIAL INSTRUMENT" ("SFAS 71") AND SFAS 73 "LEASES" ("SFAS 73")

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to SFAS 55 and SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS 71 on January 1, 2020.

Catatan/Notes	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under SFAS 55 31 Desember 2019/ December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under SFAS 71 1 Januari 2020/ January 1, 2020	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under SFAS 55 31 Desember 2019/ December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under SFAS 71 1 Januari 2020/ January 1, 2020
Aset Keuangan/ Financial Asset				
Kas/ Cash	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	1.369.167	1.369.167
Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	15.512.329	15.512.329
Giro pada bank lain/ Current account with Others Bank	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	747.869	747.869
Efek-efek - neto/ Securities - net	Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Nilai wajar melalui laba rugi / Fair value through profit or loss	4.189.398	4.189.398

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

54. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 “INSTRUMEN KEUANGAN” (“PSAK 71”) DAN PSAK 73 “SEWA” (“PSAK 73”) (lanjutan)

54. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 “FINANCIAL INSTRUMENT” (“SFAS 71”) AND SFAS 73 “LEASES” (“SFAS 73”) (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020. (lanjutan)

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to SFAS 55 and SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS 71 on January 1, 2020. (continued)

Catatan/Notes	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under SFAS 55 31 Desember 2019/ December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under SFAS 71 1 Januari 2020/ January 1, 2020	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under SFAS 55 31 Desember 2019/ December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under SFAS 71 1 Januari 2020/ January 1, 2020
<u>Aset Keuangan (lanjutan)/</u> <u>Financial Asset (continue)</u>				
Efek-efek - neto/ Securities - net	Tersedia untuk dijual/ Available for Sale	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	2.603.969	2.031.435
		Nilai wajar melalui Laba rugi/ Fair value through profit or loss	-	593.065
Efek-efek - neto/ Securities - net	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo/ Held to Maturity	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	1.291.304	1.130.641
		Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	-	117.592
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds	Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	1.232.204	1.232.204
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds	Tersedia untuk dijual/ Available for Sale	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	6.147.729	6.147.729
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo/ Held to Maturity	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	3.673.668	3.673.668
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto/ Securities Purchased Under Agreement to Resell - net	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	1.875.221	1.875.221
Tagihan akseptasi - neto/ Acceptance Receivable - net	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	487.052	487.052
Kredit yang diberikan - neto/ Loans - net	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	249.708.993	249.708.993
Bunga yang masih akan diterima/ Interest Receivable	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	3.210.772	3.210.772
Aset Lain-lain ^(*) / Other Assets ^(*)	Kredit dan Piutang/ Loans and Receivable	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	920.408	920.408
<u>Liabilitas Keuangan/</u> <u>Financial Liability</u>				
Liabilitas segera ^(**) / Current liabilities ^(**)	Liabilitas Keuangan dengan Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	1.803.172	1.803.172

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

54. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 “INSTRUMEN KEUANGAN” (“PSAK 71”) DAN PSAK 73 “SEWA” (“PSAK 73”) (lanjutan)

54. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 “FINANCIAL INSTRUMENT” (“SFAS 71”) AND SFAS 73 “LEASES” (“SFAS 73”) (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020. (lanjutan)

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to SFAS 55 and SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS 71 on January 1, 2020. (continued)

Catatan/Notes	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under SFAS 55 31 Desember 2019/ December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under SFAS 71 1 Januari 2020/ January 1, 2020	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under SFAS 55 31 Desember 2019/ December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under SFAS 71 1 Januari 2020/ January 1, 2020
<u>Liabilitas Keuangan/ Financial Liability</u>				
Simpanan nasabah/ Deposits from Customer				
Giro dan giro wadiah/ Demand Deposits and Wadiah Demand Deposit	Liabilitas Keuangan dengan Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	50.701.126	50.701.126
Tabungan dan Tabungan wadiah/ Saving Deposits and Wadiah Saving Deposit	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	42.274.798	42.274.798
Deposito Berjangka/ Time Deposit	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	113.929.768	113.929.768
Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	4.509.238	4.509.238
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ Securities sold under Repurchased agreements	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	935.000	935.000
Bunga yang masih harus dibayar/ Interest Payable	Liabilitas Keuangan dengan Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	630.002	630.002
Pinjaman Subordinasi Dan efek-efek Subordinasi/ Subordinated Loan and Securities	Liabilitas Keuangan dengan Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	5.999.669	5.999.669
Surat berharga yang Diterbitkan/ Securities Issued	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Liabilitas Keuangan dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	19.783.552	19.783.552
Liabilitas akseptasi/ Acceptance Payable	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	487.052	487.052
Pinjaman yang diterima/ Fund Borrowings	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	22.465.657	22.465.657
Liabilitas lain-lain/ Other Liabilities	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortised Cost	4.592.582	4.592.582

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

54. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 "INSTRUMEN KEUANGAN" ("PSAK 71") DAN PSAK 73 "SEWA" ("PSAK 73") (lanjutan)

54. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 "FINANCIAL INSTRUMENT" ("SFAS 71") AND SFAS 73 "LEASES" ("SFAS 73") (continued)

Berikut ini menggambarkan dampak atas penerapan PSAK 71 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

The following table shows the impact of implementation of SFAS 71 of the statement of financial on January 1, 2020:

	Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71/ Balance before SFAS 71	Klasifikasi dan Pengukuran/ Classification and measurement	Kerugian Kredit Ekspektasian/ Expected Credit Loss	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71/ Balance after SFAS 71	
Aset					Asset
Kas	1.369.167	-	-	1.369.167	Cash
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	-	-	15.512.329	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	747.869	-	(37)	747.832	Current account with Others Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	11.097.193	-	-	11.097.193	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - neto	8.084.671	(22.540)	25.377	8.087.508	Securities
Obligasi pemerintah	11.053.601	-	-	11.053.601	Securities Purchased
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.875.221	-	(9.318)	1.865.903	Under Agreement To Resell
Tagihan akseptasi - neto	487.052	-	(1.346)	485.706	Acceptance Receivable
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	Spot and Derivative Receivable
Penyertaan saham - neto	-	-	-	-	Investment in Shares
Kredit yang diberikan - neto	249.708.993	-	(7.612.677)	242.096.316	Loans and sharia financing - net
Aset tetap - neto	5.400.658	-	-	5.400.658	Fixed Asset - net
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	-	-	3.210.772	Interest receivable
Aset lain-lain	2.600.197	-	-	2.600.197	Other assets
Aset pajak tangguhan - neto	629.105	-	1.524.652	2.153.757	Deferred Tax Asset
Total Aset	311.776.828	(22.540)	(6.073.349)	305.680.939	Total Asset
Liabilitas					Liability
Liabilitas segera	1.999.183	-	-	1.999.183	Current liabilities
Simpanan nasabah	206.905.692	-	-	206.905.692	Deposits From Customer
Simpanan dari bank lain	4.509.238	-	-	4.509.238	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	-	-	935.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	19.783.552	-	-	19.783.552	Securities issued
Liabilitas akseptasi	487.052	-	-	487.052	Acceptance Payable
Pinjaman yang diterima	22.465.657	-	-	22.465.657	Fund Borrowings
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	-	-	2.705	2.705	Commitments and contingencies
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	-	-	630.002	Interest payables
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	5.736.637	-	-	5.736.637	Employee benefits and Other Liabilities
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	5.999.669	-	-	5.999.669	Subordinated Loan and securities
Total Liabilitas	269.451.682	-	2.705	269.454.387	Total Liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham	5.295.000	-	-	5.295.000	Share Capital
Tambahan modal disetor	2.054.454	-	-	2.054.454	Additional paid in Capital
Keuntungan/(kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	11.460	-	112	11.572	Net unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and Government bond, net of deferred tax securities and Government
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - Setelah pajak tangguhan	(194.707)	-	-	(194.707)	Remasurment of defined benefit plan - net of deferred tax
Bagian efektif lindung nilai - Arus kas	-	-	-	-	Effective part of Hedging - Cash Flow
Surplus revaluasi aset tetap	3.307.991	-	-	3.307.991	Revaluation Surplus of Fixed Asset
Saldo laba	-	-	-	-	Retained Earnings
Telah ditentukan penggunaannya	12.995.995	(22.540)	(6.076.166)	6.897.289	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	366.002	-	-	366.002	Unappropriated
Total Ekuitas	23.836.195	(22.540)	(6.076.054)	17.737.601	Total Equity

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

54. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 “INSTRUMEN KEUANGAN” (“PSAK 71”) DAN PSAK 73 “SEWA” (“PSAK 73”) (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi nilai cadangan kerugian aset keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 57 pada tanggal 31 Desember 2019 dan nilai cadangan kerugian aset keuangan menurut PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

54. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 “FINANCIAL INSTRUMENT” (“SFAS 71”) AND SFAS 73 “LEASES” (“SFAS 73”) (continued)

The table below shows the reconciliation of reserve for losses of financial assets according to SFAS 55 and SFAS 57 as of 31 December 2019 and the value of reserves for losses of financial assets according to SFAS 71 on January 1, 2020.

1 Januari 2020/January 1, 2020								
	Cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55/ Allowance for impairment losses based on SFAS 55			Kerugian penurunan nilai ekspektasian menurut PSAK 71/ Expected credit losses based on SFAS 71				Kenaikan/ (penurunan) Additional/ (Reversal)
	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif/ Allowance for collective impairment losses	Cadangan kerugian penurunan nilai individual/ Allowance for individual impairment losses	Total	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Giro pada bank lain/ Current account with Other banks	-	1.625	1.625	37	-	1.625	1.662	37
Efek-efek/ Securities	-	25.378	25.378	1	-	-	1	(25.377)
Tagihan akseptasi/ Acceptance Receivable	-	-	-	1.346	-	-	1.346	1.346
Efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali/Securities purchased under agreement to resell	-	-	-	9.318	-	-	9.318	9.318
Kredit yang diberikan dan piutang Pembiayaan Syariah/ Loans and sharia Financing/receivables	1.447.436	3.978.472	5.425.908	1.389.877	1.172.350	10.476.358	13.038.585	7.612.677
Komitmen dan kontijensi/ Commitments and contingencies	-	-	-	1.576	1.129	-	2.705	2.705
Total	1.447.436	4.005.475	5.452.911	1.402.155	1.173.479	10.477.983	13.053.617	7.600.706

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada saat tanggal 1 Januari 2020:

SFAS 73

The following table summarises effect of implementation SFAS 73 as of January 1, 2020:

1 Januari/January 2020				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Penyesuaian PSAK 73/ SFAS 73 Adjustment	Setelah penyesuaian/ After Adjustment		
LAPORAN POSISI KEUANGAN				ASSET
ASET				ASSET
Beban dibayar dimuka	803.479	(266.054)	539.265	Prepaid expenses
Aset tetap - Aset hak guna - setelah akumulasi penyusutan	-	465.251	465.251	Fixed assets - Right of use - assets after accumulated depreciation
Pajak Tangguhan	-	19.895	-	Deferred Tax
LIABILITAS & EKUITAS				LIABILITIES & EQUITY
Liabilitas lain-lain	5.736.637	300.520	6.037.157	Other liabilities
Saldo Laba	-	(81.428)	-	Retained Earnings

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

55. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 3,56% dan 4,42%.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK 71 dan PSAK No. 55 (Revisi 2014) terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar 146,82% dan 100,84%.

56. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

55. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2020 and 2019, the Bank's *non-performing assets to total earning assets (non-performing ratio)* are 3.56% and 4.42%, respectively.
- b. As of December 31, 2020 and 2019, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS 71 and SFAS No. 55 (Revised 2014) to minimum allowance for impairment losses based on Financial Service Authority regulation is 146.82% and 100.84%, respectively.

56. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying Financial Statements which were completed and authorized for issuance on February 10, 2021.



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130

Tel. 62-21 6336789, 6332666

Fax. 62-21 6346704

E-mail : csd@btn.co.id

Contact Center: 1500 286

LAPORAN TAHUNAN 2020

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.